



RKPD 2024

*Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barru
Tahun 2024*





BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
37. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program

Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan maksud yakni:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - b. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;.
- (2) RKPD Tahun 2024 bertujuan:
 - a. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
 - b. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
 - c. menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
 - d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - e. mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barru.

Pasal 4

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (6) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2024, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 8 (delapan) bab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III, tidak memproyeksikan alokasi transfer alokasi dana khusus sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD Tahun 2024 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada perubahan RKPD Tahun 2024.
- (5) Sasaran dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif terdapat pada Bab V.

Pasal 7

Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan acuan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja setiap program dan kegiatan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 9

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 10

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERATURAN BUPATI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR GRAFIK	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-12
1.4 Maksud dan Tujuan	I-14
1.5 Sistematika Penulisan	I-15
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-13
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-26
2.1.1.4 Kondisi Demografi	II-36
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-40
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan	
Ekonomi	II-40
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial	II-62
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-79
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-79
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non	
Pelayanan Dasar	II-133
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-210
2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan	II-217
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-234
2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-234
2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi	II-237
2.1.4.3 Produktivitas Total Daerah	II-240
2.1.5. Capaian Indikator Pembangunan Daerah	II-240
2.1.5.1 Capaian Indikator Makro	
Pembangunan Kabupaten Barru	II-240
2.1.5.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Pemerintah Kabupaten Barru	II-240

2.1.5.3	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022	II-242
2.1.5.4	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)	II-261
2.1.5.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistenable Development Goals (TPB/SDGs)	II-264
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-269
2.2.1	Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022 ...	II-269
2.2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD	II-287
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah	III-1
3.1.1.1	Prospek Perekonomi Daerah	III-1
3.1.1.2	Tantangan Perekonomi Daerah	III-3
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-18
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan	III-36
3.1.4	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru	III-37
3.2	Gambaran Kondisi Ekonomi	III-38
3.2.1	Kondisi Ekonomi Makro Nasional	III-38
3.2.2	Kondisi Ekonomi Makro Sulawesi Selatan	III-56
3.2.2	Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Barru	III-60
3.3	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-79
3.3.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-80
3.3.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-86
3.3.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-137
3.4	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-138
3.5	Pendanaan Pembangunan Lainnya	III-140
3.5.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	III-140
3.5.2	<i>Corporate Szocial Resonsibility</i> (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	III-141

3.5.3	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	III-142
3.5.6	Pembiayaan Utang Daerah	III-143
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....		IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-9
4.2.1	Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-9
4.2.1.1	Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-10
4.2.1.2	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-11
4.2.1.3	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-12
4.2.1.4	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-12
4.2.2	Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-13
4.2.2.1	Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-13
4.2.2.2	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-14
4.2.2.3	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-16
4.2.2.4	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-17
4.2.3	Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024	IV-21
4.2.3.1	Tema Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024	IV-21
4.2.3.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024	IV-22
4.2.3.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024	IV-24
4.2.3.4	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024	IV-25

4.3	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional	IV-41
4.3.1	Sustainable Development Goals /SDGs	IV-103
4.3.2	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-105
4.3.3	Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Barru	IV-107
BABV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	Kerangka Pendanaan Tahun 2024	V-1
5.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	V-2
BAB VI.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1	Indikator Makro Pembangunan	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-2
6.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	VI-3
6.4	Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)	VI-20
6.5	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-22
BAB VII.	PENUTUP	VII-1
7.1	Kaidah Pelaksanaan	VII-1
7.2	Kesimpulan	VII-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas wilayah administrative kecamatan dan kelurahan/ desa Kabupaten Barru	II-2
Tabel 2.2	Keadaan wilayah berdasarkan ketinggian di atas Permukaan laut	II-3
Table 2.3	Keadaan wilayah berdasarkan kemiringan	II-4
Tabel 2.4	Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan	II-8
Tabel 2.5	Jenis Tanah Kabupaten Barru	II-9
Tabel 2.6	Sungai mengalir menurut Daerah Aliran Kabupaten Barru	II-9
Tabel 2.7	Ketersediaan dan Kebutuhan air Kabupaten Barru	II-10
Tabel 2.8	Status daya dukung air di Kabupaten Barru	II-12
Tabel 2.9	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Kabupaten Barru	II-12
Tabel 2.10	Jumlah Hari Hujan Dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru	II-12
Tabel 2.11	Luas Arahkan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru	II-13
Tabel 2.12	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Barru	II-15
Tabel 2.13	Kejadian Bencana menurut Kecamatan di Kabupaten Barru	II-28
Tabel 2.14	Jumlah Kerusakan Rumah yang diakibatkan oleh Bencana Alam menurut Kecamatan di Kab. Barru	II-29
Tabel 2.15	Lokasi potensi kawasan relokasi bencana Kab. Barru ..	II-30
Tabel 2.16	Distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir	II-31
Tabel 2.17	Distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor	II-33
Tabel 2.18	Distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran	II-36
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Menurut kecamatan	II-36
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa)	II-37
Tabel 2.21	Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Barru	II-38
Tabel 2.22	Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru	II-38
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru	II-39

Tabel 2.24	Rasio ketergantungan Kabupaten Barru	II-40
Tabel 2.25	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022	II-41
Tabel 2.26	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru	II-42
Tabel 2.27	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru	II-43
Tabel 2.28	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru	II-44
Tabel 2.29	Perbandingan PDRB atas harga konstan (ADHK) Dan harga berlaku (ADHB) menurut lapangan Usaha Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar	II-45
Tabel 2.30	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru	II-47
Tabel 2.31	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-48
Tabel 2.32	Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2022	II-50
Tabel 2.33	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2018 – 2022	II-52
Tabel 2.34	Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022	II-54
Tabel 2.35	Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk Analisis Skalogram	II-55
Tabel 2.36	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru Tahun 2018-2022	II-58
Tabel 2.37	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2018-2022..	II-60
Tabel 2.38	Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru Tahun 2020-2022	II-62
Tabel 2.39	Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-65

Tabel 2.40	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022	II-66
Tabel 2.41	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022	II-68
Tabel 2.42	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022	II-69
Tabel 2.43	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2018-2022 (dalam Ribu/Orang/Tahun)	II-70
Tabel 2.44	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-71
Tabel 2.45	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2018-2022	II-72
Tabel 2.46	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2018-2022	II-73
Tabel 2.47	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-75
Tabel 2.48	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barru Tahun 2021-2022	II-76
Tabel 2.49	Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021-2022	II-78
Tabel 2.50	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2022	II-79
Tabel 2.51	Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-79
Tabel 2.52	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-80
Tabel 2.53	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-81

Tabel 2.54	Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-82
Tabel 2.55	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-83
Tabel 2.56	Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-84
Tabel 2.57	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs di Kab.Barru 2018-2022	II-85
Tabel 2.58	Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.	II-86
Tabel 2.59	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-87
Tabel 2.60	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-88
Tabel 2.61	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-89
Tabel 2.62	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-89
Tabel 2.63	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-90
Tabel 2.64	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kab.Barru Tahun 2018-2022	II-91
Tabel 2.65	Angka Kematian Balita (AKBa)/1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2018-2022	II-92
Tabel 2.66	Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2018-2022	II-93
Tabel 2.67	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-94
Tabel 2.68	Rasio Posyandu Persatuan Balita Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2.69	Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-95
Tabel 2.70	Rasio rumah sakit/1.000 jumlah penduduk Tahun 2018-2022	II-96

Tabel 2.72	Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-97
Tabel 2.72	Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-98
Tabel 2.73	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-99
Tabel 2.74	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2018-2022	II-99
Tabel 2.75	Cakupan Desa Keluran UCI Kab. Barru Tahun 2018-2022	II-100
Tabel 2.76	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-101
Tabel 2.77	Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-101
Tabel 2.78	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-102
Tabel 2.79	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2.80	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru	II-103
Tabel 2.81	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2018-2022	II-104
Tabel 2.82	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-105
Tabel 2.83	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk) Tahun 2018-2022	II-105
Tabel 2.84	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-106
Tabel 2.85	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2018-2022 ...	II-107
Tabel 2.86	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2017 – 2021	II-107
Tabel 2.87	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2018-2022	II-108
Tabel 2.88	Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-108

Tabel 2.89	Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-109
Tabel 2.90	Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2018-2022 ...	II-110
Tabel 2.91	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022 ...	II-110
Tabel 2.92	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Tahun 2018-2022	II-111
Tabel 2.93	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-111
Tabel 2.94	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-112
Tabel 2.95	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-113
Tabel 2.96	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-113
Tabel 2.97	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2018-2022	II-114
Tabel 2.98	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-114
Tabel 2.99	Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-115
Tabel 2.100	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2018-2022	II-116
Tabel 2.101	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kab.Barru Tahun 2018-2022	II-117
Tabel 2.102	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-117
Tabel 2.103	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2018-2022	II-118
Tabel 2.104	Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-119
Tabel 2.105	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-119
Tabel 2.106	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-120

Tabel 2.107	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-121
Tabel 2.108	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-121
Tabel 2.109	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-122
Tabel 2.110	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022	II-123
Tabel 2.111	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-124
Tabel 2.112	Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-125
Tabel 2.113	Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-125
Tabel 2.114	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kab.Barru Tahun 2020-2022	II-126
Tabel 2.115	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022	II-127
Tabel 2.116	Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-127
Tabel 2.117	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru Tahun 2018-2022	II-128
Tabel 2.118	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-129
Tabel 2.119	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-130
Tabel 2.120	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-131
Tabel 2.121	Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-131
Tabel 2.122	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-132
Tabel 2.123	Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-133

Tabel 2.124	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-134
Tabel 2.125	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-135
Tabel 2.126	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-135
Tabel 2.127	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-136
Tabel 2.128	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-137
Tabel 2.129	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-137
Tabel 2.130	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-138
Tabel 2.131	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-139
Tabel 2.132	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-140
Tabel 2.133	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-141
Tabel 2.134	Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-142
Tabel 2.135	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru Tahun 2022	II-142
Tabel 2.136	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-143
Tabel 2.137	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-144

Tabel 2.138	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-144
Tabel 2.139	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-145
Tabel 2.140	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-145
Tabel 2.141	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-146
Tabel 2.142	Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-147
Tabel 2.143	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru Tahun 2022	II-148
Tabel 2.144	Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-148
Tabel 2.145	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-149
Tabel 2.146	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-150
Tabel 2.147	Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-152
Tabel 2.148	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat PengawasLingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-153
Tabel 2.149	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Lidup Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-154
Tabel 2.150	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-154

Tabel 2.151	Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-155
Tabel 2.152	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-155
Tabel 2.153	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-156
Tabel 2.154	Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota Kabupaten Barru Tahun 2022	II-156
Tabel 2.155	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-157
Tabel 2.156	Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-157
Tabel 2.157	Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru Tahun 2020-2022	II-158
Tabel 2.158	Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2021	II-158
Tabel 2.159	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-159
Tabel 2.160	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-160
Tabel 2.161	Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-161
Tabel 2.162	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-162
Tabel 2.163	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-162
Tabel 2.164	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-163
Tabel 2.165	Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-164
Tabel 2.166	Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-164
Tabel 2.167	Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-165

Tabel 2.168	Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-165
Tabel 2.169	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-166
Tabel 2.170	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-167
Tabel 2.171	Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2022	II-168
Tabel 2.172	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-168
Tabel 2.173	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-169
Tabel 2.174	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru Tahun 2022	II-169
Tabel 2.175	Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2018-2022	II-170
Tabel 2.176	Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-170
Tabel 2.177	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-171
Tabel 2.178	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-172
Tabel 2.179	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (unmet need) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-173
Tabel 2.180	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-173
Tabel 2.181	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-174
Tabel 2.182	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-175
Tabel 2.183	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-176
Tabel 2.184	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-176

Tabel 2.185	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-177
Tabel 2.186	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-178
Tabel 2.187	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat DaerahKabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-179
Tabel 2.188	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-180
Tabel 2.189	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-180
Tabel 2.190	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-181
Tabel 2.191	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-182
Tabel 2.192	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-183
Tabel 2.193	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-184
Tabel 2.194	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-184
Tabel 2.195	Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru Tahun 2022	II-185
Tabel 2.196	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2018-2022...	II-186
Tabel 2.197	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-186
Tabel 2.198	Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-187
Tabel 2.199	Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-188
Tabel 2.200	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Tahun 2018-2022	II-188

Tabel 2.201	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-189
Tabel 2.202	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-190
Tabel 2.203	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-191
Tabel 2.204	Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-191
Tabel 2.205	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-192
Tabel 2.206	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-193
Tabel 2.207	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-194
Tabel 2.208	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2022	II-195
Tabel 2.209	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-195
Tabel 2.210	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-196
Tabel 2.211	Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-197
Tabel 2.212	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-198
Tabel 2.213	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-198
Tabel 2.214	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-199
Tabel 2.215	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-199
Tabel 2.216	Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-200
Tabel 2.217	Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru" Tahun 2018-2022.....	II-201
Tabel 2.218	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-201

Tabel 2.219	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-202
Tabel 2.220	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-203
Tabel 2.221	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-204
Tabel 2.222	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-204
Tabel 2.223	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-205
Tabel 2.224	Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-206
Tabel 2.225	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-207
Tabel 2.226	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru Tahun 2022	II-207
Tabel 2.227	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-208
Tabel 2.228	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-209
Tabel 2.229	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-209
Tabel 2.230	Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.	II-210
Tabel 2.231	PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-210
Tabel 2.232	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-211
Tabel 2.233	Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-212
Tabel 2.234	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-213
Tabel 2.235	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2018-2022	II-213
Tabel 2.236	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-214
Tabel 2.237	Produksi Perikanan Kabupaten Barru	

	Tahun 2018-2022	II-214
Tabel 2.238	Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-215
Tabel 2.239	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-216
Tabel 2.240	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-216
Tabel 2.241	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-217
Tabel 2.242	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-218
Tabel 2.243	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-218
Tabel 2.244	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-219
Tabel 2.245	Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2018-2022...	II-220
Tabel 2.246	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-220
Tabel 2.247	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-221
Tabel 2.248	Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Barru Tahun 2018-2022 .	II-222
Tabel 2.249	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-222
Tabel 2.250	Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2018-2022...	II-223
Tabel 2.251	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-224
Tabel 2.252	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-224
Tabel 2.253	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-225
Tabel 2.254	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-226
Tabel 2.255	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-227
Tabel 2.256	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-228

Tabel 2.257	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-229
Tabel 2.258	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-229
Tabel 2.259	Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022	II-230
Tabel 2.260	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-232
Tabel 2.261	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-232
Tabel 2.262	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-233
Tabel 2.263	Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-234
Tabel 2.264	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-234
Tabel 2.265	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-235
Tabel 2.266	Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2022	II-236
Tabel 2.267	Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten Barru Tahun 2018-2022.....	II-236
Tabel 2.268	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Barru	II-237
Tabel 2.269	Lama Proses Perizinan Kabupaten Barru Tahun 2022...	II-237
Tabel 2.270	Jumlah dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022	II-238
Tabel 2.271	Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Barru Tahun 2022	II-239
Tabel 2.272	Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa Kabupaten Barru 2022	II-239
Tabel 2.273	Angka Kriminalitas yang TertanganiKabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-240
Tabel 2.274	Produktifitas Total Daerah Tahun 2018-2022.....	II-240
Tabel 2.275	Capaian Indikator Makro Kabupaten Barru.....	II-241

Tabel 2.276	Capaian Indikator Kinerja Utama 2022 Pemerintah Kabupaten Barru	II-241
Tabel 2.277	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022.....	II-243
Tabel 2.279	Capain Indikator SPM Kabupaten Barru 2018-2022.....	II-262
Tabel 2.280	Rekapitulasi Capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2019 s/d 2022 Berdasarkan Tujuan	II-265
Tabel 2.281	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD	II-270
Tabel 2.282	Konsistensi Kegiatan RKPD dalam APBD	II-276
Tabel 2.283	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dalam APBD	II-282
Tabel 2.284	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Barru	II-240
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barrun Tahun 2018 – 2022	III-61
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barrun Tahun 2018 – 2022	III-62
Tabel 3.3	Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru	III-64
Tabel 3.4	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Barru 2018-2022	III-66
Tabel 3.5	Distribusi Persentasdi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	III-67
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	III-67
Tabel 3.7	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	III-69
Tabel 3.8	Perkembangan Produk Domestik Regional Kab. Barru Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018-2022	III-70
Tabel 3.9	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kab. Barru Tahun 2018-2022	III-76
Tabel 3.10	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Barru Tahun 2018 s.d 2022	III-77

Tabel 3.11	Perkembangan IPM Kab. Barru Tahun 2018-2022	III-78
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2025	III-85
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2023 Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025	III-127
Tabel 3.14	Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar (SPM) Tahun 2021 – 2025	III-129
Tabel 3.15	Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	III-129
Tabel 3.15	Pagu Perangkat Daerah	III-129
Tabel 3.16	Proyeksi Pagu Anggaran Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs Tahun 2024	III-131
Tabel 3.17	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Barru Tahun 2020 - 2024	III-138
Tabel 3.18	Total Belanja Wajib Mengikat Tazhun 2024	III-139
Tabel 3.19	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal	III-139
Tabel 3.20	Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah	III-140
Tabel 3.21	Mitra Coporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang Mendukung Pembangunan Daerah di Kabupaten Barru.....	III-141
Tabel 4.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026	IV-2
Tabel 4.2	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupten Barru Tahun 2021 - 2026	IV-3
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan Sasarazn Pembangunan Kabupaten Barru dan Target Kinerja Tahun 2024	IV-6
Tabel 4.4	Sasaran Pembangunan Provinsi Szulawesi Selatan Tahun 2024	IV-15
Tabel 4.5	Prioritas dan Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-18
Tabel 4.6	Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024	IV-22

Tabel 4.7	Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024	IV-23
Tabel 4.8	Prioritas, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan program Prioritas Kabupaten Barru Tahun 2024	IV-26
Tabel 4.9	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Barru Tahun 2024	IV-40
Tabel 4.10	Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-41
Tabel 4.11	Dukungan Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Daerah Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024	IV-44
Tabel 4.12	Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Nasional Tahun 2024	IV-50
Tabel 4.13	Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru terhadap Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	IV-82
Tabel 4.14	Perbandingan Capaian 2022, Perkiraan tahun 2023 dan Target 2024 terkait Indikator Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten	IV-102
Tabel 4.15	Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan....	IV-103
Tabel 4.16	Prioritas Pembangunan yang mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal(SPM)...	IV-106
Tabel 5.1	Proyeksi Rencana Belanja Daerah Tahun 2024-2025 Kabupaten Barru	V-1
Tabel 5.2	Prioritas Pembangunan Daerah	V-3
Tabel 5.3	Rencana Rincian Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	V-8

Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2024	VI-1
Tabel 6.2	Capaian Indikator Kinerja Utama 2022,Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Utama Kabupaten Barru Tahun 2024	VI-2
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Asumsi CapaianKinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Barru	VI-4
Tabel 6.4	Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Barru 2024	VI-21
Tabel 6.5	Penetapan IndikatorTujuan PembangunanBerkelanjutan (TPB) / <i>Sustainable Development Goal</i> (SDG) Kabupaten Barru Tahun 2024	VI-23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 I-5

Gambar 1.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Lainnya I-13

Gambar 1.3 Hubungan azntar Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran I-14

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Barru II-1

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Barru II-4

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru II-5

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Barru II-6

Gambar 2.5 Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru II-7

Gambar 2.6 Peta status daya dukung penyediaan air Kab. Barru .. II-11

Gambar 2.7 Peta pengembangan kawasan strategis Kab. Barru II-20

Gambar 2.8 Dokumentasi kejadian bencana alam di Kab. Barru ... II-30

Gambar 2.9 Peta kinerja ekosistem pengaturan pencegahan dan
perlindungan bencana banjir Kabupaten Barru..... II-32

Gambar 2.10 Peta kinerja ekosistem pengaturan pencegahan dan
perlindungan bencana longsor Kabupaten Barru II-34

Gambar 2.11 Peta kinerja ekosistem pengaturan pencegahan dan
perlindungan bencana kebakaran Kab. Barru II-35

Gambar 2.12 Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2021 II-56

Gambar 3.1 Dampak Covid 19terhadap Sektor – sector Ekonomi... III-3

Gambar 3.2 Dampak Covid 19terhadap Permintaan &Penawaran III-4

Gambar 4.1 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 IV-11

Gambar 4.2 Sasaran dan Indikator RKP Tahun 2024 IV-12

Gambar 4.3 Prioritas Pembangunan Nasional 2024 IV-13

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022	II-46
Grafik	2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru Dengan Wilayah Sekitar Tahun 2018 – 2022	II-47
Grafik	2.3	Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2020 s.d Tahun 2022 (dlm Juta Rupiah)	II-49
Grafik	2.4	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2018 – 2022	II-51
Grafik	2.5	Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru Tahun 2018 – 2022	II-52
Grafik	2.6	Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 – 2022	II-53
Grafik	2.7	Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-59
Grafik	2.8	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022	II-60
Grafik	2.9	Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 – 2022	II-61
Grafik	2.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru Tahun 2018-2022	II-62
Grafik	2.11	Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022	II-63
Grafik	2.12	Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018-2022	II-63
Grafik	2.13	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2018-2022	II-66

Grafik	2.14	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022	II-67
Grafik	2.15	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022	II-68
Grafik	2.16	Perbandingan Angka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas Kab.Barru Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2018-2022	II-69
Grafik	2.17	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022 (dlm Ribu/Orang/Tahun)	II-70
Grafik	2.18	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018-2022	II-72
Grafik	2.19	Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kab. Barru dengan capaian provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2018 – 2022	II-73
Grafik	2.20	Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 - 2022	II-74
Grafik	3.1	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan target 2024	III-11
Grafik	3.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan target 2024	III-12
Grafik	3.3	Inflasi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan Target 2024	III-14
Grafik	3.4	Inflasi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan target 2024	III-15
Grafik	3.5	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Perkiraan Capaian	

		2023 dan target 2024	III-16
Grafik	3.6	Ratio Gini Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Perkiraan Capaian 2023 dan target 2024	III-18
Grafik	3.7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Kabupaten Barru 2018 - 2022	III-61
Grafik	3.8	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Kabupaten Barru 2018 - 2022	III-63
Grafik	3.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru 2018 - 2022	III-63
Grafik	3.10	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru 2018 – 2022	III-65
Grafik	3.11	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Barru 2018 - 2022	III-66

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, pertahanan dan keamanan serta politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka harus mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam. System perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pemberdayaan perempuan, anak dan disabilitas;
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024 akan fokus pada pencapaian target akhir Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang Dalam RPJMD dengan focus pada pemantapan kesejahteraan melalui pembangunan manusia yang produktif dan berkarakter sesuai yang tertuang pada arah kebijakan Tahun 2024 pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 - 2026. Selain itu, Sebagai gambaran awal untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Barru Tahun 2022 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 5,11%, Tingkat Kemiskinan 8,4%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,32%, Gini Rasio 0,36, Indeks Pembangunan Manusia 71,53 dan PDRB Perkapita (ADHB) 47,50 Juta/Rp. Selain memperhatikan capaian indicator ekonomi makro, Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD.

Dokumen ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

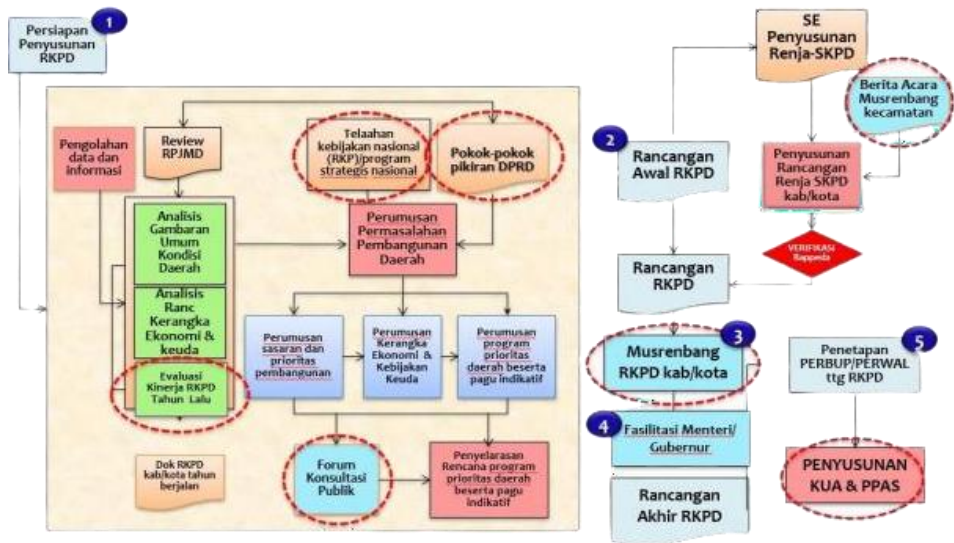
Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen RKPD 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke III (ke-tiga) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

Gambar 1.1
Alur Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka memenuhi indikator penilaian pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang sejalan dengan amanat Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, maka dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 disusun berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang lebih dirinci diuraikan pada pembahasan arah kebijakan pembangunan kab/kota.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

37. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 8)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

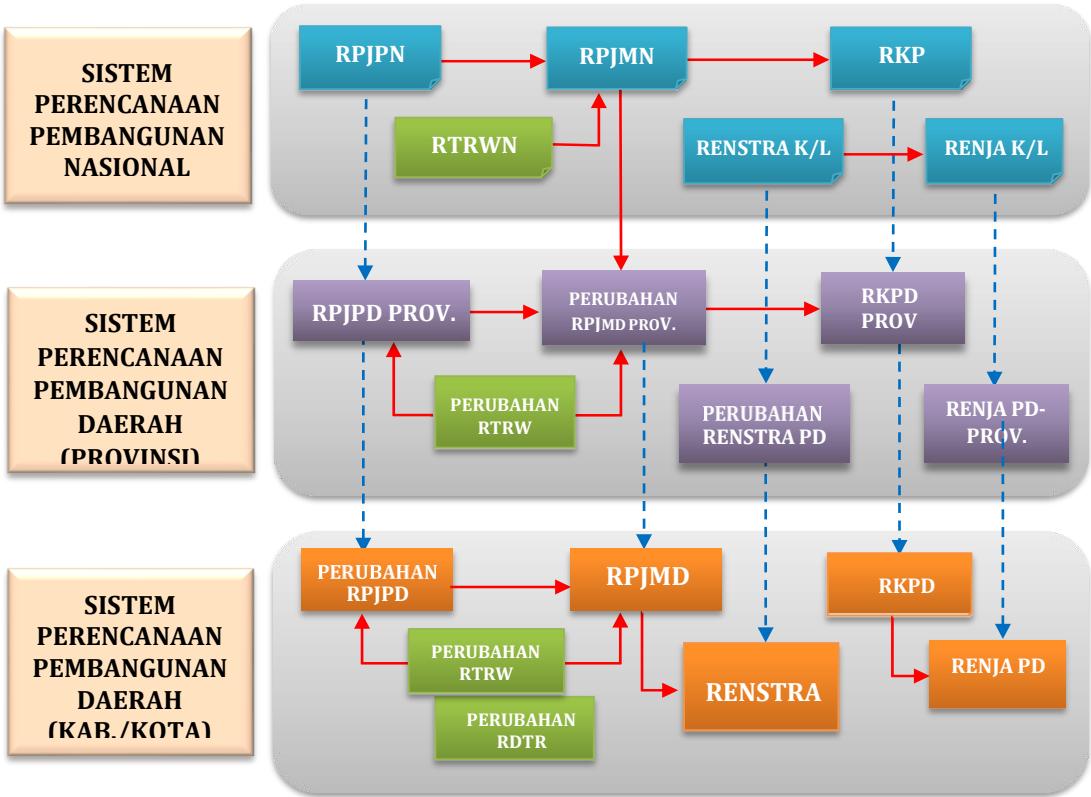
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

RKPD Kabupaten Barru tahun 2024 merupakan penjabaran teknis RPJMD Tahun 2021- 2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 berpedoman pada RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar RKPD selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi, untuk itu perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Barru tahun 2024, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Lainnya



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

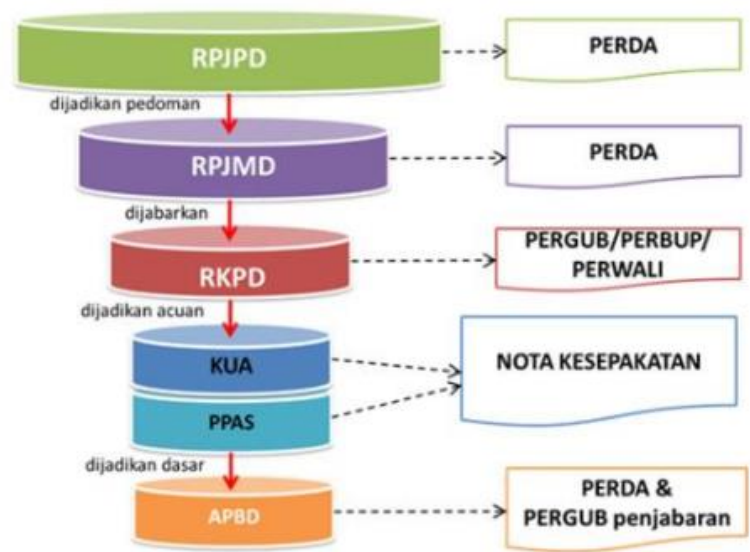
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2024 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten, sebagai landasan penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Bupati dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.3

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024:

1. Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru tahun 2021-2026;
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparansi, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian target dan sasaran pembangunan Kabupaten Barru.

1.5. Sistematika Penulisan

RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024, disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Lampiran C.3 Penyajian Dokumen RKPD dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada sub bab latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, renstra perangkat daerah, renja perangkat daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada sub bab dasar hukum penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub bab hubungan nntar dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada sub bab maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada sub bab sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

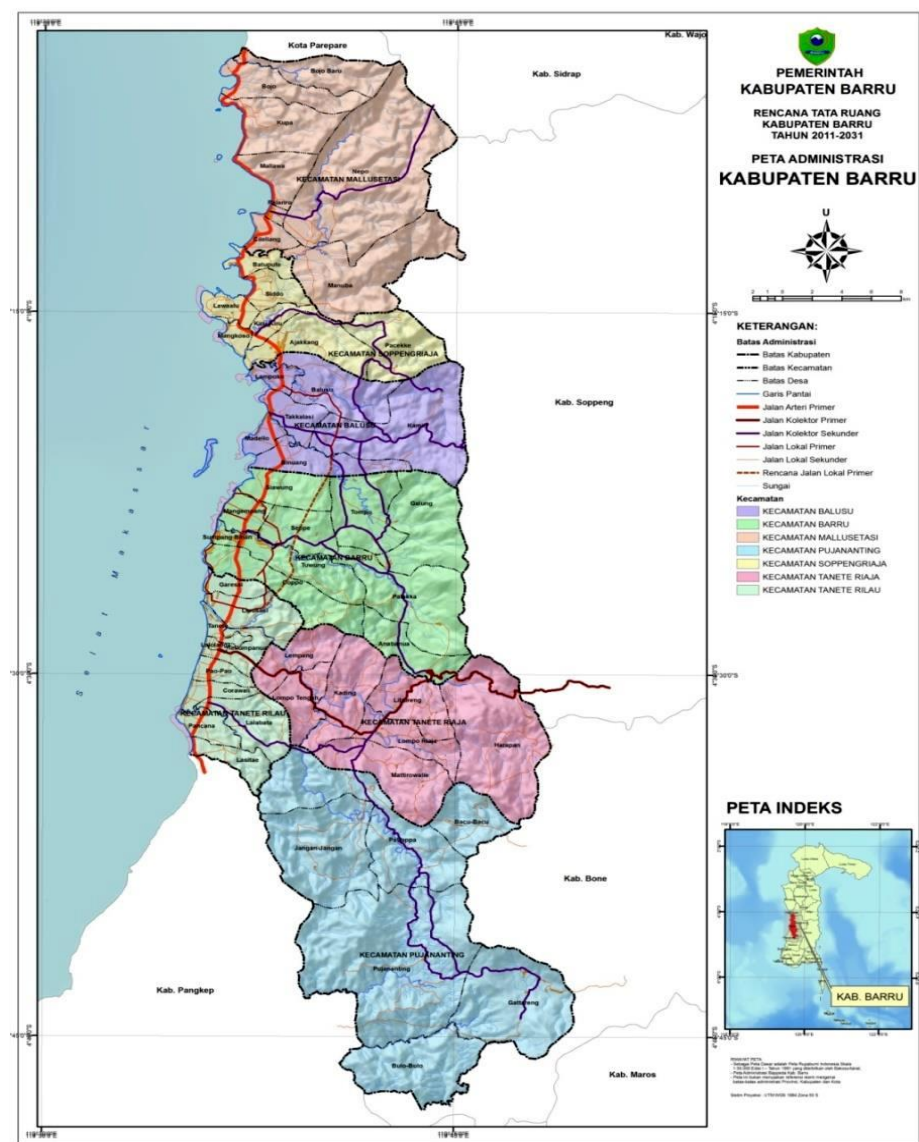
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu dari 24 Kabupaten Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi yang terletak di pesisir pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 Km arah utara Kota Makassar dengan luas 1174,72 Km².

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Barru Tahun 2022



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2023

Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah didalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Barru sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar

Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (Tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa
Kabupaten Barru Tahun 2022

Kode	Kecamatan	Desa	Kel	Luas (Km ²)	%	Jumlah Penduduk (Jiwa)
731101	Tanete Riaja	6	1	174,29	14,83	26.265
731102	Tanete Rilau	8	2	79,17	6,74	38.858
731103	B a r r u	5	5	199,32	16,97	86.060
731104	Soppeng Riaja	5	2	78,90	6,72	18.761
731105	Mallusetasi	5	3	216,58	18,44	28.218
731106	Pujananting	6	1	314,26	26,75	13.715
731107	Balusu	5	1	112,20	9,55	20.018
Total		40	15	1.174,72	100	191.895

Sumber: Disdukcapil Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan Pujananting adalah kecamatan yang terluas di Kabupaten Barru yakni seluas 314,26 Km² atau sebesar 26,75% dari total wilayah Kabupaten Barru, sementara Kecamatan Soppeng Riaja merupakan kecamatan yang tersempit di Kabupaten Barru yakni hanya seluas 78,90 Km² atau sebesar 6,72% dari total wilayah keseluruhan.

Secara astronomis, Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°05’49” LS – 4°47’35” LS (Lintang Selatan) dan 119°35’00” – 119°49’16” BT (Bujur Timur). Kabupaten Barru mempunyai wilayah yang cukup bervariasi terdiri dari daerah pesisir/laut, dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian timur Kabupaten Barru terbentang daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 100 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian barat yang berhadapan dengan selat Makassar, bertopografi datar sampai landai dengan ketinggian 0 – 20 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah Kabupaten Barru memiliki kelerengan yang sangat bervariasi mulai datar, bergelombang hingga bergunung dengan persentase kemiringan antara 0% - >40%.

Topografi merupakan salah satu faktor pembatas pemanfaatan ruang untuk pembangunan. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis dan memiliki tingkat erosi yang tinggi yang dipengaruhi oleh kecepatan pengaliran air. Secara topografis, Kabupaten Barru mempunyai wilayah bervariasi yang terdiri atas wilayah laut, dataran rendah dan wilayah pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0–1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl). Keadaan wilayahKabupatenBarru berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang dibagi dalam 5 (lima) kriteria yaitu 0-25 m, 25-100 m, 100-500 m, 500-1.000 m dan ≥ 1000 m dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian diatas Permukaan Laut Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Ketinggian Tempat (Ha)					Total
		0-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	≥1000 m	
1	Tanete Riaja	1.132	4.547	6.082	5.153	515	17.429
2	Tanete Rilau	3.830	2.113	1.974	-	-	7.917
3	Barru	3.454	5.113	9.363	1.806	196	19.932
4	Soppeng Riaja	3.137	1.171	2.771	811	-	7.890
5	Malusetasi	2.583	2.4	11.100	5.575	-	21.658
6	Pujananting	-	275	21.723	8.368	1.060	31.426
7	Balusu	3.411	1.428	5.003	1.307	71	11.220
Total		17.547	17.047	58.016	23.020	1.842	117.472

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase luas wilayah yang paling besar adalah wilayah dengan ketinggian antara 100-500 m yaitu sebesar 58.016 Ha sedangkan yang paling sedikit adalah wilayah dengan ketinggian ≥ 1.000 m yaitu sebesar 1.842 Ha Secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Barru Tahun 2023



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2023

Selanjutnya keadaan wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan meliputi 4 (empat) kriteria yaitu kemiringan 0-2%, 2-15%, 15-40%, >40%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Keadaan Wilayah Berdasarkan Kemiringan
Kabupaten Barru Tahun 2022

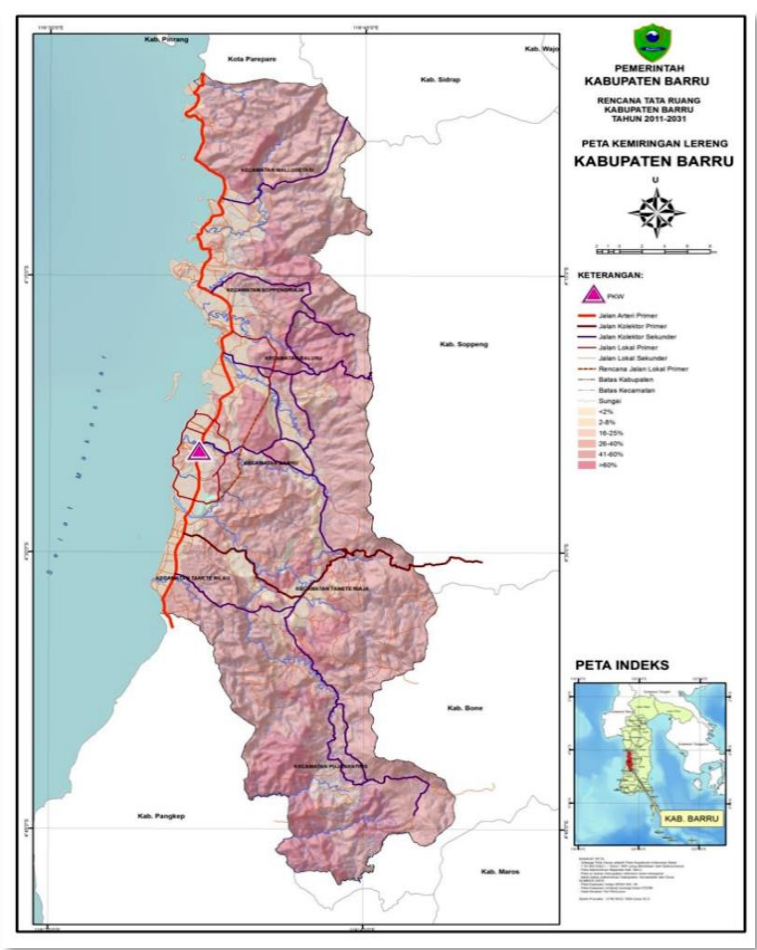
No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Kemiringan Tanah / Lereng				Total
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%	
1	Tanete Riaja	5,93	55,52	79,85	32,99	174,29
2	Pujananting	3,38	57,30	157,18	96,40	314,26
3	Tanete Rilau	11,59	33,69	28,57	5,32	79,17
4	Barru	14,58	75,83	78,27	30,64	199,32

No	Kecamatan	Luas Berdasarkan Kemiringan Tanah / Lereng				Total
		0-2%	2-15%	15-40%	>40%	
5	Soppeng Riaja	7,88	34,19	26,87	9,96	78,90
6	Balusu	10,84	40,00	47,64	13,72	112,20
7	Mallusetasi	6,11	43,60	93,71	73,16	216,58
TOTAL		60,31	340,13	512,09	262,19	1174,72

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barru berdasarkan kemiringan tanah/lereng lebih didominasi oleh wilayah dengan kemiringan antara 15%-40% yaitu sebesar 43,60%, sedangkan yang paling sedikit yaitu dengan kemiringan antara 0-2% hanya sebesar 5.05%. Secara spasial kemiringan lereng wilayah Kabupaten Barru dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Barru Tahun 2023



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2023

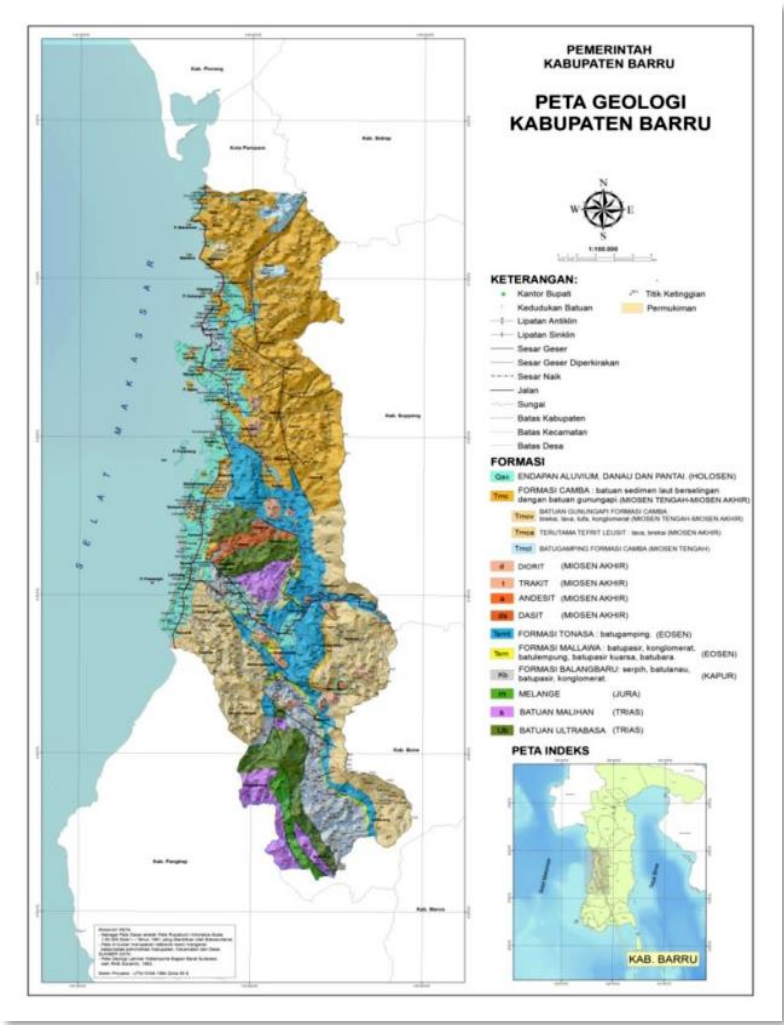
Pegunungan yang ada di Kabupaten Barru sebagian besar merupakan batuan gunung api yang bagian selatannya lebih tinggi, tetapi ke utara menyempit dan merendah. Secara bersama batuan

itu menyusun Formasi Camba yang tebalnya sekitar 5.000m. Sebagian besar pegunungan terbentuk dari Formasi Camba yang menindih tak selaras Formasi Tonasa.

Terobosan batuan beku yang terjadi di Kabupaten Barru semuanya berkaitan erat dengan kegiatan gunung api. Bentuknya berupa stok, sill dan retas, bersusunan beraneka dari basal, andesit, trakit, diorit, dasit dan granodiorit yang diperkirakan berumur pada kiasan Miosen Akhir.

Endapan Holosen yang luasannya berupa endapan aluvium, danaudan pantai terdiri atas lempung, lanau, lumpur pasir dan kerikil di sepanjang sungai besar dan disepanjang pantai. Endapan pantai setempat mengandung sisa kerang dan batu gamping koral. Secara umum endapan aluvium terdapat di sebelah barat atau pesisir pantai dari daerah Kabupaten Barru.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Barru Tahun 2023



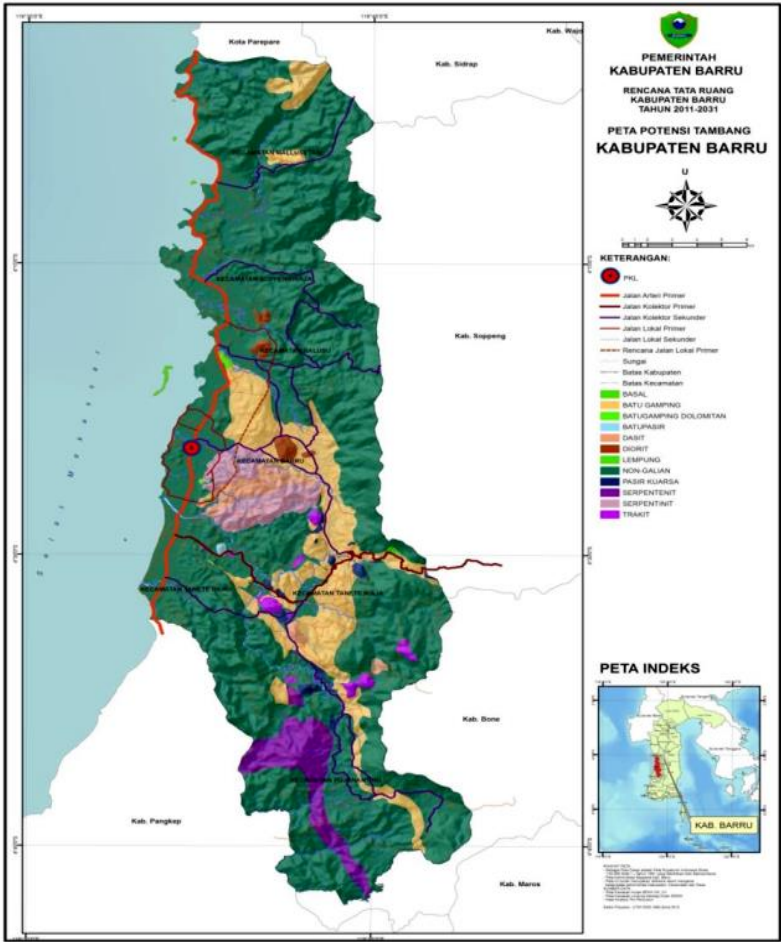
Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2023

Struktur regional Kabupaten Barru terdiri atas struktur lipatan dan struktur sesar dimana struktur lipatan adalah suatu bentuk

deformasi pada batuan sedimen, batuan vulkanik dan batuan metamorf yang memperlihatkan suatu bentuk bergelombang dan struktur yang berkembang di Kabupaten Barru adalah struktur sinklin. Sedangkan struktur sesar merupakan suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dan arahnya sejajar dengan bidang patahan. Secara spasial peta geologi Kabupaten Barru dapat dilihat melalui gambar diatas.

Kondisi geologi daerah Barru yang kompleks akibat tektonik inilah yang menyebabkan potensi pertambangan di Kabupaten Barru sangat besar dari segi bahan galian batuan, mineral dan logam. Bahan galian yang bernilai ekonomis tersebar dari Utara hingga selatan daerah Barru. Kromit ditemukan dalam batuan ultrabasa di timur Barru, terutama pada bagian yang berlapis berupa lensa, tanah pelapukannya mengandung apungan kromit. Khusus disebelah Selatan daerah Barru di Kecamatan Pujananting dan Tanete Riaja potensi bahan galian yang bernilai ekonomis banyak dijumpai antara lain: emas, galena, mangan dan batubara.

Gambar 2.5
Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Barru Tahun 2022



Sumber: Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2022

Tabel 2.4
Potensi Jenis Tambang Menurut Kecamatan
Kabupaten Barru Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Tambang
1	Tanete Riaja	Batubara, kromit, batu gamping, pasir kuarsa, marmer, serpentinit, tanah liat, batupasir, pasir, dan batu sungai
2	Tanete Rilau	Pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentinit
3	Barru	Batu gamping, serpentinit, tanah liat, pasir dan batu Sungai
4	Soppeng Riaja	Pasir dan batu sungai
5	Mallusetasi	Tras, pasir besi dan batu sungai
6	Pujananting	Batubara, kromit, batu gamping, marmer, serpentinit, mangan, galena, emas, pasir kuarsa, tanah liat, pasir dan batu sungai
7	Balusu	Batu gamping dan tanah liat

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Barru 2011-2031

Sedangkan potensi batuan menyebar dari Utara sampai Selatan daerah Barru, seperti yang terlihat pada tabel 2.4. JenisTanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian yang tersebar di beberapa Kecamatan yaitu :

- a. Jenis Tanah Aluvial Muda, dari bahan induk Aluvium,tekstur beranekaragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini didaerah daratanAluvialSungai, daratan Aluvial Pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.
- b. Jenis tanah Litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, Solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah Litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofograf berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru.
- c. Jenis tanah Regosol meliputi 35,12 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal daribahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk–gumuk pasir.
- d. Jenis tanah Mediteran berasal dari bahan induk batuankapur keras (Limestone) dan Tufa Vulkanis bersifat basa. Tekstur

umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 27,68 persen terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

Dari keempat jenis tanah tersebut, digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Jenis Tanah Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Jenis Tanah	Luas Dan Persentase	
		Ha	Persentase (%)
1.	Aluvial	14.659	12,48
2.	Litosol	29.043	24,72
3.	Regosol	41.254	35,12
4.	Mediteran	32.516	27,68
	T o t a l	117.472	100

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel diatas, diantara ke 4 (empat) jenis tanah, yang memiliki persentase terbesar adalah Regosol sebanyak 35,12% dan terkecil adalah Aluvial sebesar 12,48%.

Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya. Potensi sumber air di Kabupaten Barru yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan adalah air hujan, air permukaan dan aliran sungai atau limpasan. Sungai-sungai yang ada selain airnya dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, industri, rumah tangga juga sungai-sungai yang ada berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan untuk budidaya perikanan. Berikut data sungai yang mengalir menurut lokasi:

Tabel 2.6
Sungai Mengalir Menurut Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Daerah Aliran Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Kupa	Mallusetasi	11,25
2	Lakepo	Balusu, Barru	85,97
3	Lampoko	Balusu, Soppeng Riaja	113,51
4	Binangae	Balusu, Barru Tanete Riaja	44,85
5	Bojo	Mallusetasi	26,35
6	Jampue	Mallusetasi, Soppeng Riaja	88,70
7	Matajang	Tanete Rilau, Tanete Riaja,	53,25
8	Pangkajene	Pujananting	64,38
9	Pelapekkae	Mallusetasi	3,93
10	Segeri	Pujananting, Kab. Pangkep	35,17 Km

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Sementara itu, berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) terhadap ketersediaan air Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi air yang dibutuhkan masyarakat diwilayah tersebut. Rincian luasan status daya dukung wilayah penyediaan air disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Selisih kebutuhan (m3)
1	Tanete Riaja	195.661.363,46	81.654.160,28	114.007.203,18
2	Tanete Rilau	87.766.378,69	50.709.850,85	37.056.527,84
3	Barru	231.806.923,49	78.743.615,96	153.063.307,53
4	Soppeng Riaja	119.005.762,91	35.461.502,11	83.544.260,80
5	Mallusetasi	264.204.914,68	45.266.824,14	218.938.090,54
6	Pujananting	368.810.276,56	58.699.474,88	310.110.801,69
7	Balusu	159.746.620,21	41.699.448,62	118.047.171,59
Total		1.427.002.240,01	392.234.876,83	1.034.767.363,18

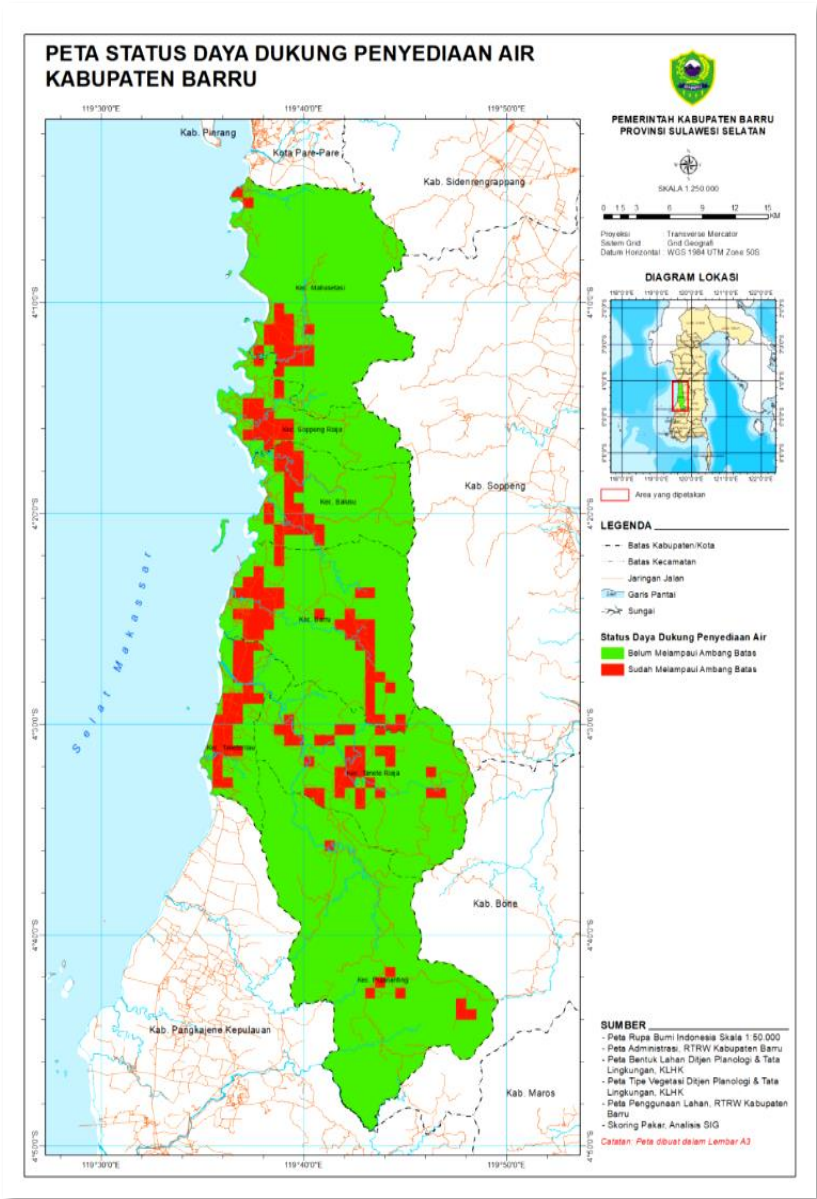
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air dari setiap Kecamatan tertinggi di Kecamatan Pujananting dan terendah di kecamatan Tanete Rilau. Kebutuhan air dalam perikehidupan manusia dibagi menjadi 2 yaitu kebutuhan air untuk lahan dan kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan air tertinggi di Kabupaten Barru yaitu pada Kecamatan Tanete Riaja sebesar 81.654.160,28 m³ disebabkan tingginya kebutuhan air untuk lahan pada Kecamatan tersebut yaitu 79.542.630,68 m³ sedangkan kebutuhan air terendah yaitu pada Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 35.461.502,11 m³ dengan kebutuhan air untuk lahan sebesar 33.971.534,11 m³.

Pada tabel diatas juga diketahui bahwa masih terdapat selisih daya dukung lingkungan hidup untuk menyediakan air di Kabupaten Barru dengan kebutuhan air bagi perikehidupan penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sehingga

dapat disimpulkan bahwa status daya dukung penyediaan air bagi penduduk Kabupaten Barru belum terlampaui pada setiap kecamatan. Berdasarkan jumlah ketersediaan air di Kabupaten Barru (123.337.296,00 m³), jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung ketersediaannya secara alamiah oleh Kabupaten Barru adalah 12.151.381 jiwa populasi, masih surplus sekitar 11.969.008 jiwa populasi penduduk dari total penduduk eksisting tahun 2021 sebanyak 189.877 jiwa.

Gambar 2.6
Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Barru Tahun 2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa wilayah yang telah melampaui ambang batas yakni antara kemampuan alam menyediakan pelayanan dalam hal penyediaan air terhadap kebutuhan yang digambarkan dari besarnya konsumsi

air yang dibutuhkan masyarakat diwilayah tersebut. Rincian luasan status daya dukung wilayah penyediaan air disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Status Daya Dukung Air di Kabupaten Barru Tahun 2022

Kecamatan	Ambang Batas	Status Ambang Batas	Luas wilayah masih mendukung		Luas Wilayah tidak mendukung	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Tanete Riaja	1.343.976	1.296.795	17.295,18	85,8	2.852,88	14,2
Tanete Rilau	464.133	395.121	4.521,40	64,3	2.510,53	37,0
Barru	1.812.225	1.730.508	16.187,82	80,1	4.025,20	19,9
Soppeng Riaja	984.197	949.057	6.579,90	81,5	1.490,69	18,5
Mallusetasi	2.560.383	2.508.465	20.840,56	91,9	1.836,05	8,1
Pujananting	3.601.887	3.576.145	30.813,80	97,8	681,26	2,2
Balusu	1.384.580	1.347.657	8.751,68	79,5	2.255,07	20,5
Total	12.151.381	11.803.748	104.990,34	87,0	15.651,68	13,0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada setiap Kecamatan di Kabupaten Barru sebagian wilayah dalam kecamatan tersebut sudah tidak mendukung sebagai fungsi penyedia air.

Sementara itu untuk jumlah hari hujan dan curah hujan Kabupaten Barru pada tahun 2018 s/d 2022 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Barru Tahun 2018–2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Curah Hujan (mm)	3.529	1.804	3.136	4.234	4.962
2	Hari Hujan (hari)	168	105	152	208	211

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan jumlah hari hujan dan curah hujan menurut bulan sepanjang tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Barru Tahun 2022

No.	Bulan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm ³)
1	Januari	22	653,5
2	Februari	22	788,7
3	Maret	17	362,1
4	April	14	92,6

No.	Bulan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm ³)
5	Mei	17	374,0
6	Juni	20	309,5
7	Juli	6	41,1
8	Agustus	10	58,5
9	September	11	133,5
10	Oktober	24	445,4
11	November	24	721,3
12	Desember	24	982,1

Sumber: Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana terhadap karakteristik dan kecenderungan pola pemanfaatan ruang wilayah. Rencana pola ruang meliputi alokasi pemanfaatan ruang, kawasan budidaya, kawasan lindung, serta kawasan perkotaan dan pedesaan.

Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan. Luas arahan kawasan budidaya Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Luas Arahan Kawasan Budidaya Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	%
1	Hutan Produksi	17.290,03	14,52
2	Hutan rakyat	5.923,35	4,97
3	Kawasan Budidaya Perikanan	2.682,69	2,25
	Tambak	2.682,69	2,25
4	Kawasan Budidaya Perkebunan	14.046,91	11,79
	Perkebunan	14.046,91	11,79

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	%
5	Kawasan Budidaya Pertanian	19.880,78	16,69
	Pertanian lahan basah	14.322,14	12,02
	Pertanian lahan kering	1.785,70	1,50
	Holtikultura	3.772,94	3,17
6	Kawasan Budidaya Peternakan	2.290,54	1,92
	Peternakan Besar	2.290,54	1,92
7	Kawasan Permukiman	3.771,64	3,17
	Permukiman	3.771,64	3,17
8	Kawasan Pertambangan	1.490,56	1,25
	Pertambangan	1.490,56	1,25
Total Kawasan Budidaya		67.376,50	56,57

Sumber Data: Dokumen RTRW Kabupaten Barru Tahun 2011-2031

Sementara itu, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan hutan lindung juga merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Kawasan sebagaimana dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri dari :

- Kawasan hutan lindung yang memiliki skor >175, yang merupakan penjumlahan skor intensitas curah hujan, kepekaan tanah terhadap erosi dan kemiringan lereng. Selain itu kawasan ini meliputi pula wilayah dengan ketinggian > 2.000 meter dari permukaan laut.
- Kawasan resapan air yang meliputi hutan rawa.
- Kawasan sempadan sungai dan danau.

Secara keseluruhan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru seluas 51.969,00 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 17.879 hektar. Secara lebih rinci luasan kawasan hutan lindung berdasarkan kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Fungsi Kawasan	Luas Hutan (Ha)
1	Hutan Lindung	49.949
2	Hutan Produksi Terbatas	17.162
3	Lainnya	50.361
Total		117.412

Sumber Data : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan kawasan perlindungan setempat terdiri dari beberapa kawasan sebagai berikut:

- Kawasan sempadan pantai ditetapkan berdasarkan pesisir pantai Kabupaten Barru sepanjang 78 Km yang terdistribusi pada lima kecamatan, yakni Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Balusu.
- Kawasan sempadan sungai ditetapkan pada Sungai Barru, Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai Jalanru.
- Kawasan sekitar mata air ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan lindung spiritual ditetapkan di kawasan perkampungan Suku Tobalo di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.
- Kawasan ruang terbuka hijau berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologi, sosial budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 persendan Ruang Terbuka Hijau privat paling sedikit 10 persen dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp dan PPK.

Kawasan lindung yang selanjutnya adalah Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang terdiri dari :

- Kawasan pantai berhutan bakau, dengan luasan kurang lebih 343,783Ha, ditetapkan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 26,322 Ha, sebagian wilayah

Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 86,804 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Balusu (termasuk Pulau Panikiang) dengan luasan kurang lebih 200,078 Ha dan sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 30,579 Ha.

- Kawasan taman wisata alam, ditetapkan di Pulau Dutungan, Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi Kecamatan Mallusetasi.
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kawasan Rumah Adat Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu, Kawasan Monumen Paccekke di Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru dan Kawasan Pendidikan Pesantren Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja.

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air tanah ditetapkan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Barru di sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting.

Untuk Kawasan Budidaya adapun Pengembangan wilayah Kabupaten Barru diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru. Hal ini guna mewujudkan ruang Kabupaten Barru yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan.

Secara hirarki sebagaimana disebutkan dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, telah ditetapkan istilah baku untuk pusat-pusat perkotaan mulai dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Wilayah Kota merupakan pusat kegiatan bagi wilayah di sekelilingnya, yang sering disebut dengan beberapa istilah seperti wilayah pengaruh, wilayah pelayanan, hinterland dan lain-lain. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan

sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031, telah mengatur beberapa Potensi pengembangan wilayah yang berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah. Diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, petambangan dan lainnya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Adapun dari hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru maka diperoleh potensi pengembangan wilayah sebagai berikut.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Barru, Penetapan kawasan peruntukan pertanian, di bagi kedalam beberapa kawasan sebagai berikut.

- a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri dari: kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan kurang lebih 14.527,07 Ha yang diarahkan pada sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Selanjutnya kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan sekitar 12.781,73 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luasan kurang

lebih 6.305,99 (enam ribu tiga ratus lima koma Sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

- b) Kawasan peruntukan perkebunan. Kawasan peruntukan perkebunan terbagi dalam beberapa peruntukan. *Pertama*, kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida dengan luasan kurang lebih 2.202 Ha, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kedua*, Kawasan peruntukan perkebunan kopi dengan luasan kurang lebih 758 Ha, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Ketiga*, kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih 5.278Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Keempat*, kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dan kakao dengan luasan kurang lebih 1.100 Ha ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru ,sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. *Kelima*, kawasan peruntukan perkebunan kemiri dan karet dengan luasan kurang lebih 4.617 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

- c) Kawasan peruntukan peternakan, ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luas sekitar 2.290,54 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

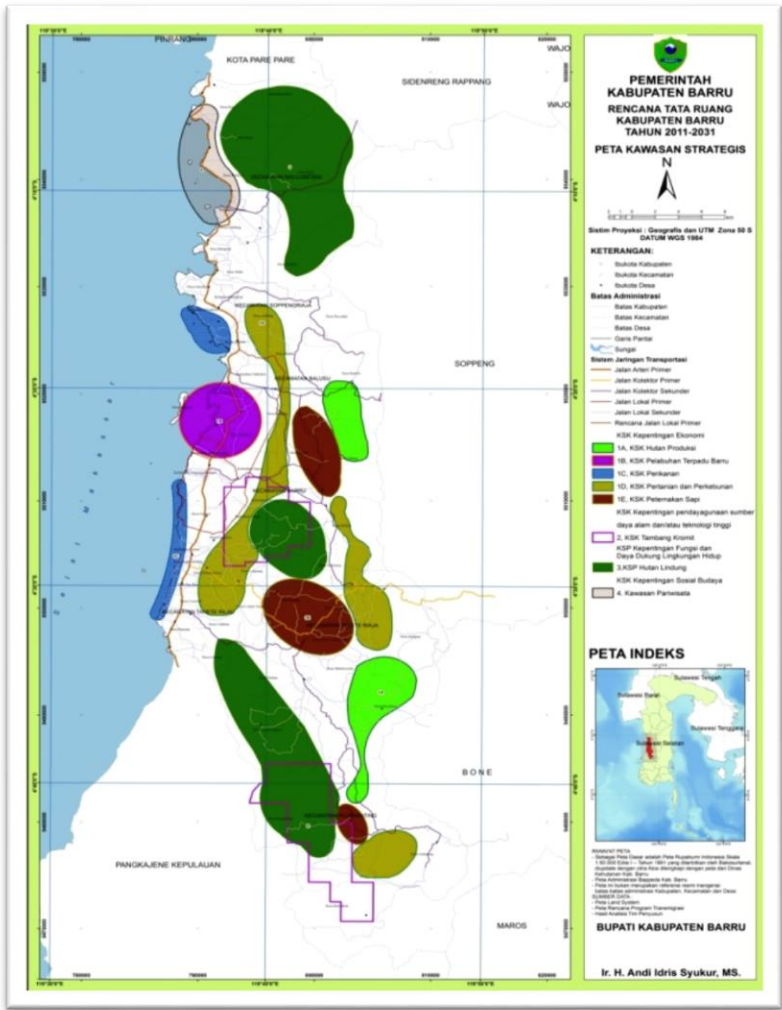
Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan untuk kawasan pertanian untuk wilayah Kabupaten Barru diarahkan untuk sektor unggulan komoditas Tanaman Pangan padi, sementara untuk komoditas peternakan diarahkan untuk komoditas sapi potong.

Untuk Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang lebih 17.879 Ha, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 4.505 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 3.272 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 14 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan kurang lebih 4.305 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 972 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 4.811 Ha.

Dan untuk pengembangan Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Barru ditetapkan dengan luasan sekitar 5.923,35 Ha, berada di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

Untuk pengembangan komoditas pangan jenis hortikultura, perkebunan dan kehutanan masih diperlukan upaya peningkatan produktivitas dan konversi produk. Hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan dari sektor beras, namun juga harus didukung dengan komoditas pangan yang lain.

Gambar 2.7
Peta Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Barru Tahun 2023



Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanian Kab. Barru Tahun 2023

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan. Pengelolaan kawasan perikanan di Kabupaten Barru diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. Adapun Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di dalam Dokumen RTRW terdiri dari:

- a) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi kawasan pesisir dan laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mallusetasi.
- b) Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan diarahkan pada; *Pertama*, kawasan budidaya perikanan air payau dengan

komoditas udang dan bandeng ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Kedua*, Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan disebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi.

- c) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan akan dikembangkan di PPI Polejiwa diKecamatan Tanete Rilau.

Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, arah pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar. Untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri

pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jenepono, dan kota Makassar.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Barru untuk Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari:

- a. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barru.
- b. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan makanan dan pakan ternak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Balusu.
- c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di kawasan perkotaan PKLp dan PPK.

Sementara untuk pengembangan Kawasan Peruntukan Wilayah pertambangan di Kabupaten Barru terdiri dari:

- a) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi : Pertama, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa kromit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan TaneteRiaja, sebagian Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. Kedua, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa mangan, galena dan emas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Ketiga*, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting. *Keempat*, wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa tras, kerikil berpasir alami, tanah liat dan marmer ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan

Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja.

- b) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam terdiri dari wilayah usaha pertambangan panas bumi yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

4. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pariwisata difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Adapun peningkatan nilai tambah pariwisata tersebut melalui diversifikasi wisata pada potensi wisata alam; wisata budaya dan wisata buatan. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Barru pada beberapa kawasan berikut.

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri dari:
 - ✓ Kawasan Makam Pajung Tenri Leleang, kawasan Makam Petta Pallase- LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan Masjid Tua Lalabata, kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan Makam Datu Maddusila To Appaewa dan kawasan Makam Karaeng Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau;
 - ✓ Kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H.M.Pudhail dan kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru;
 - ✓ Kawasan Makam Arung Nepo dan kawasan Makam La Bongo di Kecamatan Mallusetasi;
 - ✓ Kawasan permukiman suku To Balo di Kecamatan Pujananting;
 - ✓ Kawasan Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu.

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri dari:

- ✓ Kawasan Pantai Ujung Batu, kawasan Air Panas KalompiE, kawasan Air Terjun Tanjung Asap, Pantai LembaE dan kawasan Cek Dam Lajulo Indah di Kecamatan Barru.
- ✓ Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pantai Kupa, Taman Laut Mallusetasi, Pantai Lapakaka, kawasan permandian Bujung MatimbaoE, Bendungan LanraE dan Kawasan Wisata Mareppang di Kecamatan Mallusetasi.
- ✓ Pulau Pasir Putih, Pantai Awerange dan Permandian Alam Batu SitongkoE di Kecamatan Soppeng Riaja.
- ✓ Permandian Alam Datae Salopuru di Kecamatan Pujananting.
- ✓ Permandian Waempubbu, Air Terjun Sarang Burung dan Gua Togenra di Kecamatan Balusu.
- ✓ Kawasan Waenungnge, kawasan Batu Mallopie, kawasan Air Terjun Waesai, kawasan Celebes Canyon dan kawasan Bukit Harapan di Kecamatan Tanete Riaja.

Pulau Puteanging, Sungai Bottoe dan Tanjung Butung di Kecamatan Tanete Rilau.

5. Sistem Perkotaan

Dalam Dokumen RTRW, Untuk Sistem Perkotaan di Kabupaten Barru diuraikan sebagai berikut :

- a) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari; Kantor Komando Distrik Militer Barru di Kota Parepare, Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting, Kantor Kepolisian Resort Barru di Kecamatan Barru, Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting.
- b) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri dari:

- ✓ Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di kawasan perdagangan Garongkong Kecamatan Barru, kawasan perdagangan Palanro Kecamatan Mallusetasi, kawasan perdagangan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, kawasan perdagangan Takkalasi Kecamatan Balusu, kawasan perdagangan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan perdagangan Doi-doi Kecamatan Pujananting, dan kawasan perdagangan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau.
 - ✓ Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau.
- c) Kawasan peruntukan perkantoran terdiri dari:
- ✓ Kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten diarahkan pada kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan perkantoran skala kecamatan dan desa diarahkan pada kawasan perkotaan PKLp, PPK dan PPL.
 - ✓ Kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu pada kawasan perkotaan Barru.
- d) Kawasan peruntukan pelayanan umum terdiri dari:
- ✓ Kawasan pendidikan di bagi atas kawasan pendidikan dasar diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting, kawasan pendidikan menengah diarahkan pada kawasan PKLp dan PPK di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting dan kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru, kawasan perkotaan Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan perkotaan Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau.
 - ✓ Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri dari puskesmas dan balai pengobatan diarahkan pada kawasan PPL di Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting dan

- pelayanan kesehatan skala regional berupa rumah sakit diarahkan pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru.
- ✓ Kawasan peruntukan olahraga terdiri dari kawasan olahraga skala kabupaten diarahkan di kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.
- e) Pengembangan Kawasan peruntukan permukiman tersebar pada semua wilayah dan secara spesifik dibagi menjadi dua kawasan permukiman seperti diuraikan berikut ini.
- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan ini ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Barru Kecamatan Barru, Kawasan Perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kawasan Perkotaan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja, Kawasan Perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu, Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau, dan Kawasan Perkotaan Doi-Doi Kecamatan Pujananting.
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan ini ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Letak geografis dan kondisi geologis yang bervariasi dapat menyebabkan Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Barru tidak dapat dipisahkan oleh struktur-

struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi, secara keseluruhan yang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya antara lain :

- 1). Aktivitas tektonik, palung Sulawesi Utara terletak di pinggir Selatan cekungan Sulawesi, ujung Barat dimulai dari Selat Makassar memanjang ke arah Timur sepanjang Laut Sulawesi, gempa yang terjadi dalam palung ini adalah umumnya berasal dari kedalaman dangkal dan menengah yang didominasi oleh sesar naik (*Thrust Fault*).
- 2). Struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitudo lebih besar dari 0,6 skala richter dan pusat gempanya dangkal (kurang dari 33 km), serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu sesar naik atau turun akan menyebabkan tsunami.

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah Kabupaten Barru terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan bencana alam banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan kawasan rawan ombak besar.

- 1). Banjir

Penyebab utama bencana banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi, penggundulan hutan dihilu sungai, penyumbatan aliran atau saluran, tidak berfungsinya tanggul, selokan air yang tidak dapat menampung derasnya/besarnya debit air pada musim hujan.

- 2). Tanah Longsor

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barru terdiri dari tanah regosol, mediteran, litosol, aluvial, sebagian tanah tersebut berpotensi mengalami gerakan-gerakan yang dapat dikategorikan dalam empat jenis pergerakan yaitu; aliran tanah dan batu batuan, longsor atau tanah longsor, runtuh atau tanah runtuh, amblesan atau pergeseran tanah. Sedangkan penyebabnya atau terjadinya gerakan tanah tersebut antara lain : Topografi wilayah (lereng/ kemiringan); Keadaan tanah, bebatuan, struktur perlapisan dan lainnya; Kandungan air termasuk curah hujan; vegetasi, flora dan penggunaan lahan.

- 3). Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung)
Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia.
- 4). Gelombang Pasang
Bencana gelombang pasang dan abrasi terjadi akibat pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak.
- 5). Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yaitu antara bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini biasanya terjadi kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembabatan hutan atau pembukaan lahan oleh masyarakat serta musim kemarau yang berkepanjangan.
- 6). Kekeringan
Kekeringan adalah kondisi dimana Ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan.

Adapun wilayah di Kabupaten Barru yang merupakan wilayah rawan bencana dapat dilihat pada tabel 2.13. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan bencana di daerah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru. Adapun tahapan proses dalam upaya mengurangi risiko bencana di Kabupaten Barru dimulai dari fase pra bencana. Tanggap darurat, pasca bencana dan juga dipengaruhi beberapa hal yaitu tingkat sinergitas antara organisasi perangkat daerah terkait, instansi lintas sektoral dan pihak dunia usaha dalam proses pengurangan risiko bencana. Juga dibutuhkan kelengkapan dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Tabel 2.13
Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru
Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Banjir		Longsor		Kebakaran		Angin Puting Beliung		Kekeringan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Tanete Riaja	695	-	-	-	1147	1	36	9	-	-

No	Kecamatan	Banjir		Longsor		Kebakaran		Angin Puting Beliung		Kekeringan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
2	Tanete Rilau	210	1	-	-	1220	11	232	42	-	-
3	B a r r u	1235	1	-	-	157	2	149	96	-	-
4	Soppeng Riaja	1822	2	-	2	-	4	72	28	-	-
5	Mallusetasi	6393	117	-	9	105	2	804	41	-	-
6	Pujananting	1538	36	-	4	-	2	25	1	-	-
7	Balusu	450	-	-	1	100	4	106	44	-	-

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Data kejadian bencana di Kabupaten Barru menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Oleh
Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru 2021 – 2022

No	Kecamatan	Rusak Berat (Unit)		Rusak Sedang (Unit)		Rusak Ringan (Unit)		Terendam (Unit)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Tanete Riaja	5	-	3	-	7	-	-	-
2	Tanete Rilau	3	-	21	-	84	-	-	1
3	B a r r u	7	-	9	-	34	-	-	-
4	Soppeng Riaja	1	1	4	4	24	34	-	2
5	Mallusetasi	14	-	26	-	56	-	-	117
6	Pujananting	1	-	1	-	3	-	-	36
7	Balusu	4	-	11	-	57	-	-	-

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian bencana di Kabupaten Barru dalam rentang waktu tahun 2021 – 2022, dimana pada tahun 2021 menjadi tahun yang total bencananya cukup tinggi dibanding tahun 2022 khususnya bencana banjir, hal ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten untuk melakukan antisipasi bencana.

Gambar 2.8
Dokumentasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Barru
Tahun 2022



Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

Adapun gambaran wilayah relokasi bencana untuk 7 kecamatan yang telah ditentukan oleh BPBD Kabupaten Barru dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Lokasi Potensi Kawasan Relokasi Bencana Kabupaten Barru
Tahun 2022

No	Jenis Bencana	Potensi Bencana	Lokasi Potensi Relokasi Pasca Bencana
1.	Tanete Riaja	Longsor	Lapangan Sepak Bola Ralla
		Cuaca Ekstrim	Pasar Ralla
		Kebakaran	PKG Maruala
2.	Tanete Rilau	Longsor	Lapangan Sepak Bola Pekkae
		Cuaca Ekstrim	SMA Aroppoe
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Pancana
3.	Barru	Longsor	Lapangan Sepak Bola Sumpang Binangae
		Cuaca Ekstrim	SMA Lajulo
		Kebakaran	MAN Mangempang
4.	Soppeng Riaja	Longsor	Lahan Persawahan Pemda di Kel.Kiru-Kiru
		Cuaca Ekstrim	Lahan Perkebunan Pemda di Kel.Kiru-Kiru
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Siddo
5.	Balusu	Longsor	Dusun Bulu Dua, Paddumpu, Baera, Rumpiah, dan Kamiri
		Cuaca Ekstrim	Dusun Madello, Pannikiang dan Ujunge
		Kebakaran	Lapangan Sepak Bola Madello
6.	Pujananting	Longsor	Lapangan Sepak Bola Doi-Doi
		Cuaca Ekstrim	PKG Ralla
		Kebakaran	SMP Doi-Doi
7.	Mallusetasi	Longsor	Lapangan Sepak Bola Palanro
		Cuaca Ekstrim	SMK Bojo
		Kebakaran	MAN Lakkalitta

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

Pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah meliputi ekosistem yang di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah area peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir dihilir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial. Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi – sangat tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir memiliki luasan sebesar 55.221,88 Ha atau 45,76% dari keseluruhan lahan di Kabupaten Barru. Kategori sedang seluas 2.211,43 Ha (1,83%) dan kategori rendah seluas 63.208,71 Ha (52,41%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir di Kabupaten Barru Tahun 2022

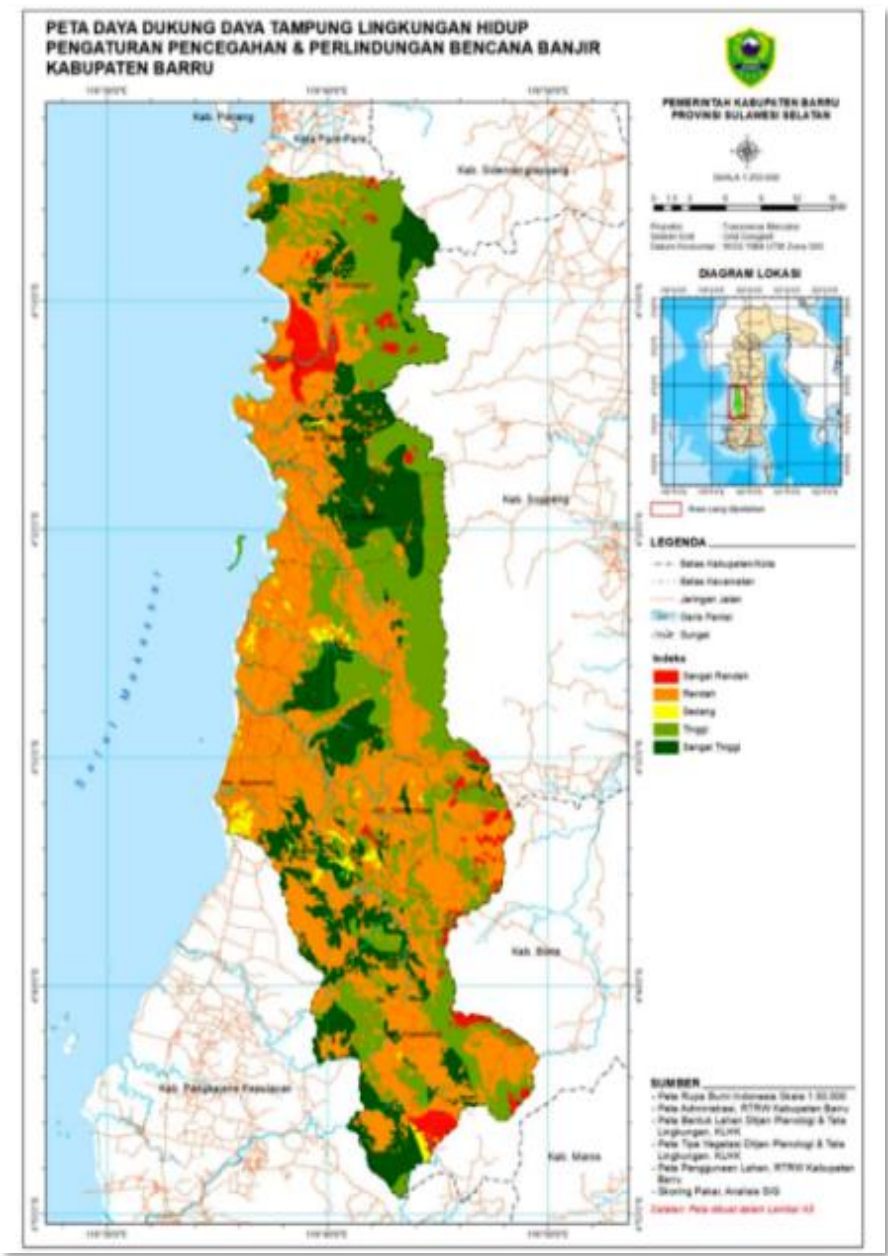
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH – RENDAH		SEDANG		TINGGI - SANGAT TINGGI	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Tanete Riaja	14.275,43	11,83	201,65	0,17	5.670,98	4,70
2	Tanete Rilau	5.775,93	4,79	474,80	0,39	781,20	0,65
3	Barru	9.235,13	7,66	626,31	0,52	10.351,58	8,58
4	Soppeng Riaja	4.362,31	3,62	205,53	0,17	3.502,75	2,90
5	Mallusetasi	8.878,42	7,36	94,38	0,08	13.703,82	11,36
6	Pujananting	16.472,52	13,66%	559,71	0,46	14.462,83	11,98
7	Balusu	4.208,96	3,49	49,05	0,04	6.748,74	5,60
TOTAL		63.208,70	52,41	2.211,43	1,83	55.221,90	45,76

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas memberikan informasi bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan

dan perlindungan bencana banjir dengan kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi) yaitu Kec. Pujananting dengan luas 14.462,83 Ha (11,98%), sedangkan kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah (sangat rendah–rendah) juga Kec. Pujananting dengan luas 16.472,52 Ha (13,66%).

Gambar 2.9
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan
Bencana Banjir Kabupaten Barru Tahun 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru 2023

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi),

kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha(19,24%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah–rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%). Rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor disajikan pada tabel berikut.

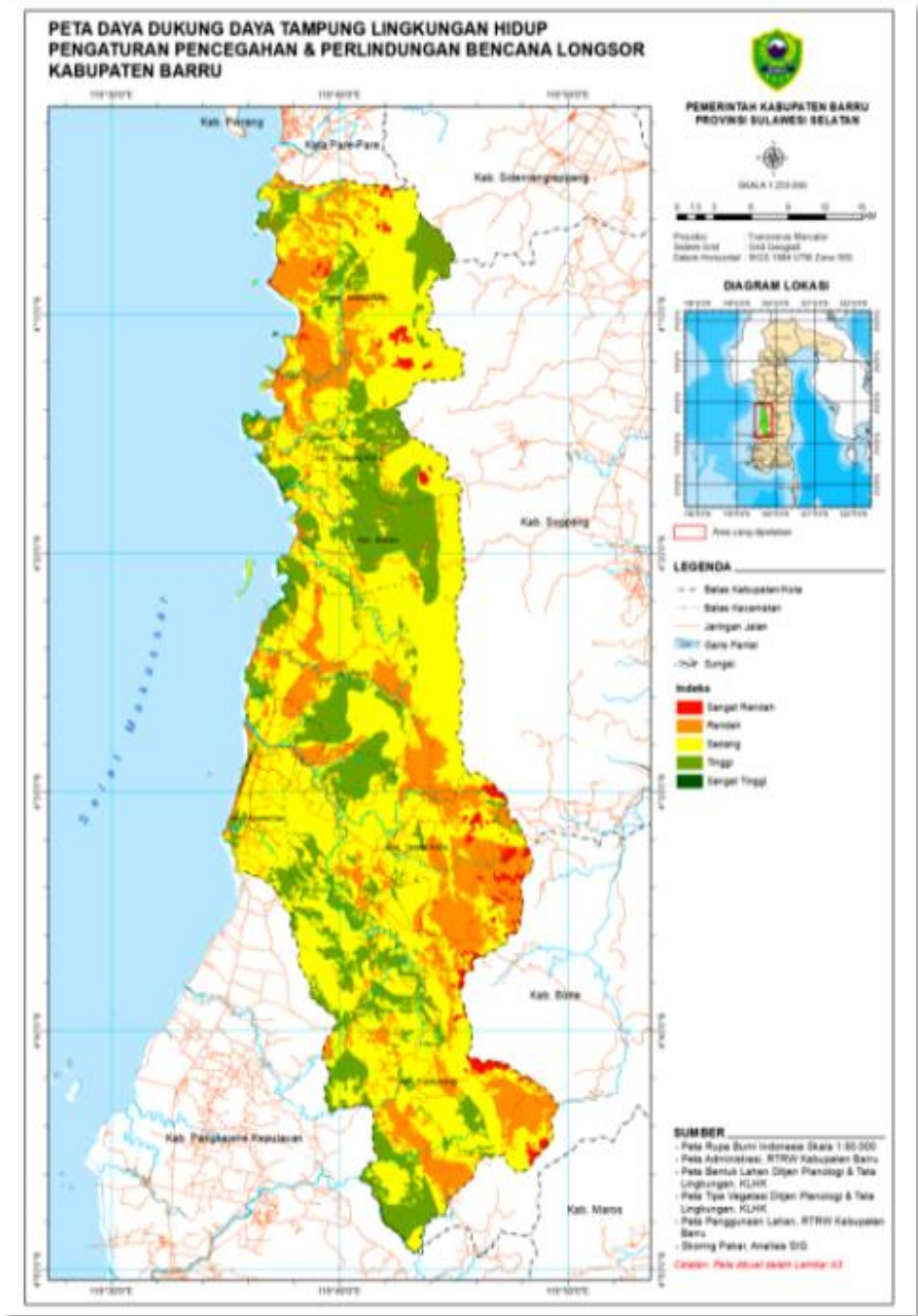
Tabel 2.17
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Kecamatan	Sangat rendah – rendah		Sedang		Tinggi – sangat tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Tanete Riaja	12.205,75	10,12	5.623,57	4,66	2.318,74	1,92
2	Tanete Rilau	3.933,75	3,26	1.775,40	1,47	1.322,78	1,10
3	Barru	7.423,08	6,15	9.995,90	8,29	2.794,05	2,32
4	Soppeng Riaja	2.639,26	2,19	2.793,47	2,32	2.637,86	0,40
5	Mallusetasi	8.400,95	6,96	10.151,39	8,41	4.124,27	3,42
6	Pujananting	16.354,80	13,56	7.373,36	6,11	7.766,90	6,44
7	Balusu	2.286,06	1,89	3.806,72	3,16	4.913,96	4,07
Total		53.243,66	44,13	41.519,81	34,42	25.878,55	19,67

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori tinggi (tinggi– sangat tinggi) yaitu kecamatan Pujananting dengan luas 7.766,90Ha (6,44%) sedangkan Kecamatan dengan lahan terluas yang memiliki kinerja pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor dengan kategori rendah (sangat rendah–rendah) yaitu kecamatan Tanete Riaja dengan luas 7.408,46 Ha (6,14%).

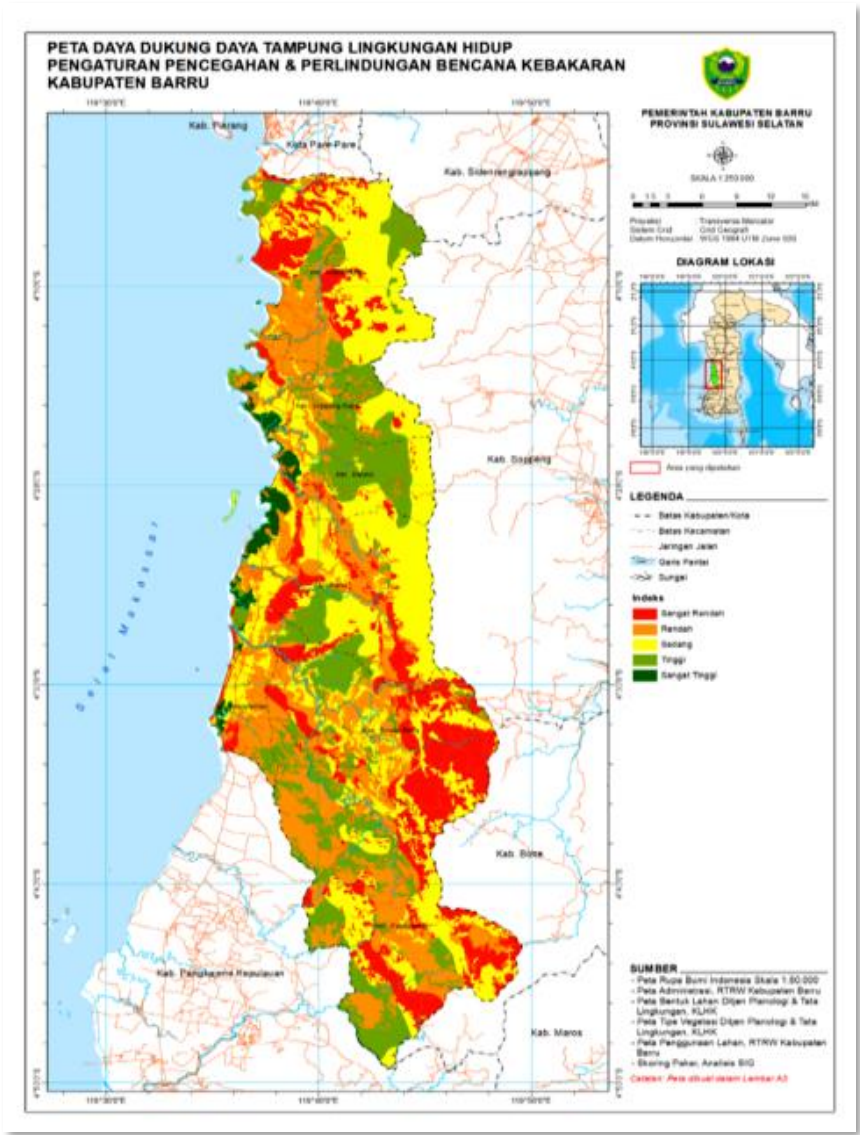
Gambar 2.10
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan
Perlindungan Bencana Longsor Kabupaten Barru Tahun 2022



Sumber:Dinas Lingkungan Hidup 2023

Untuk Fungsi Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran dimana kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya kebakaran.

Gambar 2.11
Peta Kinerja Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan
Bencana Kebakaran Kabupaten Barru Tahun 2023



Sumber:Dinas Lingkungan Hidup 2023

Secara umum di Kabupaten Barru lahan yang mampu melakukan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran dapat dibagi menjadi lahan berpotensi kategori tinggi (tinggi–sangat tinggi), kategori sedang dan kategori rendah (sangat rendah–rendah). Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran memiliki luasan sebesar 25.698,16 Ha (19,67%). Kategori sedang seluas 69.603,17 Ha (57,69%) dan kategori kelas rendah (sangat rendah–rendah) seluas 25.340,68 Ha (21%).

Adapun rincian distribusi luas kinerja jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Kecamatan	Sangat rendah – rendah		Sedang		Tinggi – sangat tinggi	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Tanete Riaja	917.43	0.76	13,358.00	11.07	201.65	0.17
2	Tanete Rilau	0	0.00	5,775.93	4.79	474.80	0.39
3	Barru	7.73	0.01	9,227.40	7.65	626.31	0.52
4	Soppeng Riaja	433.52	0.36	3,928.79	3.26	205.53	0.17
5	Mallusetasi	2,121.09	1.76	6,757.33	5.60	94.38	0.08
6	Pujananting	1,289.52	1.07	15,183.00	12.59	559.71	0.46
7	Balusu	0	0.00	4,208.96	3.49	49.05	0.04
Total		4,769.29	3.95	58,439.42	48.44	2,211.43	1.83

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Barru Tahun 2023

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Barru menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2018-2022 sebesar 0,78 persen, dimana Jumlah penduduk Kabupaten Barru pada Tahun 2018 sebesar 179.879 jiwa meningkat menjadi sebesar 191.895 jiwa pada Tahun 2022. Jumlah penduduk Kabupaten Barru dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, seperti diuraikan pada tabel berikut ini..

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju pertumbuhan Penduduk (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Tanete Riaja	24.877	24.990	25.702	26.016	26.265	13,69
2.	Tanete Rilau	36.439	36.673	37.788	38.429	38.858	20,25
3.	Barru	42.567	43.277	44.746	45.340	46.060	24,00
4.	Soppeng riaja	18.012	18.178	18.598	18.645	18.761	9,78
5.	Mallusetasi	26.968	27.100	27.746	28.059	28.218	14,70
6.	Pujananting	12.901	13.017	13.355	13.594	13.715	7,15
7.	Balusu	18.115	19.138	19.507	19.794	20.018	10,43
Total		179.879	182.373	187.442	189.877	191.895	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Data kepadatan penduduk Kabupaten Barru berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa pada tahun

2022 dengan jumlah penduduk sebesar 191.895 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Barru sebesar 163,35 Km².

Distribusi penduduk di Kabupaten Barru pada Tahun 2022 ini terlihat sangat tinggi di Kecamatan Barru yakni sebesar 46.060 jiwa atau 24,66% penduduk, lalu disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 38.858 jiwa atau 20,25%, Kecamatan Mallusetasi sebesar 28.218 jiwa atau 14,70%, Kecamatan Tanete Riaja sebesar 26.265 jiwa atau 13,69%, Kecamatan Balusu sebesar 20.018 jiwa atau 10,43%, Kecamatan Soppeng Riaja sebesar 18.761 jiwa atau 9,78% dan Kecamatan Pujananting sebesar 13.715 jiwa atau 7,15%.

Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Usia belum produktif (kelompok umur <14 tahun)
- b. Usia produktif (kelompok umur antara 15 - 64 tahun),
- c. Usia tidak produktif (kelompok umur > 64 tahun)

Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2022

No	Usia Non Produktif Dan Produktif	Jenis Kelamin		Penduduk n (jiwa)	Persen (%)
		laki2 n (jiwa)	perempuan n (jiwa)		
1.	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	23.810	22.308	46.118	24,14
2.	15-64 Tahun (Usia Produktif)	63.086	65.612	128.698	66,98
3.	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	7.355	9.724	17.079	8,88
Total		94.251	97.644	191.895	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru masih didominasi oleh penduduk yang berusia produktif.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk yang dibagi menjadi kelompok jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Struktur penduduk menurut jenis kelamin disuatu wilayah dapat dianalisis dengan menghitung rasio jenis kelamin (sex ratio) di wilayah tersebut. Rasio jenis kelamin merupakan angka yang didapat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk

perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Rasio jenis kelamin terakit penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana serta tingka kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.21
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kab.Barru Tahun 2018 s.d 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio (%)
		L	P	Total	
1	2018	88.213	92.296	180.509	96
2	2019	89.248	93.125	182.373	96
3	2020	91.963	95.429	187.392	96
4	2021	93.231	96.646	189.877	96
5	2022	94.251	97.644	191.895	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan berdasarkan rasio pada tahun 2022 yang sebesar 96 berarti dari 100 orang perempuan terdapat 96 orang laki-laki.

Rumah tangga dapat diartikan satu orang anggota atau sekelompok orang yang tinggal bersama tetapi dengan atau tidak memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan perkawinan. Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan jumlah rumah tangga pada tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga
Kab.Barru Tahun 2018 - 2022

Kode	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT)				
		2018	2019	2020	2021	2022
731101	Tanete Riaja	7.420	7.692	8.189	8.446	8.690
731102	Tanete Rilau	10.958	11.308	11.870	12.245	12.594
731103	Barru	12.803	13.321	14.028	14.149	14.917
731104	Soppeng Riaja	5.571	5.754	5.991	6.180	6.301
731105	Mallusetasi	8.205	8.438	8.888	9.086	9.328
731106	Pujananting	3.867	4.014	4.237	4.354	4.500
731107	Balusu	5.883	6.130	6.432	6.653	6.798
TOTAL		50.503	51.510	54.707	56.657	63.128

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Rumah Tangga di tiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2018 sebesar 50.503 RT meningkat sampai dengan tahun 2022 sebesar 63.128 RT.

Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu wilayah akan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan di Kabupaten Barru pada tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Barru
Tahun 2018 s.d 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Belum/Tidak Punya ijazah	59.606	60.425	62.996	63.970	63.057
2	Tamat SD	54.136	54.058	54.021	53.309	53.125
3	Tamat SMP	23.939	24.110	25.353	26.516	27.557
4	Tamat SMA	30.082	30.573	31.448	32.180	33.500
5	Diploma	2.734	2.740	2.780	2.795	2.869
6	Sarjana S1	9.432	9.849	10.143	10.425	11.061
7	Sarjana S2	558	590	630	657	701
8	Sarjana S3	22	24	21	25	25
Total		174.871	180.509	182.373	187.392	191.895

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Barru untuk kategori SMP hinga Sarjana S3 mengalami peningkatan, namun ironisnya penduduk yang belum/tidak punya ijazah juga meningkat.

Berdasarkan pengelompokan umur tersebut dapat diketahui rasio beban tanggungan (dependency ratio) yang dapat digunakan untuk melihat angka ketergantungan suatu wilayah. Rasio beban tanggungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Persentase rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) yang rendah menunjukkan rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Tabel 2.24
Rasio Ketergantungan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Usia <15 tahun (Jiwa)	44.974	44.776	45.478	45.828	46.118
2	Jumlah Penduduk usia>64 tahun (Jiwa)	15.285	16.340	16.275	16.865	17.079
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (Jiwa)	60.259	61.116	61.753	62.693	63.197
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun (Jiwa)	120.250	121.257	125.639	127.184	128.698
5	Rasio ketergantungan (%)	50,11	50,40	49,15	49,29	49,10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan Data yang diuraikan diatas, Kabupaten Barru memiliki Rasio Ketergantungan yang berfluktuatif pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 50,40 persen, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 49,10 persen.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatannya itu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB riil disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi), angka yang ditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam 17 sektor rincian kategori lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan

dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya.

Untuk mengetahui nilai dan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.25
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah), Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.581,31	1.652,72	1.662,67	1.751,02	1.829,94
2	Pertambangan dan Penggalian	130,68	138,15	139,11	144,10	148,21
3	Industri Pengolahan	232,09	253,70	247,14	259,09	282,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,10	6,39	6,80	7,28	7,41
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,62	5,10	5,80	6,08	6,69
6	Konstruksi	714,30	785	792,83	825,59	846,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	460,26	505,36	497,56	524,82	558,81
8	Transportasi dan Pergudangan	111,50	126,16	112,19	121,03	139,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43,32	48,28	48,24	50,57	58,43
10	Informasi dan Komunikasi	255,89	281,43	313,08	332,02	354,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	120,72	124,64	127,94	136,88	138,06
12	Real Estate	153,34	155,82	160,00	163,82	172,8
13	Jasa Perusahaan	1,14	1,25	1,18	1,24	1,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	338,93	375,96	371,71	376,89	395,40
15	Jasa Pendidikan	173,78	186,48	195,61	200,90	207,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,28	117,30	125,65	134,24	145,40
17	Jasa Lainnya	30,29	33,68	31,60	34,41	37,22
Jumlah PDRB		4.169,98	4.420,93	4.797,43	5.069,99	5.329,31

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.26
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru (Miliar Rupiah),
Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.333,00	2.458,99	2.528,15	2.808,89	3.109,27
2	Pertambangan dan Penggalian	206,58	219,09	225,39	236,21	252,37
3	Industri Pengolahan	319,94	355,33	348,63	373,45	421,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,20	6,44	6,84	7,40	7,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.16	6,96	7,93	8,41	9,47
6	Konstruksi	1.221,39	1.411,25	1.428,09	1.556,41	1.690,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	605,96	686,75	688,31	740,99	827,12
8	Transportasi dan Pergudangan	173,04	197,96	181,39	206,40	268,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63.73	73,22	75,78	80,59	96,93
10	Informasi dan Komunikasi	289,39	322,33	359,36	383,61	417,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	197,73	211,34	217,16	239,25	263,38
12	Real Estate	226,44	233,45	241,06	247,76	269,75
13	Jasa Perusahaan	1,51	1,74	1,67	1,79	2,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533,93	612	616,47	630,94	665,62
15	Jasa Pendidikan	235,93	257,93	273,55	279,55	293,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,43	162,04	180,57	198,01	217,42
17	Jasa Lainnya	47,76	54,37	51,94	57,56	64,78
Jumlah PDRB		5.961,95	6.614,10	7.271,22	8.057,26	8.878,37

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.27
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Barru (Persen), 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35.27	5,34	33,82	4,52	34,02	0,60	34,86	5,31	35,02	4,51
2	Pertambangan dan Penggalian	3.12	4,51	3,01	5,27	3,03	0,69	2,93	3,59	2,84	2,85
3	Industri Pengolahan	4,84	4,27	4,89	9,31	4,69	-2,59	4,63	4,48	4,75	8,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	7,01	0,09	4,66	0,09	6,49	0,09	6,98	0,09	1,86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	7,79	0,10	10,47	0,11	13,63	0,10	4,89	0,11	10,01
6	Konstruksi	18,47	10,12	19,41	9,90	19,21	1,00	19,32	4,13	19,04	2,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.16	8,84	9,44	9,80	9,26	-1,54	9,20	-5,48	9,32	6,48
8	Transportasi dan Pergudangan	2.62	12,83	2,72	13,14	2,44	-11,07	2,56	7,87	3,03	14,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.96	10,59	1,01	11,45	1,02	-0,08	1,00	4,83	1,09	15,54
10	Informasi dan Komunikasi	4.38	9,93	4,43	9,98	4,84	11,25	4,76	6,05	4,71	6,87
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	2,99	2,51	2,91	3,25	2,92	2,65	2,97	6,99	2,97	0,86
12	Real Estate	3,42	5,49	3,21	1,62	3,24	2,68	3,07	2,39	3,04	5,47
13	Jasa Perusahaan	0.02	9,67	0,02	10,27	0,02	-5,80	0,02	4,85	0,02	16,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,07	9,41	8,42	10,93	8,29	-1,13	7,83	1,40	7,50	4,91
15	Jasa Pendidikan	3.57	5,29	3,55	7,31	3,68	4,90	3,47	2,71	3,31	3,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.20	5,58	2,23	8,33	2,43	7,12	2,56	6,83	2,45	8,31
17	Jasa Lainnya	0.72	11,01	0,75	11,19	0,70	-6,18	0,71	8,89	0,73	8,18
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai produk domestik regional bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, begitupula distribusi masing-masing kategori

lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) berfluktuatif dari tahun tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB menurut sektor/kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,34	4,52	0,6	5,31	4,51
2	Pertambangan dan Penggalian	4,51	5,72	0,69	3,59	2,85
3	Industri Pengolahan	4,27	9,31	-2,59	4,84	8,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,01	4,66	6,49	6,98	1,86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,79	10,47	13,63	4,89	10,01
6	Konstruksi	10,12	9,90	1	4,13	2,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,84	9,80	-1,54	5,48	6,48
8	Transportasi dan Pergudangan	12,83	13,14	-11,07	7,87	14,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,59	11,45	-0,08	4,83	15,54
10	Informasi dan Komunikasi	9,93	9,98	11,25	6,05	6,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	3,25	2,65	6,99	0,86
12	Real Estate	5,49	1,62	2,68	2,39	5,47
13	Jasa Perusahaan	9,67	10,27	-5,8	4,85	16,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,41	10,93	-1,13	1,40	4,91
15	Jasa Pendidikan	5,29	7,31	4,9	2,71	3,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,58	8,33	7,12	6,83	8,31
17	Jasa Lainnya	11,01	11,19	-6,18	8,89	8,18
Produk Domestik Regional Bruto		6,48	7,11	7,41	4,77	5,11

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif namun cenderung meningkat setelah mengalami resesi pada saat pandemic di tahun 2021. Sementara itu perbandingan PDRB atas Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan Wilayah sekitar diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Perbandingan PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) dan Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 – 2021 (Miliar Rupiah)

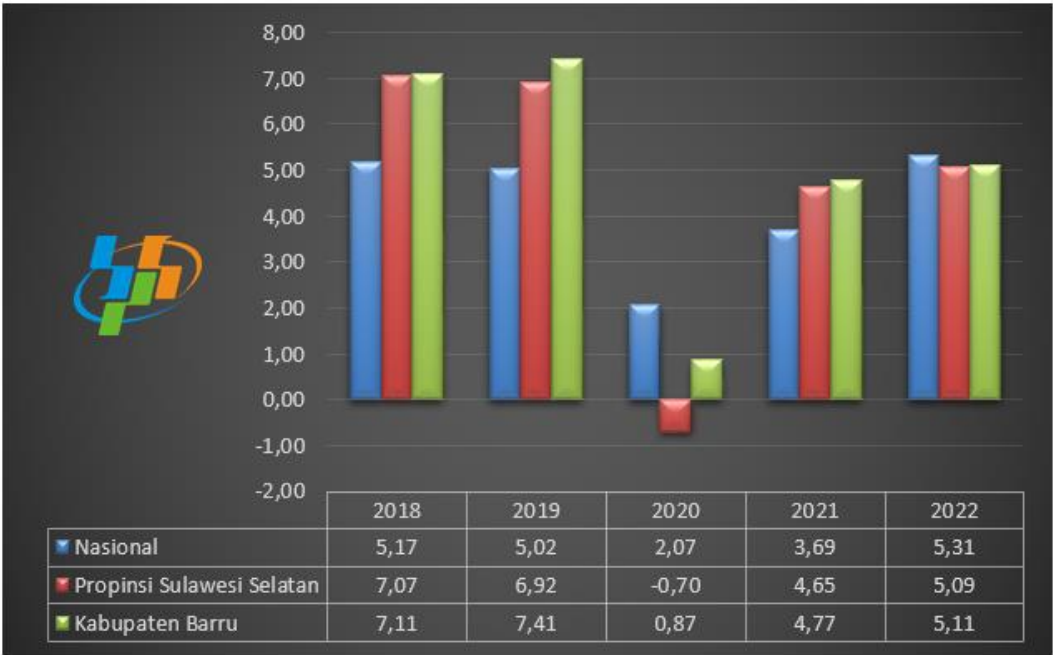
No	Kabupaten/ Kota	ADHB (Miliar Rupiah)			ADHK (Miliar Rupiah)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Barru	7.432,30	8.057,26	8.878,37	4.839,12	5.069,99	5.329,31
2	Kota Pare-pare	7.323,65	7.825,98	8.697,28	4.944,03	5.161,92	5.468,43
3	Kab. Soppeng	11.382,12	12.426,78	13.741,84	7.146,65	7.585,98	8.054,42
4	Kab.Sidrap	14.073,43	15.250,13	16.699,00	8.401,06	8.866,07	9.297,02
5	Kab. Pangkep	25.662,55	27.574,74	30.481,86	16.915,23	17.500,61	18.363,59
6	Kab. Bone	36.560,64	39.369,68	43.640,84	22.053,74	23.273,87	24.491,73

Sumber : BPS Tahun 2023

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku seperti yang diuraikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota wilayah sekitar, Kabupaten Barru memiliki PDRB baik ADHK maupun ADHB yang lebih kecil dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan Produk domestik regional bruto (PDRB) yang biasa dikenal dengan pertumbuhan ekonomi dan dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018 – 2022

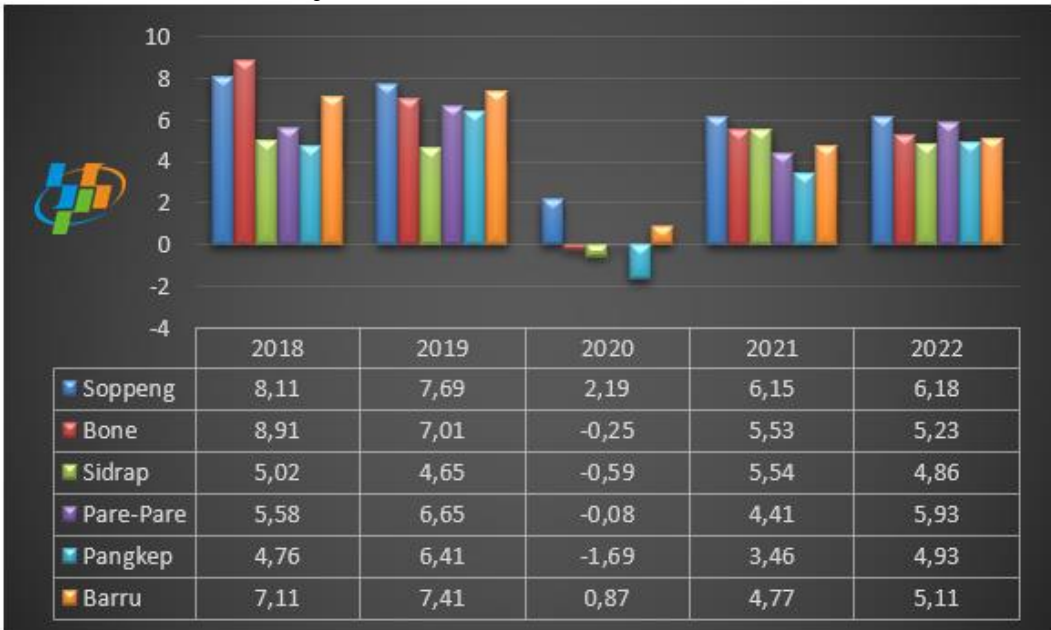


Sumber : BPS Tahun 2022

Grafik diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, dan kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2022 berada lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada pada angka 5.11 setelah di tahun 2020 mengalami resesi pada angka 0,87 akibat pandemi covid 19. Pertumbuhan ekonomi setelah masa pandemi covid19 di tahun 2021 pelan-pelan memperlihatkan trend yang positif, program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah menunjukkan potensi keberhasilan dalam stabilisasi ekonomi nasional dingga ke daerah..

Sementara untuk Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang berbatasan langsung yakni Kab. Pangkep, Kab. Soppeng. Kab. Sidrap, Kab.Bone dan Kota Parepare, Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru dari tahun 2020 - 2022 secara gradual mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif.

Produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah dengan melihat peranan masing-masing sektor lapangan usaha terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Struktur perekonomian Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barru Tahun 2018 - Tahun 2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,27	33,82	34,02	34,86	35,02
2	Pertambangan dan Penggalian	3,12	3,01	3,03	2,93	2,84
3	Industri Pengolahan	4,84	4,89	4,69	4,63	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,10	0,11	0,1	0,11
6	Konstruksi	18,47	19,41	19,21	19,32	19,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,16	9,44	9,26	9,2	9,32

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
		%	%	%	%	%
8	Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,72	2,44	2,56	3,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	1,01	1,02	1,09	1,09
10	Informasi dan Komunikasi	4,38	4,43	4,84	4,76	4,71
11	Jasa Keruangan dan Asuransi	2,99	2,91	2,92	2,97	2,97
12	Real Estate	3,42	3,21	3,24	3,07	3,04
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,07	8,42	8,29	7,83	7,50
15	Jasa Pendidikan	3,57	3,55	3,68	3,47	3,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,23	2,43	2,46	2,45
17	Jasa Lainnya	0,72	0,75	0,7	0,71	0,73
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

2. PDRB Per kapita

Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi untuk melihat perkiraan pendapatan masyarakat pada waktu terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

Tahun	ADHB (Rp.)	ADHK (Rp.)
2018	38.094.607	25.725.509
2019	41.711.191	27.520.350
2020	42.472.955	27.653.853
2021	43.429.469	27.327.826
2022	47.500.758	28.512.702

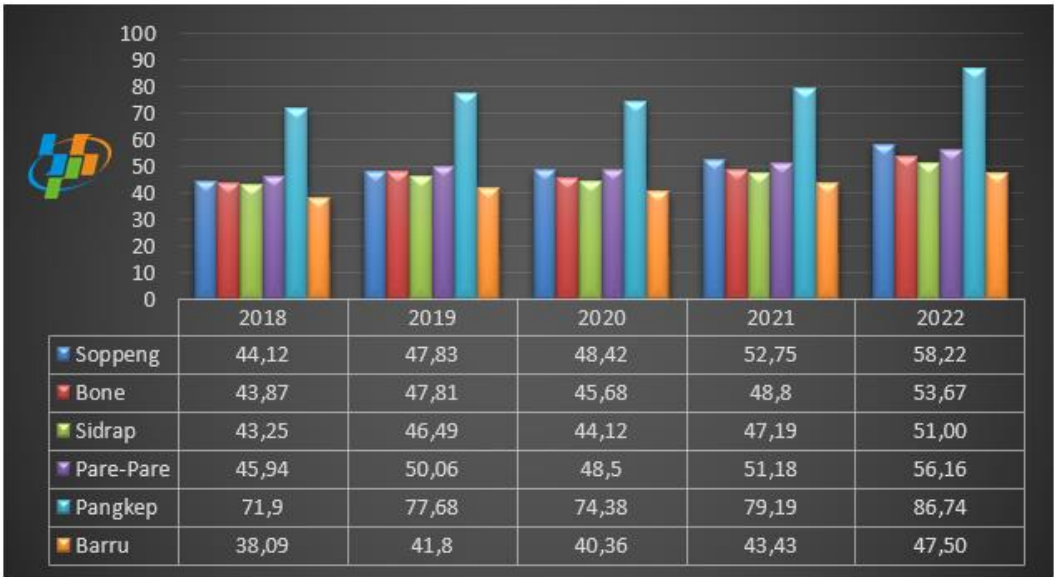
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (HK) mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai tahun 2022. kondisi pandemi covid19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita di tahun 2021, sehingga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (HK), PDRB Perkapita atas dasar harga Berlaku (Hb) mengalami peningkatan tahun 2018 sampai tahun 2022. Peningkatan signifikan dalam periode tahun 2018-2022 terjadi pada tahun 2022 yang mana capaian PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tersebut mencapai 47,5 juta.

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa capaian PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku di tahun 2022 telah melebihi target dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 sebesar 43,9 juta atau mencapai 108,20 persen dari target RPJMD.

Grafik 2.3

Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018 s.d Tahun 2022 (dlm Juta Rupiah)



Sumber : BPS Tahun 2023

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah sekitar, di Kabupaten Barru masih stabil, namun demikian Kabupaten Barru tetap berada di posisi paling bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada wilayah sekitarnya.

3. Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga- harga secara umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, hal ini bila berlebihan dapat berdampak penurunan daya beli masyarakat.

Data inflasi Kabupaten Barru sampai hari ini tidak tersedia (tidak dihitung) oleh Kabupaten Barru Dalam Angka (BPS) hanya ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan laju inflasi yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kota Parepare, dan kota Palopo. Kabupaten/kota yang paling dekat dengan Kabupaten Barru adalah Kota Parepare. Laju inflasi Kabupaten/Kota yang menjadi sampel Kabupaten Barru Dalam Angka di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Perbandingan Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 -2022

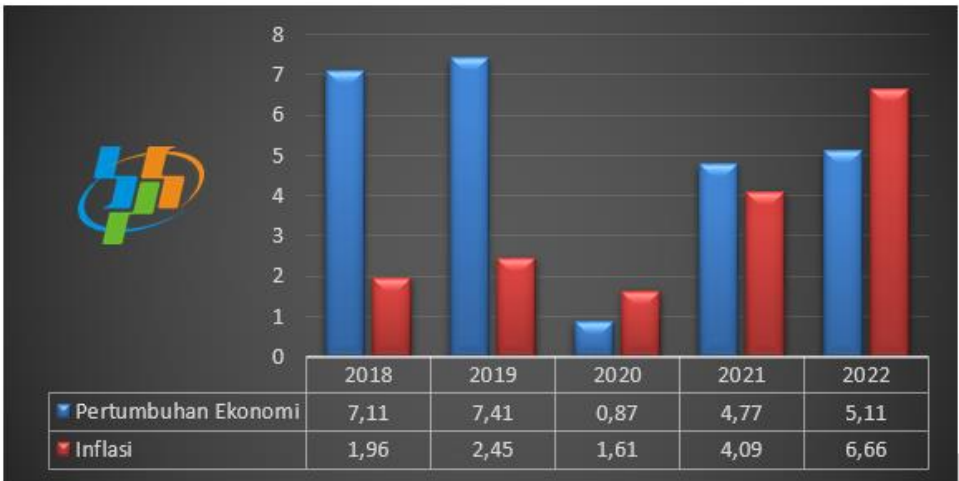
No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Bulukumba	3,85	2,25	2,30	2,16	4,12
2	Kab. Bone	4,69	1,64	1,89	2,26	5,52
3	Kota Makassar	3,48	2,43	2,13	2,26	5,81
4	Kota Pare-pare	1,96	2,45	1,61	4,09	6,66
5	Kota Palopo	4,19	1,91	1,21	2,96	5,13

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas trend inflasi di hampir seluruh kota di Sulawesi Selatan pada rentang tahun 2018-2020 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi mulai meningkat di periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Inflasi tertinggi di tahun 2022 terjadi di Kabupaten Bone dan Kota Pare-Pare. Pada tahun 2021, Kota Pare-Pare, laju inflasinya meningkat drastis dari 1,21 pada tahun 2020 menjadi 4,09 pada tahun 2021, hal ini tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barru, karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Pare-Pare yang berbatasan langsung dengannya.

Dalam beberapa teori laju inflasi yang rendah dan stabil akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Barru memperlihatkan inflasi yang tidak stabil atau fluktuatif, namun hal ini masih dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi antara 7.11 – 7.41 hingga tahun 2019 meskipun di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi turun ke angka 0.87, tingginya inflasi di tahun 2021 dan 2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru hal ini dikarenakan sektor rill masih mampu terdorong untuk berkembang serta sektor perdagangan berjalan dengan baik. Secara rinci hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 2.4
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

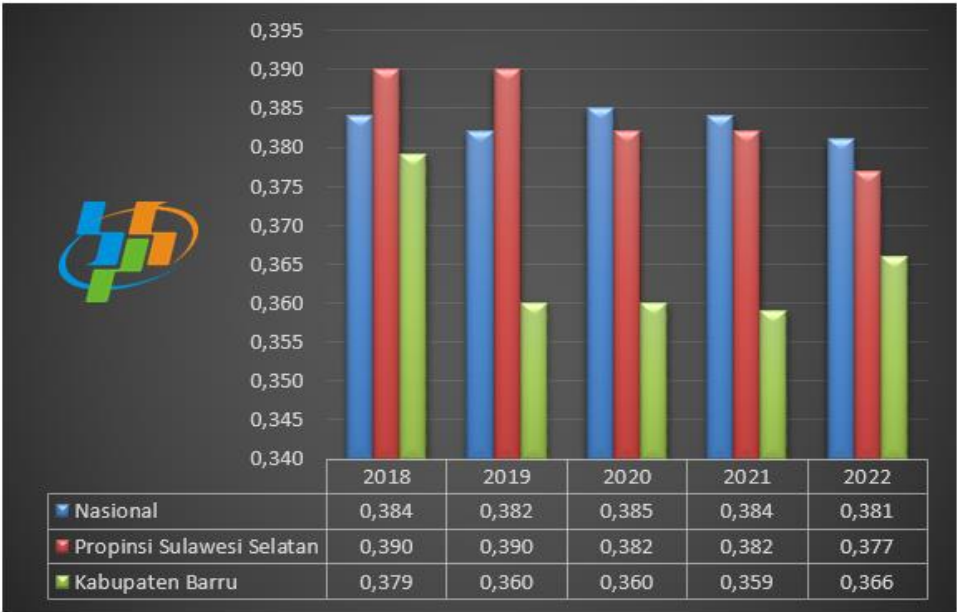
4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator- Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

- 1. $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 2. $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- 3. $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5
Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru meskipun pada tahun 2018 meningkat sebesar 0.379, namun pada tahun 2022 menurun menjadi 0.366. Penurunan Indeks Gini menunjukkan semakin meratanya pendapatan masyarakat yang berarti semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru.

Tabel 2.33
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar
Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Barru	0,379	0,360	0,357	0,359	0,366
2	Kota Pare-pare	0,382	0,350	0,373	0,381	0,379
3	Kab. Soppeng	0,359	0,392	0,357	0,406	0,386
4	Kab.Sidrap	0,340	0,284	0,349	0,358	0,354
5	Kab. Pangkep	0,321	0,328	0,345	0,363	0,334
6	Kab. Bone	0,412	0,366	0,404	0,383	0,376

Sumber : BPS Tahun 2023

Berdasarkan Data yang diuraikan diatas, Kabupaten Barru memiliki ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) yang berfluktuatif pada

periode tahun 2018-2022, pada periode tahun 2018-2020 mengalami penurunan, tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2018 – tahun 2020 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsen pemerintah Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki peran yang cukup besar. Yang perlu menjadi perhatian adalah pada tahun 2022 indeks gini kabupaten barru mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa indek gini di tahun 2022 yang sebesar 0,366 belum mencapai target (belum sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 0,35.

Pada gambar berikut menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh semakin menurunnya Indeks Gini berarti bahwa semakin inklusifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Gini secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 2.6
Hubungan Indeks Gini dengan pertumbuhan ekonomi
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

6. Indeks Williamson

Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang digunakan dalam melihat disparitas yang terjadi antar wilayah dan lebih sensitif terhadap perubahan ketimpangan (Rustiadi *et al.* 2011). Indeks wiliamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan untuk melihat disparitas antara wilayah secara horizontal. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika $Y_i = Y$ maka akan dihasilkan indeks = 0, yang berarti tidak adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks lebih besar dari 0 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di satu kabupaten.

Menurut Rustiadi *et al.* (2011), wilayah yang memiliki PDRB per kapita tinggi, dan jumlah penduduknya relatif kecil, tingkat kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Namun, besaran PDRB per kapita suatu wilayah relatif moderat apabila dibandingkan dengan wilayah lain yang kecil dengan jumlah penduduknya relatif besar, sehingga akan menyebabkan kesenjangan secara keseluruhan. Adapun indeks Williamson Kabupaten Barru seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketimpangan Williamson	0.27	0.29	0,29	0,29	0,29

Sumber : Data Olahan tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat tingkat disparitas yang terjadi di Kabupaten Barru berdasarkan PDRB Perkapita per Kecamatan. Dapat dilihat bahwa tingkat disparitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Barru pada tahun 2018 hingga 2022 cenderung sama nilainya 0,29. perhitungan indeks Williamson sangat tergantung pada data PDRB per kecamatan. Meskipun nilai indeks menunjukkan tingkat disparitas wilayah yang rendah yang berarti bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi wilayah dapat menekan terjadinya disparitas wilayah, namun kecendrungan terjadinya peningkatan nilai indeks

menunjukkan bahwa jika tidak diantisipasi di masa mendatang akan rentan terjadi disparitas wilayah.

Sementara untuk melihat tingkat hirarki perkembangan wilayah berdasarkan jumlah ketersediaan fasilitas, luas wilayah, jumlah penduduk serta jarak tempuh wilayah ke pusat pelayanan digunakan metode skalogram. Metode yang banyak digunakan untuk menentukan hierarkhi wilayah oleh Struktural Analisis adalah *Guttman scales*. Metode ini mengidentifikasi hierarkhi pusat dari fasilitas umum yang dimiliki suatu wilayah. Skalogram yang merupakan penggabungan atau penyederhanaan Skala Guttman. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu Tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya.

Indeks Perkembangan Wilayah dikelompokkan ke dalam tiga kelas hirarki, yaitu; hirarki I (tinggi), hirarki II (sedang), hirarki III (rendah). Penentuannya didasarkan pada nilai hasil standar deviasi IPW dan nilai rataannya. Nilai yang didapat untuk selang hirarki dan digunakan untuk menentukan kelas hirarki dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

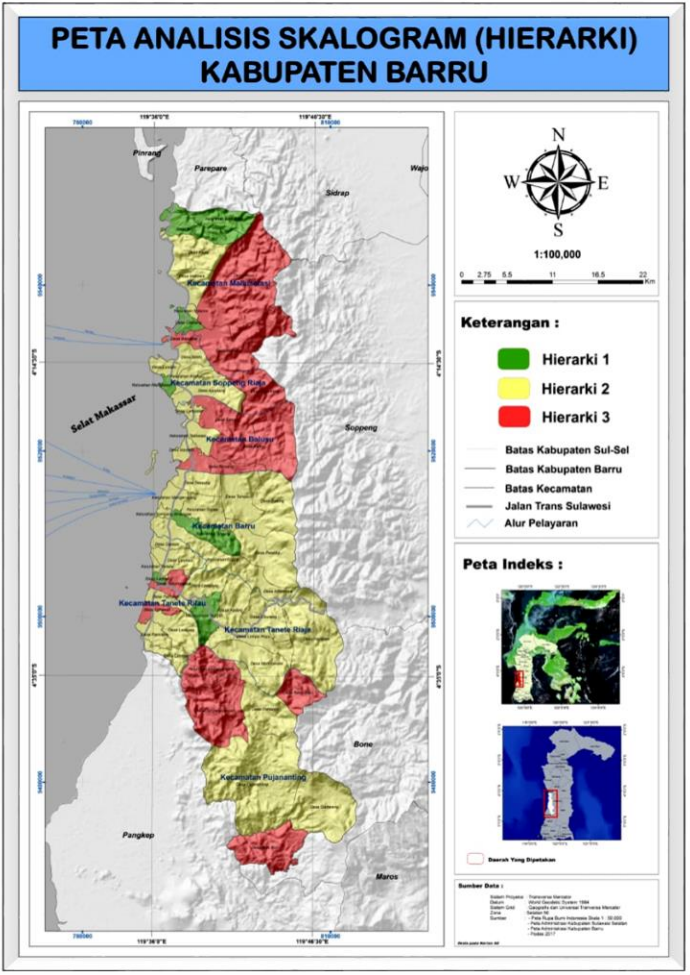
Tabel 2.35
Penentuan nilai selang kelas hirarki untuk Analisis Skalogram

No	Kelas	Nilai Selang (x)	Tingkat Hirarki
1	Hirarki I	$X > [\text{rataan} + (\text{St Dev. IPW})]$	Tinggi
2	Hirarki II	$\text{rataan} < X < (\text{St Dev. IPW})$	Sedang
3	Hirarki III	$X < \text{rataan}$	Rendah

Tingkat perkembangan desa/kelurahan di tujuh kecamatan di Kabupaten Barru ditentukan dengan metode skalogram dimodifikasi dan dicerminkan oleh nilai Indeks Perkembangan Wilayah (IPW). Umumnya, semakin tinggi nilai IPW, semakin tinggi pula kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPW berarti semakin rendah kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya.

Dari hasil analisis skalogram dapat terlihat tingkat perkembangan wilayah desa dari pendekatan ketersediaan infrastruktur. Secara spasial hasil perhitungan skalogram dengan tiga hirarki dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.12
Peta Hasil Skalogram Kab.Barru Tahun 2022



Sumber : Data Olahan tahun 2023

Berdasarkan Gambar diatas terlihat penyebaran tingkat hirarki wilayah dari hasil analisis skalogram dimana tiga tingkatan hirarki di jelaskan sebagai berikut :

- Tingkat hirarki I (tinggi) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan tinggi. Terdapat tujuh (7) desa/kelurahan yang termasuk dalam hirarki I, atau hanya sekitar 12,73% desa/kelurahan dari seluruh jumlah desa yang ada di Kabupaten Barru. Hirarki I umumnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang lebih tinggi, lebih lengkap, dan tentunya lebih memadai daripada desa/kelurahan dengan hirarki yang lebih rendah (hirarki II dan III).
- Tingkat hirarki II (sedang) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan sedang. Terdapat 35 desa atau

sekitar 63,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Barru. Adapun wilayah desa/kelurahan dengan tingkat hirarki II mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut lebih sedikit dari hirarki I; (2) umumnya letaknya berada di pinggir wilayah berhirarki I dengan tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan wilayah di hirarki I.

- Tingkat hirarki III (rendah) merupakan wilayah desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan rendah. Terdapat 13 desa/kelurahan atau sekitar 23,64% dari seluruh jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barru. Desa/kelurahan pada tingkat hirarki III pada umumnya memiliki tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan desa/kelurahan yang termasuk ke dalam tingkat hirarki yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, untuk fasilitas-fasilitas tertentu dengan kapasitas pemenuhan kebutuhan yang lebih kompleks, desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih rendah masih harus mengaksesnya di desa/kelurahan dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi.

7. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Angka Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk

mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program;

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)	garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)
1	2018	15.680	173.451	9,04	307.904
2	2019	14.920	182.373	8,57	322.248
3	2020	14.440	187.392	8,26	337.047
4	2021	15.180	189.377	8,68	351.924
5	2022	14.730	191.895	8,40	368.160

Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan Kabupaten Barru berfluktuatif, proses pembangunan di kabupaten Barru terus berkontribusi dalam trend pertumbuhan penduduk miskin, meskipun relatif tidak stabil. Selain itu fokus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung maupun program-program prioritas pembangunan lainnya terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru. Selain itu

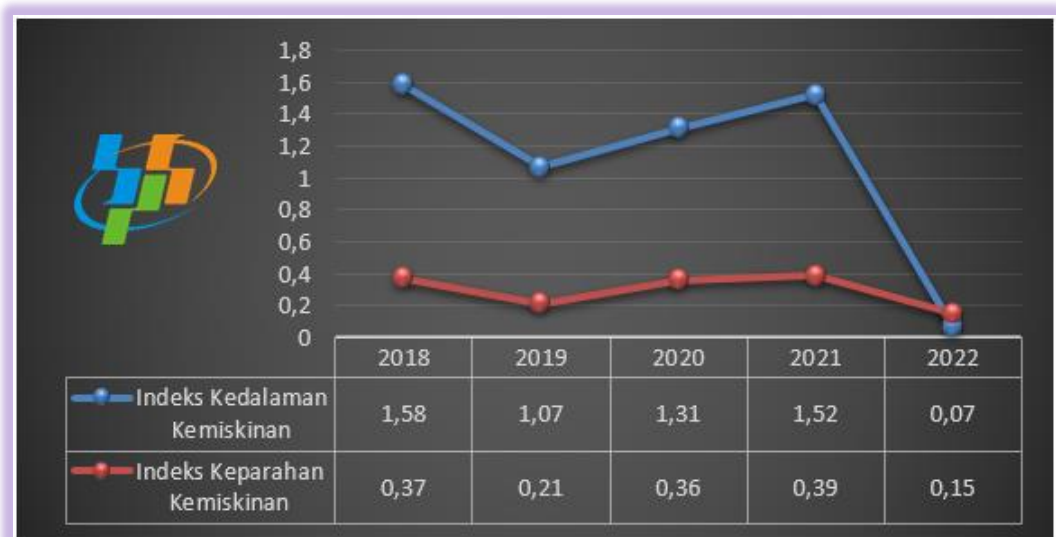
secara simultan, pemerintah kabupaten Barru juga harus fokus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang menjadi program strategis nasional.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa angka kemiskinan di tahun 2022 yang sebesar 8,40 belum mencapai target (belum sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 7,45 atau terdapat selisih 0,95 persen.

Selanjutnya, identifikasi kondisi kemiskinan dari dimensi indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan trend penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022 sebagaimana diuraikan pada grafik berikut.

Grafik 2.7

Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022



Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka tahun 2023

Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas terlihat bahwa angka P1 dan P2 Kabupaten Barru berfluktuasi, sementara pada Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini berindikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Barru cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Adapun perbandingan persentase kemiskinan antara Kabupaten Barru dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.8
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Barru selalu berada di bawah angka kemiskinan Nasional, sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 juga berhasil berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/ Kota	2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2	% Pdd Miskin	P1	P2
1	Kab. Barru	9,04	1,43	0,32	8,57	1,07	0,21	8,26	1,31	0,36	8.68	1.52	0.39	8,40	0,98	0,15
2	Kota Pare-pare	5,59	0,75	0,17	5,26	0,71	0,15	5,44	0,94	0,24	5.40	0.72	0.13	3,45	0,56	0,09
3	Kab. Soppeng	7,50	1,39	0,37	7,25	0,69	0,12	7,59	0,83	0,16	7.53	1.24	0.28	7,49	0,06	0,21
4	Kab.Sidrap	5,16	0,94	0,23	4,79	0,60	0,13	5,05	0,82	0,19	5.04	0.64	0.13	5,11	0,06	0,21
5	Kab. Pangkep	15,10	3,12	0,92	14,06	1,81	0,31	13,96	2,52	0,71	14.28	2.78	0.78	6,05	2,09	0,49
6	Kab. Bone	10,44	1,44	0,30	10,06	1.35	0,29	10,68	1.59	0,36	10.52	1.67	0.42	10,58	1,35	0,26

Sumber : BPS Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi sangat besar terutama melalui pengeluaran pemerintah untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pemerintahan, berbagai proyek pembangunan memberikan stimulasi kepada pengusaha-pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan usahanya, grafik dibawah ini menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan perubahan persentase penduduk miskin Kabupaten Barru.

Grafik 2.9
Perbandingan perubahan Persentase Penduduk Miskin dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan grafik diatas terlihat korelasi yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin. Jika Pertumbunan ekonomi meningkatkan persentase penduduk miskin juga menurun terutama tercermin dalam dua tahun pertama yakni tahun 2018–2019. Berbeda dengan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemic Covid 19. Peningkatan kesejahteraan dan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.

8. Persentase PAD terhadap pendapatan

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang sumbernya adalah pajak dan retribusi daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk mengetahui proporsi PAD

pada pendapatan daerah. Adapun persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Persentase PAD terhadap Pendapatan di Kabupaten Barru
Tahun 2020-2022

No	Tahun	PAD (Rupiah)	Total Pendapatan (Rupiah)	Persentase (%)
1	2020	101.324.046.920,50	914.860.358.822,21	11.08
2	2021	84.872.841.440	940.680.195.326	9,02
3	2022	80.653.632.709	902.412.131.655	8,93

Sumber : BKAD Kab Barru Tahun 2022/SIPD Keuangan Tahun 2023

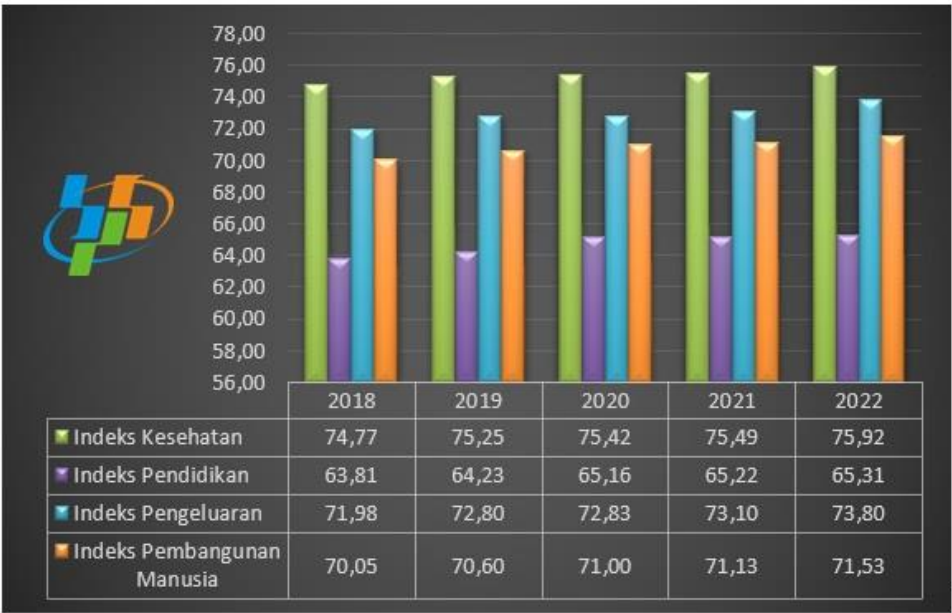
PAD Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan trend yang kurang baik, dimana angkanya menurun tiap tahunnya. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian daerah.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Adapun IPM Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022



Sumber :Kabupaten Barru dalam Angka 2023

IPM Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan trend positif, dimana angkanya meningkat tiap tahunnya. Namun ketika disandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti yang tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.11

Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Sementara itu, untuk perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar yang terdiri dari Kabupaten Pangkep, Bone, Soppeng, Sidrap dan Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.12

Perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018 – 2022



Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka 2023

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Kabupaten Barru untuk IPM tahun 2022 berada pada posisi ketiga setelah Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri Kabupaten Barru di tahun 2022 berada pada posisi 8 diantara 24 Kabupaten/Kota setelah tahun 2020 pada posisi ke 15.

Untuk indikator pembangun IPM sendiri pada Tahun 2015 metode perhitungan IPM telah dilakukan revisi/perbaikan dengan menyesuaikan metode yang dilakukan *United Nation Development Programme* (UNDP). Adapun indikatornya adalah :

a. Indeks Kesehatan

Diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

b. Indeks Pendidikan

Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah dimana angka harapan lama sekolah mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata lama bersekolah merupakan angka yang menggambarkan tingkat capain penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interpretasinya bahwa semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.

c. Paritas Daya Beli

Dikenal dengan *Purchasing Power Parity* (PPP); adalah PDRB riil per kapita yang telah disesuaikan dengan menggunakan PDRB riil per kapita, berarti mengasumsikan bahwa hasil pendapatan bruto daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan indikator pendukungnya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68.60	68,91	69,02	69,07	69,35
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.56	13,57	13,58	13,59	13,61
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.86	7,96	8,23	8,24	8,25
4	Paritas Daya Beli (Rp.000.000)	10.62	10,91	10,92	11,02	11,27
IPM		69.07	69.56	69.56	71,13	71,53

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Angka statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Barru, dibuktikan dengan nilai IPM pada periode tahun 2018-2022 yang cenderung mengalami peningkatan.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa capaian IPM di tahun 2022 yang sebesar 71,53 belum mencapai target (belum sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 71,79.

2. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan digambarkan melalui Angka Harapan Hidup yang mempersentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barru jika dibandingkan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar tersaji secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.13
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2022

Tabel 2.40
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	AHH (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Barru	68.60	68.91	69.02	69.07	69,35
2	Kota Pare-pare	70.88	71.18	71.27	71.31	71,57
3	Kab. Soppeng	69.02	69.43	69.65	69.81	70,20
4	Kab.Sidrap	69.15	69.59	69.83	70.01	70,41
5	Kab. Pangkep	66.12	66.49	66.66	66.78	67,12
6	Kab. Bone	66.50	66.88	67.07	67.21	67,57

Sumber : BPS Tahun 2023

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa meskipun dengan pergerakan lambat, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barru selalu meningkat sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian provinsi sulsel dan wilayah sekitar, AHH Kabupaten Barru berada di posisi dua terbawah, dengan menyisakan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Pangkep yang lebih rendah dibanding capaian Kabupaten Barru. Pemerintah Kabupaten Barru perlu memperhatikan pembangunan dibidang

kesehatan sebagai investasi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM. Masyarakat yang terbiasa berlaku hidup bersih dan sehat, berpeluang lebih produktif dan menghemat pengeluaran biaya berobat sehingga menyumbangkan peluang hidup sejahtera lebih besar.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa capaian angka usia harapan hidup pada tahun 2022 yang sebesar 69,35 sudah melebihi target apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 69,05.

3. Indeks Pendidikan

Indikator pembangun IPM berikutnya adalah Indeks Pendidikan yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk angka Harapan Lama sekolah Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jika disandingkan antara capaian HLS Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitar disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.14

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Tabel 2.41
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	HLS (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Barru	13.56	13.57	13,58	13,59	13,61
2	Kota Pare-pare	14.47	14.49	14.50	14.51	14.52
3	Kab. Soppeng	12.57	12.73	12.90	13.05	13.20
4	Kab.Sidrap	12.91	12.93	12.94	12.95	13,01
5	Kab. Pangkep	12.41	12.51	12.76	12.77	12.78
6	Kab. Bone	12.67	12.80	12.88	12.98	12.99

Sumber : BPS Tahun 2023

Berdasarkan data statistik di atas terlihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barru lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan capaian Provinsi Sulawesi Selatan begitupun dengan Wilayah Sekitar, kecuali Kota Parepare yang selalu menempati posisi teratas.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka harapan lama sekolah tahun 2022 yang sebesar 13,61 sudah mencapai target apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang juga sebesar 13,61.

Selanjutnya masih dari Dimensi Pendidikan, Indikator pembangun IPM Lainnya adalah angka Rata-rata lama sekolah (RLS). Perbandingan antara capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.15
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Tabel 2.42
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	RLS (Tahun)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Barru	7.86	7.96	8.23	8.24	8.25
2	Kota Pare-pare	10.29	10.30	10.45	10.65	10.66
3	Kab. Soppeng	7.63	7.74	7.81	7.82	7.96
4	Kab.Sidrap	7.79	7.83	7.84	7.94	8.04
5	Kab. Pangkep	7.49	7.60	7.66	7.92	8.05
6	Kab. Bone	6.97	6.98	7.15	7.23	7.36

Sumber : BPS Tahun 2023

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Barru berbeda dengan capaian Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk sektor pendidikan lainnya yang merupakan pendukung IPM, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barru capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional, sementara berfluktuatif jika dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada posisi kedua setelah Kota Parepare jika dibandingkan dengan wilayah sekitar.

Grafik 2.16
Perbandingan Angka Melek Huruf usia 15 tahun ke atas Kab.Barru Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2018 – 2022



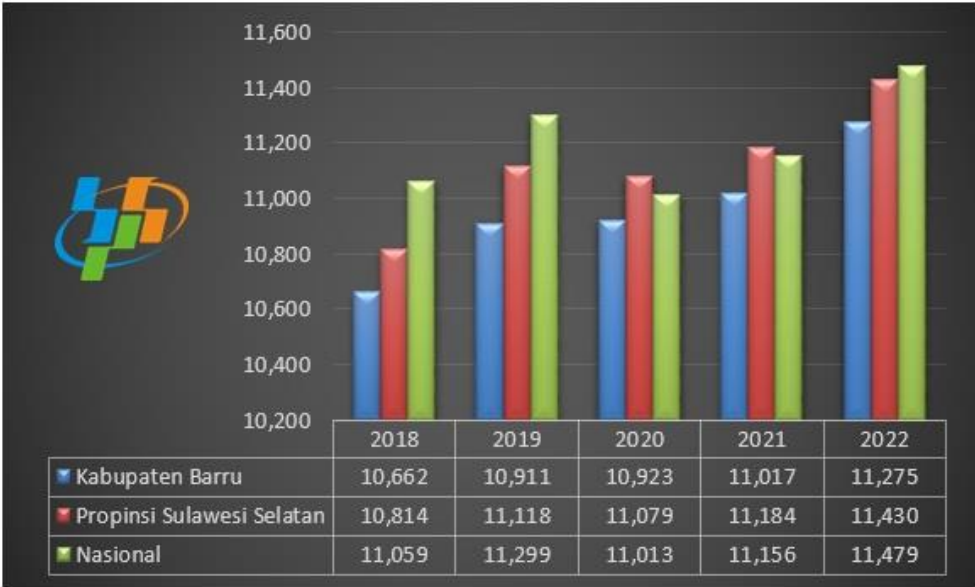
Sumber : BPS Tahun 2023

4. Paritas Daya Beli/Pengeluaran Per Kapita

Indikator standar hidup layak pada komponen IPM diproyeksi berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Standar hidup layak menggambarkan tingkat

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi dan pemerataannya. Capaian Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru Tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan wilayah sekitar lainnya disajikan secara berturut-turut berikut ini.

Grafik 2.17
Perbandingan Pengeluran Per Kapita Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018 – 2022
(dlm Ribu/Orang/Tahun)



Sumber : BPS Tahun 2023

Tabel 2.43
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Barru dengan wilayah Sekitar Tahun 2018 – 2022
(dalam Ribu/Orang/Tahun)

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Barru	10.662	10.911	10.923	11.017	11.275
2	Kota Pare-pare	13.303	13.648	13.663	13.786	14.027
3	Kab. Soppeng	9.291	9.444	9.483	9.558	9.756
4	Kab.Sidrap	11.834	12.039	12.073	12.201	12.379
5	Kab. Pangkep	11.197	11.392	11.405	11.519	11.817
6	Kab. Bone	8.686	8.954	8.963	9.030	9.277

Sumber : BPS Tahun 2023

Berdasarkan statistik di atas terlihat bahwa Paritas Daya Beli yang diproyeksi dengan pengeluaran per kapita Kabupaten Barru telah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya namun tetap perlu mendapat perhatian, dikarenakan jika dibandingkan dengan capaian Nasional

dan Provinsi masih rendah, juga apabila disandingkan dengan wilayah sekitar.

5. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tiak terserap di dunia kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	56,73	58,55	57,18	58,14	62,36
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,38	5,79	6,39	6,74	5,32

Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Sepanjang tahun 2018 – 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di kabupaten barru mengalami fluktuasi, namun pada periode tahun 2020-2022 terjadi trend peningkatan pasca pandemi dari 57,18% pada tahun 2020 meningkat di tahun 2022 menjadi 62,36%. Selanjutnya, untuk data tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan trend yang fluktuatif, dengan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,74% dan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,32%, kalau ditelaah lebih lanjut, dari tahun 2018 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan tingkat pengangguran, hal ini dipicu karena banyaknya pekerja yang merupakan penduduk asli Kabupaten Barru tetapi bekerja di luar dan dirumahkan kembali ke kampung halaman padaa saat pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi angka pengangguran pada periode empat tahun tersebut.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022

yang sebesar 5,32 sudah melampaui target apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 5,88.

Grafik 2.18

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Tabel 2.45

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/ Kota	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kab. Barru	57,39	59,40	57.18	58,14	62,36
2	Kota Pare-pare	64,09	63,27	65.53	66,94	63,60
3	Kab. Soppeng	63,64	57,47	57.5	58,94	61,90
4	Kab.Sidrap	56,22	55,30	56.92	58,70	57,60
5	Kab. Pangkep	63,50	61,22	63.85	64,43	63,30
6	Kab. Bone	58,28	60,54	60.57	65,67	67,40

Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka 2023

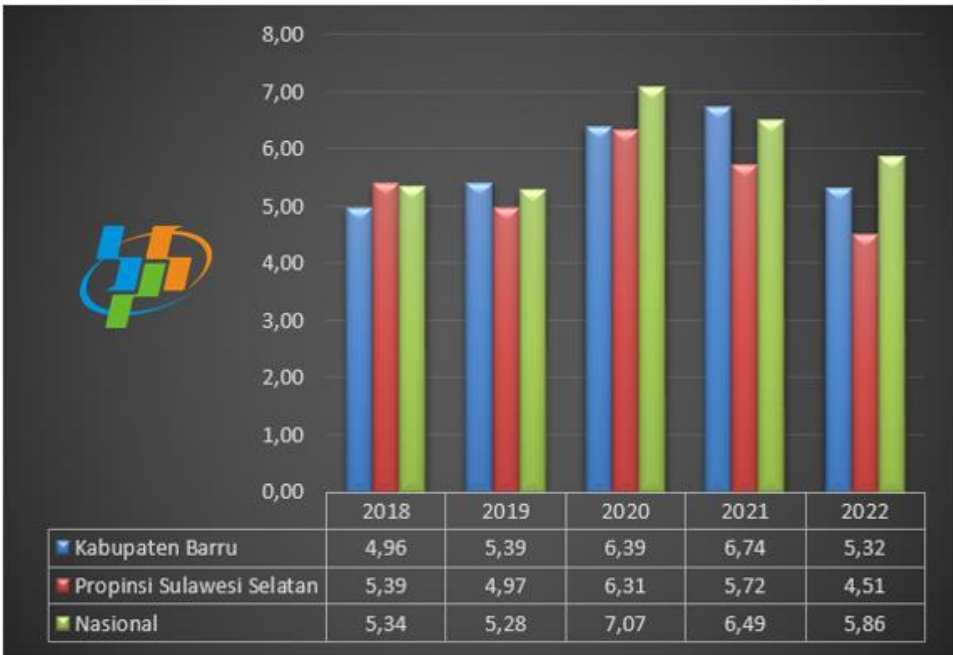
TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Dari tabel diatas sejak tahun 2018 – 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Barru selalu di atas 50%, dengan TPAK tertinggi yaitu mencapai 62,36% pada Tahun 2022.

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk

mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Grafik 2.19

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Barru dengan Capaian Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Tahun 2023

Tabel 2.46

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru dengan wilayah setara Tahun 2018 – 2022

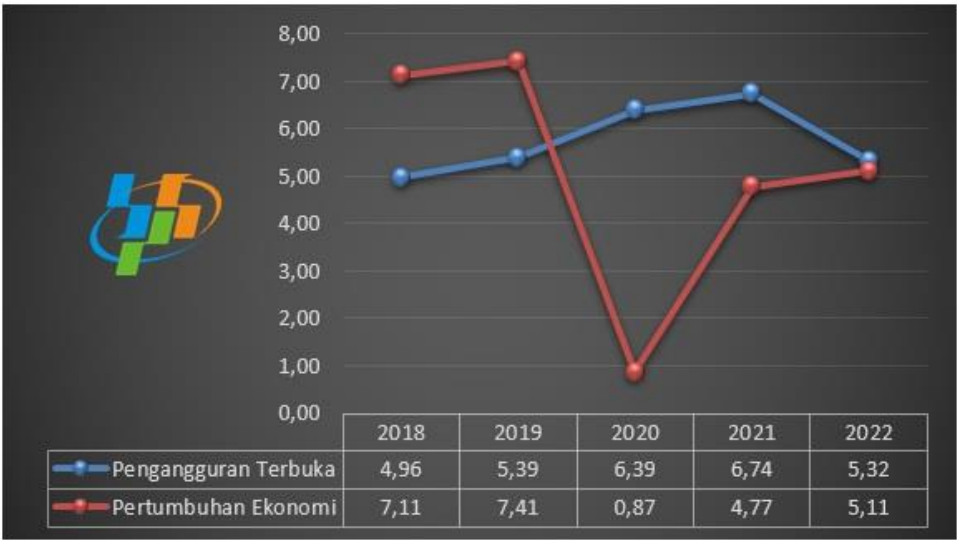
No	Kabupaten/ Kota	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Kab. Barru	4,96	5,39	6.39	6,74	6,74
2	Kota Pare-pare	6,36	6,17	7.14	6,72	6,72
3	Kab. Soppeng	2.36	3,24	4.42	3,92	3,92
4	Kab.Sidrap	4.29	4.35	5.91	4,93	4,93
5	Kab. Pangkep	6.13	4,99	5.18	5,86	5,86
6	Kab. Bone	2.56	3,01	3.20	4,15	4,15

Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa baik TAPK maupun TPT, capaian yang diperoleh Kabupaten Barru menunjukkan kinerja yang rendah.

Beberapa teori mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru Barru diilustrasikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 – 2022



Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran pada rentang tahun 2018 – 2022 menunjukkan korelasi yang lemah. Hal tersebut ditunjukkan oleh kecenderungan di tahun 2019 dan 2021 yang memperlihatkan fakta bahwa meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat akan tetapi jumlah pengangguran juga meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang awalnya meningkatkan produksinya melalui penambahan tenaga kerja beralih pada peningkatan penggunaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya digital yang menggantikan peran sumber daya manusia.

6. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah undang-undang nomor 35 tahun 2013

tentang perlindungan anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2019, mengharuskan Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2018 - 2022 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	95.44	95.42	95.52	95.51	95,64
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	69.24	63.31	63.96	63.98	65,24

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwa angka untuk IPG dalam periode tahun 2018 – 2020 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun mengalami penurunan siring dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting memberikan perhatian dan fokus terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan

terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa indeks pembangunan gender di tahun 2022 yang sebesar 95,64 sudah melampaui target apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 95,58. Sedangkan untuk nilai indeks pemberdayaan gender, juga sudah melampaui target RPJMD. Capaian indeks pemberdayaan gender tahun 2022 sebesar 65,24 sementara target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 sebesar 64,10.

7. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020 - 2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Barru telah berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2022 adalah 50,13 dengan kategori CC. Uraian komponen penilaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.48
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2021	Tahun 2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	6,09	6,81
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,18	4,99
	III. Reform	30,00	8,33	9,73
	Total Komponen Pengungkit	60,00	19,60	21,53

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2021	Tahun 2022
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,34	7,01
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,67	8,64
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,12	8,36
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,28	4,59
	Total Komponen Hasil	40,00	28,41	28,60
	Indeks reformasi Birokrasi (Pungungkit+Hasil)	100,00	48,01	50,13

Sumber : Kemenpan RB RI, Tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 sebesar 50,13 dengan kategori CC, hasil ini menunjukkan pemerintah kabupaten barru telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan peningkatan nilai pada komponen pungungkit dan penghasil.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun 2022 yang sebesar 50,13 belum mencapai target (belum sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 65.

8. Nilai saki

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinrah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barru. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran yang diperlukan.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru memperoleh nilai 57,34 atau predikat CC. hasil evaluasi tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berotientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Barru belum berjalan dengan baik dan

memerlukan perbaikan lebih lanjut, Rincian hasil evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut.

Tabel 2.49
Komponen Penilaian Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Perencanaan Kinerja	30	21,33	21,79
B	Pengukuran Kinerja	25	11,32	15,07
C	Pelaporan Kinerja	15	9,55	9,65
D	Evaluasi Internal	10	4,73	10,85
E	Capaian Kinerja	20	10,11	57,39
	Nilai Hasil Evaluasi	100	57,04	57,34
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Sumber : Kemepan RB RI, Tahun 2023

Nilai SAKIP tahun 2022 yang sebesar 57,34 dengan kategori CC meningkat dari tahun sebelumnya, menunjukkan pemerintah kabupaten barru telah melakukan perbaikan-perbaikan yang terkait dengan komponen penilaian yang menentukan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian nilai SAKIP pada tahun 2022 yang sebesar 57,34 belum mencapai target (belum sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 60.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2020-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	Baik	Baik	Baik

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel diatas menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dipertahankan dengan predikat Baik.

Apabila dikaitkan dengan target pada dokumen RPJMD tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Bidang Urusan Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan mulai pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang di selenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	79,21	80,25	80,05	91,38	74,14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat angka partisipasi PAUD di Kabupaten Barru, mengalami penurunan sampai tahun 2022. Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang bersekolah pada jenjang

TK/RA/Penitipan Anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan upaya peningkatan minat orang tua untuk mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa angka partisipasi PAUD di tahun 2022 yang sebesar 74,14 persen belum mencapai target (belum sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 91,55.

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. Angka partisipasi kasar (APK) yang meliputi APK SD/MI, APK SMP/MTs di Kabupaten Barru tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%)	99,32	100,49	100,67	101,57	103,23
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)	103,23	107,82	112,09	88,87	91,41

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2022/BPS Kab. Barru 2023

Tabel diatas menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Barru pada jenjang SD Sederajat dan jenjang SMP Sederajat tahun 2018 - 2022 berfluktuatif. APK tertinggi pada jenjang SD Sederajat yaitu 103,23% pada tahun 2022, kemudian jenjang SMP Sederajat sebesar 112,09% pada tahun 2020. Penyebab APK SD/Sederajat maupun SMP/Sederajat mencapai lebih dari 100%, disebabkan karena terdapat anak berusia kurang dari 7 tahun dan anak berusia lebih dari 15 tahun yang sekolah di jenjang SD dan SMP/Sederajat.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa angka partisipasi kasar SD/MI Paket A pada

tahun 2022 yang sebesar 103,23 persen belum mencapai target RPJMD sebesar 105,8 persen. Begitu pula untuk angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B yang belum melampaui target RPJMD dimana target pada tahun 2022 sebesar 107,81 persen, sedangkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 91,41 persen.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka partisipasi murni yang meliputi angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket Adan SMP/MTs/ Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	92,14	94,71	98,25	98,20	99,39
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	85,61	90,42	81,38	82,28	82,21

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2020/ BPS Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, selama kurun waktu 5 (lima) tahun, APM SD/Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat, sedangkan APM/SMP Sederajat cenderung berfluktuasi. Baik APM SD/Sederajat maupun APM SMP/Sederajat belum mencapai angka ideal karena terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan anak usia sekolah yang sekolah tidak pada jenjang kelompok usianya.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat dijelaskan bahwa capaian angka partisipasi murni SD/MI Paket A pada tahun 2022 yang sebesar 99,39 persen dan sudah melampaui target RPJMD sebesar 94,49 persen. Sedangkan untuk angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B tidak melampaui target, yang mana target RPJMD pada tahun 2022 sebesar 91,57 persen, sementara realisasi pada tahun 2022 hanya sebesar 82,21 persen.

d. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dan dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. APS digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan dan merupakan alat ukur pemerataan pendidikan yang paling mendekati dan paling baik jika dibandingkan dengan APK atau APM. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	92,13	100,40	97,69	98,19	99,38
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	85,61	107,38	93,41	95,32	94,01

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat diuraikan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A di Kabupaten Barru untuk periode 2018-2022 berfluktuatif, yang mana pada tahun 2019 mencapai angka 100,40 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan angka sebesar 97,69 persen, kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 di angka 98,19 persen dan selanjutnya meningkat pada tahun 2022 mencapai angka sebesar 99,38 sebesar. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2019 mencapai 107,38% dan juga mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 93,41%, selanjutnya kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan mencapai angka 95,32%. Pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 94,01%.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A di Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target RPJMD. Sedangkan untuk

tingkatan pendidikan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru pada tahun 2022 juga belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI & SMP/MTs Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,18	0,38	0,44	0,45	0,52
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,35	1,08	1,19	1,36	1,90

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, angka putus sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs fluktuatif namun cenderung meningkat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya APS SD/MI dan SMP/MTs antara lain yaitu siswa yang motivasi belajarnya rendah, tingkat ekonomi keluarga, dan karena alasan sosial budaya lainnya.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang mengharapkan tidak ada lagi angka putus sekolah (nir kasus) untuk tingkatan pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B , maka dapat disimpulkan bahwa capaian Angka Putus Sekolah untuk tingkatan pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target RPJMD, karena pada tahun 2022 masih terdapat sebesar 0,52 persen peserta didik yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Begitupula untuk tingkatan pendidikan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru pada tahun 2022, yang pada kenyataannya masih terdapat sebesar 1,90 persen peserta didik yang tidak menyelesaikan pendidikannya.

f. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs

Angka kelulusan sebagai salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses belajar mengajar disekolah. Semakin baik proses belajar mengajar, maka persentase angka kelulusan semakin baik pula. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	98,81	100	100	98,63
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	97,11	100	100	97,82

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa AL SD/MI dan AL SMP/MTs pada tahun 2018 menunjukkan pencapaian hingga 100%, namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan hanya diangka 97 – 98%. Hal ini disebabkan karena kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Oleh karena itu nampaknya aspek mutu lulusan kurang mendapatkan perhatian, hingga pada tahun 2021 kembali menunjukkan pencapaian 100%, dan di tahun 2022 kembali mengalami penurunan.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang mengharapkan angka kelulusan untuk tingkatan pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka kelulusan untuk tingkatan pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target RPJMD, karena pada tahun 2022 masih terdapat sebesar 1,37 persen peserta didik yang tidak lulus. Begitupula untuk tingkatan pendidikan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Barru pada tahun 2022, yang pada kenyataannya masih terdapat sebesar 2,18 persen peserta didik yang tidak lulus.

g. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan adalah persentase jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Angka Melanjutkan berguna untuk melihat apakah penduduk usia

sekolah menyelesaikan pendidikannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Idealnya adalah semua lulusan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Namun di Kabupaten Barru pada tahun 2018 hingga tahun 2020, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs melebihi 100% disebabkan karena jumlah siswa/siswi yang masuk sekolah SMP/MTs lebih besar dari jumlah siswa/siswi yang lulus SD/MI yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI dan SMP/MTs
di Kab.Barru 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	105,81	114,23	122,23	93,61	90,29

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, selama tahun 2018 - 2020 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs selalu menunjukkan peningkatan, namun pada periode tahun 2021-2022 angka melanjutkan (AM) mengalami penurunan.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang mengharapkan angka melanjutkan untuk tingkatan pendidikan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka melanjutkan di Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target RPJMD, karena capaian tahun 2022 hanya sebesar 90,29 persen.

h. Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan perbandingan antara jumlah sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen. Sekolah mempunyai jumlah ruang kelas yang berbeda-beda dan kondisi ruang kelas terbagi atas 4 (empat) kondisi yaitu kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Sekolah yang mempunyai ruang kelas dengan kondisi baik baik dan rusak ringan dinyatakan sebagai sekolah dengan kondisi bangunan baik karena ruang kelas yang rusak ringan bisa di biayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	SD/MI					
1	Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (Unit)	199	202	210	212	213
2	Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI (Unit)	225	226	226	226	226
3	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	88.44	89	94,23	98,81	94,24
B	SMP/MTS					
1	Jumlah Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (Unit)	26	29	29	29	30
2	Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs (Unit)	52	53	53	54	54
3	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	50	55	55	53,70	55,56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Selama kurun waktu 2018 – 2022 Persentase bangunan SD/MI dengan kondisi baik cenderung meningkat, akan tetapi untuk tingkatan SMP/MTs, kondisinya cenderung menurun di tahun 2021, meskipun kembali mengalami kenaikan di tahun 2022.

Apabila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs kondisi bangunan baik sebesar 95,67 persen untuk tingkatan SD/MI, dan 55,85 untuk tingkatan SMP/MTs , maka dapat disimpulkan bahwa capaian Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik belum mencapai target dengan capaian di tahun 2022 sebesar 94,24 persen. Begitupula untuk tingkatan pendidikan SMP/MTs/ di Kabupaten Barru pada tahun 2022, yang pada kenyataannya hanya mencapai angka 55,56 persen.

i. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Rasio

ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.59
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD) (%)	114,07	102,63	100,06	100,51	99,50
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SMP) (%)	53,07	40,59	52,10	34,07	38,24

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD) di kabupaten Barru cenderung mengalami penurunan, akan tetapi untuk tingkatan SMP/MTs, kondisinya cenderung berfluktuatif dengan capaian tertinggi di tahun 2018, yang apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 14,83 persen.

Apabila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar (SD) di kabupaten Barru sebesar 104,2 persen, dan 56,75 persen untuk tingkatan SMP/MTs, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik belum mencapai target dengan capaian di tahun 2022 sebesar 99,50 persen untuk tingkatan SD/MI. Begitupula untuk tingkatan pendidikan SMP/MTs/ di Kabupaten Barru pada tahun 2022, yang pada kenyataannya capaiannya hanya mencapai angka 38,24 persen.

j. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Rasio jumlah guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Barru disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.60
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SD	1.074,24	1.228,34	1.100,34	1.130,48	664,98
2	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar SMP	819.67	1.109,48	1.216,47	1.038,69	1.434,29

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 Rasio guru dan murid untuk tingkatan Sekolah Pendidikan Dasar (SD) dan SMP di kabupaten Barru cenderung fluktuatif, dengan capaian tertinggi untuk tingkatan SD di tahun 2019 sebesar 1.228,34, yang apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 563,36. Sementara untuk tingkatan SMP Capaian tertinggi pada tahun 2022, dengan capaian 1.434,29, atau meningkat 397,6 dari tahun lalu.

Apabila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan Rasio guru/murid Sekolah Pendidikan Dasar (SD) di kabupaten Barru sebesar 1.048,87 dan 718,95 untuk tingkatan SMP/MTs, maka dapat disimpulkan bahwa capaian rasio guru/murid untuk SD/MI belum mencapai target dengan capaian di tahun 2022 sebesar 664,98 untuk tingkatan SD/MI. Sementara untuk tingkatan pendidikan SMP/MTs/ rasio guru/murid di Kabupaten Barru pada tahun 2022, sudah melampau target yang ditetapkan di RPJMD dengan capaian sebesar 1.434,29.

k. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya tanpa harus mengerti yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf
(tidakbuta aksara) Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	-	90,5	90,42	90,81	89,17

Sumber : BPS Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022, Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten Barru berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 90,81 persen, yang apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 1,64 persen.

Apabila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan target Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten Barru sebesar 99,25 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidakbuta aksara) Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target dengan capaian di tahun 2022 hanya sebesar 89,17 persen dengan selisih dari target sebesar 10,08 persen.

1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai tenaga pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik sehingga harus memiliki keahlian atau kualifikasi atau kompetensi dalam menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan bahwa guru wajib memiliki latar belakang akademis strata satu (S1) atau diploma empat(D-IV). Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	95,15	90.27	88,24	94,89	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Perkembangan jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di atas. Selama kurun waktu tahun 2018 – 2022 jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik berfluktuatif, dari periode 2018-2020 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan, dan tahun 2022 sudah mencapai 100 persen.

Apabila capaian ini disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan target Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru sebesar 89,34 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja untuk Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Barru di tahun 2022 sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100 persen.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator kesehatan antara lain:

a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup). Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) (Jiwa)	7	31	10	9	46
2	Jumlah kelahiran hidup (Jiwa)	3.035	3.140	3.068	3.047	2.983
3	Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	2.31	9,87	3	3	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

AKB pada tahun 2018 hingga tahun 2019 meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKB

harus tetap di kedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita, hingga pada tahun 2020 hingga 2021 telah mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan.

Apabila capaian ini disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan target angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup sebesar 1,83 maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka kematian bayi Di Kabupaten Barru pada tahun 2022 masih jauh dari target dengan jumlah kematian pada tahun 2022 sebesar 15 kasus per 1000 kelahiran hidup.

b. Angka kelangsungan hidup bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun dimana $AKHB = 1 - \text{Angka Kematian Bayi}$. Sedangkan untuk AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi dibawah usia 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKHB di Kabupaten Barru dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.64
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kab.Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	99,77	99,13	99,70	99,70	99,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2022

AKHB pada periode tahun 2018 – 2022 cenderung berfluktuasi, yang mana pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding periode 2 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

Apabila capaian ini disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan target angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat

disimpulkan bahwa capaian angka kelangsungan hidup bayi Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target dengan capaian pada tahun tersebut baru mencapai 99,6 persen.

c. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Angka Kematian Balita (AKBa)/ 1000 kelahiran hidup
Kab.Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kematian Balita (Jiwa)	3	5	2	2	3
2	Jumlah kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Jiwa)	3035	3140	3069	3069	2983
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0.99	1,59	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

AKBa pada periode tahun 2018 – 2022 cenderung berfluktuasi, yang mana pada periode tahun 2020- 2022 mengalami kondisi stagnan dibandingkan periode 2 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program-program untuk mengurangi AKHB harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program tentang gizi serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan balita.

Apabila capaian ini disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan target angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru sebesar 0,2. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target dengan capaian pada tahun tersebut baru mencapai 1 angka kematian balita per 100 kelahiran hidup.

d. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau di dapat selama kehamilan. Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66

Angka Kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kab.Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) (Jiwa)	10	20	6	8	44
2	Jumlah kelahiran hidup (Jiwa)	3.035	3.140	3069	3.047	2.983
3	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	3.29	6,37	2	3	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Angka kematian neonatal pada periode tahun 2018 – 2022 cenderung berfluktuasi, yang mana angka kematian tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2022, yang mencapai 15 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 2 angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup

Apabila capaian ini disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan target angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru sebesar 1,45. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada tahun 2022 masih jauh dari target dengan jumlah kematian neonatal pada tahun tersebut mencapai 15 angka kematian neonatal per 100 kelahiran hidup.

e. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Indikator ini menunjukkan Angka Kematian Ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas dari per 100.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas (jiwa)	7	3	3	7	2
2	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)	3.140	3069	3069	3.047	2.983
3	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	222,93	98	98	230	67

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada periode tahun 2018 – 2022 cenderung berfluktuasi, yang mana angka kematian tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2021, yang mencapai 230 angka kematian per 100.000 kelahiran hidup, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 67 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Apabila capaian ini disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan target angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Barru sebesar 56. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Barru pada tahun 2022 masih belum mencapai target dengan jumlah kematian ibu pada tahun tersebut mencapai 67 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

f. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Rasio Posyandu Persatuan Balita
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah posyandu (Unit)	264	265	267	270	270
2	Jumlah balita (Jiwa)	13.344	13.084	13.343	12.788	12.355
3	Rasio posyandu per satuan balita (%)	19.78	20,25	20.01	21.11	21,85

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Barru pada periode tahun 2018 – 2022 cenderung berfluktuasi, yang mana rasio tertinggi pada periode tersebut terjadi pada tahun 2022, yang mencapai angka 21,85, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya mencapai angka 19,78.

g. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu dihitung berdasarkan jumlah puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.69
Rasio puskesmas, poliklinik puskesmas pembantu per 1.000
jumlah penduduk Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Thn	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	2018	180.509	12	0.066	0	0	33	0.18
2	2019	182.373	12	0.066	0	0	33	0.18
3	2020	187.392	12	0.064	0	0	33	0.18
4	2021	189.877	12	0.064	0	0	33	0.18
5	2022	191.895	12	0,063	7	0,037	33	0,17

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Rasio jumlah puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan. Begitupun dengan rasio jumlah pustu terhadap jumlah penduduk juga terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami penambahan sementara jumlah puskesmas dan jumlah pustu tetap.

h. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk yang menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70

Rasio rumah sakit/ 1.000 jumlah penduduk Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit (Unit)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Rasio Rumah Sakit per seribu Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Rasio Jumlah Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena laju pertambahan jumlah rumah sakit lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami penambahan sementara tidak ada penambahan jumlah rumah sakit. Rasio Rumah Sakit terhadap Jumlah rasio tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 0,0055 dan terendah pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 0,0052

i. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter yang diukur berdasarkan jumlah

dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Rasio Dokter Persatuan penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah dokter (Orang)	24	37	25	25	54
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	180,509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Rasio dokter per satuan penduduk	0.13	0,20	0.13	0.14	0,28

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Rasio Dokter Persatuan penduduk belum mencapai target jika berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, dimana pada lampirannya disebutkan rasio yang layak untuk dokter/satuan penduduk adalah 1 : 2500, sementara di Kabupaten Barru masih jauh dari layak terkait ketersediaan tenaga dokternya. Hal tersebut juga terlihat pada beberapa puskesmas yang jumlah tenaga dokternya belum mencapai standar nasional. Adapun beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melakukan perekrutan tenaga kontrak dokter daerah dan pendayagunaan dokter internship di beberapa tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

Apabila capaian pada tabel diatas disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan target Rasio Dokter Persatuan penduduk di Kabupaten Barru sebesar 0,27. Maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Dokter Persatuan penduduk di Kabupaten Barru pada tahun 2022 sudah melampaui target dengan capaian rasio 0,28.

j. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang diukur berdasarkan jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.72
Rasio Tenaga Medis per 1.000 Jumlah Penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga medis (Orang)	57	74	57	57	83
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	180,509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.32	0,41	0,30	0,31	0,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat rasio tenaga medis persatuan penduduk belum mencapai target karena tenaga medis yang ada di RSUD dan puskesmas jumlah tenaganya masih kurang sementara disisi lain penduduk terus bertambah. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah perekrutan tenaga kontrak daerah , kontrak BOK dan tenaga sukarela serta pendayagunaan dokter internship di beberapa tempat yakni RSUD, PKM Padongko dan PKM Palanro (di tempat tersebut terdapat dokter pendamping internship).

Apabila capaian pada tabel diatas disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan target rasio Tenaga Medis per 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Barru sebesar 0,44. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian Rasio Tenaga Medis per 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target dengan capaian rasio sebesar 0,43.

k. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada proses persalinan sehingga untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu maternal salah satunya melalui persalinan yang sehat dan aman, yaitu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (kasus)	480	515	775	753	1149
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Jiwa)	688	684	775	753	655
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (Persen)	69,77	75,29	100	100	175,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari 753 kasus ditahun 2021 menjadi 655 kasus pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan masa pandemi covid 19, sehingga jangkauan pelayanan kesehatan pada semua ibu hamil terutama penanganan difokuskan pada ibu hamil yang mempunyai faktor resiko dan memiliki resiko tinggi serta berdampak pada pemantauan secara berkala dalam mengoptimalkan sistem rujukan terpadu.

1. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (linakes). Adapun perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Barru 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Jiwa)	3.033	3.133	3.181	3.085	2.989
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Jiwa)	3.279	3.264	3.246	3.199	3.199

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	92,50	95,99	98,00	96,00	93,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini dipengaruhi oleh jumlah ibu bersalin yang ditolong yang ikut menurun jumlahnya di tahun 2022.

m. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu kurun waktu tertentu. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75

Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI (Desa/Kel)	44	52	19	44	52
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan (Desa/Kel)	55	55	55	55	55
3	CakupanDesa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	80,00	94,55	35,00	80,00	95,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru pada periode tahun 2018-2022 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan capaian cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 95 persen, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 35 persen.

n. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali seratus persen. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah balita gizi buruk (jiwa)	3	4	5	4	4
2	Jumlah seluruh balita (Jiwa)	13.344	13.084	13.343	13.024	12.571
3	Persentase balita gizi buruk (%)	0.02	0,03	0.04	0,03	0,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk Kabupaten Barru cenderung fluktuatif, namun masih dibawah angka 1%, termasuk kategori rendah menurut WHO dan masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 5%. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya diare, cacingan, demam berdarah, thypus dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita.

Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan yang mengikuti kaidah gizi dan kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kurang gizi balita dapat menyebabkan *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Prevalensi *Stunting* pada balita dan baduta di Kabupaten Barru dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.77
Prevalensi Stunting Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)	25,20	17,43	11,04	8,30	8,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Prevalensi *stunting* balita di Kabupaten Barru pada tahun 2018 (25,20%) berada pada angka tertinggi artinya lebih buruk dari tahun-tahun berikutnya, hingga tahun 2019 – 2021 terus mengalami penurunan, namun Kembali mengamali peningkatan di tahun 2022. *Stunting* berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Oleh sebab itu pada perbaikan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi hal yang penting melalui praktek pengasuhan yang baik, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses ke makanan bergizi serta air minum dan sanitasi yang memenuhi syarat.

o. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang di temukan dan telah mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibagi dengan jumlah keseluruhan balita yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali serratus persen. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu (Jiwa)	3	4	3	4	4
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama (Jiwa)	3	4	3	4	4
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase Cakupan Balita gizi buruk Kab. Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung sudah mencapai 100 persen setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan di sarana kesehatan.

p. **Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak**

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak usia 1 tahun dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar sebagai perlindungan terhadap penyakit campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (jiwa)	2.830	3.036	2.706	2856	2.943
2	Jumlah anak usia 1 tahun (jiwa)	3.030	3.036	2.967	3048	2.213
3	Persentase anak usia 1 tahun diimunisasi campak (%)	93.40	100	91,00	93,70	83,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase Cakupan Desa Kelurahan UCI Kab. Barru pada periode tahun 2018-2022 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan capaian cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 95 persen, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 35 persen.

q. **Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk**

Acute Flacid Paralys (AFP) adalah gejala kelumpuhan pada anak yang berumur di bawah 15 tahun yang terjadi secara mendadak (akut). Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kabupaten Barru

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus AFP non Polio (kasus)	2	1	0	0	3
2	Jumlah penduduk < 15 tahun (jiwa)	42.406	45.583	45.583	0	45.828
3	Non Polio rate per 100.000	4.72	2,19	0	0	6,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Non Polio rate per 100.000 penduduk Kab. Barru pada periode tahun 2018-2022 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dengan kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,5, dan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang pada tahun tersebut tidak terjadi kasus Non polio.

r. Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang mengenai jaringan paru (alveoli) yang disebabkan terutama oleh bakteri dan merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang sering menyebabkan meningkatnya angka kematian balita. Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan indikator untuk mengetahui proporsi pneumonia balita di suatu wilayah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita pneumonia balita (Jiwa)	60	77	24	23	26
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia (jiwa)	1,360	496	74	744	744
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	4.41	12,33	3.31	3,09	3,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Penderita pneumonia yang ditangani mengalami penurunan karena jumlah penderita pneumonia yang datang dan dilayani di sarana kesehatan mengalami penurunan akibat Pandemi Covid 19. Kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan mengalami penurunan dikarenakan mereka enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan.

s. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan cakupan dari jumlah penderita TBC/BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama 1 tahun dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC/BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC/BTA di Kabaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun (Jiwa)	222	282	202	256	298
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) (Jiwa)	222	357	388	388	460
3	Cakupan penemuan dan penanganan (%)	100	78,99	52.06	65,98	43,53

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu mengindikasikan masih kurangnya kemampuan untuk menemukan dan mengobati kasus TBC BTA sesuai perkiraan yang ada.

t. **Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan merupakan salah satu penyebab kematian dengan jumlah yang tinggi. Tingkat prevalensi Tuberkulosi (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 pddk) Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (Kasus)	222	282	202	256	460
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Tingkat prevalensi Tubercolosis (per100.000 pdk)	122.99	155,45	108,00	135,00	239,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya

penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjarangan suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans), peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pemeriksaan kontak serumah penderita TB.

u. **Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang menyerang paru dan bisa menyebabkan kematian. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien TB yang meninggal (Jiwa)	0	6	13	24	16
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Tingkat kematian karena Tuberculosis (per100.000 pddk)	0,00	3,31	7,00	13,00	8,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya tetapi nilainya masih tetap tinggi. Hal ini tentu mengindikasikan masih tingginya tingkat kematian akibat penyakit Tuberkolosis.

v. **Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS**

Proporsi jumlah kasus tubercolosis yang terdeteksi dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien baru TB/BTA yang diperkirakan ada terhadap jumlah pasien yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang terdeteksi dalam program DOTS (Jiwa)	118	233	202	256	298
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang Terdeteksi dalam program DOTS (Jiwa)	371	357	388	388	298
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	31.81	65,27	52.06	65,98	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Populasi yang beresiko terjangkit penyakit menular masih tinggi. Tingginya kasus penderita TB dikarenakan masih tingginya penularan kontak serumah. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah menurunkan angka CDR dengan penemuan dini kasus TB penjarangan suspek, pemberdayaan CBS (Community Base Surveylans), peningkatan pengobatan penderita manajemen program P2ML, masyarakat dilibatkan secara aktif, kemitraan para stake holder serta pengiriman dan pengambilan sedimen TBC di PRM.

w. **Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**

Proporsi kasus kasus tuberculosis yang di obati dan sembuh dalam Program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) merupakan presentase jumlah pasien TB/BTA yang telah mendapat pengobatan melalui program DOTS terhadap jumlah pasien yang sembuh. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Jiwa)	152	83	77	203	298
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Jiwa)	152	233	202	256	298
3	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis Yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	100,00	35.62	38.12	79,29	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berfluktuasi. Dengan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2022dan 2018 yang berhasil mencapai angka 100.

x. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan ini merupakan persentase atas jumlah penderita DBD yang ditemukan dengan jumlah penderita DBD yang ditangani.

Tabel 2.87
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai (Jiwa)	44	36	32	36	25
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu (Jiwa)	44	36	32	36	25
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung stagnan dan telah berhasil mempertahankan cakupan selama lima tahun sebesar 100 persen.

y. Penderita diare yang ditangani

Indikator ini merupakan persentase penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader disuatu wilayah dalam waktu satu tahun terhadap jumlah perkiraan penderita diare dalam suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama dimana 10% dari angka kesakitan dikalikan jumlah penduduk. Penderita diare yang ditangani Di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Penderita diare yang ditangani Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan Kader (Jiwa)	2.011	2.953	2.024	1.168	1.779

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x (Jiwa)	4.874	4.898	6.721	5.127	5.127
3	Penderita diare yang ditangani (%)	60.51	41.26	60.29	22,78	34,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Penderita diare yang ditangani mengalami penurunan karena jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19, masyarakat enggan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut tertular virus corona atau lebih memilih menahan diri untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan.

z. **Angka kejadian Malaria**

Angka kejadian malaria merupakan indikator untuk mengetahui insiden penyakit malaria pada satu daerah tertentu selama satu tahun. Angka kejadian malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89

Angka kejadian Malaria Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk yang menderita malaria (Jiwa)	9	23	1	3	24
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	180,509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Angka kejadian malaria (per 100.000 penduduk)	4.99	12,68	0.53	0,15	12,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Angka kejadian malaria Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 24 kasus, sementara jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 1 kasus.

Apabila disandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang manargetkan angka kejadian malaria per 1000 penduduk sebesar 0,11, maka dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2022 belum mencapai target yang mana pada tahun tersebut, angka kejadian malaria per 1000 penduduk cukup besar, yaitu sebesar 12,5.

aa. **Tingkat kematian akibat malaria**

Tingkat kematian akibat malaria adalah jumlah kematian tersangka malaria terhadap jumlah penduduk per 1000 jiwa. Tingkat kematian akibat malaria di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90

Tingkat kematian akibat malaria Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kematian malaria (Jiwa)	0	0	0	0	0
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	180,509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Angka Kematian malaria (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Tingkat kematian akibat malaria dari tahun 2018 sampai tahun 2022 adalah 0 per 1000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa penanganan penderita malaria di Kabupaten Barru termasuk berhasil karena semua penderita malaria tidak ada yang meninggal.

bb. **Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida**

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida adalah persentase banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida terhadap jumlah balita keseluruhan. Namun di Kabupaten Barru belum ditemukan indikasi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91

Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survey tidur dengan menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida (Jiwa)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Jumlah Balita (Jiwa)	13.344	13.084	13.343	13.024	12.355
3	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

cc. **Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi**

HIV dan AIDS merupakan penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang sering dikaitkan dengan kesehatan reproduksi terutama perempuan. Persentase Prevalensi HIV/AIDS merupakan jumlah pasien HIV dan AIDS terhadap total populasi penduduk. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS (Jiwa)	6	3	5	6	11
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Prevelensi HIV/AIDS dari Total Populasi (%)	0.003	0,002	0.003	0,003	0,006

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 11 kasus, sementara jumlah kasus terendah terjadi pada tahun 2019 yang hanya sebanyak 3 kasus.

dd. **Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**

Persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan perorangan meliputi observasi,diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap dengan sarana kesehatan strata 1 dan jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (jumlah Penerima Bantuan Iuran/PBI lokal).

Tabel 2.93

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan starta 1 (Jiwa)	18.911	83.025	7.808	113.948	16.971

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Masyarakat Penerima KIS di Kabupaten (Jiwa)	124.550	128.122	135.423	142.732	59.231
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	15,18	64,58	5.80	80,00	29,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berflauktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 64,58 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 5,8 persen.

ee. **Cakupan Kunjungan Bayi**

Cakupan kunjungan bayi merupakan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup disuatu wilayah. Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Jiwa)	3.045	3.050	2.955	3.026	2.965
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Jiwa)	3.136	3.140	3.094	3.059	3.061
3	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	97,10	97,13	95,51	98,92	96,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan kunjungan bayi Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berflauktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 98,82 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 98,86 persen.

ff. **Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan kunjungan ke-4 ibu hamil dan mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yaitu paling minim empat kali terhadap jumlah sasaran ibu hamil. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 (Jiwa)	3.114	3.145	3.173	3.070	3.011
2	Jumlah sasaran ibu hamil (Jiwa)	3.440	3.420	3.404	3.391	3.402
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	90,52	91,96	93,21	90,53	88,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 93,21 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya sebesar 88,51 persen.

gg. **Cakupan Pelayanan Nifas**

Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari. Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar (Jiwa)	2.975	3.054	3.112	2.962	2.970
2	Jumlah seluruh ibu nifas (Jiwa)	3.279	3.264	3.246	3.199	3.199
3	Cakupan pelayanan nifas (%)	90,73	93,57	95,87	100,00	92,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung

berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 100 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya sebesar 90,73 persen.

hh. **Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani**

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani (Kasus)	244	268	313	609	289
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada (Kasus)	455	466	313	609	521
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	53,63	54,47	100,00	100,00	55,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya sebesar 53,63 persen.

ii. **Cakupan Pelayanan Anak Balita**

Cakupan pelayanan anak balita adalah persentase anak balita (usia 12 sampai dengan 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standard. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali (Jiwa)	11.229	9.774	7.750	8.682	10.216

2	Jumlah seluruh anak balita (Jiwa)	14.085	12.242	12.788	12.788	12.355
3	Cakupan pelayanan anak balita (%)	79,72	79,84	60,60	67,89	82,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pelayanan anak balita Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 82,60 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 60,60 persen.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Cakupan Pelayanan anak balita Kabupaten Barru di tahun 2022 yang sebesar 82,6 sudah mencapai target (sudah sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 62,4 persen.

jj. **Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin**

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan. Untuk itu pemberian MP-ASI pada bayi usia 6-24 bulan dari keluarga miskin karena mereka memiliki keterbatasan dalam penyediaan pangan di rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI (Jiwa)	0	232	421	215	596
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (Jiwa)	0	4605	890	215	596
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	0	5,04	47,30	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Pemberian MP ASI Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung

berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 100 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2018, 202, dan 2021 yang hanya mencapai nol persen.

kk. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan terhadap murid baru kelas 1 SD/MI yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.100
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (Jiwa)	3.948	3.315	10.764	5.211	8.425
2	Jumlah murid SD dan setingkat (Jiwa)	17.574	3.571	16.737	6.762	9.471
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	22,47	92,83	64,00	77,06	88,95

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat di Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berfluaktif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 92,83 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya sebesar 22,47 persen.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD pada tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat di tahun 2022 yang sebesar 88,95 belum mencapai target (belum sesuai) apabila dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang sebesar 100 persen.

II. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin merupakan pemberian pelayanan kesehatan

perorangan meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik tanpa rawat inap terhadap jumlah seluruh masyarakat miskin yang ada dalam satu wilayah tertentu (Penerima Bantuan Iuran/PBI Lokal). Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Kab.Barru Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan pasien miskin sarkes strata 1 (Jiwa)	18.911	83.025	7.808	113.948	16.971
2	Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin (Jiwa)	124.550	128.122	135.423	142.732	18.704
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	15,18	64,58	5,80	80,00	90,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 cenderung berfluktuatif, dengan jumlah persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 90,7 persen, sementara jumlah persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 5,8 persen.

mm.Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Indikator ini memberikan acuan pelayanan keperawatan dan penanganan gawat darurat sesuai dengan standar pelayanan yang dilakukan. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Gawat Darurat Level 1 (Unit)	1	1	1	1	1
2	Jumlah RS (Unit)	1	1	1	1	1
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) dari tahun 2018 hingga tahun 2022 telah mencapai 100%.

nn. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KLBdi Desa/Kelurahan yang ditangani <24 (Kasus)	8	2	233	1.268	468
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi (Kasus)	8	2	233	1.268	468
3	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Barru pada periode tahun 2018-2022 telah terpenuhi 100 persen dalam kurun waktu tersebut.

4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan panjang jalan dalam kondisi baik terhadap panjang jalan secara keseluruhan. Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis. Kondisi jaringan jalan terbagi dalam empat kondisi yaitu kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak sedang dan kondisi rusak berat. Kondisi panjang jaringan jalan di Kabupaten Barru tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Kondisi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik (km)	415,46	438,13	445,05	444,24	404,21
2	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan (km)	59,33	58,13	57,56	59,04	38,94
3	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Sedang (km)	77,48	52,76	54,47	53,80	66,53
4	Panjang Jaringan Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	131,08	134,30	126,28	126,28	173,69
5	Jalan secara keseluruhan (kabupaten)	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,61	0,64	0,65	0,65	0,59

Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2022 berkurang secara signifikan sebesar 40,84 km dibanding dua tahun sebelumnya, yang mana pada tahun tersebut merupakan pencapaian tertinggi panjang jalan dalam kondisi baik selama periode tahun 2018-2022. Kondisi ini mengakibatkan penambahan panjang jalan rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat pada tahun 2022.

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik yang dicapai pada tahun 2022 masih lebih rendah (belum tercapai) dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 sebesar 0,84 (konversi dari IKK Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten) atau hanya mencapai 70,24 persen dari target.

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan Kabupaten (km)	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3.	Rasio	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanianKab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio panjang jalan per satuan penduduk pada periode tahun 2018-2022 cenderung stagnan, Hal ini dipengaruhi oleh jumlah jalan kabupaten yang cenderung stagnan dan tidak bertambah.

c. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dengan kecepatan diatas 40 km/jam tanpa ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (km)	415,461	438,13	445,05	444,24	404,21
2	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten (Km)	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	60,8	64,1	65,1	65	59,15

Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanianKab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam) yang diasumsikan sebagai jalan dalam kondisi mantap berdasarkan Permen PU No. 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan jalan, dari tahun 2018 sampai 2020 cenderung meningkat meskipun kembali terjadi penurunan di tahun 2021 dan 2022 akibat kerusakan jalan yang terjadi.

d. Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.107
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pebuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase	-	-	-	-	4.650
2.	Panjang seluruh Jalan Kabupaten	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
3.	Persentase	-	-	-	-	6,8

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanianKab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas mulai tahun 2018 sampai tahun 2021 panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase belum dilakukan pengukuran secara menyeluruh sehingga data yang tersedia tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Barru, namun pada tahun 2022 telah dilakukan pengukuran dan didapatkan data persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sebesar 6,8 persen.

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi merupakan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak dengan pemahaman akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	46.293	34.286	46.663	46.663	47.318
2.	Jumlah rumah tinggal	48.328	46.252	46.663	46.663	47.318
3.	Persentase	95.79	95,79	100	100	100

Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat jumlah rumah yang berakses sanitasi meningkat setiap tahunnya dengan penjelasan data bahwa jumlah

rumah dipersamakan dengan jumlah rumah tangga atau Kepala Keluarga. Angka pada tahun 2022 merupakan angka yang menunjukkan penjumlahan jumlah Rumah tangga atau kepala keluarga yang berakses layak bersama, layak sendiri, dan akses aman yang telah mencapai 100 % dengan predikat ODF.

e. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Untuk drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.109
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	-	2,5	-	-	4.130
2	Panjang Drainase (Km) Seluruh	643.954	643.954	643.954	643.954	643.954
3	Persen (%)	-	3,88	-	-	6,41

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan Persentase panjang drainase yang tersumbat pembuangan aliran airnya dengan total seluruh panjang drainase Kabupaten Barru cenderung stagnan, hanya pada tahun 2019 dan 2022 teridentifikasi drainase yang mengalami penyumbatan sehingga terjadi penurunan persentase, hal ini terjadi dikarenakan masih adanya masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke saluran drainase serta adanya tumpukan sedimen yang seharusnya diselesaikan secara gotong royong, namun harus menunggu lagi dari pemerintah, sehingga drainase yang baik

dapat berkurang kualitasnya dan mengalami kerusakan dan penyumbatan.

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik yang dicapai pada tahun 2022 masih lebih rendah (belum tercapai) dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 sebesar 100 persen atau hanya mencapai 6,41 persen dari target.

f. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (m)	4.890	3.325	3.488	3.514	3.575
2	Luas Irigasi kabupaten (m)	9.792	6.919	6.919	6.919	6.919
3	Persentase (%)	49,94	48,06	50,41	50,79	51,67

Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2023

Irigasi Kabupaten Barru tersebar di 7 kecamatan dengan klasifikasi berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni Fungsi Primer, Sekunder dan Tersier dengan persentase dalam kondisi baik pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang disebabkan besarnya perhatian pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian sehingga komitmen peningkatan irigasi ditahun 2022 sangat besar. Hal ini juga disebabkan adanya komitmen tentang Lahan Pangan Berkelanjutan sehingga luasan dapat dipertahankan dan yang dalam kondisi baik cenderung akan meningkat.

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa persentase irigasi dalam kondisi baik yang dicapai pada tahun 2022 masih lebih rendah (belum tercapai) dibandingkan dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 sebesar 54 persen atau masih terdapat selisih sebesar 2,33 persen dari target.

g. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan bangunan dan saluran yang dipergunakan untuk mengatur jalannya air irigasi, dimulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pemanfaatannya. Secara umum saluran atau jaringan irigasi di bagi menjadi jaringan primer, sekunder dan tersier. Rasio jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Irigasi Jaringan primer (m)	22.356	22.356	22.356	22.356	22.356
2	Irigasi Jaringan Sekunder (m)	83.490	90.264	90.264	90.823	91.474
3	Irigasi Jaringan Tersier(m)	79.217	79.217	79.217	79.217	79.217
4	Panjang saluran irigasi(m)	185.063	191.837	191.837	191.837	193.047
5	Luas Lahan Budidaya pertanian (Ha)	9.792	6.919	6.919	6.919	6.919
6	Rasio (%)	18,90	27,73	27,73	27,81	27,90

Sumber: Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan rasio panjang saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian pada tahun 2022 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan adanya dukungan dari Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Kabupaten Barru. Selanjutnya hal ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan partisipasi bukan hanya dari GP3A, tetapi dari unsur masyarakat lainnya.

h. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air minum/air bersih adalah air yang berasal dari air ledeng/PAM dengan menggunakan meteran atau tanpa meteran, pompa air/sumur bor, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal dimana syarat-syarat air minum menurut kementerian kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112

Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum (jiwa)	158.884	173.471	176.223	183.744	183.744
2.	Jumlah penduduk (jiwa)	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	88,02	95,30	96,63	96,77	95,75

Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan persentase penduduk berakses air minum sampai tahun 2021 mengalami peningkatan, akan tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2022. Akses air minum yang dimaksud terdiri dari akses perpipaan dan non perpipaan dimana non perpipaan meliputi mata air terlindungi, air kemasan, air dijual eceran dan penampungan air hujan.

i. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan, Pemukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113

Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Bidang/Urusan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Kawasan kumuh (Ha)	310,62	31.04	21,07	18,55	71,55
2	Luas Wilayah Kabupaten (Ha)	117.472	117.472	117.472	117.472	117.472
3	Persentase areal kawasan Kumuh (%)	0,26	0,02	0,02	0,02	0,06

Sumber : Data Olahan Pokja PKP Tahun 2023/ Kotaku Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan areal kawasan kumuh mulai tahun 2018 hingga tahun 2021 cenderung menurun, peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan beberapa intervensi penganggaran pada lokasi kumuh

tersebut, hanya saja belum pernah dilakukan deliniasi kembali luas areal kawasan kumuh yang ditetapkan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah areal kawasan kumuh pada tahun 2022 telah sesuai dengan target yang diharapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang juga menetapkan target sebesar 0,06 persen.

j. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat pemakaman terdiri atas Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Sedangkan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Sedangkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kab.Barru Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jmlh	Luas (m2)	Daya Tampung	Jmlh	Luas (m2)	Daya Tampung	Jmlh	Luas (m2)	Daya Tampung
1.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	37	34.001	22.667	39	40.001	26.667	39	40.001	26.667
2.	Tempat Pemakaman Bukan Umum(TPBU)	29	15.910	10.606	29	15.910	10.606	29	15.910	10.606
3.	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	11	218.000	-	11	218.000	-	11	218.000	-
4.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	77	267.911	33.273	79	77.711	37.273	79	77.711	37.273
6.	Jumlah Penduduk (jiwa)	-	-	187.392	-	-	189.877	-	-	191.895
7.	Rasio TPU Persatuan Penduduk(1/6)	-	-	120,96	-	-	144,21	-	-	138,97

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan Kab. Barru Tahun 2023

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tabel diatas mengalami peningkatan karena adanya penambahan

daya tampung yang signifikan meskipun dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga meningkat. penambahan daya tampung pemakaman tersebut dilakukan dengan cara optimalisasi pemanfaatan lahan untuk setiap makam di areal pemakaman.

5. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115
Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	44745	45.089	44719	59.920	47.318
2.	Jumlah Penduduk Jiwa)	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3.	Rasio	0,25	0,25	0.24	0.31	0,24

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk berfluktuasi hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak beriringan dengan jumlah rumah layak huni.

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman yang layak huni di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	3740,6	3740,6	3.750,57	3.769,12	3.771,32
2	Luas Wilayah Pemukiman (Ha)	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64	3.771,64
3	Rasio	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Sumber : Dinas PUPR PKP dan PertanahanKab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas rasio permukiman layak huni cenderung stagnan dari tahun 2018 sampai tahun 2022, untuk luas permukiman layak huni didapatkan dari hasil pengurangan luas wilayah permukiman secara keseluruhan dengan luas permukiman kumuh yang pengertiannya dipersamakan dengan permukiman tidak layak huni, khusus untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 luas permukiman layak huni bertambah seiring dengan berkurangnya luas permukiman kumuh Kabupaten Barru.

6. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Persentase cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) yakni 100 orang petugas linmas kabupaten dibagi dengan satu wilayah kerja kabupaten. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.117
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru (Orang)	1.082	1.082	898	898	736
2	1 Wilayah kerja kabupaten (Jiwa)	180.509	182.373	187.392	189.877	191.895
3	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,60	0,60	0,48	0,47	0,38

Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) cenderung menurun dari tahun 2018 ke 2022, namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja linmas seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kab. Barru pada tahun 2022.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kab.Barru pada tahun 2022 belum mencapai target, yang mana target RPJMD pada tahun 2022 sebesar 0,44 persen.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100 persen. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelanggaran K3 Yang terselesaikan (kasus)	19	14	254	70	83
2	Jumlah Pelanggaran K3 Yang Dilaporkan Masyarakat Dan Teridentifikasi (kasus)	19	14	14	7	4
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	100,00	100,00	18,14	10,00	20,75

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2023

Data Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) menunjukkan bahwa semua kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan cenderung berfluktuatif dalam kurun tahun 2018-2022. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 100 persen. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 10 persen.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kab. Barru pada tahun 2022 belum mencapai target, karena realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 20,75 persen.

c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran meliputi jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.119
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Km ²)	860.46	1.174.7	1.174,7	1.174,7	1.174,7
2	Luas Wilayah (Km ²)	1.174.7	1.174.7	1.174,7	1.174,7	1.174,7
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	73.25	100	100	100	100

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 target cakupan wilayah manajemen kebakaran dipertahankan dari tahun 2019 sebesar 100 persen, penempatan armada mobil pemadam kebakaran di WMK Kecamatan Pujananting menjadi unsur keterpenuhan jangkauan wilayah sehingga sampai Tahun 2022 ini sudah ada 6 WMK yang ada di Kabupaten Barru (Tanete Riaja, Balusu, Mallusetasi, Soppeng Riaja, Tanete Rilau, dan Pujananting) serta Posko Induk yang ada di Kecamatan Barru, yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian masyarakat atau pun korban jiwa akibat kebakaran.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab.Barru pada tahun 2022 sudah mencapai target, yang mana target RPJMD pada tahun tersebut juga sebesar 100 persen.

d. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Penanganan kebakaran merupakan hal yang diantaranya memerlukan keahlian, ketepatan dan kecepatan. Waktu penanganan kebakaran sangat menentukan tingkat keberhasilan penanganan dalam setiap kasus kebakaran. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit terhadap Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK yang dinyatakan dalam persen. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus Kebakaran Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit (Kasus)	47	112	70	35	26
2	Jumlah Kasus Kebakaran Dalam Jangkauan WMK (kasus)	47	112	70	35	26
3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan kebakaran di Kabupaten Barru dari tahun 2019, hal ini dikarenakan musim kemarau relatif lebih singkat, disamping itu optimalisasi sosialisasi terhadap masyarakat tentang pencegahan dan bahaya kebakaran terus ditingkatkan. Adapun tingkat waktu tanggap daerah WMK telah mencapai 100%, hal ini diasumsikan dengan adanya pemadam kebakaran di tiap Kecamatan maka waktu respon terhadap setiap kejadian kebakaran relatif dapat terpenuhi.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kab.Barru pada tahun 2022 sudah mencapai target, yang mana target RPJMD pada tahun tersebut juga sebesar 100 persen untuk jumlah kebakaran yang tertangani dalam kurun waktu maksimal 15 menit (konversi dari IKK).

e. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dimana setiap PERDA yang dihasilkan Kabupaten Barru menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam Penegakannya. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121

Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda (Perda)	2	2	18	31	43
2	Jumlah Pelanggaran Perda (perda)	2	2	18	31	76
3	Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	56,58

Sumber : Sumber : Dinas Satpol PP dan Damkar Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase penegakan PERDA Kabupaten Barru periode tahun 2018–2022 cenderung dapat dipertahankan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan capaian 100 persen. Capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 56,58 persen.

6. Bidang Urusan Sosial

a. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.122
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PMKS yang diberi bantuan (jiwa)	7.109	15.522	17.967	18.027	13.171
2	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan (jiwa)	3.675	769	21.821	3.794	4.856
3	Jumlah PMKS yang ada (jiwa)	7,626	16.291	39.785	18.027	13.171
4	Prosentase PMKS memperoleh Bantuan Sosial (%)	93.2	95,68	45,15	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyandang PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Barru pada tahun 2022 sudah melampaui target, yang mana target RPJMD pada tahun tersebut hanya sebesar 70 persen.

b. Persentase PMKS Yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada, yang dinyatakan dalam persen. Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Persentase PMKS Yang Tertangani Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PMKS yang tertangani (jiwa)	7.109	15.522	17.967	18.027	13.171
2	Jumlah PMKS yang ada (jiwa)	7,626	16.291	17.967	18.027	13.171
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani (%)	93.2	95,68	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penyandang PMKS yang tertangani meningkat tiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus memenuhi pencapaian SPM.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian persentase PMKS Yang tertangani Kabupaten Barru pada tahun 2022 juga sudah melampaui target, yang mana target RPJMD pada tahun tersebut hanya sebesar 70 persen.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi : angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan

potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha/pekerja pertahun adalah perbandingan jumlah kasus sengketa pengusaha pekerja dibandingkan dengan jumlah perusahaan di kali 100 persen. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja (Kasus)	1	1	0	0	1
2	Jumlah Perusahaan (Unit)	323	49	51	51	39
3	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun (%)	3,09	0,02	0,00	0,00	0,03

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2023

Jumlah perselisihan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja pada tahun 2022 yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan Pengawas Ketenagakerjaan wilayah Parepare dan Barru sebanyak 1 kasus.

b. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerjasama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama adalah perbandingan jumlah kasus yang diselesiakan dengan perjanjian kerjasama dibandingkan dengan jumlah kasus yang dicatatkan di kali 100 persen. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan kerjasama (PB) (Kasus)	0	0	0	0	1
2	Jumlah kasus yang dicatatkan (Kasus)	0	0	0	0	1
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjasama (PB) (Kasus)	0	0	0	0	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2023

c. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar di kali 100 persen. Data besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	83	619	132	638	844
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar (orang)	514	672	250	1.694	2.140
3	Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	16,15	92,11	52,80	38	39

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2023

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan monitoring tenaga kerja pada akhir tahun 2022 adalah sebesar 844 tenaga kerja dari total pencari kerja yang mendaftar sebanyak 2.140 tenaga kerja atau sebesar 39%.

d. Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah perbandingan antara pekerja/buruh jamsostek dengan pekerja/buruh secara keseluruhan di kali 100 persen. Data Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta

program jamsostek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pekerja/ Buruh JAMSOSTEK (orang)	515	37.131	38.111	40,008	1.367
2	Pekerja/ Buruh (orang)	70.328	48.075	48.075	48,007	2.045
3	Persentase (%)	0,73	77	79	83	67

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2023

Peningkatan yang signifikan terhadap kepesertaan Jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Barru dari 0,73 % pada tahun 2018 menjadi 77% di tahun 2019 hingga 83% di tahun 2021, dan kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 67 % di tahun 2022.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek pada tahun 2022 belum mencapai target (belum sesuai), yang mana target RPJMD pada tahun tersebut sebesar 70,53 persen

e. Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda dengan jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda di kali 100 persen. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak ada perselisihan. Data perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128
Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda (Kasus)	1	0	0	0	1
2	Jumlah Kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda (Kasus)	1	0	0	0	1
3	Persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (%)	100	0	0	0	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2023

Jumlah Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada periode Tahun 2018 – 2022 jumlahnya sangat sedikit, hanya ada 1 kasus pada tahun 2018 dan 2022, sementara pada tahun 2019-2021 sama sekali tidak ada kasus perselihan.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Jumlah Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada Tahun 2022 tidak mencapai target dengan adanya 1 kasus perselisihan, sementara target RPJMD pada tahun tersebut mengharapkan tidak ada kasus perselisihan.

f. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah perbandingan tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga kerja yang dilatih (orang)	80	330	20	152	40
2	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi (orang)	80	330	20	152	40
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2023

Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi pada tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Bidang Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi sebanyak 40 Tenaga Kerja dengan capaian 100 persen apabila dibandingkan dengan jumlah pendaftar pelatihan.

g. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan adalah perbandingan antara tenaga kerja yang dilatih dengan pendaftar pelatihan kewirausahaan dikali 100 persen. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.130
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga kerja yang dilatih (Orang)	80	80	20	0	0
2	Pendaftar pelatihan (Orang)	80	80	20	0	0
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100	100	100	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab .Barru Tahun 2023

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Barru pada periode 2018-2022, cenderung menurun, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 belum ada lagi tenaga kerja yang dilatih, hal ini mempengaruhi cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan urusan yang sangat penting untuk menuju pencapaian kesetaraan gender yaitu dengan memberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan dengan ditandatanganinya deklarasi menuju kabupaten layak anak pada tahun 2019, mengharuskan

Kabupaten Barru memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, selama periode 2018 – 2022 telah disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender. Capaian pemberdayaan Perempuan ditunjukkan dari angka Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.131
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	95,44	95,42	95,52	95,51	95,64
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	69,24	63,31	63,96	63,98	65,24

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Dari angka IPG dan IDG pada tabel diatas memperlihatkan bahwasanya angka untuk IPG dalam periode tahun 2018 – 2022 menunjukkan perolehan yang memuaskan meskipun berfluktuasi.

Selain itu pada Tahun 2021 telah terbit Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa, untuk itu sangat penting focusing terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Untuk perlindungan anak Pemerintah Daerah Kabupaten Barru juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, diharapkan dengan

terbitnya Peraturan Daerah dapat melindungi hak-hak anak di Kabupaten Barru.

a. **Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah**

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi eselon I-IV. untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.132
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II (Orang)	2	2	2	2	2
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III (Orang)	28	29	32	34	41
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV (Orang)	207	215	220	102	101
4	Pekerja perempuan di pemerintah (Orang)	4,705	4.710	4.088	2.435	2.547
5	Jumlah pekerja perempuan (Orang)	25,413	25.415	21.687	25.649	25.854
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah (%)	18.51	18,55	18,55	9,49	9.85

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023/BPS Kab. Barru tahun 2023

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2018 – 2022 cenderung berfluktuatif, dari tahun 2018 sampai di tahun 2020, persentasenya di kisaran 18 persen, akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 persentase cenderung menurun pada kisaran angka 9 persen.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Barru tidak mencapai target dengan capaian sebesar 9,85 persen, sementara target RPJMD pada tahun tersebut mengharapkan persentase sebesar 18,75 persen.

b. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dengan jumlah total kursi di keanggotaan DPRD yang dinyatakan dalam persen. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan (Orang)	6	5	5	5	5
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD (Orang)	25	25	25	25	25
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	24	20	20	20	20

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Barru Tahun 2023

Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2018 – 2022 cenderung menurun, capaian tertinggi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 24 persen, akan tetapi pada tahun 2021 dan 2022 persentase cenderung menurun dan stagnan di angka 20 persen.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Kabupaten Barru belum mencapai target dengan capaian sebesar 20 persen, sementara target RPJMD pada tahun tersebut mengharapkan persentase sebesar 21,12 persen.

c. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun

per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134

Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KDRT (Kasus)	7	9	8	8	0
2	Jumlah Rumah Tangga (KK)	50.503	51.510	54.707	56.657	63.128
3	Rasio KDRT (%)	0,01	0,02	0,01	0,01	0

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Rasio KDRT terhadap Total Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2018 – 2022 cenderung menurun, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan rasio 0,02 persen. capaian terbaik terjadi pada tahun 2022 dengan tidak adanya kasus KDRT pada tahun tersebut.

d. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	2022
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (Kasus)	11
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (Kasus)	11
3	Persentase (%)	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru pada Tahun 2022 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan ditindaklanjuti.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Barru pada tahun 2022 sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100 persen, sementara target RPJMD pada tahun tersebut juga mengharapkan persentase sebesar 100 persen.

e. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	0	0	0	0	0
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	0	0	0	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

f. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban

kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	0	0	0	0	0
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos dalam kurun waktu tertentu	0	0	0	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

g. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kasus)	0	0	0	0	6
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan (Kasus)	0	0	0	0	6
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Persentase penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barru pada Tahun 2022 sangat baik dengan cakupan persentase sebesar 100 persen. Hal ini

mengindikasikan penegakan hukum yang baik atas perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

h. **Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hokum (Orang)	0	0	0	0	6
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hokum (Orang)	0	0	0	0	6
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Kabupaten Barru pada Tahun 2022 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan layanan bantuan hukum.

i. **Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan**

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan (Orang)	0	0	0	0	4
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT (Orang)	0	0	0	0	4
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Persentase Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Barru pada Tahun 2022 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan pelayanan pemulangan.

j. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	0	0	0	0	4
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	0	0	0	0	4
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas DPMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Persentase Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten Barru pada Tahun 2022 sangat baik dengan cakupan persentase 100 persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan mendapatkan pelayanan reintegrasi sosial.

3. Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Indikator ketersediaan pangan utama, energi dan protein

perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan meningkatkan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama, energi dan protein perkapita dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142

Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan pangan utama (Ton)	4366	4379	261,588	229,133	237.980
2	Ketersediaan energi (mT)	115,00	118,61	2782	2.352	2.354,29
3	Protein perkapita (kalori)	18,5	21,72	69,77	96,91	81,90
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	0,28	0,42	53	45,2	77,3

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2023

Persentase Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2018 – 2022 berfluktuasi, tetapi secara umum cenderung meningkat dari tahun 2018 persentasenya 0,275 persen, sampai pada tahun 2022 persentase cenderung meningkat signifikan dari lima tahun lalu dengan persentase sebesar 77,3 persen.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Ketersediaan Pangan Utama, Energi Dan Protein Perkapita Dan Pengawasan Dan Pembinaan keamanan Pangan Kabupaten Barru pada tahun 2022 telah melebihi dari target dengan capaian sebesar 77,30 persen, sementara target RPJMD pada tahun tersebut ditetapkan sebesar 46,78 persen. Atau dengan kata lain surplus capaian dari target sebesar 30,52 persen.

b. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah persentase angka kecukupan gizi (AKG) di kalikan bobot masing-masing kelompok pangan. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143
Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru
Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) (%)	89	91	93	93	93,20

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru Tahun 2023

Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Barru dalam periode Tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan, capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 93,20 persen sedangkan capaian terendah pada tahun 2018 sebesar 89 persen.

4. Lingkungan Hidup

a. Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup dan harus diintegrasikan dalam rencana pembangunan. Tersusunnya RPPLH dan terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144
Tersusunnya RPPLH Dan Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana
Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

NO.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersusunnya RPPLH kab/Kota (Ada/Tidak ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kab/Kota (Ada/Tidak Ada)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Dalam periode tahun 2018-2022, belum ada dokumen RPPLH yang disusun dan diintegrasikan Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru.

b. Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P

Regulasi yang mengatur tiap daerah untuk wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam Pasal 15 ayat (2). Pada ayat ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi : (a) rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan (b) kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Pada prinsipnya KLHS adalah suatu kajian/penilaian mandiri (self assessment) untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun terlaksananya KLHS sebagai bagian dalam pengambilan kebijakan rencana program Kabupaten Barru tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah (Ada/Tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Dalam periode tahun 2018-2022, setiap tahun telah diselenggarakan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah di Kabupaten Barru dengan output dokumen KLHS yang disusun dan diintegrasikan Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Barru.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Kabupaten Barru pada tahun 2022 telah mencapai target dengan capaian sebesar 1 dokumen, sementara target RPJMD pada tahun tersebut juga mengharapkan adanya dokumen KLHS.

c. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, Indeks kualitas Udara, Indeks kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan indikator pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Indeks kualitas air adalah nilai yang menunjukkan status mutu air dengan metode indeks pencemaran, Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya yang dihitung berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Perhitungan indeks tutupan lahan dilakukan melalui perbandingan jumlah luas tutupan ber-hutan dibagi dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Barru

Tabel 2.146
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hasil Pengukuran indeks Kualitas Air	62,22	62,22	50	60,67	50,67
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	94,2	93,40	90,59	92,52	92,74
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	51,1	63,77	69,77	70,25	70,44
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	69,17	72,19	69,85	75,67	72,04

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Barru pada Tahun 2022 dilakukan pada 3 sungai, yaitu sungai Sumpang BinangaE di Kecamatan Barru, Sungai BottoE yang melintasi wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau dan sungai Takkalasi yang melintasi wilayah Kecamatan Barru dan Kecamatan Balusu. Setiap sungai memiliki 3 titik pantau dengan pengambilan sampel minimal 2 kali dalam setahun. Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air yaitu TSS,DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli. Pada Tahun 2020 Nilai Indeks kualitas Air

(IKA) Kabupaten Barru pada sebesar 50 berada pada kondisi baik. Nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada berbagai sumber air.
- ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global
- penggunaan air
- Tingkat erosi dan sedimentasi

Kualitas udara ambient di Kabupaten Barru dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Pemantauan dilakukan di 4 titik lokasi yang mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas dengan menggunakan metode passive sampler. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO₂ dan SO₂. Nilai konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100. Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022 di Kabupaten Barru pada Tabel di atas menunjukkan angka 92,74 meningkat sedikit dari tahun 2021, yang berarti indeks kualitas udara di Kabupaten Barru > 50 jadi termasuk dalam kondisi baik. Tetapi nilai IKU tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 kemudian turun kembali di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 turun cukup signifikan diangka 90,59. Hal ini disebabkan karena konsentrasi SO₂ Tahun 2019 mengalami penurunan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barru harus meningkatkan upaya dalam peningkatan kualitas udara di Kabupaten Barru terutama pada lokasi perkantoran dan pemukiman. Berdasarkan data tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLH Kabupaten Barru pada Tahun 2020 berada dalam status cukup, hal ini menyimpulkan bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup dibanding pada tahun 2019, dimana pada tahun 2019 kualitas lingkungan hidup Kabupaten Barru berada dalam status kurang. Peningkatan kualitas lingkungan hidup ini disebabkan karena berubahnya status mutu air sungai pada beberapa titik pantau dari tercemar berat menjadi tercemar ringan dan yang tercemar sedang menjadi memenuhi baku mutu. Disamping itu juga disebabkan

karena adanya perubahan metode perhitungan indeks tutupan lahan, yang sebelumnya beberapa tutupan lahan tidak dihitung sebagai tutupan hutan, pada tahun ini dihitung sebagai tutupan hutan seperti semak belukar, taman keanekaragaman hayati dan hutan kota.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target dengan capaian sebesar 72,04, sementara target RPJMD pada tahun tersebut ditetapkan dengan nilai sebesar 73.

d. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah merupakan perbandingan antara Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani dengan Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang dinyatakan dalam persen. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147

Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

NO.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%)	9	8	5	10	23

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Dalam periode tahun 2018-2022, Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru setiap tahunnya telah dilaksanakan, meskipun demikian capaian persentasenya masih rendah dengan kisaran di bawah 25 persen.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target dengan capaian hanya sebesar 23 persen, sementara target RPJMD pada tahun tersebut ditetapkan sebesar 100 persen.

e. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)

Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) terdiri atas Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina dan Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	1	0	1	1	2
2	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;	1	0	0	0	0
3	Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Dalam periode tahun 2018-2022, Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) berfluktuasi, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebanyak 2 kali. Sementara capaian terendah

pada tahun 2019, yang mana pada tahun tersebut tidak ada kegiatan peningkatan sama sekali.

f. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Penghargaan merupakan reward yang diberikan karena telah memenuhi dan/atau melebihi standar nilai yang ditentukan.

Tabel 2.149
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Lidup
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada (adiwiyata tingkat kabupaten dan provinsi)	Ada (Adiwiyata Tingkat Kabupaten)	Ada (Adiwiyata Tingkat Kabupaten)	Ada (Adiwiyata Tingkat Kabupaten)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Dalam periode tahun 2018-2022, setiap tahunnya telah terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah kabupaten Barru dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

g. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pengaduan masyarakat yang ditangani (Kasus)	-	15	10	4	4
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	-	15	10	4	4
3.	Persentase (%)	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Persentase Cakupan layanan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah di Kabupaten Barru pada Tahun 2022 sangat baik dengan cakupan persentase 100

persen. Hal ini mengindikasikan semua pengaduan dilayani dan terregistrasi.

h. **Timbulan Sampah yang ditangani**

Timbulan sampah yang ditangani adalah perbandingan antara volume timbulan yang ditangani dengan total timbulan sampah dikali dengan 100 persen. Timbulan sampah yang ditangani tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151

Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani (Ton)	20.667	21.409	22.030	22.713	23.671
2.	Total timbulan sampah (Ton)	25.832	26.626	27.359	27.722	27.817
3.	Persentase (%)	80,01	80,41	80,52	81,93	85,09

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Persentase Timbulan Sampah yang ditangani di Kabupaten Barru pada tahun 2022 sebesar 85,09 persen, Hal ini mengindikasikan volume timbulan sampah yang ditangani kabupaten Barru sudah cukup besar.

i. **Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R**

Sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152

Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	34,58	36,54	34,38	34,54	36,86

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R pada tahun 2022 di kabupaten Barru sebesar 38,86 persen, Hal ini

mengindikasikan pengurangan jumlah sampah melalui program ini masih rendah begitupula efektifitas dari program ini.

j. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangani yaitu volume sampah yang di tangani di bagi dengan Volume produksi sampah yang dinyatakan dalam persen. Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.153
Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

NO.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani (Persen)	98.01	80,41	80,52	81,93	85,05

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

Persentase jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuasi, dengan persentase tertinggi pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 98,01 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 80,41 persen.

k. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154
Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota
Kabupaten Barru Tahun 2022

NO.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Operasionalisasi TPA/ TPST/ SPA di Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru Tahun 2023

1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio

penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.155
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP (Jiwa)	128.967	131.981	135.033	137.147	139.463
2	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah (Jiwa)	129.177	131.981	135.045	137.159	142.219
3	Rasio (Persen)	0.99	1	0,99	0,99	0,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barru terus menunjukkan tren positif. Terkait kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2022 menunjukkan angka 0,98 yang mendekati angka 1, yang mana berarti jumlah penduduk yang bersyarat memiliki KTP sudah hampir semuanya telah memiliki KTP.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa capaian Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target dengan capaian sebesar 0,98, sementara target RPJMD pada tahun tersebut ditetapkan sebesar 1 (dikonversikan dari IKK Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk) .

b. Rasio Bayi Dan Penduduk Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan Rasio penduduk berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran dengan jumlah penduduk. Rasio bayi dan penduduk berakte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.156
Rasio Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi berakte kelahiran Jiwa)	1.299	1.356	1.328	1.403	1.745

2	Jumlah bayi (Jiwa)	1.479	1.474	1.369	1.422	1.745
3	Rasio (%)	0,88	0,92	0,97	0,99	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Sedangkan rasio penduduk berakte kelahiran tahun 2020 - 2022 perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.157
Rasio Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Barru
Tahun 2020-2022

Kode	Kecamatan	Jumlah Penduduk Yang Mempunyai Akte Kelahiran		Jumlah Penduduk		Rasio	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
731101	Tanete Riaja	7.013	6.858	7.369	7.066	0,92	0,97
731102	Tanete Rilau	11.157	10.789	11.643	11.289	0,96	0,95
731103	Barru	12.866	12.481	13.330	13.052	0,97	0,95
731104	Soppeng Riaja	5.018	4.923	5.182	4.962	0,97	0,99
731105	Mallusetasi	7.741	7.506	8.022	7.683	0,96	0,97
731106	Pujananting	3.796	3.716	3.944	3.746	0,96	0,99
731107	Balusu	5.146	5.174	5.391	5.273	0,95	0,98
7311	Kab. Barru	52.737	51.447	54.881	53.071	0,96	0,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat kepemilikan akte kelahiran tidak mencapai angka maksimal. Pemerintah Kabupaten Barru perlu mengatasi keterlambatan pengurusan akte kelahiran yang menjadi permasalahan mengapa tidak pernah mencapai 100%.

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah. Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.158
Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah (Jiwa)	23.439	27.588	32.810	38.630	45.498

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah (Jiwa)	85.406	87.098	87.208	88.111	89.700
3	Rasio (%)	27,49	31,67	37,62	43,84	50,72

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Persentase Cakupan Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru Tahun 2022 masih cukup rendah dengan cakupan persentase 50,72 persen. Hal ini mengindikasikan masih banyak pasangan nikah yang belum berakte nikah.

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Barru, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Cakupan Rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Barru pada tahun 2022 belum mencapai target dengan capaian hanya sebesar 50,72 persen, sementara target RPJMD pada tahun tersebut ditetapkan sebesar 100 persen.

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 telah tersedia database dengan skala provinsi, begitupula telah diterapkan KTP nasional berbasis NIK. Hal ini sejalan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan ada database kependudukan skala propinsi dan sudah dilaksanakan penerapan KTP Nasional Berbasis NIK.

e. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.160
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan (Orang)	131.981	131.981	135.045	137.147	139.463
2	Jumlah penduduk wajib KTP (Orang)	131.981	131.981	135.033	137.159	142.219
3	Persen ((1/2)x100%)	100	100	99,99	99,99	98,06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru sangat baik, dengan kisaran 98 persen ke atas.

Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 belum mencapai target karna baru mencapai 98,06 persen.

f. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161
Cakupan penerbitan akte kelahiran di Kabupaten Barru
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan penerbitan akte kelahiran (%)	35,34	37,76	44,54	47,27	51.44

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kabupaten Barru masih cukup rendah dengan capaian sebesar 51, 44 persen, apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 belum mencapai target karna baru mencapai 51,44 persen.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pembangunan Prasarana diwilayah kelurahan/pedesaan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Prasarana yang dibangun harus dapat dimanfaatkan sampai masa yang panjang, untuk itu diperlukan upaya pemanfaatan dan pemeliharaan. Bila prasarana yang dibangun tidak memberikan manfaat jangka panjang akibat lemahnya pengelolaan, akan berakibat pada tidak tercapainya harapan masyarakat dan tujuan program. Selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu prasarana dan sarana adalah Pengelolaan prasarana, yang mencakup Organisasi Pengelola, Pemanfaatan/Pengoperasian dan Pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan. Bila salah satu hal tersebut tidak dipenuhi maka akan berpengaruh kepada kualitas pelayanan dan umur pemanfaatan yang akhirnya akan mengakibatkan tidak tercapainya harapan

masyarakat dan tujuan dibangunnya prasaran dan sarana tersebut. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.162
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan
Desa Yang Baik Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kantor pemerintahan Desa yang Baik (Unit)	40	40	40	40	40
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa (Unit)	40	40	40	40	40
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 Persentase cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik di Kabupaten Barru sudah cukup tinggi , dengan kisaran persentase sebesar 100 persen dalam kurun waktu lima tahun tersebut.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah mencapai target karna juga telah mencapai 100 persen.

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perbandingan jumlah kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah LPM yang dinyatakan dalam persen. Rata-rata kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.163
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (Unit)	55	55	55	55	40
2	Jumlah LPM (Unit)	55	55	55	55	40
3	Rata-rata	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru sudah cukup tinggi, dengan kisaran rata rata sebesar 1 dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Barru sebesar 1, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah mencapai target karna juga telah mencapai nilai rata-rata sebesar 1.

c. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164						
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022						
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok)	1711	1712	2485	NA	2.627
2	Jumlah PKK (Kelompok)	63	63	63	63	63
3	Rata-rata (%)	27,16	27,18	39,44	NA	41,70

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Barru masih cukup rendah, dengan kisaran rata rata di bawah 50 dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Barru sebesar 41,65, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah melampaui target karna telah mencapai nilai rata-rata sebesar 41,70.

d. **Persentase LSM Aktif**

Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif. Persentase LSM yang aktif adalah jumlah LSM yang terdaftar di pemerintah dari jumlah yang ada di Kabupaten Barru. Persentase LSM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.165
Persentase LSM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah LSM terdaftar	20	20	20	20	40
2	Jumlah LSM tidak aktif	0	0	0	0	0
3	Jumlah LSM aktif (1-2)	20	20	20	20	40
4	Jumlah LSM	20	20	20	20	40
5	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, persentase LSM Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

e. **Persentase LPM Berprestasi**

Jumlah LPM berprestasi yaitu Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif melaksanakan kegiatan dibagi jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi dikali seratus. Persentase LPM berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.166
Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah LPM Berprestasi	7	7	14	14	14
2	Jumlah LPM	55	55	55	55	40
3	Persentase (%)	12,72	12,72	25,45	25,45	35,00

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, Rata-rata persentase LPM Berprestasi di Kabupaten Barru menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 35 persen.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Barru sebesar 32,36 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah melampaui target karna telah mencapai nilai rata-rata sebesar 35 persen.

f. Persentase PKK aktif

PKK aktif yaitu jumlah PKK yang memiliki pengurus dan sekretariat dan memiliki program kerja. Persentase PKK aktif adalah perbandingan antara jumlah PKK yang aktif dengan keseluruhan jumlah PKK yang dinyatakan dalam persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.167
Persentase PKK Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PKK Aktif (Kelompok)	63	63	63	63	63
2	Jumlah PKK (Kelompok)	63	63	63	63	63
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, persentase PKK Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan persentase PKK Aktif sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah mencapai target karna juga telah mencapai 100 persen.

g. Persentase Posyandu Aktif

Persentase posyandu aktif adalah perbandingan jumlah posyandu aktif dengan jumlah semua posyandu yang dinyatakan dalam persen. Persentase posyandu aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.168
Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu Aktif (Posyandu)	262	262	262	262	270

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Total Posyandu (Posyandu)	262	262	262	262	270
3	Persenentase (Persen)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, persentase posyandu Aktif di Kabupaten Barru cukup tinggi, dengan kisaran 100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan persentase posyandu Aktif sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah mencapai target karna juga telah mencapai 100 persen.

h. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang memberikan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat bisa berupa ide, gagasan, pikiran dan bisa pula berupa bantuan finansial. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	180	180	180	180	180
2	Total program pemberdayaan Masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	30	30	30	30	30

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan kisaran 30 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan persentase Swadaya Masyarakat terhadap

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru sebesar 30 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah mencapai target karna juga telah mencapai 30 persen.

i. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya.

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	3	3	3	3	3
2	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	50	50	50	50	50

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan kisaran 50 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Barru sebesar 50 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah mencapai target karna juga telah mencapai 50 persen.

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah angka kelahiran total. Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.171
Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022

NO.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Fertility Rate (TFR)	NA	NA	2,55	2,55	2,52

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022, jumlah total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten barru sebesar 2,52.

b. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.172
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Di Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022

NO.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	NA	NA	80	80	47

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022, persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB sebesar 47 persen, atau dengan kata lain sebanyak 11 OPD yang berperan aktif, dari keseluruhan 23 OPD.

c. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Di Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022

NO.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	NA	NA	24,13	24,13	24,13

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun dari tahun ke tahun perangkat daerah baik Dinas Maupun Badan di Kabupaten Barru belum mengalami peningkatan atau pertambahan yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.

d. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.174
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Di Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022

NO.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2022, Belum ada kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan.

e. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175

Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak	60,250	60.350	61.280	54.881	51.580
2	Jumlah keluarga	52,969	53.125	54320	61.838	52.641
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,137	1,136	1,128	0,887	1,020

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Barru dibawah 1,2.Dengan capaian rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,137, dan terendah sebesar 0,887 pada tahun 2021.

f. Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.176

Rasio akseptor KB Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah akseptor KB (Jiwa)	21.065	20.141	61.280	18.860	14.538
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	30.117	29.671	54.320	27.087	27.083
3	Rasio akseptor KB (%)	69,94	67,88	112,81	69,63	53,68

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Rasio akseptor KB di kabupaten Barru menunjukkan trend penurunan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 70, dan terendah sebesar 53,68 pada tahun 2022.

g. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. CPR adalah perbandingan antara jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun yang ditanyakan dalam persen. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah peserta KB aktif (Jiwa)	21,065	20.141	19562	13753	14.187
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	30,117	29.671	29.361	27.089	27.083
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 (%)	69.94	67,88	66,63	75,01	64,99

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 sudah diatas 65 persen selama lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 75,01 dan terendah sebesar 64,99 pada tahun 2022.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kabupaten Barru sebesar 70,36 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 belum mencapai target karna baru mencapai 64,99 persen.

h. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun. Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 thn (Jiwa)	512	508	443	474	389
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	30,117	29.761	29361	27087	27.083
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (%)	1.70	1,71	1,51	1,75	1,44

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 1,44 persen dan terendah sebesar 1,75 persen pada tahun 2021.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru sebesar 1,15 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 belum mencapai target karna baru mencapai 1,44 persen.

i. **Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)**

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) adalah perbandingan antara jumlah PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani dengan jumlah pasangan usia subur yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.179
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (*unmet need*)
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (Jiwa)	8.971	5.744	4906	13.753	4.716
2	Jumlah pasangan usia subur (Jiwa)	30.117	29.671	29361	27.087	27.083
3	Persentase ((1/2)x100%) (%)	29,78	19,35	16,71	15,89	17,41

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (*unmet need*) berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 29,78 dan terendah sebesar 15,89 pada tahun 2021.

Apabila dikaitkan dengan target RPJMD Pada tahun 2022 yang mengharapkan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Kabupaten Barru sebesar 17,65 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 belum mencapai target karna baru mencapai 17,41 persen.

j. **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP) adalah perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP dengan jumlah akseptor yang dinyatakan dalam persen. Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.180
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP (Jiwa)	2.889	2.745	2760	3.398	1.447
2	Jumlah akseptor KB (Jiwa)	21.065	20.141	19859	18.860	14.187

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase ((1/2)x100%) (%)	13,71	13,62	13,90	18,02	10,20

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 18,02 persen kemudian menurun signifikan tahun selanjutnya sekaligus menjadi capaian terendah pada periode lima tahun terakhir yang hanya sebesar 10,20 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Barru sebesar 14,68 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna baru mencapai persentase sebesar 10,20 persen.

k. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah perbandingan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dengan jumlah akseptor KB yang dinyatakan dalam persen. Peresentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.181
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi (Jiwa)	9.540	9.930	9.799	7.977	4.716
2	Jumlah akseptor KB (Jiwa)	21.065	20.141	19.562	18.860	14.537
3	Persentase ((1/2)x100%)	45.29	46,38	50,09	42,3	32,44

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 50,09 persen kemudian menurun signifikan secara berturut-turut pada dua tahun

selanjutnya sekaligus menjadi capaian terendah pada tahun 2022 selama periode lima tahun terakhir yang hanya sebesar 32,44 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Barru sebesar 52,89 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna baru mencapai persentase sebesar 32,44 persen.

1. **Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.182						
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022						
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB (Jiwa)	3,794	3.805	3642	3.488	2.642
2	Jumlah anggota kelompok BKB (Jiwa)	6,716	6.716	7672	5.693	5.168
3	Persentase ((1/2)x100%)	56.49	56,65	45,13	61,05	51,12

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 61,05 persen kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 51,12 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Barru sebesar 47,66 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target karna sudah mencapai persentase sebesar 51,12 persen.

m. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah perbandingan jumlah anggota kelompok yang ber-KB dengan jumlah anggota kelompok BKR yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.183
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB (Jiwa)	3,984	3.997	3008	2.940	2.249
2	Jumlah anggota kelompok BKR (Jiwa)	9,262	9.266	9992	7.730	5.222
3	Persentase ((1/2)x100%)	43.01	43,13	30,10	30,90	43,06

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 43,13 persen kemudian capaian terendah pada tahun 2020 sebesar 30,10 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Barru sebesar 31,78 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target karna sudah mencapai persentase sebesar 43,06 persen.

n. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB adalah jumlah anggota kelompok BKL yang dinyatakan dalam persen. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.184
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB (Jiwa)	2,705	2.752	2325	301	2.499

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah anggota kelompok BKL (Jiwa)	7,367	7.374	7012	5.331	4.963
3	Persentase ((1/2)x100%)	36.72	37,32	33,16	34,05	50,35

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Barru cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 50,35 persen kemudian capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 33,16 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB di Kabupaten Barru sebesar 35,02 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target karna sudah mencapai persentase sebesar 50,35 persen.

o. **Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan**

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan adalah perbandingan antara jumlah PPKS dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.185

Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PPKS (Unit)	7	7	7	7	7
2	Jumlah kecamatan (Unit)	7	7	7	7	7
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun

terakhir. Setiap Kecamatan di kabupaten barru telah memiliki setidaknya 1 unit PPKS.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan pada Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah tercapai karna realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

p. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah jumlah pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dengan jumlah kecamatan yang dinyatakan dalam persen. Untuk mengetahui cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.186
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/
Mahasiswa Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PIK R/M	70	73	63	72	53
2	Jumlah kecamatan	7	7	7	7	7
3	Persentase (%)	1000	1042	900	1024	757

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa di Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebsar 1042 persen, semsntara capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 757 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa di Kabupaten Barru sebesar 950,37 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut baru 757 persen.

q. Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang penegendalian penduduk adalah perbandingan jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan dengan jumlah PKB/PKLB yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PKB/PKLB yang didayagunakan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	47	47	50	50	49
2	Jumlah PKB/PLKB	47	47	50	50	49
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah di Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah tercapai karna realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

r. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang ber-KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri adalah perbandingan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang dinyatakan dalam persen. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri (Unit)	381	412	469	358	219
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS (Unit)	917	917	917	917	224
3	Persentase ((1/2)x100%)	42	44,92	51,15	39,02	97,77

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Barru di Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 97,77 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 39,02 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri di Kabupaten Barru sebesar 55,90 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 97,77 persen.

s. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa kelurahan adalah perbandingan jumlah petugas pembantu Pembina KB desa dengan jumlah desa kelurahan yang dinyatakan dalam persen. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.189

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	55	55	55	55	55
2	Jumlah desa/kelurahan	55	55	55	55	55
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain setiap desa dan kelurahan di kabupaten Barru memiliki petugas pembantu Pembina KB Desa.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah tercapai karna realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

t. **Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat**

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah perbandingan jumlah alkon per mix kontarsepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon dengan perkiraan permintaan masyarakat yang dinyatakan persen. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190
Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	48,362	20.588	34.279	34.279	2.198
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	48.362	20.588	34.279	34.279	20.840
3	Cakupan (1/2)x100%)	100	100	100	100	10,55

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2021, Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama empat tahun terakhir. Baru pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan dengan realisasi sebesar 10,55 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat Kontrasepsi di Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target dengan realisasi sebesar 10,55 persen.

u. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan adalah perbandingan jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dengan jumlah faskes dan jejaring yang dinyatakan dalam persen. Persentase faskes dan jejaringnya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191
Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS (Unit)	14	14	14	14	13
2	Jumlah Faskes dan jejaring (Unit)	14	14	14	14	13
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir. Dengan kata lain semua faskes dan jejaringnya selama lima tahun terakhir sudah bekerjasama dengan BPJS.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS di Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa

realisasi pada tahun 2022 sudah tercapai karna realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

v. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa adalah perbandingan antara jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga yang dinyatakan dalam persen. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.192
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia (Bulan)	12	12	12	12	12
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga (Bulan)	12	12	12	12	12
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa di Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah tercapai karna realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

w. Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui fungsi keluarga merupakan perbandingan antara jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dengan jumlah kelompok kegiatan yang

dinyatakan dalam persen. Cakupan kelompok kegiatan melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.193
Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	249	255	255	255	255
2	Jumlah kelompok kegiatan	249	255	255	255	255
3	Persentase ((1/2)x100%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Barru dapat dipertahankan dengan capaian 100 persen selama lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah tercapai karna realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen.

4. Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan angkutan umum yang keluar masuk pada suatu daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.194
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penumpang Bis (Jiwa)	1.693.893	1.682.943	826.600	592.908	189.900
2	Jumlah penumpang Kapal laut (Jiwa)	23.103	45.287	28.164	48.387	96.360
3	Total Jumlah Penumpang (Jiwa)	1.693.893	1.682.943	853.764	641.295	288.282

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penumpang bis maupun jumlah penumpang kapal laut berfluktuasi. Untuk jumlah penumpang kapal laut cenderung mengalami Peningkatan sampai tahun 2022, sementara penumpang bis cenderung menurun.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Barru sebanyak 1.909.104 jiwa maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebanyak 288.282 jiwa.

b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah Uji Kir Angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.195
Jumlah Uji Kir Angkutan umum Kabupaten Barru Tahun 2022

NO.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Uji Kir angkutan umum	0	0	0	0	0
2	Persentase Kepemilikan Kir angkutan umum	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2023

Kegiatan Uji Kir tahun di Kabupaten Barru mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak dilakukan kerana masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengujian tersebut, belum lagi persoalan sumberdaya manusia yang masih terbatas

c. Rasio Ijin Trayek

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Rasio ijin trayek adalah perbandingan antara jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.196
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	-	-
2	Izin Trayek perdesaan	41	41	41	41	41
3	Jumlah Izin Trayek	41	41	41	41	41
4	Jumlah penduduk	180.509	182.373	187,392	189,877	191.895
5	Rasio Izin Trayek	2,27	2,24	2,18	2,15	2,14

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ijin trayek dari tahun 2018 sampai 2022 cenderung menurun, hal ini di pengaruhi jumlah permintaan ijin yang berkurang dan jumlah penduduk yang terus bertambah.

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima kapal laut dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Jumlah pelabuhan laut/terminal bis di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.197
Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelabuhan laut	5	5	5	5	5
2	Jumlah terminal bis	5	4	3	3	3
3	Jumlah	10	9	8	8	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan laut/terminal bis cenderung stagnan, hanya saja khusus untuk terminal bis pada tahun 2022 mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pengalihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis di Kabupaten Barru sebanyak 11 buah maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna baru mencapai 8 buah pelabuhan laut/terminal bis.

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat adalah perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang yang terangkut yang dinyatakan dalam persen. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.198
Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Angkutan darat	1.475	1.288	525	31026	8.277
2	Jumlah penumpang angkutan darat	1.693.893	1.682.943	825.600	592.908	237.738
3	Persentase (%)	0.087	0.076	0,063	0,052	0,035

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase layanan angkutan darat mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan darat karena kurangnya peremajaan kendaraan.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Barru sebesar 99 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna baru mencapai 0,035 persen.

f. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan

di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Tabel 2.199
Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	75	156	156	-	-
2	Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	3951	3951	3951	-	-
3	Persentase (%)	1.90	3.95	3.95	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas, khusus tahun 2021 dan 2022 data tidak tersedia karena, kegiatan pemasangan rambu-rambu tidak dilaksanakan dengan pertimbangan adanya refocusing anggaran.

g. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.200
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum (Jiwa)	936.225	907.025	825.600	592.908	189.900
2	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum (Ton)	11.235	10.884	8.784	32.610	96.360

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum cenderung menurun mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, hal ini di sebabkan oleh menurunnya jumlah orang/barang yang menggunakan sarana angkutan umum karena beralih menggunakan kendaraan pribadi, disamping itu terjadinya penurunan jumlah angkutan umum karena kurangnya peremajaan kendaraan.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru sebanyak 927.605 jiwa, maka dapat

disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebanyak 189.900 jiwa.

Sementara, untuk target Jumlah barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 12.709 ton, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 96.360 ton

h. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/ terminal adalah jumlah orang atau barang yang diangkut dengan moda transportasi angkutan umum yang melalui dermaga dan terminal. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.201
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Terminal Pertahun
Di Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Satuan	Dermaga	Terminal	Jumlah
1	2018	Orang	23,103	4,769,581	4,792,684
		Barang	12,335.87	12,382	24,717.87
2	2019	Orang	45,287	1,682,943	1,728,230
		Barang	9,683,355	10,884	9,694,239
3	2020	Orang	28,164	825,600	853,764
		Barang	12,657	8,784	21441
4	2021	Orang	48,487	592,908	641,395
		Barang	14,204,900	32610	14.237.510
5	2022	Orang	47.838	189.900	237.738
		Barang	18.456.357	96.360	18.552.717

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas jumlah orang melalui dermaga cenderung menurun disebabkan pemilihan moda transportasi masyarakat dari kapal laut ke pesawat udara. Untuk jumlah orang yang melalui terminal menurun sangat signifikan hal ini disebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan jumlah barang yang melalui dermaga dan terminal meningkat, hal ini terjadi karena fungsi dermaga sangat optimal dari sisi pengangkutan barang,

disamping itu pemilihan pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Barru menjadi alternatif para pengguna jasa.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru sebanyak 1.881.879 jiwa, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebanyak 237.738 jiwa.

Sementara, untuk target Jumlah barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 9.785.137 ton, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 18.552.717 ton

5. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan jumlah koperasi aktif dengan jumlah semua koperasi yang ada dan dinyatakan dalam persen. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.202
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi aktif (Unit)	58	63	65	66	68
2	Jumlah koperasi (Unit)	103	102	104	105	107
3	Persentase koperasi aktif (%)	56.31	61,76	62,50	62,86	63,55

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase Koperasi Aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami trend peningkatan tiap tahunnya.

Sementara, untuk target persentase koperaasi aktif di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 76,31 persen, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 63,55 persen.

b. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah UKM non BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh UKM non BPR/LKM yang dinyatakan dalam persen. Persentase UKM non BPR/LKM di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.203
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	1494	430	762	762	-
2	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	1494	458	790	790	-
3	Persentase (%)	100	93,88	96,46	96,46	-

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase UKM non BPR/LKM Aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif dimana capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 100 persen, sedangkan capaian terendah pada tahun 2019 hanya sebesar 93,88 persen. Berdasarkan sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Barru untuk tahun 2022 sudah tidak melakukan pendataan karena bukan merupakan kewenangan dinas koperasi sesuai SOTK nomor 19 Tahun 2022.

Sementara, untuk target persentase koperaasi aktif di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 95, 20 persen.

c. Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif merupakan perbandingan antara jumlah BPR/LKM aktif dengan jumlah seluruh BPR/LKM yang dinyatakan dengan persen. Persentase jumlah BPR/LKM aktif di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.204
Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah BPR/LKM aktif	20	20	20	20	20
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	28	28	28	28	28
3	Persentase (%)	71.43	71.43	71,43	71,43	71,43

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2022

Data BPR/LKM di Kabupaten Barru adalah sebanyak 28 LKM yakni 20 unit merupakan Bumdes binaan Dinas PMDPPKBP3A sedangkan 8 merupakan binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang sudah tidak aktif karena baik dari usaha maupun pengurus sudah tidak ada.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase BPR/LKM Aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan trend yang sama setiap tahunnya.

Sementara, untuk target Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 73,88 persen, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 71,43 persen.

d. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil merupakan perbandingan antara jumlah usaha mikro dan kecil dengan jumlah seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.205
Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Usaha mikro	17.820	18.999	9.208	9.229	10.081
2	Jumlah Usaha Kecil	1.434	322	718	718	36
3	Usaha Menengah	88	136	72	72	5
4	Jumlah UKM	19.342	19.457	9.998	10.091	10.122
5	Persentase (%)	99.55	99,74	99,27	99,35	99,36

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Barru Tahun 2023

Jumlah usaha mikro dan kecil artinya jumlah seluruh usaha yang mempunyai omzet maksimal 300 juta. Jumlah usaha mikro dan kecil merupakan akumulasi dari jumlah pelaku industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan perikanan. Berdasarkan tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan adalah 99,27% artinya dari 20.656 unit usaha yang ada di Barru ada 20.505 unit merupakan usaha mikro dan kecil.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan trend yang sama setiap tahunnya,

Sementara, untuk target Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Barru sebagaimana ditetapkan pada dokumen RPJMD sebesar 99.84 persen, dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut sudah sebesar 99,36 persen.

6. Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor adalah orang perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik yang melakukan suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.206

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	PMDN	325	260	118	46	47
2	PMA	-	-	-	2	2
3	Total	325	260	118	48	49

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2023

Jumlah Persetujuan Investasi (usaha) tahun 2022 sebanyak 49 yang dikategorikan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan nilai investasi lebih dari 200 juta dan penambahan investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Daerah tahun 2022.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 325 investor

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah investor sebanyak 122,0461, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebanyak 49 Investor.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perseorangan atau lembaga baik domestik dan non domestik untuk jangka waktu tertentu. Jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui dinas terkait. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.207

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
1	2018	325	729.568.409.663
2	2019	260	730.659.151.736
3	2020	118	855.316.873.042
4	2021	48	401.993.726.034
5	2022	49	424.182.849.592

Sumber : DPPTSPT Kab. Barru Tahun 2023

Terjadi Peningkatan nilai investasi sebesar dari nilai investasi tahun sebelumnya. Hal yang perlu menjadi perhatian utamanya dalam hal kepastian lahan kemudian dalam sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor dengan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Percepatan RDTR untuk seluruh wilayah di Kabupaten Barru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kemudahan/ kebijakan investasi lainnya yang dapat ditawarkan oleh Pemda Kabupaten Barru.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 855.316.873.042 Rupiah dan rendah pada tahun 2021 sebesar 401.993.726.034 Rupiah.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah nilai investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) sebesar 867.333.213.707 Rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai

target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebesar 424.182.849.592 Rupiah.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh PMDN/PMA. Rasio daya serap tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	237	32	33

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Barru pada tahun 2022 sebesar 33 Point.

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dihitung dengan membandingkan realisasi PMDN tahun evaluasi dikurang realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.209
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi	Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)
1	2018	729.568.409	591.931.425.987	35
2	2019	730.659.151.736	729.568.409.663	0,15
3	2020	855.316.873.042	730.659.151.736	17,06
4	2021	400.889.608.880	360.728.443.384	11,13
5	2022	375.412.751.766	400.899.608.880	-6,36

Sumber : DPMPTSP Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 17,06 Miliar Rupiah dan rendah pada tahun 2022 sebesar -6,36 Miliar Rupiah.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah nilai investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) sebesar 17,29968 Miliar Rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebesar -6,36 Miliar Rupiah.

7. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah perbandingan antara jumlah organisasi pemuda yang aktif dengan jumlah seluruh organisasi pemuda yang dinyatakan dalam persen. Persentase organisasi pemuda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.210
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Barru	42	42	64	79	124
2	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Rilau	26	26	44	53	123
3	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Tanete Riaja	21	21	38	45	116
4	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Pujananting	16	16	35	47	63
5	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Balusu	21	21	40	59	79
6	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Soppeng Riaja	21	21	39	48	91
7	Jumlah Organisasi Pemuda di Kecamatan Mallusetasi	20	20	38	53	100
8	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	167	167	298	384	696
9	Jumlah seluruh organisasi pemuda	167	167	298	384	696
10	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mempunyai caoaian yang sama setiap tahunnya yaitu sebsar 100 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan persentase organisasi pemuda aktif sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah mencapai target sebesar 100 persen.

b. Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi atau orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda adalah perbandingan antara jumlah wirausaha muda di bagi dengan jumlah seluruh wirausaha yang dinyatakan dalam persen. Persentase wirausaha muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah wirausaha muda	5	20	139	173	219
2	Jumlah seluruh wirausaha	90	150	150	197	415
3	Persen ((1/2)x100%)	5,56	13,33	92,66	87,82	52,77

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase wirausaha muda kabupaten barru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 92,66 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,56 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan persentase organisasi pemuda aktif sebesar 13,79 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 melampaui target sebesar 52,77 persen.

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.212
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2021
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina (Cabang)	13	27	27	26	26
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar (Cabang)	26	29	29	28	28
3	Persentase ((1/2)x100%) (%)	50	93,1	93,1	92,86	92,86

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Ckupan pembinaan olahraga kabupaten barru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 93,1 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 50 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan cakupan pembinaan olahraga kabupaten Barru sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum melampaui target sebesar 92, 86 persen.

d. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi adalah perbandingan antara jumlah pelatih bersertifikat dengan jumlah seluruh pelatih yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pelatih yang bersertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.213
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelatih bersertifikat	43	57	57	18	28
2	Jumlah seluruh pelatih	58	75	75	18	36
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi (%)	74,13	76,00	76,00	100,00	77,78

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Cakupan pelatih yang bersertifikat kabupaten barru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mempunyai capaian berfluktuatif setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 100 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 74,13 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan cakupan pelatih yang bersertifikat kabupaten

Barru sebesar 6,80 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target sebesar 77,78 persen.

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda adalah perbandingan antara jumlah pembinaan atlet muda dengan jumlah seluruh pembinaan atlet muda yang dinyatakan dalam persen. Cakupan pembinaan altlet muda di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.214
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah atlit pelajar yang dibina	401	430	430	-	71
2	Jumlah seluruh atlit pelajar	401	606	606	-	104
3	Persen ((1/2)x100%)	100,00	70,90	70,90	-	68,27

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Cakupan pembinaan Atlet Muda kabupaten barru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya dimana capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 100 persen sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 68,27 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan cakupan pembinaan Atlet Muda kabupaten Barru sebesar 73,33 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum melampaui target sebesar 68,27 persen.

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.215
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah atlet berprestasi kabupaten barru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum terdapat atlet yang berprestasi.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan cakupan jumlah atlet berprestasi kabupaten Barru sebesar 1 atlet, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum melampaui target sebesar 0 Atlet.

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga adalah jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Jumlah prestasi cabang olahraga di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.216						
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022						
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah berprestasi olahraga kabupaten barru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum ada prestasi cabang olehraga yang di menengkan di tingkat nasional dan internasional.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan jumlah berprestasi olahraga kabupaten Barru sebesar 1 atlet, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum melampaui target sebesar 0 Atlet

8. Statistik

a. Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru"

Buku Kabupaten Dalam Angka sebagai sarana untuk menyediakan data statistik yang dapat menggambarkan indikator capaian pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta dan selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan. Sedangkan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah buku yang memuat jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau

daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Ketersediaan Buku Kabupaten Barru Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217
Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan
Buku "PDRB Kabupaten Barru" Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru" mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tetap tersedia.

Dengan demikian, maka dapat dijelaskan bahwa Buku "Kabupaten Barru Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten Barru" sudah sesuai dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru pada tahun 2022.

9. Persandian

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunkasi Perangkat Daerah

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi dengan jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Barru dan dinyatakan dalam persen. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.218
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi
Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat daerah (OPD)	1	1	1	1	1
2	Jumlah total perangkat daerah (OPD)	37	37	37	37	37

3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dipertahankan dengan capaian 2,7 persen selama lima tahun terakhir.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Barru sebesar 2,7 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah tercapai karna realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 2,7 persen

10. Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Secara umum, seni budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan biasanya ditampilkan pada kegiatan festival. Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.219
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival budaya (Kali)	3	5	5	5	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru kondisinya mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebanyak 15 kali dan capaian terendah pada tahun 2018 sebanyak 3 kali.

Apabila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Barru sebanyak 9 kali, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target sebanyak 15 kali.

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentasenya di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.220
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11	15	15	15	15
2	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	29	28	15	15	15
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dilestarikan (%)	40,90	53,57	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, apabila dicermati dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Barru kondisinya mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai tahun 2022 sebesar 100 persen dan capaian terendah pada tahun 2018 sebesar 40,9 persen.

Apabila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Barru sebesar 82,74 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target sebesar 100 persen.

c. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Revitalisasi dan inventarisasi karya budaya merupakan kewajiban dalam hal pelestarian budaya, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga, memelihara, membangkitkan serta memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di suatu wilayah. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Barru yang dituangkan dalam bentuk dokumen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.221
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Dokumen)	2	3	3	3	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, apabila dicermati dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru selama empat tahun terakhir masih bertahan sebanyak 3 Dokumen dan capaian terendah pada tahun 2018 sebanyak 2 dokumen.

Apabila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Barru sebesar 6 dokumen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen.

d. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Pengelolaan cagar budaya Kabupaten Barru merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, hal ini sebagai bentuk pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya yang ada. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.222
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Jenis)	28	28	15	15	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Barru pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dari capaian tahun 2018 sebanyak 28 jenis, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 13 jenis. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 tetap bertahan dengan capaian sebanyak 15 jenis.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Barru sebanyak 30 jenis, maka dapat

disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebanyak 15 jenis.

11. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.223
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	193,601	202.142	121.286	123.347	127.693
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	193,601	202.142	121.286	123.347	127.693

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Barru kondisinya cenderung berfluktuatif dengan capaian tertinggi di tahun 2019 sebanyak 202.142 orang dan terendah pada tahun 2020 sebanyak 121.286 orang.

Apabila dihubungkan dengan target RPJMD pada tahun 2022 yang menetapkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Barru sebesar 125.445 orang, maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah melampaui target dengan capaian sebesar 127.693 orang.

b. Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah adalah jumlah buku dan judul buku yang ada di perpustakaan. Jumlah koleksi buku dan judul buku yang tersediadi perpustakaan daerah Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.224						
Koleksi Buku dan Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022						
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	56,435	58.685	58.685	59.137	59.837
2	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah	11.119	11.676	11.676	11.922	12.272

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah kabupaten barru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 59.837 koleksi buku dan capaian terendah pada tahun 2018 sebanyak 56.435 koleksi buku, sedangkan untuk jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dimana capaian tertinggi terjadi di tahun 2022 sebanyak 12.272 judul buku dan terendah di tahun 2018 hanya 11.119 judul buku.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2022 sebanyak 60.697 jumlah buku, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebanyak 59.837 koleksi buku.

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi diwilayah pemerintah daerah dimana rasio perpustakaan persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk. Rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.225
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perpustakaan	56	56	56	56	56
2	Jumlah Penduduk	180,509	181.500	187,392	189,877	191.895
3	Rasio (1/2*1000)	0.31	0,31	0,30	0,29	0,29

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk kabupaten barru mulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 0,31 dan capaian terendah pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 0,29.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan rasio perpustakaan persatuan penduduk di kabupaten barru pada tahun 2022 sebanyak 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebesar 0,29.

d. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/ Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.226
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Barru
Tahun 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun			0,647	631	855

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan/tahun kabupaten barru pada tahun tahun 2022 sebanyak 855 orang.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan pada tahun 2022 sebanyak 125.445 Orang, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut hanya sebesar 855 orang.

e. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki Sertifikat di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.227

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	3	3	3	5	10
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	3	3	3	5	10
3	Persentase (%)	33,33	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Barru pada tahun tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dimana capaian tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 10 orang dan capaian terendah terjadi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 3 orang.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan pada tahun 2022 sebanyak 2 Orang, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target dengan realisasi pada tahun tersebut hanya sebanyak 10 orang.

12. Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah seluruh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang mengeloa arsip secara baku di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.228
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	27	30	29	29	18
2	Jumlah Perangkat Daerah	37	37	36	36	33
3	Persentase (%)	72,97	81,08	80,50	80,50	55,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di kabupaten Barru cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dimana capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 81,08 persen dan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 55 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan pada tahun 2022 sebanyak 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum melampaui target (belum sesuai) dengan realisasi pada tahun tersebut hanya sebesar 55 persen.

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.229
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	3	3	0	4	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 peningkatan SDM pengelolaan Kearsipan di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dimana pada tahun 2020 dan 2022 tidak ada kegiatan peningkatan SDM pengelolaan Kearsipan. Capaian tertinggi pada tahun 2021 terdapat 4 kegiatan dan capaian terendah terdapat pada tahun 2018 dan 2019 dengan capaian sebesar 3 kegiatan.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan pada tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, maka

dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 tidak mencapai target dengan realisasi pada tahun tersebut hanya sebesar 0 kegiatan.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata dihitung dengan membandingkan antara Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten dengan jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten yang dinyatakan dalam persen. Kujungan wisata di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.230						
Kunjungan Wisata Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022						
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-kabupaten	54,84	117,98	61,52	87,13	233,97
2	Lama kunjungan wisata	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
3	Jumlah seluruh kunjungan wisata se-kabupaten	54,835	117,967	61,519	57,133	88441
4	Jumlah seluruh kunjungan wisata yang direncanakan se-kabupaten	29,50	31,00	33,00	35,00	37,80
5	Persentase (%)	185.89	380,58	186.42	248,94	618,96

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 persentase kunjungan wisata di kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dimana capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 618,96 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 185,89 persen.

b. PAD Sektor Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata merupakan perbandingan antara PAD sektor pariwisata dengan total PAD yang dinyatakan dalam persen. Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.231				
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022				
No	Tahun	PAD sektor pariwisata	Total PAD	Persen
1	2018	29,550,000	104.627.706.924,57	0,03
2	2019	34,350,000	110.310.167.038	0,03

3	2020	64,119,000	107,388,426,060.00	0.06
4	2021	50.258.000	91.080.726.896	0,06
5	2022	107.636.000	80.653.632.709	0,13

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Barru pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,13 persen dan capaian terendah pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,03 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Barru sebesar 0.97 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target dengan realisasi capaian sebesar 0,13 persen

3. Pertanian

a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal merupakan perbandingan antara produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama local yang dinyatakan dalam persen. Produktivitas padi atau bahan pangan local dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.232

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	121.470	124.399,04	132.097,08	135.698,00	141.676,46
2	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal (Ha)	23.488	23.986	23.385	23.995	24.768
3	Produktivitas Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ku/Ha)	51,72	51,86	56,49	56,55	57,20

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan, meskipun kenaikan pertahunnya tidak signifikan

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan kontribusi Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar sebesar 6,98 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target dengan realisasi capaian sudah sebesar 57,20 persen

b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani merupakan perbandingan antara jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda dengan jumlah kelompok tani yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.233
Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda	140	157	87	105	88
2	Jumlah kelompok tani	709	712	729	756	783
3	Persentase (%)	19,75	6,17	23,88	13,88	11,24

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Barru 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 persentase Cakupan Bina kelompok petani di Kabupaten Barru cenderung berfluktuatif dimana capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 23,88 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 6,17 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan pada tahun 2022 sebesar 12,11 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target (belum sesuai) dengan realisasi pada tahun 2022 tersebut hanya sebesar 11,24 persen. Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Barru sebesar 0.97 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target dengan realisasi capaian sebesar 0,13 persen

4. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.234
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Nilai ekspor	Nilai Impor	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan
1	2018	128,712,891	0	128.712.891
2	2019	97.264.928	0	97.264.928
3	2020	-	-	-
4	2021	-	-	-
5	2022	116.834.755.620	-	116.834.755.620

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2019 Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Barru cenderung menurun, sementara untuk data tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, tidak tersedia data di dinas terkait namun untuk tahun 2022 kembali disajikan. Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 senilai 103.166.478 rupiah

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahunn dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.235
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n	9	12	12	-	-
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	39	39	39	-	-
3	Cakupan (%)	23.08	30,77	30,77	-	-

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2019 terjadi kenaikan Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten

Barru ditandai dengan meningkatnya jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda, sementara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, tidak terjadi peningkatan jumlah kelompok. Untuk tahun 2021 dan 2022, tidak tersedia data di dinas terkait. Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 sebesar 28,82 persen.

5. Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan perbandingan antara jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda dengan jumlah kelompok pengrajin yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.236
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	20.67	20.67	14	-	-

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi penurunan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin setelah sebelumnya pada periode 2018-2019 cakupan tersebut dapat dipertahankan. Untuk tahun 2021 dan 2022, tidak tersedia data di dinas terkait. Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 sebesar 15 persen.

6. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan adalah banyaknya produksi perikanan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Produksi perikanan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.237
Produksi Perikanan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah produksi ikan (ton)	24.373,41	25.648,66	25.773,9	26.167,72	26.429,87
2	Target Daerah (ton)	25.874,52	26.587,30	27.324,19	27.906,01	26.616,04
3	Persentase (%)	94,20	96,46	94,32	93,77	99,30

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 produksi Perikanan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 26.429,87 Ton dan capaian terendah terdapat pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 24.373,41 Ton.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 capaian produksi Perikanan di Kabupaten Barru yang menargetkan sebesar 26.222,53 Ton, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target dengan realisasi pada tahun 2022 tersebut hanya sebesar 26.429,87 Ton.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah konsumsi ikan dengan target daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.238
Konsumsi Ikan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Konsumsi ikan	Target Daerah	Persentase
		Kg	Kg	
1	2018	7.913.736	7.917.209	99,96
2	2019	7.929.362	7.966.561	99,53
3	2020	8.014.464	8.014.496	99,99
4	2021	8.020.407	8.080.130	99,26
5	2022	8.558.380,32	8.556.739	100,02

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2023

Apabila dicermati dari tahun 2018 – 2022 persentase konsumsi ikan di Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan sebesar 0,43 persen,dimana capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 100,02 persen dan capaian terendah terdapat pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 99,53.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 capaian produksi Perikanan di Kabupaten Barru yang menargetkan sebesar 46,37 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target dengan realisasi pada tahun 2022 tersebut hanya sebesar 100,02 persen.

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dengan target kelompok nelayan yang dinyatakan dalam persen. Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.239
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan	27	63	69	51	8
2	Target Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan	16	18	18	18	10
3	Persentase (%)	168	350	383	283	80

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Barru pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 100 persen dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,13 persen dan capaian terendah pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,03 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Barru sebesar 0.97 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target dengan realisasi capaian sebesar 0,13 persen

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan perbandingan jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dengan jumlah produksi ikan di daerah yang dinyatakan dalam persen. Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.240
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Jumlah Produksi ikan di daerah	Prosentase
1	2018	8174,37	24.372,41	35,53
2	2019	8.583,09	25.874,52	33,17

3	2020	12.554,69	25.773,90	48,71
4	2021	12.703,36	26.167,72	48,54
5	2022	14.640,82	26.429,87	55,39

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Produksi Perikanan Kelompok Nelayan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat, penurunan hanya terjadi pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Barru sebesar 26.222,53 ton, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampau target dengan realisasi capaian sebesar 26.429,87 ton.

2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan rentan waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rentan waktu 5 tahun, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rentan waktu 30 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan ditetapkan dengan PERKADA. Ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.241
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	RPJPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	RPJMD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	RKPD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4	RTRW	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas, mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barru konsisten dalam penyediaan dokumen perencanaan baik dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW. Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 ketersediaan dokumen perencanaan tetap konsisten ada.

Tabel 2.242
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
Kabupaten Barru Tahun 2018 -2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan (Program)	166	157	276	104	221
2	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan (Program)	166	157	276	104	221
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 capainnya 100 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target RPJMD 100 persen.

b. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD merupakan perbandingan antara jumlah program yang ada di APBD dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan dan dinyatakan dalam persen. Angka 100% menunjukkan dokumen RKPD telah konsisten dan angka dibawah 100% menunjukkan terjadi inkonsistensi antar dokumen APBD dengan RKPD. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.243
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Program APBD Tahun Berkenaan (Program)	166	157	276	104	221
2	Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan (Program)	166	157	276	104	221
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 capainnya 100 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sebesar 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target RPJMD 100 persen.

2. Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan merupakan penilaian ketaatan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.244
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barru
Tahun 2017 -2021

No	Tahun	Opini BPK
1	2018	WTP
2	2019	WTP
3	2020	WTP
4	2021	WTP
5	2022	WTP

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas, mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barru konsisten dengan predikat WTP dalam mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan setiap tahunnya . Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 sudah sesuai target RPJMD yaitu WTP.

b. Persentase SILPA

Silpa adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan persentase SILPA merupakan perbandingan antara total SILPA dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase SILPA di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.245
Persentase SILPA Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No.	Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase (%)
1	2018	141.476.534.480,84	992.656.086.174,65	14,25
2	2019	83.717.109.878,35	1.119.164.212.811,57	13,37
3	2020	83.734.357.547,35	920.669.003.812,00	9,09
4	2021	118.879.623.079,89	940.680.195.326,00	12,63
5	2022	118.943.534.504,89	902.412.131.655,00	13,18

Sumber :BBKADKab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase SILPA Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebsar 14,25 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,09 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan 5 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karna realisasi pada tahun tersebut baru 13,18 persen.

c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja pendidikan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.246
Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase (%)
1	2018	273.979.301.209,00	992.656.086.174,65	27,60
2	2019	285.957.897.587,00	1.119.164.212.811,57	25,55
3	2020	232.729.629.587,00	920.669.003.812,00	22,92
4	2021	297.079.401.936	940.680.195.326,00	31,58
5	2022	284.755.591.738	902.412.131.655,00	31,55

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebsar 31,58 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 22,92 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan 20 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target karna realisasi pada tahun tersebut 31,55 persen.

d. **Persentase Belanja Kesehatan (10%)**

Persentase belanja kesehatan merupakan perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan kesehatan dengan total APBD yang dinyatakan dalam persen. Persentase belanja kesehatan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.247
Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase
1	2018	148.763.525.015,15	992.656.086.174,65	14,99
2	2019	190.954.022.675	1.119.164.212.811,57	17,06
3	2020	189.542.241.675	920.669.003.812,00	18,66
4	2021	200.340.333.581	940.680.195.326,00	21,29
5	2022	163.577.216.781	902.412.131.655,00	18,13

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase Belanja kesehatan (10%) Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebsar 21,29 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 14,99 persen.

Apabila dikaitkan dengan dokumen RPJMD Pada tahun 2022 yang menargetkan 10 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target karna realisasi pada tahun tersebut 18,13 persen.

e. **Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung**

Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung merupakan perbandingan antara jumlah belanja langsung dan jumlah belanja tidak langsung terhadapt total APBD yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.248
Perbandingan Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Jumlah Belanja Langsung	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Total APBD	Persentase Belanja Langsung (%)	Persentase Belanja tidak Langsung (%)
1	2018	488.253.434.390,15	504.402.651.784,65	992.656.086.174,80	49,19	50,81
2	2019	580.796.860.218,59	538.367.352.592,98	1.119.164.212.811,57	51,89	48,10
3	2020	413.690.046.654,10	586.660.283.440,98	920.669.003.812,00	44,93	63,72
		Jumlah Belanja Operasi	Jumlah Belanja Modal		Persentase Belanja Operasi (%)	Persentase Belanja Modal (%)
4	2021	716.429.332.596,00	60.840.341.589,00	940.680.195.326,00	76,16	6,47
5	2022	710.668.831.700	200.250.069.935	902.412.131.655,00	79,00	22,00

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian belanja langsung tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 79 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 44,93 persen. Sedangkan persentase belanja tidak langsung capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 63,72 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,47 persen.

f. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa merupakan perbandingan antara jumlah belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa yang dinyatakan dalam persen. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.249
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	Total APBD	Persentase (%)
1	2018	96.250.293.737,00	992.656.086.174,80	9,70
2	2019	43.901.994.559,07	1.119.164.212.811,57	3,92
3	2020	108.940.698.605	920.669.003.812,00	11,83
4	2021	107.273.106.000	940.680.195.326,00	11,40
5	2022	95.523.960.500	902.412.131.655,00	10,58

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa

Kabupaten Barru berfluktuatif, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 11,83 persen, sementara capaian terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 3,92 persen.

g. **Penetapan APBD**

APBD ditetapkan dengan perkara yang sebelumnya telah dibahas dengan badan legislatif (DPRD). Penetapan APBD di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.250		
Penetapan APBD Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022		
No.	Tahun	Penetapan APBD
1	2018	20 Desember 2017
2	2019	17 Desember 2018
3	2020	17 Desember 2019
4	2021	30 Desember 2020
5	2022	30 Desember 2021

Sumber : BKAD Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2022, penetapan APBD Kabupaten Barru tidak tepat waktu.

Jika melihat target dokumen RPJMD, penetapan APBD Kabupaten Barru tahun 2022 yaitu pada tanggal 30 November 2021 , maka disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target karena di tetapkan pada tanggal 30 Desember 2021.

3. **Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

a. **Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**

Salah satu kebijakan pemerintah dalam UU ASN nomor 5 Tahun 2014, Setiap ASN berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan minimal 20 jam per tahun. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dihitung beradsarkan perbandingan antara jumlah jam pelajaran yang telah diikuti PNS dengan jumlah PNS. Rata-rata lama pegawai mendapatkn pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.251
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah JPL yang telah diikuti PNS Kab. Barru (JPL)	39.430	22.104	64.916	99.926	100.243
2	Jumlah PNS (Orang)	4.122	4.098	3.919	3.909	3.745
3	Rata - Rata lama Diklat (JPL)	9,57	5,39	16,56	25,56	26,77

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tahun ketahun cenderung meningkat, penurunan terjadi pada tahun 2018 ke tahun 2019. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 26,77 JPL, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2019 sebanyak 5,39 JPL.

Jika melihat target dokumen RPJMD, Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Barru tahun 2022 sebanyak 20 JPL , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target yaitu sebesar 26,77 JPL.

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal adalah perbandingan antara ASN yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah seluruh ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.252
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Diklat Teknis (Orang)	217	1542	284	458	940
2	Jumlah PNS (Orang)	4.170	4.098	3.919	3.909	3.745
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	5.26	37.63	7,25	11,72	25,10

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari tahun ketahun berfluktuatif, penurunan terjadi pada tahun 2020. Capaian

tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 37,63 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,26 peren.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten Barru tahun 2022 sebesar 15 persen , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah melampaui target yaitu sebesar 25,10 persen.

c. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah perbandingan antara jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural dengan jumlah total jabatan yang dinyatakan dalam persen. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.253
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural (ASN)	456	462	383	453	119
2	Jumlah Total Jabatan (Jabatan)	664	664	668	673	410
3	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)	68.67	69.58	57,34	67,31	29,02

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural dari tahun ketahun berfluktuatif, penurunan terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2022. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 69,58 persen, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 29,02 peren.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Kabupaten Barru tahun 2022 sebesar 68 persen , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum melampaui (belum sesuai) target yaitu sebesar 29,02 persen.

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sedangkan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.254
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah (Orang)	26	33	30	28	32
2	Jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah (Orang)	530	579	544	343	980
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah (Orang)	2.695	2.695	3345	2857	2.733

Sumber data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 33 orang dan terendah pada tahun 2018 sebanyak 26 orang. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah dari tahun ke tahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 980 orang dan capaian terenddah pada tahun 2021 sebanyak 343 orang. Sedangkan untuk Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dari tahun ke tahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 3345 orang dan capaian terendah terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebanyak 2695 orang.

Jika melihat target dokumen RPJMD, jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Barru tahun 2022 sebanyak 34 orang , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum melampaui (belum sesuai) target

yaitu sebanyak 32 orang. Sedangkan untuk Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah tahun 2022 sebanyak 200 orang, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 tidak mencapai target yaitu sebanyak 980 orang. Dan untuk Jumlah jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah tahun 2022 sebanyak 3345 orang , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum melampaui (belum sesuai) target yaitu sebanyak 2.733 orang

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu penunjang urusan pemerintahan yang berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu daerah dimana hasil penelitian dan pengembangan yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul disuatu wilayah.

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan dalam RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD yang dinyatakan dalam persen. Persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.255
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD (kegiatan)	10	5	8	14	8
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD (kegiatan)	10	10	8	14	8
3	Persentase (%)	100	50	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan dari tahun ketahun cenderung dapat di pertahankan dengan angka 100 persen, penurunan terjadi pada tahun 2019 dengan angka 50 persen.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Barru tahun 2022 sebesar 100

persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah sesuai target yaitu sebesar 100 persen.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan perbandingan antara jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam hal ini hasil-hasil kelitbangan yang sesuai dengan renja perangkat daerah yang berkenaan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dengan jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.256
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti (Kegiatan)	15	3	7	14	8
2.	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah (Kegiatan)	17	4	8	14	8
3	Persentase (%)	88,24	75	87,5	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 100 persen, capaian terendah pada tahun 2019 sebanyak 75 persen.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Barru tahun 2022 sebesar 100 persen , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah sesuai target yaitu sebesar 100 persen.

c. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dengan jumlah total perangkat daerah yang dinyatakan dalam persen. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.257
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam
Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	17	19	40	44	44
2	Jumlah total perangkat daerah	36	36	44	44	44
3	Persentase (%)	47.22	52,77	90,90	100	100

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah dari tahun ketahun meningkat, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 100 persen, capaian terendah pada tahun 2018 sebanyak 47,22 persen.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru tahun 2022 sebesar 100 persen , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 sudah sesuai target yaitu sebesar 100 persen.

d. Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah.

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah adalah jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.258
Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam
Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	17	19	50	70	18
2	Jumlah inovasi yang Diusulkan	36	36	77	96	25
3	Persentase (%)	47.22	52,77	64,93	72,92	72,00

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Kebijakan Inovasi

Daerah dari tahun ketahun meningkat, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 72,92 persen, capaian terendah pada tahun 2018 sebanyak 47,22 persen.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Barru tahun 2022 sebesar 100 persen , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target yaitu sebesar 72 persen.

Tabel 2.259
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1.	BOLATA YASSIBERRUI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 LaO KeDesa (Layanan Nyaman Cepat Akurat dan Ramah dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Layanan Online Kelurahan/Desa)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 KIAMiSOL (Layanan Nyaman Cepat Akurat dan Ramah dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kartu Identitas Anak Mitra Sekolah secara OnLine)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 MATiPPe	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu MaLePPu (Layanan Nyaman Cepat Akurat dan Ramah dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Sinergi dengan Desa/Kelurahan, Media dan Lembaga Penyiaran Publik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	LaNCAR D'DukCapil MPC-19 pada Sektor PTSP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	KEGIATAN RENCANA KOTA BERBASIS DIGITAL	Dinas PUPR dan PKP
8.	KUPAS Covid-19 (Ukuran Pas, Aman dan Sehat lawan Covid-19)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
9.	TARO ADA TARO GAU (Tera/Tera Ulang Metrologi Legal Secara Digital Tanpa Mengganggu Proses Perdagangan dan Jual Beli)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
10.	SIM-KGB Online	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	SIM-MUTASIPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	SIM-VALIDASI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13.	PEPAYA MATANG	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

14.	KLIK DESA (Klinik Layanan Konsultasi Desa)	Dinas PMD,PPKB,PPPA
15.	Pokdarwis + (Kelompok Sadar Wisata Plus)	Dinas Pariwisata dan Pemuda Olah Raga
16.	MPOK DARTI	Dinas Sosial
17.	SURAT LAYANAN MELAKSANAKAN KIR KENDARAAN (S@LAMAKI)	Dinas Perhubungan
18.	RUMAH KLINIK ANGGARAN	Inspektorat Daerah
19.	SISTEM PENDAFTARAN ONLINE PASIEN LAMA RAWAT JALAN	RSUD La Patarai
20.	GERAKAN JUS MANIS	Puskesmas Ralla
21.	POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid)	Puskesmas Pekkae
22.	WISATA POSYANDU	Puskesmas Palakka
23.	POSYANDU SUBUR (Sore Hari Bagi Yang Tidak Hadir)	Puskesmas Mangkoso
24.	GEMAR SYANTIK (Gerakan Marennu Sayang Anak, Ibu Dan Keluarga)	Puskesmas Pujananting
25.	GEMA DOA CAHAYA HATI	Puskesmas Doi-Doi

Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Barru masuk dalam kategori Kabupaten Inovatif. data dari Badan Stategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Ada 3 fase dalam proses inovasi yaitu : Inisiatif, Ujicoba dan Penerapan. Di Kabupaten Barru terdapat 10 (sepuluh) inovasi merupakan fase penerapan, yang dilakukan pada tahun 2020-2021, 2 (dua) inovasi dalam fase ujicoba, dilakukan pada tahun 2022 dan 75 (tujuh puluh lima) judul inovasi masuk dalam fase inisiatif yang akan dilakukan di tahun 2022.

Untuk jenis kebaruannya, inovasi dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, lebih fungsional, lebih mudah dan semacamnya. Hampir semua inovasi merupakan kebaruan. Inovasi yang telah dilakukan di Kabupaten Barru merupakan kebaruan untuk menunjang kinerja dari perangkat daerah yang bermanfaat bagi Aparatur sipil Negara, masyarakat maupun bagi pemerintah daerah, sehingga dapat menghemat energi dan biaya.

5. Pengawasan

a. Persentase Tindaklanjuti Temuan

Persentase tindaklanjuti temuan merupakan perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan yang dinyatakan dalam persen. Persentase tindaklanjuti temuan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.260
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	71	33	42	19	27
2	Jumlah total temuan	73	37	50	21	53
3	Persen ((1/2)x100%)	97,26	89,19	84,00	90,47	50,94

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Tindak lanjut Temuan Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 97,26 persen, capaian terendah pada tahun 2022 sebanyak 50,94 persen.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase Tindak lanjut Temuan Kabupaten Barru tahun 2022 sebesar 100 persen , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target yaitu sebesar 50,94 persen.

b. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai merupakan perbandingan antara jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN yang dinyatakan dalam persen. Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.261
Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	17	27	7	22	4
2	Jumlah total ASN	4.122	4.098	3.919	3.919	3.909
3	Persen ((1/2)x100%)	0,41	0,66	0,18	0,56	0,10

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase pelanggaran pegawai Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif,

capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,66 persen, capaian terendah pada tahun 2022 sebanyak 0,10 persen.

Jika melihat target dokumen RPJMD, persentase pelanggaran pegawai Kabupaten Barru tahun 2022 sebesar 0 persen , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target yaitu sebesar 0,10 persen.

c. Jumlah Temuan BPK

Indikator jumlah temuan BPK dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Tabel 2.262								
Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022								
No	Uraian			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah	temuan	BPK	17	10	14	8	9
	(Kasus)							

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Barru Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru dari tahun ketahun berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 17 kasus, capaian terendah pada tahun 2021 sebesar 8 kasus.

Jika melihat target dokumen RPJMD, Jumlah Temuan BPK Kabupaten Barru tahun 2022 sebesar 10 persen , maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target yaitu sebesar 9 kasus.

6. Sekretariat Dewan

- a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota serta Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**

Tabel 2.263

Tersedianya Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Sekretarat DPRD Kab. Barru Tahun 2023

Pada tabel diatas, mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 konsisten dalam penyediaan Rencana Kerja, terintegrasi program-program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kabupaten Barru . Untuk target RPJMD Pada tahun 2022 tetap konsisten ada.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang perjumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Barru tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.264

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan	683,36	683,36	683,36	683,36	683,36
2	Jumlah Kendaraan Bermotor	48.616	52.237	54.634	54.634	54.634
3	Rasio(1/2)	0,014	0.013	0,012	0,012	0,012

Sumber : Dinas PUPR PKP dan Pertanahan/ BPS Kabupaten Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Barru pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Capaian

tertinggi pada tahun 2018 dengan rasio 0,014 sedangkan capaian terendah pada tahun 2020 sampai tahun 2022.

b. Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini seagai motor pembangunan suatu daerah. Jaringan transportasi merupakan salah satu tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan, terminal, bandara, layanan air minum dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan. Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.265
Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur Kabupaten Barru
Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Daya saing daerah pilar Infrastruktur	-	6,5	3,58	3,33	1,95

Sumber data : Kementerian Riset dan Teknologi/ BRIN 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Daya Ssaing Daerah Pilar Infrastruktur Kabupaten Barru pada tahun 2018 sampai tahun 2022 cenderung mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2018 belum dilakukan pengukuran indeks daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur. Capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 6,5

point sedangkan capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 1,95 point.

b. Jenis dan Jumlah Bank

Jenis dan jumlah Bank di Kabupaten Barru pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.266
Jenis dan Jumlah Bank Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Uraian	Kantor Cabang	Kantor Capem	Kantor Kas
1	Bank Pemerintah Indonesia	1	11	-
2	Bank Pembangunan Daerah	1	-	3
3	Bank Swasta	-	-	-
4	Jumlah	2	11	3

Sumber : BPS (Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Jenis Bank Kabupaten Barru pada tahun 2022 yang terdiri dari Bank Pemerintah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Swasta dengan jumlah kantor cabang 2 unit, jumlah antor cabang pembantu 11 unit dan jumlah Kantor Kas 3 unit.

c. Jumlah Hotel dan Restoran/ Rumah Makan

Jumlah hotel dan restoran/rumah makan di Kabupaten Barru tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.267
Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Hotel Non Bintang (Unit)	19	22	23	20	23
2	Restoran/Rumah Makan (Unit)	121	127	66	57	67

Sumber : BPS Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Hotel non Bintang di Kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 memiliki trend berfluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2022 dengan jumlah 23 unit dan capaian terendah pada tahun 2018 dengan jumlah 19 unit. Sedangkan jumlah Restoran/ Rumah makan di Kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 juga memiliki trend berfluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada

tahun 2018 dengan jumlah 121 unit dan capaian terendah pada tahun 2021 dengan jumlah 57 unit.

d. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga yang dinyatakan dalam persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Barru tahun 2020 -2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.268
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik (Unit)	45.319	47.547	49,738	52.524	52.524
2	Seluruh Rumah Tangga (Unit)	50.503	51.510	54.707	56.657	63.128
3	Persentase (%)	89,74	92,31	90,92	92,71	83,20

Sumber : BPS Tahun 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 92,71 persen, capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 83,20 persen.

2.1.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Lama Proses Perizinan

Lama proses perizinan merupakan salah satu indikator yang sangat mempengaruhi iklim investasi pada suatu daerah. Adapun lama proses perizinan di Kabupaten Barru pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.269
Lama Proses Perizinan Kabupaten Barru Tahun 2022

No.	Uraian	Lama Penyelesaian
1.	Surat izin tempat usaha (SITU)	2 hari
2.	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	1 hari
3.	Tanda daftar perusahaan (TDP)	1 hari
4.	Izin gangguan (HO)	0 hari (dihapus)
5.	Izin mendirikan bangunan (IMB)	5 hari
6.	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)	1 hari
7.	Izin penyelenggaraan reklame	1 hari
8.	Izin trayek	1 hari
9	Tanda daftar gudang (TDG)	2 hari

10	Tanda daftar industri (TDI)	O hari (tidak ada pemohon)
11	Izin usaha industri (IUI)	O hari (tidak ada pemohon)
12	Izin pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan swasta (IPLP2S)	O hari (tidak ada pemohon)
13	Izin lingkungan (IL)	5 hari
14	Izin Penelitian (IP)	1 hari
15	Kartu pencari kerja (kartu kuning)	1 hari
16	Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)	3 hari

Sumber : DPMPSTSP Kab. Barru Tahun 2023

2. Jenis dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Barru tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.270
Jumlah dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan
A	PAJAK	
1.	Pajak Hotel	69.060.500
2.	Pajak Restoran	1.063.918.899
3.	Pajak Hiburan	2.391.375
4.	Pajak Reklame	425.247.528
5.	Pajak Penerangan Jalan	8.174.371.524
6.	Pajak Parkir	2.000.000
7.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.299.051.813
8.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.169.741.327
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.948.366.218,24
10	Pajak Air Tanah	23.698.969
11	Pajak sarang Burung walet	44.030.000
B	RETRIBUSI	
B.1	Retribusi jasa umum	
1	Retribusi pelayanan kesehatan	4.552.899.500
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	124.361.000
3	Retribusi pelayanan pasar	1.098.143.900
4	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB)	0
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	139.055.580
6	Retribusi pelayanan tera /tera ulang	13.411.000
B.2	Retribusi jasa usaha	
1	Retribusi pemekaaian kekayaan daerah (PKD)	1.626.425.500
2	Retribusi tempat pelelangan ikan-Bapenda	0
3	Retribusi terminal	121.316.750
4	Retribusi tempat khusus parkir	655.786.000
5	Retribusi pelayanan kepelabuhanan	196.687.638
6	Retribusi pelayanan tempat olahraga	89.300.000
7	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	96.482.000
B.3	Retribusi perizinan tertentu	
1	Retribusi izin mendirikan bangunan	378.130.000
2	Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi	0

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru Tahun 2023

3. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Regulasi merupakan salah satu factor yang sangat penting untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah. Adapun jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Barru sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.271
Jumlah PERDA yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Barru Tahun 2022

No	Nama Perda	Nomor
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2019
2	Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2022
3	Izin Lingkungan	Sekarang menjadi Persetujuan Lingkungan berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 (Perda Belum ada)
4	Izin Lokasi	Sekarang menjadi PKKPR berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 (Perda Belum ada)

Sumber : DPMPSTSP Kab. Barru Tahun 2023

4. Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri

Desa Mandiri yang disebut adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, punya infrastruktur memadai, serta punya pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat baik. Data Jumlah desa Mandiri di Kabupaten Barru disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.272
Persentase Desa Berstatus Mandiri Terhadap Total Desa
Kabupaten Barru 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa Mandiri	-	1	7	17	23
2	Jumlah Desa	-	40	40	40	40
3	Persentase (%)	-	2,5	17,5	42,5	57,5

Sumber : Dinas PMDKBPPPA Kab. Barru Tahun 2023

Pada Tahun 2022, Cakupan persentase Desa Berstatus mandiri baru mencapai 57,5 persen, atau dengan kata lain masih ada sekitar 17 desa yang belum bersatatus mandiri di Kabupaten Barru.

5. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan investasi. Angka kriminalitas yang

tertangani dari tahun ke tahun di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.273
Angka Kriminalitas yang Tertangani
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Kriminalitas	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kriminalitas (Kasus)	153	139	139	227	74
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	171.906	180.509	182.373	189.877	191.895
3	Angka Kriminalitas (%)	8,9	7,7	7,6	11,9	0,04

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas Kab. Barru Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Kriminalitas yang Tertangani Kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 11,9 persen, capaian terendah pada tahun 2022 sebesar 0,04 persen

2.1.4.3 Produktivitas Total Daerah

Perkembangan produktifitas total daerah Kabuaten Barru dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan. Angka partisipasi angkatan kerja yang merupakan perbandingan angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Adapun capaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.274
Produktifitas Total Daerah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angkatan Kerja	102403	106779	107151	78.272	84.460
2	Produktifitas Total Daerah (Miliar Rupiah)	4.420,93	4.797,43	4.839,12	5.069,99	5.329,31

Sumber : BPS Tahun 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Produktifitas Total Daerah Kabupaten Barru dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5.329,31 miliar rupiah, capaian terendah pada tahun 2018 dengan nilai 4.420,93 miliar rupiah.

2.1.5 Capaian Indikator Pembangunan Daerah

2.1.5.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru

Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan

daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan

Tabel 2.275

Capaian Indikator Makro Kabupaten Barru

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2022	Target RKPD 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	71,53	72,57
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,4	6,41
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,14
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,11	6,64
5	PDRB Perkapita (ADHB) (Juta Rp)	47,50	50,92
6	Rasio Gini (Angka)	0,36	0,33

Sumber : BPS Tahun 2023 dan Bappelitbangda 2023

2.1.5.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barru

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.276

Capaian Indikator Kinerja Utama 2022 Pemerintah Kabupaten Barru

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Target Tahun 2024
			Target	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,79	71,53	72,57
2	Indeks Pendidikan	Poin	69,94	65,31	70,83
3	Indeks Kesehatan	Poin	76,69	75,92	77,26
4	Paritas Daya Beli	Juta Rupiah	11,12	11,27	11,63
5	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,011	0,061	0,006
6	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	5,45	0,05	9,09

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Target Tahun 2024
			Target	Capaian	
7	Indeks Ketahanan Bencana	Poin	0,69	0,64	0,75
8	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	9,52	0,083	12,7
9	Indeks Williamson	Poin	0,29	0,29	0,27
10	Indeks daya saing daerah Pilarinfrastruktur	Poin	3,82	1,95	3,881
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	5,11	6,64
12	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	51,94	50,27	52,97
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	73,73	72,04	74,26
14	Indeks Gini	Poin	0,35	0,33	0,33
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,88	5,32	5,14
16	Angka Kemiskinan	%	7,45	8,40	6,41
17	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	65	50,13	73
18	Nilai SAKIP	Poin	60	57,34	70
19	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,51	3,96	4
20	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	6,5	0,04	5,9
21	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,001	0,001	0,001

Sumber : BPS Tahun 2023, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2023

2.1.5.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022 diukur melalui indikator kinerja yang menunjukkan bahwa dari 199 yang diukur, terdapat 59 indikator yang telah melampaui target yang di tetapkan pada tahun 2021, 57 indikator yang sesuai target 2021 dan 83 indikator yang belum mencapai target 2021. Kinerja outcome penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026 dengan berbagai indikator dan capaiannya disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.277
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
1					ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	1				KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	1	1			Tingkat kemiskinan	%	9,04	8,57	8,26	9,71	6,41	7,45	Belum tercapai
1	1	2			Pertumbuhan Ekonomi	%	6,81	7,41	0,87	4,77	5,11	4,47	Melampaui
1	1	3			PDRB per kapita	Juta Rp	37,15	42,00	40,30	43,40	47,50	43,90	Melampaui
1	1	4			Indeks Gini	Poin	0,38	0,36	0,36	0,36	0,33	0,35	Melampaui
1	1	5			Laju inflasi	%	1,96	2,45	1,61	4,09	6,66	3,0 – 1,0	Belum tercapai
1	1	6			Indeks Williamson	Poin	0,27	0,29	0,29	0,29	-	0,29	-
1	2				KESEJAHTERAAN SOSIAL								
1	2	1			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,63	70,6	71,00	71,13	71,53	71,79	Belum tercapai
1	2	2			Tingkat pengangguran terbuka	%	5,38	5,79	6,39	6,74	5,32	5,88	Melampaui
1	2	3			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.56	13,57	13,58	13,59	13,61	13,61	Tercapai
1	2	4			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.86	7,96	8,23	8,24	8,25	8,53	Belum tercapai
1	2	5			Angka usia harapan hidup	Tahun	68.60	68,91	69,02	69,07	69,35	69,05	Melampaui
1	2	6			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,44	95,42	95,52	95,51	95,64	95,58	Melampaui
1	2	7			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	69,24	63,31	63,96	63,98	65,24	64,10	Melampaui
2					ASPEK PELAYANAN UMUM								
2	2				Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
2	2	1			Pendidikan								
2	2	1	1		Tingkat partisipasi warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	79,21	80,25	85,05	91,38	74,14	91,55	Belum tercapai
2	2	1	2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	NA	NA	NA	NA	97,43	94,49	Melampaui
2	2	1	3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam	%	NA	NA	NA	NA	96,87	91,57	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					pendidikan menengah pertama								
2	2	1	4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	NA	NA	NA	NA	87,42	80,71	Melampaui
2	2	1	2	1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	99,32	100,49	100,67	101,57	103,23	105,80	Belum tercapai
2	2	1	2	2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	103,23	107,82	112,09	88,87	91,41	107,81	Belum tercapai
2	2	1	3	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	92,14	94,71	93,99	98,20	99,39	94,49	Melampaui
2	2	1	3	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,61	90,42	90,50	82,28	82,21	91,57	Melampaui
2	2	1	4	1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	92,13	100,40	97,69	98,19	99,38	100,00	Belum tercapai
2	2	1	4	2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	85,61	107,38	93,41	95,32	94,01	100,00	Belum tercapai
2	2	1	5	1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,18	0,38	0,44	0,45	0,52	0	Belum tercapai
2	2	1	5	2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,35	1,08	1,19	1,36	1,90	0	Belum tercapai
2	2	1	6	1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	98,81	100	100	98,63	100	Belum tercapai
2	2	1	6	2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	97,11	100	100	97,82	100	Belum tercapai
2	2	1	7	1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	105,81	114,23	122,23	93,61	90,29	100	Belum tercapai
2	2	1	7	2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	%	-	-	-	-	-	100	-
2	2	1	8	1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	88,44	89	94,23	98,81	94,24	95,67	Belum tercapai
2	2	1	8	2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	50	55	55	53,70	55,56	55,84	Belum tercapai
2	2	1	9	1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia	%	114,07	102,63	100,06	100,51	99,50	104,20	Belum tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					SD								
2	2	1	9	2	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	%	53,07	40,59	52,1	34,07	38,24	56,75	Belum tercapai
2	2	1	10	1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)		1074,24	1228,34	1.100,34	1.130,48	664,98	1.048,87	Belum tercapai
2	2	1	10	2	Rasio guru/ murid pendidikan dasar SMP (SMP)		819,67	1109,48	1,216,47	1.038,69	1.434,29	718,95	Melampaui
2	2	1	11		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	NA	90,5	90,42	90,81	89,17	99,25	Belum tercapai
2	2	1	12		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,15	90.27	88,24	94,89	100	89,34	Tercapai
2	2	2			Kesehatan								
2	2	2	1		Angka Kematian Bayi (AKB) Bayi per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	2,31	9,87	3	3	15	1,84	Belum tercapai
2	2	2	2		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	angka per 100.000	99,77	99,13	99,7	99,7	99,60	100	Belum tercapai
2	2	2	3		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	0,99	1,59	1	1	1	0,2	Belum tercapai
2	2	2	4		Angka Kematian Neonatal per 1000kelahiran hidup	angka per 100.000	3,29	6,37	2	3	15	1,45	Belum tercapai
2	2	2	5		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka per 100.000	131,8	222,93	98	230	67	56	Belum tercapai
2	2	2	6		Rasio dokter per satuan penduduk	angka per 1000	0,13	0,2	0.13	0,14	0,25	0,29	Belum tercapai
2	2	2	7		Rasio tenaga medis persatuan penduduk	angka per 1000	0,32	0,41	0.30	0,31	0,43	0,44	Belum tercapai
2	2	2	8		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	NA	NA	NA	NA	0,1	0,1	Tercapai-
2	2	2	9		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	2	2	10		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	97	Belum tercapai
2	2	2	11		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	93	Belum tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
2	2	2	12		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	NA	NA	NA	NA	95	100	Belum tercapai
2	2	2	13		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	79,72	79,84	60.60	67,89	82,60	62,40	Melampaui
2	2	2	14		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	89	65,4	Melampaui
2	2	2	15		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	69	58,4	Melampaui
2	2	2	16		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	69	80,4	Belum tercapai
2	2	2	17		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	65	100	Belum tercapai
2	2	2	18		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	94	100	Belum tercapai
2	2	2	19		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	89	100	Belum tercapai
2	2	2	20		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	102	100	Melampaui
2	2	2	21		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	NA	NA	NA	NA	91	73,8	Melampaui
2	2	2	22		Cakupan penjangkaran	%	22,47	92,83	64	77,06	88,95	100	Belum tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					kesehatan siswa SD dan setingkat								
2	2	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2	2	3	1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	-	-	-	-	8,46	5,71	Melampaui
2	2	3	2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	-	-	-	-	17,06	30,21	Belum Tercapai
2	2	3	3		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	-	-	-	-	74,58	83,13	Belum Tercapai
2	2	3	4		Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	-	-	25	71,36	Belum Tercapai
2	2	3	5		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	-	-	-	-	100	100	Tercapai
2	2	3	6		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	-	-	-	-	100	100	Tercapai
2	2	3	7		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	-	-	-	-	100	100	Tercapai
2	2	3	8		Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	100	100	Tercapai
2	2	3	9		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	95,79	95,79	100	100	100	100	Tercapai
2	2	3	10		Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	-	3,88	3,88	NA	6,41	100	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
2	2	3	11		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	49,94	48,06	50,41	50,79	51,67	54,00	Belum Tercapai
2	2	3	12		Rasio Jaringan Irigasi		18,9	27,73	27,73	27,81	27,90	52,66	Belum Tercapai
2	2	3	13		Presentase penduduk berakses air minum	%	88,02	95,3	95,61	96,77	95,75	97,75	Belum Tercapai
2	2	3	14		Persentase areal kawasan kumuh	%	0,26	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	Tercapai
2	2	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman								
2	2	4	1		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	-	-	-	-	86,21	73,90	Melampaui
2	2	4	2		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	-	-	-	-	1,09	3,63	Belum Tercapai
2	2	4	3		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	-	-	-	54,6	36,85	Melampaui
2	2	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
2	2	5	1		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	NA	NA	NA	NA	100	100	Tercapai
2	2	5	2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	NA	NA	NA	NA	100	100	Tercapai
2	2	5	3		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Per 10.000 pddk	0,6	0,6	0,48	0,47	0,38	0,44	Belum Tercapai
2	2	5	4		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	2	5	5		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	NA	NA	NA	NA	177.648	24.443	Melampaui
2	2	5	6		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	NA	NA	NA	NA	177.648	26.843	Melampaui
2	2	5	7		Persentase warga negara yang memperoleh	%	NA	NA	NA	NA	100	100	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
2	2	5	8		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	NA	NA	NA	100	100	Tercapai
2	2	5	9		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	73,25	100	100	100	100	100	Tercapai
2	2	5	10		Tingkat waktu tanggap (responsetime rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	2	6			Sosial								
2	2	6	1		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	NA	NA	NA	NA	100	100	Tercapai
2	2	6	2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	100	100	Tercapai
2	2	6	3		Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	93,2	95,68	45,15	100,00	100,00	70,00	Melampaui
2	2	6	4		Presentase PMKS yang tertangani	%	93,2	95,68	45,15	100,00	100,00	70,00	Melampaui
2	3				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2	3	1			Tenaga Kerja								
2	3	1	1		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	NA	NA	NA	NA	58	44,40	Belum tercapai
2	3	1	2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	NA	NA	NA	53,66	56,86	-	
2	3	1	2		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	NA	NA	NA	NA	3.982,83	61	
2	3	1	3		Persentase Perusahaan yang menerapkan	%	NA	NA	NA	NA	78,60	42,88	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).								
2	3	1	4		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	42,81	9,8	Melampaui
2	3	1	5		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	0,73	77,00	79,00	83,00	67,00	70,53	Belum Tercapai
2	3	1	6		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	Tercapai
2	3	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2	3	2	1		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	NA	NA	NA	NA	41,42	13,65	Melampaui
2	3	2	2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	NA	NA	NA	NA	100	0,19	Melampaui
2	3	2	3		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	18,51	18,55	18,55	9,49	9,85	18,75	Belum Tercapai
2	3	2	4		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	24	20	20	20	20	21,12	Belum Tercapai
2	3	2	5		Rasio KDRT		0,02	0,02	0,02	0,02	0	0,38	Melampaui
2	3	2	6		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	2	7		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit								
2	3	2	8		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	3			Pangan								
2	3	3	1		Ketersediaan pangan utama	%	4.366	4.379	261.588	229.133	237.980	46,78	
2	3	3	2		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	0,28	0,42	0,42	45,20	77,30	65,00	Melampaui
2	3	5			Lingkungan Hidup								
2	3	5	1		Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Belum Tercapai
2	3	5	2		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Belum Tercapai
2	3	5	3		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	3	5	4		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	62,22	62,22	50,00	60,67	50,67	59,00	Belum Tercapai
2	3	5	5		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	94,2	93,4	90,59	92,52	92,74	91,00	Melampaui
2	3	5	6		Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan Lahan		51,10	63,77	69,77	70,25	70,44	70,00	Melampaui
2	3	5	7		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	9,00	8,00	0,05	10,00	23,00	6,24	Melampaui
2	3	5	8		Peningkatan kapasitas dan Sarana		1	0	1	1	2	2	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah								
2	3	5	9		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA	100					100	100	Tercapai
2	3	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2	3	6	1		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0,99	0,99	0,99	0,99	0,98	100	Belum Tercapai
2	3	6	2		Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,88	0,92	0,97	0,99	100	-	Belum Tercapai
2	3	6	3		Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	-	-	50,72	100	Belum Tercapai
2	3	6	4		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	3	6	5		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Tercapai
2	3	6	6		Cakupan Penerbitan KTP	%	100	100	99,99	99,99	98,06	100	Belum Tercapai
2	3	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2	3	7	1		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desayang baik	%	100	100	100	100	100	1	Tercapai
2	3	7	2		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	1	1	Tercapai
2	3	7	3		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		27,16	27,18	39,44	25,44	41,70	41,65	Melampaui
2	3	7	4		Presentase LPM Berprestasi	%	12,72	12,72	25,45	25,45	35,00	32,36	Melampaui
2	3	7	5		Presentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	7	6		Presentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	7	7		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30	30	30	30	30	30	Tercapai
2	3	7	8		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50	50	50	50	50	50	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
2	3	8			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2	3	8	1		Rasio akseptor KB		70,00	67,88	66,63	69,63	53,68		
2	3	8	2		Angka pemakaian kontrasepsi/CP R bagi perempuan menikah usia 15 -49	%	69,94	67,88	66.63	75,01	64,99	70,36	Belum Tercapai
2	3	8	3		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,7	1,71	1,51	1,75	1,44	1,15	Belum Tercapai
2	3	8	4		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	29,78	19,35	16,71	15,89	17,41	17,65	Belum Tercapai
2	3	8	5		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	13,71	13,62	13,9	18,02	10,20	14,68	Belum Tercapai
2	3	8	6		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	45,29	46,38	50.09	42,3	32,44	52,89	Melampaui
2	3	8	7		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	56,49	56,65	45,13	61,05	51,12	47,66	Melampaui
2	3	8	8		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	43,01	43,13	30,1	30,90	43,06	31,78	Melampaui
2	3	8	9		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	36,72	37,32	33,16	34,05	50,35	35,02	Melampaui
2	3	8	10		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	8	11		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	1000	1042	900	1024	759	950,37	Belum Tercapai
2	3	8	12		Cakupan PKB/ PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	8	13		Cakupan PUS peserta KB	%	42	44,92	51,15	39,02	97,77	55,9	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri								
2	3	8	14		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	8	15		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10,55	100	Belum Tercapai
2	3	8	16		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	8	17		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	8	18		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	9			Perhubungan								
2	3	9	1		Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1.693.893	1.682.943	853.764	641.295	288.282	1.909.104	Belum Tercapai
2	3	9	2		Rasio konektivitas kabupaten/kota		NA	NA	NA	NA	0,76	72,55	Belum Tercapai
2	3	9	3		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		1	9	8	8	8	11	Belum Tercapai
2	3	9	4		Presentase layanan Angkutan darat	%	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	99	Belum Tercapai
2	3	9	5		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang /Ton	936.225	907.025	825.600	592.908	189.900	927.605 Org 12.709 Ton	Melampaui
2	3	9	6		Jumlah orang/barang melalui	Orang /Ton	4.792.684 Org,	1.728.230 Org,	853.764 Org,	641.395 Org,	237.738 Org,	1.881.879 Ogr	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					dermaga/bandara/ terminal per tahun		24.717,87 Ton	9.694.239 Ton	21.441 Ton	14.237.510 Ton	18.552.717 Ton	9.785.137 Ton	
2	3	10			Komunikasi dan Informatika								
2	3	10	1		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	NA	NA	NA	NA	86,04 %	100 %	Belum Mencapai
2	3	10	2		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	42,54 %	97 %	Belum Mencapai
2	3	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2	3	11	1		Persentase koperasi aktif	%	56,31	61,76	62,5	62,86	63,55	76,31	Belum Tercapai
2	3	11	2		Persentase UKM non BPR/LKM UKM	%	100	93,88	96,46	96,46	-	95,20	
2	3	11	3		Presentase BPR/LKM Aktif	%	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	73,88	Belum Tercapai
2	3	11	4		Presentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,55	99,74	99,27	99,35	99,36	99,84	Belum Tercapai
2	3	12			Penanaman Modal								
2	3	12	1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		325	260	118	48	49	122	Belum Tercapai
2	3	12	2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	rp	729.568.409.663	730.659.151.736	855.316.873.042	401.993.726.034	424.182.849.592	867.333.213.707	Belum Tercapai
2	3	12	3		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	35	0,15	17,06	11,13	-6,36	17,30	Belum Tercapai
2	3	13			Kepemudaan dan Olahraga								
2	3	13	1		Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	3	13	2		Presentase wirausaha muda	%	5,56	13,33	92,66	87,81	52,77	13,79	Melampaui
2	3	13	3		Cakupan pembinaan olahraga	%	50,00	93,1	93,1	92,86	92,86	100	Belum Tercapai
2	3	13	4		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	74,13	76	76	100	77,78	6,80	Melampaui
2	3	13	5		Jumlah atlet berprestasi	%	0	0	0	0	0	1	Belum Tercapai
2	3	13	6		Cakupan pembinaan atlet muda	%	100	70,9	70,9	0	68,27	73,33	Belum Tercapai
2	3	13	7		Jumlah Prestasi olahraga	Org	0	0	0	0	0	1	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
2	3	14			Statistik								
2	3	14	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	NA	NA	NA	NA	100 %	82 %	Melampaui
2	3	14	2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		NA	NA	NA	NA	100 %	82 %	Melampaui
2	3	15			Persandian								
2	3	15	1		Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	NA	NA	NA	100 %	100 %	Tercapai
2	3	15	2		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	Tercapai
2	3	16			Kebudayaan								
2	3	16	1		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	3	5	5	5	15	9	Melampaui
2	3	16	2		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	40,9	53,57	100	100	100	82,74	Melampaui
2	3	16	3		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	2	3	3	3	3	6	Melampaui
2	3	16	4		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	28	28	15	15	15	30	Belum Tercapai
2	3	17			Perpustakaan								
2	3	17	1		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa/tahun	193.601	202.142	121.286	123.347	127.693	125.445	Tercapai
2	3	17	2		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	56,435	58.685	58.685	59.137	59.837	60.697	Belum Tercapai
2	3	17	3		Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,31	0,31	0,31	0,29	0,29	0,3	Belum Tercapai
2	3	18	4		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Org	3	3	3	5	10	2	Belum Tercapai
2	3	18			Kearsipan								

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
2	3	18	1		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	72,97	81,08	80,50	80,50	55,00	100	Belum Tercapai
2	3	18	2		Peningkatan SDM pengelola kearsipan		3	3	0	4	0	2	Belum Tercapai
2	3	18	3		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	NA	NA	NA	NA	75	54,5	Melampaui
2	3	18	4		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan erbangsa dan bernegara Untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	NA	NA	NA	NA	50	56	Belum tercapai
2	4				Pelayanan Urusan Pilihan								
2	4	1			Pariwisata								
2	4	1	1		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	NA	NA	NA	NA	122,22	3	Melampaui
2	4	1	2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	54,80	5	Melampaui
2	4	1	3		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	NA	NA	NA	NA	1,09	1,03	Melampaui
2	4	1	4		PAD Sektor Pariwisata		0,03	0,03	0,06	0,06	0,13	0,97	Belum Tercapai
2	4	2			Pertanian								
2	4	2	1		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	NA	NA	NA	NA	5,83	6,98	Belum Tercapai
2	4	2	2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	NA	NA	NA	NA	-84,50	0,33	Belum Tercapai
2	4	2	3		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	51,72	51,86	56,49	56,55	57,20	6,98	Melampaui

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
2	4	2	4		Cakupan bina kelompok petani	%	19,75	6.17	23.88	13,88	11,24	12,11	Belum Tercapai
2	4	3			Perdagangan								
2	4	3	1		Ekspor Bersih Perdagangan		120.712.891	97.264.928	97.264.928	97.264.928	-	10.166.478	
2	4	3	2		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	23,04	30,77	30,77	30,77	-	28,28	
2	4	4			Perindustrian								
2	4	4	1		Cakupan bina kelompok pengrajin	%	20,67	20,67	14,00	14,00	15,00	15	Tercapai
2	4	5			Kelautan dan Perikanan								
2	4	5	1		Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	NA	NA	NA	NA	26.421,30	26.814,23	Belum Tercapai
2	4	5	2		Produksi perikanan	Ton	24.373,41	25648,66	25733,9	26.167,72	26.429,87	26.222,59	Melampaui
2	4	5	3		Konsumsi ikan	%	99,96	99,53	99,99	99,26	100,02	49,37	Melampaui
2	4	5	4		Cakupan bina kelompok nelayan	%	168	350	388	283	80	78	Melampaui
2	4	5	5		Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	8.174,37	8.583,00	12.554,69	12.703,36	14.640,82	12.943,00	Melampaui
2	5				Penunjang Urusan								
2	5	1			Sekretariat Daerah								
2	5	1	1		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	NA	NA	NA	NA	25,94	27,19	Belum Tercapai
2	5	1	2		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	NA	NA	NA	NA	38,33	21,6 %	Melampaui
2	5	2			Sekretariat Dewan								
2	5	2	1		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	2	2		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
					dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)								
2	5	2	3		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	3			Perencanaan Pembangunan								
2	5	3	1		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	3	2		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	3	3		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	3	4		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
2	5	3	5		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	98,83	100	100	100	100	100	Tercapai
2	5	3	6		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	84,29	100	100	100	100	Tercapai
2	5	4			Keuangan								
2	5	4	1		Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2	5	4	2		Persentase SILPA	%	14,25	13,37	9,09	12,63	13,18	5	Melampaui
2	5	4	3		Persentase belanja pendidikan (20%)	%	27,60	25,55	22,92	31,58	31,55	20	Melampaui
2	5	4	4		Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,99	17,06	18,66	21,29	18,13	10	Melampaui
2	5	4	5		Penetapan APBD		20 Desember 2017	17 Desemb er 2018	29 Desemb er 2019	30 Desember 2020	30 Desember 2021	30 November 2021	Belum Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
2	5	4	6		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	NA	NA	NA	NA	-12,04	6,43	Belum Tercapai
2	5	4	7		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	NA	NA	NA	NA	18,56	4,44	Melampaui
2	5	4	8		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		NA	NA	NA	NA	11,83 %	7,23	Melampaui
2	5	5			Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
2	5	5	1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	NA	NA	NA	NA	299,10	4,81	Melampaui
2	5	5	2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	NA	NA	NA	NA	24,31	23,07	Melampaui
2	5	5	3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	NA	NA	NA	NA	11,08	40	Belum Tercapai
2	5	5	4		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JPL	9,57	5,39	16,56	25,56	26,77	20	Melampaui
2	5	5	5		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5,26	37,63	7,25	11,72	25,10	15	Melampaui
2	5	5	6		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	68,67	69,58	57,34	67,31	29,02	68	Belum Tercapai
2	5	5	7		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	26	33	30	28	32	34	Belum Tercapai
2	5	5	8		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	530	579	544	343	980	200	Melampaui
2	5	5	9		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.695	2.654	3.345	2857	2.733	3.345	Belum Tercapai
2	5	6			Penelitian dan Pengembangan								
2	5	6	1		Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	50	100	100	100	100	Tercapai

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Satuan	Realisasi					Target RPJMD 2022	Interpretasi (Belum Tercapai, Tercapai, Melampaui)
							2018	2019	2020	2021	2022		
2	5	6	2		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	88,24	75	87,5	100	100	100	Tercapai
2	5	6	3		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	%	47,22	52,77	90.,90	100	100	100	Tercapai
2	5	6	4		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	47,22	52,77	64,93	72,92	72,00	100	Belum Tercapai
2	5	7			Pengawasan								
2	5	7	1		Persentase tindak lanjut temuan	%	97,26	89,19	84,00	90,47	50,94	100	Belum Tercapai
2	5	7	2		Persentase pelanggaran pegawai	%	0,41	0,66	0,18	0,56	0,10	0	Belum Tercapai
2	5	7	3		Jumlah temuan BPK		17	10	14	8	9	10	Belum Tercapai
2	5	7	4		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		NA	NA	NA	NA	2	3	Belum Tercapai
2	5	7	5		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		NA	NA	NA	NA	2	3	Belum Tercapai

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2023

2.1.5.4 Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimala (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah

daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Capain indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.279
Capain Indikator SPM Kabupaten Barru 2018 -2022

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian SPM				
			2018	2019	2020	2021	2022
SPM PENDIDIKAN							
1	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100	79,21	80,25	85,05	91,38	74,14
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) (%)	100	85,61	90,42	90,50	96,32	97,22
3	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100	37,16	36,10	36,10	84,19	100
SPM KESEHATAN							
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil (%)	100	90.52	91,96	100	91	97
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (%)	100	92.5	98,98	100	93	93
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir (%)	100	94.36	97,64	100	99	95
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita (%)	100	79.72	95,94	61	68	83
5	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar (%)	100	95.38	97,17	64	77	89
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif (%)	100	42.44	91,16	57	2	69
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut (%)	100	61.44	91,17	79	3	48
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	100	71.04	100	100	4	65
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus (%)	100	100	100	100	33	94
10	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (%)	100	100	100	100	51	88
11	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis (%)	100	100	100	100	39	102
12	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV (%)	100	19	98	72	82	91

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian SPM				
			2018	2019	2020	2021	2022
SPM PEKERJAAN UMUM							
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	100	88,02	95.30	95,61	96,7	100
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic (%)	100	94,89	95,79	100	100	100
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	0	14	0	0	100
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	100	0	0	0	0	0
SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	100	100	100
2	pelayanan informasi rawan bencana (%)	100	80	80	80	80	100
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	40	40	40	40	100
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran (%)	100	32	100	100	100	100
SPM SOSIAL							
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti (%)	100	100	63,24	100	100	100
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti (%)	100	0	63,24	100	100	100
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti (%)	100	74,37	75	100	100	100
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (%)	100	100	100	100	100	100
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeltibangda Kab. Barru Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas capaian SPM kabupaten Barru masih perlu perhatian karena pencapaian yang belum maksimal. Koordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya sangat diperlukan. Adapun permasalahan terkait pencapaian SPM adalah sebagai berikut.

1.
- Belum optimalnya pendekatan integratif untuk pencapaian SPM sehingga program-program terkait SPM yang diupayakan belum

dapat mendorong akselerasi dan efektivitas pencapaian target SPM menuju 100%.

2. Pada jenjang Pendidikan dan Kesehatan diperlukan upaya pemenuhan sarana prasarana, akses, pemerataan dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidikan dan kesehatan. Tantangan yang berat dikarenakan tidak hanya terkait penyediaan fasilitas dan tenaga pendidikan dan juga kesehatan oleh pemerintah namun juga kesadaran masyarakat itu sendiri.
3. Belum optimalnya dukungan terhadap penanggulangan bencana termasuk belum adanya Dokumen Penanggulangan Bencana, selain itu luasnya wilayah yang menjadi cakupan pelayanan penanggulangan bencana dalam hal ini bencana kebakaran serta belum terpenuhinya fasilitas bencana.
4. Belum adanya inisiasi kebijakan rehabilitasi sosial luar panti dalam bentuk *home/day care services* bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak potensial. Untuk itu perlu adanya inisiasi tersebut diatas sebagai upaya pemberian pelayanan dasar kepada warga miskin tidak potensial.

Perlunya pemantapan kualitas dan akses layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin termarginalkan untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak.

2.1.5.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dan berkomitmen penuh dalam penentuan sasaran dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru juga ikut berkomitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 terdapat 220 indikator SDGs/TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Barru diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 indikator dengan 16 Tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun dari 220 indikator tersebut yang

kemudian dilaksanakan hanya sebanyak 55 indikator. Adapun capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.280
Rekapitulasi Capaian SDGs/TPB Kabupaten Barru Tahun 2019 s/d 2022 Berdasarkan Tujuan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi				Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2019	2020	2021	2022		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	8,57	8,26	8,68	8,40	7,45	Belum Tercapai
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						37.391	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	95,30	95,61	96,70	96,75	100	Belum Tercapai
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	95,79	100	100	100	100	Tercapai
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	94,71	93,99	98,20	99,39	99,71	Belum Tercapai
		Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Desa	2	3	NA	NA	25	-
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-	-	-	-	358	
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial.						0	
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	259.04 8.000	147.23 0.000	NA	7.755.2 90.000	58.682 .407	Meningkat
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada/Tidak	-	-	-	ADA	ADA	Tercapai
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Poin	0,020	0,010	NA	14,00	6,19	Belum Tercapai
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	42,01	41,87	NA	NA	26	
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	NA	91,20	NA	93,2	96,00	Belum Tercapai

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi				Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2019	2020	2021	2022		
		mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		1,59	1	1	1	0,41	Melampaui
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	/1000 Jiwa	6,37	2,00	3,00	15,00	2,95	Belum Tercapai
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	/1000 Jiwa	2,00	0,53	2,00	0,07	0,02	Belum Tercapai
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	13,62	13,90	18,02	10,20	28,00	Belum Tercapai
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	%					0,57	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	81,24	81,24	NA	NA	99,37	
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	74,36	74,36	NA	NA	97,19	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	100,49	100,67	101,57	103,23	114,00	Belum Tercapai
		Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	%					93,47	
		Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	%					100	
		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik. ((1/2) x 100%)	%					100	
5	Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.						21	
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	19,35	16,71	15,89	17,41	10	Belum Tercapai
		Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.						95	
		Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Keg	5	6	6	36	10	Melampaui
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	95,3	95,61	96,70	95,75	100,00	Belum Tercapai
		Proporsi populasi yang memiliki akses	%	95,3	95,61	96,70	95,75	100,00	Belum Tercapai

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi				Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2019	2020	2021	2022		
		layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.							
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	KK	1.810	1.810	1.221	NA	3852	
		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	61,67	50,00	60,67	NA	95,06	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	PDB per kapita.	Juta Rupiah	41,71	42,43	43,42	47,50	64,38	Belum Tercapai
		Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.						68,87	
		Persentase tenaga kerja formal.						59,77	
		Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.						60,11	
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5,79	6,39	6,74	NA	4,45	
		Jumlah wisatawan mancanegara.						1759	
		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.						57,02	
		Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	6,13	6,02	NA	1,09	7,03	
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						ADA	
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						37391	
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.						ADA	
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	259.04 8.000	147.23 0.000	NA	NA	100.68 2.407	
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	80,41	80,52	81,93	85,05	100	Belum Tercapai
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		-	-	ADA	ADA	ADA	
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	Jiwa	0,03	0,01	NA	0,061	0,00	Belum Tercapai

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Realisasi				Target Akhir Periode (2026)	Interpretasi
				2019	2020	2021	2022		
	dan Dampaknya	orang.							
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dok	0	0	0	0	3	Belum Tercapai
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,01	0,01	NA	NA	0,00	
		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lemba ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	%	CC	CC	CC	CC	BB	Belum Tercapai
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	NA	NA	NA	46,66	98,99	Belum Tercapai
		Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.						5	
		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						ADA	
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.						1.131.828.048.820	

Sumber : Bappelitbangda Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2018 – 2022 untuk dipenuhi target pencapaiannya itu sebanyak 55 Indikator. 46 indikator sampai dengan Tahun 2019 belum tercapai, 3 indikator yang sesuai dan 6 indikator TPB yang telah mencapai target. Adapun beberapa kendala dalam pencapaian TPB/SDGs dikarenakan penerapan SGD's dari keseluruhan stakeholders terdapat kurang pemahaman akan pentingnya implementasi SDGs, yaitu dari segi masyarakat. Masyarakat tidak sepenuhnya paham akan pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan ini. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan SDGs. Sehingga harapannya para stakeholders dapat saling memaksimalkan dan mendukung akan implementasi dari Sustainable Development Goals.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Barru melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sesuai dengan tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif, ini bertujuan antara lain:

- 1. untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- 2. serta konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- 3. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

A. Konsistensi Program Kegiatan, dan Sub. Kegiatan

Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan konsistensi program, Kegiatan dan Sub-kegiatan antara RKPD dengan RPJMD, RKPD dengan APBD.

Tabel 2.281
Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2	4	4	4	2	2	2	2	-	2	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9	7	7	7	7	7	7	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	8	8	8	4	4	4	4	-	4	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	DINAS SOSIAL

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	4	4	4	4	4	4	1	-	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	6	6	6	6	6	6	-	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	5	5	5	4	5	4	1	-	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	9	9	9	9	9	9	1	-	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	4	4	4	3	4	3	1	-	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	DINAS PERIKANAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	DINAS PARIWISATA
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	DINAS PERTANIAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
32	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
33	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	SEKRETARIAT DPRD
34	PERENCANAAN	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
35	KEUANGAN	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
36	KEUANGAN	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan	Jumlah Program				Program Yang Sama			Program Yang Tidak Sama			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RPJMD 2016 - 2021	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	
37	KEPEGAWAIAN	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
40	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	INSPEKTORAT
41	KECAMATAN	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	KECAMATAN TANETE RIAJA
42	KECAMATAN	6	4	4	4	4	4	4	2	-	2	KECAMATAN MALLUSETASI
43	KECAMATAN	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
44	KECAMATAN	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	KECAMATAN BALUSU
45	KECAMATAN	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	KECAMATAN BARRU
46	KECAMATAN	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	KECAMATAN PUJANANTING
47	KECAMATAN	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	KECAMATAN TANETE RILAU
48	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		197	200	200	200	192	194	192	12	-	12	

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD antara lain sebagai berikut:

1. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
 - a. Jumlah rencana program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah 197 program, dan jumlah program dalam RKPD Tahun 2022 juga berjumlah 200 program
 - b. Antara dokumen RPJMD dan RKPD terdapat selisih 8 program diantara kedua dokumen tersebut.
 2. Kesesuaian program RKPD dan APBD
 - a. Jumlah rencana program dalam RKPD adalah 200 program, sedangkan jumlah program dalam APBD adalah 200 program. Untuk kesesuaian program yang sama antara RKPD dan APBD sejumlah 200 program.
 - b. Program yang tidak sesuai tersebut seluruhnya adalah 12 program yang ada di RPJMD namun tidak terdapat dalam APBD
- Dari kedua hal diatas, adanya perbedaan antara jumlah program RPJMD dan RKPD Tahun 2022 disebabkan adanya penyesuaian nomenkelatur dan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang SOTK dan Penyesuaian terhadap Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

Tabel 2.282
Konsistensi Kegiatan RKPD dalam APBD

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	11	11	11	11	11	-	-	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	23	23	23	23	23	-	-	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	5	5	-	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30	30	30	30	30	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16	16	16	16	16	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10	10	10	10	10	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12	12	12	12	12	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14	14	14	14	14	-	-	DINAS SOSIAL
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	12	12	12	12	12	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9	9	9	9	9	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11	11	11	11	11	-	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4	4	4	4	4	-	-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15	15	15	15	15	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	15	15	15	15	-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9	9	9	9	9	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6	6	6	6	6	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	15	15	15	15	15	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9	9	9	9	9	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15	15	15	15	15	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	11	11	11	11	11	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13	13	13	13	13	-	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2	2	2	2	2	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5	5	5	5	5	-	-	DINAS PENDIDIKAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7	7	7	7	7	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6	6	6	6	6	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15	15	15	15	15	-	-	DINAS PERIKANAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13	13	13	13	13	-	-	DINAS PARIWISATA

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	24	24	24	24	24	-	-	DINAS PERTANIAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9	9	9	9	9	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	3	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
32	SEKRETARIAT DAERAH	7	7	7	7	7	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
33	SEKRETARIAT DPRD	12	12	12	12	12	-	-	SEKRETARIAT DPRD
34	PERENCANAAN	12	12	12	12	12	-	-	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
35	KEUANGAN	7	7	7	7	7	-	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
36	KEUANGAN	14	14	14	14	14	-	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
37	KEPEGAWAIAN	10	10	10	10	10	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	1	1	-	-	
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	1	1	-	-	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
40	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	3	3	-	-	INSPEKTORAT
41	KECAMATAN	13	13	13	13	13	-	-	KECAMATAN TANETE RIAJA

No	Urusan	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	APBD & RKPD 2022	RKPD 2022 & RKPD Perubahan	
42	KECAMATAN	14	14	14	14	14	-	-	KECAMATAN MALLUSETASI
43	KECAMATAN	10	10	10	10	10	-	-	KECAMATAN SOPPENG RIAJA
44	KECAMATAN	14	14	14	14	14	-	-	KECAMATAN BALUSU
45	KECAMATAN	14	14	14	14	14	-	-	KECAMATAN BARRU
46	KECAMATAN	14	14	14	14	14	-	-	KECAMATAN PUJANANTING
47	KECAMATAN	15	15	15	15	15	-	-	KECAMATAN TANETE RILAU
48	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	11	11	11	11	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		522	522	522	522	522	-	-	

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD 2022 dan APBD 2022.

- a. Kegiatan dalam RKPD 2022 adalah sejumlah 522, dalam APBD adalah sejumlah 522 kegiatan.
- b. Untuk jumlah kegiatan Antara RKPD 2022 dan RKPD perubahan ada perbedaan 522 Kegiatan.

Untuk pelaksanaan RKPD tahun 2022 sudah mengacu kepada permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang dalam pelaksanaan penjabarannya memuat rincian sampai pada sub kegiatan. Sebagai bentuk dari pelaksanaan evaluasi terkait konsistensi pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD tahun 2022

Tabel 2.283

Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dalam APBD

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	57	57	57	57	57	-	-	DINAS PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	111	111	111	111	111	-	-	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	11	11	11	11	11	-	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49	49	49	49	49	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42	42	42	42	42	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34	34	34	34	34	-	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	45	45	45	45	45	-	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	51	51	51	51	51	-	-	DINAS SOSIAL
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	22	22	22	22	22	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	10	10	10	10	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	23	23	23	23	23	-	-	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4	4	4	4	4	-	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	31	31	31	31	31	-	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	28	28	28	28	28	-	-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31	31	31	31	31	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7	7	7	7	7	-	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	43	43	43	43	43	-	-	DINAS PERHUBUNGAN

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22	22	22	22	22	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	35	35	35	35	35	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27	27	27	27	27	-	-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	58	58	58	58	58	-	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	6	6	6	6	6	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	5	5	5	5	5	-	-	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6	6	6	6	6	-	-	DINAS PENDIDIKAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	28	28	28	28	28	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	9	9	9	9	9	-	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	34	34	34	34	34	-	-	DINAS PERIKANAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	38	38	38	38	38	-	-	DINAS PARIWISATA
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	60	60	60	60	60	-	-	DINAS PERTANIAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	15	15	15	15	15	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10	10	10	10	10	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
32	SEKRETARIAT DAERAH	17	17	17	17	17	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
33	SEKRETARIAT DPRD	35	35	35	35	35	-	-	SEKRETARIAT DPRD
34	PERENCANAAN	25	25	25	25	25	-	-	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
35	KEUANGAN	21	21	21	21	21	-	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH
36	KEUANGAN	88	88	88	88	88	-	-	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
37	KEPEGAWAIAN	24	24	24	24	24	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
38	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	1	1	-	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
39	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	2	2	-	-	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
40	INSPEKTORAT DAERAH	28	28	28	28	28	-	-	INSPEKTORAT
41	KECAMATAN	32	32	32	32	32	-	-	KECAMATAN TANETE RIAJA
42	KECAMATAN	31	31	31	31	31	-	-	KECAMATAN MALLUSETASI
43	KECAMATAN	18	18	18	18	18	-	-	KECAMATAN SOPPENG RIAJA

No	Urusan	Jumlah Sub. Kegiatan			Sub. Kegiatan Yang Sama		Sub. Kegiatan Yang Tidak Sama		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	APBD & RKPD	APBD & RKPD Perubahan	
44	KECAMATAN	30	30	30	30	30	-	-	KECAMATAN BALUSU
45	KECAMATAN	32	32	32	32	32	-	-	KECAMATAN BARRU
46	KECAMATAN	32	32	32	32	32	-	-	KECAMATAN PUJANANTING
47	KECAMATAN	33	33	33	33	33	-	-	KECAMATAN TANETE RILAU
48	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	19	19	19	19	-	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		1420	1420	1420	1420	1420	-	-	

Berdasarkan data yang tercantum dalam table diatas, dapat dijelaskan konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan RKPD antara lain sebagai berikut:

1. RKPD 2022 dan APBD 2022 .
 - a. Sub. Kegiatan dalam RKPD 2022 adalah sejumlah 1420 dan APBD sejumlah 1420 Jumlah kegiatan untuk kedua dokumen telah konsisten.
 - b. Untuk jumlah Sub. kegiatan Antara RKPD 2022 dan RKPD perubahan tidak ada perbedaan yakni sejumlah 1420 Sub. Kegiatan.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah ini akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (stakeholder) untuk mengantar Kabupaten Barru pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Adapun rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, diuraikan sebagai berikut :

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Prospek Perekonomian Daerah

Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan structural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dengan tetap menjaga *fiscal sustainability* jangka menengah.

Perencanaan diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal juga harus menjadi aggregate control untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijakan jangka pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiskal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiskal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah.

Perkembangan berbagai kebijakan terkait kebijakan fiskal dan keuangan yang ditetapkan pemerintah diantaranya:

1. Kebijakan Pemindahan ibukota negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2022. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memperbaiki tata Kelola wilayah ibukota negara untuk

mewujudkan tujuan bernegara, selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibukota Negara yang aman, modern, berkelanjutan dan berketahanan. Sebagai landasan pembangunan IKN di Kalimantan Timur dengan Nama Nusantara.

2. Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022. Kebijakan ini merupakan pemuktahiran kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Kebijakan ini juga mengatur penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Mengatur perencanaan belanja daerah melalui penganggaran belanja daerah, simplikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong penggunaan *creative financing* untuk akselerasi pembangunan di daerah.
3. Kebijakan penyelenggaraan pemilu dan pilukada serentak tahun 2024 merupakan upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel.

Ketiga kebijakan diatas akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan memberi peluang bagi Kabupaten Barru sebagai penyangga Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 akan memberi peluang bagi Kabupaten Barru meningkatkan PAD nya melalui peningkatan penerimaan pajak

daerah, begitupula dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak memberi arah terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3.1.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Global

Pemulihan ekonomi global tahun 2022 tertahan oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang berjalan sejak Februari 2022. Tingginya tensi geopolitik tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, melainkan meluas ke berbagai negara di dunia. Salah satu dampak perang berkaitan dengan tingginya tensi geopolitik adalah saling berbalas sanksi utamanya antara Rusia dengan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara produsen terbesar untuk komoditas energi seperti minyak dan gas serta komoditas pangan gandum dunia. Sehingga, dengan adanya perang, *supply* kebutuhan energi dan pangan menjadi terganggu dan memicu tingginya tekanan inflasi di berbagai negara pada tahun 2022. Dampak perang yang menghambat pemulihan ekonomi juga tecermin pada perekonomian beberapa negara seperti Inggris, Meksiko, Jepang, dan Spanyol yang belum mampu kembali ke level prapandemi hingga tahun 2022.

Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan pada *Baltic Dry Index* (BDI). Penurunan aktivitas perdagangan global disebabkan utamanya oleh gangguan rantai pasok, kebijakan sanksi perdagangan beberapa negara, tingginya harga komoditas, dan tekanan inflasi yang tinggi. Volume perdagangan dunia pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan terus mengalami tren perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing 3,5 dan 1,0 persen, setelah mampu tumbuh tinggi sebesar 9,7 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun jasa mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan *Purchasing Managers' Index* (PMI) hingga berada di zona kontraksi pada akhir tahun 2022.

Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas pada tahun 2022. Selain itu, perang juga memicu krisis energi dan pangan serta peningkatan inflasi berbagai negara hingga mencapai rekor inflasi dalam beberapa dekade.

Dalam merespons dan meredam tingginya inflasi, bank sentral berbagai negara meningkatkan suku bunga acuan. Seiring dengan respons kebijakan kenaikan suku bunga dan adanya kekhawatiran akan risiko resesi dan perlambatan global pada tahun 2023, tren harga komoditas diperkirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022.

Dengan berbagai perkembangan terkini, per Januari 2023 International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 melambat sebesar 2,9 persen. Sementara, lembaga internasional lain, seperti World Bank dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 masing-masing sebesar 1,7 dan 2,2 persen. Inflasi global yang masih tinggi diperkirakan akan menjadi penghambat pertumbuhan pada tahun 2023.

B. Tantangan Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi global pada tahun 2022. Ini menjadi modal kuat dalam menghadapi risiko resesi di tahun 2023 dan tantangan pada tahun 2024. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian target pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap tangguh pada tahun 2023 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yakni masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income* pada tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk mengejar *trajectory* pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan

satu hingga dua persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari SDM yang berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, dalam mengejar pertumbuhan jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikan *trajectory* pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan *megatrend* global ke depan.

C. Tantangan Perekonomian Provinsi

Kinerja ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 menunjukkan adanya pemulihan dengan tumbuh di angka 7,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya di angka 3,25% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan IV juga membawa ekonomi Sulawesi Selatan kembali tumbuh diatas nasional setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh dibawah nasional. Pemulihan ekonomi juga tercermin pada keseluruhan tahun 2021 dengan pertumbuhan 4,65% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh seluruh komponen, didukung berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Sejalan dengan sisi permintaan, sebagian besar Lapangan Usaha (LU) tercatat tumbuh terakselerasi pada triwulan laporan. Perbaikan utamanya didorong oleh kinerja LU utama Sulawesi Selatan, yaitu LU Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertambangan. Perbaikan LU Perdagangan dan Industri Pengolahan terjadi seiring dengan pembatalan rencana pelaksanaan PPKM level 3 pada periode HBKN Nataru merespon terkendalinya penyebaran pandemi dan membaiknya tingkat vaksinasi. Peningkatan pada LU Pertambangan didorong oleh

perbaikan produksi korporasi dan berlanjutnya tren kenaikan harga nikel. Di sisi lain, akselerasi pembangunan proyek infrastruktur di akhir tahun karena target realisasi menyebabkan peningkatan pada LU Konstruksi.

Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang meskipun akan sedikit tertahan seiring peningkatan risiko varian Omicron COVID-19 pada triwulan I 2022.

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik, tingkat inflasi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Inflasi tahunan pada laporan utamanya disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman khususnya komoditas cabai rawit, minyak goreng, dan cabai merah serta Kelompok Transportasi seperti tarif angkutan udara dan tarif angkutan dalam kota. Sementara itu, penahan laju inflasi disumbang oleh penurunan harga beras, bawang merah, dan telur ayam ras.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan tahun 2022 tercatat sebesar 5,77% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,4% (yoy). Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, potensi tekanan inflasi meningkat menjelang periode Nataru akibat adanya peningkatan konsumsi dan pelonggaran aktivitas masyarakat.

Inflasi Sulawesi Selatan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,0 \pm 1\%$ pada tahun 2021. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilisasi harga dan mendukung pemulihan ekonomi.

Perbaikan kinerja ekonomi Sulawesi Selatan didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang terjaga pada triwulan laporan. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek mengalami peningkatan dibandingkan triwulan dan tahun lalu. Akselerasi ekonomi yang terjadi tercermin dari peningkatan kredit baik kepada sektor rumah tangga maupun korporasi. Peningkatan pembiayaan yang terjadi disertai dengan penurunan DPK sektor

rumah tangga dan korporasi. Hal ini disebabkan karena kinerja korporasi dan permintaan rumah tangga yang lebih baik pada triwulan laporan. Di tengah perkembangan tersebut, Non Performing Loan (NPL) masih terjaga di bawah ambang batas.

Kinerja perbankan secara keseluruhan tetap kuat yang salah satunya terlihat dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit mengalami penurunan di tengah perbaikan penghimpunan DPK. Sementara itu untuk kinerja intermediasi perbankan, baik pembiayaan maupun penghimpunan DPK mengalami kenaikan, bahkan mencatat penyaluran pembiayaan tertinggi sejak 6 (enam) tahun terakhir.

Sementara itu, kredit UMKM mencatat peningkatan penyaluran kredit dengan NPL yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini dapat memberikan harapan bahwa sektor UMKM dapat menjadi pendorong kinerja perbankan yang baik. Kuatnya sektor UMKM juga tak lepas dari upaya percepatan perluasan akses keuangan kepada UMKM melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi signifikan pada tahun 2022 serta konsumsi rumah tangga yang meningkat (4,04%; yoy dan 1,73%; qtq) di tengah pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), indikator sistem pembayaran juga menunjukkan adanya peningkatan.

Transaksi nilai besar melalui Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) meningkat 9,6% (yoy) menjadi Rp28,7 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, adopsi pembayaran ritel juga mengalami peningkatan yang signifikan. Transaksi menggunakan kartu kredit tercatat mencapai Rp. 858,5 miliar atau meningkat sebesar 21,8% (yoy). Sementara transaksi e-commerce dan uang elektronik pada tahun 2022 mencatatkan transaksi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan nominal transaksi sebesar 31,6% (yoy) dan 115,9% (yoy) secara berturut-turut. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode Natal dan tahun baru didukung dengan pelonggaran PPKM. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah Quick Reponse Code

Indonesian Standard (QRIS) di Sulsel mencapai 510.792 merchant atau tumbuh sebesar 174,1% (yoy). Dari jumlah tersebut, 73,5% diantaranya merupakan pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Perkembangan implementasi elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) masih berjalan dalam koridor prinsip 6T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi). Realisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 100%, sedangkan realisasi penyerapan Program Sembako mencapai 99,3%. Dari sisi peredaran uang kartal, terjadi net outflow sebesar Rp1,68 triliun. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan uang yang tinggi di tengah masyarakat terutama pada akhir tahun.

Pada periode Agustus 2021, kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan mengalami perbaikan dibanding dengan periode Agustus 2020. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan nilai indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diikuti dengan penurunan nilai indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan juga semakin membaik meski masih berada di masa pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Maret 2021. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III tahun 2021. Inisiasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui stimulus kebijakan diharapkan dapat terus meningkatkan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, seiring dengan upaya percepatan pemulihan kondisi, dampak dari pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah serta penerapan disiplin dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang lebih baik oleh masyarakat serta dunia usaha.

Berlanjutnya stimulus pemerintah berupa bantuan sosial dasar, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu

Prakerja, dan subsidi listrik, serta relaksasi PPnBM 0% untuk mobil low cost green car dan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) turut mendukung peningkatan konsumsi masyarakat. Investasi diperkirakan tumbuh kuat didukung keyakinan investor dan berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah serta swasta. Secara sektoral, peningkatan perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan didorong oleh perbaikan lapangan usaha Konstruksi, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum, serta Pertambangan

Di tengah peningkatan kinerja ekonomi, tekanan inflasi diperkirakan turut meningkat namun tetap terjaga dalam rentang sasaran $3,0 \pm 1,0\%$ (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan.

D. Tantangan Perekonomian Kabupaten

Secara umum kebijakan makro ekonomi diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan struktural dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Selaras dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan daerah senantiasa didorong agar efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga *fiscal sustainability* jangka menengah.

Perencanaan diarahkan lebih fokus pada program prioritas, efisien dan berdaya tahan serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian agar keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Kerangka kebijakan fiskal juga harus menjadi *aggregate control* untuk menjaga konsistensi kebijakan dan sekaligus menjembatani keselarasan antara kebijakan jangka pendek dan jangka menengah melalui pengelolaan fiskal yang konsisten, efektif, hati-hati dan berkelanjutan. Pengelolaan fiskal perlu didorong agar responsive, integrative, komprehensif dan efektif untuk memperkuat pondasi perekonomian daerah.

Peningkatan peran Kabupaten Barru terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional,

merupakan tantangan sendiri. Berikut ini akan ditampilkan tabel capaian 2021, perkiraan capaian 2022 dan target 2023 Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2022 kembali meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha tanpa memasukkan faktor inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Barru 2022 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 5,33 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,07 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, atau meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,77 persen.

Di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mencapai 5,11 persen. Perekonomian semua kategori lapangan usaha di Kabupaten Barru juga berhasil tumbuh positif. Terdapat tiga kategori yang dapat tumbuh di atas 5 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi di tahun 2020. Ketiga kategori itu adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) yang tumbuh 6,48 persen; Transportasi dan Pergudangan (H) yang tumbuh 14,97 persen; dan Jasa Lainnya (R, S, T, U) yang tumbuh 8,89 persen. Kategori-kategori tersebut adalah beberapa kategori yang paling merasakan pemulihan ekonomi, setelah sebelumnya terdampak berbagai kebijakan pembatasan sosial sebagai

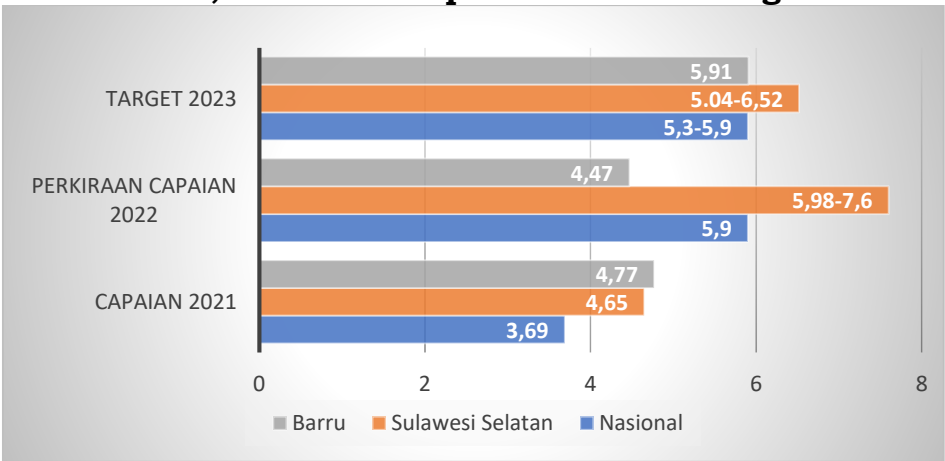
dampak COVID-19 yang memicu pengurangan aktivitas operasional.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori lapangan usaha Jasa Lainnya (R, S, T, U) yang tumbuh 8,89 persen. Pertumbuhan ini ditandai dengan dibukanya kembali beberapa usaha yang bergerak di sektor jasa pada tahun 2021, di saat pada tahun 2020 banyak usaha di sektor jasa harus tutup sementara akibat kebijakan pembatasan dan melemahnya perekonomian karena dampak pandemi COVID-19.

Posisi kedua kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah kategori Transportasi dan Pergudangan, yang tumbuh 7,87 persen. Mobilitas penduduk yang kembali meningkat pasca puncak pandemi, menyebabkan sektor transportasi baik laut maupun darat kembali sibuk. Aktivitas pergudangan dan pengiriman barang sebagai pendukung lapangan usaha lainnya juga kembali meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di semua lapangan usaha secara umum. Kebiasaan masyarakat untuk berbelanja *online* semasa pandemi di 2020 juga masih bertahan dan bahkan meningkat di 2021.

Kondisi perekonomian Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



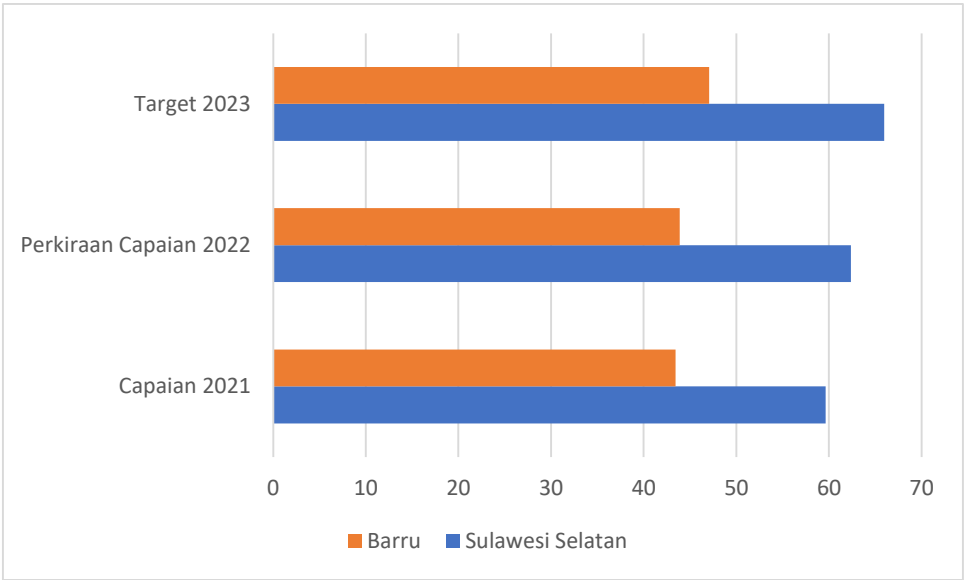
B. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2018 hingga 2022 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 42,47 juta rupiah kemudian tercatat meningkat pada tahun 2021 sebesar 43,43 juta rupiah. Pada tahun 2022 PDRB perkapita Kabupaten Barru ADHB adalah sebesar 47,50 juta rupiah.

Kondisi pendapatan per kapita Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



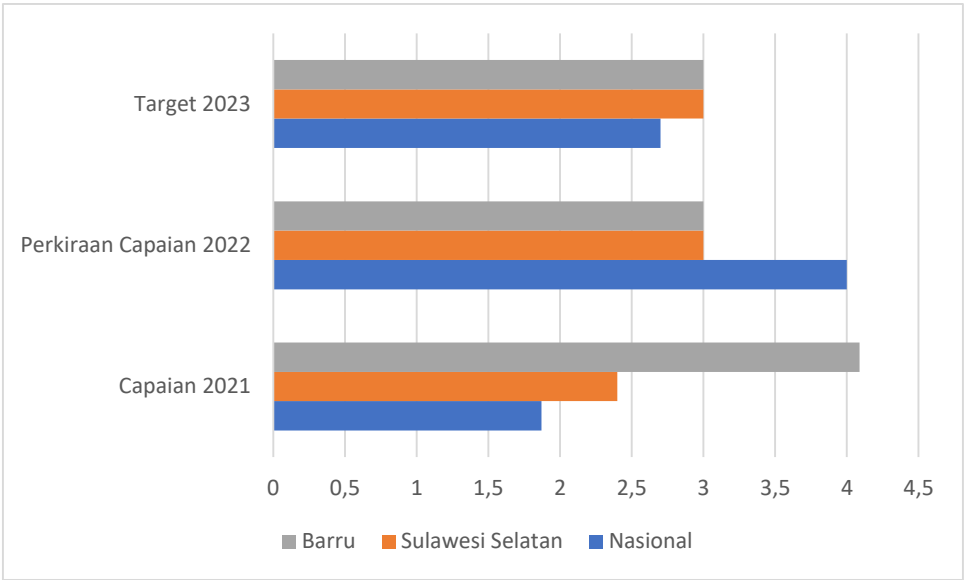
C. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan tingginya inflasi, akan memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2022, inflasi Kabupaten Barru berada pada poin yang sama (2,04 persen) lebih tinggi dibandingkan Nasional (1,68 persen). Rendahnya tekanan inflasi di tahun 2021 didorong oleh daya beli masyarakat yang menurun sebagai imbas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak minggu ke-3 di Maret 2021 menambah jumlah angka pengangguran dan menurunkan sumber pendapatan masyarakat yang berakibat penurunan daya beli. Kondisi ini merupakan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan inflasi. Hubungan kedua indikator tersebut memiliki tren yang cukup linear. Penurunan inflasi menghasilkan trade-off dengan meningkatnya jumlah pengangguran. Menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendorong level konsumsi perlu mendapat prioritas kebijakan nasional saat ini. Dengan pulihnya konsumsi masyarakat, maka level produksi akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka Inflasi yang terjadi ditahun 2022 diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3,0-1,0 persen demikian juga tahun 2023 sebesar 3,0-1,0 persen.

Kondisi Inflasi Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3
Inflasi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



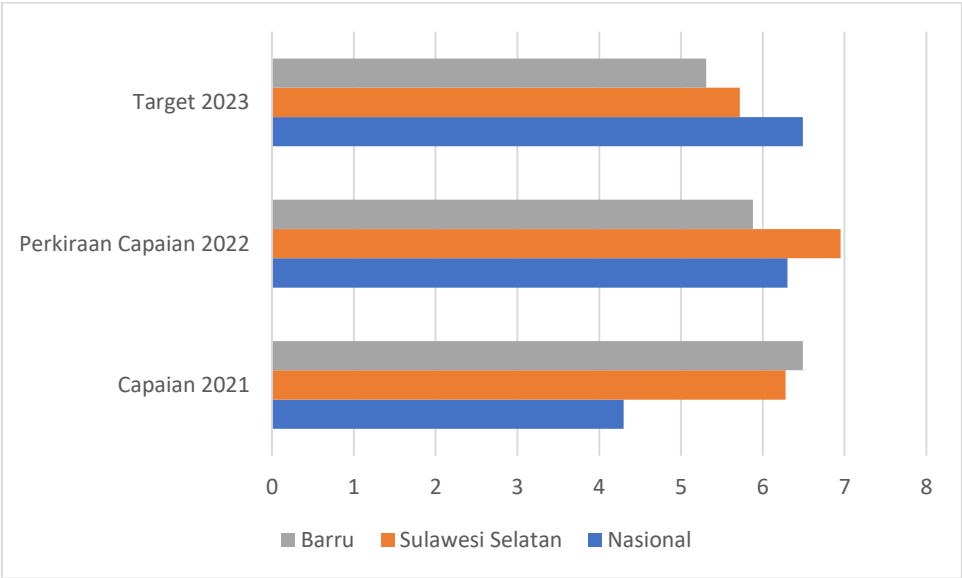
D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 dipengaruhi oleh peningkatan pada beberapa lapangan usaha seperti lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Meski mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding dengan periode sebelumnya, lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Sulawesi Selatan. Peran pemerintah Kabupaten Barru terhadap kondisi perbaikan ini tidak terlihat, karena lebih tingginya tingkat pengangguran terbukanya yang berada pada angka 5,32 persen. Melihat dari kondisi saat ini, , Pemerintah Sulawesi Selatan ditahun 2023 masih memprediksikan capaian tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,16-6,95 persen atau masih lebih tinggi jika dibandingkan dari capaian tahun 2022 yang mencapai 4,51 persen dan lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 5,9 persen. Sementara untuk tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di target oleh pemerintah sulawesi selatan sebesar 6,28 persen atau lebih tinggi dari target Nasional yaitu 6,0-5,30 persen.

Pemerintah Kabupaten Barru ingin menguatkan perannya dengan menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada angka 5,31 pada tahun 2023 dan 5,14 pada tahun 2024. Kondisi

tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Barru sebagaimana dijelaskan diatas serta perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 3.4
Inflasi Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



E. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Tingkat Kemiskinan;

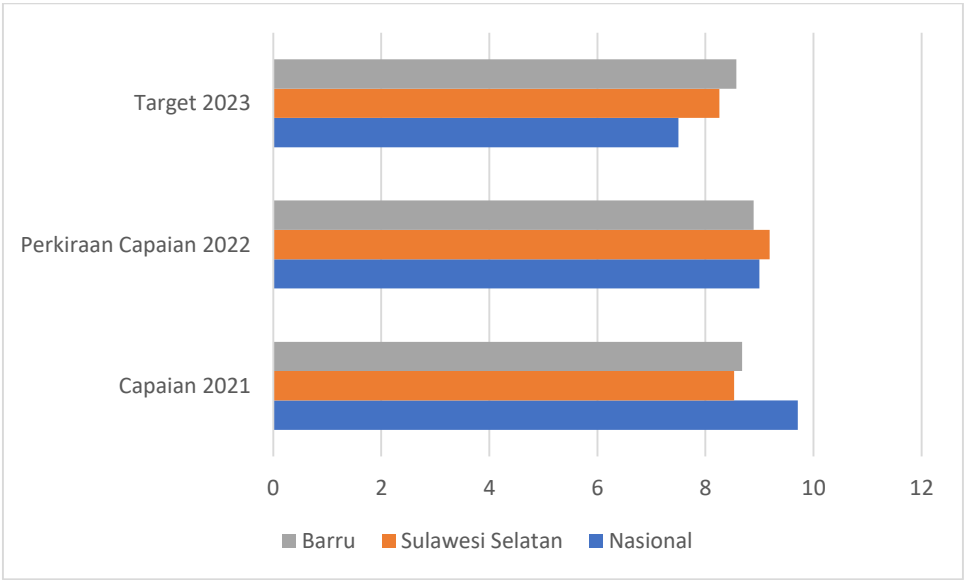
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui

seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun gambaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru dan peranannya terhadap penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.5
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023

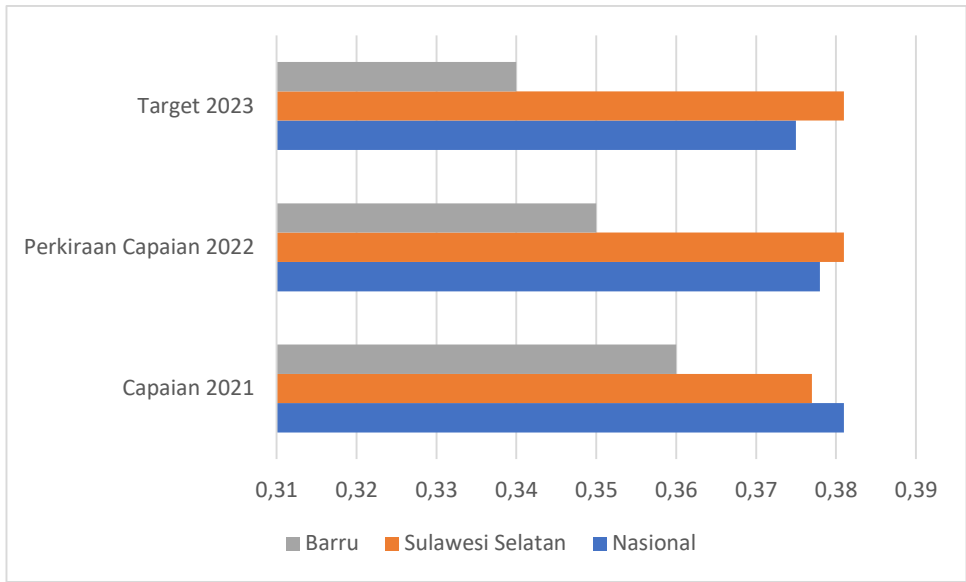


F. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Gini Ratio Kabupaten Barru sebesar 0,36 berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode September tahun 2021 mencapai sebesar 0,377, atau berada dibawah capaian angka Nasional yaitu 0,381. Untuk tahun 2022, Gini Ratio di Kabupaten Barru di prediksi mencapai nilai 0,35. Dan di Sulawesi Selatan di prediksi akan mencapai angka 0,381, dan di tahun yang sama Nasional memprediksi angka Gini Rasio Indonesia sebesar 0,376–0,378, atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Sementara pada tahun 2023, angka Gini Rasio Sulawesi Selatan di targetkan sebesar 0,381, atau menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan target Nasional sebesar 0,360–0,374 atau dibawah angka Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan cukup signifikan kenaikannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan 2023. Kenaikan Gini Ratio ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 sehingga pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) desil 1 meningkat, sementara golongan menengah atas walaupun dari sisi pengeluaran meningkat namun pendapatannya naik. Akibat pendapatan penduduk menengah atas lebih tinggi, maka menyebabkan gap (jarak) antara penduduk miskin dan menengah atas menjadi semakin jauh.

Grafik 3.6
Ratio Gini Kabupaten Barru dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Perkiraan Capaian 2022 dan target 2023



3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045 antara lain :

A. Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024

(i) Percepatan Transformasi Ekonomi

Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

(ii) Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur

dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

(iii) **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

(iv) **Mewujudkan Stabilitas Ekonomi**

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

B. Mencapai Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, iklim investasi terus dijaga ditengah agenda politik tahun 2024 melalui kebijakan reformasi struktural, seperti penerapan Perpu Cipta Kerja. Selain itu, investasi akan terus didorong seiring proses hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, rumput laut, rajungan, udang, tuna, biofuel, bauksit, nikel, tembaga, timah, dan lainnya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan mampu tumbuh 5,3–5,7 persen. Konsumsi masyarakat ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3–5,5 persen dan tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi LNPRRT seiring agenda Pemilu tahun 2024. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan tumbuh masing-masing sebesar 7,2–7,9 dan 7,2–8,0 persen. Pertumbuhan ekspor didorong oleh kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia dan kebijakan perdagangan yang kondusif.

Investasi ditargetkan akan tumbuh sebesar 6,2–7,0 persen, didorong oleh penuntasan proyek-proyek dalam agenda pembangunan jangka menengah. Dengan sasaran pertumbuhan investasi tersebut, target total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat menjadi sebesar Rp1.450–1.650 triliun. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (i) peningkatan investasi untuk mendorong hilirisasi industri berkelanjutan dan inklusif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru; (ii) optimalisasi fasilitasi investasi yang berkualitas, produktif, dan berorientasi ekspor secara menyeluruh utamanya untuk percepatan penyelesaian proyek-proyek prioritas dan strategis; serta (iii) meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan perizinan melalui penuntasan regulasi terkait penanaman modal, serta penyelesaian sistem perizinan dan kemudahan berusaha terintegrasi Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Di sisi lapangan usaha, sektor industri ditargetkan mengalami pertumbuhan sebesar 5,4– 5,8 persen, didorong perbaikan rantai pasok pascapandemi serta pemulihan permintaan akibat perbaikan kondisi ekonomi domestik dan beberapa mitra dagang. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2024 antara lain (i) peningkatan aktivitas masyarakat selama Pemilu mendorong konsumsi terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (durable); (ii) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (iii) normalisasi harga dan kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang lebih terjangkau; (iv) peningkatan investasi industri; (v) operasional beberapa kawasan industri dan smelter; (vi) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; (vii) penguatan rantai pasok dan produk industri halal; serta (viii) peningkatan diversifikasi produk ekspor ke arah yang lebih kompleks.

Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam industri pengolahan akan dilaksanakan melalui strategi (i) harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung diversifikasi produk ekspor yang lebih kompleks; (ii)

peningkatan hilirisasi SDA untuk peningkatan ekspor produk bernilai tambah yang didukung oleh peningkatan investasi, termasuk di kawasan industri; (iii) perluasan penerapan industri 4.0 dan transformasi digital dalam proses bisnis dan produksi perusahaan; (iv) peningkatan inovasi dan riset industri; (v) peningkatan partisipasi industri domestik dalam rantai pasok global; (vi) peningkatan produktivitas dan kapabilitas tenaga kerja industri, termasuk dalam hal adopsi teknologi, melalui penyediaan pelatihan teknis sesuai kebutuhan perusahaan; (vii) perluasan penerapan industri hijau dan industri yang mendukung ekonomi biru; (viii) pengembangan industri dan infrastruktur halal melalui penguatan standar kualitas, rantai pasok, dan kawasan industri halal terintegrasi; (ix) penguatan infrastruktur industri dan pendukungnya guna peningkatan daya saing industri nasional; serta (x) gerakan penggunaan produk dalam negeri.

Sektor pertanian ditargetkan akan tumbuh sebesar 3,4–3,8 persen, didorong oleh peningkatan produktivitas, keberlanjutan pengembangan Food Estate (FE), serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian. Sektor konstruksi ditargetkan mampu tumbuh tinggi sebesar 6,4–6,7 persen, didorong oleh penuntasan proyek pembangunan pada tahun akhir periode RPJMN 2020-2024 serta pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, sektor pertambangan akan tumbuh meningkat pada kisaran 4,2–4,4 persen, utamanya didukung oleh meningkatnya produksi hasil tambang seiring dengan berlanjutnya agenda hilirisasi komoditas tambang. Sektor perdagangan ditargetkan akan tumbuh pada kisaran 5,8–6,0 persen, didukung peningkatan mobilitas serta terjaganya daya beli masyarakat.

Produktivitas sektor pariwisata untuk mendorong pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ditargetkan sebesar 6,5–7,4 persen. Peningkatan kinerja sektor ini didukung oleh pelaksanaan event dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival nasional. Peningkatan perjalanan wisatawan internasional juga menjadi momentum bagi pembukaan destinasi pariwisata prioritas sejalan dengan stabilitas kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan

mancanegara. Produktivitas di sektor ekonomi kreatif diperkirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan penguatan industri berbasis konten dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal.

Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi; (i) peningkatan daya saing dan daya dukung kepariwisataan Indonesia di tingkat dunia; (ii) peningkatan tenaga kerja terampil melalui re-skilling dan up-skilling serta sertifikasi kompetensi; (iii) penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan kapasitas SDM, dan diversifikasi produk dan layanan; (iv) peningkatan ragam dan kualitas usaha industri dan rantai pasok destinasi pariwisata; (v) integrasi pola perjalanan di destinasi yang terintegrasi dengan penyelenggaraan event dan MICE dengan standar layanan pariwisata yang baik; (vi) penguatan pemasaran Wonderful Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), dan Bangga Buatan Indonesia; (vii) refocusing pasar wisatawan mancanegara berkualitas (quality tourism) yang didukung oleh aturan visa dan kemudahan berwisata; (viii) penguatan komersialisasi dan kapitalisasi kekayaan intelektual; (ix) pengembangan ekosistem film yang didukung investasi konten; (x) perluasan program gastrodiploasi “Indonesia Spice Up The World”; (xi) integrasi rantai pasok dan penguatan SDM di kabupaten/kota kreatif; dan (xii) scaling up start-up ekonomi kreatif dan digital.

C. Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2024, kinerja NPI diperkirakan masih tetap tangguh dalam menopang stabilitas eksternal Indonesia. Diversifikasi ekspor yang semakin kuat terutama didukung kebijakan hilirisasi komoditas serta perluasan negara tujuan ekspor baru akan terus menjaga surplus neraca barang sekitar US\$49,5–47,2 miliar. Pulihnya kunjungan wisman turut menekan defisit neraca jasa menjadi semakin rendah pada kisaran US\$16,2–15,7 miliar. Neraca pendapatan sekunder semakin meningkat menjadi US\$6,7–6,9 miliar ditopang kinerja penempatan pekerja migran Indonesia di negara-negara mitra yang telah pulih disertai dengan peningkatan keahlian teknis. Dengan perkiraan tersebut, kinerja neraca transaksi berjalan tetap mencatat surplus US\$7,2–6,9 miliar. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial semakin

berkembang menjadi US\$3,7–10,5 miliar ditopang oleh investasi langsung yang tetap tinggi sekitar US\$15,3–15,5 miliar di tengah berbagai proyek strategis yang terus berjalan dan keberhasilan Indonesia melewati periode politik sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut mencerminkan sinyal ke pasar terkait prospek ekonomi Indonesia yang tetap kondusif dan terus berkembang. Sementara itu, tekanan investasi portofolio semakin minimal sehingga mencapai defisit rendah sekitar US\$5,7–0,2 miliar. Posisi cadangan devisa juga terus meningkat menjadi US\$149,1–150,2 miliar atau setara 6,0–5,8 bulan impor, seiring dengan kinerja NPI yang tetap solid dalam menopang ketahanan eksternal serta mendukung sektor riil.

D. Arah Kebijakan Fiskal

Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, Major Project dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (iii) penyelenggaraan pemilihan Presiden RI (pelaksanaan tahun politik). Berdasarkan arah besar kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

(i) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 11,8–12,4 persen PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 9,9–10,2 persen PDB dan PNBPN sebesar 1,9–2,2 persen PDB. Untuk mencapai target tersebut diperlukan perluasan sumber penerimaan pajak dalam mendukung keberlanjutan Sumber Daya Alam. Di sisi lain, reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan perlu dilakukan untuk mendukung transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan PNBPN. Kebijakan pendapatan negara diarahkan melalui • akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif; • penggalan

sumber-sumber penerimaan pajak yang dapat mengurangi ketergantungan pada SDA dan mendukung transisi energi; serta

- optimalisasi PNPB dari pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintah.

(ii) Belanja Negara

Pada tahun 2024, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,0–15,0 persen PDB, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,4–11,4 persen PDB dan TKD sebesar 3,5–3,7 persen PDB. Kebijakan Belanja Negara (Belanja K/L, Non-K/L, dan TKD) dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja (*wise and better spending*) agar lebih efisien, produktif, dan bersifat *countercyclical* untuk menjadi *enabler* yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada SDM, infrastruktur, dan kelembagaan.

(iii) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2024, defisit diarahkan sebesar 2,2–2,6 persen PDB. Defisit anggaran diarahkan konsolidatif namun tetap mempertimbangkan (i) perkiraan penerimaan pajak tahun 2023 yang dipengaruhi normalisasi harga komoditas; (ii) kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi dalam rangka penyelesaian janji presiden/agenda pembangunan; serta (iii) arahan pada tahun 2024 yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan anggaran sebagai berikut :

- pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif untuk prioritas pembangunan, dikelola secara prudent dan akuntabel;
- peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar keuangan yang kondusif dan melibatkan multi stakeholders, serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable dan lebih masif; serta
- pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Special Vehicle Purpose (SVP) yang tepat dan efisien.

E. Stabilitas Moneter

Di tengah perkiraan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50–3,50 persen (yoy). Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) dalam kerangka menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), mencakup (i) kestabilan harga melalui pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain operasi pasar, pasar murah; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi implementasi Program Lumbung Pangan (Food Estate), pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD); serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat-daerah sejak proses perencanaan, dan pengelolaan ekspektasi.

Pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi melakukan koordinasi dari sisi supply, dengan (i) mengarahkan belanja APBN/APDB kepada subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi, bantuan sosial tepat sasaran, dan operasi pasar; (ii) melakukan percepatan implementasi Major Project Food Estate; (iii) mendorong implementasi Major Project terkait digitalisasi dalam rangka mendukung pengendalian inflasi seperti pengolahan produk hasil pertanian dan mendukung kelancaran distribusi; (iv) mengoptimalkan DAK Fisik tematik ketahanan pangan yaitu Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan KSPP / Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian dan Perikanan) serta konektivitas daerah; dan (v) memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D) untuk penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RKP melalui forum koordinasi perencanaan untuk menyelaraskan strategi dan kebutuhan anggaran pengendalian inflasi.

Dalam rangka mitigasi risiko yang bersumber dari perlambatan ekonomi global serta normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara Advanced Economies (AEs) pada tahun 2024, maka kebijakan nilai tukar Rupiah diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor riil. Bauran kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan dengan cara (i) memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter; (ii) menetapkan tingkat suku bunga BI7DRR yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi; (iii) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valas; (iv) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional maupun lintas negara; serta (v) mengembangkan local currency settlement untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dollar AS. Upaya-upaya tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar.

Penguatan sinergi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, makroprudensial, sektor keuangan, dan sektor riil merupakan kunci keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perekonomian global sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

F. Stabilitas Sistem Keuangan

Arah kebijakan sektor keuangan ke depan akan difokuskan pada upaya percepatan pendalaman sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang memuat berbagai upaya diantaranya (1) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (2) peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil termasuk UMKM, (3) perluasan basis investor ritel, (4) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (5) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (6) peningkatan pembiayaan hijau, serta (7) implementasi harmonisasi kebijakan.

G. Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

(i) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2024, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran, sehingga TPT pada tahun 2024 ditargetkan akan berada pada kisaran 5,0–5,7 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga ditargetkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga TPT di daerah akan menurun. TPT wilayah Sumatera ditargetkan berada pada kisaran 4,2–4,9 persen, Jawa-Bali 5,2–5,9 persen, Nusa Tenggara 2,6–3,3 persen, Kalimantan 3,9–4,7 persen, Sulawesi 3,2–3,9 persen, Maluku 4,6–5,3 persen, dan Papua 2,4–3,2 persen. Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan UMKM, belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebekerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

(ii) Tingkat Kemiskinan

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2024 di kisaran 6,5–7,5 persen. Angka ini tetap optimis meskipun telah bergeser dari target RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 6,0–7,0 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan ada di kisaran 0-1 persen. Dengan target tersebut, gap target jumlah penduduk miskin yang perlu dientaskan diperkirakan sekitar tiga juta per tahun, baik untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrem maupun penduduk miskin secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta inflasi yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan infrastruktur layanan dasar di daerah sulit

serta kemudahan akses kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas.

Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2024 diperkuat dengan melanjutkan arah kebijakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang diimplementasikan melalui beberapa penekanan, yaitu (i) pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh K/L/D untuk melakukan penyaluran program; (ii) peningkatan kapasitas Pemerintah hingga level Desa/Kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti menggunakan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan; (iii) penguatan pelaksanaan sistem perlindungan sosial adaptif yang dilakukan K/L/D; (iv) penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial beserta mekanisme graduasi berkelanjutan serta komplementaritasnya dengan program pemberdayaan, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (v) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (vi) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan; serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.

(iii) Rasio Gini

Target rasio gini yang tercantum pada dokumen RPJMN 2020-2024 pada tahun 2024 adalah 0,360–0,374. Namun, target tersebut sangat sulit untuk dicapai karena pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, dilakukan penghitungan ulang penyesuaian target rasio gini menjadi 0,374–0,377 tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan.

Untuk menurunkan ketimpangan, pemerintah melakukan kebijakan afirmasi melalui empat strategi utama yaitu, (i) mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan

modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan, dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (ii) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (iii) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; dan (iv) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

(iv) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2024, IPM Indonesia ditargetkan 73,99–74,02 yang akan dicapai melalui :

- peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional;
- peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan
- upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian PSN, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memberikan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, regulasi yang akomodatif, seperti UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk dapat

meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

(v) **Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon**

Upaya kuat mendorong berjalannya transformasi ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkatkan emisi GRK sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri dan mobilitas penduduk. Ekonomi hijau, melalui implementasi aksi pembangunan rendah karbon diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program transformasi ekonomi harus berjalan beriringan, sebagai fondasi untuk melaksanakan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan, menciptakan lebih banyak green jobs, dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK, melalui (i) upaya pemulihan lahan berkelanjutan; (ii) peningkatan bauran EBT dan efisiensi energi; (iii) penerapan industri hijau; (iv) pengelolaan limbah dan penerapan sirkular ekonomi; serta (v) aktivitas rendah karbon pesisir dan laut (blue carbon).

Untuk ke depannya, penerapan ekonomi sirkular berpotensi besar dalam mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon. Penerapan ekonomi sirkular pada industri berfokus pada resource efficiency berpotensi untuk mengurangi emisi GRK, menghemat penggunaan air, dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Penerapan ekonomi sirkular juga berpotensi dapat meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan kerja hijau baru (green jobs). Di samping untuk menurunkan emisi GRK, meningkatkan penggunaan material daur ulang, dan mengurangi kebutuhan material baru, kebijakan ekonomi sirkular kedepannya akan fokus pada standardisasi produk sirkular.

Penerapan ekonomi hijau dan rendah karbon tidak terlepas dari adanya investasi hijau untuk dapat mencapai target transisi dan transformasi ekonomi. Arah kebijakan investasi hijau diarahkan pada (i) mendorong perbaikan regulasi investasi yang komprehensif; (ii) mendorong transfer

teknologi, dan strategi perbaikan skema pendanaan serta keberlanjutan riset dan pengembangan teknologi hijau; (iii) program inovasi pembiayaan pembangkit EBT blended financing; (iv) penerapan program pengembangan instrumen keuangan berbasis pasar; dan (v) perbaikan skema insentif untuk mendorong investasi transportasi ramah lingkungan.

Melalui berbagai kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan kinerja penurunan emisi GRK pada tahun 2024 dapat mencapai 27,27 persen terhadap baseline. Angka tersebut mencerminkan bahwa persentase penurunan emisi GRK kembali pada jalurnya, sebagaimana target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

(vi) Nilai Tukar Petani (NTP)

Pada tahun 2024, NTP dijaga pada kisaran 105–108. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian NTP tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi harga pertanian dan harga barang yang dikonsumsi. Kebijakan dari sisi harga pertanian mencakup: (a) pengendalian harga produk pertanian, utamanya melalui kerja sama lintas K/L, BUMN seperti Bulog (beras dan bahan pokok) dan Kementerian Perdagangan (kelapa sawit, hortikultura, dan produk turunan pangan); (b) inovasi sistem logistik pangan melalui platform e-commerce pertanian/rantai pasok daring untuk menjamin hasil produksi petani dapat dipasarkan secara merata; (c) efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi dan peningkatan infrastruktur distribusi termasuk pergudangan dan cold storage; (d) pembentukan food estate (kawasan sentra produksi pangan) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian; (e) penguatan pertanian keluarga dan peningkatan peran penyuluh untuk peningkatan produktivitas usaha pertanian; (f) modernisasi pertanian (pertanian presisi) termasuk Climate Smart Agriculture dan pertanian digital (digital based agriculture), serta pertanian regeneratif dan konservasi lahan produktif agar usaha tani lebih efisien dan berkelanjutan; serta (g) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian melalui diversifikasi turunan produk pangan untuk menambah nilai produk pertanian.

Kebijakan pengendalian dari sisi harga barang konsumsi meliputi (a) pengendalian inflasi terutama inflasi bahan makanan melalui peningkatan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang konsumsi petani hingga pedesaan; (b) jaminan ketersediaan agro input seperti pupuk, pestisida benih, sarana dan prasarana pertanian baik melalui rantai pasok konsumsi petani hingga tingkat desa; (c) fasilitasi sarana prasarana pertanian berbasis hayati seperti Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) serta pembenihan/nursery berbasis kelompok tani untuk membangun kemandirian petani dan menekan biaya pokok produksi tani serta meningkatkan efisiensi usaha tani; (d) pembentukan korporasi petani dan nelayan berbasis koperasi kelompok tani, yang didukung dengan digital backbone dan penguatan enabling factors, agar barang konsumsi petani dapat ditekan dan secara mandiri meningkatkan produksi dengan menjamin ketersediaan barang konsumsi petani; serta (e) regenerasi petani dengan berbagai strategi untuk meningkatkan minat anak petani/petani muda milenial melalui program tani milenial.

(vii) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Dalam rangka pencapaian NTN pada kisaran 107–110, upaya yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pendapatan nelayan dan stabilisasi pengeluaran nelayan lintas sektoral melalui (1) peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan prasarana dan sarana perikanan tangkap; (2) peningkatan mutu produk perikanan tangkap melalui penguatan sistem rantai dingin, logistik perikanan dan pemasaran hasil perikanan; (3) peningkatan kapasitas nelayan, termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi penangkapan, perbaikan penanganan hasil tangkapan, manajemen usaha, dan peningkatan kompetensi/sertifikasi nelayan melalui pendampingan dan pelatihan; (4) penguatan korporasi nelayan dan penataan kampung nelayan; (5) perlindungan nelayan, termasuk fasilitasi jaminan sosial nelayan; (6) kemudahan perizinan dan fasilitasi pembiayaan nelayan; dan (7) menjaga ketersediaan dan keterjangkauan input produksi, terutama pasokan BBM dan kebutuhan pokok rumah tangga nelayan.

(viii) Pemerataan Pembangunan

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2024, Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) didorong untuk tumbuh lebih tinggi, sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI). Pertumbuhan ekonomi Wilayah KBI ditargetkan sebesar 5,0–5,4 persen, sedangkan KTI sebesar 6,5– 7,3 persen.

Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2024 akan didorong oleh kegiatan operasional serta aktivitas logistik dari sarana-prasarana konektivitas PSN yang selesai dibangun pada tahun 2023, seperti Bandar Udara Nabire Baru dan Siboru Fak Fak, serta Pelabuhan Sorong. Selain itu, pertumbuhan ekspor dan industri pengolahan akan didukung oleh operasionalisasi sarana-prasarana industri yang selesai pengembangannya pada tahun 2023, seperti LNG Tangguh Train 3 dan KI Teluk Bintuni. Pertumbuhan ekonomi Papua ditargetkan mencapai 5,8–7,2 persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 22,5–23,0 persen dan pengangguran menjadi 2,4–3,2 persen.

Berlanjutnya agenda hilirisasi industri pada tahun 2024 ditargetkan akan mendorong perekonomian Wilayah Maluku tumbuh sebesar 12,6–16,8 persen. Percepatan PSN Wilayah Maluku, seperti operasionalisasi Bendungan Way Apu, serta pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Tingkat pengangguran Terbuka Wilayah Maluku diharapkan dapat turun menjadi 4,6– 5,3 persen, sedangkan kemiskinan dapat turun menjadi 9,5–10,0 persen.

Wilayah Sulawesi merupakan sumber utama penggerak ekonomi di KTI yang ditargetkan tumbuh 7,7–8,6 persen pada tahun 2024. Beberapa provinsi di Sulawesi diharapkan tumbuh signifikan seiring dengan program pembangunan smelter nikel. Implementasi PSN di Wilayah Sulawesi, seperti Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, KI Bantaeng, KI Morowali juga diharapkan dapat mendorong perekonomian. Sementara, produk pertanian dan perkebunan seperti kakao yang merupakan komoditas utama Wilayah Sulawesi terus

ditingkatkan melalui hilirisasi. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian yang inklusif, kemiskinan dapat ditekan menjadi 7,8–8,5 persen dengan TPT yang mencapai 3,2–3,9 persen.

Percepatan pembangunan sarana-prasarana Ibu Kota Nusantara dan fasilitas pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat tumbuh 5,2–5,6 persen pada tahun 2024. Selain itu, hilirisasi komoditas pertambangan diharapkan meningkat dengan berjalannya pengolahan dan pemurnian komoditas bauksit dan Coal to Methanol. Infrastruktur pendukung kawasan, seperti Tol Balikpapan–Samarinda, Pelabuhan Terminal Kijing, Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur, dan upgrading kilang-kilang eksisting/Refinery Development Master Plan (RDMP) yang diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan. Kawasan industri, seperti KI Landak, Ketapang, Jorong, dan Tanah Kuning diharapkan mengakselerasi investasi serta industri pengolahan. Melalui upaya pembangunan tersebut, kemiskinan akan turun menjadi 4,0–4,5 persen dan TPT sebesar 3,9–4,7 persen.

Perekonomian di wilayah Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 5,7–6,1 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa serta peningkatan nilai tambah sektor primer. Pembangunan berbagai infrastruktur PSN diperkirakan akan meningkatkan kegiatan sektor pertanian serta mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara, pembangunan Bendungan Meninting dan Manikin akan mendorong kegiatan sektor konstruksi dan penyerapan investasi. Penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi smelter tembaga di Nusa Tenggara Barat akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Selain itu, peningkatan aktivitas Bandar Udara Komodo dan Bandar Udara Internasional Lombok Praya serta Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo diharapkan dapat mendorong aktivitas pariwisata maupun perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, berlanjutnya penyelenggaraan event seperti World Superbike dan MotoGP di KEK Mandalika akan turut mendorong aktivitas

perekonomian. Hal tersebut dapat berkontribusi pada upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang dapat menurunkan TPT hingga mencapai 2,6–3,3 persen dan kemiskinan mencapai 14,5–15,0 persen.

Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,6–5,0 persen sebagai pusat pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berorientasi ekspor dengan dibangunnya KEK dan KI. Proyek strategis nasional (PSN) seperti bendungan dan irigasi berperan penting dalam penyediaan air baku untuk lahan pertanian dalam mendukung Sumatera sebagai lumbung pangan nasional. Operasionalisasi Jaringan Kereta Api Trans Sumatera serta pengembangan Hub Internasional Kuala Tanjung menjadi pendorong dalam integrasi kawasan khususnya dalam penyaluran logistik antar provinsi serta perdagangan internasional. Selain itu, di Wilayah Sumatera terdapat gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, hidrogenasi CPO di Palembang serta pembangunan PLTS skala besar untuk meningkatkan perekonomian. Kemiskinan akan turun menjadi 7,5–8,3 persen dan TPT menjadi 4,2–4,9 persen.

Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus diperkuat di Pulau Jawa terutama untuk mengatasi tingginya mobilitas penduduk. Proyek strategis nasional (PSN) seperti LRT Jabodebek serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus dikembangkan. Selain itu, pembangunan KEK Lido, Gresik, Singhasari, Sanur, dan Kura-kura Bali diharapkan dapat mendorong perekonomian baik melalui aktivitas pariwisata, pengembangan teknologi, industri, dan logistik. Sementara, pembangunan KI Wilmar Serang dan KI Terpadu Batang juga menjadi pendorong industrialisasi. Aktivitas pariwisata yang kembali dibuka diikuti berbagai kegiatan internasional serta pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di Wilayah JawaBali. Oleh karena itu, Wilayah Jawa-Bali ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,2–5,5 persen. Kemiskinan akan turun menjadi 7,0–7,5 persen dan TPT sebesar 5,2–5,9 persen.

Sementara itu, arah kebijakan pengelolaan sumberdaya ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 mencakup :

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan Ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
5. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi
6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi disektor rill dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Arah kebijakan ekonomi merupakan bagian dari arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan pembangunan tersebut melahirkan prioritas yang disusun berdasarkan tahapan dan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan. Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Selatan bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan disusun untuk periode perencanaan 2024 - 2026 sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan.

Rumusan arah kebijakan ekonomi disusun dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion)

2. Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan dan kesempatan kerja serta kesejahteraan tenaga kerja termasuk bagi penyandang disabilitas
3. Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah
4. Peningkatan nilai investasi melalui promosi potensi daerah
5. Penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran

Tantangan perekonomian Sulawesi Selatan kedepan, sebagaimana pencapaian dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian tidak lagi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Faktanya, bahwa inklusivitas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tergolong rendah dalam lima tahun terakhir, sehingga kerangka pendanaan harus mampu difokuskan pada inklusivitas pertumbuhan, dan tetap diupayakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai selama ini. Kerangka pendanaan harus mendorong alokasi pembiayaan pembangunan untuk menurunkan tingkat pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan antar wilayah, serta mereduksi tingkat kemiskinan. Sehingga tantangannya bukan semata-mata pada mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pada meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekonomi tersebut untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan berusaha bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah yang tersebar hingga ke daerah-daerah pelosok Sulawesi Selatan.

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Barru

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan

prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kabupaten Barru terkait peningkatan perekonomian daerah melalui :

1. Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi
2. Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan jalan dan jembatan
3. Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas
4. penguatan kelembagaan dan penegakan hukum serta pencegahan pencemaran/kerusakan SDA dan LH
5. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi
6. Penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.2 Gambaran Kondisi Ekonomi

3.2.1 Kondisi Ekonomi Makro Nasional

a. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi US\$4.783,9 atau setara Rp71,0 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan

pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen. Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh moderat sebesar 3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19.

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut, sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa sektor yang mampu mencapai dua digit, yaitu transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, KTT G20, World Conference on Creative Economy, International E-Sport Federation World E-Sport Championship, World Super Bike); pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara; serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut

meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, yaitu 18,3 persen, tumbuh sebesar 4,9 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024

Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diperkirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tahun 2023 diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif, didukung oleh peningkatan permintaan domestik maupun eksternal dan peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

b. Neraca Pembayaran

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus sebesar US\$4,0 miliar sepanjang tahun 2022. Kontribusi capaian tersebut utamanya melalui ekspor yang kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahun 2022 naik signifikan mencapai US\$13,2 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya US\$3,5 miliar.

Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan ekspor yang tinggi, sejalan dengan harga komoditas internasional yang masih tinggi, serta diikuti oleh permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, meskipun tren impor juga mengalami kenaikan di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit yang terkendali sebesar US\$8,9 miliar, seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja NPI yang tetap solid dalam mendukung sektor eksternal mendorong devisa terus berkembang. Pada akhir tahun 2022, posisi cadangan devisa mencapai US\$137,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional.

Memasuki tahun 2023, kinerja NPI diperkirakan masih tetap tangguh di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Tantangan di tahun 2023 berasal dari kemungkinan penurunan harga komoditas dan juga kondisi keuangan global yang cenderung masih akan ketat, selaras dengan rezim kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi. Meskipun demikian, keberlanjutan hilirisasi industri dalam negeri, peningkatan wisatawan mancanegara (wisman) dan pengiriman kembali pekerja migran Indonesia akan menjaga surplus transaksi berjalan tetap tinggi pada kisaran US\$7,1–6,8 miliar. Di sisi lain, tekanan neraca transaksi modal dan finansial akan sedikit mereda, terutama ditopang investasi langsung yang masih mengalir ke perekonomian domestik serta perlambatan *capital outflow* pada investasi portofolio. Perkiraan tersebut kemudian akan menopang neraca transaksi modal dan finansial mencapai sekitar US\$2,0–5,8 miliar. Kinerja NPI yang masih solid tersebut diikuti perkembangan cadangan devisa mencapai sekitar US\$144,2–145,3 miliar atau setara 6,1–6,0 bulan impor.

c. Keuangan Negara

Kinerja keuangan negara pada tahun 2022 membaik seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 mampu menjadi bantalan (*shock absorber*) di tengah berbagai tekanan akibat faktor risiko global, sehingga pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun (13,4 persen PDB), meningkat sebesar 30,6 persen dibanding realisasi tahun 2021. Dari sisi komponennya, Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp2.034,5 triliun (10,4 persen PDB), tumbuh sebesar 31,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp588,3 triliun (3,0 persen PDB), tumbuh 28,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah yang signifikan di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, dampak implementasi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta *windfall* kenaikan harga komoditas.

Belanja Negara mencapai Rp3.090,8 triliun (15,8 persen PDB), menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 16,4 persen PDB, terutama disebabkan alokasi belanja penanganan COVID-19 yang tidak sebesar tahun sebelumnya. Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.274,5 triliun atau 11,6 persen PDB, terutama dipengaruhi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi. Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp816,2 triliun atau 4,2 persen PDB, didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tumbuh signifikan sebesar 43,7 persen.

Dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, defisit APBN tahun 2022 mencapai Rp464,4 triliun (2,4 persen PDB), berada di bawah target 2022 sebesar 4,50 persen PDB dan realisasi tahun 2021 yaitu 4,57 persen PDB. Realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp583,5 triliun (3,0 persen PDB), utamanya berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp688,5 triliun dan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp106,8 triliun. Dengan realisasi Pembiayaan Anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp119,2 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp96,7 triliun.

Pada tahun 2023, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif untuk kembali pada defisit APBN dibawah 3 persen PDB, sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2021. Meski konsolidatif, pelaksanaan APBN diarahkan tetap fleksibel untuk mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan

Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun atau 11,7 persen PDB, menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13,4 persen PDB, terutama mempertimbangkan perkiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.021,2 triliun atau 9,6 persen PDB, serta PNPB ditargetkan mencapai Rp441,4 triliun atau 2,1 persen PDB. Belanja Negara ditargetkan sebesar Rp3.061,2 triliun atau 14,5 persen PDB, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau 10,7 persen PDB, dan TKD sebesar Rp814,7 triliun atau 3,9 persen PDB.

Defisit Anggaran pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 2,8 persen PDB atau sebesar Rp598,2 triliun. Dari sisi Pembiayaan Anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp696,3 triliun. Pembiayaan Investasi ditargetkan sebesar negatif Rp176,0 triliun, dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp70,0 triliun.

d. Moneter

Stabilitas moneter pada tahun 2022 relatif terkendali di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, tecermin dari perkembangan inflasi dan nilai tukar Rupiah. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin baik melalui sinergi bauran kebijakan.

Sepanjang tahun 2022, Inflasi Umum (IHK) mengalami tren kenaikan hingga triwulan III dan berangsur melandai pada triwulan IV mencapai 5,51 persen (*yoy*), masih berada diatas sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, sebesar 2,0–4,0 persen (*yoy*). Tingginya inflasi dipengaruhi kondisi global akibat ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, kebijakan *zero* COVID-19 di Cina, serta kebijakan proteksionisme pangan di beberapa negara yang telah menyebabkan gangguan rantai pasok global sehingga berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan global. Dari sisi domestik, tingginya inflasi utamanya disebabkan oleh dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan pada awal September 2022 serta kenaikan

harga sejumlah komoditas pangan akibat pasokan dan distribusi yang terkendala.

Memasuki tahun 2023, tren penurunan Inflasi Umum masih berlanjut hingga mencapai 5,28 persen (*yoy*) pada Januari 2023. Pada akhir tahun 2023, Inflasi Umum diperkirakan lebih rendah dari tahun 2022 dan akan kembali berada dalam rentang sasaran 2,0–4,0 persen (*yoy*).

Perkembangan nilai tukar Rupiah pada tahun 2022 sangat dinamis dan mengalami pelemahan dibandingkan tahun 2021, namun dengan volatilitas yang cukup terkendali. Dari sisi global, berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan dunia yang dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tingginya suku bunga kebijakan moneter dan imbal hasil US *Treasury* 10 tahun, telah mendorong aliran modal asing keluar dari Indonesia dan memberi tekanan pelemahan terhadap nilai tukar Rupiah. Namun demikian, sejumlah faktor internal meliputi perbaikan prospek perekonomian Indonesia, kecukupan pasokan valuta asing, imbal hasil aset keuangan yang kompetitif berhasil menahan laju pelemahan lebih dalam. Rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2022 mencapai Rp14.875 per US\$, tetap terkendali meski sedikit berada diatas target RKP Tahun 2022 yaitu rentang Rp13.900–Rp14.800 per US\$.

Memasuki triwulan I-2023 (Gambar 2.10), nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh membaiknya aliran masuk modal asing sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian di pasar keuangan global dan sentimen positif investor terhadap fundamental perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2023 nilai tukar Rupiah diperkirakan terjaga pada kisaran Rp14.900–Rp15.400 per US\$ ditopang oleh prospek percepatan pemulihan perekonomian domestik, serta arah kebijakan bank sentral di mayoritas negara maju, utamanya The Fed yang diperkirakan masih mempertahankan suku bunga acuan tinggi pada tahun 2023.

Tingginya tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2022 direspons Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga acuan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) secara kumulatif sebesar 200 basis poin, dari semula 3,50

persen menjadi 5,50 persen di akhir 2022. Pengetatan kebijakan moneter berlanjut hingga awal tahun 2023 dengan kembali meningkatkan BI7DRR sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada periode Januari 2023. Bank Indonesia kemudian mempertahankan hasil tersebut dalam RDG periode Februari 2022. Keputusan meningkatkan BI7DRR hingga awal 2023, mempertimbangkan (a) tingginya inflasi global; (b) prakiraan periode pengetatan kebijakan moneter global yang panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah; (c) masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina; (d) urgensi menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk menahan aliran modal asing keluar; serta (e) urgensi untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik supaya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia. Kebijakan moneter Indonesia ke depan harus terus memperhatikan perkembangan suku bunga kebijakan moneter global yang diperkirakan tetap tinggi pada tahun 2023, serta kondisi makro ekonomi dan keuangan domestik.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Pengendalian inflasi menjadi perhatian bersama pemerintah dan Bank Indonesia baik pusat dan daerah, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) pusat-daerah (TPIP/TPID). Stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh melalui langkah-langkah untuk menjaga efektivitas operasi moneter, melanjutkan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor, melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), mendorong kebijakan digitalisasi sistem pembayaran, serta memastikan ketersediaan likuiditas di pasar keuangan.

e. Sektor Keuangan

Pada tahun 2022, sektor keuangan tercatat terus mengalami pemulihan. Peningkatan aktivitas perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi menjadi penopang pertumbuhan, yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap sektor jasa keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan pengumuman pemerintah

dalam mengakhiri tanggap darurat pandemi yang dapat mendorong optimisme pertumbuhan tahun 2023.

Pada tahun 2022, aktivitas pasar modal domestik bertumbuh secara positif. Kinerja positif tersebut tecermin dari peningkatan pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tinggi, pertumbuhan jumlah investor yang meningkat pesat, serta penghimpunan dana yang tinggi. Per 28 Desember 2022, IHSG berada pada level 6.850,52 atau tumbuh sebesar 4,09 persen dibandingkan 30 Desember 2021. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.492,42 triliun atau meningkat sebesar 15,05 persen (*yoy*). Capaian tersebut didukung oleh adanya peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan di meningkat sebesar 37,68 persen dibandingkan akhir tahun 2021 yang tercatat hanya sebesar 7,49 juta. Sementara itu, pada pasar obligasi, *yield* obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan dan nilainya relatif terus menurun sepanjang tahun 2021. Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar.

Perbaikan kinerja juga terjadi pada industri perbankan, seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Perbaikan kinerja perbankan tecermin dari peningkatan penyaluran kredit perbankan dan risiko kredit bermasalah yang melandai. Penyaluran kredit mengalami peningkatan hingga tumbuh sebesar 11,35 persen pada akhir tahun 2022. Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga tercatat tinggi hingga akhir tahun 2022 yaitu sebesar 9,02 persen.

Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah juga terjaga positif hingga akhir tahun 2022. Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan total aset jasa keuangan syariah (tidak termasuk saham) per November 2022 yang mencapai Rp2.312,72 triliun atau tumbuh 7,48 persen (*yoy*). Perkembangan positif sektor perbankan syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan syariah. Perkembangan pasar modal syariah khususnya ditopang oleh berlanjutnya komitmen pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Saham syariah juga tumbuh positif

yang ditunjukkan oleh pertumbuhan kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia sebesar 20,18 persen (yoy) dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp4.786 triliun pada triwulan IV-2022. Selain itu, adanya pengembangan inovasi digital oleh layanan jasa keuangan syariah dan meningkatnya literasi keuangan masyarakat turut memperkuat kinerja jasa keuangan syariah secara keseluruhan.

f. Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

(i) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator ketenagakerjaan terus mengalami pemulihan dari tekanan pandemi COVID-19. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase menjadi 5,86 persen. Jumlah penciptaan lapangan kerja baru cukup besar mencapai 4,25 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2022, menjadi sebesar 1,85 juta orang. Untuk meningkatkan pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya adalah implementasi program Kartu Prakerja bagi 3,47 juta orang dengan total insentif mencapai Rp5,36 triliun.

Memasuki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, TPT diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,3–6,0 persen. Program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian terus dilakukan melalui pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pelatihan vokasi, termasuk program Kartu Prakerja yang akan memulai kebijakan transisi program ke skema awal yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

(ii) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 mengalami peningkatan dari 9,54 persen menjadi 9,57 persen. Beberapa faktor menjadi penyebab kenaikan angka kemiskinan di September 2022, antara lain karena pertumbuhan ekonomi

yang melambat pada III dibanding triwulan II, dan kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan pada beberapa harga komoditas pangan. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 2023 sebesar 7,5–8,5 persen dalam RPJMN 2020-2024, namun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan 2023 berada di kisaran 8,5–9,0 persen dan kemiskinan ekstrem sekitar 1,5 persen.

Upaya keras terus dilakukan pada tahun 2023 untuk menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan melanjutkan pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Salah satu penahapan yang penting adalah melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial dengan menggunakan *database* sosial ekonomi yang mutakhir dan berperingkat. Beberapa aspek penekanan dalam reformasi ini, antara lain (1) penyiapan regulasi untuk pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi sehingga dapat digunakan seluruh K/L dan pemerintah daerah dalam penyaluran program pada tahun 2024; (2) perluasan dan implementasi skema perlindungan sosial adaptif kepada pemerintah daerah; (3) penyempurnaan proses graduasi dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lintas sektor; (4) penguatan reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan; dan (5) penjangkauan terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lansia, dan penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah. Melalui penguatan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung stabilitas ekonomi diharapkan upaya pemerintah menghapuskan kemiskinan ekstrem masih *on-track*.

(iii) Rasio Gini

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan,

terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda antarkelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata. Kondisi ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Hal ini ditunjukkan dari capaian rasio gini pada level 0,385 bulan September 2020 dibandingkan September 2019 pada level 0,380.

Kondisi ketimpangan di Indonesia setelah tahun 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari naik turunnya angka rasio gini dari Maret 2021 hingga September 2022. ini disebabkan oleh belum stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia yang berakibat pada memburuknya keadaan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Sementara masyarakat berpendapatan tinggi kondisi perekonomiannya lebih stabil, sehingga mengakibatkan jarak ketimpangan semakin lebar. Keadaan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada periode selanjutnya.

(iv) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Aktivitas perekonomian kembali pulih meskipun Indonesia masih berstatus pandemi COVID-19. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu meningkat sebanyak 0,62 poin dari tahun sebelumnya, yang disumbang oleh peningkatan pada komponen kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Peningkatan komponen ekonomi tecermin dari capaian indikator persentase penduduk miskin, gini rasio, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai per bulan, tingkat pengangguran terbuka, persentase pekerja formal, serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terus membaik.

Selain itu, pemerataan ekonomi melalui bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah turut berperan dalam perbaikan ekonomi selama tahun 2022. Pada aspek pendidikan, pemerintah telah memperbolehkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) seiring dengan kesiapan sekolah dan melandainya pandemi COVID-19. Hal ini mempunyai dampak pada kenaikan partisipasi pendidikan. Percepatan pemulihan kualitas pembelajaran dan akselerasi mutu pembelajaran pascapandemi COVID-19 dilakukan dengan penguatan kurikulum, penilaian diagnostik kembali oleh guru kepada siswa, dan optimalisasi layanan pendidikan formal dan nonformal.

Pada aspek kesehatan, inovasi layanan dilaksanakan untuk mengatasi terhambatnya pelayanan kesehatan esensial selama pandemi COVID-19. Selain itu, pengembangan pelayanan kesehatan digital sebagai bagian dari Reformasi Sistem Kesehatan akan meningkatkan kualitas baik dari sisi penjangkauan maupun ketersediaan layanan di tingkat masyarakat. Sistem kesehatan Indonesia masih membutuhkan dukungan investasi, khususnya pada sektor kesehatan publik (*public health*) termasuk di dalamnya infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, maupun kuratif.

Tahun 2023 diperkirakan akan menjadi tahun transisi status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Aktivitas masyarakat diperkirakan akan pulih, sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, membaiknya kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian global terutama akibat tensi geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sehingga berpotensi menghambat peningkatan pendapatan masyarakat.

(v) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Aktivitas perekonomian di tahun 2023 diperkirakan sudah kembali pada kondisi normal seiring dengan upaya kuat di bidang kesehatan untuk mencapai *herd immunity* pada tahun 2022, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 hingga 5,5 persen. Adapun program dan kegiatan

pemerintah pada tahun 2023 mendorong akselerasi ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19. Sementara itu, sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau, aksi pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar berjalan optimal guna mengurangi *trade-off* dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat, serta untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2023 diproyeksikan akan berdampak pada meningkatnya emisi GRK di tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau, maka diproyeksikan penurunan emisi GRK akan dapat menguat dari 26,87 persen pada tahun 2022 menjadi 27,02 persen pada tahun 2023. Beberapa penguatan aksi pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi, serta restorasi gambut dan juga reforestasi.

(vi) Nilai Tukar Petani (NTP)

Perkembangan NTP dari tahun 2020-2022 mengalami tren peningkatan yang signifikan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.17. Perkebunan menjadi sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam peningkatan NTP tersebut. Pada tahun 2022, peningkatan permintaan luar negeri terhadap produk buah dan sayur menyebabkan terjadinya lonjakan NTP hortikultura. Sektor peternakan dan perikanan sepanjang tahun 2020-2022 masih memberikan kontribusi positif dalam perkembangan NTP.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pada tahun 2023 diperkirakan NTP akan terus naik hingga mencapai 105–107. Sektor perkebunan diperkirakan masih menjadi kontributor dominan dalam pembentukan NTP meskipun pertumbuhan di tahun 2023 diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor hortikultura diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun 2023, sedangkan untuk sektor peternakan akan tetap tumbuh positif.

Stagnasi sektor tanaman pangan akan berlanjut hingga akhir tahun 2023.

Indeks yang diterima oleh petani (Ib) pada tahun 2023 akan tetap tinggi seiring peningkatan permintaan komoditas pertanian, terutama hortikultura, peternakan, dan perikanan, baik di pasar global maupun domestik. Harga komoditas perkebunan di tingkat global diprediksi akan berfluktuasi pada tahun 2023 namun tetap tinggi. Perkembangan harga komoditas pertanian domestik akan sangat dipengaruhi oleh inflasi. Pada sisi indeks yang dibayarkan petani (It), peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama untuk komoditas pangan, tahun 2023 masih dominan mempengaruhi. Harga input pertanian (pupuk dan bahan bakar) diperkirakan akan meningkat akibat kenaikan harga ditingkat global, gangguan pasokan/distribusi, resesi global, kebijakan pembatasan perdagangan di beberapa negara, dan perubahan iklim.

(vii) Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Seiring terkendalanya pandemi COVID-19, sektor perikanan mengalami pemulihan yang signifikan. Kenaikan produksi perikanan tangkap dipicu oleh meningkatnya permintaan baik di pasar domestik maupun luar negeri. Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat produk perikanan juga berkontribusi terhadap peningkatan permintaan tersebut tecermin dari angka konsumsi ikan. Kelancaran jalur logistik dan distribusi barang yang sebelumnya terhambat juga sangat penting, untuk mempermudah arus distribusi produk perikanan dan mendorong naiknya indeks harga yang diterima oleh nelayan, sehingga capaian tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021.

Nilai tukar nelayan (NTN) pada tahun 2022 mencapai 106,45 atau tumbuh 1,69 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 104,69. Rata-rata pertumbuhan NTN per bulan pada tahun 2022 menunjukkan mengalami perlambatan kinerja mencapai 0,16 persen dibanding tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan 0,08 persen per bulan. Capaian ini,

menunjukkan perlu adanya intervensi untuk mendorong perbaikan kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan indeks yang diterima (It) dengan indeks yang dibayar oleh nelayan (Ib) di mana pertumbuhan indeks terima tidak secepat indeks beli. Dengan tren pertumbuhan tersebut, diperlukan intervensi untuk mendorong capaian NTN pada akhir tahun 2023 senilai 107–108.

(viii) Pembangunan Wilayah

Secara kewilayahan, perekonomian telah pulih ke masa prapandemi COVID-19. Namun pada tingkat provinsi, ekonomi Bali belum pulih ke tingkat prapandemi akibat belum kembalinya aktivitas pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali hanya sebesar 2,2 juta kunjungan sepanjang tahun 2022, jauh di bawah level prapandemi yang mampu mencapai 6,3 juta kunjungan.

Sementara itu, ekonomi Wilayah Sulawesi dan Maluku mampu tumbuh tinggi sejalan dengan hilirisasi komoditas pertambangan serta tingginya harga komoditas ekspor unggulan, utamanya nikel. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 22,9 persen, yang diikuti dengan pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,2 persen. Tingginya pertumbuhan Wilayah Maluku diikuti oleh pengurangan tingkat pengangguran menjadi 5,7 persen.

Pada tahun 2023, perekonomian Wilayah Maluku diperkirakan dapat tumbuh sebesar 12,3–13,2 persen. Sejalan dengan hal tersebut, angka kemiskinan Wilayah Maluku diharapkan dapat mencapai 10,7–11,2 persen serta tingkat pengangguran terbuka Wilayah Maluku menjadi 5,1–5,3.

Hilirisasi yang terus didorong terutama pada industri logam dasar berupa produk olahan komoditas nikel di Wilayah Sulawesi mendorong ekonomi wilayah tersebut tumbuh sebesar 7,1 persen pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, permintaan eksternal untuk komoditas tersebut mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi di negara mitra dagang Wilayah Sulawesi terutama Tiongkok. Pertumbuhan ini

mampu mendorong penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,1 persen di tahun 2022.

Wilayah Sulawesi diperkirakan dapat tumbuh sebesar 7,6–8,1 persen pada tahun 2023. Meningkatnya permintaan mitra dagang pada komoditas industri bijih logam serta barang dari logam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi. Hal tersebut juga diiringi oleh pembangunan smelter baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perekonomian. Di samping perekonomian yang tumbuh tinggi, diharapkan inklusivitas tetap terjaga dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,7–4,0 persen dan tingkat kemiskinan menjadi 8,7–9,1 persen.

Perekonomian Nusa Tenggara dan Papua yang memiliki komoditas unggulan tembaga dan emas turut diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas. Pada tahun 2022, Wilayah Nusa Tenggara dan Papua tumbuh masing-masing sebesar 5,3 dan 7,0 persen. Wilayah Nusa Tenggara tumbuh didorong oleh tingginya produksi pertambangan bijih logam khususnya tembaga di Nusa Tenggara Barat, sementara, Wilayah Papua didorong oleh produksi tembaga dan emas di Provinsi Papua. Sejalan dengan hal itu, tingkat pengangguran terbuka di Wilayah Nusa Tenggara dan Papua tercatat masing-masing sebesar 3,1 dan 3,4 persen.

Wilayah Nusa Tenggara dan Papua masing-masing akan tumbuh sebesar 5,7–6,0 dan 5,8–7,0 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara didorong oleh meningkatnya kinerja pertambangan tembaga sejalan dengan peningkatan permintaan dari mitra dagang utama, meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo dan Bandara Internasional Lombok Praya seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata, serta proyek hilirisasi komoditas tembaga di Pulau Sumbawa. Sementara itu, Wilayah Papua diharapkan masih terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya sektor pertambangan dan berlanjutnya proyek pengembangan Pelabuhan Sorong dan proyek Tangguh LNG Train 3. Kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua diharapkan dapat mencapai masing-masing 15,9–16,3 dan 24,1–24,5

persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Nusa Tenggara dan Papua diperkirakan masing-masing sebesar 2,5–2,8 dan 2,7–3,2 persen.

Peningkatan harga komoditas batu bara dan lignit selama tahun 2022 serta perbaikan permintaan dari mitra dagang utama, seperti Cina dan India, mendorong perekonomian Wilayah Kalimantan untuk tumbuh sebesar 4,9 persen. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,0 persen.

Pada tahun 2023, ekonomi Kalimantan diperkirakan tumbuh sebesar 5,2–5,5 persen. Hal ini didorong oleh berlanjutnya hilirisasi komoditas pertambangan, pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing, serta berlanjutnya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Peningkatan perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan di Kalimantan menjadi 4,4–5,0 persen dan menurunkan TPT menjadi 4,2–4,4 persen.

Aktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan yang kembali pulih, mendorong Wilayah Jawa-Bali tumbuh 5,3 persen pada tahun 2022. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan menurunkan TPT menjadi 6,6 persen.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan tol di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, pengembangan Bali *Maritime Tourism Hub* di Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Kediri, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, serta infrastruktur bendungan dan irigasi diperkirakan mendorong peningkatan investasi pada tahun 2023. Ekonomi Wilayah Jawa-Bali diperkirakan tumbuh sebesar 5,2–5,4 persen. Peningkatan perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan menjadi 7,9–8,3 persen dan menurunkan TPT sebesar 5,9–6,3 persen.

Peningkatan harga komoditas unggulan Wilayah Sumatera khususnya minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara mendorong ekonomi wilayah tersebut tumbuh sebesar 4,7 persen pada tahun 2022. Selain itu, kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan, produksi pertanian serta penguatan permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi

Sumatera berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan penurunan TPT menjadi sebesar 5,4 persen tahun 2022.

3.2.2 Kondisi Ekonomi Makro Sulawesi Selatan

Kinerja ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2021 menunjukkan adanya pemulihan dengan tumbuh di angka 7,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya di angka 3,25% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan IV juga membawa ekonomi Sulawesi Selatan kembali tumbuh diatas nasional setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh dibawah nasional. Pemulihan ekonomi juga tercermin pada keseluruhan tahun 2021 dengan pertumbuhan 4,65% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang oleh seluruh komponen, didukung berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan peningkatan produksi komoditas pertanian serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Sejalan dengan sisi permintaan, sebagian besar Lapangan Usaha (LU) tercatat tumbuh terakselerasi pada triwulan laporan. Perbaikan utamanya didorong oleh kinerja LU utama Sulawesi Selatan, yaitu LU Perdagangan, Pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertambangan. Perbaikan LU Perdagangan dan Industri Pengolahan terjadi seiring dengan pembatalan rencana pelaksanaan PPKM level 3 pada periode HBKN Nataru merespon terkendalinya penyebaran pandemi dan membaiknya tingkat vaksinasi. Peningkatan pada LU Pertambangan didorong oleh perbaikan produksi korporasi dan berlanjutnya tren kenaikan harga nikel. Di sisi lain, akselerasi pembangunan proyek infrastruktur di akhir tahun karena target realisasi menyebabkan peningkatan pada LU Konstruksi.

Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang meskipun akan sedikit tertahan seiring peningkatan risiko varian Omicron COVID-19 pada triwulan I 2022.

Sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik, tingkat inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi tahunan pada triwulan laporan utamanya disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman khususnya komoditas cabai rawit, minyak goreng, dan cabai merah serta Kelompok

Transportasi seperti tarif angkutan udara dan tarif angkutan dalam kota. Sementara itu, penahan laju inflasi disumbang oleh penurunan harga beras, bawang merah, dan telur ayam ras.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan tahun 2021 tercatat sebesar 2,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,04 % (yoy). Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya, potensi tekanan inflasi meningkat menjelang periode Nataru akibat adanya peningkatan konsumsi dan pelonggaran aktivitas masyarakat.

Inflasi Sulawesi Selatan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,0 \pm 1\%$ pada tahun 2021. Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan dalam menjaga stabilisasi harga dan mendukung pemulihan ekonomi.

Perbaikan kinerja ekonomi Sulawesi Selatan didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang terjaga pada triwulan laporan. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek mengalami peningkatan dibandingkan triwulan dan tahun lalu. Akselerasi ekonomi yang terjadi tercermin dari peningkatan kredit baik kepada sektor rumah tangga maupun korporasi. Peningkatan pembiayaan yang terjadi disertai dengan penurunan DPK sektor rumah tangga dan korporasi. Hal ini disebabkan karena kinerja korporasi dan permintaan rumah tangga yang lebih baik pada triwulan laporan. Di tengah perkembangan tersebut, Non Performing Loan (NPL) masih terjaga di bawah ambang batas.

Kinerja perbankan secara keseluruhan tetap kuat yang salah satunya terlihat dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit mengalami penurunan di tengah perbaikan penghimpunan DPK. Sementara itu untuk kinerja intermediasi perbankan, baik pembiayaan maupun penghimpunan DPK mengalami kenaikan, bahkan mencatat penyaluran pembiayaan tertinggi sejak 6 (enam) tahun terakhir. Dengan demikian, LDR pada triwulan IV 2021 tercatat meningkat setelah menurun selama 3 (tiga) triwulan sebelumnya.

Sementara itu, kredit UMKM mencatat peningkatan penyaluran kredit dengan NPL yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini dapat memberikan harapan bahwa sektor UMKM

dapat menjadi pendorong kinerja perbankan yang baik. Kuatnya sektor UMKM juga tak lepas dari upaya percepatan perluasan akses keuangan kepada UMKM melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terakselerasi signifikan pada triwulan IV 2021 serta konsumsi rumah tangga yang meningkat (4,04%; yoy dan 1,73%; qdq) di tengah pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), indikator sistem pembayaran juga menunjukkan adanya peningkatan.

Transaksi nilai besar melalui Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) meningkat 9,6% (yoy) menjadi Rp28,7 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, adopsi pembayaran ritel juga mengalami peningkatan yang signifikan. Transaksi menggunakan kartu kredit tercatat mencapai Rp858,5 miliar atau meningkat sebesar 21,8% (yoy). Sementara transaksi e-commerce dan uang elektronik pada triwulan IV 2021 mencatatkan transaksi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dengan pertumbuhan nominal transaksi sebesar 31,6% (yoy) dan 115,9% (yoy) secara berturut-turut. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode Natal dan tahun baru didukung dengan pelonggaran PPKM. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah Quick Reponse Code Indonesian Standard (QRIS) di Sulsel mencapai 510.792 merchant atau tumbuh sebesar 174,1% (yoy). Dari jumlah tersebut, 73,5% diantaranya merupakan pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

Perkembangan implementasi elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT) masih berjalan dalam koridor prinsip 6T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi). Realisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 100%, sedangkan realisasi penyerapan Program Sembako mencapai 99,3%. Dari sisi peredaran uang kartal, terjadi net outflow sebesar Rp1,68 triliun. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan uang yang tinggi di tengah masyarakat terutama pada akhir tahun.

Pada periode Agustus 2021, kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan mengalami perbaikan dibanding dengan periode Agustus 2020. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan nilai indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diikuti dengan penurunan nilai indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan juga semakin membaik meski masih berada di masa pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Maret 2021. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III tahun 2021. Inisiasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui stimulus kebijakan diharapkan dapat terus meningkatkan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dengan rentang 4,9-5,7% (yoy). Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, seiring dengan upaya percepatan vaksinasi, pencegahan, dan penanganan dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah serta penerapan disiplin dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang lebih baik oleh masyarakat serta dunia usaha.

Berlanjutnya stimulus pemerintah berupa bantuan sosial dasar, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan subsidi listrik, serta relaksasi PPnBM 0% untuk mobil low cost green car dan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) turut mendukung peningkatan konsumsi masyarakat. Investasi diperkirakan tumbuh kuat didukung keyakinan investor dan berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah serta swasta. Secara sektoral, peningkatan perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan didorong oleh perbaikan lapangan usaha Konstruksi, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum, serta Pertambangan.

Di tengah peningkatan kinerja ekonomi, tekanan inflasi diperkirakan turut meningkat namun tetap terjaga dalam rentang sasaran $3,0 \pm 1,0\%$ (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan.

3.2.3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Barru

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

A. PDRB Sisi Pengeluaran

Secara total, PDRB Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku di tahun 2021 yakni dari 8.057,26 miliar rupiah (2010=100) menjadi 8.878,37 miliar rupiah (2010=100) pada tahun 2022. Jika dinilai atas dasar harga konstan 2010 terjadi peningkatan dari 5.069,99 miliar Rupiah (2010=100) tahun 2021 menjadi 5.329,31 miliar Rupiah (2010=100) pada tahun 2022.

Di tengah kondisi pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan, perekonomian Kabupaten Barru periode 2018 – 2022 dapat tetap tumbuh sebesar 7,11 persen; 7,41 persen; 0,87 persen; 4,77 persen dan 5,11 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa Lainnya yang tumbuh 8,18%.

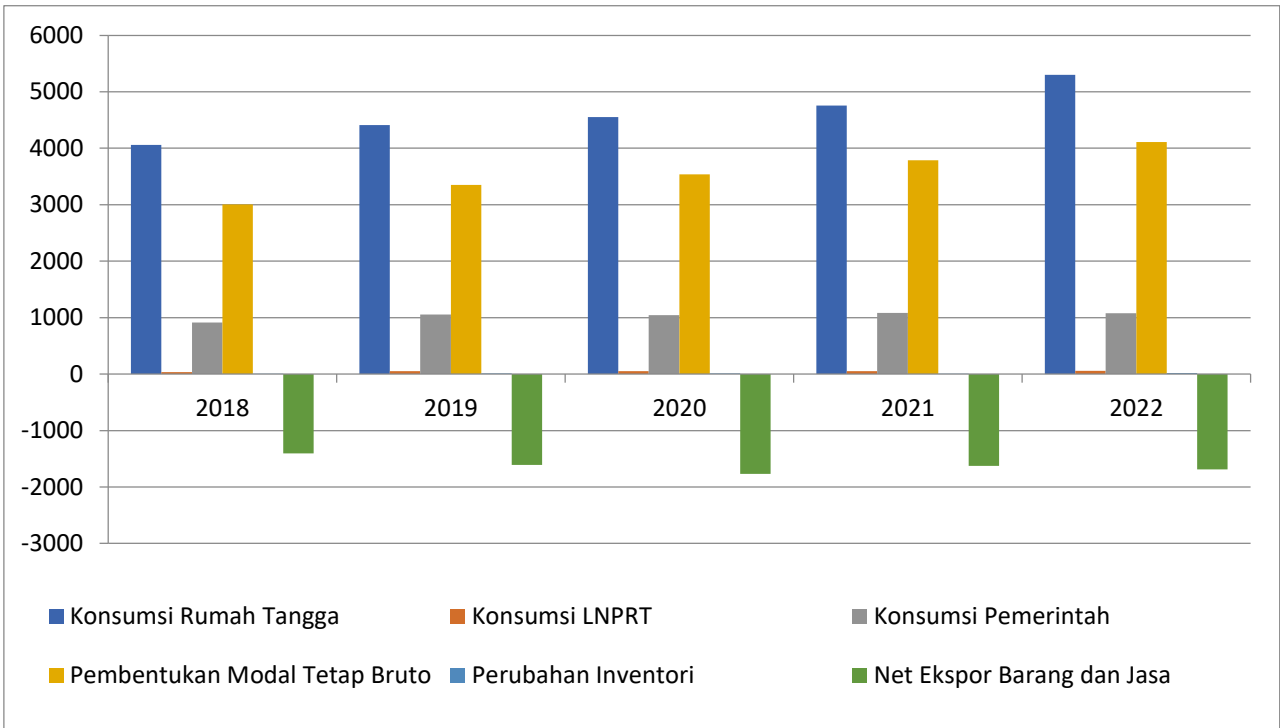
Pada periode tahun 2018-2022 PDRB Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku juga terus meningkat, yakni sebesar 6.614,10 miliar rupiah (2018); 7.271,22 miliar rupiah (2019); 7.432,3 miliar rupiah (2020); 8.057,26 miliar rupiah (2021) dan 8.878,37 Miliar rupiah (2022). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB di sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Barru pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel 3.1 dan grafik 3.7 berikut ini:

Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru
2018 – 2022 (Miliar Rp)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020*	2021	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.059,34	4.407,96	4.550,36	4.755,26	5.298,78
2. Konsumsi LNPR	37,29	51,92	51,57	51,83	59,35
3. Konsumsi Pemerintah	912,68	1.055,35	1.042,00	1.084,11	1.076,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.003,66	3.351,95	3.538,74	3.788,49	4.110,84
5. Perubahan Inventori	4,96	10,29	14,87	5,35	20,10
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.403,82	-1.606,24	-1.765,25	-1.627,79	-1.687,13
PDRB	6.614,10	7.271,22	7.432,30	8.057,26	8.878,37

Sumber : BPS, Kabupaten Barru 2023

Grafik 3.7
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru,
2018 – 2022 (miliar rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Barru dan Data Olahan 2023

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang

perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Barru pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari tabel 3.2 dan grafik 3.2 berikut ini:

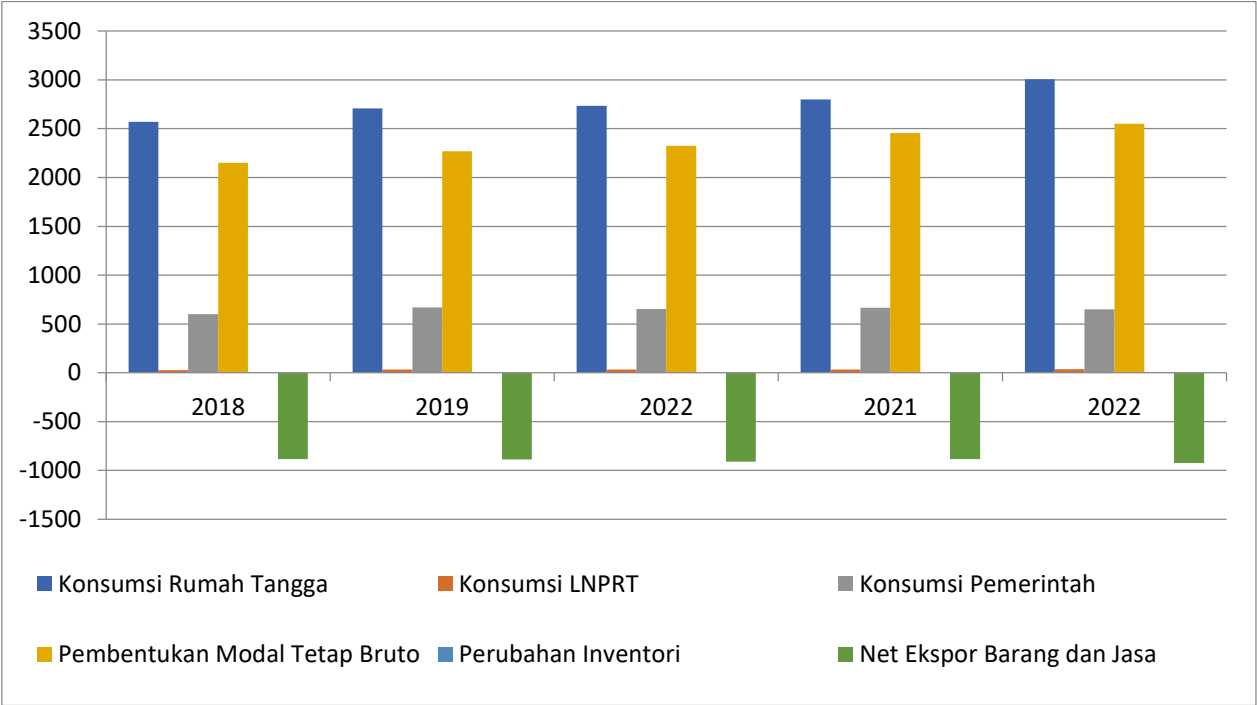
Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru 2018 – 2022 (Miliar Rp)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.569,54	2.709,75	2.734,32	2.798,74	3.006,52
2. Konsumsi LNPRT	25,28	33,95	32,42	32,21	36,31
3. Konsumsi Pemerintah	599,19	669,39	653,07	667,40	648,85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.152,43	2.268,48	2.323,46	2.454,72	2.552,34
5. Perubahan Inventori	3,79	4,97	5,04	2,15	7,70
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-883,70	-889,11	-909,19	-885,23	-922,41
PDRB / GRDP	4.466,54	4.797,43	4.839,12	5.069,99	5.329,31

Sumber : BPS, Kabupaten Barru 2023

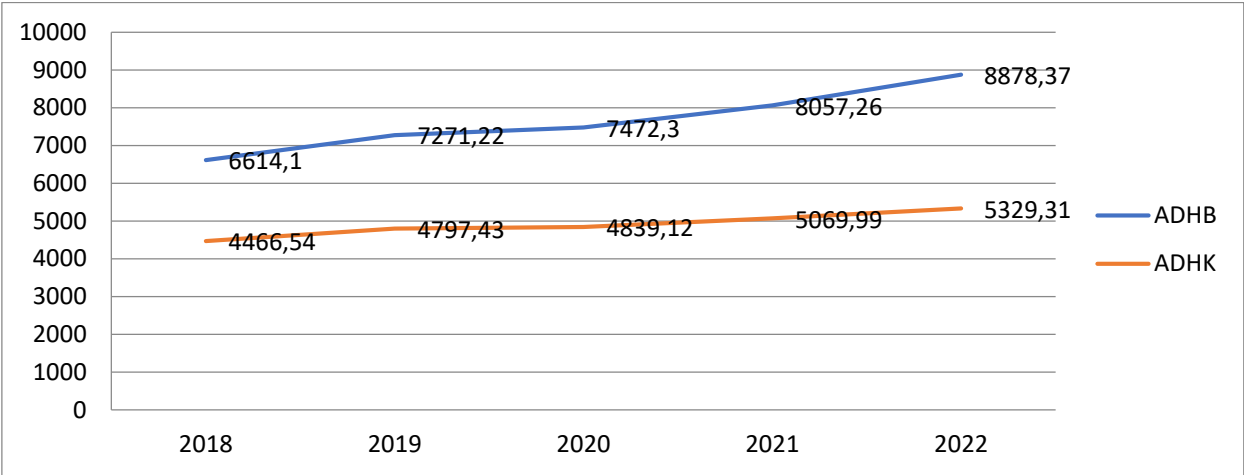
Dari tabel 3.2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Barru meningkat, yakni sebesar 4.466,54 miliar rupiah (2018); 4.797,43 miliar rupiah (2019); 4.839,12 miliar rupiah (2020); 5.069,99 miliar rupiah (2021) dan 5.329,31 miliar rupiah (2022). Sedangkan dari grafik 3.2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru cenderung meningkat selama empat tahun terakhir.

Grafik 3.8
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Barru dan Data Olahan 2023

Grafik 3.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Barru, 2023

Dari grafik 3.3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.3
Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Barru

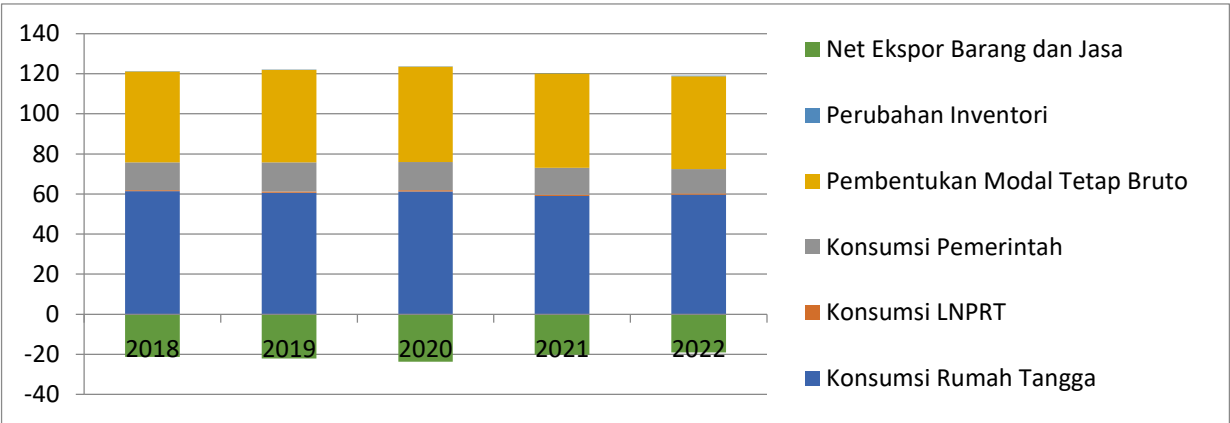
Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	61,37	60,62	61,22	59,02	59,68
2. Konsumsi LNPRT	0,56	0,71	0,69	0,64	0,67
3. Konsumsi Pemerintah	13,80	14,51	14,02	13,46	12,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45,41	46,10	47,61	47,02	46,30
5. Perubahan Inventori	0,07	0,14	0,20	0,07	0,23
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-21,22	-22,09	-23,75	-20,20	-19,00
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2023

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK- RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga PK- LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Barru, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 46,30 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 19,00 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 3.10
Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Barru 2018 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2023

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada kisaran 12,12 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2018-2022 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor (ditandai dengan net ekspor yang minus).

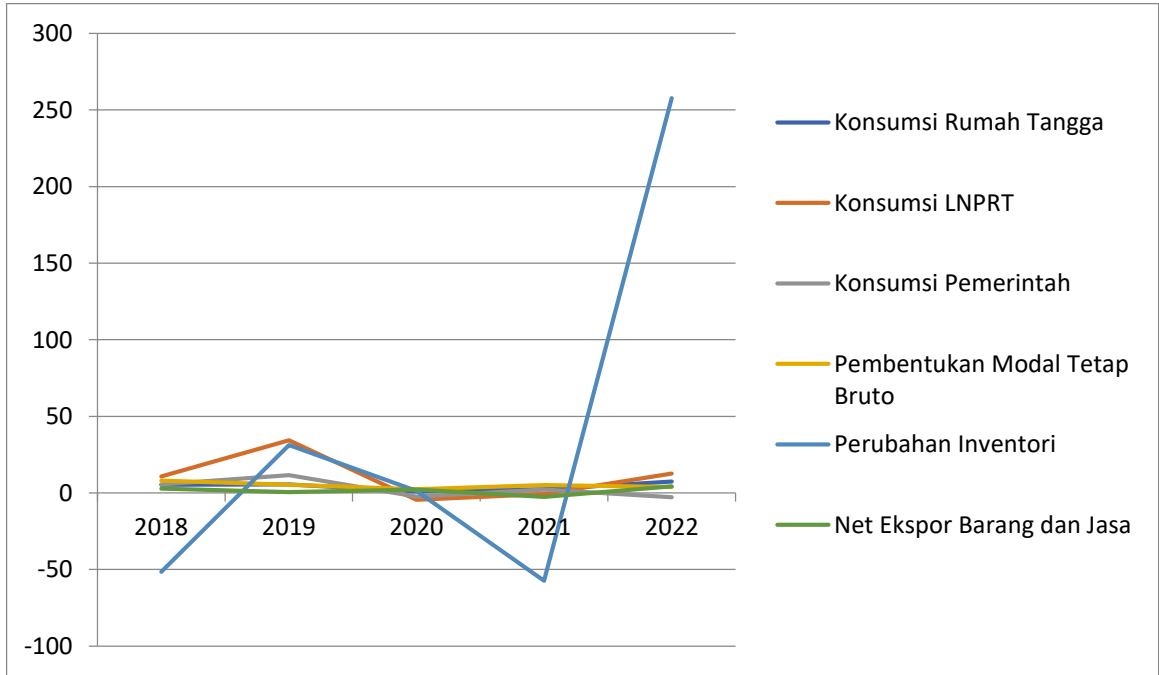
Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Barru 2018 – 2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,42	5,46	0,91	2,36	7,42
2. Konsumsi LNPRT	10,69	34,32	-4,50	-0,67	12,76
3. Konsumsi Pemerintah	5,53	11,71	-2,44	2,19	-2,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,99	5,39	2,42	5,20	3,98
5. Perubahan Inventori	-51,49	31,20	1,40	-57,30	257,58
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	2,87	0,61	2,26	-2,64	4,20
PDRB	7,11	7,41	0,87	4,77	5,11

Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2023

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 3.4, selama periode tahun 2018 - 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mengalami fluktuasi, yakni sebesar 7,11 persen (2018); 7,41 persen (2019); 0,87 persen (2020); 4,77 persen (2021) dan 5,11 persen (2022). Sedangkan dari grafik 3.5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun tersebut.

Grafik 3.11
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Barru Tahun 2023

Pada tabel 3.5 bisa dilihat Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 59,58 persen. Kemudian komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto menyusul dengan kontribusi sebesar 46,30 persen.

Tabel 3.5
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Barru
Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021**	2022**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,37	60,62	61,22	59,02	59,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,56	0,71	0,69	0,64	0,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,80	14,51	14,02	13,46	12,12
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45,41	46,10	47,61	47,02	46,30
5. Perubahan Inventori	0,07	0,14	0,20	0,07	0,23
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-21,22	-22,09	-23,75	-20,20	-19,00
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2023

Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Pengeluaran di Kabupaten Barru Tahun 2018-2022 menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Net Ekspor Barang dan Jasa). Dari tabel 3.6 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2018–2022, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Barru
Tahun 2018 -2022

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020*	2021**	2022**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,42	5,46	0,91	2,36	7,42
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,69	34,32	-4,50	-0,67	12,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,53	11,71	-2,44	2,19	-2,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,99	5,39	2,42	5,65	3,98
5. Perubahan Inventori	-51,49	31,20	1,40	-57,30	257,58
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	2,37	0,61	2,26	-2,64	4,20
PDRB	7,11	7,41	0,87	4,77	5,11

Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2023

B. PDRB Sisi Produksi

Nilai PDRB Kabupaten Barru atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 8.878,37 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 821,11 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 8.057,26 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di berbagai lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 5.069,99 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 5.329,31 triliun rupiah pada tahun 2022. Kenaikan PDRB harga konstan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Pada tahun 2022, struktur perekonomian Kabupaten Barru didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan Industri Pengolahan. Posisi ke-6 diduduki oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 35,02 persen. Angka ini naik dari 34,86 persen di tahun 2021. Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi pada tahun 2022 turun sebesar 19,04 persen dari 19,32 persen di tahun 2021, disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,32 persen (naik dari 19,20 persen di tahun 2021). Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib turun sebesar 7,50 persen dari 7,83 persen di tahun 2021 dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,75 persen (naik dari 4,63 persen di tahun 2021). Posisi ke-enam adalah Informasi

dan Komunikasi yang menyumbang 4,71 persen terhadap PDRB Kabupaten Barru di 2022, yang turun dibandingkan dengan angka 4,76 persen di tahun 2021.

Tabel 3.7
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2018–2022

Lapangan Usaha (PDRB)	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,27	33,82	34,02	34,86	35,02
Pertambangan dan Penggalian	3,12	3,01	3,03	2,93	2,84
Industri Pengolahan	4,84	4,89	4,69	4,63	4,75
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,10	0,11	0,10	0,11
Konstruksi	18,47	19,41	19,21	19,32	19,04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,16	9,44	9,26	9,20	9,32
Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,72	2,44	2,56	3,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,96	1,01	1,02	1,00	1,09
Informasi dan Komunikasi	4,38	4,43	4,84	4,76	4,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	2,91	2,92	2,97	2,97
Real Estat	3,42	3,21	3,24	3,07	3,04
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,07	8,42	8,29	7,83	7,50
Jasa Pendidikan	3,57	3,55	3,68	3,47	3,31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,20	2,23	2,43	2,46	2,45
Jasa Lainnya	0,72	0,75	0,70	0,71	0,73
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2023

Di antara keenam lapangan usaha tersebut, semua kategori mengalami penurunan porsi distribusi kecuali pada kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (kategori A) dan Konstruksi (kategori F). Peranan kategori A, sebagai penyumbang peran terbesar mengalami penurunan ditahun 2019 namun dapat kembali naik di 2020, 2021 dan 2022. Sementara itu, kategori-kategori selain keenam lapangan usaha tersebut, memiliki peran kurang dari 5 persen masing-masing di 2022. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barru
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen),
Tahun 2018–2022

Lapangan Usaha (PDRB)	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.333,00	2.458,99	2.528,15	2.808,90	3.109,27
Pertambangan dan Penggalan	206,58	219,09	225,39	236,21	252,37
Industri Pengolahan	319,95	355,33	348,63	373,45	421,44
Pengadaan Listrik dan Gas	6,21	6,44	6,84	7,41	7,63
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,16	6,97	7,93	8,41	9,47
Konstruksi	1.221.39	1.411.25	1.428.09	1.556.42	1.690.44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	605.96	686.75	688.31	740.99	827.12
Transportasi dan Pergudangan	173.04	197.97	181.39	206.40	268.68
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63.72	73.22	75.78	80.59	96.93
Informasi dan Komunikasi	289.39	322.33	359.36	383.61	417.99
Jasa Keuangan dan Asuransi	197.73	211.34	217.16	239.25	263.38
Real Estat	226.44	233.45	241.06	247.76	269.75
Jasa Perusahaan	1.55	1.74	1.67	1.79	2.18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533.86	612.01	616.47	630.94	665.62
Jasa Pendidikan	235.93	257.93	273.55	279.55	293.92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145.43	162.04	180.57	198.02	217.42
Jasa Lainnya	47.76	54.37	51.94	57.56	64.78
Produk Domestik Regional Bruto	6.614.10	7.271.22	7.432.30	8.057.26	8.878.38

Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2023

Kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi peranan terhadap PDRB ADHB. Meskipun demikian, menguatnya kategori ini di Kabupaten Barru pada dasarnya lebih didukung oleh sektor perikanan daripada sektor pertanian itu sendiri.

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Kategori-kategori tersebut disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Berikut uraian perkembangan lima kategori lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Barru periode 2018-2022. Kelima lapangan usaha tersebut adalah Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Industri Pengolahan. Kondisi per 5 sektor tersebut dijelaskan berikut ini :

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan Perikanan. Sub-sub kategori ini meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Kategori ini menjadi sumber produktifitas terbesar Kabupaten Barru.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 3.109,27 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2020 sempat berada di pertumbuhan paling lambat sejak 2018, yaitu hanya 0,87 persen. Pada 2021, masa pemulihan pasca puncak pandemi, perekonomian kategori ini tumbuh 4,77 persen dibanding tahun 2020.

Kategori lapangan usaha berkode A ini, secara dominan disumbang oleh sub kategori Perikanan. Kemudian disusul oleh sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Sisanya sebagian kecil dihasilkan dari sub kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu.

Di tahun 2021, produk perikanan sebagai salah satu input untuk sektor akomodasi/perhotelan dan makan minum disinyalir mengalami titik balik, setelah merosotnya permintaan sepanjang pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kembali pulihnya permintaan atas produk perikanan di sektor akomodasi dan makan minum ini dapat menjadi salah satu sebab meningkatnya aktivitas produksi perikanan. Di samping itu, adanya peningkatan produksi rumput laut dibandingkan tahun sebelumnya turut membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi perikanan.

Menyusul sub kategori Perikanan, terdapat sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang memberi andil terbesar kedua di dalam lapangan usaha kode A

ini. Sub ini banyak digerakkan oleh tanaman pangan dan peternakan.

Pada sektor hortikultura semusim, Barru memiliki beberapa komoditas unggulan seperti semangka salah satunya. Produktivitas semangka mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Begitu pula untuk komoditas lainnya, seperti bawang merah dan tomat meningkat produksinya dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu di sektor kehutanan dan penebangan kayu terdapat indikasi penurunan produksi. Hal ini seiring dengan informasi bahwa berkurangnya hasil hutan yang diproduksi oleh para pengusaha di sektor kehutanan dikarenakan banyak pengusaha yang beralih usaha ke sektor perkebunan semusim dan tahunan.

b. Konstruksi

Pada tahun 2022, kontribusi kategori konstruksi mencapai 1.690,44 miliar rupiah atau sebesar 19,04 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Barru dan menduduki peringkat kedua andil terbesar. Angka kontribusi kategori konstruksi terhadap PDRB pada 2022 mengalami penurunan sebesar 19,04 dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 19,32 persen.

Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan sektor konstruksi tahun 2022 lebih ditopang oleh proyek non-pemerintah melalui pembangunan perumahan yang terus bertambah sepanjang 2022.

Dari sisi pemerintah, terdapat proyek pembangunan berupa rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa wilayah yang memiliki jaringan irigasi, lanjutan proyek pengaspalan jalan Barru-Soppeng dan beberapa pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintahan Kabupaten Barru, seperti Pekerjaan Interior Lantai 6 Gedung Tower Kantor Bupati, Pembangunan Rescue Center, Rehabilitasi Berat Kantor Bupati Barru, Rehabilitasi Gedung Pendidikan Kerjasama UNHAS (Kelas D4), Rehabilitasi Ruang Paripurna DPRD Barru dan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Sumpang Binangae.

- c. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sesuai dengan namanya, kategori lapangan usaha ini mencakup dua sub kategori. Sub kategori pertama adalah Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Sub kategori kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Di Kabupaten Barru, kategori ini secara dominan disusun oleh sub kategori perdagangan bukan mobil dan sepeda motor.

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbangkan lebih dari 8 persen. Kemudian peran terhadap PDRB mencapai 9,32 persen di tahun 2022. Secara nominal, kontribusi kategori ini mencapai 827,12 miliar rupiah.

Secara umum, peran Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung stabil selama periode 2018-2022, dari sisi kontribusi setiap tahunnya. Laju pertumbuhan kategori ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru secara total.

Pertumbuhan positif terjadi di kategori perdagangan besar maupun eceran di Kabupaten Barru pada tahun 2022. Hal ini tercermin dari banyaknya toko-toko yang kembali buka pada tahun 2022. Dihapuskannya pembatasan transportasi akibat pembatasan sosial (PSBB) juga memengaruhi peningkatan aktivitas distribusi barang yang berdampak positif terhadap pertumbuhan perdagangan eceran.

- d. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan, termasuk perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Kategori lapangan usaha ini memberi andil sebesar 7,50 persen pada PDRB Kabupaten Barru 2022. Pada 2022, nilai ADHB kategori ini sebesar 665,62 miliar rupiah, dari sebelumnya 630,94 miliar rupiah di tahun 2021.

Informasi yang mengiringi data ini adalah realisasi belanja pegawai tahun 2022 yang meningkat dibanding 2021 berdasarkan LRA APBD 2022. Di samping itu, berangsur-angsur

dihapuskannya pembatasan sosial dalam kegiatan perkantoran, meningkatkan kegiatan belanja pemerintah melalui paket pertemuan, pelatihan, perjalanan dinas, dan lain sebagainya.

e. **Industri Pengolahan**

Kategori lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2022 adalah sebesar 4,75 persen di PDRB ADHB Kabupaten Barru. Industri Pengolahan menunjukkan konsistensi peningkatan baik secara ADHB maupun ADHK di lima tahun terakhir. Secara nominal ADHB Industri Pengolahan berkembang dari 373.45 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi 421,44 miliar rupiah di tahun 2022.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Barru pada tahun 2022 kembali meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha tanpa memasukkan faktor inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Barru 2022 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 5.329,31 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5.069,99 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, atau menguat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4.77 persen.

Sebelumnya di 2020, dari 17 kategori lapangan usaha di Kabupaten Barru, 7 di antaranya mengalami kontraksi (nilai pertumbuhan negatif). Sampai di tahun 2022, semua kategori lapangan usaha tumbuh positif. Tren perekonomian nasional di tahun 2022 nampaknya menunjukkan pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang sempat menyebabkan resesi nasional di 2020. Terbukti, dari yang sebelumnya di posisi terkontraksi, ekonomi

tahun 2021 Indonesia tercatat tumbuh 3,7 persen menjadi 5,3 persen pada tahun 2022 dan perekonomian Sulawesi Selatan juga tumbuh sebesar 4,64 persen tahun 2021 menjadi 5,09 persen tahun 2022.

Di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mencapai 5,11 persen. Perekonomian semua kategori lapangan usaha di Kabupaten Barru juga berhasil tumbuh positif. Terdapat tiga kategori yang dapat tumbuh di atas 5 persen setelah sebelumnya mengalami kontraksi di tahun 2020. Ketiga kategori itu adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) yang tumbuh 6,48 persen; Transportasi dan Pergudangan (H) yang tumbuh 14,97 persen; dan Jasa Lainnya (R, S, T, U) yang tumbuh 8,18 persen. Kategori-kategori tersebut adalah beberapa kategori yang paling merasakan pemulihan ekonomi, setelah sebelumnya terdampak berbagai kebijakan pembatasan sosial sebagai dampak COVID-19 yang memicu pengurangan aktivitas operasional.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Transportasi dan Pergudangan (H) yang tumbuh 14,97 persen. Pertumbuhan ini ditandai dengan dibukanya kembali beberapa usaha yang bergerak di sektor jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain

Posisi kedua kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya (R, S, T, U) yang tumbuh 8,18 persen. Pertumbuhan ini ditandai dengan dibukanya kembali beberapa usaha yang bergerak di sektor jasa pada tahun 2022.

D. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai

PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Barru Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2018 hingga 2022 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 38,09 juta rupiah kemudian tercatat meningkat menjadi 41,71 juta rupiah di tahun 2019 lalu kembali meningkat pada 2020 sebesar 42,47 juta rupiah selanjutnya pada tahun 2021 meningkat sebesar 43,43 juta rupiah. Pada tahun 2022 PDRB perkapita Kabupaten Barru ADHB adalah sebesar 47,50 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.9. Kenaikan angka PDRB per kapita ini juga dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 3.9
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita
Kabupaten Barru 2018 – 2022 (Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
ADHB per kapita	38 094 607	41 711 191	42 472 955	43 429 496	47 500 758
ADHK per kapita	25 725 509	27 520 350	27 653 853	27 327 826	28 512 702

Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2023

E. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

1. Tingkat Kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati

garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program;

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Adapun gambaran penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Barru
Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	15.680	14.920	14.440	15.180	14.730
Persentasi Jumlah Penduduk Miskin	9.04	8.57	8.26	8.68	8.40
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	307.904	322.248	337.047	351.924	368.160
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.58	1.07	1.31	1.52	0.07
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.37	0.21	0.36	0.39	0.15

Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2023

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Untuk indikator pembangun IPM sendiri pada Tahun 2015 metode perhitungan IPM telah dilakukan revisi/ perbaikan dengan menyesuaikan metode yang dilakukan

United Nation Development Programme (UNDP). Adapun indikatornya adalah :

- a. Indeks Kesehatan

Diperoleh dari angka harapan hidup yang merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
- b. Indeks Pendidikan

Diperoleh dari dua unsur yaitu angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama sekolah dimana angka harapan lama sekolah mencerminkan pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sedangkan rata-rata lama bersekolah merupakan angka yang menggambarkan tingkat capaian penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dalam bersekolah. Interpretasinya bahwa semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai.
- c. Paritas Daya Beli

Dikenal dengan *Purchasing Power Parity* (PPP); adalah PDRB riil per kapita yang telah disesuaikan dengan menggunakan PDRB riil per kapita, berarti mengasumsikan bahwa hasil pendapatan bruto daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk.

Adapun IPM Kab. Barru Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perkembangan IPM Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2022

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kesehatan	74.77	75.25	75.42	75.49	75.92
Angka Harapan Hidup	68.60	68.91	69.02	69.07	69.35
Indeks Pendidikan	63.81	64.23	65.16	65.22	65.31
Rata-rata Lama Sekolah	7.86	7.96	8.23	8.24	8.25
Harapan Lama Sekolah	13.56	13.55	13.58	13.59	13.61
Indeks Pengeluaran	71.98	72.80	72.83	73.10	73.80
Paritas Daya Beli	10.622	10.911	10.923	11.017	11.275
IPM	70.05	70.60	71.00	71.13	71.53

Sumber : BPS Kabupaten Barru, Tahun 2023 dan Data Olahan

Komponen Indeks kesehatan digambarkan melalui angka harapan hidup yang mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan pada tabel diatas memperlihatkan selama kurun waktu 2018 – 2022 mengalami peningkatan dari 68,60 pada tahun 2018 menjadi 69,35 pada Tahun 2022.

Untuk komponen lainnya yaitu Indeks Pendidikan yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), juga mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,86 pada tahun 2018 menjadi 8.25 pada tahun 2022. Begitupun dengan Harapan lama sekolah meningkat dari 13,56 pada tahun 2018 menjadi 13,61 pada tahun 2022.

Komponen terakhir adalah Indeks pengeluaran yang diukur nilai pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi dan pemerataannya. Kurun waktu 2018-2022 menunjukkan perbaikan yang dapat dilihat dengan peningkatan paritas daya beli masyarakat yang meningkat dari Rp.10,622 juta pada tahun 2018 menjadi Rp. 11,275 Juta pada tahun 2022.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pada tahun 2023, pemerintah masih mengalami periode pemulihan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu fleksibilitas deficit APBD masih dioptimalkan untuk mendukung pemulihan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Namun deficit APBD diupayakan secara gradual menurun sehingga risiko pembiayaan bisa terkendali.

Di tahun 2024, untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan dengan melakukan pengelolaan fiskal secara pruden melalui konsolidasi APBD secara bertahap. Defisit APBD dijaga terus mengecil semakin mendekati batas deficit 3% sementara itu primary balance diupayakan terus menuju positif melalui peningkatan pendapatan dan penguatan

spending better serta inovasi pembiayaan. Upaya-upaya mendukung kesinambungan fiskal sebagai berikut :

- a. Mengakselerasi pemulihan ekonomi sehingga kapasitas perekonomian
- b. Melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan *countercyclical* untuk memelihara momentum pemulihan ekonomi dengan upaya pengendalian risiko, sehingga konsolidasi tetap dilakukan secara konsisten dengan mendorong deficit anggaran kembali paling tinggi 3 persen di tahun 2023.
- c. Melakukan reformasi fiskal secara holistic baik untuk optimalisasi pendapatan penguatan spending better dan inovasi pembiayaan.
- d. Menjaga kerentanan fiskal dalam batas toleransi dengan mendorong optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better serta pengendalian utang lebih solid.

Untuk melanjutkan upaya-upaya tersebut dalam kaitannya antara proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja /pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan public. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasi anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Berbagai arah kebijakan terkait pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja ini tidak lepas dari arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dijelaskan pada sub bab berikut ini.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Menurut peraturan perundang – undangan pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah mengacu pada pasal 30 sampai dengan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah

Selanjutnya ketentuan terkait Pendapatan Transfer mengacu pada pasal 34 sampai dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi :

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai berikut :

a. Dana Perimbangan terdiri atas

- 1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- 2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

- 3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- b. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- c. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- a. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
 - 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah

termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya

Struktur pendapatan diatas diharapkan dapat merespon kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru pada tahun 2024 yang akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Penyusunan postur pendapatan didasarkan pada realisasi pendapatan dari tahun 2018-2022 dan kondisi pendapatan pada tahun 2023 dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan meningkat sebesar 4 % melalui perkiraan potensi peningkatan masing masing jenis pendapatan daerah sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan Transfer diperkirakan menurun sebesar 2 persen. Penurunan ini diperkirakan karena tidak adanya lagi pendapatan melalui transfer antar daerah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar 14 persen.

Untuk memenuhi asumsi pendapatan tersebut maka kebijakan keuangan diarahkan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan penguatan sistem dan perluasan basis perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.
- b. Optimalisasi pengelolaan kekayaan dan asset daerah agar lebih produktif salah satunya dengan penerapan Highest dan Best Use (HBU).

- c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLUD.
- d. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari dana transfer umum dan dana transfer khusus.

Postur Pendapatan Daerah yang menggambarkan realisasi dan kondisi 2023 secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2025

URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Proyeksi Tahun	Proyeksi Tahun
				2024	2025
PENDAPATAN	942,012,409,292.00	895,019,636,566.00	874,806,270,675.00	1.145.039.945.001,00	980,507,557,044.66
Pendapatan Asli Daerah	91,063,263,147.00	79,368,076,620.00	104,354,004,055.00	106.780.594.922,00	118,680,033,590.28
Pajak Daerah	20,401,700,919.00	22,870,000,000.00	24,478,108,406.00	25.921.200.000,00	28,918,740,517.62
Retribusi daerah	6,573,775,240.00	7,666,681,177.00	7,345,200,104.00	7.795.200.104,00	9,361,868,148.81
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9,198,474,101.00	8,942,135,943.00	9,389,242,740.00	9.922.742.013,00	10,844,575,364.70
Lain - Lain PAD Yang sah	54,889,312,887.00	39,889,259,500.00	63,141,452,805.00	63.141.452.805,00	69,554,849,559.16
Pendapatan Transfer	824,919,254,145.00	773,275,006,975.00	770,452,266,620.00	1.042.784.922.344,00	861,827,523,454.38
A. Transfer Pemerintah Pusat	755,924,175,624.00	722,158,670,000.00	708,777,746,000.00	978.556.017.387,00	791,832,192,165.00
- Dana Perimbangan	650,326,376,624.00	669,315,937,000.00	671,190,169,000.00	978.556.017.387,00	739,987,161,322.50
a. Transfer Umum	505,197,377,054.00	498,110,204,000.00	509,501,533,000.00	940.968.440.387,00	561,725,440,132.50
a.1. Dana bagi hasil/ bagi hasil bukan pajak	22,553,028,054.00	15,434,965,000.00	9,932,661,000.00	9.932.661.000,00	10,950,758,752.50
a.2. Dana alokasi umum	482,644,349,000.00	482,675,239,000.00	499,568,872,000.00	543.171.225.760,00	550,774,681,380.00
b. Transfer khusus (DAK)	145,128,999,570.00	171,205,733,000.00	161,688,636,000.00	388.392.012.627,00	178,261,721,190.00
Dana Insentif Daerah	52,320,458,000.00	9,909,264,000.00	-	-	10,404,727,200.00
- Dana Desa	53,277,341,000.00	42,933,469,000.00	37,587,577,000.00	37.587.577.000,00	41,440,303,642.50
B. Transfer Antar Daerah	68,995,078,521.00	51,116,336,975.00	61,674,520,620.00	64.228.904.957,00	69,995,331,289.38
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	26,029,892,000.00	42,376,552,971.00	-	-	-
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	26,029,892,000.00	42,376,552,971.00	-	-	-

Sumber : LRA 2021 – 2022, APBD 2023, RPJMD Kab. Barru, dan Data Olahan

Tabel diatas menggambarkan perkembangan realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 serta APBD Tahun 2023. berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 12 Tahun 2019. Realisasi pendapatan pada tahun 2021 sebesar Rp. 942.012.409.292,- mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 895.019.636.566,- dan pada tahun 2023 APBD Kabupaten Barru sebesar Rp. 874.806.270.675,-. Penurunan tersebut disebabkan salah satunya oleh Pandemi Covid 19. Refocusing anggaran dan penurunan transfer pusat juga merupakan penyebab turunnya realisasi pendapatan di Kabupaten Barru. Kemudian, pendapatan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Barru yang dituangkan dalam APBD Tahun 2023. Penentuan besaran yang dilakukan berdasarkan permendagri yang mengatur tentang besaran pendapatan daerah melalui transfer pusat.

Pada tahun 2024 diproyeksikan total pendapatan daerah mengalami peningkatan. Proyeksi tersebut diperoleh melalui forecasting data dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Realisasi APBD Tahun 2021 – 2022 dan Kondisi APBD 2023
2. Pendapatan transfer umum mengalami peningkatan dengan asumsi peningkatan pada dana Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan nilai sebesar Rp. 931.563.238.387,00. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper*.
3. Pendapatan Transfer untuk dana desa juga diasumsikan sama dengan tahun lalu.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemulihan dan penanganan ekonomi COVID-19 dan mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Barru. Peningkatan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBD sebagai instrument fiskal dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas serta optimal memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah secara konsisten terus melakukan berbagai strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian.

Isu krusial dalam APBD 2024 berkaitan dengan dukungan anggaran yang spesifik dalam pelaksanaan urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, diantaranya :

1. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Hak Keuangan, Biaya Sarana dan Prasarana, Biaya Mobilitas dan Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wa KDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
7. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pengelolaan tatalaksana, kualitas, terpadu, terintegrasi dan percepatan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha, (Ease of Doing Bussiness/EoDB), sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Turunan dan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.

8. Penguatan Perencanaan Badan layanan Umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Percepatan Implementasi Tranformasi Digital Nasional
10. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
11. Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Penyelenggaran jaminan sosial dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
14. Percepatan pembangunan Kota Baru sesuai arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, agar menganggarkan dukungan pendanaan pada APBD.

Struktur Belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi :

1) Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

- i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :
 - 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
 - 3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - 4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan

pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - a. Ketentuan pemberian TPP ASN :
 1. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 2. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 3. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 4. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
 5. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- b. Kebijakan TPP untuk TA 2023, yaitu :
1. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
 2. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - 1) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - 2) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19* yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - 3) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
 3. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
- c. Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2023 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan TPP ASN agar memedomani:

1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 4. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
- d. Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
1. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada

- Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
4. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
 - e. Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2023 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2022.
- 8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - 9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
 - a. Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - b. Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam

rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

- 2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - 1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain :
 - a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait

langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

1. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:

1. Menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
2. Mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
4. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - 1) Kepala desa dan perangkat desa; serta
 - 2) PNPNSD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan :

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2023 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
- 5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk

yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:

(1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;

(2) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan

(3) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.

6. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan

Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

7. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:

- 1) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
- 2) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya *ambulance* peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- 3) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;
- c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat

kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - 1. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan, yang diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.
 5. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya,

- seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.
6. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
 8. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023, untuk:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
9. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
10. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja Pemeliharaan:
 - (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada

daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

(a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada

- masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - 1) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
 - (1) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (2) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
 - (3) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (4) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - 2) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.
 - 1) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah

penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

- (1) Biaya transportasi peserta, panitia / moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (2) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/ residence*);
- (3) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (4) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

2) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

(b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
2. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

(c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

1. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,

frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

(d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

5. Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* (*Genose/rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil.
 6. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 - (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- 5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk

- pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
 - (b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
- 3) Belanja Bunga
- (a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
 - (b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - (c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

- (d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2023 pada SKPKD.
 - (e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
 - (f) Belanja Subsidi
 - (g) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (i) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (j) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- a) Belanja Hibah
 - 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- 3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.

- 4) Belanja hibah diberikan kepada:
- (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD;
 - (e) BUMDes;
 - (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - (g) Partai Politik.
 - i. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
 - ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- 6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program,

kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

(c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

(1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga / pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan / pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial

yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA

2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.

- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan

darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya

pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2023.
- (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2022, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah

dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
- (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2023.

b) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten / kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD

kabupaten/kota TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPB yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2022 dan terpisah dari ADD TA 2023.
- (11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala

daerah.

- (13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.

Postur Belanja Daerah yang menggambarkan realisasi dan kondisi 2023 serta proyeksi tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2023, Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025

URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Proyeksi Tahun	Proyeksi Tahun
				2024	2025
BELANJA	889.445.555.265	1.016.302.634.896	894.459.537.584	1.145.039.945.001,00	910.470.548.573
Belanja Operasi	659.980.715.569	710.668.831.700	689.766.942.518	797.035.473.452,61	703.047.112.305
Belanja Pegawai	403.999.557.353	413.608.636.487	420.471.284.060	463.973.537.820,42	450.102.667.999
Belanja Barang dan jasa	230.369.385.317	282.914.776.165	261.047.928.017	294.047.269.041,19	247.667.223.656
Belanja Bunga	1.558.257.404	1.528.243.139	1.530.000.000	2.730.000.000,00	1.530.000.000
Belanja Subsidi	-	-	-	1.000.000.000,00	-
Belanja Hibah	24.053.515.495	9.939.675.909	6.717.730.441	35.284.666.591,00	3.737.220.650
Belanja Bantuan Sosial	-	2.677.500.000	-	-	-
Belanja Modal	112.254.470.242	200.250.069.935	107.738.787.915	245.634.865.862,00	106.550.927.564
Belanja tidak Terduga	11.507.218.331	9.552.772.761	5.165.015.000	6.000.000.000,00	6.000.000.000
Belanja Transfer	105.703.151.123	95.830.960.500	91.788.792.151	96.369.605.686,40	94.872.508.704
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	105.703.151.123	95.830.960.500	91.788.792.151	96.369.605.686,40	94.872.508.704

Sumber : LRA 2021 – 2022, APBD 2023, RPJMD Kab. Barru, dan Data Olahan 2023

Tabel diatas menggambarkan perkembangan realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 serta APBD Tahun 2023. berdasarkan struktur yang tercantum dalam PP 12 Tahun 2019.

Realisasi belanja pada tahun 2021 sebesar Rp. 889.445.555.265,- mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.016.302.634.896,-. Peningkatan ini kemudian mengalami penurunan pada APBD tahun 2023 yaitu menjadi Rp. 894.459.537.584,-. Penurunan tersebut disebabkan salah satunya oleh Pandemi Covid 19. Refocusing anggaran dan penurunan transfer pusat juga merupakan penyebab turunnya realisasi belanja di Kabupaten Barru. Pada tahun 2023 APBD Kabupaten Barru di sisi belanja mengalami penurunan menjadi Rp. 894.459.537.584,-.

Sedangkan untuk tahun 2024 total belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.145.039.945.001,00. Proyeksi tersebut diperoleh melalui forecasting data dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Realisasi APBD Tahun 2021 – 2022 dan Kondisi APBD 2023
2. Belanja Pegawai mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp. 463.973.537.820,42. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper* .
3. Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp. 294.047.269.041,19. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data dan pertimbangan inflasi.
4. Belanja Bunga diasumsikan mengalami perubahan dengan peningkatan nilai sebesar Rp 2.730.000.000,00.
5. Belanja Hibah mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp. 35.284.666.591,00. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper*. Serta mempertimbangkan program prioritas Bupati terpilih dan pertimbangan pelaksanaan pemilu serentak.
6. Belanja Modal mengalami peningkatan dengan nilai sebesar Rp. 245.634.865.862,00. Nilai ini diperoleh dari hasil forecasting data pada nilai *upper*.

Tabel 3.14
Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar (SPM)

O P D	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp.)
Dinas Pendidikan	299.722.891.419
Dinas Kesehatan	250.197.957.975
Rumah Sakit Umum Daerah	-
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman	201.374.099.156
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.556.068.675
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.866.982.458
Dinas Sosial	4.909.700.142
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.321.935.436
Total	776.949.635.261

Tabel 3.15
Proyeksi Alokasi Belanja terhadap Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

O P D	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp.)
Dinas Tenaga Kerja	2.332.833.665
Dinas Lingkungan Hidup	7.993.692.257
Dinas Kependudukan dan Capil	4.757.425.986
Dinas Perhubungan	7.660.157.702
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.694.050.509
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	9.045.783.450
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.080.565.249
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.730.819.375
Total	49.295.328.193

Tabel 3.15
Pagu Perangkat Daerah

O P D	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp.)
Dinas Pendidikan	299.722.891.419
Dinas Kesehatan	250.197.957.975
Rumah Sakit Umum Daerah	-
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman	201.374.099.156
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.556.068.675
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.866.982.458
Dinas Sosial	4.909.700.142
Dinas Tenaga Kerja	2.332.833.665
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.321.935.436

Dinas Lingkungan Hidup	7.993.692.257
Dinas Kependudukan dan Capil	4.757.425.986
Dinas Perhubungan	7.660.157.702
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.694.050.509
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	9.045.783.450
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.080.565.249
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.730.819.375
Dinas Perikanan	4.910.104.710
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	16.378.784.324
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.216.353.700
Sekretariat Daerah	55.588.803.972
Sekretariat DPRD	27.846.357.837
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.218.898.998
Badan Keuangan dan Asset Daerah	109.822.493.285
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.031.569.950
Inspektorat Daerah	7.175.738.119
Kecamatan Tanete Riaja	3.613.987.877
Kecamatan Mallusetasi	4.985.559.278
Kecamatan Soppeng Riaja	3.555.360.525
Kecamatan Balusu	2.820.772.890
Kecamatan Pujananting	2.640.023.162
Kecamatan Tanete Rilau	4.103.361.133
Kecamatan Barru	6.779.237.301
Badan Pendapatan Daerah	7.997.519.267
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.082.556.219
Total	1.145.012.446.001

Tabel 3.16
Proyeksi Pagu Anggaran Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) / SDgs Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)		Perkiraan Maju Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
BIDANG PENDIDIKAN						
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)	86,55	75,258,706,938	87,05	63,546,411,005	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs) (SPM)	94,63		94,79		
	Persentase jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	93,5		94,25		
BIDANG KESEHATAN						
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100%	118,872,470,726	100%	1,000,280,605	Dinas Kesehatan
	Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100%		100%	197,283,065	Dinas Kesehatan
	Angka Status Gizi Masyarakat	92.03%		92.55%	1,872,048,778	Dinas Kesehatan
	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	85%		86%	673,836,879	Dinas Kesehatan
	Indeks Keluarga Sehat	0.6		0.7	107,614,064,943	Dinas Kesehatan
	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	100%		100%	8,242,408	Dinas Kesehatan
	Presentase pasien yang tertangani sesuai standart pelayanan	77.50%		77.55%	19,994,856,230	Dinas Kesehatan

BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN						
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100%	36,132,000	100%	45,000,000	BPBD
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100%	869,876,330	100%	894,178,896	BPBD
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100%	132,000,000	100%	145,000,000	BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	100%	2,037,700,000	100%	1,646,892,500	Satpol PP dan Damkar
	Waktu tanggap (rensponse time)	15 Menit	55,681,636	15 Menit	55,681,636	Satpol PP dan Damkar
BIDANG SOSIAL						
Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Warga Negara Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta PMKS lainnya yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100%	264,222,000	100%	414,013,362	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	100%	898,516,000	100%	591,336,596	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM						
Program Pengelolaan Sumber Daya Air(Sda)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik	55,32 %	8,705,937,777	54.00	8,705,937,777	Dinas PUTR dan PERKIM
	Persentase luas kawasan permukaan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	7,37 %	10,472,847,218	7,37 %	10,472,847,218	Dinas PUTR dan PERKIM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2024

Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	78,8 %	114,457,075,906	78,8 %	113,957,075,906	Dinas PUTR dan PERKIM
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	98,87% Layak 68,21% aman	3,254,400,000	100	3,254,400,000	Dinas PUTR dan PERKIM
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100 %	1,993,238,000	100 %	-	Dinas PUTR dan PERKIM
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	1,750,275,000	100	1,907,775,000	Dinas PUTR dan PERKIM
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM)	100 %		100		Dinas PUTR dan PERKIM
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	3,01 %	840,000,000	2.88%	3,875,000,000	Dinas PUTR dan PERKIM
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	57 %	3,648,319,640	61%	3,648,319,640	Dinas PUTR dan PERKIM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	18.90%	82,944,500	19.25%	164,000,000	Dinas PMD, PPKB dan PPPA
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-EL	99%	230,663,500	99%	256,463,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14.75%	3,400,980,600	15.25%	3,359,120,000	Dinas PMD, PPKB dan PPPA

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera	83.33%	26,090,000	83.33%	26,000,000	Dinas PMD, PPKB dan PPPA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	17,344,067,853	100%	24,788,467,762	Bag. Kesejahteraan Rakyat
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara.	100%	1,208,690,400	100%	1,209,690,400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada.	80%	24,109,010,333	80%	649,459,296	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi.	100%	133,234,689	100%	133,889,183	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemnbinan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100%	123,558,782	100%	126,029,938	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat.	50%	342,156,063	50%	348,999,184	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA						
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	63.08%	304,196,500	20 %	211,128,917	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	14.40%	85,956,500	65.00%	85,956,500	Dinas Tenaga Kerja

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETAHANAN PANGAN						
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	46.92%	270,000,000	48%	242,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	96%	483,304,000	97%	468,946,208	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	0.50%	187,800,000	0.40%	323,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	26%	265,251,710	23%	314,558,664	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	199,989,500	100%	342,714,881	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	86,85 %	111,557,820	86,85 %	122,713,602	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	32,392,500	100%	25,321,360	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	84%	71,991,083	86%	74,150,815	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	82%	4,437,886,169	82%	1,724,729,500	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	2,269,673,500	100%	2,345,673,500	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkkm)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	10,97%	2,800,000,000	11,33%	70,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Program Pengembangan Ukm	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	1,12%	328,275,675	1,34%	334,841,188	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	17.30%	3,246,834,011	19.30%	646,455,394	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Peran Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	1.12%		1.54%		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN						
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	20427 Ton	155,934,000	4.50%	1,146,520,800	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6625 Ton	1,365,500,000	6%	1,580,802,000	Dinas Perikanan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA						
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Pad Pariwisata	2%	3,219,644,174	2%	6,090,518,508	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisataaawan	24%	700,226,002	32%	422,072,783	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN						
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun	7.98%	2,321,435,000	8.48%	2,236,112,485	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	3.45%	350,000,000	3.95%	350,000,000	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1.50%	928,000,000	1.52%	9,420,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah berupa :

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

1. SiLPA;
2. pencairan Dana Cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan Pinjaman Daerah;
5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

1. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang deficit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus, maka harus digunakan untuk membayar pokok utang. penyertaan modal (investasi) daerah pemberian

- peningkatan jaminan sosial;
- 2) Apabila APBD defisit, maka ditutup dari penerimaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup deficit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Arah kebijakan pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong countercyclical melalui kebijakan pembiayaan yang inovatif dan prudent antara lain :

1. Mendorong pembiayaan inovatif diantaranya pengutan peran BUMD dan BLUD
2. Menjaga efektivitas pembiayaan investasi
3. Mengelola Sisa Anggaran Lebih pada level yang aman sebagai fiscal buffer melalui perbaikan manajemen kas.

Postur Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Barru
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023 (APBD)	Proyeksi APBD 2024
PEMBIAYAAN NETTO	79.681.326.283	65.112.768.955	113.890.503.241	19.653.266.909	9.946.968.735
Penerimaan Pembiayaan	83.734.357.547	71.365.800.219	118.943.534.505	24.706.298.174	-
Pengeluaran Pembiayaan	4.053.031.264	6.253.031.264	5.053.031.264	5.053.031.265	5.053.031.265

Sumber : LRA 2020 – 2021 - 2022, APBD 2023, RPJMD Kab. Barru, dan Data Olahan 2023

3.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 157 yaitu :

1. Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Adapun belanja wajib dan mengikat yang dimaksud adalah belanja gaji dan tunjangan, Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta operasional KDH/WKDH, Belanja Bunga dan Belanja Bagi hasil.

- 2. Prioritas kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3. Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Perhitungan kerangka pendanaan dengan memperhatikan belanja wajib mengikat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.18
Total Belanja Wajib Mengikat Tahun 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2024
A	Belanja Operasi	563.073.143.506,82
1	Belanja Pegawai	463.973.537.820,42
2	Belanja Bunga	2.730.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	-
4	Belanja Transfer	96.369.605.686,40
B	Pengeluaran Pembiayaan	5.053.031.265,00
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang	3.053.031.265,00
Total Belanja Wajib Mengikat		568.126.174.771,82

Sumber : Data Olahan 2023

Pada tabel dapat dilihat bahwa komponen total belanja wajib mengikat terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Transfer serta pengeluaran transfer yang besarnya sekitar 49,42 persen dari perkiraan pendapatan Kabupaten Barru Tahun 2024.

Untuk melihat Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal

NO	URAIAN	TAHUN 2024
1	Pendapatan	1.145.039.945.001,00
2	Pencairan dana cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-
Total Penerimaan (A)		1.145.039.945.001,00
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Mengikat (B)		568.126.174.771,82
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal (A – B)		576.913.770.229,18

Sumber : Data Olahan 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kapasitas rill kemampuan keuangan daerah yang dapat digunakan diperoleh dari penjumlahan dari pendapatan, pencairan dana cadangan dikurangi total belanja wajib yaitu sebesar Rp. 576.913.770.229,18.

Pada tabel selanjutnya memperlihatkan Kapasitas Rill Kemapuan Keuangan Daerah secara keseluruhan yang dibagi atas belanja pegawai, prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	TAHUN 2024	Proporsi (%)
Total Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah		1.145.039.945.001,00	
1	Belanja Wajib Mengikat	568.126.174.771,82	
2	Prioritas I	144.228.442.557,295	25
3	Prioritas II	346.148.262.137,508	60
4	Prioritas III	86.537.065.534,377	15

Sumber : Data Olahan 2023

3.5 Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dan besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Barru mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk mencari alternatif pendanaan dalam membangun sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan antara lain: 1) APBN/Tugas Pembantuan; 2) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 3) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 4) Pembiayaan Utang Daerah (Pinjaman Daerah, Obilgasi Daerah, Sukuk Daerah). Adapun penjelasan alternatif pendanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

3.5.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyelesaian pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Barru selain bersumber dari APBD Kabupaten Barru, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah kabupaten.

3.5.2 Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan selain APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu dimaksimalkan yaitu Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL lebih diutamakan pada program yang mendukung prioritas gubernur serta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berkesinambungan dan berdampak positif terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Tabel 3.21
Mitra Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Yang Mendukung Pembangunan Daerah di Kabupaten Barru

NO.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
1.	FHI360 Program USAID- MADANI	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Yang Kuat akan mendorong akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keberagaman Sosial di Daerah.	1) Meningkatkan Kemampuan OMS 2) Memperkuata Hubungan Antara OMS dengan Masyarakat dan pemerintah daerah 3) Meningkatkan kemampuang penggalangan dana OMS 4) Mempromosikan kelembagaan dan kontribusi OMS lokal: terutama dalam hal akuntabilitas kelembagaan. 5) Memperkuat jejaring dan hubungan antar OMS, OMS dengan pelaku pembangunan lainnya: Pemerintah daerah, sektor swasta, universitas, media, dan lainnya di tingkat kabupaten 6) Meningkatkan legitimasi dan relevansi

NO.	LEMBAGA	PROGRAM	FOKUS KEGIATAN
			OMS di mata mitra utama mereka: Pemerintah Daerah, sektor swasta, universitas lokal, media, penerima manfaat, publik, dll.
2.	USAID ERAT	Memperkuat Efektifitas Pemerintah Daerah melalui Peningkatan Mutu Pelaksanaan Kebijakan dan Penyediaan Pelayanan di Daerah.	1) Kemiskinan Ekstrem : Penguatan/perluasan kolaborasi Lintas Sektor percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2) UHC : penguatan Implementasi instruksi bupati nomor 74 tahun 2022 tentang peran lintas sektor 3) Stunting : kebijakan dan implementasi dalam percepatan penurunan stunting 4) SPBE : Penguatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kab.barru 5) PPID : peningkatan peran PPID dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik 6) SP4N LAPOR: pemanfaatan data SP4N LAPOR dalam perbaikan layanan publik
3.	USAID IUWASH Tangguh	Proyek lima tahun untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman, serta perilaku higiene (WASH) di daerah perkotaan yang rentan dan memperkuat layanan WASH dan pengelolaan sumber daya air (PSDA) yang berketahanan iklim. Bermitra dengan Pemerintah Indonesia, USAID IUWASH Tangguh mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memastikan akses air dan sanitasi untuk semua (Tujuan 6) dan menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman , tangguh, dan berkelanjutan (Tujuan 11).	1) Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Sektor WASH dan Water Resources Management (Pengelolaan Sumber Daya Air); 2) Peningkatan Akses Ke Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Inklusif & Tahan Iklim, dan dikelola secara aman 3) Peningkatan PSDA untuk Mendukung Layanan Air Minum yang Tangguh; dan Peningkatan Adopsi Perilaku dan Peningkatan Peran Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan yang Berkontribusi pada Peningkatan WASH dan PSDA.

Sumber : Data Olahan Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2023

3.5.3 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didasari atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kondisi yang berkembang saat ini menyebabkan banyak pemerintah daerah menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.5.4 Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang daerah tersebut terdiri atas : **(1) Pinjaman Daerah** yaitu Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga

daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, **(2) Obligasi Daerah** yaitu surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, **(3) Sukuk Daerah** yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan asset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Usulan pembiayaan utang daerah tersebut harus termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan lebih dulu menetapkan nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam periodisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Barru pada tahun 2024 merupakan periode tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Dalam rangka menjamin asas keberlanjutan dan sinergitas pembangunan maka dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah didasarkan dari analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta identifikasi permasalahan di tingkat lokal, regional, nasional dan global yang kemudian diselaraskan dengan program dari perangkat daerah dan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi termasuk adanya permasalahan mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya finansial.

Bab ini memuat dua hal, yaitu; 1) tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2024; dan 2) penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2024.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Visi Pembangunan daerah untuk periode RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Kabupaten Barru Yang

Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

Rumusan visi ini mengandung empat kata kunci visi yakni sejahtera, mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2024 sesuai tema pembangunan Kabupaten Barru yaitu “Pemerataan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Dengan Pemanfaatan Sektor-Sektor Strategis Daerah”.

Berdasarkan pokok-pokok visi, maka visi RPJMD Kabupaten Barru 2021-2026 dapat dijelaskan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Sejahtera	Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial
	Mandiri	Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barru
	Berkeadilan	Kondisi ideal dimana dampak pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang
	Bernafaskan Keagamaan	Kondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
- 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal.
- 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal.
- 4. Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- 5. Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan.
- 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi.
- 7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat sebagaimana diuraikan tabel berikut.

Tabel 4.2
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

No.	Pokok-pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya	Mencakup upaya umum dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas manusia yang terdiri dari pelayanan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan dasar lainnya yang dimaksud pada misi ini adalah pelayanan dasar terhadap konsumen yakni pengendalian harga dan ketersediaan pangan
2		Menciptakan lingkungan yang kondusif serta	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan lingkungan kondusif yang tangguh terhadap bencana

		pengembangan dan penguatan seni budaya lokal	serta menerapkan kearifan lokal, memperkuat dan mengembangkan budaya-budaya lokal
3		Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal	Mencakup upaya umum dalam membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur yang menjamin pemerataan infrastruktur wilayah sehingga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dalam menunjang perekonomian daerah
4		Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan meliputi peningkatan sektor-sektor strategis perekonomian daerah serta memastikan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu
5		Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan	Mencakup upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat pedesaan dan perkotaan meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan
6		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) serta layanan publik yang	Mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan pelayanan publik yang memuaskan dengan didukung teknologi informasi

		akuntabel berbasis teknologi informasi	
7		Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C

Target dari tujuan dan sasaran tahun 2024 menjadi landasan RKPD Tahun 2024, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan
Kabupaten Barru dan Target Kinerja Tahun 2024

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
	Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan						
1	Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya						
	1	Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,53	72,26	72,57
	1	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	Poin	65,31	70,28	70,83
	2	Sasaran : Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat	Indeks kesehatan	Poin	75,92	76,93	77,26
	3	Sasaran : Meningkatkan kualitas daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita	Juta rupiah	11,27	11,35	11,63
2	Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal						
	2	Tujuan : Mewujudkan ketahanan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah terhadap bencana	Poin	-	0,72	0,75
	4	Sasaran : Meningkatkan ketangguhan bencana	Persentase penurunan korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,004*	0,009	0,006
	3	Tujuan : Mewujudkan pengembangan pemajuan kebudayaan	Persentase peningkatan desa/kel pemajuan kebudayaan dari 0	%	0,05	7,25	9,09

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
			menjadi 12,73%				
	5	Sasaran : Terwujudnya penguatan seni budaya	Persentase objek kemajuan budaya yang terpelihara	%	8,30	11,11	12,70
3	Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal						
	4	Tujuan : Meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks williamson	Poin	0,29*	0,28	0,27
	6	Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur	Poin	3,583*	3,874	3,881
4	Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan						
	5	Tujuan : mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi	%	5,11	5,91	6,64
	7	Sasaran : Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	50,12	52,52	52,97
	8	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72,04	74	74,26
5	Misi 5: Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan						
	6	Tujuan : Menurunkan ketimpangan pendapatan antar	Indeks gini	Poin	0,36	0,34	0,33

No	Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
		masyarakat dan angka kemiskinan					
9	Sasaran : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,32	5,31	5,14	
		Angka kemiskinan	%	8,40	6,67	6,41	
6	Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi						
	7	Tujuan : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Nilai reformasi birokrasi	Poin	50,13	70	73
	10	Sasaran : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Nilai SAKIP	Poin	57,34	65	70
			Indeks pelayanan publik	Poin	3,96	3,7	4
7	Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama						
	8	Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	Angka kriminalitas	Per 10.000 penduduk	5,42	6,1	5,9
	11	Sasaran : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma-norma, hukum dan ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,002*	0,001	0,001

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2023

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Barru tahun 2024 disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. Tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menjadi acuan penyusunan prioritas pada rencana kerja tahunan selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka RKP 2024 merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2024 untuk menjaga keselarasan rencana pembangunan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua

Visi RPJMN 2020-2024

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Presiden yang dituangkan kedalam sembilan poin Nawacita kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2024

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020-2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

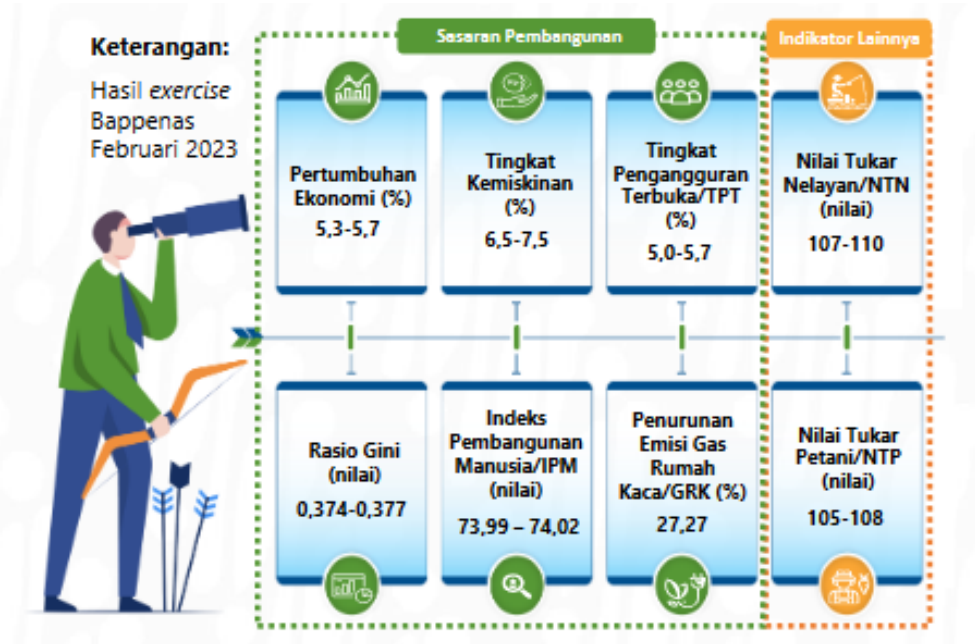
4.2.1.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 4.2
Sasaran dan Indikator RKP Tahun 2024



Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2024

4.2.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 sebagai berikut :

- 1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan ;
- 3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan ;
- 4. Penguatan daya saing usaha ;
- 5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- 7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara ; dan
- 8. Pelaksanaan pemilu 2024

4.2.1.4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan kedalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi

pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh PN RKP Tahun 2024 disampaikan dalam infografis di bawah ini.

Gambar 4.3
Prioritas Pembangunan Nasional 2024



Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2024

4.2.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

4.2.2.1 Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas tahun 2024 masih dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak

pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2024.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2024 masih difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional

4.2.2.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Berdasarkan tema pembangunan tahun 2024 “Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”, maka sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran yang termuat dalam RPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Target RKPD 2024
		Sasaran Pembangunan			
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ Angka	BB (>70 – 80)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	BB (>70-80)
	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	A- (4,01 – 4,5)
2	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,528
	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	84,97
3	Meningkatnya produktivitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah	Rp. Juta	
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,9
4	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	70,7
		9	Angka Kemiskinan	%	6,7-7,7
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,59-4,3
	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	11	Rasio Gini	Angka	0,361-0,36
	Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	12	IPM	Angka	74,02
	Meningkatnya Kualitas dan Kesenjaraan Gender dalam pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,65
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	14	IKLH	Angka	73,57
	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan	15	Potensi Penurunan emisi	Juta Ton	1.823.583

	adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		GRK (Juta Ton CO2Eq)		
6	Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	16	Angka Kriminalitas	Angka	

Sumber : Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

4.2.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan penguatan sistem manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur.
2. Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah.
3. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel.
4. Peningkatan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.
5. Pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan peningkatan ketaatan penataan ruang.
6. Peningkatan akses terhadap penciptaan Lapangan dan kesempatan kerja serta kesejahteraan tenaga kerja.
7. Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim
8. Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerja di berbagai bidang pembangunan.
9. Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan berdasarkan potensi wilayah.
10. Peningkatan prasarana/sarana destinasi pariwisata dan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi pariwisata.
11. Peningkatan nilai investasi melalui promosi potensi daerah.
12. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

4.2.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Berdasarkan tema, sasaran dan arah kebijakan untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 difokuskan pada sasaran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja		Satuan	Target	
			Sasaran Pembangunan			RKPD Tahun 2024	RPD 2024
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ Angka	BB (>70 – 80)	BB (>70 – 80)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	BB (>70-80)	BB (>70-80)
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	A- (4,01 – 4,5)	A- (4,01 – 4,5)
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,528	0,528
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	84,97	84,97

		wilayah					
3	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktivitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah	Rp. Juta		
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,9	5,5-6,9
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	70,7	70,7
			9	Angka Kemiskinan	%	6,7-7,7	6,7-7,7
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,59-4,3	3,59-4,3
		Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	11	Rasio Gini	Angka	0,361-0,36	0,361-0,36
		Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif	12	IPM	Angka	74,02	74,02

		dan Berkarakter					
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93,65	93,65
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	14	IKLH	Angka	73,57	73,57
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	Juta Ton	1.823.583	1.823.583
6	Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional	Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	16	Angka Kriminalitas	Angka		

Sumber : Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

4.2.3 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024

4.2.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran yang pada dasarnya meliputi program program unggulan perangkat daerah, target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Adapun tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu “Pemerataan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Dengan Pemanfaatan Sektor-Sektor Strategis Daerah” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya;
3. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas;
4. Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan; dan
5. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Adapun penjelasan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024

No .	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah
1	Peningkatan akses pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia	Mencakup upaya umum dalam pelayanan untuk meningkatkan kualitas SDM dan layanan dasar (SPM)
2	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya	Mencakup upaya umum dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024, penanggulangan bencana , penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya.
3	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas	Mencakup upaya umum dalam membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur yang berorientasi strategis dan konektivitas dalam menunjang perekonomian daerah.
4	Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan	Mencakup upaya umum dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan meliputi peningkatan sektor-sektor strategis perekonomian daerah serta memastikan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.
5	Percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	Mencakup upaya umum dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat pedesaan dan perkotaan meliputi peningkatan penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2023

4.2.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024

Berdasarkan tema pembangunan tahun 2024 “Pemerataan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Dengan Pemanfaatan Sektor-Sektor Strategis Daerah” maka sasaran pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Barru tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	Poin	70,83
2	Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat	Indeks kesehatan	Poin	77,26
3	Meningkatnya kualitas daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita	Juta rupiah	11,63
4	Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase penurunan korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,006
5	Terwujudnya penguatan seni budaya	Persentase objek kemajuan budaya yang terpelihara	%	12,7
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur	Poin	3,881
7	Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	52,97
8	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,26
9	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,14
		Angka kemiskinan	%	6,41
10	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Nilai SAKIP	Poin	70
		Indeks pelayanan publik	Poin	4
11	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma-norma, hukum dan ideologi kebangsaan pada masyarakat	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam	Poin	0,001

No	Sasaran Pembangunan	Indikator	Satuan	Target Tahun 2024
		12 bulan terakhir		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2023

4.2.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKPD tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan budaya literasi masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan pendewasaan usia perkawinan pertama;
3. Peningkatan Pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan;
4. Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi;
5. Meningkatkan kualitas konstruksi jaringan jalan dan jembatan;
6. Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas;
7. penguatan kelembagaan dan penegakan hukum serta pencegahan pencemaran/kerusakan SDA dan LH
8. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi
9. Penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
10. Perwujudan modernisasi manajemen pemerintah melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi
11. Peningkatan desa dan kelurahan tangguh bencana
12. Pelaksanaan pelestarian budaya lokal
13. Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dan pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara

4.2.3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024

Tema, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 dituangkan dalam 5 (lima) Prioritas Kabupaten (PK) RKPD tahun 2024. Lima PK tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dan dilanjutkan pada RKPD Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektifitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2024 difokuskan pada sasaran pembangunan, arah kebijakan dan program prioritas serta indikator kinerjanya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Prioritas, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan Program Prioritas Kabupaten Barru Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
Peningkatan akses pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat	Peningkatan budaya literasi masyarakat	Program pengelolaan pendidikan	Persentase warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud (SPM)	100	75.258.706.938	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (sd/ mi, smp/mts) (SPM)	100		
				Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	100		
	Meningkatnya usia harapan	Peningkatan kualitas pelayanan kb dan	Program pemenuhan upaya kesehatan	Persentase ibu hamil yang mendapatkan	100	118.872.470.726	Dinas Kesehatan

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
	hidup masyarakat	pendewasaan usia perkawinan pertama	perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	layanan kesehatan (SPM)			
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100		
				Angka status gizi masyarakat	92,03%		
				Persentase imunisasi dasar lengkap	85%		
				Indeks keluarga sehat	0,06		
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100%		
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase pemenuhan sdm kesehatan yang kompeten sesuai standar dan peraturan perundang-undangan	92%	58.678.400	Dinas Kesehatan

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
	Meningkatnya kualitas daya beli masyarakat		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Persentase penduduk yang menerapkan PHBS	82%	186.928.000	Dinas Kesehatan
			Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,63%	70.874.500	Dinas PMDPPKBPPPA
			Program pemenuhan hak anak (PHA)	Nilai capaian evaluasi kabupaten layak anak	750	115.000.400	Dinas PMDPPKBPPPA
		Peningkatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	72%	102.192.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga antar waktu	≥10	55.000.000	Dinas Kop, UKM & Dag
Peningkatan dan pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	55,32	8.705.937.777	Dinas PUTR - PERKIM
		Meningkatkan kualitas konstruksi		Persentase luas kawasan permukiman rawan	7,37	10.472.847.218	

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
		jaringan jalan dan jembatan		banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di ws kewenangan kab/kota			
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	98,87 layak dan 68,21 aman	3.254.400.000	Dinas PUTR - PERKIM
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	1.993.238.000	Dinas PUTR - PERKIM
			Program penyelenggaraan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	78,80	113.957.075.906	Dinas PUTR - PERKIM
			Program pengembangan perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	1.750.275.000	Dinas PUTR - PERKIM
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah	100		

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)			
			Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan memiliki kelengkapan psu (prasarana, sarana dan utilitas umum)	57,00	3.648.319.640	Dinas PUTR - PERKIM
			Program pengelolaan pelayaran	Persentase peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui melalui dermaga/kapal laut	2%	241.509.667	Dinas Perhubungan
Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan	Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah	Pengembangan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai realisasi PMA dan PMDN	465 m	438.200.000	Dinas Pmptsp
			Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	6625 ton	1.365.500.000	Dinas Perikanan

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Total produksi produk olahah perikanan	1407 ton	391.888.800	Dinas Perikanan
			Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah pad pariwisata	2%	3.234.644.274	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Or
			Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	6,94	700.226.002	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Or
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Tingkat produktivitas pertanian per hektar per tahun	7,98%	2.121.652.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Tingkat produktivitas sektor peternakan per tahun	3,45%	350.000.000	
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	1,50%	928.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan	Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum serta pencegahan	Program pengendalian pencemaran dan/atau	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan	26%	265.251.710	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
	lingkungan hidup secara terpadu	pencemaran/kerusakan SDA dan LH	kerusakan lingkungan hidup	atau kerusakan lingkungan hidup			
			Program pengelolaan persampahan	Presentase sampah yang tertangani	82%	4.437.886.169	Dinas Lingkungan Hidup
Percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm), dan koperasi	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	63,08	304.196.500	Dinas Tenaga Kerja
		Penanganan dan pemberdayaan masyarakat miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (ppks)	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	14,4	85.956.500	Dinas Tenaga Kerja
			Program rehabilitasi sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100	264.222.000	Dinas Sosial
				Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		
				Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial di luar panti (SPM)	100		
				Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100		
			Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100	898.516.000	Dinas Sosial
			Program pemberdayaan usaha menengah,	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,97%	2.800.000.000	Dinas Kop, UKM & Dag

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
			usaha kecil dan usaha mikro				
			Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	1,12%	328.275.675	Dinas Kop, UKM & Dag
Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	Perwujudan modernisasi manajemen pemerintah melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Tingkat kematangan organisasi	Level 2	487.325.300	Sekretariat Daerah
			Program perekonomian dan pembangunan	Tingkat kematang UKPBJ	level 3	348.107.000	Sekretariat Daerah
			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan per UU dan ditetapkan tepat waktu	100%	743.142.500	Bappeda
				Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%		

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penetapan perda apbd tepat waktu dan sesuai peraturan per undang-undangan	100%	102.801.831.487	BKAD
				Persentase realisasi pengeluaran kas daerah terhadap realisasi penerimaan kas daerah	100%		BKAD
				Persentase penyampaian laporan keuangan ke BPK RI tepat waktu	100%		BKAD
			Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase pemberdayaan aset tetap tanah dan bangunan	100%	779.187.550	BKAD
			Program kepegawaian daerah	Nilai indeks implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)	B (61-80)	1.921.928.050	BKPSDM
			Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase pns yang mengikuti pengembangan	80%	976.854.500	BKPSDM

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				kompetensi 20 jp pertahun			
			Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	90	1.476.118.000	Inspektorat Daerah
			Program pendaftaran penduduk	Persentase perekaman KTP-el	99%	230.663.500	Dinas Dukcapil
			Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran	99%	125.927.900	Dinas Dukcapil
			Program pelayanan penanaman modal	Persentase peningkatan ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	98,98	188.979.000	Dinas PMPTSP
	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Peningkatan desa dan kelurahan tangguh bencana	Program penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100	36.132.000	BPBD
				Persentase warga negara yang	100	869.876.330	

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)			
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	132.000.000	
			Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100	2.037.700.000	Satpol PP Dan Damkar
				Waktu tanggap (<i>rensponse time</i>)	15 menit	55.681.636	
			Program penanganan bencana	Presentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	522.010.000	Dinas Sosial

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
				daerah kab/kota (SPM)			
	Terwujudnya penguatan seni budaya dan kearifan lokal	Pelaksanaan pelestarian budaya lokal	Program pengembangan kebudayaan	Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB	0,44	1.018.143.300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan dan ditetapkan sebagai WBTB	1	24.500.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	Peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dan pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	100	859.670.000	Satpol PP Dan Damkar

Prioritas pembangunan daerah	Sasaran	Arah kebijakan tahun 2024	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Prosentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.	100	123.558.782	Badan Kesbangpol
			Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Presentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	38.602.817.853	Sekretariat Daerah
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat	50%	342.156.063	Badan Kesbangpol

Sumber : Data olah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah tersebut dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan arah pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Adapun keterkaitan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, isu strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab.Barru Tahun 2024

No	Permasalahan Pembangunan	No	Isu Strategis Daerah	No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024
1	Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia dan pemenuhan pelayanan dasar	1	Perluasan dan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar	1	Peningkatan akses pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia
2	Tata kelola pemerintahan daerah belum efektif dan efisien	2	Penguatan reformasi birokrasi dan Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya
		3	Peningkatan keamanan, penciptaan stabilitas daerah dalam rangka pemilu dan pemilukada.		
3	Belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur yang merata	4	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang optimal	3	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas
4	Masih rendahnya daya saing daerah	5	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan	4	Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan

No	Permasalahan Pembangunan	No	Isu Strategis Daerah	No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024
5	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan,dan pemerataan pendapatan	6	Peningkatan penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan ekstrim.	5	Percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2023

4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

Dalam rangka konsistensi antar rencana pembangunan mulai dari level nasional hingga kabupaten/kota, maka dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan. Adapun sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Barru dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dapat dijelaskan sebagaimana uraian tabel berikut.

Tabel 4.10

Sinergitas dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN BARRU
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2024		
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Inklusif	Pemerataan Pembangunan Masyarakat dan wilayah dengan Pemanfaatan Sektor-Sektor Strategis Daerah
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024		

PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar PN.6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik	PP 1 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PP 2 Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata PP 3 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah PP 4 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PP 5 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PP 6 Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional	PK 1 Peningkatan akses pelayanan dasar dan Kualitas Sumber daya Manusia; PK 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya; PK 3 Peningkatan dan Pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas; PK 4 Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan; dan PK 5 Percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
PEMETAAN SINKRONISASI PRIORITAS		
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP 3 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	PK 4 Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP 4 Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PK 5 Percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

PN 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP 6 Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional	PK 1 Peningkatan akses pelayanan dasar dan Kualitas Sumber daya Manusia
PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PP 2 Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	PK 3 Peningkatan dan Pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas
PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PP 5 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PK 4 Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan
PN 7 Memperkuat Stabiitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik	PP 1 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	PK 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya

Keterangan : PN (Prioritas Nasional); PP (Prioritas Provinsi); PK (Prioritas Kabupaten)

Berdasarkan tabel diatas sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Barru dengan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2023, maka dilakukan sinkronisasi untuk mendukung prioritas dan sasaran Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2024 sebagaimana uraian tabel sebagai berikut.

Tabel 4.11

Dukungan Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Daerah terhadap Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru		Tujuan dan Sasaran Prioritas Kabupaten		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 3	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	PK 4	Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan	T.5	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,64
						S.7	Meningkatnya sektor-sektor strategis Perekonomian daerah	Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB	%	52,97
						S.8	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,26
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan	PP 4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	PK 5	Percepatan penurunan angka kemiskinan dan	T.6	Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan	Indeks Gini	Poin	0,33

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru		Tujuan dan Sasaran Prioritas Kabupaten		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
	menjamin pemerataan				ketimpangan pendapatan		angka kemiskinan			
						S.9	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,14
								Angka Kemiskinan	%	6,41
PN 3	Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PP 6	Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional	PK 1	Peningkatan akses pelayanan dasar dan Kualitas Sumber daya Manusia	T.1	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,57
						S.1	Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	70,83
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan					S.2	Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	77,26
						S.3	Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat	Paritas Daya Beli	Juta Rupiah	11,63
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	PP 4	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	PK 3	Peningkatan dan Pemerataan infrastruktur berorientasi	T.4	Meningkatkan kualitas Pemerataan Pembangunan antar wilayah	Indeks Williamson	Poin	0,27

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru		Tujuan dan Sasaran Prioritas Kabupaten		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
	ekonomi dan pelayanan dasar				strategis dan konektivitas	S.6	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,881
PN 6	Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	PP 5	Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PK 4	Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan	T.2	Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Poin	0,72
						S.4	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,006
						T.3	Mewujudkan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	9,09
						S.5	Terwujudnya Penguatan Seni	Persentase Objek	%	12,70

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru		Tujuan dan Sasaran Prioritas Kabupaten		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
							Budaya dan kearifan Lokal	Kemajuan Budaya yang terpelihara		
PN 7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PP 1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	PK 2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya	T.7	Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73
						S.10	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik	Nilai SAKIP	Poin	70
								Indeks Pelayanan Publik	Poin	4
						T.8	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama	Angka Kriminalitas	Per 1000 penduduk	6,1
						S.11	Meningkatnya penerapan Nilai-nilai Agama, norma-norma, hukum dan	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan	Poin	0,001

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan		Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru		Tujuan dan Sasaran Prioritas Kabupaten		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2024
							Ideologi kebangsaan pada masyarakat	kekerasan dalam 12 bulan terakhir		

Dengan demikian terlihat bahwa sasaran pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 memiliki keterkaitan secara keseluruhan dengan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2024. Adapun sebagai dukungan terhadap kegiatan Prioritas Nasional tahun 2024, maka Kabupaten Barru menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung kegiatan tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2024

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	1 Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Terbarukan (Ebt)	1 Akselerasi Pengembang an Pembangkit Energi Terbarukan	-	
			2 Peningkatan Pasokan Bahan Bakar nabati	-	
			3 Peningkatan Pelaksanaan Konservasi Dan Efisiensi Energi	-	
			4 Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	-	
			5 Pengembang an Industri Pendukung Ebt	-	
		2 Peningkatan Kualitas/Ketahan an Air Untuk	1 Pemantapan Kawasan Berfungsi	-	

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
		Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1 Lindungi (Kumulatif)		
			2 Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	-	
			3 Penyediaan Air Untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR dan PKP
			4 Penyediaan Air Baku Untuk Kawasan Prioritas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR dan PKP
			5 Pemeliharaan, Pemulihan Dan Konservasi Sumber Daya Air Dan Ekosistemnya Termasuk Revitalisasi Danau Dan Infrastruktur Hijau	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR dan PKP

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			6 Pengembangan Waduk Multi Guna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUTR dan PKP
		3 Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan	1 Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi Dan Biofortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			2 Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan Untuk Menjaga Stabilitas Pasokan Dan Harga Kebutuhan Pokok	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			3 Peningkatan Produktifitas Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (Sdm)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Penyuluhan Pertanian ; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ; Dinas Perikanan ;

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
					Dinas Koperindag
			4 Peningkatan Keberlanjutan Prodiktivitas Sumber Daya Pertanian, Dan Digitalisasi Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian ; Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			5 Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		4 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, Dan Kelautan	1 Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (Wpp) Dan Tata Ruang Laut Dan Rencana Zonasi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
				Pesisir Serta Pengelolaan Ruang Laut	
			2 Peningkatan Ekosistem Kelautan Dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			3 Peningkatan Produksi, Produktifitas , Standarisasi Mutu Dan Nilai Tambah Produk Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ; Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan ; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Dinas Perikanan
			4 Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, Dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ; Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan ; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Dinas Perikanan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			Perikanan Skala Kecil Serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya		
		5	Peningkatan Sdm Dan Riset Kemaritiman Dan Kelautan Serta Databaase Kelautan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Dinas Perikanan
		5	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (Umkm) Dan Koperasi		
		1	Peningkatan Kemitraan Usaha Antara Usaha Mikro Kecil Dan Usaha Menengah Besar	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperindag
		2	Peningkatan Kapasitas Usaha Dan Akses	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperindag

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah		
			3	Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, Dan Inovasi Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperindag	
			4	Peningkatan Penciptaan Start-Up Dan Peluang Usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)		
			5	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperindag	
		6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil Dan Insdustrialisasi	1	Peningkatan Industri Pengelolaan Berbasis Pertanian, Kemaritiman , Dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
				2	Peningkatan Industrialisa si Berbasis	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter Dan Kawasan Industri Terutama Di Luar Jawa		
			3 Peningkatan Daya Saing Destinasi Dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Pariwisata Alam, Yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparpora
			4 Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Dan Usaha	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparpora

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			Kreatif Dan Digital		
			5 Perbaikan Iklim Usaha Dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			6 Pengembangan Industri Halal	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperindag
		7 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri	1 Peningkatan Diversifikasi Nilai Tambah, Dan Daya Saing Produk Ekspor Dan Jasa	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag
			2 Peningkatan Akses Dan Pendalaman Pasar Ekspor	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag
			3 Pengelolaan Impor	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			4 Peningkatan Kandungan Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah Yang Efektif	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag
			5 Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produk Global	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperindag
			6 Peningkatan Citra Dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas Dan Destinasi Brending, Dan Produk Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparpora

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			7 Peningkatan Efektifitas Preferential Trader Agreement (Pta)/ Free Trade Agreement (Fta)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (Cepa) Dan Diplomasi Ekonomi		
		8 Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi	1 Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
			2 Otimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital Dan Industri 4.0	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperindag
			3 Peningkatan Sistem Logistik Dan Stabilitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperindag

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			4 Peningkatan Penerapan Praaktik Berkelanjutan Di Industri Pengolahan Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Disparpora
			5 Reformasi Fiskal	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
			6 Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Data Dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman , Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Dan Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperindag
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurai Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1 Pengembangan Wilayah Sulawesi	1 Pengembangan Kawasan Strategis	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR dan PKP
			2 Pengembangan Sektor Unggulan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian dan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
					Ketahanan Pangan ; Dinas Perikanan ;
			3 Pengembangan Kawasan Perkotaan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PUTR dan PKP
			4 Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, Dan Transmigrasi		
			5 Kelembagaan Dan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	1 Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1 Percepatan Cakupan Administarsi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas DUKCAPIL
			2 Integritas Sistem Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas DUKCAPIL

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			3 Pendampingan Dan Layanan Terpadu	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas DUKCAPIL
			4 Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas DUKCAPIL
		2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1 Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			2 Bantuan Sosial Dan Subsidi Tepat Sasaran	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			3 Perlindungan Sosial Adatif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			4 Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		3 Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (Kb) Dan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan Keluarga Berencana KB	Dinas Kesehatan : DPMDPPKB PPPA

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
				Kesehatan Reproduksi	
			2	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			3	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
			4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Dinas Kesehatan
			5	Penguatan Sistem Kesehatan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan	Dinas Kesehatan
		4	1	Peningkatan Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Afirmasi Askes Dan Percepatan	Dinas Pendidikan dan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah		
					Kebudayaa n		
			3	Peningkatan Pengelolaan Dan Penempatan Pendidik Dan Tenaga Kependidika n	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan n	
			4	Penjamin Mutu Kependidika n	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan n	
			5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan n	
		5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda	1	Pemenuhan Hak Dan Perlindunga n Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMDPPKB PPPA
				2	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdaya an, Dan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMDPPKB PPPA

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			Perlindungan Perempuan		
			3 Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disparpora
		6	1 Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Sosial
			2 Keperantaraan Usaha Dan Dampak Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			3 Reforma Agraria		
			4 Perhutanan Sosial		
		7	1 Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2 Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			3 Peningkatan Kapabilitas Iptek Dan Penciptaan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
			4 Prestasi Olah Raga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Disparpora
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	1 Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	1 Revolusi Mental Dalam Sistem Pendidikan Untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja Gotong Royong, Dan Budi Pekerti	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
			2 Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih,	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			Melayani, Dan Responsif		
			3 Revolusi Mental Dalam Sistem Sosial Untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas Dan Peran Keluarga Dalam Masyarakat Dalam Pembentukan Karekter	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
			4 Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Revolusi Mental	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
			5 Pembangunan Dan Pemberdayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			Berdasarkan Pancasila		
			6 Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan Dan Bela Negara Untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Dan Patriotisme	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
		2 Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan	1 Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2 Pengembangan Dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya Untuk	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
		Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia			
			3 Memperkuat Karakter Bangsa Dan Kesejahteraan Rakyat		
			3 Perlindungan Hak Kebudayaan Dan Ekspresi Budaya Untuk Memperkuat Budaya Yang Inklusif	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			4 Pengembangan Diplomasi Budaya Untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia Dalam Perkembangan Peradaban Dunia	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			5 Pengembangan Tata Kelola	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			Pembangunan Kebudayaan		Kebudayaan
		3 Memperkuat Modernisasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, Dan Harmoni Sosial	1 Penguatan Cara Pandang, Sikap, Dan Praktik Beragama Dalam Prespektif Jalan Tengah Untuk Memantapkan Persaudaraan Dan Kebersamaan Dikalangan Umat Beragama		
			2 Penguatan Harmini Dan Kerukunan Umat Beragama		
			3 Penyelarasan Relasi		

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah		
				Agama Dan Budaya			
			4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan			
			5	Pengembagnan Ekonomi Dan Sumber Daya Keagammaan			
		4	Peningkatab Budaya Literasi, Inovasi, Dan Kreatifitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan Dan Berkarakter	1	Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				2	Pengembang an, Pembinaan, Dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Dan Aksara Daerah, Serta Sastra	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3	Pengembang an Budaya Iptek,	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			Inovasi, Kreativitas Dan Daya Cipta		
			4 Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi Dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan; Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; Bappelitbangda
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman	Dinas PUTR dan PKP
			2 Penyediaan Akses Air Minum Dan Sanitasi Layak Dan Aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR dan PKP
			3 Pengelolaan Air Tanah Dan Air Baku Berkelanjutan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR dan PKP

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			4 Keselamatan Dan Keamanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LLAJ	Dinas Perhubungan
			5 Ketahanan Kebencanaa n Infrastruktur	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			6 Waduk Multipurpos e Dan Modernisasi Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA	Dinas PUTR dan PKP
		2 Infrastruktur Ekonomi	1 Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perhubungan
			2 Konektivitas Kereta api		
			3 Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
			4 Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LLAJ	Dinas Perhubungan
		3 Infrastruktur Perkotaan	1 Transportasi Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan LLAJ	Dinas Perhubungan
			2 Infrastruktur Dan Ekosistem	Program Penyelenggaraan Jalan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);	Dinas PUTR dan PKP ; Dinas

N O	Prioritas Pembangunan Nasional		Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah	
					Tik Perkotaan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.	Perhubunga n; Dinas Kominfo-SP
				3	Penyediaan Akses Perumahan Dan Permukiman Layak, Aman, Dan Terjangkau Di Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman	Dinas PUTR dan PKP
		4	Energi Ketenagalistrikan	1	Keberlanjuta n Penyediaan Energi Dan Ketenagalistr ikan		
		2		Akses Dan Keterjangka uan Energi Dan Ketenagalistr ikan			
		3		Kecukupan Penyediaan Energi Dan Tenaga Listrik			

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah	
		5	Transformasi Digital	1 Penuntasan Infrastruktur Tik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo-SP
				2 Pemanfaatan Infrastruktur Tik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo-SP
				3 Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo-SP
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
				2 Penanggulan gan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			3 Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
			4 Penguatan Kelembagaan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		2 Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	1 Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Dinas LH
			2 Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		3 Pembangunan Rendah Karbon	1 Pembangunan Energi Berkelanjutan		

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			2 Pemulihan Lahan Berkelanjutan		
			3 Pengelolaan Limbah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3	Dinas LH
			4 Pengembangan Industri Hijau		
			5 Rendah Karbon Pesisir Dan Laut		
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1 Konsolidasi Demokrasi	1 Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesbangpol
			2 Penguatan Kesetaraan Dan Kebebasan		
			3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo-SP
		2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1 Penguatan Integritas NKRI Dan Perlindungan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah
			n WNI Di Luar Negeri		
		3	Penegakan Hukum Nasional	1 Penataan Regulasi	
				2 Perbaikan Sistem Hukum Pidana Dan Perdata	
				3 Penguatan Sistem Anti Korupsi	
				4 Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	
		4	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	1 Penguatan Implementasi Manajemen Asn Berbasis Sistem Merit	BKPSDM
				2 Transformasi Pelayanan Publik	
				3 Penataan Kelembagaan Dan Proses Bisnis	
				4 Reformasi Sistem	

N O	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Daerah Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional (PN)	Perangkat Daerah		
				Akuntabilita s Kinerja Pembanguna n			
		5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesbangpol
		2		Penguatan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Badan Kesbangpol	
		3		Penguatan Keamanan Dan Ketahanan Siber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Kominfo-SP	

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2023



Selanjutnya, sebagai dukungan terhadap kegiatan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, maka Kabupaten Barru menetapkan program pembangunan daerah yang menjadi pendukung capain sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.13

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Terhadap Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
1	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahanyang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ Angka	BB (>70 – 80)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Kematangan Organisasi	Level 2	487.325.300	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/ Angka	BB (>70- 80)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Tingkat Kematang UKPBJ	level 3	348.107.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	3	Indeks Pelayanan Publik	Huruf/ Angka	A- (4,01 – 4,5)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersedian Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai Peraturan Per UU dan Ditetapkan tepat waktu	100%	743.142.500	BAPPEDA
								Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100%		

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Per Undang- undangan	100%	102.801.831. 487	BPKAD
								Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%		BPKAD
								Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%		BPKAD
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan	100%	779.187.550	BPKAD
							Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	B (61- 80)	1.921.928.05 0	BKPSDM

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Program Pengembanga n Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun	80%	976.854.500	BKPSDM
							Program Penyelenggar aan Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	90	1.476.118.00 0	INSPEKTOR AT DAERAH
							Program Pendaftaran Penduduk	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL	99%	230.663.500	DINAS DUKCAPIL
							Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	99%	125.927.900	DINAS DUKCAPIL
							Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	98,98	188.979.000	DINAS PMPTSPNAK ER

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Program Penanggulan gan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100	36.132.000	BPBD
								Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100	869.876.330	
								Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	132.000.000	
							Program Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran Dan Penyelamata	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100	2.037.700.00 0	SATPOL PP DAN DAMKAR

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							n Non Kebakaran	kebakaran (SPM)			
								Waktu tanggap (rensponse time)	15	55.681.636	
							Program Penanganan Bencana	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100	522.010.000	DINAS SOSIAL
							Program Pengembanga n Kebudayaan	Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB	0,44	1.018.143.30 0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
							Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan dan ditetapkan sebagai WBTB	1	24.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum perda dan perkara (SPM)	100	859.670.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
							Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100	123.558.782	BADAN KESBANGPOL
							Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	38.602.817.853	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat	50%	342.156.063	BADAN KESBANGPOL

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
2	Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamson	Angka	0,528		persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	55,32	8.705.937.777	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	84,97	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	7,37	10.472.847.218	
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	98,87 Layak dan 68,21 aman	3.254.400.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air	100	1.993.238.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
								limbah domestik (SPM)			
							Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	78,80	113.957.075.906	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
							Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	1.750.275.000	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
								persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100		

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Kawasan Perumahan memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	57,00	3.648.319.640	DINAS PUPR,PKP & PERTANAHAN
							Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Peningkatan Jumlah orang/barang yang terangkut melalui melalui dermaga/kapal Laut	2%	241.509.667	DINAS PERHUBUNGAN
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas Total Daerah	Rp. Juta		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	465 M	438.200.000	DINAS PMPTSP
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	7	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5-6,9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	6625 Ton	1.365.500.000	DINAS PERIKANAN
							Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Total Produksi Produk Olahah perikanan	1407 Ton	391.888.800	DINAS PERIKANAN

N o	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata	2%	3.234.644.274	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
							Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	6,94	700.226.002	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OR
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas pertanian per hektar per tahun	7,98%	2.121.652.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
								Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	3,45%	350.000.000	
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1,50%	928.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	70,7	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	63,08	304.196.500	DINAS TENAGA KERJA

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
	berkualitas dan merata.		9	Angka Kemiskina n	%	6,7-7,7	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	14,4	85.956.500	DINAS TENAGA KERJA
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	1 0	Tingkat Pengangu ran terbuka	%	3,59- 4,3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100	264.222.000	DINAS SOSIAL
		Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	1 1	Rasio Gini	Angka	0,361- 0,36		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		
		Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	1 2	IPM	Angka	74,02		Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	1 3	Indeks Pembangu nan Gender (IPG)	Angka	93,65		Persentase Warga Negara/gelanda ngan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial di luar panti (SPM)	100		
								Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100		
							Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100	898.516.000	DINAS SOSIAL
							Pprogram Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,97%	2.800.000.00 0	DINAS KOP, UKM & DAG

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Program Pengembanga n UMKM	Persentase Peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	1,12%	328.275.675	DINAS KOP, UKM & DAG
5	Pembanguna n kualitas lingkungan hidup yang berkelanjuta n	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	1 4	IKLH	Angka	73,57	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	26%	265.251.710	DINAS LINGKUNGA N HIDUP
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 5	Potensi Penurunan emisi GRK (Juta Ton CO2Eq)	Juta Ton	1.823.5 83	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	82%	4.437.886.16 9	DINAS LINGKUNGA N HIDUP
6	Pembentuka n karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional	Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	1 6	Angka Kriminalita s	Angka		Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kab/Kota	Tingkat Kematangan Organisasi	Level 2	487.325.300	SEKRETARI AT DAERAH
							Program Perekonomia n Dan	Tingkat Kematang UKPBJ	level 3	348.107.000	SEKRETARI AT DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Pembangunan				
							Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai Peraturan Per UU dan Ditetapkan tepat waktu	100%	743.142.500	BAPPEDA
								Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program RPJMD	100%		
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Per Undang-undangan	100%	102.801.831.487	BPKAD
								Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah	100%		BPKAD

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
								Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	100%		BPKAD
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan	100%	779.187.550	BPKAD
							Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	B (61- 80)	1.921.928.05 0	BKPSDM
							Program Pengembanga n Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun	80%	976.854.500	BKPSDM
							Program Penyelenggar aan Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	90	1.476.118.00 0	INSPEKTOR AT DAERAH
							Program Pendaftaran Penduduk	PERSENTASE PEREKAMAN KTP-EL	99%	230.663.500	DINAS DUKCAPIL

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	99%	125.927.900	DINAS DUKCAPIL
							Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	98,98	188.979.000	DINAS PMPTSPNAK ER
							Program Penanggulan gan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100	36.132.000	BPBD
								Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100	869.876.330	

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
								Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	132.000.000	
							Program Pencegahan, Penanggulan gan, Penyelamata n Kebakaran Dan Penyelamata n Non Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100	2.037.700.00 0	SATPOL PP DAN DAMKAR
								Waktu tanggap (rensponse time)	15	55.681.636	
							Program Penanganan Bencana	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100	522.010.000	DINAS SOSIAL

N o	Prioritas Pembanguna n Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan	Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
						Program Pengembanga n Kebudayaan	Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB	0,44	1.018.143.30 0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan dan ditetapkan sebagai WBTB	1	24.500.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N
						Program Peningkatan Ketenterama n Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum perda dan perkara (SPM)	100	859.670.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
						Program Pembinaan Dan Pengembanga n Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100	123.558.782	BADAN KESBANGPO L

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan		Satuan	Target RKPD 2024	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	PAGU INDIKATIF	OPD
							Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	38.602.817.853	SEKRETARIAT DAERAH
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat	50%	342.156.063	BADAN KESBANGPOL

Berdasarkan keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Barru terhadap prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang telah diuraikan tersebut maka dilakukan perbandingan Perbandingan Capaian 2022, Perkiraan Tahun 2023 dan Target 2024 terkait Indikator Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana diuraikan tabel berikut.

Tabel 4.14
Perbandingan Capaian 2022, Perkiraan Tahun 2023 dan Target 2024
terkait Indikator Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten

N o	Indikator Pembangunan Nasional	Capai an 2022	Perkira an Tahun 2023	Target 2024	Indikator Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Capa ian 2022	Perkira an Tahun 2023	Target 2024	Indikator Pembang unan Kabupate n Barru	Capai an 2022	Perkira an Tahun 2023	Targ et 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,3-5,5	5,3 - 5,7	Pertumbuhan Ekonomi	5,09	5,06- 6,59	6,3–6,9	Pertumbu han Ekonomi	5,11	5,91	6,64
2	Tingkat Kemiskinan	9,57	7,5-8,5	6,5 - 7,5	Tingkat Kemiskinan	8,66	7,75 – 8,00	6,3 – 6,7	Tingkat Kemiskin an	8,40	6,67	6,41
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,86	5,3-6,0	5,0 - 5,7	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,51	5,69	3,6 – 4,3	Tingkat Pengangg uran Terbuka	5,32	5,31	5,14
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,91	73,31- 73,49	73,99 - 74,02	Indeks Pembangunan Manusia	72,8 2	73,17	73,53 – 73,8	Indeks Pembang unan Manusia	71,53	72,26	72,5 7
5	Rasio Gini	0,381	0,375- 0,378	0,374 - 0,377	Rasio Gini	0,36 5	0,376 – 0,381	0,362- 0,363	Rasio Gini	0,36	0,34	0,33
6	Penurunan Emisi GRK	26,87	27,02	27,27	Penurunan Emisi GRK		1,347	1,347	Penuruna n Emisi GRK		1,347	1,34 7

Sumber Data : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru Tahun 2023

4.3.1 Sustainable Development Goals/SDGs

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Barru berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021 – 2026. Adapun sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Sinergitas Dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2024	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya	1. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua (TPB.16) 2. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (TPB.13) 3. Melindungi, merestorasi dan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2024	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
	meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (TPB.15) 4. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (TPB.11)
Peningkatan akses pelayanan dasar dan Kualitas Sumber daya Manusia	1. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (TPB.3) 2. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (TPB.4) 3. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (TPB.5)
Percepatan penurunan angka Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (TPB.1) 2. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara (TPB.10)
Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan	1. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (TPB.2) 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta Pekerjaan yang layak untuk semua (TPB.8) 3. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (TPB.12) 4. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (TPB.14)

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2024	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Peningkatan dan Pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas	1. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan (TPB.6) 2. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. (TPB.9) 3. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. (TPB.7)

4.3.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Tabel 4.16

Prioritas Pembangunan yang mendukung atau terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2024	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya	1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana 5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BARRU TAHUN 2024	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
	2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah 3. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari- Hari 4. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.

4.3.3 Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Barru

Pokok - pokok pikiran DPRD untuk rencana pembangunan tahun 2024 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD, dan RKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 merupakan tahun kedua perencanaan dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021- 2026, selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi antara lain penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, maka dalam proses penyusunan RKPD tahun 2024 harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barru.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran yang diusulkan sebanyak 555 usulan. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen

pemikiran sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi saran dan pendapat di dalam penyusunan Rancangan RKPD tahun 2024. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Barru secara garis besar adalah yang terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur meliputi jalan, sumber daya air, irigasi dan air minum.
2. Peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
3. Ketersediaan perlengkapan jalan berupa lampu jalan, rambu-rambu dan marka jalan.
4. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana.
5. Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan kewirausahaan.
6. Pemberian kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2024 Kabupaten Barru. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan target dan pendanaan program.

Belanja daerah tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan- kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Rencana Belanja Daerah Tahun 2024-2025
Kabupaten Barru

URAIAN (Sesuai PP 12 TAHUN 2019)	Proyeksi Tahun	
	2024	2025
Pendapatan	1.145.039.945.001,00	980,507,557,044.66
Pendapatan Asli Daerah	106.780.594.922,00	118,680,033,590.28
Pendapatan Transfer	1.042.784.922.344,00	861,827,523,454.38
A. Transfer Pemerintah Pusat	978.556.017.387,00	791,832,192,165.00
B. Transfer Antar Daerah	64.228.904.957,00	69,995,331,289.38
BELANJA	1.145.039.945.001,00	910.470.548.573
Belanja Operasi	797.035.473.452,61	703.047.112.305
Belanja Pegawai	463.973.537.820,42	450.102.667.999
Belanja Barang dan jasa	294.047.269.041,19	247.667.223.656

Belanja Bunga	2.730.000.000,00	1.530.000.000
Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	-
Belanja Hibah	35.284.666.591,00	3.737.220.650
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	245.634.865.862,00	106.550.927.564
Belanja tidak Terduga	6.000.000.000,00	6.000.000.000
Belanja Transfer	96.369.605.686,40	94.872.508.704
Belanja Bagi Hasil	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	96.369.605.686,40	94.872.508.704

Sumber : Data Olahan 2023

5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Bab III diproyeksi bahwa belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.145.039.945.001,00. Belanja daerah tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Rincian belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah					
Prioritas pembangunan daerah	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
Peningkatan akses pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia	Program pengelolaan pendidikan	Persentase warga negara usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud (SPM)	100	75.258.706.938	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (sd/mi, smp/mts) (SPM)	100		
		Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	100		
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100	118.872.470.726	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100		
		Angka status gizi masyarakat	92,03%		
		Persentase imunisasi dasar lengkap	85%		
		Indeks keluarga sehat	0,06		
		Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100%		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase pemenuhan sdm kesehatan yang kompeten sesuai standar dan peraturan perundang-undangan	92%	58.678.400	Dinas Kesehatan
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	Persentase penduduk yang menerapkan PHBS	82%	186.928.000	Dinas Kesehatan
	Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,63%	70.874.500	Dinas PMDPPKBPPPA
	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Nilai capaian evaluasi kabupaten layak anak	750	115.000.400	Dinas PMDPPKBPPPA
	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	72%	102.192.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan

Prioritas pembangunan daerah	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
					Pangan
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga antar waktu	≥10	55.000.000	Dinas Kop, UKM & Dag
Peningkatan dan pemerataan infrastruktur berorientasi strategis dan konektivitas	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	55,32	8.705.937.777	Dinas PUTR - PERKIM
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di ws kewenangan kab/kota	7,37	10.472.847.218	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	98,87 layak dan 68,21 aman	3.254.400.000	Dinas PUTR - PERKIM
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	1.993.238.000	Dinas PUTR - PERKIM
	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	78,80	113.957.075.906	Dinas PUTR - PERKIM
	Program pengembangan perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	1.750.275.000	Dinas PUTR - PERKIM
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100		
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan memiliki kelengkapan psu (prasarana, sarana dan utilitas umum)	57,00	3.648.319.640	Dinas PUTR - PERKIM
	Program pengelolaan pelayaran	Persentase peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui melalui dermaga/kapal laut	2%	241.509.667	Dinas Perhubungan
Penguatan perekonomian berwawasan lingkungan	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai realisasi PMA dan PMDN	465 m	438.200.000	Dinas Pmptsp
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	6625 ton	1.365.500.000	Dinas Perikanan
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Total produksi produk olahah perikanan	1407 ton	391.888.800	Dinas Perikanan
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan jumlah pad pariwisata	2%	3.234.644.274	Dinas Pariwisata, Kepemudaan,

Prioritas pembangunan daerah	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
					Dan Or
	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	6,94	700.226.002	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Or
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Tingkat produktivitas pertanian per hektar per tahun	7,98%	2.121.652.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
		Tingkat produktivitas sektor peternakan per tahun	3,45%	350.000.000	
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase peningkatan produksi pertanian	1,50%	928.000.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	26%	265.251.710	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengelolaan persampahan	Presentase sampah yang tertangani	82%	4.437.886.169	Dinas Lingkungan Hidup
Percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	63,08	304.196.500	Dinas Tenaga Kerja
	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	14,4	85.956.500	Dinas Tenaga Kerja
	Program rehabilitasi sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100	264.222.000	Dinas Sosial
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		
		Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100		
		Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tna sosial di luar panti (SPM)	100		
		Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan layanan	100		

Prioritas pembangunan daerah	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
		rehabilitasi sosial			
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	100	898.516.000	Dinas Sosial
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	10,97%	2.800.000.000	Dinas Kop, UKM & Dag
	Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro	1,12%	328.275.675	Dinas Kop, UKM & Dag
Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif berlandaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Tingkat kematangan organisasi	Level 2	487.325.300	Sekretariat Daerah
	Program perekonomian dan pembangunan	Tingkat kematang UKPBJ	level 3	348.107.000	Sekretariat Daerah
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan per UU dan ditetapkan tepat waktu	100%	743.142.500	Bappeda
		Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%		
	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase penetapan perda apbd tepat waktu dan sesuai peraturan per undang-undangan	100%	102.801.831.487	BKAD
		Persentase realisasi pengeluaran kas daerah terhadap realisasi penerimaan kas daerah	100%		BKAD
		Persentase penyampaian laporan keuangan ke BPK RI tepat waktu	100%		BKAD
	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase pemberdayaan aset tetap tanah dan bangunan	100%	779.187.550	BKAD
	Program kepegawaian daerah	Nilai indeks implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)	B (61-80)	1.921.928.050	BKPSDM
	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase pns yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 jp pertahun	80%	976.854.500	BKPSDM
	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	90	1.476.118.000	Inspektorat Daerah
	Program pendaftaran penduduk	Persentase perekaman KTP-el	99%	230.663.500	Dinas Dukcapil
	Program pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran	99%	125.927.900	Dinas Dukcapil
	Program pelayanan penanaman modal	Persentase peningkatan ketepatan waktu penyelesaian izin yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	98,98	188.979.000	Dinas PMPTSP

Prioritas pembangunan daerah	Program prioritas	Indikator kinerja	Target tahun 2024	Pagu indikatif	Perangkat daerah
	Program penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100	36.132.000	BPBD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100	869.876.330	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100	132.000.000	
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	100	2.037.700.000	Satpol PP Dan Damkar
		Waktu tanggap (<i>rensponse time</i>)	15 menit	55.681.636	
	Program penanganan bencana	Presentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (SPM)	100	522.010.000	Dinas Sosial
	Program pengembangan kebudayaan	Persentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB	0,44	1.018.143.300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan dan ditetapkan sebagai WBTB	1	24.500.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara (SPM)	100	859.670.000	Satpol PP Dan Damkar
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Prosentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.	100	123.558.782	Badan Kesbangpol
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Presentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	38.602.817.853	Sekretariat Daerah
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase penurunan konflik sosial di lingkungan masyarakat	50%	342.156.063	Badan Kesbangpol

Tabel 5.3
Rencana Rincian Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1					BIDANG PENDIDIKAN																			
1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pendidikan	4,00				3,00	235.879.042.614			3,00	235.801.542.614	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan												20 JPL
1	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan	1	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan				100%	233.986.446.640			100%	233.986.446.640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	01	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2176 orang			100%	233.986.446.640	DAU/DAK Non Fisik		100%	233.986.446.640	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2,00	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/ fungsional/ struktural	1	01	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/ fungsional/ struktural	100%			100%	160.000.000			100%	170.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	2,00	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	01	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 orang	32 orang	32 orang	Barru	14 Orang	160.000.000	DAU		14 Orang	170.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	2,00	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	1	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%			100%	320.082.904			100%	320.082.904	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	2,00	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	01	01	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	6 Paket	2 Paket	Barru	3 Paket	8.000.000	DAU		13 Jenis	8.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																	10 Paket	129.135.204				129.135.204	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	2,00	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	01	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	135 Laporan	1 Laporan		50 Laporan	182.947.700	DAU		182.947.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	2,00	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100%	60.000.000			100%	60.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	2,00	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	01	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 unit				3 Unit	60.000.000	DAU		3 Jenis	60.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	1	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%				4 Jenis	632.513.070			4 Jenis	632.513.070	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	01	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			Barru	4 Laporan	328.389.996	DAU		4 Laporan	328.389.996	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
														150 Orang	100 Laporan	4 Laporan		150 orang						
														1 Dokumen				1 Dokumen						
1	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	01	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	24 Laporan	3 Laporan	Barru	3 Laporan	170.923.074	DAU		3 Laporan	170.923.074	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	01	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	19 Laporan	1 Laporan		2 laporan	21.000.000	DAU		2 orang	21.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
														2 Laporan				2 laporan	15.000.000			2 orang	15.000.000	
														15 Laporan				15 Laporan	97.200.000			15 orang	97.200.000	
01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	1	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%				100%	632.500.000			100%	632.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	01	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit				27 Unit	50.000.000	DAU		27 Unit	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
														25 Unit				25 Unit	15.000.000			25 Unit	15.000.000	
01	01	2,00	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	01	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit				4 Unit	27.500.000	DAU		4 Jenis	27.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	2,00	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	01	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	4 Unit		2 Unit	490.000.000	DAU		1 Unit	490.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
														2 Unit				2 Jenis	50.000.000			2 Jenis	50.000.000	
					Penimbunan dan Pemasangan Paving Blok Halaman PKG Mallusetasi													1 Paket	175.000.000	DAU				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							75.258.706.938				63.546.411.005	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)							Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)					86,55				87,05		
						Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,							Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,					94,63				94,79		
						Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					93,5				94,25		
01	02	2,00	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SD)	1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SD)	76%		70%		72%	27.220.278.055			74%	27.952.005.555	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2	01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	01	02	2,01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbangun	1305				3 Ruang	510.000.000	DAU		3 Ruang	510.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2	01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	01	02	2,01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	111	1 Ruang	3 Ruang		2 Ruang	570.683.800	DAU/DAK		2 Ruang	570.683.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SD NEGERI 3 BARRU												1 Ruang	261.297.920					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SD NEGERI 151 BARRU												1 Ruang	261.297.920					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
01	02	2	01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	55				2 Ruang	150.000.000	DAU/DAK		2 Ruang	150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						UPTD SD NEGERI 83 BARRU												1 Ruang	122.483.339					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	87				2 Unit	400.000.000	DAU	Pokir	2 Unit	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
														763	9 Unit	10 unit		3 Unit	231.000.000	DAU/DAK		3 Unit	231.000.000		
														8				1 Unit	210.945.000	DAU/DAK		1 Ruang	210.945.000		
						Pemb. Pagar SDN Padongko												50 Meter	102.980.500		POKIR			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Rehab Pagar SD 182 Lapasu													100 Meter	205.961.000		POKIR			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pemb. Pagar Sekolah SD Inpres Temmireng													1 Ls	164.768.800		POKIR			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembuatan Pagar SDN Ceppaga													200 Meter	411.922.000		pokir			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pemb. Pagar SD Inpres Ralla													1 Ls	164.768.800		POKIR			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pemb. Pagar SD Panrenge											Panrenge	70 M	164.768.800		Musrembang				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Paving Blok SDN 35 Barru											Pao	240 M	120.000.000		Musrembang				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pemb. Pagar SDI Ceppaga											Ceppaga	150 M	308.941.500		Musrembang/ pokir				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pemb. Toilet/Jamban SD Pettung											Pettung	1 Ruang	122.972.612		Musrembang				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Toilet																			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SD NEGERI 65 BARRU (Bujunglita)												1 Ls	122.972.612		POKIR				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	383				2 Unit	403.525.000	DAU/DAK		1 unit	201.762.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Pemb. Perumahan Guru SDI Patalassang, Kelas Jauh												1 Unit	200.000.000		POKIR				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1275	8 Ruang	15 Ruang		12 Ruang	1.170.000.000	DAU/DAK		12 Ruang	1.170.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						UPTD SD Negeri 171 Barru	Rehab Plapon SD Palludda											128 M2	78.389.376		Musrembang				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehab Ruang Kelas																			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							UPTD SD NEGERI 179 BARRU = (55%-60%)													1 Ruang	156.778.688					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							UPTD SD NEGERI 24 BARRU (Palakka)													3 Ruang	274.362.624					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							UPTD SD NEGERI 82 BARRU (Pasar Baru)													2 Ruang	78.389.376					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							UPTD SD NEGERI 83 BARRU (Bunne)													3 Ruang	156.778.560					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							UPTD SD NEGERI 132 BARRU (Nepo)													3 Ruang	274.362.624					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							UPTD SD NEGERI 171 BARRU (SDI Palludda)													4 Ruang	156.778.752					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							UPTD SD NEGERI 78 BARRU (Tokkene)													3 Ruang	274.362.624					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	01	14		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	35 Paket					5 Paket	160.000.000	DAU	pokir bacu2	5 Paket	180.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Mebel SDN 148, 58, 103, 43 BARRU, 116 Barru, 118 Barru													5 Paket	160.000.000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	01	16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket					10 Paket	50.000.000	DAU/DAK	Pokir/musre	10 Paket	283.490.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	01	21		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20281 PD					2.0281 PD	4.625.000.000	DAU		2.0281 PD	4.625.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	01	22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	197	4 Paket	25 paket			25 Paket	1.082.798.000			25 Paket	1.082.798.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Pengadaan Peralatan TIK SD = 10 x Rp. 125.000.000													10 Paket	1.250.000.000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	199	199 SP	199 SP			199 SP	573.733.400			199 SP	573.733.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	01	24		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	226 Dok					226 Dok	71.412.700			226 Dok	71.412.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	01	25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2828					600 Siswa	325.000.000	DAU		600 Siswa	325.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															1250					7 SP	32.500.000			7 SP	32.500.000	
															828 PD					99 SP	32.500.000			99 SP	32.500.000	
01	02	2,00	01	26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	79 orang	76 Orang	76 Orang			79 Orang	1.144.000.000	DAU		79 Orang	1.144.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	02	2,00	01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1360	0			8 Orang	68.000.000	DAU		25 Orang	68.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
													211 org				200 Orang	462.035.400			280 Orang	1.142.035.400		
													211 org				211 org	264.571.798			211 org	264.571.798		
01	02	2,00	01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	120 SP	80 SP	80 SP		120 SP	41.500.000	DAU		120 SP	41.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
													5 jenis					5 Jenis	33.672.957			5 Jenis	33.672.957	
													1 Dokumen					1 Dokumen	110.000.000			1 Dokumen	110.000.000	
													1 Dokumen					1 Dokumen	22.500.000			1 Dokumen	22.500.000	
01	02	2,00	01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	199 SP	199 SP	199 SP		199 SP	14.474.900.000	DAK Non Fisik		199 SP	14.474.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SMP)	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SMP)					76%	19.736.123.450			77%	19.961.123.450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	283 Ruang				2 Ruang	407.756.900	DAU		1 Unit	407.756.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	177 Ruang	2 Ruang			1 Ruang	567.022.900	DAU/DAK		2 RK	567.022.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI SATAP 16 BARRU												1 Ruang	561.461.000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	39 Ruang				1 Ruang	75.000.000	DAU/DAK		1 Ruang	75.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI SATAP 16 BARRU												1 Ruang	244.966.800					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	20 unit				1 Unit	200.625.000	DAU		1 Unit	200.625.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	39 unit	1 Unit, 4 Paket, 1 Ruang			3 Unit	1.286.125.550	DAU		3 Unit	1.286.125.550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
													10 unit				1 Unit		DAU/DAK		1 Ruang			
													93 unit				2 Unit		DAU/DAK		2 Unit			
					UPTD SMP NEGERI SATAP 8 BARRU	Pemb. Pagar Sekolah SMP Matajang											Matajang	150 Meter	205.961.000		POKIR			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Pagar dan Paving Bock																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						UPTD SMP NEGERI 34 BARRU												50 M1	102.980.500					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI 25 BARRU												50 M1	102.980.500					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI 26 BARRU												100 M1	205.961.000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Lab Komputer																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI SATAP 16 BARRU												1 Ruang	613.183.000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehab Toilet																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI 26 BARRU (40% - 45%)												1 Paket	122.483.400					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	302 Ruang	6 Ruang			6 Ruang	585.000.000			1 Ruang	585.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI 18 BARRU												5 Ruang	578.734.065					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI SATAP 4 BARRU												3 Ruang	347.240.439					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI SATAP 16 BARRU												3 Ruang	347.240.439					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP NEGERI 26 BARRU (5%-10%)												2 Ruang	66.140.874					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket				10 Paket	250.000.000			4 Jenis	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP Negeri Satap 8 Barru													35.000.000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						UPTD SMP Negeri Satap 16 Barru													35.000.000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket				10 Paket	50.000.000			10 set	275.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39 SP	235 PD	8630 Peserta Didik		39 SP	4.625.000.000			6 RK	4.625.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
														3 Jenis				3 Jenis	90.000.000		3 Jenis	90.000.000		
														17045 PD				1.150 PD	37.500.000		1.150 PD	37.500.000		
01	01	2,00	02	35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	01	02	2.02	0035	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	39 Paket	6 Paket	4 Paket		4 Paket	375.000.000			4 Paket	375.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2,00	02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	3407 PD				3.407 PD	409.866.400			3.407 PD	409.866.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	2,00	02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	39 Dok				39 Dok	24.836.200			39 Dok	24.836.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 PD				600 Siswa	430.341.700			600 Siswa	430.341.700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
														48 SP				7 SP				7 SP		
														39 SP				39 SP				39 SP		
01	02	2,00	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23 orang	22 Orang	22 Orang		23 Orang	278.612.000		BOSDA	23 Orang	278.612.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 orang	0 Orang			5 Orang	42.500.000	DAU		5 Orang	42.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
														200 orang				200 Orang	227.557.000			200 Orang	227.557.000	
														39 orang				39 org	40.607.000			39 org	40.607.000	
01	02	2,00	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	39 orang	40 SP	40 SP		39 Orang	41.500.000	DAU		39 Orang	41.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
														5 Jenis				5 Jenis	33.672.800			5 Jenis	33.672.800	
														1 Dokumen				1 Dokumen	110.000.000			1 Dokumen	110.000.000	
														1 Dokumen				1 Dokumen	22.500.000			1 Dokumen	22.500.000	
01	02	2,00	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	39 SP	39 SP	39 SP		39 SP	9.525.100.000	DAK Non Fisik		39 SP	9.525.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM PAUD)	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM PAUD)						11.037.712.000				11.037.712.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Ruang	400.000.000	DAU/DAK	Pokir/kiru 2	3 Ruang	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	12 Unit	10 Unit		10 Unit	240.000.000	DAK		10 SP	240.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Alat Peraga Pendidikan											TK Takkalasi	1 Set			POKIR			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							Bantuan Alat Sarana Bermain Untuk 3 PAUD												Puccanra, Banrongnge, Lapakaka,	3 PAUD			POKIR			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Permainan Anak Untuk PAUD KB Nurul Huda Padang Rewatae												Dusun Padang Rewatae, Desa Pattappa, Kec Pujananting	5 Buah			POKIR			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	03	11		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6809 PD	6380 orang	6380 orang			6.859 PD	4.104.990.400	DAU		6.859 PD	4.104.990.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	03	15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	645 PD	596 orang	596 orang			645 Orang	5.975.372.000	DAU		645 Orang	5.975.372.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 org					200 Orang	132.349.600	DAU		200 Orang	132.349.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	03	17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 SP					7 SP	50.000.000	DAU		7 Dokumen	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															250 Orang	396 orang	396 orang			250 Orang	60.000.000			250 Orang	60.000.000	
															22					22 Gugus	75.000.000			22 Gugus	75.000.000	
01	02	2,00	04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)							4.595.570.000				4.595.570.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	02	2,00	04	12		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 PD					100 PD	4.000.000	DAU		100 WB	4.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															1 Lembg					1 Lbg	198.970.000	DAU		100 WB	198.970.000	
															236 siswa					236 Siswa	306.800.000	DAU		100 WB	306.800.000	
															858 siswa					858 Siswa	1.287.000.000	DAU		100 WB	1.287.000.000	
															545 siswa	1151 orang	3095 PD			236 Siswa	981.000.000	DAU		1 PKBM	981.000.000	
															50 WB					50 WB	110.000.000	DAK Non Fisik		5 Klp	110.000.000	
															50 WB					50 WB	125.000.000	DAU		50 WB	125.000.000	
															5 Jenis					5 Jenis	1.582.800.000	DAU		50 WB	1.582.800.000	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
																			DAU/DAK		5 Jenis			
2					BIDANG KESEHATAN																			
01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan	3,00		4,00	Dinkes	3	130.498.139.849	DAU		4	125.747.606.676	DINAS KESEHATAN	
					Tingkat Kesehatan BLUD	Tingkat Kesehatan BLUD						65,55	RSUD	65.50	BLUD	65.50								
01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%	Dinkes	100%	994.000	DAU		100%	1.000.000	DINAS KESEHATAN	
01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	0	2 dok	Dinkes	2 Dok	994.000	DAU		2 Dok	1.000.000	DINAS KESEHATAN
01	2	02			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	1	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100%	0	0	Dinkes	100%	26.417.500	DAU		100%		DINAS KESEHATAN	
02	1	2,03	02		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	0	0	Dinkes	1 Dok	26.417.500	DAU		1 Dok		DINAS KESEHATAN
01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang- Undangan	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang- Undangan	100%	100%	100%	Dinkes	100%	68.884.400.000	DAU		100%	70.333.244.000	DINAS KESEHATAN	
01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	726 orang	714 orang	726 orang	Dinkes	726	68.884.400.000	DAU		726	70.333.244.000	DINAS KESEHATAN
01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Dinkes	100%	915.537.500	DAU		100%	890.468.000	DINAS KESEHATAN	
01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	Dinkes	7 Paket	10.185.000	DAU		7 Paket	3.500.000	DINAS KESEHATAN
01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			Dinkes	20 Paket	231.470.000	DAU		20 Paket	252.410.000	DINAS KESEHATAN
01	2	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	15 Paket	3 Paket	Dinkes	23 Paket	50.027.500	DAU		23 Paket	9.694.000	DINAS KESEHATAN
01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Dinkes	1 paket	113.360.000	DAU		1 paket	125.264.000	DINAS KESEHATAN
01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	67.429 Lembar	0	0	Dinkes	67.429 Lembar	33.280.000	DAU		67.429 Lembar	23.600.000	DINAS KESEHATAN
01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Dinkes	12 Lap	13.390.000	DAU		12 Lap	12.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	777 laporan	1104 laporan	Dinkes	12 Lap	463.825.000	DAU		12 Lap	464.000.000	DINAS KESEHATAN
01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Dinkes	100%	665.000.000	DAU		100%	721.500.000	DINAS KESEHATAN
01	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	Dinkes	1 Unit	200.000.000	DAU		1 Unit	190.000.000	DINAS KESEHATAN
01	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	02	01	2.1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		0	Dinkes	5 Paket	75.000.000	DAU		5 Paket	54.000.000	DINAS KESEHATAN
01	2	07	09		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	02	01	2.1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Paket	2 Paket	0	Dinkes	22 unit		DAU		22 unit	92.500.000	DINAS KESEHATAN
01	2	07	10		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	Dinkes	1 Unit	390.000.000	DAU		1 Unit	385.000.000	DINAS KESEHATAN
01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	Dinkes	100%	1.946.983.645	DAU		100%	1.946.840.000	DINAS KESEHATAN
01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Dinkes	12 Lap	87.857.002	DAU		12 Lap	44.000.000	DINAS KESEHATAN
01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Dinkes	12 Lap	714.326.643	DAU		12 Lap	748.440.000	DINAS KESEHATAN
01	2	08	03		Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Dinkes	12 Lap	1.144.800.000	DAU		12 Lap	1.154.400.000	DINAS KESEHATAN
01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	Dinkes	100%	818.950.000	DAU		100%	1.297.238.000	DINAS KESEHATAN
01	2	09	05		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 unit	9 unit	23 unit	Dinkes	43 Unit	346.950.000	DAU		43 Unit	431.000.000	DINAS KESEHATAN
01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit	54 unit	44 unit	Dinkes	41 unit	77.000.000	DAU		41 unit	147.950.000	DINAS KESEHATAN
01	2	09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	02	01	2.1	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 aplikasi	0	0	Dinkes	5 aplikasi	-	DAU		5 aplikasi	5.000.000	DINAS KESEHATAN
01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	02	01	2.1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 paket	1 paket	0	Dinkes	11 Paket	395.000.000	DAU		11 Paket	713.288.000	DINAS KESEHATAN
02	01	1.10			Peningkatan pelayanan BLUD	Tingkat Kesehatan BLUD	1	02	01	2.10		Peningkatan pelayanan BLUD	Tingkat Kesehatan BLUD	1 unit	1 unit	1 unit	Dinkes	1 unit	57.239.857.204	DAU		1 unit	50.557.316.676	DINAS KESEHATAN
02	01	1.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	RSUD	1 unit	45.678.802.844	DAU		1 unit	50.557.316.676	DINAS KESEHATAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	02									Dinkes (PKM)	1 TAHUN	11.561.054.360	DAU				DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100%		100%	Dinkes	100%	118.872.470.726	DAU/DAK		100%	1.000.280.605	DINAS KESEHATAN
						Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)							Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100%		100%	Dinkes	100%		DAU/DAK		100%	197.283.065	DINAS KESEHATAN
						Angka Status Gizi Masyarakat							Angka Status Gizi Masyarakat	93%		91,57%	Dinkes	92,03%		DAU/DAK		92,55%	1.872.048.778	DINAS KESEHATAN
						Persentase Imunisasi Dasar Lengkap							Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	87%		84%	Dinkes	85%		DAU/DAK		86%	673.836.879	DINAS KESEHATAN
						Indeks Keluarga Sehat							Indeks Keluarga Sehat	1%		0,5%	Dinkes	0,6		DAU/DAK		0,7	107.614.064.943	DINAS KESEHATAN
						Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)							Persentase Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan (SPM)	100%		100%	Dinkes	100%		DAU/DAK		100%	8.242.408	DINAS KESEHATAN
						Presentase pasien yang tertangani sesuai standart pelayanan							Presentase pasien yang tertangani sesuai standart pelayanan	77 600 %		77 000 %	Dinkes	77.50%		DAU/DAK		77.55%	19.994.856.230	DINAS KESEHATAN
2	01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan	83,33%	83,33%	83,33%	Dinkes	83,33%	63.514.355.593	DAU/DAK		83,33%	43.056.283.844	DINAS KESEHATAN
02	02	2.01	03		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 unit	3 unit	1 unit	RSUD	2	21.692.558.249	DAU/DAK		2	5.750.000.000	DINAS KESEHATAN
02	02	2.01	08		Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dsn Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1	02	02	2,01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 unit	1 unit	0	RSUD	2	-	DAU/DAK		2	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
02	2	01	09		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	02	02	2,01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 PKM	0	0	Dinkes	1 PKM	2.999.995.920	DAU/DAK		1 pkm	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
02	2	01	10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	02	02	2,01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Faskes	0	0	Dinkes	2 Faskes	467.217.649	DAU/DAK		2 faskes	500.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE						KODE REKENING PEMUTAKHIRAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
												Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							Rehabilitasi Pustu Pao-Pao					Dusun Pucue Desa Pao-Pao Kec.Tanete Rilau	Dusun Pucue Desa Pao-Pao Kec.Tanete Rilau	-	DAU	musrembang		-	DINAS KESEHATAN
02	2	01	11			1 02 02 2,01 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 rumdis	0	0	Dinkes	2 rumdis	599.995.926	DAU/DAK		2 rumdis	600.000.000	DINAS KESEHATAN
02	2	01	13			1 02 02 2,01 0006	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 unit	7 unit	6 unit	Dinkes	2 prasarana	350.000.000	DAU/DAK		3 prasarana	750.000.000	DINAS KESEHATAN
							Pembangunan Pagar Pustu Ele					Dusun Ele, Desa Lompo Tengah	1 Unit	-	DAU	musrembang		-	DINAS KESEHATAN
02	2	01	14			1 02 02 2,01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	300 unit	423 unit	201 item	Dinkes	150 unit	3.066.178.115	DAU/DAK		250	12.566.571.384	DINAS KESEHATAN
										195	3 item	RSUD	101 unit	25.971.942.661	DAU/DAK		200	7.000.000.000	DINAS KESEHATAN
02	2	01	16			1 02 02 2,01 0023	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	494	96 item	96 item	Dinkes	494 item	3.167.655.459	DAU/DAK		494	4.044.856.230	DINAS KESEHATAN
							Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		1 paket	1 paket	RSUD	1 Tahun	1.000.000.000	DAU		309	1.044.856.230	DINAS KESEHATAN
02	2	01	17			1 02 02 2,01 0023	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		34 item	49 item	Dinkes	641 item	3.198.811.614	DAU/DAK		641	4.000.000.000	DINAS KESEHATAN
							Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				RSUD	1 TAHUN	1.000.000.000	DAU/DAK		546 paket	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
02	2	01	20			1 02 02 2,01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	30 unit	0	224 unit	Dinkes	30 unit	-	DAU/DAK		30 unit	300.000.000	DINAS KESEHATAN
02	2	02				1 02 02 2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Keterpenuhan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	Dinkes	100%	55.152.365.133	DAU/DAK		100%	77.883.090.429	DINAS KESEHATAN
02	2	02	01			1 02 02 2,02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM)	3180	3.294	3402	Dinkes	3.180 Ibu Hamil	670.800.000	DAU/DAK		3.180	234.656.204	DINAS KESEHATAN
02	2	02	02			1 02 02 2,02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	3028	2.963	3199	Dinkes	3.028 Ibu bersalin	217.425.000	DAU/DAK		3.028	765.624.400	DINAS KESEHATAN
02	2	02	03			1 02 02 2,02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	2985	2.965	3109	Dinkes	2.985 Bayi	32.635.000	DAU/DAK		2.985	129.705.623	DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02	2	02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14387	10.216	12618	Dinkes	14.387 Balita	104.873.200	DAU/DAK		14.387	67.577.443	DINAS KESEHATAN
02	2	02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2880	8.430	4.651	Dinkes	2.880 Jiwa	209.295.000	DAU/DAK		2.880 Jiwa	36.807.503	DINAS KESEHATAN
02	2	02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34676	82.072	120.204	Dinkes	34.676 Jiwa	687.359.390	DAU/DAK		34.676 Jiwa	8.242.408	DINAS KESEHATAN
02	2	02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16022	8.691	22.820	Dinkes	16022 Jiwa	1.711.881.000	DAU/DAK		16022	247.555.573	DINAS KESEHATAN
02	2	02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49358	31.107	49.172	Dinkes	48358 Jiwa	21.806.500	DAU/DAK		49358	10.303.010	DINAS KESEHATAN
02	2	02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM)	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3169	2.811	3.082	Dinkes	3069 jiwa	16.400.000	DAU/DAK		3069	6.181.806	DINAS KESEHATAN
02	2	02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (SPM)	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	505 Jiwa	389 Jiwa	437 Jiwa	Dinkes	475 jiwa	46.352.000	DAU/DAK		490	10.303.010	DINAS KESEHATAN
02	2	02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (SPM)	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3650 jiwa	2537 Jiwa	4600 Jiwa	Dinkes	3650 jiwa	726.786.590	DAU/DAK		3650 jiwa	30.909.030	DINAS KESEHATAN
02	2	02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (SPM)	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3748	3.440	3760	Dinkes	3748 Jiwa	710.755.000	DAU/DAK		3748	25.757.525	DINAS KESEHATAN
02	2	02	13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduiduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	23.737.500	DAU/DAK		12 Dok	23.975.104	DINAS KESEHATAN
02	2	02	14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	7.128.000	DAU/DAK		12 Dok	7.212.107	DINAS KESEHATAN
02	2	02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	950.942.880	DAU/DAK		12 Dok	1.587.685.702	DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02	2	02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	34.553.000	DAU/DAK		12 Dok	34.898.871	DINAS KESEHATAN
02	2	02	17		Pengelolaan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	347.837.000	DAU/DAK		12 Dok	360.605.350	DINAS KESEHATAN
02	2	02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	767.790.000	DAU/DAK		12 Dok	379.109.556	DINAS KESEHATAN
02	2	02	19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	42.887.000	DAU/DAK		12 Dok	43.315.915	DINAS KESEHATAN
02	2	02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	14.077.000	DAU/DAK		12 Dok	14.218.154	DINAS KESEHATAN
02	2	02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2484 Jiwa	1686 jiwa	31122 Jiwa	Dinkes	2384 Jiwa	10.080.000	DAU/DAK		2384 Jiwa	10.100.000	DINAS KESEHATAN
02	2	02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	641.037.400	DAU/DAK		12 Dok	544.441.957	DINAS KESEHATAN
02	2	02	24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	7.128.000	DAU/DAK		12 Dok	7.212.107	DINAS KESEHATAN
02	2	02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	142.781.000	DAU/DAK		12 Dok	144.242.140	DINAS KESEHATAN
02	2	02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	44.087.523.100	DAU/DAK		12 Dok	55.194.629.932	DINAS KESEHATAN
02	2	02	29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Dinkes	1 Dok	128.513.500	DAU/DAK		1 Dok	129.891.731	DINAS KESEHATAN
02	02	2.02	32		Operasional pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6 dokumen			Dinkes	6 Dok	-	DAU/DAK		6 Dok	2.700.000.000	DINAS KESEHATAN
02	2	02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 dok	70.275.000	DAU/DAK		12 dok	12.363.612.000	DINAS KESEHATAN
02	2	02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12 PKM		4 PKM	Dinkes	12 PKM	785.557.500	DAU/DAK		12 PKM	793.414.194	DINAS KESEHATAN
02	2	02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 laporan	0	0	Dinkes	4 Laporan		DAU/DAK		4 Laporan	17.412.087	DINAS KESEHATAN
02	2	02	37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	372.387.000	DAU/DAK		12 Dok	376.110.799	DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02	2	02	38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat darurat Terpadu	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	13 PSC	13 PSC	13 PSC	Dinkes	13 PSC	1.561.761.573	DAU/DAK		13 PSC	1.577.379.189	DINAS KESEHATAN
03	2	03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi				Dinkes	12 PKM	165.458.000	DAU		12 PKM	190.605.685	DINAS KESEHATAN
03	2	03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dok	12 Dok	13 Dok	Dinkes	13 Dok	40.804.000	DAU		13 Dok	41.212.040	DINAS KESEHATAN
03	2	03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	124.654.000	DAU		12 Dok	149.393.645	DINAS KESEHATAN
03	2	03	03		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan								12 Pkm/2 RS	0	0	RSUD	1				1		DINAS KESEHATAN
03	2	04			PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D SERTA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasyankes yang mempunyai izin operasional	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang mempunyai izin operasional	100%			Dinkes	100%	40.292.000	DAU		100%	40.732.950	DINAS KESEHATAN
03	2	04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	12 PKM			Dinkes	12 PKM	25.611.000	DAU		12 PKM	25.891.464	DINAS KESEHATAN
03	2	04	04		Penyiapan perumusan dan Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	14.681.000	DAU		12 Dok	14.841.486	DINAS KESEHATAN
03					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Dinkes	92%	58.678.400	DAU		100%	50.394.980	DINAS KESEHATAN
03	2	01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktik	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktik	100%			Dinkes	100%	25.685.000	DAU		100%	16.833.851	DINAS KESEHATAN
03	2	01	01		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dok	0	1 Dok	Dinkes	1 Dok	16.660.000	DAU		1 Dok	7.713.998	DINAS KESEHATAN
03	2	01	02		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dok	0	1 Dok	Dinkes	1 Dok	9.025.000	DAU		1 Dok	9.119.854	DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
03	2	02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten	Persentase peyusunan SDMK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten	Persentase peyusunan SDMK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%		100%	Dinkes	100%	12.358.400	DAU		100%	12.604.836	DINAS KESEHATAN
03	2	02	01		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dok	2	1 dok	Dinkes	1 dok	6.090.000	DAU		1 dok	6.243.624	DINAS KESEHATAN
03	2	02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	618 orang	0	35 org	Dinkes	618 org	3.178.400	DAU		618	3.239.400	DINAS KESEHATAN
03	2	02	03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dok	0	1 dok	Dinkes	1 Dok	3.090.000	DAU		1 Dok	3.121.812	DINAS KESEHATAN
03	2	03			Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kompetensi tekhnis	1	02	03	2.03		Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kompetensi tekhnis	55 org	10org	55 org	Dinkes	55 org	20.635.000	DAU		55 org	20.956.293	DINAS KESEHATAN
03	2	03	01		Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	56 org	10 org	80 org	Dinkes	55 org	20.635.000	DAU		55 org	20.956.293	DINAS KESEHATAN
04	2				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKAN MINUM	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat.	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKAN MINUM	Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat.	100%	100%	100%	Dinkes	100%	581.741.000	DAU/DAK		100%	172.539.714	DINAS KESEHATAN
04	2	01			pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin usaha	1	02	04	2		pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin usaha	100%	0	0	Dinkes	100%	74.855.000	DAU/DAK		100%	74.850.000	DINAS KESEHATAN
04	2	01	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dok	0	0	Dinkes	4 Dok	30.005.000	DAU/DAK		4 Dok	30.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
04	2	01	02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	02	04	2.01	0001	Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40sarana	0	0	Dinkes	35 sarana	44.850.000	DAU/DAK		35 sarana	44.850.000	DINAS KESEHATAN
02	2	03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	100%		100%	Dinkes	100%	35.000.000	DAU/DAK		100%	35.000.000	DINAS KESEHATAN
02	2	03	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 dok	0	4 dok	Dinkes	4 Dok	35.000.000	DAU/DAK		4 Dok	35.000.000	DINAS KESEHATAN
02	2	06			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang telah mendapatkan pemeriksaan post market sesuai aturan perundang-undangan	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang telah mendapatkan pemeriksaan post market sesuai aturan perundang-undangan	100	67		Dinkes	100%	406.518.000	DAU/DAK		100%	3.908.962	DINAS KESEHATAN
02	2	06	01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	110 Sarana	48 Sarana		Dinkes	110 sarana	402.648.000	DAU/DAK		110 sarana		DINAS KESEHATAN
02	2	06	02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan											Dinkes	104 sarana IRT	3.870.000	DAU/DAK		104 sarana IRT	3.908.962	DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
04	2	04			Kegiatan Penerbitan Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan Depot air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diterbitkan laik hygiene sanitasi sesuai standar peraturan perundang-undangan	1	2	4	2		Kegiatan Penerbitan Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan Depot air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diterbitkan laik hygiene sanitasi sesuai standar peraturan perundang-undangan	35 TPM			Dinkes	35 TPM	52.318.000	DAU/DAK		35 TPM	53.450.470	DINAS KESEHATAN
04	2	04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	2	4	2	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 dok			Dinkes	12 Dok	52.318.000	DAU/DAK		12 Dok	53.450.470	DINAS KESEHATAN
04	2	05			Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan	Jumlah stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan	1	2	4	2,1		Penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan	Jumlah stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan	446 Lembar			Dinkes	446 Lembar	13.050.000	DAU/DAK		446 Lembar	5.330.282	DINAS KESEHATAN
04	2	05	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	2	4	2,1	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4 Dok			Dinkes	4 Dok	13.050.000	DAU/DAK		4 Dok	5.330.282	DINAS KESEHATAN
05					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.	Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS	88%	0	80%	Dinkes	82	186.928.000	DAU/DAK		85	169.287.434	DINAS KESEHATAN
05	2	01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kel Siaga Aktif strata mandiri dan purnama	1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/kel Siaga Aktif strata mandiri dan purnama	25% dan 11%	0	25% dan 11%	Dinkes	25% dan 11%	126.938.000	DAU/DAK		25% dan 11%	109.287.434	DINAS KESEHATAN
05	2	01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	02	05	2,01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	126.938.000	DAU/DAK		12 Dok	109.287.434	DINAS KESEHATAN
05	2	02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Masyarakat yang telah menerapkan gernas Hidup Bersih dan Sehat.	1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang telah menerapkan gernas Hidup Bersih dan Sehat.				Dinkes		30.000.000	DAU/DAK			30.000.000	DINAS KESEHATAN
05	2	02	01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	02	05	2,02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	30.000.000	DAU/DAK		12 Dok	30.000.000	DINAS KESEHATAN
05	2	03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Dinkes		29.990.000	DAU/DAK			30.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	2	03	01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Dinkes	12 Dok	29.990.000	DAU/DAK		12 Dok	30.000.000	DINAS KESEHATAN
																			238.636.903.615					
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM																								
01	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP	01	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP	4 poin	2 poin	2 poin		3 Level	7.722.648.196			3	6.390.209.091	Dinas PUTR-PERKIM
						Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan					Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			100 jpl	20 jpl	20 jpl		20 JPL	193.060.000			20	100.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%		100 %	5.032.699.979			100	3.417.883.831	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	285 orang	57 orang	55 orang	Barru	55 OB	5.032.699.979	APBD		60	3.417.883.831	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	100%	100%		100 %	193.060.000			100	100.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 orang	14 orang	8 orang	Barru	10 Orang	52.622.500	APBD		8	40.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	0	0	Barru	33 Orang	140.437.500	APBD		22	60.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%		100 %	449.250.000			100	346.508.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 Paket	1 Paket	Barru	1 Paket	3.745.000	APBD		1	5.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	155 paket			Barru	2 Paket	123.433.500	APBD		32	67.500.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 paket	1 Paket	1 Paket	Barru	2 Paket	3.168.500	APBD		8	10.940.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91 paket			Barru	12 Paket	64.695.000	APBD		12	72.500.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	172 paket			Barru	24 Paket	8.250.000	APBD		24	10.150.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 laporan			Barru	12 Lapoaran	3.140.000	APBD		12	10.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.290 laporan	431	380	Barru	380 Lapoaran	242.818.000	APBD		504	170.418.000	Dinas PUTR-PERKIM

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%		100 %	1.437.848.317			100	1.713.766.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	32 unit	0	0	Barru	6 Unit	185.800.000	APBD		8	307.016.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	5 unit	0	0	Barru	1 Unit	973.569.817	APBD		1	1.250.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 unit			Barru	24 Unit	65.050.000	APBD		12	6.750.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 unit	16 unit	13 unit	Barru	24 Unit	213.428.500	APBD		14	150.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%		100 %	366.770.500			100	368.271.500	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	60 laporan	1352	4 laporan	Barru	4 laporan	21.710.500	APBD		12	37.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 laporan	2 laporan	24 laporan	Barru	24 Laporan	80.910.000	APBD		24	83.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 laporan	3 laporan	4 laporan	Barru	4 laporan	14.550.000	APBD		15	28.271.500	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	300 laporan	4 laporan	84 laporan	Barru	84 Lapoaran	249.600.000	APBD		60	220.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100 %	436.079.400			100	443.779.760	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	0	2	Barru	3 Unit	37.500.000	APBD		2	20.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	132 unit	23	19	Barru	26 Unit	96.540.000	APBD		32	80.386.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	60 unit	10	11	Barru	11 Unit	287.039.400	APBD		13	322.893.760	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 unit	1	1	Barru	1 Unit	15.000.000	APBD		2	20.500.000	Dinas PUTR-PERKIM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)	persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	60%	52,66%	54,49%		55,32 %	8.705.937.777			54,00	8.705.937.777	Dinas PUTR-PERKIM
						Persentase luas kawasan permukaan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota							persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	9,03%	5,71%	6,54%		7,37 %	10.472.847.218			7,37 %	10.472.847.218	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan SDA dan Pengaman Pantai Yang Terbangun	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan SDA dan Pengaman Pantai Yang Terbangu	47,54%	5,93%	7,08%		6,0648 KM	10.472.847.218					Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	6 dokumen	0	1 Dokumen		1 Dokumen	80.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	9,10 km	124 m	142 m		0,7 KM	3.204.726.368	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Bronjong pinggir sungai Kel. Kiru-Kiru)											Kel. Kiru-Kiru	0,1 KM	829.949.048	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembanguan Bronjong Sungai Balusu (Attassalo)											Dusun Balusu, Desa Balusu	0,07 KM	280.715.400	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Bronjong Sungai Ajakkang											Sungai Ajakkang	0,05 KM	414.974.520	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Bronjong Sungai Nepo											Desa Nepo, Kec. Mallusetasi	0,17 KM	681.737.400	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pengadaan Bronjong Turungeng Balandae											Desa Palakka	0,07 KM	332.450.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Bronjong Sungai Data Desa Pattappa											Desa Pattappa, Kec Pujananting	0,07 KM	332.450.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Bronjong Sungai Kec. Pujananting											Kec.Pujananting	0,07 KM	332.450.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	14,34 km	124 m	0		0,85	1.296.050.100	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Talud Sungai Alappang-Corawalie											Desa Corawalie	0,2 KM	432.656.400	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Saluran Lawae											Jl. Jend. Sudirman (Lawae) Kec Barru	0,5 KM	757.148.700	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembuatan dan Rehab Saluran air											RW 3 Pacciro, Kel. Takkalasi	0,15 KM	106.245.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan PengamanPantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1	03	02	2.01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	9,45 km	150,4 m	0		0,42 KM	2.726.082.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembuatan Tanggul Pantai Padongko											Padongko Kel.Mangempang	0,1 KM	671.353.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Tanggul pantai Pancana											Desa Pancana	0,1 KM	671.353.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Tanggul Pantai Putianging											Putianging (Lasitae)	0,05 KM	345.844.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Tanggul Pantai Ujung desa Cilellang											Dusun Ujung Cilellang	0,05 KM	345.844.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Tanggul Pantai Wiringtasi											Pesisir Laut Wiring Tasi, Kel Mangkoso, Kec Soppeng Riaja	0,05 KM	345.844.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan Tanggul Pantai Mallawa											Desa Mallawa	0,05 KM	345.844.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dirhabilitasi	1	03	02	2.01	0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dirhabilitasi	4 km	455 m	0		0,3	443.249.670	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Rehab saluran pembuang keliling pinggir lapangan Ta'Kajuara											Ta'Kajuara Kel.Mangempang	0,19 KM	195.288.650	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Rehab Kanal Banjir Abbatunge											Abbatunge Kel.Mangempang	0,05 KM	108.164.100	APBD		25.000.000		Dinas PUTR-PERKIM
						Rehabilitasi talud/pondasi sungai Lingkungan Sepee											Sepee Kel. Sepee	0,06 KM	139.796.920	APBD		8.387.815		Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	1	03	02	2.01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitas	0,63 km	45 m	0		0,424 KM	2.318.074.200	APBD			148.184.735	Dinas PUTR-PERKIM
						Rehabilitasi Tanggul Pantai Polejiwa											Dusun Polejiwa, Desa Tellumpanua , Kec Tanete Rilau	0,025 KM	110.713.200	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Rehabilitasi Tanggul Pantai Sumpang Binangae(LANJUTAN)											Sumpang Bingae, Kel Sumpang Binangae, Kec Barru	0,149 KM	950.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Rehab Tanggul Pantai PudeE											Kel. Takkalasi	0,25 KM	1.257.361.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1,50 km				0,049 KM	196.500.780	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
																	Pemeliharaan Perkuatan Tebing Sungai Ulo	0,049 KM	196.500.780	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,32 km	261 m	0		0,4 KM	108.164.100	APBD				Dinas PUTR-PERKIM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						Pemeliharaan Saluran utama Lasinri Tembusan Kantor DPRD												Balengnge , Jl. Lasawedi Kec Barru	0,05 KM	108.164.100	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	450 org	-	-			100 Orang	100.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Penguatan Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Barru													50 Org	50.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Penguatan Kelembagaan Dewan SDA Kabupaten Barru													50 Org	50.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan sekunder Yang Terbangun dalam kondisi baik	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi Primer dan sekunder Yang Terbangun dalam kondisi baik	69,55 km	11,60 km	13,30 km			13,832 KM	8.705.937.777					Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	16,60 km	518 m	0			2,4 KM	1.244.977.700	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Peningkatan Jaringan Irigasi Abbekkae DI. Alejjang												Dusun Daccipong Desa Anabanua, Kec. Barru	0,2 KM	130.446.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Peningkatan Jaringan Irigasi Barang DI. Barang												Dusun Barang, Desa Pujananting, Kec. Pujananting	0,3 KM	195.669.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Peningkatan Jaringan Irigasi Panasae DI. Batulappa												Dusun Batu lappa, Desa Tompo, Kec. Barru	0,3 KM	155.045.100	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Kiru-Kiru												Kec. Soppeng Riaja	1,4 KM	633.371.600	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Peningkatan Jaringan Irigasi Pakaddo Bata Dusun Punranga DI. Punranga												Dusun Punranga, Desa Pujananting, Kec. Pujananting	0,2 KM	130.446.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1	03	02	2.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	13 bendung	0	0			3 Bendung	450.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Peningkatan Bendung Irigasi Wira-Wirae DI. Wira-Wirae												Desa Lipukasi, Kec. Tanete Rilau	1 Bendung	150.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Peningkatan Bendung Irigasi Gellengnge DI. Gellengnge												Desa Anabanua, Kec. Barru	1 Bendung	150.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							Peningkatan Bendung Irigasi Manyengo DI. Manyengo												Desa Gattareng, Kec. Pujananting	1 Bendung	150.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	02	2.02	14		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	51,50 km	8.825 m	250 m		Barru	10,12 km	6.510.960.077	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Poccoe D.I Baera II												Dusun Baera, Desa Kamiri, Kec. Balusu	0,7 KM	503.657.600	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bujung Mattimbawawoe												Desa Nepo, Kec. Mallusetasi	1,05 KM	541.532.000	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kalukue												Desa Galung, Kec. Tanete Barru	1,467 KM	1.300.684.000	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aroppoe												Desa Tellumpanua , Kec. Tanete Rilau	0,468 KM	532.684.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jalanru												Kab. Barru	0,8 KM	965.205.197	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Temboe RT.3 Batubessi DI. Batubessi												Kel. Sepee, Kec. Barru	0,25 KM	303.840.750	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Labokong DI. Kiru-Kiru												Kel. Kiru-Kiru, Kec. Sop. Riaja	0,55 KM	326.059.250	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bempesu Lingkungan Cempa RT.02 D.I Waesai												Dusun Waesai, Kel. Lompo Riaja, Kec. Tanete Riaja	0,2 KM	132.476.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tabbi DI. Tabbi												Dusun Bunne, Desa Kading, Kec. Tanete Riaja	0,3 KM	156.987.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Bendung dan Irigasi Ulo DI. Ulo												Dusun Ulo, Desa Libureng, Kec. Tanete Riaja	0,368 KM	511.195.300	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bolлие DI. Bolлие												Dusun Pange, Desa Palakka, Kec. Barru	0,4 KM	181.498.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bawangge DI. Palakka												Dusun Pange, Desa Palakka, Kec. Barru	0,4 KM	181.498.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ammerung Dusun Bacu-Bacu DI. Ammerung I											Dusun Bacu- Bacu, Desa Pujananting, Kec. Pujananting	0,4 KM	192.387.880	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Latudang DI. Tille											Dusun Tille, Desa Mattirowalie, Kec. Tanate Riaja	0,1 KM	121.536.300	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lapawide Watu DI. Watu											Dusun Watu, Desa Libureng, Kec. Tanate Riaja	0,3 KM	115.260.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mangaribu DI. Jempulu											Dusun Jempulu, Desa Pujananting, Kec. Pujananting	0,25 KM	130.822.500	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Balang Baru DI. Lappatemmu											Desa Bulo- Bulo, Kec. Pujananting	0,1 KM	121.536.300	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dusun Matene											Dusun Matene, Kel Tanete, Kec Tanete Rilau	0,5 KM	192.100.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2,50 km	90,549 m	0		0,2 KM	500.000.000					Dinas PUTR- PERKIM	
						Operasional dan Pemeliharaan D.I tersebar pada 7 Kecamatan											Tersebar di 7 Kecamatan	0,2 KM	500.000.000					Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	83%	70,98%	74,64		78,8 %	114.457.075.906				78,8 %	113.957.075.906	Dinas PUTR- PERKIM
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan	1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan	69 km	7 km	14 km		31,988 KM	114.457.075.906						Dinas PUTR- PERKIM
1	03	10	2,01	01	Penyusunan Rencana, kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1	03	10	2,01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 dok	0			1 Dokumen	181.200.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1	03	10	2,01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	27 km	13,97 Km	12,76 KM		31988 M	99.589.488.724	APBD/DAK					Dinas PUTR- PERKIM
						Rekonstruksi Ruas Jalan Laju- Tanrabalana (setelah Jembatan) (R.C.6)											Desa Lawallu	152 M	470.681.464	APBD					Dinas PUTR- PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							Rekonstruksi Ruas Jalan Labawang-Salosoe (R.C.20)											Desa Ajakkang	2650 M	8.070.190.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rekonstruksi Jl. Iskandar Unru 2, Kel Coppo, Kec Barru (A.1-24)											Kel. Coppo	120 M	375.152.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rekonstruksi Ruas Jalan Bangabangae - Tokkene (A.18)											Desa Kading	1000 M	3.086.600.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rekonstruksi Ruas Jalan Panincong - Pacciro - waesai (F.9)											Desa Libureng	1000 M	3.086.600.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rekonstruksi Palanro-LanraE											Kel. Palanro	475 M	1.800.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							MADDO- BUKIT JELLORENG											Kec. Tanete Rilau	1580 M	3.818.565.600	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rekonstruksi Jalan Maddo-Sikapa											Kec. Tanete Rilau	1000 M	3.086.600.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							LAKONRAE-KAERENGNGE											Kab. Barru	750 M	2.776.140.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							PALANRO-MAREPPANG											Kel. Palanro	2000 M	6.173.200.000	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							PATTANRONGNGE TOPPORENG											Kec. Mallusetasi	2000 M	6.173.200.000	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							MAREPPANG-BELOKKA											Desa Nepo, Kec. Mallusetasi	15000 M	15.000.000.000	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							BARANTANG-MAREPPANG											Desa Nepo, Kec. Mallusetasi	1894 M	5.842.232.400	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							LAWAMPANG-TOMPO											Desa Kamiri	2380 M	8.809.617.600	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							TOMPO-KAERENGNGE											Desa Galung	5000 M	6.266.563.460	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							BARANG-KALOMPI											Desa Galung	3000 M	6.253.800.000	DAK/APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							LAKONRAE- TOMPO											Kec. Barru	1937 M	5.974.870.200	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
							BARRU-LAKONRAE											Kec. Barru	1000 M	3.086.600.000	DAK/APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							KAERENGNGE-WATU											Kec. Barru	2550 M	9.438.876.000	DAK				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	10	2,01	09		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	03	10	2,01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitas	26 km	0	0		3250 M	3.304.476.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jalan Ex Kantor Bupati											Kel. Sumpang Binangae	250 x 8 M	500.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Ruas Jalan Tabbabatue - Cempae + Pembangunan Duikker (F.27)											Kel. Lompo Riaja	8 x 1,5 M	300.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Ruas Jalan Lapao - Waempubbu (B.3)											Desa Madello	1500 M	1.135.928.700	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Ruas Jalan Kota Kec. Sop. Riaja (Jl. A. Dagong (R. C.1-6) dan Jl. AG. A.M Amberi Said - Jl. H.A. Hasan (R. C.1-13) + drainase											Kel. Mangkoso	1500 M	1.168.547.300	APBD				Dinas PUTR-PERKIM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
						Rehabilitasi (Pembangunan Gorong-Gorong 4 Titik) Ruas Jalan Ralla-Tabbabatue (F.1-8)											Kel. Lompo Rlaja	4 titik	200.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	10	2,01	09	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	1	03	10	2,01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,258 km		0		2251 M	1.403.310.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Rehabilitasi Ruas Jalan Pekkapao-Limpomajang (E.8)											Kel. Coppo	2251 M	1.403.310.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	03	10	2,01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	170 km	65,53	96,3		100 KM	2.000.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	1	03	10	2,01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	25 unit	4 Unit	1 Unit		5 unit	7.213.601.182	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Pembangunan Jembatan Sungai Tangassoe Ruas Bette - Tangassoe (G.19)							Pembangunan Jembatan Sungai Tangassoe Ruas Bette - Tangassoe (G.19)				Bette	18 M	1.807.968.182	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Pembangunan jembatan sungai Galussalae Desa Harapan							Pembangunan jembatan sungai Galussalae Desa Harapan				Desa Harapan	40 M	2.000.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Pembangunan jembatan Bujung Lita, Desa Lasitae, Kec Tanete Rilau							Pembangunan jembatan Bujung Lita, Desa Lasitae, Kec Tanete Rilau				Desa Lasitae	12 M	1.005.633.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Pembagunan jembatan PudeE Takkalasi							Pembagunan jembatan PudeE Takkalasi				Pudee Takkalasi	12 M	2.000.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
													Pembangunan Jembatan gantung Kerengnge				Desa Palakka	12 M	400.000.000						
1	03	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1	03	10	2,01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	25 unit	0	0		1 unit	265.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Rehabilitasi Jembatan Dusun Binuang, Desa Binuang							Rehabilitasi Jembatan Dusun Binuang, Desa Binuang				Desa Binuang	40 M	265.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	03	10	2,01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	50 unit	7 kecamatan	5 Unit		10 unit	500.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	10	2,01	26	Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	1	03	10	2,01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 unit	0			1 unit	-	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Pembangunan Jembatan gantung Kerengnge											Desa Palakka	1 unit	-	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten	40%	33	37%		37%	2.061.063.619				100	1.075.435.846	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	06	2,01		Pengelolaan dan pengebangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	1	03	06	2,01		Pengelolaan dan pengebangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	5.869 M	1.250 m	1.260 m		1110 M	2.061.063.619				1116	1.075.435.846	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	06	2,01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	1	03	06	2,01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2.053 m	1 sistem	1 sistem	6 sistem	6 sistem	1.461.063.619	APBD		350	400.401.005	Dinas PUTR-PERKIM	
						Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Bunne-Rumpia (Kading)											Desa Kading	275 M	200.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Barru-Kamara (Jl. Pramuka Tuwung)											Kel. Tuwung	940 M	437.190.841	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Kampung baru - Callacu											Desa Ajjakkang	235 M	175.600.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	

KODE					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Puccanra - Lapakaka											Kel. Bojo Baru	390 M	200.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Pembangunan Saluran Drainase Jalan A.M Akbar, Sumpang Binangae Kecamatan Barru											Kel. Sumpang Binangae	340 M	248.272.778	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Mareto - Baramase											Desa Lipukasi	275 M	200.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
1	03	06	2,01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	1	03	06	2,01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1.490 m	13 sistem	0	1 sistem	1 sistem	200.000.000	APBD		290	153.238.900	Dinas PUTR- PERKIM
						Rehabilitasi Saluran Drainase dan Duikker Jl. Jend. Sudirman Kel.Sumpang Binangae											Kec Barru	300/ Duikker	200.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
1	03	06	2,01	12	Pembangunan sistem drainase lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1	03	06	2,01	012	Pembangunan sistem drainase lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.726 m	87 meter	0		220 M	200.000.000	APBD		276	315.968.686	Dinas PUTR- PERKIM
						Pembangunan Saluran Drainase Link. Mangkoso Kel. Mangkoso, Kota Kec Soppeng Riaja											Kec. Soppeng Riaja	220 M	200.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
1	03	06	2,01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	1	03	06	2,01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	600 m	0	0	1 sistem	1 sistem	200.000.000	APBD		200	105.827.255	Dinas PUTR- PERKIM
						Rehab Drainase Lingk Pude'e Kel. Takkalasi, Kota Kec. Balusu											Kec. Balusu	200 M	200.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	100% layak dan 72,22% aman	97,75 layak dan 64,20% aman	98,31 layak dan 68,21 aman		98,87% Layak 68,21% aman	3.254.400.000			100	3.254.400.000	Dinas PUTR- PERKIM
1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten	Jumlah SR jaringan perpipaan SPAM di daerah Kabupaten	1	03	03	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten	Jumlah SR jaringan perpipaan SPAM di daerah Kabupaten	1.200 sr	250 sr	250 sr		100 SR	3.254.400.000					Dinas PUTR- PERKIM
1	03	03	2,01	03	Pembangunan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	1	03	03	2,01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	15 liter/detik	-	0		5 m3/det	1.004.400.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan KelurahanSepe'e											Kelurahan Sepe'e	5 m3/det	300.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Kelurahan Mattappawalie											Padang Lampe, Kelurahan Mattappawali e	5 m3/det	304.400.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Kelurahan Mallawa											Lingkungan Pd. Pobbo	5 m3/det	200.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Kelurahan Coppo											BottoLai Lingkungan Padang Lowang Kel. Coppo, Kec Barru	5 m3/det	200.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	03	2,01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/ SPAM Berbasis Masyarakat	1	03	03	2,01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.200 SR	0	260 SR		100 SR	2.250.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Bulo-Bulo											Dusun Maroanging Kec. Pujananting	20 SR	350.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kading											Dusun Bunne, Tanete Riaja	20 SR	475.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Libureng											Dusun Pacciro , Pujananting	20 SR	450.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Lempang											Dusun Sikapa, Tanete Riaja	20 SR	475.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Mattirowalie											Dusun Limpo, Pujananting	20 SR	500.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	1	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	1	1	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100 %	100 %	100 %		100 %	1.993.238.000			100 %	-	Dinas PUTR-PERKIM
1	03	05	2,01		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah RT yang mendapatkan akses pengolahan air limbah	1	03	05	2,01		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah RT yang mendapatkan akses pengolahan air limbah	3.940 RT	1000 RT	1000 RT		230 RT	1.993.238.000					Dinas PUTR-PERKIM
1	03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	03	05	2,01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 Dokumen	0	0	Kab. Barru	1 dokumen	250.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
1	03	05	2,01	06	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1	03	05	2,01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	2.340 RT	602	-		180 RT	1.552.500.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan/Penyediaan Sub-Sistem Pengolahan Setempat Kelurahan Lompo Riaja											Kec. Tanete Riaja	30 RT	225.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan/Penyediaan Sub-Sistem Pengolahan Setempat Kelurahan Sumpang Binangae											Kec. Barru	30 RT	225.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan/ Penvediaan											Kec. Barru	30 RT	225.000.000	APBD				Dinas PUTR-
						Pembangunan/Penvediaan											Kec. Tanete	30 RT	225.000.000	APBD				Dinas PUTR-
						Pembangunan/ Penyediaan Sub-Sistem Pengolahan Setempat Desa Harapan											Kec. Tanete Riaja	30 RT	225.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
						Pembangunan/ Penyediaan Sub-Sistem Pengolahan Setempat Desa Lipukasi											Kec. Tanete Rilau	30 RT	225.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	03	05	2,01	10	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1	03	05	2,01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	10 Unit	2	2	Kab Barru	2 Unit	52.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	05	2,01	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	1	03	05	2,01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		69	-	Kab Barru	50 RT	138.738.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas penampungan tempat pembuangan sampah dengan jumlah penduduk	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas penampungan tempat pembuangan sampah dengan jumlah penduduk	100 %	0	0		100 %	1.350.000.000				-	Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	04	2.01		Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten / kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R-TPS yang di bangun	1	03	04	2.01		Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten / kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R-TPS yang di bangun	1 Unit	0	0		1 Unit	1.350.000.000					Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R- TPS	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	1	03	04	2,01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	6.600 RT	-	-	Kab Barru	6600 Rumah Tangga	1.350.000.000	APBD		0	-	Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan IMB	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan IMB	100 %	100 %	100 %		100 %	42.478.594.300				100	5.320.000.000	Dinas PUTR- PERKIM
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintah yang di tata	1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintah yang di tata	107 Unit	9 Unit	7 Unit		9 Unit	42.478.594.300				4	5.320.000.000	Dinas PUTR- PERKIM
1	03	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	03	08	2,01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500 Dokumen	-	100 dokumen	Kab Barru	100 Dokumen	378.594.300	APBD		2	175.000.000	Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan,Pengawasan , dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	03	08	2,01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	9 (7 unit gedung, 2 dokumen perencanaan)	0	Kab Barru	2 Dokumen	20.150.000.000	APBD		2	150.000.000	Dinas PUTR- PERKIM	
1	03	08	2,01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui	1	03	08	2,01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	13 unit	9 Unit	7 Unit	Kab Barru	8 unit	21.900.000.000	APBD		2	4.900.000.000	Dinas PUTR- PERKIM	
					kantor gabungan dinas- dinas(lanjutan)												Kec. Barru	1 unit	10.000.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
						Dinas PUTR-PERKIM											Kec. Barru	1 unit	2.000.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Kantor Camat Tanete Rilau											Kec. Tanete Rilau	1 unit	2.600.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Kantor Camat Pujananting											Kec. Pujananting	1 unit	2.500.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Rujab DPRD(lanjutan)											Kec. Barru	1 unit	1.000.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Rujab Camat Tanete Riaja											Kec. Tanete Riaja	1 unit	500.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Rehab Kantor Lurah Tuwung											Kec. Barru	1 unit	3.000.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
						Rehab kantor penghubung kab, Barru(Mess Pemda)											DKI Jakarta	1 unit	300.000.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	08	2,01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	1	03	08	2,01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkal	-	-	-	Kab. Barru	1 unit	50.000.000	APBD		2	95.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100 %	100 %	100 %		100 %	756.888.300			100	760.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ ditetapkan sesuai standart peraturan Perundang-undangan	1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ ditetapkan sesuai standart peraturan Perundang-undangan	9 Dokumen	0	0		2 Dokumen	606.888.300			100	600.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	12	2,01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRWKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	03	12	2,01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	9 Dokumen	0	0		2 Dokumen	456.888.300	APBD		1	450.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	12	2,01	03	Penetapan Kebijakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan pemanfaatan ruang dengan dokumen RTRW	1	03	12	2,01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan pemanfaatan ruang dengan dokumen RTRW	9 Dokumen	4 Dokumen	0		1 Dokumen	150.000.000	APBD		1	150.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	03	12	2,03		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	264 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen		20 Dokumen	150.000.000	APBD		60	150.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni (SPM)	100 %	100 %	100 %		100 %	1.750.275.000			100	1.907.775.000	Dinas PUTR-PERKIM	
						Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni (SPM)							Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni (SPM)	100 %	100 %	100 %	100								
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang telah didata	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang telah didata	100 %	100 %	100 %		100 %	32.000.000			100	42.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5 dokumen	-	1 Dokumen	Kab Barru	1 Dokumen	12.000.000	APBD		1	12.000.000	Dinas PUTR-PERKIM	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	3 dokumen	-	-	Kab Barru	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1	30.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %		100 %	42.880.000			100	62.880.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		-	30 orang	Kab Barru	75 Orang	23.730.000	APBD		30	23.730.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		-	15 orang	Kab Barru	10 Orang	19.150.000	APBD		30	19.150.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Pemerintah	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan pembangunan dan rehabilitasi rumah	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Pemerintah	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan pembangunan dan rehabilitasi rumah	100 %	100 %	100 %		400 orang	1.675.395.000			550	1.802.895.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		0	100 unit	Kab Barru	100 Unit Rumah	1.675.395.000	APBD		363	925.395.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	1	04	04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	2,67%	3,63%	3,29%		3,01 %	840.000.000			2,88%	3.875.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %		100 %	840.000.000			100	3.875.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaik		-	-	Kab Barru	35 Unit Rumah	840.000.000	APBD		250	3.875.000.000	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan kawasan perumahan yang memiliki kelengkapan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	65%	52%	55%		57 %	3.648.319.640			61%	3.648.319.640	Dinas PUTR-PERKIM
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang terbangun	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang terbangun	100 %	100 %	100 %		100 %	3.648.319.640			100		Dinas PUTR-PERKIM
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi	30 lokasi	5 lokasi	lokasi	20 lokasi	3.628.319.640	APBD				Dinas PUTR-PERKIM

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Aroppoe												Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau	1 Lokasi	77.098.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Pagar Kuburan Dusun Pange												Desa Palakka Kecamatan Barru	1 Lokasi	110.140.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Pagar Kuburan Lojie												Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi	1 Lokasi	110.140.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Jalan Pinggir Sungai Padongko												Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru	1 Lokasi	96.098.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jalan Buaka												Kecamatan Mallusetasi	1 Lokasi	163.366.600	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Jalan Perkuburan Cinaga Bonto Penno												Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau	1 Lokasi	172.976.400	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Rehabilitasi Jalan Lingkungan												Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru	1 Lokasi	187.391.100	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Pembuatan Talud dan penimbunan Jalan menuju Kuburan Juppai												Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau	1 Lokasi	115.317.600	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Peningkatan Jalan Dusun Ance												Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau	1 Lokasi	163.366.600	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Peningktan Jalan Lingkungan Cilellang												Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau	1 Lokasi	163.366.600	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Peningktan Jalan Rabat Beton Jalan Taccipinge-Lappalita Pange												Kel. Mattapawalie Kecamatan	1 Lokasi	172.976.400	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Pagar Kuburan Islam Takkalasi (Lanjutan)												Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu	1 Lokasi	165.210.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Pengecoran Jalan Menuju Pesantern DDI Takklasi (Jl. K.H Ismail)												Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu	1 Lokasi	197.000.900	APBD				Dinas PUTR-PERKIM
							Pembangunan Pagar Kuburan Palanro Utara												Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi	1 Lokasi	144.147.000	APBD				Dinas PUTR-PERKIM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						Peningkatan Jalan Penghubung Pesse dan Garongkong											Desa lempang Kecamatan Tanete Riaja	1 Lokasi	96.098.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jl. M. Akbar Lr.1											Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru	1 Lokasi	192.196.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Peningkatan Jalan Jalange											Kecamatan Mallusetasi	1 Lokasi	153.756.800	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Peningkatan Jalan masuk BTN Coppo											Kelurahan Coppo Kecamatan Barru	1 Lokasi	153.756.800	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Peningkatan Jalan Kuburan Burancie Wiringtasi											Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja	1 Lokasi	192.196.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
						Peningkatan Jalan ke Perkuburan Mattirodeceng											Kecamatan Pujananting	1 Lokasi	197.000.900	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
1	04	05	2.01	05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-	1 laporan	Kab Barru	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1	10.000.000	Dinas PUTR- PERKIM	
1	04	03			Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	1	04	03			Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	80%	74%	75%		76,64%	600.000.000			77%	600.000.000	Dinas PUTR- PERKIM
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase jumlah rekomendasi yang diterbitkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	100 %	100 %	100 %		100 %	600.000.000					Dinas PUTR- PERKIM
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1	04	03	2.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisas	5 Dokumen	0	1 Dokumen	Barru	1 Dok	600.000.000	APBD				Dinas PUTR- PERKIM
5					BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN																			
05	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP (BPBD)	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP (BPBD)	3 Point		3 Point	Barru	3	2.352.060.345			3	2.343.863.783	BPBD
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL		20 JPL	20 JPL	166.000.000	20 JPL		180.000.000						
05	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	1	05	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%	Barru	100%	1.842.760.345			100%	1.842.863.783	BPBD
05	1	2	02	05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	05	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	19 Orang/bulan	25 Orang/bulan	Barru	25	1.842.760.345	DAU		25	1.842.863.783	BPBD

KODE					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	1	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	1	05	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	100%	100%	Barru	100%	166.000.000			100%	180.000.000	BPBD
05	1	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	05	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	3 orang	15 orang	Barru	15	34.000.000	DAU		15	48.000.000	BPBD
05	1	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	05	01	2,1	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	4 orang	4 orang	Barru	4	7.000.000	DAU		4	7.000.000	BPBD
05	1	2	05	11	Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti	1	05	01	2,1	0011	Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti	8 orang	5 orang	10 orang	Barru	10	125.000.000			10	125.000.000	BPBD
05	1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	1	05	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Barru	100%	250.300.000	DAU		100%	238.100.000	BPBD
05	1	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	05	01	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Barru	2	15.000.000	DAU		2	15.000.000	BPBD
05	1	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	05	01	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	2 Paket	Barru	2	31.200.000	DAU		2	25.000.000	BPBD
05	1	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	05	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Barru	2	3.000.000	DAU		2	3.000.000	BPBD
05	1	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	05	01	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Barru	2	58.000.000	DAU		2	48.000.000	BPBD
05	1	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	05	01	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Barru	2	11.000.000	DAU		2	11.000.000	BPBD
05	1	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	05	01	2,1	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	Barru	3	700.000	DAU		3	700.000	BPBD
05	1	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	05	01	2,1	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12	3.900.000	DAU		12	4.000.000	BPBD
05	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	05	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186 Laporan	93 Laporan	200 Laporan	Barru	2	127.500.000	DAU		2	141.400.000	BPBD
05	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	1	05	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	Barru	100%	128.000.000	DAU		100%	91.900.000	BPBD
05	1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	05	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	1	1.000.000	DAU		1	1.500.000	BPBD
05	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	05	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12	80.000.000	DAU		12	80.000.000	BPBD
05	1	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	05	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	1	47.000.000	DAU		1	50.400.000	BPBD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	1	05	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	Barru	100%	131.000.000	DAU		100%	141.000.000	BPBD
05	1	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	05	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	11 unit	18 unit	Barru	18	122.000.000	DAU		20	128.000.000	BPBD
05	1	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	05	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	2 unit	8 unit	Barru	8	5.500.000	DAU		8	6.000.000	BPBD
05	1	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	05	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	1 gedung	Barru	1	3.500.000	DAU		1	7.000.000	BPBD
05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													100	1.038.008.330	DAU		100	1.084.178.896	BPBD
05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	100%	100%	100%	Barru	100%	36.132.000	DAU		100%	45.000.000	BPBD
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)							Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	100%	100%	100%	Barru	100%	869.876.330	DAU		100%	894.178.896	BPBD
						Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)							Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100%	100%	100%	Barru	100%	132.000.000	DAU		100%	145.000.000	BPBD
05	3	2	01		Pelayanan Informasi Rawan BencanaKabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Informasi tentang Rawan Bencana	1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan BencanaKabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Informasi tentang Rawan Bencana	140610 orang	140610 orang	140610 orang	Barru	140610	36.132.000	DAU	indikator LPPD dan SPM	140610	45.000.000	BPBD
05	3	2	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1	05	03	2,01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 orang	100 orang	125 orang	Barru	125	36.132.000	DAU		125	45.000.000	BPBD
05	3	2	02		Pelayanan Pencegahan dan KesiapsiagaanTerhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan KesiapsiagaanTerhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	140610 orang	140610 orang	140610 orang	Barru	140610	811.848.000	DAU	indikator LPPD dan SPM	140610	830.020.000	BPBD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	3	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 orang	100 orang	100 orang	Barru	100	32.026.000	DAU		100	31.400.000	BPBD
05	3	2	02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Barru	1	23.000.000	DAU		1	27.000.000	BPBD
05	3	2	02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	Barru	2	107.000.000	DAU		2	105.000.000	BPBD
05	3	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	10 orang	10 orang	14 orang	Barru	14	578.020.000	DAU		14	578.020.000	BPBD
05	3	2	02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Barru	1	45.802.000	DAU		1	55.000.000	BPBD
05	3	2	02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0 orang	0 orang	20 orang	Barru	20	26.000.000	DAU		30	33.600.000	BPBD
05	3	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	555 orang	555 orang	555 orang	Barru	555	132.000.000	DAU	indikator LPPD dan SPM	555	145.000.000	BPBD
05	3	2	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Barru	1	13.000.000	DAU		1	25.000.000	BPBD
05	3	2	03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	355 orang	355 orang	355 orang	Barru	150	50.000.000	DAU		150	50.000.000	BPBD
05	3	2	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 orang	150 orang	150 orang	Barru	150	27.000.000			150	50.000.000	BPBD
05	3	2	03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	Barru	1	42.000.000	DAU		1	20.000.000	BPBD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	3	2	04		Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang tersedia, tertata dan terlaksana	1	05	03	2.04		Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang tersedia, tertata dan terlaksana	1 Sistem	1 Sistem	4 Sistem	Barru	4	58.028.330	DAU		4	64.158.896	BPBD
05	3	2	04	03	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	05	03	2.04	0003	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	0	1 Dokumen	Barru	1	5.000.000	DAU	indikator IKD	1	10.000.000	BPBD
05	3	2	04	04	Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemamfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0	0	1 Dokumen	Barru	1	5.000.000	DAU	indikator IKD	1	5.000.000	BPBD
05	3	2	04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0	1 Laporan	Barru	1	3.500.000	DAU		1	5.000.000	BPBD
05	3	2	04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab /Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Barru	1	44.528.330	DAU		1	44.158.896	BPBD
																	Barru							
05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR	Level 3	Level 1	Level 3	Barru	3,00	4.969.612.458	APBD		3,00	5.157.491.463	SATPOL PP DAN DAMKAR
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	20 JPL	Barru	20 JPL	160.000.000	APBD		20 JPL	160.000.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	1	05	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	Barru	100%	4.380.540.758	APBD		100%	4.380.540.758	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	1,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	05	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	290 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	Barru	58	4.380.540.758	APBD		58	4.380.540.758	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	1	05	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	Barru	100%	99.860.900	APBD		100%	111.008.318	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	1,00		Penvediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penvediaan	1	05	01	2,1	0001	Penvediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penvediaan	2602 Laporan	650 Laporan	650 Laporan	Barru	650 Laporan	2.060.900	APBD		650 Laporan	15.000.000	SATPOL PP DAN
05	01	02	2,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	05	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	Barru	3 Laporan	88.200.000	APBD		3 Laporan	67.082.818	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	3,00		Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	05	01	2,1	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Laporan	0	0	Barru	6 Laporan	-	APBD		6 Laporan	19.325.500	SATPOL PP DAN DAMKAR

KODE					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	01	02	4,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	05	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Barru	2 Laporan	9.600.000	APBD		2 Laporan	9.600.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	1	05	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Barru	100%	171.690.200	APBD		100%	214.953.200	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	1,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	05	01	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	6 Paket	6 Paket	Barru	6 Paket	3.377.000	APBD		6 Paket	5.909.500	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	2,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	05	01	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	4 paket	0	Barru	4 Paket	-	APBD		4 Paket	19.920.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	3,00		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	05	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	59 Paket	10 Paket	10 Paket	Barru	10 Paket	3.678.000	APBD		10 Paket	4.177.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	4,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	05	01	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	5 paket	5 paket	Barru	5 Paket	40.879.200	APBD		5 Paket	40.879.200	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	5,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	05	01	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	Barru	2 Paket	6.100.000	APBD		2 Paket	7.000.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	8,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	05	01	2,1	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	Barru	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	12.000.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	9,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	05	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	685 Laporan	135 Laporan	135 Laporan	Barru	37 Laporan	117.656.000	APBD		37 Laporan	125.067.500	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02			Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1	05	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Barru	100%	27.457.600	APBD		100%	39.740.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	5,00		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	05	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	0	Barru	2 Unit	-	APBD		2 Unit	21.000.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	6,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	05	01	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	7 Unit	7 Unit	Barru	7 Unit	27.457.600	APBD		7 Unit	18.740.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02			Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	1	05	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	Barru	100%	222.460.000	APBD		100%	187.595.687	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	2,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	05	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	22 Unit	22 Unit	Barru	20 Unit	214.710.000	APBD		20 Unit	163.839.687	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	5,00		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	05	01	2,1	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	21 Unit	0	0	Barru	3 Unit	-	APBD		3 Unit	10.656.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	6,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	05	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	6 unit	6 Unit	Barru	6 Unit	7.750.000	APBD		6 Unit	9.600.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	9,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	05	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	0	0	Barru	2 Unit	-	APBD		2 Unit	3.500.000	SATPOL PP DAN DAMKAR

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	01	02			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	1	05	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	100%	100%	Barru	100%	67.603.000	APBD		100%	223.653.500	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	2,00		Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	05	01	2,1	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	5 Paket	4 Paket	Barru	5 Paket	23.140.000	APBD		5 Paket	86.756.500	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	9,00		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	05	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	7 Orang	0	Barru	7 Orang	16.591.000	APBD		8 Orang	81.679.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	01	02	11,00		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	05	01	2,1	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	2 Orang	2 Orang	Barru	10 Orang	27.872.000	APBD		2 Orang	55.218.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
5	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada(SPM)	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada(SPM)	100%	100%	100%	Barru	100%	859.670.000	APBD		100%	1.038.001.858	SATPOL PP DAN DAMKAR
5	02	02			Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	05	02	2		Penanganan Gangguan Ketenteraman danKetertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	Barru	100%	820.500.000	APBD		100%	940.530.158	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	02	02	1		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, danPengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1	05	02	2,01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, danPengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1825 Kasus	365 Kasus	365 Kasus	Barru	365 Kasus	790.500.000	APBD		365 Kasus	836.365.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	02	02	2,00		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1	05	02	2,01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 kasus	6 Kasus	0	Barru	6 Kasus	-	APBD		6 Kasus	35.053.158	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	02	02	4,00		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	05	02	2	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2925 Dokumen	585 Dokuen	27 dokumen	Barru	380 Dokumen	30.000.000	APBD		380 Dokumen	33.500.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	02	02	6,00		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	05	02	2,01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	256 Dokumen	52 Dokumen	0	Barru	52 Dokumen	-	APBD		52 Dokumen	10.612.000	SATPOL PP DAN DAMKAR

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	02	02	7,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	500 Unit	0	0	Barru	10 Unit	-	APBD		10 Unit	25.000.000	SATPOL PP DAN DAMKAR	
05	02	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota	1	05	02	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota	100%	100%	100%	Barru	100%	39.170.000	APBD		100%	97.471.700	SATPOL PP DAN DAMKAR	
05	02	02	1,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	1	05	02	2.02	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	75 Laporan	0	0	Barru	15 Laporan	-	APBD		15 laporan	49.819.100	SATPOL PP DAN DAMKAR	
05	02	02	2,00	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	35 laporan	5 laporan	5 Laporan	Barru	7 Laporan	24.950.000	APBD		7 Laporan	24.217.600	SATPOL PP DAN DAMKAR	
05	02	02	3,00	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	36 Laporan	6 laporan	6 laporan	Barru	6 Laporan	14.220.000	APBD		6 Laporan	23.435.000	SATPOL PP DAN DAMKAR	
05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	100%	100%	100%	Barru	100%	2.037.700.000	APBD		100%	1.646.892.500	SATPOL PP DAN DAMKAR	
					Waktu tanggap (renspnse time)												Waktu tanggap (renspnse time)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	Barru	15 Menit	55.681.636	APBD
05	04	02		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100%	100%	100%	Barru	100%	2.037.700.000	APBD		100%	1.608.398.300	SATPOL PP DAN DAMKAR	
05	04	02	2,00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	750 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	Barru	150 Laporan	1.437.700.000	cukai rokok		150 Laporan	1.480.200.000	SATPOL PP DAN DAMKAR	
05	04	02	6,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	26 Unit	5 Unit	3 Unit	Barru	6 Unit	600.000.000	APBD		5 Unit	82.150.000	SATPOL PP DAN DAMKAR	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	04	02	07		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	350 Orang	0	0	Barru	70 Orang	-			70 Orang	42.948.300	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	04	02	09		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5 Dokumen	1 Dokumen	0	Barru	1 Dokumen	-	APBD		1 Dokumen	3.100.000	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	04	02			Pemberdayaan Masyarakat dalam PencegahanKebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam PencegahanKebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran	100%	100%	100%	Barru	100%	-	APBD		100%	38.494.200	SATPOL PP DAN DAMKAR
05	04	02	1,00		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Tahunnya	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Tahunnya	150 Orang	0	0	Barru	60 Orang	-	APBD		60 Orang	38.494.200	SATPOL PP DAN DAMKAR
6					SOSIAL																			
06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Sosial	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Sosial					3,00	3.007.531.042			4,00	3.553.622.948	DINAS SOSIAL
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan					20 JPL				20 JPL		
06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan	1	06	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	100%		100%	2.415.335.982	DAU		100%	2.515.335.982	DINAS SOSIAL
06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	06	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	25	Dinas Sosial	25 Orang	2.415.335.982	DAU		25 Orang	2.515.335.982	DINAS SOSIAL
06	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	1	06	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100	40	100		100%	62.271.000	DAU		100%	90.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan	1	06	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	10	5	Dinas Sosial	10 Orang	62.271.000	DAU		10 Orang	90.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	1	06	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100		100%	327.140.300	DAU		100%	385.150.966	DINAS SOSIAL
06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	06	1	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	6	Dinas Sosial	6 Paket	8.993.500	DAU		6 Paket	9.000.000	DINAS SOSIAL

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	06	1	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	Dinas Sosial	2 Paket	18.250.000	DAU		2 Paket	89.150.966	DINAS SOSIAL
06	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	06	1	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13	13	13	Dinas Sosial	13 Paket	7.200.000	DAU		13 Paket	5.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	06	1	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2	2	2	Dinas Sosial	2 Paket	26.106.800	DAU		2 Paket	15.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	06	1	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1500	1500	1500	Dinas Sosial	1500 Lembar	12.595.000	DAU		1500 Lembar	13.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	06	1	2,1	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	1	1	Dinas Sosial	1 Laporan	3.995.000	DAU		1 Laporan	4.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	06	1	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	1	1	Dinas Sosial	1 Laporan	250.000.000	DAU		1 Laporan	250.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	1	06	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah					100%	28.500.000	DAU		100%	407.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	06	1	2,1	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	1	0	Dinas Sosial	1 Unit	-	DAU		1 Unit	32.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	1	06	1	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33	0	0	Dinas Sosial	10 Unit	-	DAU		10 Unit	25.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1	06	1	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	15	1	Dinas Sosial	7 Unit	28.500.000	DAU		7 Unit	50.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Disediakan	1	06	1	2,1	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	Dinas Sosial	1 Unit	-	DAU		1 Unit	100.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	06	1	2,1	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	0	Dinas Sosial	1 Unit	-	DAU		1 Unit	100.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	06	1	2,1	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	0	0	Dinas Sosial	3 Jenis	-	DAU		3 Jenis	100.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	1	06	1	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor					100%	116.513.960	DAU		100%	87.600.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	06	1	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	Dinas Sosial	1 Laporan	20.000.000	DAU		1 Laporan	15.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	06	1	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	Dinas Sosial	3 Laporan	30.513.960	DAU		3 Laporan	30.600.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	06	1	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	Dinas Sosial	1 Laporan	66.000.000	DAU		1 Laporan	42.000.000	DINAS SOSIAL

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	1	06	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100	100	100		100%	57.769.800	DAU		100%	68.536.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil/Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	06	1	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	7	8	Dinas Sosial	6 Unit	39.529.800	DAU		6 Unit	39.536.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	06	1	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	7	8	Dinas Sosial	6 unit	8.990.000	DAU		6 unit	15.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	1	06	1	2,1	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	0	0	Dinas Sosial	3 Unit	3.000.000			3 Unit	3.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	06	1	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12	Dinas Sosial	12 Unit	6.250.000			12 Unit	6.000.000	DINAS SOSIAL
06	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	06	1	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	5	Dinas Sosial	5 Unit	-			5 Unit	5.000.000	DINAS SOSIAL
06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUan	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUan	100%	100%	100%		100%	163.041.500	DAU		100%	179.398.784	DINAS SOSIAL
06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang medapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang medapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%		100%	163.041.500	DAU		100%	179.398.784	DINAS SOSIAL
06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	1	06	02	2,03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	4	Dinas Sosial	4 KLP	43.094.000	DAU		4 KLP	32.845.164	DINAS SOSIAL
06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan peningkatan potensi	1	06	02	2,03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7	7	7	Dinas Sosial	7 Orang	37.168.000	DAU		7 Orang	37.789.417	DINAS SOSIAL
06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah organisasi sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Perempuan, lembaga Kesejahteraan sosial Lainnya) yang mendapatkan peningkatan potensi	1	06	02	2,03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	68	68	68	Dinas Sosial	68 KLP	82.779.500	DAU		68 KLP	81.168.881	DINAS SOSIAL

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
06	02	2	03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah kelompok LK3 yang dibina	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	0	Dinas Sosial	1 Lembaga	-	DAU		1 Lembaga	27.595.322	DINAS SOSIAL
06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	100%	100%	100%		100%	-	DAU		100%	12.235.000	DINAS SOSIAL
06	03	2		01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Kasus pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asal	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Kasus pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asal	5	0	0		5 Kasus	-	DAU		5 Kasus	12.235.000	DINAS SOSIAL
06	03	2	01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah pekerja migran, korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	0	0	Dinas Sosial	10 Orang	-	DAU		10 Orang	12.235.000	DINAS SOSIAL
06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase Warga Negara Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta PMKS lainnya yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase Warga Negara Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta PMKS lainnya yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%		100%	264.222.000	DAU		100%	414.013.362	DINAS SOSIAL
06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100%	100%	100%		40 Orang	264.222.000	DAU		15 Orang	299.792.362	DINAS SOSIAL
						Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)							Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100%	100%	100%		15 Orang	78.046.579	DAU		15 Orang	79.371.976	DINAS SOSIAL
						Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)							Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100%	100%	100%		5 Orang	78.046.579	DAU		5 Orang	78.046.579	DINAS SOSIAL
						Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)							Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100%	100%	100%		5 Orang	43.000.000	DAU		5 Orang	43.000.000	DINAS SOSIAL

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)							Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)	100%	100%	100%		15 Orang	43.000.000	DAU		15 Orang	43.000.000	DINAS SOSIAL
06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang	75	15	15	Dinas Sosial	40 Orang	93.384.500	DAU		40 Orang	114.736.335	DINAS SOSIAL
06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75	15	15	Dinas Sosial	40 Orang	39.961.500	DAU		40 Orang	50.000.000	DINAS SOSIAL
06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	2	2	Dinas Sosial	2 Unit	25.251.500	DAU		2 Unit	13.869.916	DINAS SOSIAL
06	04	2	01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15	6	3	Dinas Sosial	15 Orang	13.529.000	DAU		3 Orang	9.548.100	DINAS SOSIAL
06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	132	20	0	Dinas Sosial	20 Orang	-	DAU		20 Orang	49.172.715	DINAS SOSIAL
06	04	2	01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	90	0	0	Dinas Sosial	21 Orang	-	DAU		21 Orang	4.200.000	DINAS SOSIAL
06	04	2	01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	22	20	Dinas Sosial	3 Orang	92.095.500	DAU		3 Orang	58.265.296	DINAS SOSIAL
06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantI Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar PantI Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial					13 Orang	-			13 Orang	114.221.000	DINAS SOSIAL
06	04	2	02	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan Bombingan Fisik, mental, Spritual dan Sosial	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	600	100	0	Dinas Sosial	100 Orang	-			100 Orang	50.000.000	DINAS SOSIAL

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
06	04	2	02	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan administrasi kependudukan	1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	35	0	0	Barru	7 Orang	-		7 Orang	1.400.000	DINAS SOSIAL	
06	04	2	02	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan layanan pemberian layanan rujukan	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	18	0	0	Barru	15 Orang	-		3 Orang	9.500.000	DINAS SOSIAL	
06	04	2	02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	18	1	0	Barru	1 Dokumen	-	1	1 Dokumen	53.321.000	DINAS SOSIAL	
06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	100%				100%	898.516.000	100		100%	591.336.596	DINAS SOSIAL
06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah B40 yang mendapatkan pelayanan data dan Fasilitas Bantuan	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah B40 yang mendapatkan pelayanan data dan Fasilitas Bantuan	72000	89569	89569		72000 Orang	898.516.000			72000 Orang	591.336.596	DINAS SOSIAL
06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	72000	89569	89569	Barru	72000 Orang	287.879.000	DAU		72000 Orang	421.633.471	DINAS SOSIAL
06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem pendataan kemiskinan yang dikelola dengan baik	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1	0	0	Barru	1 aplikasi	24.950.000	DAU		1 aplikasi	25.000.000	DINAS SOSIAL
06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1100	7238	1100	Barru	1100 Keluarga	585.687.000	DAU		1100 Keluarga	86.821.875	DINAS SOSIAL
06	05	2	02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500	0	0	Barru	100 orang	-	DAU		100 orang	57.881.250	DINAS SOSIAL
06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100%	100%	100%		100%	522.010.000	DAU		100%	362.611.581	DINAS SOSIAL

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB		
															Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	1500	457	400		1500 Orang	373.005.000	DAU		1500 Orang	292.611.581	DINAS SOSIAL
06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	Barru	1500 Orang	158.807.500	DAU		1500 Orang	50.000.000	DINAS SOSIAL
06	06	2	01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5	1	1	Barru	1 Unit	-	DAU		1 Unit	25.000.000	DINAS SOSIAL
06	06	2	1	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500	100	100	Barru	100 KK	185.213.500	DAU		100 KK	182.611.581	DINAS SOSIAL
06	06	2	01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	20	20	Barru	20 Jiwa	28.984.000	DAU		20 Jiwa	35.000.000	DINAS SOSIAL
06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase keterlibatan TAGANA Pada penanganan Darurat Bencana	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase keterlibatan TAGANA Pada penanganan Darurat Bencana	100%	100%	100%		100%	149.005.000			100%	70.000.000	DINAS SOSIAL
06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	10	Barru	10 Orang	149.005.000	DAU		10 Orang	70.000.000	DINAS SOSIAL
06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMPN yang mendapatkan pemeliharaan	100%	100%	100%		100%	54.379.600	DAU		100%	66.855.223	DINAS SOSIAL
06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMPN yang mendapatkan Pemeliharaan	7	7	7		7 TMPN	54.379.600	DAU		7 TMPN	66.855.223	DINAS SOSIAL
06	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	7	7	7	Barru	7 TMPN	54.379.600	DAU		7 TMPN	66.855.223	DINAS SOSIAL
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA																								
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Disnaker	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Disnaker	4 Poin	2 poin	3 Poin		3 Poin	1.910.940.665			4 poin	2.399.598.778	Dinas Tenaga Kerja
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 JPL	20 Jpl	20 Jpl		20 JPL	12 JPL		Dinas Tenaga Kerja				
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	60,15%	100%		100%	1.455.775.065			100 %	1.455.775.065	Dinas Tenaga Kerja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang/bulan	14 Orang	20 Orang/Bulan	Kabupaten Barru	20 Orang/Bulan	1.455.775.065	APBD		#####	1.455.775.065	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	100%	0 %	100%		100%	52.109.500			100%	98.878.688	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 Orang	0 Orang	8 Orang	Kabupaten Barru	9 Orang	25.681.500	APBD		8 Orang	68.878.688	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	0 Orang	8 Orang	Kabupaten Barru	10 Orang	26.428.000	APBD		8 Orang	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	100%	91,25%	100%		100%	259.709.000			100%	422.135.830	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	1 Paket	Kabupaten Barru	50 Paket	845.000	APBD		1 Paket	2.025.844	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	0 Paket	1 Paket	Kabupaten Barru	16 Paket	607.000	APBD		1 Paket	7.860.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	1 Paket	Kabupaten Barru	1 Paket	7.732.500	APBD		1 Paket	24.017.800	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	Kabupaten Barru	2 Laporan	2.132.000	APBD		2 Laporan	5.568.176	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2028 Laporan	105 Laporan	338 Laporan	Kabupaten Barru	241 Laporan	248.392.500	APBD		1 Laporan	276.574.010	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	100%	75,22%	100 %		100%	31.050.000			100%	195.580.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	07	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39 Unit	11 Unit	6 Unit	Kabupaten Barru	40 Unit	12.900.000	APBD		6 Unit	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	4 Unit	4 Unit	Kabupaten Barru	2 Unit	18.150.000	APBD		5 Unit	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	100%	91,45%	100 %		100%	68.019.300			100%	158.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	07	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kabupaten Barru	4 Laporan	14.419.300	APBD		1 Laporan	105.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	Kabupaten Barru	2 Laporan	26.000.000	APBD		1 Laporan	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	Kabupaten Barru	3 Laporan	27.600.000	APBD		1 Laporan	23.000.000	Dinas Tenaga Kerja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai	100%	100%	100%		100%	19.625.000			100%	66.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	07	01	2.1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	0 Unit	7 Unit	Kabupaten Barru	4 Unit	15.175.000	APBD		8 Unit	45.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	07	01	2.1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6 Unit	1 Unit	Kabupaten Barru	14 Unit	4.450.000	APBD		1 Unit	20.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100				63,08%	304.196.500			20 %	211.128.917	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	70%	0,81%	60%		40 Orang	288.575.500			63,08 %	195.255.696	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	460 Orang	38 Orang	80 Orang	Kabupaten Barru	40 Orang	288.575.500	APBD		120 Orang	195.255.696	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	57,14%	0,40	100%		71,43%	5.500.000			85,71%	5.670.371	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	Kabupaten Barru	1 Lembaga	5.500.000	APBD		1 Lembaga	5.670.371	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas Konsultasi Produktivitas	2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas Konsultasi Produktivitas	100%	0%	48,65%		64,86%	10.121.000			81,08%	10.202.850	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	30 Perusahaan	0 Perusahaan	6 Perusahaan	Kabupaten Barru	12 Perusahaan	10.121.000	APBD		6 Perusahaan	10.202.850	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	100	28%	14,40%		14,40%	85.956.500			65,00%	85.956.500	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja terdaftar	2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja terdaftar	59,09%	22%	52,22%		50,00%	55.975.500			57,00%	78.738.020	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 Orang	9 Orang	10 Orang	Kabupaten Barru	10 Orang	39.268.000	APBD		10 Orang	39.282.544	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	03	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2500 Orang	0 Orang	500 Orang	Kabupaten Barru	30 Orang	11.042.500	APBD		500 Orang	16.750.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	5 Orang	5 Orang	Kabupaten Barru	5 Orang	5.665.000	APBD		5 Orang	5.670.000	Dinas Tenaga Kerja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Sesuai Standard Per Undang Undangan	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Sesuai Standard Per Undang Undangan	100%	74%	100%		100%	29.981.000			100%	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	50 Orang	6 Orang	10 Orang	Kabupaten Barru	10 Orang	29.981.000	APBD		10 Orang	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100				61,44%	40.895.000			62,16%	22.476.975	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dan pendafaran PP, PK, Struktur Skala Upah dan BPJamsostek bagi perusahaan	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian dan pendafaran PP, PK, Struktur Skala Upah dan BPJamsostek bagi perusahaan	45,57%	0%	74,59%		55,68%	19.330.000			63,78%	6.736.735	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Perusahaan	0 Perusahaan	4 Laporan	Kabupaten Barru	4 Laporan	19.330.000	APBD		4 Laporan	6.736.735	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang diselesaikan	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang diselesaikan	100%	93%	100%		100%	21.565.000,00			100%	15.740.240	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perusahaan	40 Orang	12 Perusahaan	Kabupaten Barru	3 Perkara	6.568.000	APBD		3 Perkara	9.271.000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 Perusahaan	0 Perusahaan	12 Perusahaan	Kabupaten Barru	8 Perusahaan	14.997.000	APBD		12 Perusahaan	2.645.000	Dinas Tenaga Kerja
8					BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
08	02				PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	19,25%	18,75 %	18,85 %		18.90%	82.944.500	DAU		19.25%	164.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	02	2,01			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam Pelebagaan Pengarusutamaan Gender	2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam Pelebagaan Pengarusutamaan Gender	36 PD	36 PD	36 PD		36 PD	16.241.000	DAU		36 PD	78.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA

KODE					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
08	02	2,01	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	02	2,01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Dok	36 Dok	36 Dok	Barru	36 Dok	16.241.000	DAU		36 Dok	78.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	02	2,01	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial	0,40%	0,35%	0,35%	Barru	0.36%	66.703.500	DAU		0.38%	86.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	02	2,01	02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	02	2,02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Organisasi	7 Organisasi	7 Organisasi	Barru	7 Organisasi	66.703.500	DAU		7 Organisasi	86.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,2%	0,84%	0,73%		0.63%	70.874.500	DAU		0.52%	375.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	10 Kasus	18 Kasus	-		15 Kasus	41.399.500	DAU		13 Kasus	90.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	03	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	03	2,01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	-	Barru	2 Dok	41.399.500	DAU		2 Dok	90.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif sesuai peraturan perundang undangan	2	08	03	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif sesuai peraturan perundang undangan	100%	100%	100%	Barru	100%	29.475.000	DAU		100%	285.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
8	3	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	2	08	03	2,02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				Barru	5 Orang		DAU		5 Orang	25.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
8	3	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	03	2,02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	Barru	5 layanan	29.475.000	DAU		5 layanan	260.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	95%	85%	85%		88%	22.120.500	DAU		80%	59.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
8	5	2	1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Keterpenuhan Data Gender dan Anak sesuai peraturan perundang undangan	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan Data Gender dan Anak sesuai peraturan perundang undangan	100%	100%	100%		100%	22.120.500	DAU		100%	59.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
8	5	2	1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Barru	3 Dokumen	22.120.500	DAU		3 Dokumen	59.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya	100%	100%	100%		750%	115.000.400	DAU		100%	117.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	06	2	01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Status Predikat Kabupaten Layak Anak	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Status Predikat Kabupaten Layak Anak	KLA	Madya	Nindya		Nindy	115.000.400	DAU		Utama	117.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	06	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dok	4 Dok	4 Dok	Barru	4 Dokumen	115.000.400	DAU		4 Dokumen	117.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0,2 %	0,015%	0,015%	Barru	100%	17.743.500	DAU		100%	17.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	-	Barru	100%		DAU		100%		Dinas PMDPPKBPPPA
08	07	2	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	36 PD	36 PD	-	Barru	36 PD	17.743.500	DAU		36 PD	17.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0,067 %	0,015%	0,015%		0,013%	61.820.000	DAU		0.1%	47.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani	100%	100%	100%		100%		DAU		100%		Dinas PMDPPKBPPPA

KODE					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
08	07	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	19 Orang	4 Orang	4 Orang	Barru	4 Orang	61.820.000	DAU		4 Orang	47.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETAHANAN PANGAN																								
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	48.71%	135,66%	0		46,92%	270.000.000			48%	242.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	36 Unit	6 Desa	0		3 Unit	270.000.000			9 Unit	242.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	4 Unit	1 Unit	0	Kabupaten Barru	1 Unit	200.000.000	APBD (DAU/DAK)		1 Unit	42.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	4 Unit	0	0	Kabupaten Barru	1 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	28 Unit	7 Unit	0	Kabupaten Barru	1 Unit	20.000.000	APBD		7 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein	98 Persen	81,90 Persen	95 Persen		96%	483.304.000			97%	468.946.208	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	83.037.000			100	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10 Laporan	0	0	Kabupaten Barru	3 Laporan	44.160.000	APBD		10 Laporan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2	09	03	2.01	00015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kabupaten Barru	12 Dokumen	14.400.000	APBD		12 Dokumen	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	10 Unit	3 Unit	7 Unit	Kabupaten Barru	7 Unit	19.477.000	APBD		10 Unit	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	10 Unit	10 Unit	0	Kabupaten Barru	7 Unit	5.000.000	APBD		10 Unit	25.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	13 Unit	1 Unit	3 Unit		1 Unit	157.700.000			3 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	8 Laporan	0	0	Kabupaten Barru	3 ton	10.000.000	APBD		7 Laporan	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Ton	3 Ton	3,8 Ton	Kabupaten Barru	5,6 Ton	137.700.000	APBD		12 Ton	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	4 Ton	0	0	Kabupaten Barru	1 Ton	10.000.000	APBD		4 Ton	20.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Harga Minimum Daerah Pangan Lokal	2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Harga Minimum Daerah Pangan Lokal	7 Laporan	0	0		7 Laporan	10.000.000			7 Laporan	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.03	01	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	2	09	03	2.03	0001	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	7 Laporan	0	0	Kabupaten Barru	7 Laporan	10.000.000	APBD		7 Laporan	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi	87 Persen	72 Persen	75 Persen		78%	232.567.000			81	238.946.208	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	8 Dokumen	0	0	Kabupaten Barru	1 Dokumen	10.000.000	APBD		8 Dokumen	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	Kabupaten Barru	1 Laporan	203.180.000	APBD		3 Laporan	178.946.208	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	7 Laporan	7 Laporan	0	Kabupaten Barru	7 Laporan	19.387.000	APBD		7 Laporan	30.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	78 Persen	65 Persen	68 Persen		72%	102.192.000			74%	140.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	78 Persen	77,3 Persen	68 Persen		72%	102.192.000			74%	140.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dok	0	0	Kabupaten Barru	1 Dok	13.994.000	APBD		1 Dok	20.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dokumen	1 Dok	Kabupaten Barru	1 Dok	51.418.000	APBD		1 Dok	70.000.000	Dinas Pertania dan Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dok	0	1 Dok	Kabupaten Barru	1 Dok	36.780.000	APBD		1 Dok	50.000.000	Dinas Pertania dan Ketahanan Pangan
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan	0.20 Persen	0,70 Persen	0,60 Persen		0,50%	187.800.000			0.40%	323.000.000	Dinas Pertania dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dok	0	1 Dok		1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000	Dinas Pertania dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dok	0	1 Dok	Kabupaten Barru	1 Dok	100.000.000	APBD		1 Dok	100.000.000	Dinas Pertania dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Masyarakatnya mendapatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Masyarakatnya mendapatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan	3 Desa	3 Desa	4 Desa		3 Desa	87.800.000			3 Desa	223.000.000	Dinas Pertania dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	14 Laporan	0	7 Laporan	Kabupaten Barru	7 Laporan	72.800.000	APBD		14 Laporan	40.000.000	Dinas Pertania dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Dok	5 Dokumen	0	Kabupaten Barru	1 Dok	15.000.000	APBD		7 Dok	183.000.000	Dinas Pertania dan Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN																								
2	10	02			Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	2	10	02			Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %		100 %	3.750.000			100	3.750.000	Dinas PUTR-PERKIM
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan	2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan	9 rek	0	2 rek		2 rek	3.750.000			2	3.750.000	Dinas PUTR-PERKIM
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan pemberian izin dan lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	2	10	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah laporan pemberian izin dan lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha	9 laporan	0	2 kegiatan	Lap	2 Lap	3.750.000	APBD		2	3.750.000	Dinas PUTR-PERKIM
2	10	04			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2	10	04			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	100 %	100 %		100 %	12.750.300			100	12.750.300	Dinas PUTR-PERKIM
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10 Kasus	0	2 Kasus		2 Kasus	12.750.300			2	12.750.300	Dinas PUTR-PERKIM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB			
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	0 lokasi	2 kegiatan	Berita Acara	2 Berita Acara	12.750.300	APBD		2	12.750.300	Dinas PUTR-PERKIM			
2	10	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2	10	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %	100 %	100 %		100 %	1.070.500.600			100	1.070.500.600	Dinas PUTR-PERKIM			
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas tanah yang telah dibayarkan ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas tanah yang telah dibayarkan ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan	8 Ha	1 Ha	2 Ha		2 Ha	1.070.500.600					Dinas PUTR-PERKIM			
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25 Dokumen	-	-	Dokumen	5 Dokumen	1.070.500.600	APBD				Dinas PUTR-PERKIM			
2	10	06			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	2	10	06			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	100 %	100 %	100 %		100 %	2.750.300			100	2.750.300	Dinas PUTR-PERKIM			
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	5 Dokumen	0	2 Dokumen		1 Dokumen	2.750.300			1	2.750.300	Dinas PUTR-PERKIM			
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	5 Dokumen	0	2 kegiatan	Dokumen	1 Dokumen	2.750.300	APBD		1	2.750.300	Dinas PUTR-PERKIM			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																											
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai maturitas SPIP DLH	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai maturitas SPIP DLH	4 Nilai	3,00	3,00		3 Poin	2.626.979.975			3 Poin	2.647.281.376	Dinas Lingkungan Hidup			
						Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan							Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100%	20	20		20 JPL	95.189.000			20 JPL	98.000.000	Dinas Lingkungan Hidup			
2	11	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2	11	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	82,80	100%		100%	2.139.832.975			100%	2.139.390.225	Dinas Lingkungan Hidup			
2	11	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	11	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan	82,80	29 Orang/Bulan	Kab. Barru	27 Org/Bln	2.139.832.975	APBD		17 Org/Bln	2.139.390.225	Dinas Lingkungan Hidup			

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional	2	11	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional	100%	99,82	100%		100%	95.189.000			100%	98.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	11	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	148 Orang	99,82	-	Kab. Barru	28 Orang	95.189.000	APBD		33 orang	98.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	2	11	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	99,94	100%		100%	211.097.200			100%	217.910.881	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	11	01	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	-	-	Kab. Barru	3 Paket	62.398.000	APBD		3 Paket	64.827.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	11	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	98,20	16 Unit	Kab. Barru	4 Paket	5.075.500	APBD		4 Paket	5.949.165	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	11	01	2,1	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	99,73	2 Paket	Kab. Barru	12 Lap	4.254.200	APBD		12 Lap	4.167.450	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	11	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1003 Laporan	99,97	82 Laporan	Kab. Barru	233 Lap	139.369.500	APBD		252 Lap	142.967.266	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	2	11	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	97,48	100%		100%	100.696.800			100%	103.696.521	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	11	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	679 Laporan	99,68	12 Laporan	Kab. Barru	135 Lap	29.989.300	APBD		129 Lap	28.496.521	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	11	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	99,90	24 Lap	Kab. Barru	24 Lap	20.307.500	APBD		12 Lap	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	11	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	94,52	12 Lap	Kab. Barru	12 Lap	50.400.000	APBD		6 Lap	55.200.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik daerah	2	11	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik daerah	100%	63,68	100%		100%	80.164.000			100%	88.283.750	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	11	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	51,21	34 Unit	Kab. Barru	46 Unit	61.095.000	APBD		2 Unit	24.375.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	11	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	100,00	18 Unit	Kab. Barru	3 Jenis	9.050.000	APBD		3 Jenis	11.383.750	Dinas Lingkungan Hidup

KODE						Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	01	2.1	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	11	01	2.1	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,00	1 Unit		Kab. Barru	1 Unit	10.019.000	APBD		1 Unit	12.212.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	98,72	100%			100%	224.127.500			100%	215.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian dok RPPLH	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase penyelesaian dok RPPLH	100%	0,00	100%			100%	124.134.000			100%	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.01	01		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	0,00	-		Kab. Barru	1 Dok	124.134.000	APBD		1 Dok	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang tersusun	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang tersusun	2 Dok	98,72	1 Dok			1 Dok	99.993.500			1 Dok	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02	02		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dok	98,72	1 Dok		Kab. Barru	1 Dok	99.993.500	APBD		1 Dok	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	21%	98,28	28%			26%	265.251.710			23%	314.558.664	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditentukan status mutunya	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditentukan status mutunya	3 Keg	98,47	3 Keg			3 Keg	245.610.710			3 Keg	293.048.526	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dok	97,93	3 Dok		Kab. Barru	2 Dok	90.740.300	APBD		3 Dok	112.414.673	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dok	99,84	2 Dok		Kab. Barru	1 Dok	34.307.500	APBD		1 Dok	19.379.965	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	03		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dok	98,59	- Dok		Kab. Barru	2 Dok	120.562.910	APBD		2 Dok	161.253.888	Dinas Lingkungan Hidup

KODE					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penanggulangan pencemaran/kerusakan LH yang disusun	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penanggulangan pencemaran/kerusakan LH yang disusun	1 Keg	96,25	1 Dok		1 Keg	19.641.000			1 Keg	21.510.138	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Lap	96,25	- Lap	Kab.Barru	1 Lap	19.641.000	APBD		1 Lap	21.510.138	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	91,95	100%		100%	199.989.500			100%	342.714.881	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang dipelihara	1 Lokasi	91,95	1 Lokasi		1 Lokasi	199.989.500			1 Lokasi	342.714.881	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18,52	91,95	18,52 Ha	Kab.Barru	18,52 Ha	199.989.500	APBD		18,52 Ha	342.714.881	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	90,73	99,13	85,43 %		86,85 %	111.557.820			86,85 %	122.713.602	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3	2	11	05	2		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3	2 Usaha	98,06	2 Usaha		2 Usaha	37.318.820			2 Usaha	41.050.702	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 lap	98,06	4 Lap	Kab.Barru	4 Lap	37.318.500	APBD		4 Lap	41.050.702	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpul LB3	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpul LB3	1 Pengumpulan	100,00	1 Pengumpul		1 Pengumpul	74.239.000			1 Pengumpul	81.662.900	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	7 Dok	1 dok	5 Dok	Kab.Barru	7 Dok	74.239.000	APBD		7 Dok	81.662.900	Dinas Lingkungan Hidup

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	97,19	100%		100%	32.392.500			100%	25.321.360	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Usaha	97,19	20 Usaha		20 Usaha	32.392.500			20 Usaha	25.321.360	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dok	95,99	10 Dok	Kab.Barru	10 Dok	9.311.000	APBD		10 Dok	9.779.175	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Lap	97,83	10 Lap	Kab.Barru	10 Lap	23.081.500	APBD		10 Lap	15.542.185	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100%	0,00	100%		100%	11.415.500			100%	11.761.954	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terdata	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terdata	1 dok	0,00	1 dok		1 Dok	11.415.500			1 Dok	11.761.954	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dok	0,00	Dok	Kab.Barru	1 Dok	11.415.500	APBD		1 Dok	11.761.954	Dinas Lingkungan Hidup

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	88%	95,53	82%		84%	71.991.083			86%	74.150.815	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Dok	95,53	2 lembaga		2 Dok	71.991.083			2 Dok	74.150.815	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	2	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dok	95,53	2 Dok	Kab.Barru	2 Dok	71.991.083	APBD		2 Dok	74.150.815	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per Uuan	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per Uuan	100%	98,60	100%		100%	12.100.500			100%	12.706.092	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait izin PPLH	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait izin PPLH	3 Pengaduan	98,60	3 Pengaduan		4 Pengaduan	12.100.500			5 Pengaduan	12.706.092	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3 Dok	98,60	3 Dok	Kab.Barru	4 Dok	12.100.500	APBD		5 Dok	12.706.092	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase sampah yang tertangani	83%	90,63	81,63%		82%	4.437.886.169			82%	1.724.729.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	2	11	11	2		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	25881 Ton	90,63	24550,6 Ton		24550,6 Ton	4.437.886.169			25180,6 Ton	1.724.729.500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dok	97,41	1 Dok	Kab.Barru	1 Dok	51.062.000	APBD		1 Dok	56.168.200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	25810,6 Ton	90,47	24550,6 Ton	Kab.Barru	24550,6 Ton	3.338.841.169	APBD		25180,6 Ton	605.780.000	Dinas Lingkungan Hidup

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJA WAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	91,07	2 Kelompok	Kab.Barru	2 Kelompok	93.533.000	APBD		2 Kelompok	102.886.300	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dok	94,82	- Dok	Kab.Barru	1 Dok	54.450.000	APBD		1 Dok	59.895.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	170 Unit	90,78	43 Unit	Kab.Barru	170 Unit	900.000.000	APBD		170 Unit	900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
12					BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
12	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.00	3		Kab. Barru	3,00	3.971.513.586	DAU		3,00	3.871.870.086	Dinas Kependudukan dan Capil
						Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 JPL				20 JPL	223.119.500	DAU		20 JPL	191.670.500	
12	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima gaji dan tunjangan	2	12	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima gaji dan tunjangan	100%	20%	20%		100%	2.793.706.086	DAU		100%	2.993.706.086	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	2	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	12	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/Bular	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan		30 Orang/Bulan	2.793.706.086	DAU		30 Orang/Bulan	2.993.706.086	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	5		Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang telah	2	12	01	2,1		Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang telah	425%	128%	128%		85%	223.119.500	DAU		85%	191.670.500	Dinas
12	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	12	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	3 Orang	3 Orang		3 Orang	40.273.000	DAU		15 Orang	33.301.500	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	2	12	01	2,1	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 Orang	121 Orang	121 Orang		120 Orang	38.950.000	DAU		120 Orang	35.838.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	12	01	2,1	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	42 Orang	42 Orang		41 Orang	143.896.500	DAU		28 Orang	122.531.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	2	12	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	20%	20%		100%	549.642.000	DAU		100%	425.162.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	12	01	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 paket	2 paket		2 Paket	402.815.000	DAU		2 Paket	330.720.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	12	01	2,1	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		4 Laporan	1.776.000	DAU		1 Laporan	1.815.000	Dinas Kependudukan dan Capil

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
12	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	12	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359 Laporan	62 Laporan	65 Laporan		89 Laporan	145.051.000	DAU		77 Laporan	92.627.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	12	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	20%	20%		100%	272.450.000	DAU		100%	113.000.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	12	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	9 Unit	0 Unit		12 Unit	84.975.000	DAU		3 Unit	25.000.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	12	01	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	9 Unit	3 Unit		4 Unit	187.475.000	DAU		5 Unit	88.000.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	2	12	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	20%	20%		100%	287.460.500	DAU		100%	261.452.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	12	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	42.660.500	DAU		12 Laporan	16.652.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	12	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	244.800.000	DAU		12 Laporan	244.800.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2	12	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	20%	20%		100%	68.255.000	DAU		100%	78.550.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	12	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105 Unit	21 Unit	19 Unit		21 Unit	58.200.000	DAU		21 Unit	64.550.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	12	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit	5 Unit	14 Unit		13 Unit	5.775.000	DAU		16 Unit	8.000.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	1	2	9	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	12	01	2,1	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	11 Unit	0	1 Unit		1 Unit	4.280.000	DAU		2 Unit	6.000.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	2				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-EL	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-EL	99%	98,06%	99%	Kab. Barru	99%	230.663.500	DAU		99%	256.463.500	Dinas Kependudukan dan Capil
12	2	2	1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 Jenis	4 Jenis	4 Jenis		4 Jenis	139.250.500	DAU		4 Jenis	150.500.500	Dinas Kependudukan dan Capil
12	2	2	1	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	16 Dokumen	4 Jenis	4 Jenis		4 Dokumen	25.800.000	DAU		4 Dokumen	29.814.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	2	2	1	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	113.450.500	DAU		1 Laporan	120.686.500	Dinas Kependudukan dan Capil
12	2	2	3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang Diselenggarakan	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang Diselenggarakan	15 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		3 Jenis	60.200.000	DAU		3 Jenis	74.750.000	Dinas Kependudukan dan Capil

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJA WAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
12	2	2	3	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 Laporan	0	0		0 Laporan	-	DAU		4 Laporan	15.000.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	2	2	3	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	60.200.000	DAU		2 Dokumen	35.250.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	2	2	3	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	0	0		0 Laporan	-	DAU		1 Laporan	24.500.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	2	2	4		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	31.213.000	DAU		1 Jenis	31.213.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	2	2	4	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	31.213.000	DAU		4 Laporan	31.213.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	3				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99%	96,94%	98%	Kab. Barru	98%	125.927.900	DAU		99%	181.525.750	Dinas Kependudukan dan Capil
12	3	2	1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	15 Jenis	3 Jenis	3 Jenis		3 Jenis	120.985.400	DAU		3 Jenis	127.748.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	3	2	1	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20 Dokumen	0	0		4 Dokumen	13.476.400	DAU		4 Dokumen	13.550.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	3	2	1	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		1 Layanan	107.509.000	DAU		1 Layanan	114.198.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	3	2	2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pencatatan Sipil yang Diselenggarakan	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pencatatan Sipil yang Diselenggarakan	15 Jenis	0	0		3 Jenis	-	DAU		3 Jenis	48.777.750	Dinas Kependudukan dan Capil
12	3	2	2	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	20 Laporan	0	0		0 Laporan	-	DAU		4 Laporan	21.777.500	Dinas Kependudukan dan Capil
12	3	2	2	8	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	5 Laporan	0	0		0 Laporan	-	DAU		1 Laporan	27.000.250	Dinas Kependudukan dan Capil

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
12	3	2	3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	4.942.500	DAU		1 Jenis	5.000.000	Dinas Kependudukan dan Capil	
12	3	2	3	2	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		1 Laporan	4.942.500	DAU		2 Laporan	5.000.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	4				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Opd Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Opd Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan	42%	0	22%	Kab. Barru	22%	158.957.500	DAU		31%	184.961.500	Dinas Kependudukan dan Capil
12	4	2	1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dikumpulkan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang dikumpulkan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	20%	20%		100%	96.961.000	DAU		100%	99.711.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	4	2	1	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	46.530.500	DAU		2 Dokumen	49.280.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	4	2	1	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen	50.430.500	DAU		11 Dokumen	50.431.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	4	2	3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Dikelola	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Dikelola	100%	20%	20%		100%	61.996.500	DAU		100%	85.250.500	Dinas Kependudukan dan Capil
12	4	2	3	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20 Laporan	0 Laporan	0 Laporan		0 Laporan	-	DAU		4 Laporan	23.250.000	Dinas Kependudukan dan Capil
12	4	2	3	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35 Laporan	7 Laporan	7 Laporan		7 Laporan	61.996.500	DAU		7 Laporan	62.000.500	Dinas Kependudukan dan Capil
12	5				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan	100%	20%	20%	Kab. Barru	100%	47.244.000	DAU		100%	72.500.250	Dinas Kependudukan dan Capil
12	5	2	1		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang Disusun	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang Disusun	100%	20%	20%		100%	47.244.000	DAU		100%	72.500.250	Dinas Kependudukan dan Capil
12	5	2	1	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	47.244.000	DAU		1 Dokumen	72.500.250	Dinas Kependudukan dan Capil
13					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
13	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	3	3		3,00	3.146.117.360	DAU		4,00	3.707.255.653	Dinas PMDPPKBPPPA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	20 JPL		20 JPL		DAU		20 JPL		
13	01	2	02		Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2	13	01	2		Adimistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	Barru	100%	2.639.961.091	DAU		100%	3.248.255.653	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	13	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 org/ bulan	36 org/ bulan	36 org/ bulan	Barru	36 Orang/ Bulan	2.639.961.091	DAU		36 Orang/ Bulan	3.248.255.653	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	2	13	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	22,22 %	22,22 %	22,22 %	Barru	22.22%	41.811.000	DAU		22.22%	81.500.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	13	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 org	5 org	5 org	Barru	5 orang	31.316.000	DAU		5 orang	32.500.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	2	13	01	2,1	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	18 org	3 org	3 org	Barru	3 Orang	10.495.000	DAU		3 Orang	49.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	2	13	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Barru	100%	104.797.000	DAU		100%	134.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	13	01	2,1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	Barru	10 Paket	2.475.000	DAU		10 Paket	2.500.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	13	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	Barru	12 Paket	1.732.000	DAU		12 Paket	1.500.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	13	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	Barru	20 Laporan	100.590.000	DAU		20 Laporan	130.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	13	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Barru	100%	147.945.129	DAU		100%	75.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	13	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	5 Unit	-	Barru	5 unit	8.076.450			5 unit	28.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	13	01	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	-	Barru	5 unit	57.205.000			5 unit	25.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	13	01	2,1	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 Unit	-	Barru	5 unit	82.663.679			5 unit	22.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	2	13	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%		100%	116.748.640	DAU		100%	101.500.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	13	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Barru	2 Laporan	63.430.000	DAU		2 Laporan	71.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	13	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	22.118.640	DAU		12 Laporan	20.500.000	Dinas PMDPPKBPPPA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	13	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	31.200.000	DAU		12 Laporan	10.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2	13	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	Barru	100%	94.854.500	DAU		100%	67.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	13	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	29 unit	29 unit	Barru	29 unit	80.000.000	DAU		29 unit	49.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	13	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	Barru	2 unit	6.000.000	DAU		2 unit	8.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	13	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	Barru	2 unit	8.854.500	DAU		2 unit	10.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa dari 17,50% menjadi 75%	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa dari 17,50% menjadi 75%	75,00%	37,50%	37,50%		50%	61.000.000	DAU		62,50%	61.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	03	2	01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam kabupaten	Persentase MoU Kerja sama antar Desa yang ditetapkan	2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase MoU Kerja sama antar Desa yang ditetapkan	75,00%	37,50%	37,50%		50%	61.000.000	DAU		62,50%	61.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	03	2	01	1	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam kabupaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	13	03	2,01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	40 Dok	40 Dok	-	Barru	40 dok	31.000.000	DAU		40 dok	31.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	03	2	01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	13	03	2,01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	40 Dok	40 Dok	40 Dok	Barru	40 dok	30.000.000	DAU		40 dok	30.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib adimistrasi sesuai peraturan Per UU an	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib adimistrasi sesuai peraturan Per UU an	100%	100%	100%		100%	1.976.127.976	DAU		100%	1.980.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Keterpenuhihan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai peraturan per UU an	2	13	04	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Keterpenuhihan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai peraturan per UU an	100%	100%	100%		100%	1.976.127.976	DAU		100%	1.980.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	13	04	2,01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Dok	40 Dok	40 Dok	Barru	40 Dok	916.499.576	DAU		40 Dok	900.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	2	13	04	2,01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	40 Dok	40 Dok	-	Barru	40 Dok	30.000.000	DAU		40 Dok	30.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	2	13	04	2,01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	40 Dok	40 Dok	40 Dok	Barru	40 Dok	70.000.000	DAU		40 Dok	70.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2	13	04	2,01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 orang	40 Org	-	Barru	40 orang	56.000.000	DAU		40 orang	56.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2	13	04	2,01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	Barru	40 Laporan	48.000.000	DAU		40 Laporan	48.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40 Dok	40 Dok	40 Dok	Barru	40 Dok	49.000.000	DAU		40 Dok	49.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	40 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	533.500.400	DAU		12 Laporan	550.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	55 dok	55 dok	55 dok	Barru	55 dok	81.128.000	DAU		55 dok	85.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80 orang	80 orang	-	Barru	80 orang	80.000.000	DAU		80 orang	80.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	04	2	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	55 dok	55 dok	55 dok		55 dok	112.000.000	DAU		55 dok	112.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase LPM Berprestasi	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase LPM Berprestasi	52,31%	32,30%	36,49%		100%	341.116.100	DAU		100%	582.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	05	2	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa yang di bina	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa yang di bina	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga		6 Lembaga	341.116.100	DAU		6 Lembaga	582.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 lembaga	4 lembaga	3 lembaga	Barru	4 lembaga	26.380.500	DAU		4 lembaga	40.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 dok	5 dok	5 dok	Barru	5 dok	33.549.000	DAU		5 dok	126.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	40 Laporan	40 Laporan	0	Barru	40 Laporan	53.655.000	DAU		40 Laporan	61.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	55 dok	55 dok	55 dok	Barru	55 dok	227.531.600	DAU		55 dok	355.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
14					BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15,90%	14,65%	14,65%		14,75%	3.400.980.600	DAU/DAK		15.25%	3.359.120.000	Dinas PMDPPKBPPPA
14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan	85%	80%	80%		85%	58.055.000	DAU		85%	116.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
14	03	2	01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dok	3 Dok	3 Dok		3 Dokumen	58.055.000	DAU		3 Dokumen	56.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berperan aktif dalam Penyuluhan dan Pengembangan Program KB	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berperan aktif dalam Penyuluhan dan Pengembangan Program KB	100%	100%	100%	Barru	100%	658.320.000	DAU		100%	657.120.000	Dinas PMDPPKBPPPA
14	03	2	02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 laporan	12 laporan	12 laporan		12 Laporan	658.320.000	DAU		12 Laporan	657.120.000	Dinas PMDPPKBPPPA
14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	100%	100%	100%		100%	2.620.605.600	DAK FISIK dan BOKB		100%	2.520.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA
14	03	2	03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 unit	5 unit	5 unit	Barru	5 Unit	2.620.605.600	DAK FISIK dan BOKB		5 Unit	2.520.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB		
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Keterpenuhan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Keterpenuhan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	100%	100%		100%	64.000.000	DAU		100%	66.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA		
14	03	2	04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 Organisasi	15 Organisasi	15 Organisasi	Barru	15 Organisasi	64.000.000	DAU		15 Organisasi	66.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA		
14	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera	100%	66,67%	-		83.33%	26.090.000	DAU		83.33%	26.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA		
14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitas Kegiatan Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitas Kegiatan Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6 Keg	4 Keg	-		5 Kegiatan	26.090.000	DAU		5 Kegiatan	26.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA		
14	04	2	01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	14	04	2.01	0003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan	6 Laporan	-	Barru	6 Laporan	26.090.000	DAU		6 Laporan	26.000.000	Dinas PMDPPKBPPPA		
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN																										
2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	4 Poin	2 Poin	3 poin		3 Point	4.481.868.008			3 Poin	4.312.474.965	Dinas Perhubungan		
						Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 Jpl	20 Jpl	20 jpl		20 JPL	180.549.500			20 jpl	140.000.000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2	15	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100		100%	3.644.644.212			100%	3.422.185.460	Dinas Perhubungan		
2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	15	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42	43	43	Kantor Dishub	42 orang/bulan	3.632.894.212	APBD		42 orang	3.409.185.460	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	15	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96			Kantor Dishub	24 Dokumen	2.200.000	APBD		24 Dokumen	2.400.000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	15	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4			Kantor Dishub	1 Laporan	550.000	APBD		1 Laporan	600.000	Dinas Perhubungan	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	15	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	15	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72			Kantor Dishub	18 Laporan	9.000.000	APBD		18 Laporan	10.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100	100	100		100%	180.549.500			100%	140.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	15	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3			Kabupaten Barru	1 paket	44.000.000	APBD		1 paket	45.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	15	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13			Kabupaten Barru	3 orang	25.000.000	APBD		3 orang	25.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	15	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76	4		Kabupaten Barru	19 orang	111.549.500	APBD		19 orang	70.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100		100%	438.920.300			100%	462.325.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	15	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60			Kabupaten Barru	10 paket	494.000	APBD		10 paket	825.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	15	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	2		Kabupaten Barru	3 paket	2.650.000	APBD		3 paket	15.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	15	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	5	2	Kabupaten Barru	2 paket	976.800	APBD		2 paket	2.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	15	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	26	2	Kabupaten Barru	2 paket	79.988.500	APBD		2 paket	81.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	15	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500	32	1	Kabupaten Barru	100 Paket	4.000.000	APBD		100 Paket	4.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	15	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	1	12	Kabupaten Barru	12 laporan	857.000	APBD		12 laporan	9.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	15	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3880	504	543	Kabupaten Barru	800 laporan	349.954.000	APBD		800 laporan	350.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100		100%	45.000.000			100%	100.064.505	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	15	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14	3	2	Kabupaten Barru	3 unit	45.000.000	APBD		2	65.064.505	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100		100%	107.839.642			100%	109.000.000	Dinas Perhubungan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB		
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	15	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8200	41	12	Kantor Dishub	1600 laporan	13.779.000	APBD		1700	14.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	15	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	74	Kantor Dishub, UPTD PKB, UPTD Pelabuhan , Traffic Light (tiga titik), Alun-Alun Kota Barru, Taman Melati	96 laporan	94.060.642	APBD		96 laporan	95.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100		100%	245.463.854			100%	218.900.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	15	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84	11	15	Kabupaten Barru	17 unit	135.518.000	APBD		17 unit	110.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	15	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	39			Kabupaten Barru	5 unit	3.000.000	APBD		5 unit	2.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	15	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165	8	19	Kabupaten Barru	40 unit	8.775.000	APBD		40 unit	15.400.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	15	01	2	09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	8	1	1	Kabupaten Barru	2 unit	64.425.000	APBD		2 unit	46.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	15	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2	1	Kabupaten Barru	1 unit	11.860.834	APBD		1 unit	10.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	15	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	0		Kabupaten Barru	2 unit	21.885.020	APBD		2 unit	5.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100		100 %	1.971.154.027			100 %	3.694.306.704	Dinas Perhubungan	
							persentase layanan angkutan darat							persentase layanan angkutan darat	100	100	100		100 %	785.076.500			100 %	920.150.880	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan Kabupaten yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan Kabupaten yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	8 jenis	8 jenis	8 jenis		8 jenis	1.971.154.027			7 jenis	3.694.306.704	Dinas Perhubungan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2	15	02	2	02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				Jl. AP. Pettarani, Kelurahan Tuwung dan Jl. Melati, Kelurahan Sumpang Binangae, Kec Barru	4 unit	100.000.000	APBD		4 unit	100.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	15	02	2	02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4490	782	151	Kec Balusu, Mallusetasi, tanete Riaja, tanete Rilau, Pujananting, Barru, Soppeng Riaja	953 unit	1.327.865.427	APBD		900	2.824.147.056	Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan											Jl. Andi Majjajareng, Kelurahan Sumpang Binangae Kec Barru	4 Unit	3.000.000	APBD				Dinas Perhubungan	
							Pengadaan Lampu Jalan											Jl. Andi Majjajareng, Kelurahan Sumpang Binangae Kec Barru	3 Unit	2.250.000	APBD				Dinas Perhubungan	
							Pengadaan Lampu Jalan											Jl. H.M Sewang Magganjeng Kel. Coppo Kecamatan Barru	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan	
							Pengadaan Lampu Jalan											Padongko, Kelurahan Mangempang , Kec Barru	12 Unit	9.000.000	APBD				Dinas Perhubungan	
							Pengadaan Lampu Jalan											Pange Desa Palakka, Kec Barru	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan	
							Pengadaan Lampu Jalan											Desa Ana Banua,Kec Barru	30 Unit	22.500.000	APBD				Dinas Perhubungan	
							Pengadaan Lampu Jalan											Jl. Menuju Mesjid Bublue Kel. Mangempang , Kec Barru	3 Unit	2.250.000	APBD				Dinas Perhubungan	
							Pengadaan Lampu Jalan											RT.3 Lingkungan Padang Lowang Kel. Coppo, Kec Barru	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							Pengadaan Lampu Jalan												Lingkungan Jampue, Kel Sumpang Binangae, Kec Barru	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Lingkungan Amaro, Kel Coppo, kec Barru	2 Unit	1.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Dusun Banga-bangae, Desa Palakka, Kec Barru	15 Unit	11.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pemasangan Rambu Lalulintas												Desa Siawung, Kec Barru	10 Unit	27.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pemasangan Cermin Tikungan												Dusun Barang, Dusun tompo Desa Tompo, Kec Barru	4 Unit	20.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Galung, Kec Barru	25 Unit	18.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Jl.Anggrek, Jl.Lajang Rt I, Sumpang Binangae I Kel.Sumpang Binangae, Kec. Barru	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Aroppoe, Garessi, Kec Tanete Rilau	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Garessi, Kec Tanete Rilau	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Lajari, Desa Lipukasi, Kec Tanete Rilau	1 Unit	750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Lajari, Desa Lipukasi, Kec Tanete Rilau	3 Unit	2.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Butung, Desa Lasitae, Kec Tanete Rilau	3 Unit	2.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Tanete Rilau	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							Pengadaan Lampu Jalan												Berarue, Desa Pancana, Kec Tanete Rilau	4 Unit	3.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Gamoe	3 Unit	2.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Kel. Lalolang, Kec. Tanete Rilau	50 Unit	37.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Aluppangnge Desa Corawali, Kec. Tanete Rilau	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Pancana, Kec. Tanete Rilau	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Cempae, Kel Lompo Riaja, Kec Tanete Riaja	10 Unit	7.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Kenrang Dusun Parenring, Kec Tanete Riaja	4 Unit	3.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Lokae, Desa Libureng, Kec. Tanete Riaja	7 Unit	5.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Lompo Tengah, Kec Tanete Riaja	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Semua Dusun Desa Harapan, Kec Tanete Riaja	15 Unit	11.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Balusu , Kecamatan Balusu	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Lapasu Desa Balusu Kec. Balusu	7 Unit	5.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Kamiri, Kec Balusu	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Rumpia,Desa Kamiri, Kec Balusu	7 Unit	5.250.000	APBD				Dinas Perhubungan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							Pengadaan Lampu Jalan												Lahanreng, Dusun Kamiri, Desa Kamiri, Kec. Balusu	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Lapasu Salesso, Desa Balusu, Kec Balusu	15 Unit	11.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												labungnge Desa Lampoko, Kec Balusu	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Depan Kantor Camat Balusu	2 Unit	1.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Perumahan	2 Unit	1.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Depan Bulog Desa Madello, Kec Balusu	2 Unit	1.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Pude'e Takkalasi, Kec Balusu	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Temmireng, Kel Takkalasi, Kec Balusu	3 Unit	2.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Pacciro, Kel Takkalasi, Kec Balusu	3 Unit	2.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Binuang, Kec. Balusu	30 Unit	22.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Madello, Kec. Balusu	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Kel Kiru - kiru, Kec Soppeng Riaja	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Kel. Mangkoso, Kec Soppeng Riaja	7 Unit	5.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Ajakkang, Kec Soppeng Riaja	3 Unit	2.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Kel. Kiru - Kiru, Desa Lawallu, Kec Soppeng Riaja	7 Unit	5.250.000	APBD				Dinas Perhubungan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						Pengadaan Lampu Jalan											Mangkoso, Kiru-Kiru, Lawallu, Lampoko dan Batupute, Kec. Soppeng Riaja	40 Unit	30.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
						Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)											Paccekke - mangkoso, Kec. Soppeng Riaja	Meter	-	APBD				Dinas Perhubungan
						Pengadaan Lampu Jalan											RT 1 Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
						Pengadaan Lampu Jalan											RT 02 Dusun Kampung Baru dan RT 02 Dusun Minangatoa, Kec. Soppeng Riaja	15 Unit	11.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
						Pengadaan Lampu Jalan											Desa	10 Unit	7.500.000	APBD				Dinas
						Pemasangan Rambu Lalulintas											Rt. 01 Dusun Pallambara, Kec. Soppeng Riaja	2 Unit	5.400.000	APBD				Dinas Perhubungan
						Pengadaan Lampu Jalan											Rt. 02 Dusun Siddo, Kec. Soppeng Riaja	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
						Pemasangan Cermin Tikungan											RT 01 Dusun Kampung Baru dan RT 02 Dusun Ajakkang, Kec. Soppeng Riaja	2 Buah	10.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
						Pengadaan Lampu Jalan											Desa Nepo, Kec Mallusetasi	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
						Pengadaan Lampu Jalan											Patalengge,	9 Unit	6.750.000	APBD				Dinas
						Pengadaan Lampu Jalan											Buaka, Kec Mallusetasi	20 Unit	15.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
						Pengadaan Lampu Jalan											Kelurahan Mallawa, Kec. Mallusetasi	50 unit	37.500.000	APBD				Dinas Perhubungan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Kupa, Kec. Mallusetasi	10 Unit	7.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												RW 3 Banrongge, Kec. Mallusetasi	50 Unit	37.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Dusun Padang Rewatae, Desa Pattappa, Kec Pujananting	8 Unit	6.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Dusun Batu Lappa, Desa Bacu- Bacu, Kec Pujananting	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Dusun Ammerung, Desa Bacu-Bacu, Kec Pujananting	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Dusun, Ampiri Desa Bacu-Bacu, Kec Pujananting	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Pacciro Manu Desa Jangan-Jangan Kec. Pujanating	5 Unit	3.750.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pemasangan Cermin Tikungan												Desa	4 Buah	20.000.000	APBD				Dinas
							Pemasangan Cermin Tikungan												Semua Dusun Desa Pujananting	10 Buah	50.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Semua Dusun Desa Pujananting	10 Unit	7.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Bacu-Bacu, Kec Pujananting	15 Unit	11.250.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Desa Bulu Bulu, Kec Pujananting	50 Unit	37.500.000	APBD				Dinas Perhubungan
							Pengadaan Lampu Jalan												Doi-Doi, Kel. Mattappawali e, Kec Pujananting	10 Unit	7.500.000	APBD				Dinas Perhubungan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
						Pemasangan Rambu Lalulintas											Kec Balusu, Mallusetasi, tanete Riaja, tanete Rilau, Pujananting, Barru, Soppeng Riaja	20 Unit	54.000.000	APBD				Dinas Perhubungan
						Kegiatan Pendukung Lainnya											Kecamatan Barru	1 Unit	478.465.427	APBD				Dinas Perhubungan
2	15	02	2 02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2	15	02	2 02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	24		19	Kec Balusu, Mallusetasi, tanete Riaja, tanete Rilau, Pujananting, Barru, Soppeng Riaja	17 unit	34.000.000	APBD		5 Unit	15.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2 02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2	15	02	2 02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2095	392	1460	Kec Balusu, Mallusetasi, tanete Riaja, tanete Rilau, Pujananting, Barru, Soppeng Riaja	3477 Unit	509.288.600	APBD		415 Unit	855.159.648	Dinas Perhubungan
2	15	02	2 05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji sesuai dengan peraturan yang telah di persyaratkan	2	15	02	2 05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji sesuai dengan peraturan yang telah di persyaratkan					800 Unit	105.783.000			900 Unit	199.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2 05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2	15	02	2 05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	1		Kec. Barru	1 unit	50.065.000	APBD		1 Unit	160.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2 05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	15	02	2 05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3			Kec. Barru	1 orang	19.738.000	APBD				Dinas Perhubungan
2	15	02	2 05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	15	02	2 05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16000		500	Kec. Barru	3000 Dokumen	12.500.000	APBD		2000 Dokumen	25.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2 05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2	15	02	2 05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	26		6	Kec. Barru	6 unit	23.480.000	APBD		6 Unit	14.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2 06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan kabupaten terselenggara manajemen rekayasa lalu lintas	2	15	02	2 06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah ruas jalan kabupaten terselenggara manajemen rekayasa lalu lintas					95 ruas Ruas	677.493.500			105 ruas	670.605.626	Dinas Perhubungan

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
2	15	02	2	06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	15	02	2	06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	24	4	24	Kantor Dishub	5 laporan	601.200.000	APBD		5 Laporan	587.700.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2	06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2	15	02	2	06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	135	2		Kec. Barru	40 dokumen	50.000.000	APBD		25 Unit	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2	06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2	15	02	2	06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	25	1	4	Kabupaten Barru	5 laporan	26.293.500	APBD		5 Laporan	32.905.626	Dinas Perhubungan
2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Andalalin yang direkomendasikan yang telah memenuhi standart peraturan perundang-undangan	2	15	02	2	07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Andalalin yang direkomendasikan yang telah memenuhi standart peraturan perundang-undangan					1 dokumen Dokumen	1.800.000			1 dokumen	24.251.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2	07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	2	15	02	2	07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	180	9		Kabupaten Barru	36 laporan	1.800.000	APBD		36	1.800.000	Dinas Perhubungan
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga	2	15	03										2 %	241.509.667			2 %	2.190.209.469	Dinas Perhubungan
2	15	03	2	13		Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	persentase keterpenuhan pelabuhan penyeberangan yang fungsional dan sesuai standart peraturan perundang-undangan	2	15	03	2	13		Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	persentase keterpenuhan pelabuhan penyeberangan yang fungsional dan sesuai standart peraturan perundang-undangan					100 %	241.509.667			100 %	2.190.209.469	Dinas Perhubungan
2	15	03	2	13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2	15	03	2	13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	9	1		Pelabuhan Penyeberang an Garongkong	2 Unit	41.509.667	APBD		2 Unit	1.150.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2	13	05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	2	15	03	2	13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	17			Pelabuhan Penyeberang an Garongkong	35 Dokumen	200.000.000	APBD		35 Unit	1.040.209.469	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																										
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kominfo Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Kominfo Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	4 Poin	3 Poin	3 Poin		3 Poin	3.501.693.909			3 Poin	3.929.194.251	Dinas Kominfo SP
															100 JPL	20 Jpl	20 Jpl		20 JPL				20 jpl	Dinas Kominfo SP		
2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan	2	16	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan	30 Dokumen dan 10 Laporan	0 Dokumen dan 0 Laporan	6 Dokumen dan 2 Laporan		6 Dokumen dan 2 Laporan	2.070.000			4 Dokumen dan 2 Laporan	1.643.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	16	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten Barru	2 Dokumen	865.000	APBD		2 Dokumen	452.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	16	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten Barru	2 Dokumen	425.000	APBD		1 Dokumen	397.000	Dinas Kominfo SP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	16	01	2 01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten Barru	2 Dokumen	390.000	APBD		1 Dokumen	397.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	Kabupaten Barru	2 Laporan	390.000	APBD		2 Laporan	397.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	87,10%	100%		100%	3.110.443.409			100%	3.308.205.251	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang	27 Orang	31 Orang	Kabupaten Barru	31 orang	3.110.443.409	APBD		31 orang	3.308.205.251	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	2	16	01	2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	100%	24%	0%		20%	49.263.500			20%	65.947.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	6 Orang	0 Orang	Kabupaten Barru	5 Orang	49.263.500	APBD		5 Orang	65.947.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	16	01	2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%	140.859.000			100%	272.256.500	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	1 Paket	Kabupaten Barru	2 Paket	1.839.000	APBD		2 Paket	2.837.500	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	2 Paket	3 Paket	Kabupaten Barru	3 Paket	1.500.000	APBD		3 Paket	1.700.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	0 Paket	52 Paket	Kabupaten Barru	52 Paket	23.537.500	APBD		24 Paket	43.065.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	Kabupaten Barru	4 Laporan	1.210.000	APBD		35 Laporan	7.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1449 Laporan	1 Laporan	147 Laporan	Kabupaten Barru	145 Laporan	112.772.500	APBD		305 Laporan	217.654.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	16	01	2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0%	0%		100%	54.991.000			100%	120.500.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	16	01	2 07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	0 Unit	Kabupaten Barru	6 Unit	54.991.000	APBD		3 Unit	120.500.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang urusan Kantor	2	16	01	2 08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang urusan Kantor	100%	100%	100%		100%	118.072.000			100%	130.642.500	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 08	01	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	2	16	01	2 08	0001	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	60 Laporan	1 Laporan	24 laporan	Kabupaten	24 Laporan	118.072.000	APBD		24 Laporan	130.642.500	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2 09		Pemeliharaan Barang	Terlaksananya Pemeliharaan	2	16	01	2		Pemeliharaan Barang Milik	Terlaksananya Pemeliharaan	100%	100%	100%		100%	25.995.000			100%	30.000.000	Dinas Kominfo

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB		
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
2	16	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	16	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	8 Unit	8 Unit	Kabupaten Barru	10 Unit	21.995.000	APBD		10 Unit	22.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	16	02	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	8 Unit	8 Unit	Kabupaten Barru	8 Unit	4.000.000	APBD		15 Unit	8.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%	100%		100%	2.269.673.500			100%	2.345.673.500	Dinas Kominfo SP
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	1325 Informasi	265 Informasi	265 Informasi		265 Informasi	2.269.673.500			265 Informasi	2.345.673.500	Dinas Kominfo SP
2	16	02	2	01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2	16	02	2	01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	48 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Kabupaten Barru	12 Dokumen	24.000.000	APBD		12 Dokumen	24.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	16	02	2	01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Kabupaten Barru	3 Dokumen	16.000.000	APBD		3 Dokumen	23.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2	16	02	2	01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	32 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	Kabupaten Barru	7 Dokumen	1.215.631.500	APBD		7 Dokumen	1.257.631.500	Dinas Kominfo SP
2	16	02	2	01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2	16	02	2	01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	15 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	Kabupaten Barru	3 Layanan	515.042.000	APBD		3 Layanan	530.042.000	Dinas Kominfo SP
2	16	02	2	01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2	16	02	2	01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Kabupaten Barru	1 Dokumen	67.000.000	APBD		1 Dokumen	67.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	02	2	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya KomunikasiPublik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	2	16	02	2	01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya KomunikasiPublik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	223 Orang	1 Orang	1 Orang	Kabupaten Barru	45 Orang	275.000.000	APBD		45 Orang	275.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	02	2	01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi diDaerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2	16	02	2	01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi diDaerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	Kabupaten Barru	1 Dokumen	45.000.000	APBD		1 Dokumen	45.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2	16	02	2	01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	32,28 Dokumen	1 Dokumen	681 Dokumen	Kabupaten Barru	8 Dokumen	112.000.000	APBD		8 Dokumen	124.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	2	16	03				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%		100%	2.272.198.500			100%	3.428.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Tersedianya Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	Tersedianya Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36 OPD	0 OPD	5 OPD		5 OPD	1.388.400.000			5 OPD	1.915.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	03	2	01	01	Pendaftaran Nama Domain PemerintahKabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2	16	03	2	01	0001	Pendaftaran Nama Domain PemerintahKabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Domain	0 Domain	0 Domain	Kabupaten Barru	1 Domain	15.000.000	APBD		1 Domain	15.000.000	Dinas Kominfo SP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
2	16	03	2	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan IntraPemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan IntraPemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit	0 Unit	1 Unit	Kabupaten Barru	1 Unit	1.373.400.000	APBD		1 Unit	1.900.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	03	2	02		Pengelolaan E-government di Lingkup PemerintahDaerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi yang menunjang SPBE di Kabupaten Barru	2	16	03	2	02	Pengelolaan E-government di Lingkup PemerintahDaerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi yang menunjang SPBE di Kabupaten Barru	16 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi		2 Aplikasi	883.798.500			2 Aplikasi	1.513.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	23 Unit	0 Unit	0 Unit	Kabupaten Barru	5 Unit	18.022.500	APBD		5 Unit	25.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	03	2	02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	18 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	Kabupaten Barru	7 Layanan	366.725.000	APBD		3 Layanan	810.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	03	2	02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Kabupaten Barru	1 Dokumen	288.331.500	APBD		1 Dokumen	300.000.000	Dinas Kominfo SP
2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	38 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Kabupaten Barru	1 Dokumen	210.719.500	APBD		9 Dokumen	378.000.000	Dinas Kominfo SP
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																									
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	4 Poin	2 Poin	3 Poin		3 Point	3.278.293.222			3 Point	3.273.293.222	DISKUMDAG
							Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan					Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				20 JPL	20 JPL	20 JPL		20 JPL	110.000.000			20 JPL	110.000.000
2	17	01	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai	2	17	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai	100	100	100		100%	2.884.845.722			100%	2.884.845.722	DISKUMDAG
2	17	01	2	01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaan gaji dan Tunjangan ASN	2	17	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	150 org	28 Orang	30 Orang	Kabupaten Barru	30 Org	2.884.845.722	APBD		30 org	2.884.845.722	DISKUMDAG
2	17	01	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	2	17	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	80	80	80		80%	110.000.000			80%	110.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2	01		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	17	01	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 org	1 Orang	2 Orang	Kabupaten Barru	2 Orang	65.000.000	APBD		3 Orang	65.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2	02		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	17	01	2	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 org	4 Orang	4 Orang	Kabupaten Barru	4 Orang	45.000.000	APBD		4 Orang	45.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2			Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	2	17	01	2		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100		100%	125.000.000			100%	125.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2	01		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2	17	01	2	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 Paket	2 Paket	2 Paket	Kabupaten Barru	2 Paket	5.000.000	APBD		2 Paket	5.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2	02		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	17	01	2	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1320 OK	220 OK	220 OK	Kabupaten Barru	220 OK	120.000.000	APBD		220 OK	120.000.000	DISKUMDAG

KODE				Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	17	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2	17	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100%	100%		100%	45.000.000		100%	45.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,1	01	Pengadaan meubeleur	Tersedianya Mebel	2	17	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	10 Paket	2 Paket	2 Paket	Kabupaten Barru	2 Paket	20.000.000	APBD	2 Paket	20.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,1	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	17	01	2,1	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	0	7 Unit	Kabupaten Barru	7 Unit	20.000.000	APBD	7 Unit	20.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,1	03	Pengadaan Sarana dan Perasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	17	01	2,1	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	1 Unit	3 Unit	Kabupaten Barru	3 Unit	5.000.000	APBD	3 Unit	5.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2	17	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100		100%	162.572.000		100%	157.572.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	17	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	Kabupaten Barru	12 Laporan	111.062.500	APBD	12 Laporan	106.062.500	DISKUMDAG
2	17	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	17	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	2	Kabupaten Barru	2 Laporan	51.509.500	APBD	2 Laporan	51.509.500	DISKUMDAG
2	17	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	2	17	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100%	60.875.500		100%	60.875.500	DISKUMDAG
2	17	01	2,1	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	17	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	Kabupaten Barru	13 Unit	28.975.500	APBD	13 Unit	28.975.500	DISKUMDAG
2	17	01	2,1	02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	17	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	5 Unit	5 Unit	Kabupaten Barru	14 Unit	4.900.000	APBD	14 Unit	4.900.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,1	03	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	17	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Kabupaten Barru	2 Unit	25.000.000	APBD	2 Unit	25.000.000	DISKUMDAG
2	17	01	2,1	04	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	17	01	2,1	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Kabupaten Barru	5 Unit	2.000.000	APBD	5 Unit	2.000.000	DISKUMDAG
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam	100	0%	0%		100%	5.000.000		100%	5.000.000	DISKUMDAG
2	17	02	2		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam	2	17	02	2		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam	100	0	0		100%	5.000.000		100%	5.000.000	DISKUMDAG

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
2	17	02	2	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2	17	02	2	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	48	0	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	48 Unit Usaha	5.000.000	APBD		48 Unit Usaha	5.000.000	DISKUMDAG
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Aktif	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Aktif	100%	100%	100%		100%	60.000.000			100%	60.000.000	DISKUMDAG
2	17	03	2		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	2	17	03	2		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%		65 Unit Usaha	60.000.000			65 Unit Usaha	30.000.000	DISKUMDAG
2	17	03	2	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	17	03	2	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	60	65 Koperasi	60 Koperasi	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	65 Unit Usaha	30.000.000	APBD		65 Unit Usaha	30.000.000	DISKUMDAG
2	17	03	2	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	17	03	2	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	68	68 Koperasi	60 Koperasi	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	68 Unit Usaha	30.000.000	APBD		68 Unit Usaha	30.000.000	DISKUMDAG
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP, KOPERASI	Persentase Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP, KOPERASI	Persentase Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	100	93%	93%		95%	60.000.000			95%	60.000.000	DISKUMDAG
2	17	04	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	2	17	04	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kab/ Kota	100	93%	93%		95%	60.000.000			95%	60.000.000	DISKUMDAG
2	17	04	2	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2	17	04	2	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40	37	37	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000	DISKUMDAG

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	17	04	2	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	2	17	04	2	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	40	37	37	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	40 unit Usaha	30.000.000	APBD		40 unit Usaha	30.000.000	DISKUMDAG
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian	93%	61%	61%		77%	70.000.000			85%	70.000.000	DISKUMDAG
2	17	05	2		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Anggota Operasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	2	17	05	2		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Anggota Operasi yang Telah Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	93%	61%	61%		77%	70.000.000			85%	70.000.000	DISKUMDAG
2	17	05	2	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2	17	05	2	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	450	50	50	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	90 Koperasi	70.000.000	APBD		90	70.000.000	DISKUMDAG
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	11,54%	10,18%	10,18%		10,97%	2.800.000.000			11,33%	70.000.000	DISKUMDAG
2	17	07	2		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi Pengembangan Usaha	2	17	07	2		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang difasilitasi Pengembangan Usaha	40%	40%	40%		40%	2.800.000.000			40%	70.000.000	DISKUMDAG
2	17	07	2	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	17	07	2	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2818	939	939	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	40%	2.700.000.000	APBD		-	-	DISKUMDAG

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB		
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
2	17	07		2	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2	17	07	2	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	4698	939	939	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	940 Unit Usaha	20.000.000	APBD		940 Unit Usaha	15.000.000	DISKUMDAG	
2	17	07		2	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Mendapatkan Perizinan	2	17	07	2	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	4698	939	939	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	940 Unit Usaha	20.000.000	APBD		940 Unit Usaha	15.000.000	DISKUMDAG	
2	17	07		2	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2	17	07	2	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	70	40	40	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000	DISKUMDAG	
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase Peningkatan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro	1,56%	100%	100%		1,12%	328.275.675			1,34%	334.841.188	DISKUMDAG	
2	17	08		2		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	2	17	08	2		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha	105	60	60		20 UMK	328.275.675			20 UMK	334.841.188	DISKUMDAG	
2	17	08		2	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan tehnologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDm, serta Desain dan Teknologi	2	17	08	2	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	20 UMK	60	60	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	20 UMK	328.275.675	APBD		20 UMK	334.841.188	DISKUMDAG	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																										
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP DPMTSP	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP DPMTSP	5 Point	3 Point	3 Point		3 Point	3.261.922.249			4 Point	3.186.486.774	DPMTSP	
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	120 JPL	20 JPL	20 JPL		20 JPL	49.999.500			20 JPL	130.000.000	DPMTSP	
2	18	01		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 %	2.474.381.249			100 %	2.194.130.951	DPMTSP	
2	18	01		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang	32 Orang	26 Orang	Kabupaten Barru	26 Orang / Bulan	2.474.381.249	APBD		#####	2.194.130.951	DPMTSP	

KODE				Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN				Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
															Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	95 Persen	114,29 Persen	95,00 Persen		95 %	49.999.500			95 %	130.000.000	DPMPTSP
2	18	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	18	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 Orang	0 Orang	10 Orang	Kab Barru, Dalam dan Luar Propinsi Sulawesi Selatan	10 Orang	2.242.000	APBD		5 Orang	44.195.238	DPMPTSP
2	18	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	18	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103 Orang	16 Orang	16 Orang	Barru dan Luar Daerah	16 Orang	47.757.500	APBD		15 Orang	85.804.762	DPMPTSP
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 %	401.066.000			100 %	432.755.992	DPMPTSP
2	18	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	18	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1 Paket	2 Paket	Kabupaten Barru	3 Paket	2.096.000	APBD		3 Paket	4.748.585	DPMPTSP
2	18	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	18	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	Kabupaten Barru	1 Paket	12.500.000	APBD		1 Paket	34.955.090	DPMPTSP
2	18	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	18	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	4 Paket	4 Paket	Kabupaten Barru	4 Paket	8.319.000	APBD		4 Paket	22.228.280	DPMPTSP
2	18	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	18	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	1 Paket	Kabupaten Barru	1 Paket	51.227.000	APBD		1 Paket	22.500.000	DPMPTSP
2	18	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	18	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	Kabupaten Barru	1 Paket	6.750.000	APBD		1 Paket	2.750.000	DPMPTSP
2	18	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	18	01	2.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kabupaten Barru	2 Laporan	32.380.000	APBD		2 Laporan	32.168.864	DPMPTSP
2	18	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	18	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1320 Laporan	255 Laporan	250 Laporan	Luar Daerah	250 Laporan	287.794.000	APBD		250 Laporan	313.405.174	DPMPTSP
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD	95 Persen	100 Persen	95 Persen		95 %	83.600.000			95 %	161.033.035	DPMPTSP
2	18	01	2,1	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	18	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	126 Unit	11 Unit	13 Unit	Kabupaten Barru	10 Unit	14.000.000	APBD		13 Unit	59.643.225	DPMPTSP
2	18	01	2,1	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	18	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	12 Unit	12 Unit	Kabupaten Barru	8 Unit	68.400.000	APBD		4 Unit	30.534.898	DPMPTSP
2	18	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	18	01	2.07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	115 Unit	2 Unit	1 Unit	Kabupaten Barru	1 Unit	1.200.000	APBD		1 Unit	70.854.912	DPMPTSP
2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 %	262.700.000			100 %	282.655.217	DPMPTSP
2	18	01	2,1	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	18	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kabupaten Barru	4 Laporan	5.050.000	APBD		4 Laporan	10.876.558	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kabupaten Barru	1 Laporan	2.050.000	APBD		1 Laporan	29.171.440	DPMPTSP
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kabupaten Barru	1 Laporan	255.600.000	APBD		1 Laporan	242.607.219	DPMPTSP
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 %	40.175.000			100 %	115.911.578	DPMPTSP
2	18	01	2,1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 Unit	11 Unit	11 Unit	Kabupaten Barru	12 Unit	34.425.000	APBD		12 Unit	33.177.178	DPMPTSP
2	18	01	2,1	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	34 Unit	Unit	4 Unit	Kabupaten Barru	5 Unit	750.000	APBD		5 Unit	472.366	DPMPTSP
2	18	01	2,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	20 Unit	15 Unit	Kabupaten Barru	10 Unit	5.000.000	APBD		15 Unit	5.738.730	DPMPTSP
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart peraturan per UU an	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kebijakan pro investasi yang tersusun sesuai standart peraturan per UU an	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	63.893.500			1 Point	60.923.070	DPMPTSP
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan fasilitas/ insentif	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persetujuan fasilitas/ insentif	100 Persen	0 Persen	100 Persen		100 %	32.600.000			100 %	8.059.608	DPMPTSP
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	Barru dan Luar Kab.	1 Dokumen	27.000.000	APBD		1 Dokumen	7.823.083	DPMPTSP
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	Kabupaten Barru	1 Dokumen	5.600.000	APBD		#####	236.526	DPMPTSP
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi yang telah mencakup keseluruhan potensi investasi	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi yang telah mencakup keseluruhan potensi investasi	20 Persen	20 Persen	20 Persen		20 %	31.293.500			20 %	52.863.462	DPMPTSP
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Barru, Luar Kab.	4 Dokumen	31.293.500	APBD		4 Dokumen	17.384.628	DPMPTSP
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang berinvestasi	80,86 Persen	80,18 Persen	33,33 Persen		80,16%	70.573.000			1 Point	118.767.704	DPMPTSP
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan pelayanan Promosi Penanaman Modal	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang mendapatkan pelayanan Promosi Penanaman Modal	100 Persen	35 Persen	100 Persen		40 %	70.573.000			45 %	118.767.704	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJA WAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	Kabupaten Barru	1 Dokumen	5.650.000	APBD		1 Dokumen	1.736.438	DPMPTSP
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	Barru, Luar Kab.	2 Dokumen	64.923.000	APBD		2 Dokumen	117.031.266	DPMPTSP
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 Persen	98 Persen	98 Persen		98,98	188.979.000			1 Point	554.421.536	DPMPTSP
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Indeks	90,34 Indeks	91,5 Indeks		92 %	188.979.000			92 %	554.421.536	DPMPTSP
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15216 Pelaku Usaha	2461 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	Kabupaten Barru	2700 Pelaku Usaha	52.340.000	APBD		#####	308.737.259	DPMPTSP
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	3298 Kegiatan Usaha	341 Kegiatan Usaha	550 Kegiatan Usaha	Kabupaten Barru	550 Kegiatan Usaha	125.830.000	APBD		#####	218.593.902	DPMPTSP
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	42 Orang	8 Orang	10 Orang	Kabupaten Barru	10 Orang	8.359.000	APBD		10 Orang	21.373.018	DPMPTSP
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	Barru, Luar Kab.	2 Dokumen	2.450.000	APBD		#####	5.717.357	DPMPTSP
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	695 Milyar	424,18 Milyar	350 Milyar		465 Point	438.200.000			580 Point	349.163.389	DPMPTSP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	25,82 Persen	22,13 Persen	26,99 Persen		28 %	438.200.000			27 %	349.163.389	DPMPTSP
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	399 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	Barru, Luar Kab.	53 Kegiatan Usaha	141.357.000	DAK non Fisik		#####	132.275.864	DPMPTSP
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1004 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	Kabupaten Barru	200 Pelaku Usaha	181.371.000	DAK non Fisik		#####	134.902.084	DPMPTSP
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	163 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	Barru, Luar Kab.	15 Kegiatan Usaha	115.472.000	DAK non Fisik		#####	81.985.441	DPMPTSP
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat efektifitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat efektifitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Point	6.998.000			100 Point	54.121.608	DPMPTSP
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan data dan informasi sesuai standart peraturan per UU an	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterpenuhan data dan informasi sesuai standart peraturan per UU an	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 %	6.998.000			100 %	54.121.608	DPMPTSP
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	36 Dokumen	16 Dokumen	21 Dokumen	Kabupaten Barru	24 Dokumen	6.998.000	APBD		30 Dokumen	54.121.608	DPMPTSP
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	21,30%	-	15%		17,30%	3.246.834.011			19,30%	646.455.394	DISPARPORA
						PERAN PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI						PERAN PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI		1,54%	0,74%	0,91%		1,12%				1,54%		DISPARPORA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	19	02	2		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten / Kota Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kota	2	19	02	2		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten / Kota Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kota	100%	100%	100%		100%	2.896.574.011			100%	590.031.194	DISPARPORA
2	19	02	2	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2	19	02	2	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	570 Orang	-	100 Orang	Kab. Barru	120 Orang	62.006.801	APBD		140 Orang	25.165.000	DISPARPORA
2	19	02	2	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2	19	02	2	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	umlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	900 Orang	180 Orang	140 Orang	Kab. Barru	150 Orang	50.765.700	APBD		230 Orang	60.000.000	DISPARPORA
2	19	02	2	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2	19	02	2	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	360 Orang	-	50 Orang	Kab. Barru	70 Orang	44.532.010	APBD		90 Orang	50.000.000	DISPARPORA
2	19	02	2	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	2	19	02	2	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	50 Orang	-	10 Orang	Kab. Barru	1928	2.739.269.500	APBD		10 Orang	20.000.000	DISPARPORA
2	19	02	2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota	2	19	02	2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota	100 Orang	100%	100%		100%	350.260.000			100%	56.424.200	DISPARPORA
2	19	02	2	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2	19	02	2	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4 Dokumen	1 Doklumen	1 Dokumen	Kab. Barru	1 Dokumen	350.260.000	APBD		1 Dokumen	24.924.200	DISPARPORA
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE KENAIKAN RAIHAN PRESTASI PADA EVENT OLAAHRAGA PROVINSI DAN NASIONAL	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE KENAIKAN RAIHAN PRESTASI PADA EVENT OLAAHRAGA PROVINSI DAN NASIONAL	100%	100%	100%		100%	3.003.973.571			100%	484.102.643	DISPARPORA
2	19	03	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	2	19	03	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%		100%	1.431.944.271			100%	135.000.000	DISPARPORA
2	19	03	2	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2	19	03	2	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	4 Dokumen	-	1 Dokumen	Kab. Barru	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000	DISPARPORA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	19	03	2	03	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2	19	03	2	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	7 Unit	1 Unit	Buttue, Geresi, Matirowalie Kec. Tanete Rilau ; Dusun Banga-bangae, Desa Palakka, Kec Barru ; Pacciro, Kel Takkalasi, Kec Balusu ; Palanro, Kec Mallusetasi	111 Unit	1.416.944.271	APBD		1 Unit	120.000.000	DISPARPORA
2	19	03	2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kabupaten / Kota	2	19	03	2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kabupaten / Kota	100%	-	100%		100%	736.963.300			1%	159.102.643	DISPARPORA
2	19	03	2	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2	19	03	2	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	1 Dokumen	Kab. Barru	100%	567.036.300	APBD		1%	119.102.643	DISPARPORA
2	19	03	2	02	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2	19	03	2	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	1 Dokumen	Kab. Barru	1 Dokumen	169.927.000	APBD		1%	40.000.000	DISPARPORA
2	19	03	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi	2	19	03	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi	100%	-	100%		100%	24.007.000			100%	45.000.000	DISPARPORA
2	19	03	2	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	2	19	03	2	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	92 Orang	-	10 Orang	Kab. Barru	10 Orang	15.000.000	APBD		7 Orang	10.000.000	DISPARPORA
2	19	03	2	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	2	19	03	2	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Barru	1 Dokumen	9.007.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000	DISPARPORA
2	19	03	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	2	19	03	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga	100%	100%	100%		100%	811.059.000			100%	50.000.000	DISPARPORA
2	19	03	2	01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2	19	03	2	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Barru	1 Dokumen	60.516.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000	DISPARPORA
2	19	03	2	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2	19	03	2	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	29 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Barru	6 Dokumen	750.543.000	APBD		6 Dokumen	15.000.000	DISPARPORA
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE LEMBAGA KEPRAMUKAAN YANG AKTIF	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE LEMBAGA KEPRAMUKAAN YANG AKTIF	100%	100%	100%		100%	150.260.000			1 Lembaga	48.000.000	DISPARPORA
2	19	04	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan	2	19	04	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan	100%	100%	100%		100%	150.260.000			100%	48.000.000	DISPARPORA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
22					BIDANG KEBUDAYAAN																			
22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														1.867.513.200				3.594.711.500	
22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase cagar dan karya budaya yang ditetapkan sebagai WBTB					0,33	1.018.143.300			0,33	1.020.272.750	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	02	2	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karya budaya yang dapat dilindungi	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karya budaya yang dapat dilindungi	1 Objek				1 objek	40.000.000			1 objek	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	02	2	01	01	Perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1 Objek	1 Objek		1 objek	40.000.000	DAU		1 objek	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	02	2	02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional	2 Jenis				2 Jenis	809.369.900			2 Jenis	809.369.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	02	2	02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6 Laporan	8 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	685.310.900	DAU		6 Laporan	685.310.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	02	2	02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	430 Sertifikat	50 Sertifikat	90 Sertifikat		90 Sertifikat	124.059.000	DAU		90 orang	124.059.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Adat	1 Keg				1 Lembaga	168.773.400				170.902.850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	02	2	03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	1 Objek			1 Objek	168.773.400	DAU		1 Objek	170.902.850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase kesenian tredisional yang dikembangkan dan dilestarikan sebagai WTB	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase kesenian tredisional yang dikembangkan dan dilestarikan sebagai WTB	300 orang				300 orang	349.022.000			300 orang	349.022.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian Masyarakat	2	22	02	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian Masyarakat	15 group				15 Group	349.022.000			15 Group	349.022.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	03	2	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (di tingkatkan Kompetensinya)	2	22	02	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 orang				300 orang	349.022.000	DAU		300 orang	349.022.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah budaya lokal dan situs bersejarah yang dilestarikan	100%				100	24.500.000			100	253.550.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
22	05	2	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota		2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota		1 Jenis				1 Jenis	24.500.000			1 Jenis	253.550.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	05	2	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah peninggalan sejarah dan situs bersejarah yang dilestarikan	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	27 Unit	11 Orang	11 Orang		27 Unit	24.500.000	DAU		27 Unit	253.550.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23					BIDANG PERPUSTAKAAN																			
23	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	2	3	Barru	3	4.072.648.775	DAU		3	3.538.869.042	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 JPL	0 JPL	20 JPL		20 JPL				20 JPL		
23	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	2	23	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	100%	100%	100%	Barru	100%	3.063.405.475	DAU		100%	2.276.280.902	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2	23	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	33 Orang	28 Orang	Barru	28 Orang	3.063.405.475	DAU		33 Orang	2.276.280.902	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap Keseluruhan ASN	2	23	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap Keseluruhan ASN	100%	0%	100%	Barru	100%	-	DAU		100%	85.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	23	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	0 Orang	8 Orang	Barru	0 Orang	-	DAU		11 Orang	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2	23	01	2,1	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	0 Orang	12 Orang	Barru	0 Orang	-	DAU		14 Orang	65.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	23	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Barru	100%	177.991.000	DAU		100%	307.282.140	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	23	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	0 Paket	4 Paket	Barru	2 Paket	497.500	DAU		6 Paket	500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	23	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1356 Laporan	28 Laporan	368 Laporan	Barru	288 Laporan	177.493.500	DAU		1 Laporan	306.782.140	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	23	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	Barru	100%	42.260.200	DAU		100%	117.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	23	01	2,1	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	1 Unit	Barru	1 Unit	21.631.000	DAU		1 Unit	70.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	23	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	0 Unit	10 Unit	Barru	0 Unit	-	DAU		10 Unit	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
23	01	2,07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	23	01	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	0 Unit	6 Unit	Barru	6 Unit	20.629.200	DAU		4 Unit	22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	2	23	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhihan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100%	100%	100%	Barru	100%	738.699.100	DAU		100%	703.721.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,08	01		Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	23	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	29.117.500	DAU		1 Laporan	29.121.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	23	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	252 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	Barru	60 Laporan	69.981.600	DAU		2 Laporan	35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	23	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	639.600.000	DAU		1 Laporan	639.600.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2	23	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	Barru	100%	50.293.000	DAU		100%	49.585.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,09	02		Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di bayarkan Pajak dan Perizinannya	2	23	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	13 Unit	13 Unit	Barru	13 Unit	26.420.000	DAU		15 Unit	23.075.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	23	01	2,1	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	0 Unit	80 Unit	Barru	0 Unit	-	DAU		80 Unit	2.510.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	23	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	28 Unit	32 Unit	Barru	32 Unit	13.965.000	DAU		32 Unit	14.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	01	2,09	09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	23	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit	Barru	1 Unit	9.908.000	DAU		1 Unit	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah dan Taman Baca	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan Pemustaka pada Perpustakaan Daerah dan Taman Baca	85%	72%	77%	Barru	81%	607.078.000	DAU		88%	1.108.355.480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01			Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten / Kota yang terkelola dengan Baik	2	23	02	2,01		Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten / Kota yang terkelola dengan Baik	100%	38,50%	77%	Barru	100%	607.078.000	DAU		100%	766.663.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 { ITSM : Information Technology Service Management }	2	23	02	2,01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	0 Layanan	1 Layanan	Barru	0 Layanan	-	DAU		1 Layanan	24.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
23	02	2,01	02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten / Kota sesuai Kewenangannya	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Barru	0 Perpustakaan	-	DAU		1 Perpustakaan	8.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01	03		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	6 Eks	0 Eks	6 Eks	Barru	0 Eks	-	DAU		6 Eks	5.300.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01	04		Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	238 Perpustakaan	0 Perpustakaan	238 Perpustakaan	Barru	238 Perpustakkan	107.094.400	DAU	238 Perpustakaan		107.100.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01	05		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	7 Perpustakaan	0 Perpustakaan	7 Perpustakaan	Barru	0 Perpustakaan	-	DAU		7 Perpustakaan	5.263.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01	06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	165 Orang	0 Orang	165 Orang	Barru	0 Orang	-	DAU		165 Orang	70.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01	07		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten / Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 Layanan	0 Layanan	3 Layanan	Barru	0 Layanan	-	DAU		3 Layanan	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01	08		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	5.000 Eks	1.925 Eks	5000 Eks	Barru	5183 Eks	499.983.600	DAU		5000 Eks	500.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01	09		Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2 Eks	0 Eks	2 Eks	Barru	0 Eks	-	DAU		2 Eks	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,01	10		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	0 Dokumen	60 Dokumen	Barru	0 Dokumen	-	DAU		60 Dokumen	11.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan literasi	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan literasi	100%	0%	100%	Barru	100%	-	DAU		100%	341.691.980	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
23	02	2,02	01		Sosialisasi budaya baca pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	260 Lokus	0 Lokus	260 Lokus	Barru	0 Lokus	-	DAU		260 Lokus	269.221.980	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,02	02		Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21 Perpustakaan	0 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Barru	0 Perpustakaan	-	DAU		21 Perpustakaan	57.570.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,02	03		Pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15 Orang	0 Orang	15 Orang	Barru	0 Orang	-	DAU		15 Orang	7.450.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	02	2,02	05		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	15 Orang	0 Orang	15 Orang	Barru	0 Orang	-	DAU		15 Orang	7.450.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24					BIDANG KEARSIPAN																			
24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip sesuai Peraturan Perundang-Undangan	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	55,50%	100%	Barru	100%	33.195.850	DAU		100%	34.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	02	2,01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang di Kelola dengan Baik	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis Daerah Yang di Kelola dengan Baik	100%	0%	100%	Barru	100%	10.296.850	DAU		100%	11.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	02	2,01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	5 Berkas	0 Berkas	1 Berkas	Barru	1 Berkas	3.297.700	DAU		1 Berkas	3.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	02	2,01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	15955 Berkas	0 Berkas	15755 Berkas	Barru	15755 Berkas	6.999.150	DAU		15885 Berkas	7.700.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	02	2,02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik	100%	0%	100%	Barru	100%	11.000.000	DAU		100%	12.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	02	2,02	02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip	0 Arsip	50 Arsip	Barru	50 Arsip	11.000.000	DAU		50 Arsip	12.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	02	2,03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik	100%	0%	100%	Barru	100%	11.899.000	DAU		100%	10.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	02	2,03	02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab. Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	11.899.000	DAU		1 Laporan	10.800.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
24	03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 undang-undang 43 tahun 2009)	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 undang-undang 43 tahun 2009)	66,5	75	60,5	Barru	60,5	17.896.750	DAU		63,5	18.300.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	03	2,01			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100%	0%	100%	Barru	100%	2.699.000	DAU		100%	2.900.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	03	2,01	01		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5 Arsip	0 Arsip	1 Arsip	Barru	2500 Arsip	700.000	DAU		1 Arsip	700.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	03	2,01	02		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2400 Berkas	0 Berkas	2100 Berkas	Barru	2100 Berkas	1.999.000	DAU		2300 Berkas	2.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	03	2,03			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan	100%	0%	100%	Barru	100%	13.997.750	DAU		100%	14.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	03	2,03	03		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	5 Arsip	0 Arsip	1 Arsip	Barru	1 Arsip	7.000.000	DAU		1 Arsip	7.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	03	2,03	04		Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Desa /Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Keluraha n	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	6 Arsip	0 Arsip	1 Arsip	Barru	6 Arsip	6.997.750	DAU		1 Arsip	7.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	03	2,05			Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang	Persentase Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang yang dicari	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang	Persentase Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang yang dicari	100%	0%	100%	Barru	100%	1.200.000	DAU		100%	1.400.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	03	2,05	01		Penilaian dan Penetapan autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	0 Arsip	1 Arsip	Barru	1 Arsip	1.200.000	DAU		1 Arsip	1.400.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN																								
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																								
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan	3				3 Poin	2.995.281.910			3 Poin	2.955.620.699	Dinas Perikanan
						Rata -rata lama pendidikan dan pelatihan kepagawaian							Rata -rata lama pendidikan dan pelatihan kepagawaian	640 JPl				20 jpl	45.000.000			20 jpl	45.000.000	Dinas Perikanan

KODE				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%		100%	1.000.000		100%	500.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Kabupaten Barru	4 Dokumen	500.000	APBD	1 Dokumen	500.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	07	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kabupaten Barru	1 Dokumen	500.000	APBD	1 Laporan	500.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentasePenyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentasePenyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%		100%	2.508.140.832		100%	2.508.140.832	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	25	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	26	Kabupaten Barru	25	2.508.140.835	APBD	25	2.508.140.835	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	32%	20%		20%	46.900.000		20%	45.000.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	25	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	8 Orang	4 orang	Kabupaten Barru	5 Orang	46.900.000	APBD	5 Orang	45.000.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanann administrasi umum perangkat daerah	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanann administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%		100%	293.278.822		100%	286.478.822	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	25	01	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	3 Paket	3 paket	Kabupaten Barru	3 Paket	4.161.600	APBD	3 Paket	4.161.600	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	25	01	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	3 Paket	3 paket	Kabupaten Barru	3 Paket	4.681.800	APBD	3 Paket	4.681.800	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	25	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1400 Laporan	249 Laporan	280 Laporan	Kabupaten Barru	405 laporan	284.435.422	APBD	405 laporan	284.435.422	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%		100%	20.808.000		100%	20.808.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	3	25	01	2,1	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	13 jenis	2 jenis	2 Jenis	Kabupaten Barru	2 jenis	20.808.000	APBD	2 jenis	20.808.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan kantor	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan kantor	100%	100%	100%		100	80.360.496		100	80.360.496	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	25	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4800 Surat	688 Surat	780 Surat	Kabupaten Barru	220 laporan	29.599.380	APBD	220 laporan	29.599.380	Dinas Perikanan

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	01	2.08	.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	25	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kabupaten Barru	12 Laporan	12.484.800	APBD		12 Laporan	12.484.800	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	25	01	2,1	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kabupaten Barru	1 laporan	10.185.516	APBD		3 jenis	10.185.516	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	25	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kabupaten Barru	12 laporan	28.090.800	APBD		7 orang	28.090.800	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100	46.193.760			100	52.593.760	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	25	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 unit	16 Unit	17 Unit	Kabupaten Barru	17 Unit	41.511.960	APBD		17 Unit	41.511.960	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	3	25	01	2,1	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	61 unit			Kabupaten Barru	10 unit	2.080.800	APBD		10 unit	2.080.800	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	.09	pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	25	01	2,1	0009	pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Kabupaten Barru	1 unit	2.601.000	APBD		1 unit	2.601.000	Dinas Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	3	25	.03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	21398,64 Ton	19971,3 Ton	20463,92 Ton		20427 Ton	155.934.000			4,50%	1.146.520.800	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana penangkapan ikan	3	25	.03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana penangkapan ikan	28,84%	-	6,19%		6,04%	80.606.000			6,04	847.926.000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	25	03	2	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kecamatan Mallusetasi, Soppeng Riaja, Balusu Barru dan Tanete Rilau	1 Dokumen	15.606.000	APBD		1 Dokumen	15.606.000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3	25	03	2	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	48 unit			Lompo Tengah Tanete Riaja	10 unit	65.000.000	APBD		8 unit	208.080.000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3	25	.03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	400 unit			Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja, Maluusetasi	670 unit	622.500.000	APBD (DAK)		670 unit	622.500.000	Dinas Perikanan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	3	25	.03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	50 kelompok	8 Kelompok	10 kelompok		10 Kelompok	75.328.000			10 Kelompok	78.030.000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	3	25	03	2	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120 orang	-	20 Orang	Bahusu, Soppeng Riaja Mallusetasi	20 Orang	72.828.000	APBD		20 Orang	72.828.000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3	25	03	2	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	36 kelompok	8 Kelompok	6 kelompok	Bahusu, Soppeng Riaja Mallusetasi	6 kelompok	2.500.000	APBD		6 kelompok	5.202.000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Yang terkelola	3	25	.03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Yang terkelola	4	3	3		3 unit	100.000.000			3 unit	220.564.800	Dinas Perikanan
3	25	03	2.03	.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4	3	3	Kabupaten Barru	1 unit	100.000.000	APBD		1 unit	220.564.800	Dinas Perikanan
3	25	.04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	3	25	.04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	6986,59 Ton	6450 Ton	6583,63 Ton		6625 Ton	1.365.500.000			6%	1.580.802.000	Dinas Perikanan
3	25	.04	2.01		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	3	25	.04	2.01		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha	81 Kelompok	15 Kelompok	15 kelompok		15 kelompok	5.000.000			15 kelompok	83.232.000	Dinas Perikanan
3	25	.04	2.02	.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	3	25	04	2	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	36 Kelompok	-	-	Kabupaten Barru	6 Kelompok	2.500.000	APBD		6 Kelompok	5.202.000	Dinas Perikanan
3	25	.04	2.02	.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3	25	04	2	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	30 Kelompok	7 Kelompok	6 Kelompok	Kabupaten Barru	6 Kelompok	2.500.000	APBD		6 Kelompok	5.202.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)	3	25	4	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)	50 Dok	10 Dok	10 Dok		10 Dok	5.000.000			10 Dok	15.000.000	Dinas Perikanan
3	25	.04	2.03	.01	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3	25	04	2	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 RTP	10 RTP	10 RTP	Kabupaten Barru	10 RTP	5.000.000	APBD		10 RTP	15.000.000	Dinas Perikanan
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha	3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha	80 kelompok	16 kelompok	15 kelompok		15 klp	1.355.500.000			15 klp	1.466.924.000	Dinas Perikanan
3	25	.04	2.04	.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	2	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten Barru	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	20.808.000	Dinas Perikanan

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	.04	2.04	.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	25	04	2	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	700 Unit	39 Unit	150 Unit	Kab. Barru	142 Unit	981.460.000	APBD		150 Unit	956.460.000	Dinas Perikanan
3	25	.04	2.04	.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	3	25	04	2	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Barru	5 Dokumen	5.000.000	APBD		5 Dokumen	5.202.000	Dinas Perikanan
3	25	.04	2.04	.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	3	25	04	2	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	200 Orang	40 Orang	40 Orang	Kab. Barru	40 Orang	5.000.000	APBD		40 Orang	5.202.000	Dinas Perikanan
3	25	.04	2.04	.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	3	25	04	2	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	50 Ha		10 Ha	Kel Coppo	10 Ha	104.040.000	APBD		10 Ha	104.040.000	Dinas Perikanan
3	25	.04	2.04	.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	3	25	04	2	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	150 Orang	-	30 Orang	Soppeng Riaja, Malluisetasi, Balusu	70 Orang	250.000.000	APBD		60 Orang	208.080.000	Dinas Perikanan
3	25	.06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	3	25	.06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	1494 Ton	919,61 Ton	1393 Ton		1407 ton	391.888.800			1407	255.938.400	Dinas Perikanan
3	25	.06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Daftar usaha Pengolahan yang diterbitkan	3	25	.06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Daftar usaha Pengolahan yang diterbitkan	25 Unit	8 Unit	5 Unit		1 Dokumen (5 unit usaha)	7.282.800			1 Dokumen (5 unit usaha)	7.282.800	Dinas Perikanan
3	25	.06	2.01	.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3	25	06	2	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5 Dokumen	(1 Dokumen)	1 Dokumen	Kab Barru	1 Dokumen	7.282.800	APBD		1 Dokumen	7.282.800	Dinas Perikanan
3	25	.06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan dari keseluruhan umkm perikanan	3	25	.06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase usaha skala mikro dan kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan dari keseluruhan umkm perikanan	30,64%	-	4,83%		4,83%	25.606.000			4,83	25.606.000	Dinas Perikanan
3	25	6	2.02	.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3	25	06	2	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit	-	3 Unit	Kab Barru	3 unit	25.606.000	APBD		3 unit	25.606.000	Dinas Perikanan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	.06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku olahan perikanan (TON)	3	25	.06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku olahan perikanan (TON)	3341,08 Ton	2475,5 Ton	3171,66		3227,16	359.000.000			3227,16	209.218.600	Dinas Perikanan
3	25	.06	2.03	.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3	25	06	2	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	8,75%	-19,19	3.5%	Kab Barru	(1,75%) 3227,16 ton	45.169.000	APBD		3227,16 ton	45.169.000	Dinas Perikanan
3	25	.06	2.03	.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	3	25	06	2	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	25 kelompok	8 kelompok	5 kelompok	Tanete Rilau, Barru, Balusu, Soppeng Riaja dan Mallusetasi	200 Orang (20 kelompok)	313.770.000	APBD		5 kelompok	233.049.600	Dinas Perikanan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA																								
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI MATURITAS SPIP DINAS PARIWISATA, DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI MATURITAS SPIP DINAS PARIWISATA, DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	Level 3		Level 3		3 Level	5.412.218.266			4 Level	5.814.881.443	DISPARPORA
						Rata-Rata Lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan							Rata-Rata Lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JPL	-	20 JPL		20 JPL				20 JPL	900.000.000	DISPARPORA
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%		100%	3.329.709.830			100%	4.785.193.443	DISPARPORA
3	26	01	2.03	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	26	01	2.03	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	32 Orang	32 Orang	Kab. Barru	32 Orang	3.329.709.830	APBD		33 Orang	4.785.193.443	DISPARPORA
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	100%	17%		17%	94.805.500			17%	120.000.000	DISPARPORA
3	26	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	5 Orang	29 Orang	Kab. Barru	29 Orang	94.805.500	APBD		29 Orang	120.000.000	DISPARPORA
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%		100%		100%	368.020.000			100%	472.417.000	DISPARPORA
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	1 Paket	5 Paket	Kab. Barru	5 Paket	5.690.000	APBD		5 Paket	13.310.000	DISPARPORA
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	87 Paket	1 Paket	27 Paket	Kab. Barru	15 Paket	2.923.500	APBD		15 Paket	19.965.000	DISPARPORA
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1589 Laporan	167 Laporan	286 Laporan	Kab. Barru	12 Laporan	359.406.500	APBD		12 Laporan	439.142.000	DISPARPORA
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%		100%	1.343.759.286			100%	176.660.000	DISPARPORA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	26	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	26	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110 Unit	2 Unit	11 Unit	Kab. Barru	22 Unit	1.331.914.286	APBD		22 Unit	49.225.000	DISPARPORA
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	26	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	2 Unit	Kab. Barru	2 Unit	11.845.000	APBD		2 Unit	127.435.000	DISPARPORA
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%		100%	227.645.650			100%	243.650.000	DISPARPORA
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Laporan	1 Laporan	300 Laporan	Kab. Barru	12 Laporan	96.343.750	APBD		12 Laporan	143.825.000	DISPARPORA
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	35 Laporan	36 Laporan	7 Laporan	Kab. Barru	12 Laporan	131.301.900	APBD		7 Laporan	99.825.000	DISPARPORA
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100%	100%	100%		100%	48.278.000			100%	136.961.000	DISPARPORA
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	6 Unit	7 Unit	Kab. Barru	7 Unit	27.720.000	APBD		7 Unit	37.268.000	DISPARPORA
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	26	01	2.09	0006	pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	9 Unit	5 Unit	Kab. Barru	5 Unit	10.558.000	APBD		5 Unit	13.310.000	DISPARPORA
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	1 Unit	Kab. Barru	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	39.728.000	DISPARPORA
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PAD PARIWISATA	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PAD PARIWISATA	10%	2%	2%		2%	3.219.644.174			2%	6.090.518.508	DISPARPORA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola dan berkembang	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola dan berkembang	15 Lokasi	5 Lokasi	4 Lokasi		3 Lokasi	3.175.746.874			2 Lokasi	1.912.735.015	DISPARPORA
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	40 Unit	7 Unit	8 Unit	Kab. Barru	8 Unit	3.100.746.874	APBD		8 Unit	1.585.628.000	DISPARPORA
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang direkomendasikan	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang direkomendasikan	25 Usaha	-	5 Usaha		5 Rekomendasi	43.897.300			5 Rekomendasi	72.600.000	DISPARPORA
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	5 Dokumen	1 Laporan	5 Usaha	Kab. Barru	5 Usaha	43.897.300	APBD		1 Laporan	54.450.000	DISPARPORA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAAWAN	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAAWAN	6,09%	54,80%	7,45%		24%	700.226.002			32%	422.072.783	DISPARPORA

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
															Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dilaksanakan	3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	1 Kali		1 Media	700.226.002			1 Media	422.072.783	DISPARPORA
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	26	03	2.01	01	10 Dokumen	2 Doumen	2 Dokuman	Kab. Barru	2 Dokumen	33.545.000	APBD		2 Dokumen	81.400.000	DISPARPORA
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3	26	03	2.01	02	37 Kegiatan	5 Kegiatan	7 Kegiatan	Kab. Barru	8 Laporan	666.681.002	APBD		9 Laporan	333.412.783	DISPARPORA
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE PENINGKATAN EKFRAF YANG MEMILIKI HAKI	3	26	04			100%	-	100%		100%	100.000.000			100%	98.494.000	DISPARPORA
3	26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekraf yang berkembang	3	26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekraf yang berkembang	20 Usaha	-	5 Usaha		5 Sub Sektor	100.000.000			5 Sub Sektor	98.494.000	DISPARPORA
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	3	26	04	2.02	0022	200 Orang	-	40 Orang	Kab. Barru	40 Dokumen	100.000.000	APBD		40 Dokumen	90.508.000	DISPARPORA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA DAN EKRAF	3	26	05			65%	27%	12%		100%	545.628.200			14%	967.211.080	DISPARPORA
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Penduduk yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	720 Orang	160 Orang	140 Orang		140 Orang	420.468.000			140 Orang	787.526.080	DISPARPORA
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	3	26	05	2.01	0008	240 Orang	80 Orang	40 Orang	Kecamatan Tanete Rilau	40 Orang	250.000.000	APBD		40 Orang	372.680.000	DISPARPORA
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3	26	05	2.01	0009	200 Orang	40 Orang	40 Orang	Kec Sopeng Riaja	40 Orang	15.000.000	APBD		40 Orang	186.340.000	DISPARPORA
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	3	26	05	2.01	0010	80 Orang	-	20 Orang	Kab. Barru	20 Orang	150.468.000	APBD		20 Orang	40.835.080	DISPARPORA

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30 Laporan	-	4 Dokumen	Kab. Barru	4 Dokumen	5.000.000	APBD		4 Dokumen	7.986.000	DISPARPORA
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) yang mendapatkan peningkatan kualitas SDM	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) yang mendapatkan peningkatan kualitas SDM	360 Orang	40 Orang	80 Orang		80 Orang	125.160.200			80 Orang	179.685.000	DISPARPORA
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	360 Orang	40 Orang	80 Orang	Kab. Barru	80 Orang	125.160.200	APBD		80 Orang	179.685.000	DISPARPORA
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN																								
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian	Level 3	Level 3	Level 3		3 Poin	13.627.592.700			3 Poin	14.039.573.404	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Rata - rata Lama Penddikan dan Pelatihan Pegawai							Rata - rata Lama Penddikan dan Pelatihan Pegawai	20 JPL	72 JPL	20 JPL		20 JPL	60.000.000			20 JPL	70.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	117.500.000			100%	117.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	0	Kabupaten Barru	2 Dokumen	3.500.000	APBD		2 Dokumen	3.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Kabupaten Barru	1 Laporan	114.000.000	APBD		5 Laporan	114.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	12.946.270.800			100%	13.278.171.441	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/ Bulan	106	115 Orang/ Bulan	Kabupaten Barru	115 Orang/ Bulan	12.916.270.800	APBD		125 Orang/ Bulan	13.248.171.441	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	0	0	Kabupaten Barru	1 Laporan	15.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	0	Kabupaten Barru	4 Laporan	15.000.000	APBD		12 Laporan	15.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
															Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 Persen	0	100 Persen		100%	35.000.000		100%	35.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	27	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	0	0	Kabupaten Barru	1 Dokumen	5.000.000	APBD	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0	0	Kabupaten Barru	1 Laporan	15.000.000	APBD	1 Laporan	15.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	0	1 Laporan	Kabupaten Barru	1 Laporan	15.000.000	APBD	1 Laporan	15.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap keseluruhan ASN	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap keseluruhan ASN	90.54 Persen	11,34 Persen	16.98 Persen		18,86%	60.000.000		18,86%	70.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	11 Orang	2 Orang	Kabupaten Barru	16 Orang	60.000.000	APBD	40 Orang	70.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	239.363.000		100	249.363.235	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0	Kabupaten Barru	1 Paket	7.000.000	APBD	1 Paket	7.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0	1 Paket	Kabupaten Barru	1 Paket	35.000.000	APBD	1 Paket	35.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	2 Paket	Kabupaten Barru	1 Paket	2.363.000	APBD	1 Paket	2.363.235	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	85 Laporan	Dalam dan Luar Daerah	4 Laporan	195.000.000	APBD	4 Laporan	205.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	0	0		100%	25.750.000		100%	25.750.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	0	Kabupaten Barru	2 Unit	25.750.000	APBD	4 Unit	25.750.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	114.708.900		100%	114.788.728	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	24 Laporan	Kabupaten Barru	1 Laporan	22.660.000	APBD	1 Laporan	23.339.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	208 Laporan	Kabupaten Barru	12 Laporan	25.198.900	APBD		12 Laporan	25.198.928	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	Kabupaten Barru	1 Laporan	6.250.000	APBD		1 Laporan	6.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	Kabupaten Barru	12 Laporan	60.600.000	APBD		12 Laporan	60.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 Persen	50 Persen	100 Persen		100%	149.000.000			100%	149.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	15 Unit	16 Unit	Kabupaten Barru	29 Unit	41.000.000	APBD		29 Unit	41.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	0	Kabupaten Barru	1 Unit	100.000.000	APBD		2 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	7 Unit	Kabupaten Barru	1 Unit	3.000.000	APBD		5 Unit	3.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	27	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1 Unit	0	Kabupaten Barru	2 Unit	5.000.000	APBD		8 Unit	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Tahunan	3	27	02			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Tahunan	8,98 Persen	5,99 Persen	7,48 Persen		7,98%	2.321.435.000			8,48%	2.236.112.485	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun							Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun	4,45 Persen	1,73 Persen	2,95 Persen		3,45%	350.000.000			3,95%	350.000.000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	1.479.375.000			100%	1.401.963.750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	4 Laporan	28 Laporan	Kec.Bahusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	4 Laporan	500.420.000	APBD		4 Laporan	251.963.750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	3 Laporan	978.955.000	APBD		4 Laporan	1.150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengeloaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengeloaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	657.210.000			100%	666.463.485	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	02	2.02	01		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	5 VUB	0	24500 VUB	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 VUB	597.210.000	APBD		5 VUB	606.463.485	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	02	2.02	03		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	60.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	02	2.03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	244.850.000			100%	227.685.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	02	2.03	01		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Laporan	244.850.000	APBD		4 Laporan	227.685.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	02	2.05			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Hijauan Pakan Ternak	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Hijauan Pakan Ternak	100 Persen	0	100 Persen		100%	5.000.000			100%	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJA WAB
																		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	02	2.05	04		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	250 Ton	0	0,7 Ton	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	0,25 Ton	5.000.000	APBD		250 Ton	5.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.06			Penyediaan Benih, Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih, Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100 Persen	57,43 Persen	100 Persen		100%	285.000.000			100%	285.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.06	01		Pengadaan Benih.Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	12.560 Ekor	4. 069 Ekor	1. 114 Ekor	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1320 Ekor	275.000.000	APBD		2.512 Ekor	275.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.06	02		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200 Ton	0	1 Ton	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Ton	10.000.000	APBD		200 Ton	10.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	3	27	03			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1.55 Persen	1,43 Persen	1,47 Persen		1,50%	928.000.000			1.52%	9.420.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian	100 Persen	100 Persen	0		100%	70.000.000			100%	825.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.01	01		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	0	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	35.000.000	APBD		1 Dokumen	135.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.01	02		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	5 Dokumen	0	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Laporan	5.000.000	APBD		4 Laporan	90.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	0	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	450.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun sesuai Standar Peraturan Perundang Undangan	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun sesuai Standar Peraturan Perundang Undangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	858.000.000			100%	9.844.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara Tani	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	60 Unit	6 Unit	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Unit	142.500.000	DAU/DAK		12 Unit	2.450.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	59 Unit	0	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	2 Unit	240.000.000	DAU/DAK		13 Unit	1.560.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	28 Unit	12 Unit	1 Unit	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	2 Unit	250.000.000	DAU/DAK		6 Unit	2.650.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	0	Tellumpanua , Kec. Tanete Rilau	1 Unit	25.000.000	DAU		1 Unit	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	03	2.02	08		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	3 Unit	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Unit	150.000.000	DAU/DAK		7 Unit	1.445.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 Unit	1 Unit	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Unit	50.500.000	DAU/DAK		3 Unit	150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0.21 Persen	-84,5 Persen	0,33 Persen		0,30%	576.839.000			0,27%	579.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penangannan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penangannan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	300.000.000			100%	300.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.01	01		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	4 Laporan	300.000.000	DAU/ DAK Non Fisik		5 Laporan	300.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	60.000.000			100%	60.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.02	01		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	4 Laporan	0	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Laporan	15.000.000	APBD		4 Laporan	15.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	7 Laporan	45.000.000	APBD		7 Laporan	45.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	131.079.000			100%	133.900.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	2 Laporan	100.000.000	DAU/ DAK Non Fisik		2 Laporan	103.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	2 Laporan	31.079.000	DAU/ DAK Non Fisik		2 Laporan	30.900.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	15.000.000			100%	15.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Laporan	15.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	70.760.000			100%	70.600.000	Dinas Pertanian dan KP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	7 Kasus	70.760.000	APBD		7 Laporan	70.600.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	05			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kerugian Akibat Bencana Pertanian	3	27	05			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Kerugian Akibat Bencana Pertanian	22 Persen	9 Persen	9 Persen		12%	331.541.000			15.00 %	330.000.000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	331.541.000			100%	330.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	7 Ha	5 Ha	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	5 Ha	180.000.000	APBD		10 Ha	180.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	21 Ha	21 Ha	2 Ha	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	2 Ha	51.541.000	APBD		21 Ha	50.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	4 Laporan	0	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	4 Laporan	100.000.000	APBD		4 Laporan	100.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	06			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	3	27	06			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang memiliki Izin Usaha Sesuai Standart	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	118.000.000			100%	121.090.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pertanian dalam daerah kab/kota	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pertanian dalam daerah kab/kota	100 Persen	0	0		100%	103.000.000			100%	106.090.000	Dinas Pertanian dan KP

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	0	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	25.750.000	APBD		1 Dokumen	26.522.500	Dinas Pertanian dan KP
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	0	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	51.500.000	APBD		1 Dokumen	53.045.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	0	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Laporan	25.750.000	APBD		1 Laporan	26.522.500	Dinas Pertanian dan KP
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	15.000.000			100%	15.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	06	2.03	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	2 Laporan	15.000.000	DAU		2 Laporan	15.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	100 Persen	11,24 Persen	20 Persen		20%	859.650.000			20%	864.650.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100%	859.650.000			100%	864.650.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	7 Unit	200.000.000	DAU / DAK Non Fisik		7 Unit	200.000.000	Dinas Pertanian dan KP

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJA WAB
																		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	27	07	2.01	02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	7 Unit	300.000.000	DAU/ DAK Non Fisik		7 Unit	305.000.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	07	2.01	03		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	7 Unit	7 Unit	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	7 Unit	259.650.000	APBD		7 Unit	259.650.000	Dinas Pertanian dan KP
3	27	07	2.01	05		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	7 Unit	7 Unit	0	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	7 Unit	100.000.000	APBD		7 Unit	100.000.000	Dinas Pertanian dan KP
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN																									
3	30	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	7,50%	0,00%	95%		37,97%	30.000.000			37,97%	30.000.000	DISKUMDAG
3	30	02	2			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	3	30	02	2		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	7,50%	0,0%	95%		1,5%	10.000.000			1,5%	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	02	2	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	30	02	2	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60	0	20	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	12 Dokumen	10.000.000	APBD		12	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	02	2			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG Tepat Waktu	3	30	02	2		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG Tepat Waktu	100%	0%	100%		100%	10.000.000			100%	10.000.000	DISKUMDAG

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	30	02	2	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3	30	02	2	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	20	0	4	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	4 dokumen	10.000.000	APBD		4	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	02	2,1		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	3	30	02	2,1		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	100%	0	100		100%	10.000.000			100%	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	02	2,1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3	30	02	2,1	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4 Kali	0	1	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerja Kab/Kota	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerja Kab/Kota	95%	95%	95%		95%	1.281.392.951			95%	1.307.020.810	DISKUMDAG
3	30	03	2		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerja Kab/Kota	3	30	03	2		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerja Kab/Kota	95%	90%	90%		95%	1.281.392.951			95%	1.307.020.810	DISKUMDAG
3	30	03	2	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	30	03	2	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	20	19	20	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	20 Unit	311.464.051	APBD		20 Unit	337.091.910	DISKUMDAG
3	30	03	2	02	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	30	03	2	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9	8	8	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	9 Unit	969.928.900	APBD		9 Unit	969.928.900	DISKUMDAG
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	≥10	≥10	≥10		≥10	55.000.000			≥10	56.000.000	DISKUMDAG

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	30	04	2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terkendali	3	30	04	2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terkendali	92%	83%	83%		92%	45.000.000			92%	48.000.000	DISKUMDAG
3	30	04	2	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	30	04	2	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20 Laporan	0	4 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	4 Laporan	10.000.000	APBD		4 Laporan	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	04	2	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3	30	04	2	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	12 Laporan	28.000.000	APBD		12 Laporan	28.000.000	DISKUMDAG
3	30	04	2	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3	30	04	2	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Laporan	7.000.000	APBD		1 Laporan	10.000.000	DISKUMDAG
3	30	04	2		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	3	30	04	2		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	90%	0	90%		90%	10.000.000			90%	8.000.000	DISKUMDAG
3	30	04	2	01	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3	30	04	2	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20 Laporan	0	4 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	4 Laporan	5.000.000	APBD		4 Laporan	4.000.000	DISKUMDAG
3	30	04	2	02	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3	30	04	2	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	0	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	4.000.000	DISKUMDAG

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur , Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	3	30	06			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur , Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	100%	89,79%	90,59%		91,39%	205.032.300			100%	209.133.300	DISKUMDAG
3	30	06	2		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera sah yang berlaku Tahun Berjalan	3	30	06	2		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera sah yang berlaku Tahun Berjalan	100%	57,14%	68,06%		79,98%	205.032.300			89,90%	209.133.300	DISKUMDAG
3	30	06	2	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang						3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1099	628	748	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	868 Unit	174.217.300	APBD		988 Unit	1.742.173.000	DISKUMDAG
3	30	06	2	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina						3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	600	120	240	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	360 Orang	30.815.000	APBD		480 Orang	34.916.000	DISKUMDAG
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi dan Kerjasama Perdagangan	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi dan Kerjasama Perdagangan	100%	100	100		100%	10.789.302			100%	11.005.088	DISKUMDAG
3	30	07	2		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi dan Kerjasama Perdagangan	3	30	07	2		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi dan Kerjasama Perdagangan	100%	100	100		100%	10.789.302			100%	11.005.088	DISKUMDAG
3	30	07	2	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3	30	07	2	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20 UMKM	5 UMKM	5 UMKM	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	5 UMKM	10.789.302	APBD		5 UMKM	11.005.088	DISKUMDAG
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN																								
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIK	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIK	100%	100%	100%		100%	480.000.000			20%	490.000.000	DISKUMDAG
3	31	02	2		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok IKM yang meningkat Kualitasnya	3	31	02	2		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok IKM yang meningkat Kualitasnya	15 Klp	3 Kelompok	3 Kelompok		3 Kelompok	480.000.000			3 Kelompok	490.000.000	DISKUMDAG

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	31	02	2	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3	31	02	2	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5	1 Laporan	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	110.000.000	DISKUMDAG
3	31	02	2	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3	31	02	2	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5	1 Laporan	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	110.000.000	APBD		1 Dokumen	110.000.000	DISKUMDAG
3	31	02	2	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3	31	02	2	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5	1 Laporan	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	110.000.000	APBD		1 Dokumen	110.000.000	DISKUMDAG
3	31	02	2	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3	31	02	2	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	1 Laporan	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	110.000.000	APBD		1 Dokumen	110.000.000	DISKUMDAG
3	31	02	2	05	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	3	31	02	2	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	5	1 Laporan	1 Laporan	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000	DISKUMDAG
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100%	100%	100%		100%	220.000.000			100%	220.000.000	DISKUMDAG

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	31	03	2		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Peningkatan Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang memiliki izin sesuai dengan Perundang-Undangan	3	31	03	2		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Peningkatan Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang memiliki izin sesuai dengan Perundang-Undangan	100%	100%	100%		100%	220.000.000			100%	220.000.000	DISKUMDAG
3	31	03	2	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	3	31	03	2	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Sin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	5	1	1	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000	DISKUMDAG
3	31	03	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kabupaten/Kota	3	31	03	2	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kabupaten/Kota	5	1	1	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000	DISKUMDAG
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional	100	100%	100%		100%	52.000.000			100%	53.700.000	DISKUMDAG
3	31	04	2		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Industri	3	31	04	2		Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Industri	100	100%	100%		100%	52.000.000			100%	53.700.000	DISKUMDAG

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJA WAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	31	04	2	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistim Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3	31	04	2	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5	1	1	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000	DISKUMDAG
3	31	04	2	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3	31	04	2	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5	1	1	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	12.000.000	APBD		1 Dokumen	13.700.000	DISKUMDAG
3	31	04	2	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3	31	04	2	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5	1	1	Kec.Balusu, Soppeng Riaja, Mallusetasi, Barru, Pujananting, Tanete Rilau, Tanete Riaja	1 Dokumen	15.000.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000	DISKUMDAG
					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
1					SEKRETARIAT DAERAH																			
01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	100%	100%	100%	Barru	100%	250.539.000	APBD		100%	192.909.500	
01	03	2.01			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Ketersediaan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Ketersediaan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	20 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi		4 Rekomendasi	250.539.000			4 Rekomendasi	192.909.500	Bag. Perekonomian dan SDA
01	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10	2	2		2 Dok	22.000.000			2 Dok	22.000.000	Bag. Perekonomian dan SDA
01	03	2.01	02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	15	3	3		4 Laporan	29.785.000			3 Laporan	29.785.000	Bag. Perekonomian dan SDA
01	03	2.01	03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5	1	1		1 Dok	79.774.500			1 Dok	79.785.000	Bag. Perekonomian dan SDA
01	03	2.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	5	1	1		1 Dok	118.979.500			1 Dok	61.339.500	Bag. Perekonomian dan SDA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Rata-rata capaian kinerja Program Sekretariat Daerah	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Rata-rata capaian kinerja Program Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	Barru	100%	313.131.500	APBD		100%	399.701.962	
01	03	2.02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian,dan movev yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian,dan movev yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%		100%	313.131.500			100%	399.701.962	Bag. Adm. Pemb
01	03	2.02	01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5	1	1		1 Dok	21.818.500			1 Dok	28.642.455	Bag. Adm. Pemb
01	03	2.02	02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5	1	1		1 Laporan	268.734.500			1 Laporan	349.733.560	Bag. Adm. Pemb
01	03	2.02	03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5	1	1		1 Laporan	22.578.500			1 Laporan	21.325.948	Bag. Adm. Pemb
01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80 s/d 99	25,4	60 s/d 80	Barru	60 s/d 80	348.107.000	APBD		60 s/d 80	375.000.000	
01	03	2.03			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	15 Jenis	3 jenis	3 Jenis		3 Jenis	348.107.000			3 Jenis	375.000.000	
						Persentase pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan sistem pengadaan pemerintah							Persentase pengadaan barang/jasa yang memanfaatkan sistem pengadaan pemerintah	100%	100%	100%		100%				100%		
01	03	2.03	01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250	50	50		50 Dok	200.250.000			50 Dok	210.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	03	2.03	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10	2	2		2 Dok	99.194.500			2 Dok	110.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	03	2.03	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10	2	2		2 Orang	48.662.500			2 Orang	55.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	100%	100%	100%	Barru	100%	61.339.500	APBD		100%	12.375.000	
01	03	2.04			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan	100%	100%	100%		100%	61.339.500			100%	12.375.000	
01	03	2.04	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	1	1		1 Dok	61.339.500			1 Dok	12.375.000	Bag. Perekonomian dan SDA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	4,00			3,00	Barru	3,00	33.995.375.919	APBD		3,00	36.825.344.798	
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan																		
						Tingkat Kematangan Organisasi																		
01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	4	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100%	100%	100%		100%	9.801.690.196			100%	12.593.947.739	
01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4	01	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92	92	92		92 Orang/Bulan	9.801.690.196			92 Orang/Bulan	12.593.947.739	Bagian Umum
01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	4	01	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	100%	100%		100%	445.617.100			100%	628.677.965	
01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	01	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	0	5		2 Orang	12.478.000			5 Orang	57.500.000	Bagian Umum
01	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	01	01	2,1	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	3	5		2 Orang	3.982.500			5 Orang	9.625.000	Bag. Adm. Pemb
01	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								24	6	6		6 Orang	11.125.500			6 Orang	11.125.500	Bag. Kesejahteraan Rakyat
01	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								15	20	3		3 Orang	10.852.600			3 Orang	12.100.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								30	6	6		6 Orang	10.387.000			6 Orang	11.125.500	Bagian Hukum
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								15	3	3		2 Orang	21.835.000			3 Orang	48.147.110	Bag. Adm. Pemb
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								30	6	6		4 Orang	34.343.500			6 Orang	108.900.000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								100	20	20		20 Orang	110.938.000			20 Orang	121.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								35	0	7		4 Orang	23.741.000			7 Orang	50.820.000	Bag. Pemerintahan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	01	01	2,1	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	2	10		2 Orang	42.946.000			10 Orang	46.898.000	Bag. Perekonomian dan SDA
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								30	6	6		6 Orang	37.752.000			6 Orang	43.711.855	Bagian Protokol
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								40	8	8		8 Orang	50.243.000			8 Orang	54.558.000	Bagian Hukum
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								21	0	6		19 Orang	49.735.000			3 Orang	4.800.000	Bagian Umum
01	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								15	3	3		3 Orang	25.258.000			3 Orang	48.367.000	Bagian Organisasi
01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	4	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%		100%	4.535.843.825			100%	4.139.630.676	
01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	01	01	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	12	12		12 Paket	74.431.400			12 Paket	89.030.700	Bagian Umum
01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	01	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	0	4		4 Paket	967.000			4 Paket	900.000	Bag. Pemerintahan
01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								20	4	4		4 Paket	50.173.925			4 Paket	51.750.000	Bagian Umum
01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	01	01	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	6	6		6 Paket	146.350.000			6 Paket	208.899.455	Bagian Umum
01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	01	01	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25000	5000	5000		5000 Paket	2.913.400			5000 Paket	3.460.000	Bag. Adm. Pemb
01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								30000	6000	6000		6000 Paket	3.000.000			6000 Paket	3.000.000	Bagian Hukum
01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan								49420	0	9884		0 Paket	-			9884 Paket	4.942.000	Bagian Organisasi
01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	01	01	2,1	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	1	1		1 Laporan	1.865.048.500			1 Laporan	1.695.506.188	Bagian Umum
01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								310	62	62		62 Laporan	66.093.500			62 Laporan	54.000.000	Bag. Adm. Pemb
01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								750	150	150		150 Laporan	105.000.000			150 Laporan	100.000.000	Bag. Kesejahteraan Rakyat

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	01	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	70	70		70 Laporan	47.591.600			70 Laporan	70.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								690	138	138		102 Laporan	80.012.000			138 Laporan	85.000.000	Bag. Pemerintahan
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								606	101	101		101 Laporan	146.816.500			101 Laporan	146.825.600	Bag. Perekonomian dan SDA
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								77	9	17		17 Laporan	30.454.000			17 Laporan	17.696.900	Bagian Protokol
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								270	54	54		54 Laporan	35.440.000			54 Laporan	42.477.500	Bagian Hukum
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								2045	409	409		409 Laporan	1.769.332.000			409 Laporan	1.512.474.833	Bagian Umum
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								150	30	30		30 Laporan	112.220.000			30 Laporan	53.667.500	Bagian Organisasi
01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	01	01	2,1	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	0	1		0 Dok	-		1 Dok	-	Bagian Umum	
01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%		100%	808.229.547			100%	1.097.507.030	
01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	01	01	2,1	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	0	1		0 Unit	-			1 Unit	-	Bagian Hukum
01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	01	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	0	1		0 Unit	-			1 Unit	1.500.000	Bagian Hukum
01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								32	0	6		6 Unit	64.300.000			7 Unit	86.130.615	Bagian Umum, Bag. Adm. Pemb, Bag. Protokol
01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								9	0	4		0 Unit	-			2 Unit	18.150.000	Bagian Organisasi
01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	01	01	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	1	2		2 Unit	30.060.000			2 Unit	5.000.000	Bag. Adm. Pemb
01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								15	3	3		3 Unit	30.000.000			3 Unit	30.000.000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								25	2	5		5 Unit	40.000.000			5 Unit	40.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								8	2	1		2 Unit	25.000.000			2 Unit	14.500.000	Bag. Perekonomian dan SDA
01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								12	1	2		2 Unit	165.000.000			2 Unit	17.955.000	Bagian Protokol

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								15	0	3		3 Unit	20.000.000			3 Unit	20.000.000	Bagian Hukum
01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								23	5	5		5 Unit	184.686.797			5 Unit	302.500.000	Bagian Umum
01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								15	3	3		3 Unit	60.179.000			3 Unit	21.450.000	Bagian Organisasi
01	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	01	01	2,1	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	8	8		8 Unit	136.843.750			8 Unit	222.821.415	Bagian Umum
01	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	01	01	2,1	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55	11	11		11 Unit	28.160.000			11 Unit	317.500.000	Bagian Umum
01	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								4	2	0		2 Unit	24.000.000			2 Unit	-	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	4	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%		100%	8.971.311.840			100%	9.126.486.945	
01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								50	10	10		12 Laporan	14.050.900			12 Laporan	13.000.000	Bag. Adm. Pemb
01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								50	10	10		12 Laporan	16.500.000			12 Laporan	15.000.000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								50	10	10		12 Laporan	21.507.500			12 Laporan	20.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								50	10	10		12 Laporan	11.964.000			12 Laporan	11.000.000	Bag. Pemerintahan
01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	01	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	10	10		12 Laporan	8.497.000			12 Laporan	7.469.800	Bag. Perekonomian dan SDA
01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								50	10	10		12 Laporan	13.000.000			12 Laporan	17.128.300	Bagian Protokol
01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								50	10	10		12 Laporan	5.646.600			12 Laporan	4.787.000	Bagian Hukum
01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								50	10	10		12 Laporan	190.741.200			12 Laporan	250.000.000	Bagian Umum
01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								50	10	10		12 Laporan	14.025.300			12 Laporan	14.057.450	Bagian Organisasi
01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	01	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12		12 Laporan	6.462.897.300			12 Laporan	6.263.352.975	Bagian Umum

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	01	01	2,1	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	0	3		3 Laporan	673.939.040			3 Laporan	674.018.795	Bagian Umum
01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								10	0	2		2 Laporan	29.068.000			2 Laporan	20.000.000	Bag. Pemerintahan
01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	01	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1	1		1 Laporan	1.509.475.000			1 Laporan	1.816.672.625	Bagian Umum
01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	4	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100%	2.709.220.900			100%	2.535.509.825	
01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	01	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	5	5		5 Unit	702.540.600			5 Unit	610.910.360	Bagian Umum
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	01	01	2,1				4	4	4		4 Unit	9.000.000			4 Unit	10.500.000	Bag. Adm. Pemb
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								4	4	4		4 Unit	18.150.000			4 Unit	15.000.000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								2	2	2		2 Unit	8.397.300			2 Unit	10.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								1	1	1		1 Unit	7.500.000			1 Unit	7.500.000	Bag. Pemerintahan
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								3	3	3		3 Unit	8.500.000			3 Unit	8.500.000	Bag. Perekonomian dan SDA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								1	1	1		1 Unit	13.750.000			1 Unit	12.500.000	Bagian Protokol
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								1	1	1		1 Unit	7.500.000			1 Unit	7.550.000	Bagian Hukum
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								68	68	68		68 Unit	610.261.500			68 Unit	530.719.250	Bagian Umum
01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								1	1	1		1 Unit	10.000.000			1 Unit	10.000.000	Bagian Organisasi
01	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	01	01	2.1	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	0	4		0 Unit	-			4 Unit	-	Bagian Hukum
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								3	3	3		3 Unit	4.920.000			3 Unit	4.065.000	Bag. Adm. Pemb
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								3	3	3		3 Unit	3.630.000			3 Unit	3.000.000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								3	3	3		3 Unit	1.355.000			3 Unit	2.000.000	Bag. Pengadaan Barang/Jasa
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								3	3	3		3 Unit	4.485.000			3 Unit	4.630.000	Bag. Pemerintahan
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	01	01	2.1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	3		3 Unit	3.550.000			3 Unit	2.355.000	Bag. Perekonomian dan SDA
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								4	4	4		4 Unit	3.065.000			4 Unit	3.000.000	Bagian Protokol
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								3	3	3		3 Unit	2.950.000			3 Unit	3.000.000	Bagian Hukum
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								4	4	4		4 Unit	19.985.000			4 Unit	17.556.190	Bagian Umum
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								3	3	3		3 Unit	2.662.000			3 Unit	4.630.000	Bagian Organisasi
01	01	2.09	07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	01	01	2.1	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	0	2		0 Unit	-			2 Unit	-	Bag. Kesejahteraan Rakyat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	01	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	6	6		6 Unit	757.019.500			6 Unit	768.094.025	Bagian Umum
01	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	01	01	2,1	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	6	6		6 Unit	510.000.000			6 Unit	500.000.000	Bagian Umum
01	01	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	01	01	2,1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%		100%	5.780.184.611			100%	6.102.220.957	
01	01	2.11	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	01	01	2,1	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2		2 Orang/Bulan	568.412.361			2 Orang/Bulan	712.220.957	Bagian Umum
01	01	2.11	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	01	01	2,1	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	45	9	9		9 Paket	172.300.000			9 Paket	350.000.000	Bagian Umum
01	01	2.11	03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	01	01	2,1	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40	8	8		8 Orang	289.800.000			8 Orang	290.000.000	Bagian Umum
01	01	2.11	04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	01	01	2,1	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20	4	4		4 Orang/Bulan	4.749.672.250			4 Orang/Bulan	4.750.000.000	Bagian Umum
01	01	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga yang difasilitasi kebutuhannya pada Sekretariat Daerah	4	01	01	2,1		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga yang difasilitasi kebutuhannya pada Sekretariat Daerah	100%	100%	100%		100%	884.993.000			100%	885.000.000	
01	01	2.12	01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4	01	01	2,1	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	1		1 Paket	469.995.000			1 Paket	470.000.000	Bagian Umum
01	01	2.12	02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4	01	01	2,1	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	1		1 Paket	350.000.000			1 Paket	350.000.000	Bagian Umum
01	01	2.12	03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4	01	01	2,1	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	1	1		1 Paket	64.998.000			1 Paket	65.000.000	Bagian Umum
01	01	2.13			Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang terlaksana sesuai Peraturan Perundang-Undangan	4	01	01	2,1		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi yang terlaksana sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%		100%	487.325.300			100%	558.792.399	
01	01	2.13	01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	01	01	2,1	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	30	6	6		6 Dok	128.417.200			6 Dok	234.760.582	Bagian Organisasi
01	01	2.13	02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	01	01	2,1	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	1	1		1 Laporan	156.497.400			1 Laporan	156.497.649	Bagian Organisasi
01	01	2.13	03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	01	01	2,1	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	1	1		1 Dok	92.259.200			1 Dok	76.999.814	Bagian Organisasi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2.13	04		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	01	01	2,1	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	1	1		1 Dok	72.693.500			1 Dok	72.112.249	Bagian Organisasi
01	01	2.13	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4	01	01	2,1	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	1	1		1 Dok	37.458.000			1 Dok	18.422.105	Bagian Organisasi
01	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprorotokolsn, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	4	01	01	2,1		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprorotokolsn, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	100%	100%	100%		100%	503.902.000			100%	345.041.627	
01	01	2.14	01		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4	01	01	2,1	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	5	1	1		1 Laporan	211.166.000			1 Laporan	150.000.000	Bagian Protokol
01	01	2.14	02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4	01	01	2,1	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5	1	1		1 Laporan	159.668.000			1 Laporan	73.786.500	Bagian Protokol
01	01	2.14	03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	01	01	2,1	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5	1	1		1 Laporan	133.068.000			1 Laporan	121.255.127	Bagian Protokol
01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3,5000	3,3044	3,3697		3,4005	572.204.500			3,4005	755.134.340	
01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaporan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaporan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%		100%	491.969.000			100%	666.640.770	
01	02	2.01	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6	0	1		1 Dok	43.949.500			1 Dok	151.775.883	Bag. Pemerintahan
01	02	2.01	02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	1	1		1 Dok	118.019.500			1 Dok	151.039.887	Bag. Pemerintahan
01	02	2.01	03		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	24	4	4		4 Dok	330.000.000			4 Dok	363.825.000	Bag. Pemerintahan
01	02	2.04			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang ditetapkan	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang ditetapkan	50 MOU	10 MOU	10 MOU		10 MOU	80.235.500			10 MOU	88.493.570	
01	02	2.04	01		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5	1	1		1 Dok	80.235.500			1 Dok	88.493.570	Bag. Pemerintahan
01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai hasil evaluasi RB pada Penataan PerUUan	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai hasil evaluasi RB pada Penataan PerUUan	5	3	3		4	598.284.000			4	732.050.000	
01	02	2.03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Perda dan Perbub yang ditetapkan	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Perda dan Perbub yang ditetapkan	50 Perda dan 100 Perbub	10 Perda dan 20 Perbub	10 Perda dan 20 Perbub		10 Perda dan 20 Perbub	598.284.000			10 Perda dan 20 Perbub	732.050.000	Bagian Hukum
01	02	2.03	01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	15	3	3		3 Dok	349.869.000			3 Dok	399.300.000	Bagian Hukum
01	02	2.03	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15	3	3		3 Kasus	126.586.000			3 Kasus	166.375.000	Bagian Hukum
01	02	2.03	03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1	1	1		1 Dok	121.829.000			1 Dok	166.375.000	Bagian Hukum

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan	100%	100%	100%		100%	17.344.067.853			100%	24.788.467.762	
01	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun sesuai aturan Perundang-Undangan	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun sesuai aturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%		100%	17.344.067.853			100%	24.788.467.762	
01	02	2.02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	1	1		1 Dok	5.213.391.353			1 Dok	4.706.779.169	Bag. Kesejahteraan Rakyat
01	02	2.02	02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5	1	1		1 Dok	10.090.400.000			1 Dok	10.013.150.000	Bag. Kesejahteraan Rakyat
01	02	2.02	03		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	10	2	2		2 Dok	2.040.276.500			2 Dok	10.068.538.593	Bag. Kesejahteraan Rakyat
2					SEKRETARIAT DPRD																			
2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat DPRD	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Sekretariat DPRD	4,0				3.0	17.195.766.587			4.0	17.045.463.229	Sekretariat DPRD
						Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100				20 JPL				20 JPL		Sekretariat DPRD
2	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	4	02	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%		100%	2.010.510.003			100%	1.833.495.779	Sekretariat DPRD
2	1	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima dan tunjangannya untuk tiap bulannya selama 1 Tahun	4	02	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110	22	18		18	2.010.510.003			22	1.833.495.779	Sekretariat DPRD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi Tekhnis terhadap keseluruhan ASN	4	02	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi Tekhnis terhadap keseluruhan ASN	100%	100%	100%		100%	60.960.500			100%	61.067.730	Sekretariat DPRD
2	1	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur/ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4	02	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44	13	10		10	46.615.000			10	46.696.996	Sekretariat DPRD
2	1	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4	02	01	2,1	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31	8	7		7	14.345.500			7	14.370.734	Sekretariat DPRD
2	1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	02	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhihan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%	964.390.500			100%	966.086.863	Sekretariat DPRD
2	1	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	4	02	01	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	3	1		2	43.375.000			1	43.451.297	Sekretariat DPRD
2	1	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Berdasarkan Jenisnya	4	02	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	4	5		3	29.322.000			3	29.373.577	Sekretariat DPRD
2	1	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Berdasarkan Jenisnya	4	02	01	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14	3	4		3	88.194.500			3	88.349.634	Sekretariat DPRD
2	1	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Berdasarkan Jenisnya	4	02	01	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	4	2		4	58.640.000			2	58.743.148	Sekretariat DPRD
2	1	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/media cetak yang tersedia selama 1 Tahun	4	02	01	2,1	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	6	5		6	84.000.000			6	84.147.756	Sekretariat DPRD
2	1	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Periodesasi Penyediaan Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka fasilitasi tamu	4	02	01	2,1	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12		12	113.582.500			12	113.782.292	Sekretariat DPRD
2	1	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	4	02	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2340	12	12		468	547.276.500			468	548.239.159	Sekretariat DPRD
2	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	02	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%		100%	46.135.000			100%	46.216.151	Sekretariat DPRD
2	1	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Tersedia	4	02	01	2,1	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-		3	-			1	-	Sekretariat DPRD
2	1	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia	4	02	01	2,1	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-		0	-			0	-	Sekretariat DPRD
2	1	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Meubel Yang Tersedia	4	02	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35	5	1		7	11.000.000			7	11.019.349	Sekretariat DPRD
2	1	2	07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Tersedia	4	02	01	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	8	16		7	35.135.000			7	35.196.802	Sekretariat DPRD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumkah Gedung Yang Terbangun	4	02	01	2,1	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-		0	-			0	-	Sekretariat DPRD
2	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan jasa penunjang urusan kantor	4	02	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%		100%	1.074.389.700			100%	1.076.279.551	Sekretariat DPRD
2	1	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk	4	02	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000	12	12		12	4.014.700			400	4.021.762	Sekretariat DPRD
						Jumlah Surat Keluar																		Sekretariat DPRD
2	1	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periodesasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	02	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180	36	48		36	334.875.000			36	335.464.045	Sekretariat DPRD
2	1	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	02	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	240	48	60		48	735.500.000			48	736.793.745	Sekretariat DPRD
2	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	4	02	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100%	941.409.500			100%	943.065.439	Sekretariat DPRD
2	1	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil / Kendaraan Dinas Jabatan / Perorangan Yang Di Pelihara	4	02	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	7		7	218.232.000			7	218.615.870	Sekretariat DPRD
						Jumlah Mobil / Kendaraan Dinas Jabatan / Perorangan Yang Di Bayarkan Pajak dan Perizinannya																		Sekretariat DPRD
2	1	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil / Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Di Pelihara	4	02	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	9	16		12	196.650.000			12	196.995.907	Sekretariat DPRD
						Jumlah Mobil / Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Di Bayarkan Pajak dan Perizinannya																		Sekretariat DPRD
2	1	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jeni Peralatan Mesin yang di pelihara	4	02	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	6	36		40	20.710.000			40	20.746.429	Sekretariat DPRD
2	1	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara	4	02	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	4	4		7	505.817.500			7	506.707.233	Sekretariat DPRD
2	1	2	15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpunuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4	02	01	2,2		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpunuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%		100%	10.804.322.884			100%	10.823.327.688	Sekretariat DPRD
2	1	2	15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima dan tunjangannya untuk tiap bulannya selama 1 Tahun	4	02	01	2,2	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25	25	25		25	10.059.397.884			25	10.077.092.365	Sekretariat DPRD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2	1	2	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang Tersedia	4	02	01	2,2	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	3	3		1	617.400.000			1	618.486.007	Sekretariat DPRD
2	1	2	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Layanan general check up	4	02	01	2,2	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25	25	25		25	127.525.000			25	127.749.316	Sekretariat DPRD
2	1	2	16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	4	02	01	2,2		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%		100%	1.293.648.500			100%	1.295.924.028	Sekretariat DPRD
2	1	2	16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Yang Telaksana	4	02	01	2,2	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	460	12	92		92	273.428.500			92	273.909.461	Sekretariat DPRD
2	1	2	16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Keburuhan Rumah Tangga DPRD yang Tersedia	4	02	01	2,2	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	15	3	4		3	1.020.220.000			3	1.022.014.567	Sekretariat DPRD
					Persentase Keterpenuhan Dukungan Persidangan, Administrasi serta Sarana dan Prasarana penunjang dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD													100%				100%		
2	2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda Yang Ditetapkan Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda Yang Ditetapkan Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%		100%	10.650.591.250			100%	8.707.046.250	Sekretariat DPRD
2	2	2	01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Ditetapkan Menjadi Perda sesuai Prolegda	4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Ditetapkan Menjadi Perda sesuai Prolegda	100%	100%	100%		100%	1.439.832.000			100%	1.387.950.000	Sekretariat DPRD
2	2	2	01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang di bahas dan di tetapkan menjadi Perda Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	4	02	02	2,01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	75	3	3		9	316.467.500			15	33.000.000	Sekretariat DPRD
2	2	2	01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Kajian Perundang-Undangan yang di laksanakan	4	02	02	2,01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	375	38	0		50	-			75	904.950.000	Sekretariat DPRD
2	2	2	01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik Yang Tersusun	4	02	02	2,01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	15	2	4		8	1.123.364.500			3	450.000.000	Sekretariat DPRD
2	2	2	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitas SDM nya	4	02	02	2		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitas SDM nya	25	25	25		25	2.245.678.250			25	1.572.859.000	Sekretariat DPRD
2	2	2	04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti workshop dalam Peningkatan kapasitas	4	02	02	2,04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25	25	25		108	1.156.858.250			154	1.004.259.000	Sekretariat DPRD
2	2	2	04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	02	02	2,04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	500	4	4		100	458.820.000			100	64.600.000	Sekretariat DPRD
2	2	2	04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar dan Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Yang Di Bayarkan Gajimya selama 1 Tahun	4	02	02	2,04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27	6	9		9	378.000.000			6	252.000.000	Sekretariat DPRD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
2	2	2	04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Pendamping Fraksi dan Komisi yang di bayarkan gajinya selama 1 tahun	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	33	9	6		9	252.000.000			6	252.000.000	Sekretariat DPRD	
2	2	2		05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%		100%	3.305.985.000			100%	1.912.925.000	Sekretariat DPRD	
2	2	2	2	05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	125	9	660		25	51.700.000			25	79.500.000	Sekretariat DPRD
2	2	2	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses anggota DPRD yang difasilitasi	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	375	75	75		75	3.254.285.000			75	1.833.425.000	Sekretariat DPRD
2	2	2	2	08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Tugas DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Tugas DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%		100%	3.659.096.000			100%	3.833.312.250	Sekretariat DPRD
2	2	2	2	08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana terkait pemenuhan Tugas DPRD	4	02	02	2.08	001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	125	12	395		25	3.659.096.000			25	3.833.312.250	Sekretariat DPRD
					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
1					PERENCANAAN																				
01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	Level 1	Level 3		Level 3	3.480.787.198			Level 3	3.646.840.598	BAPPELITBANGDA	
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							20 JPL	20 JPL	20 JPL		20 JPL	BAPPELITBANGDA							
01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	5	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%		100%	2.986.390.406			100%	2.986.390.406	BAPPELITBANGDA	
01	01	2.02	1,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	01	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	Barru	27 Orang/bulan	2.986.390.406	DAU		27 Orang/bulan	2.986.390.406	BAPPELITBANGDA	
01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	5	01	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian perangkat daerah yang tersusun dan ditetapkan tepat waktu	100%	100%	-		100%	87.776.000			100%	190.000.000	BAPPELITBANGDA	
01	01	2.05	9,00		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	01	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	132 Orang	8 Orang	-	Barru	26 Orang	87.776.000	DAU		30 Orang	190.000.000	BAPPELITBANGDA	
01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	5	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	66,66%	100%		100%	200.147.600			100%	257.169.000	BAPPELITBANGDA	
01	01	2.06	1,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	01	01	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	Barru	1 Paket	4.655.000	DAU		1 Paket	5.850.000	BAPPELITBANGDA	
01	01	2.06	2,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	01	01	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	120 Paket	-	2 Paket	Barru	2 Paket	9.510.600	DAU		2 Paket	32.005.000	BAPPELITBANGDA	
01	01	2.06	3,00		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	01	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	0 Paket	4 Paket	Barru	6 Paket	4.079.000	DAU		6 Paket	10.005.000	BAPPELITBANGDA	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2.06	4,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	01	01	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	1 Paket	4 Paket	Barru	4 Paket	4.152.500	DAU		4 Paket	22.384.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.06	5,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	01	01	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	0 Paket	4 Paket	Barru	4 Paket	6.437.500	DAU		4 Paket	6.732.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.06	8,00		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	01	01	2,1	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	1.920.000	DAU		12 Laporan	10.800.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.06	9,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	01	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 Laporan	85 Laporan	92 Laporan	Barru	126 Laporan	169.393.000	DAU		126 Laporan	169.393.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	66,67%	-		100%	34.142.000			100%	44.000.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.07	6,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	01	01	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	2 Unit	-	Barru	9 Unit	34.142.000	DAU		3 Unit	44.000.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	5	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%		100%	127.806.192			100%	127.806.192	BAPPELITBANGDA
01	01	2.08	2,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	01	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	Barru	24 Laporan	52.206.192	DAU		24 Laporan	52.206.192	BAPPELITBANGDA
01	01	2.08	4,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	01	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	75.600.000	DAU		12 Laporan	75.600.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	5	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100%	44.525.000			100%	41.475.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.09	2,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	01	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	3 Unit	3 Unit	Barru	6 Unit	15.025.000	DAU		6 Unit	15.025.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.09	6,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	01	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	273 Unit	9 Unit	24 Unit	Barru	51 Unit	21.450.000	DAU		51 Unit	21.450.000	BAPPELITBANGDA
01	01	2.09	9,00		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	5	01	01	2,1	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	Barru	1 Unit	8.050.000	DAU		1 Unit	5.000.000	BAPPELITBANGDA
01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%		100%	743.142.500			100%	974.000.000	BAPPELITBANGDA
					Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD								Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD	100%	100%	100%		100%				100%		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai peraturan perUUan	100%	100%	100%		100%	655.458.000			100%	819.000.000	BAPPELITBANGDA
01	02	2.01	3,00		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	Barru	1 Berita Acara	11.905.000	DAU		2 Berita Acara	20.000.000	BAPPELITBANGDA
01	02	2.01	4,00		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Barru	1 Berita Acara	23.154.000	DAU		2 Berita Acara	50.000.000	BAPPELITBANGDA
01	02	2.01	5,00		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Barru	2 Berita Acara	90.343.000	DAU		2 Berita Acara	90.000.000	BAPPELITBANGDA
01	02	2.01	7,00		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	44 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	Barru	11 Dokumen	530.056.000	DAU		11 Dokumen	659.000.000	BAPPELITBANGDA
01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	100%	100%	100%		100%	7.221.500			100%	20.000.000	BAPPELITBANGDA
01	02	2.02	02		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	176 Orang	-	44 Orang	Barru	44 Orang	7.221.500	DAU		44 Orang	20.000.000	BAPPELITBANGDA
01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	100%	100%		100%	80.463.000			100%	135.000.000	BAPPELITBANGDA
01	02	2.03	1,00		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	33 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Barru	8 Laporan	12.761.000	DAU		10 Laporan	67.500.000	BAPPELITBANGDA
01	02	2.03	3,00		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	80 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	Barru	16 Laporan	67.702.000	DAU		16 Laporan	67.500.000	BAPPELITBANGDA
01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi dan kajian sektoral yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	100%	100%		100%	558.071.200			100%	510.000.000	BAPPELITBANGDA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahandan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	256 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan		48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	220.566.200			64 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000	BAPPELITBANGD A
01	03	2.01	1,00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	132 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	Barru	24 Dokumen	44.168.400	DAU		36 Dokumen	42.500.000	BAPPELITBANGD A
01	03	2.01	4,00		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Barru	12 Laporan	63.317.000	DAU		12 Laporan	42.500.000	BAPPELITBANGD A
01	03	2.01	5,00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Barru	8 Dokumen	25.217.900	DAU		12 Dokumen	42.500.000	BAPPELITBANGD A
01	03	2.01	8,00		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Barru	4 Laporan	87.862.900	DAU		4 Laporan	42.500.000	BAPPELITBANGD A
01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	96 Rekomendasi / Kajian / Laporan	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan		18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	168.363.600			24 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000	BAPPELITBANGD A
01	03	2.02	1,00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Barru	8 Dokumen	28.831.800	DAU		12 Dokumen	42.500.000	BAPPELITBANGD A
01	03	2.02	4,00		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Barru	4 Laporan	46.587.000	DAU		4 Laporan	42.500.000	BAPPELITBANGD A
01	03	2.02	5,00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Barru	4 Dokumen	57.820.800	DAU		6 Dokumen	42.500.000	BAPPELITBANGD A

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	03	2.02	8,00		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Barru	2 Laporan	35.124.000	DAU		2 Laporan	42.500.000	BAPPELITBANGDA
01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastrukturdan Kewilayahan	Jumlah rekomendasi / kajian / laporan hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	176 Rekomendasi / Kajian / Laporan	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	33 Rekomendasi / Kajian / Laporan		33 Rekomendasi / Kajian / Laporan	169.141.400			44 Rekomendasi / Kajian / Laporan	170.000.000	BAPPELITBANGDA
01	03	2.03	1,00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Barru	8 Dokumen	75.239.800	DAU		12 Dokumen	42.500.000	BAPPELITBANGDA
01	03	2.03	4,00		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Barru	4 Laporan	87.414.000	DAU		4 Laporan	42.500.000	BAPPELITBANGDA
01	03	2.03	5,00		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	Barru	14 Dokumen	2.217.000	DAU		21 Dokumen	42.500.000	BAPPELITBANGDA
01	03	2.03	8,00		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	35 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Barru	7 Laporan	4.270.600	DAU		7 Laporan	42.500.000	BAPPELITBANGDA
2					KEUANGAN																			
02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BKAD	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BKAD				BKAD	3,00	6.241.474.248			4,00	9.427.745.701	BKAD
					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan						20 JPL				20 JPL		
02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD	5	02	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penggaran dan pelaporan hasil evaluasi kinerja BPKAD				BKAD	100%	2.820.500	APBD		100%	2.910.000	BKAD
02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD	5	02	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	1 Dok	2.820.500	APBD		1 Dok	2.910.000	BKAD
02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BPKAD	5	02	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen keuangan BPKAD				BKAD	100%	4.984.430.048	APBD		100%	7.596.128.788	BKAD
02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	5	02	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	BKAD	100%	4.984.430.048	APBD		100%	7.596.128.788	BKAD
02	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berkinerja baik	5	02	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berkinerja baik				BKAD	100%	89.276.000	APBD		100%	150.882.000	BKAD

KODE					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	5	02	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Diklat	7 Diklat	7 Diklat	BKAD	7 Diklat	89.276.000	APBD		7 Diklat	150.882.000	BKAD
02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia	5	02	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan Prasarana BPKAD yang tersedia				BKAD	100%	242.758.500	APBD		100%	290.138.645	BKAD
02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	5	02	01	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	BKAD	3 Jenis	3.845.000	APBD		3 Jenis	3.845.000	BKAD
02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	5	02	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Jenis	12 Jenis	12 Jensi	BKAD	12 Jenis	8.021.000	APBD		12 Jenis	7.179.375	BKAD
02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	5	02	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	BKAD	12 Bulan	230.892.500	APBD		12 Bulan	279.114.270	BKAD
02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan	5	02	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan				BKAD	100%	516.500.000	APBD		100%	938.457.512	BKAD
02	01	2.07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	02	01	2,1	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	0 Unit	0 Unit	BKAD	2 Unit	482.400.000	APBD		2 Unit	40.000.000	BKAD
02	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	02	01	2,1	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	5 Unit	BKAD	-	34.100.000	APBD		-	-	BKAD
02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan				BKAD		306.189.200	APBD			384.728.756	BKAD
02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis jasa surat menyurat yang disediakan	5	02	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	BKAD	4 Jenis	306.189.200	APBD		4 Jenis	384.728.756	BKAD
02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5	02	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					BKAD		99.500.000				64.500.000	BKAD
02	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	5	02	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	5 Unit	5 Unit	BKAD	4 Unit	40.000.000	APBD		24 Unit	40.000.000	BKAD
02	01	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	02	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	5 Unit	5 Unit	BKAD	24 Unit	9.500.000	APBD		24 Unit	9.500.000	BKAD
02	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang dipelihara	5	02	01	2,1	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	BKAD	1 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	15.000.000	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan RKA Tepat Waktu				BKAD	100%	102.801.831.487	APBD		100%	113.576.943.644	BKAD
						Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah							Persentase Realisasi Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Realisasi Penerimaan Kas Daerah					100%				100%		
						Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu							Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu					100%				100%		
						Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu							Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu					100%				100%		
02	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen Anggaran Daerah yang disahkan Tepat Waktu				BKAD	100%	1.416.959.000	APBD		100%	2.348.794.121	BKAD
02	02	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disepakati tepat waktu	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKAD	2 Dok	40.910.000	APBD		2 Dok	44.604.681	BKAD
02	02	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disepakati tepat waktu	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	1 Dok	34.647.000	APBD		1 Dok	34.193.967	BKAD
02	02	2.01	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BKAD	44 SKPD	5.941.500	APBD		44 SKPD	8.907.637	BKAD
02	02	2.01	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BKAD	44 SKPD	6.056.500	APBD		44 SKPD	6.995.889	BKAD
02	02	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BKAD	44 SKPD	6.459.000	APBD		44 SKPD	19.379.306	BKAD
02	02	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang telah diverifikasi dan disetujui	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BKAD	44 SKPD	6.347.500	APBD		44 SKPD	19.379.306	BKAD
02	02	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD yang ditetapkan tepat waktu	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	2 Dok	357.401.000	APBD		2 Dok	821.124.835	BKAD
02	02	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perkada APBD Perubahan yang ditetapkan tepat waktu	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	2 Dok	406.942.000	APBD		2 Dok	445.037.605	BKAD
02	02	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi tentang kebijakan Anggaran yang tersusun dan ditetapkan	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	54 Regulasi	10 Regulasi	10 Regulasi	BKAD	10 Regulasi	353.634.500	APBD		10 Regulasi	600.000.000	BKAD
02	02	2.01	10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Perencanaan Anggaran Pendapatan	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	1 Dok	6.347.500	APBD		1 Dok	6.347.500	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02	02	2.01	11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	1 Dok	6.347.500	APBD		1 Dok	6.347.500	BKAD
02	02	2.01	12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	1 Dok	6.347.500	APBD		1 Dok	6.347.500	BKAD
02	02	2.01	13		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	2 Kegiatan	179.577.500	APBD		2 Kegiatan	330.128.394	BKAD
02	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rata - rata Waktu Penerbitan Dokumen Administrasi Pengeluaran Kas	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	100%	348.925.000	APBD		100%	453.677.241	BKAD
02	02	2.02	01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Yang Diterbitkan	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	BKAD	44 SKPD	260.691.000	APBD		44 SKPD	328.227.300	BKAD
02	02	2.02	05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	35 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	BKAD	7 Kegiatan	47.092.000	APBD		7 Kegiatan	49.469.941	BKAD
02	02	2.02	06		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Mou Tansaksi Non Tunai	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	98 SKPD	98 SKPD	98 SKPD	BKAD	98 SKPD	10.742.000	APBD		98 SKPD	42.080.000	BKAD
02	02	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	25 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	BKAD	3 Laporan	30.400.000	APBD		3 Laporan	33.900.000	BKAD
02	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhanpelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase keterpenuhanpelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	100%	595.371.300	APBD		100%	945.034.113	BKAD

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02	02	2.03	02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan LO	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	4 Dok	28.307.000	APBD		4 Dok	42.470.846	BKAD
02	02	2.03	03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah LRA yang disusun	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	2 Dok	33.462.500	APBD		2 Dok	48.882.805	BKAD
02	02	2.03	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang disusun dan diselesaikan tepat waktu	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	2 Dok	354.024.300	APBD		2 Dok	674.102.961	BKAD
02	02	2.03	11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan atas penyelenggaraan akuntansi	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	2 Dok	179.577.500	APBD		2 Dok	179.577.500	BKAD
02	02	2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					BKAD	100%	100.145.105.187	APBD		100%	109.829.438.168	BKAD
02	02	2.04	04		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	1 Kegiatan	3.191.298.036	APBD		1 Kegiatan	3.000.000.000	BKAD
02	02	2.04	08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Validasi Administrasi/DokumenPenerima	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	40 Desa	91.788.792.151	APBD		40 Desa	100.000.000.000	BKAD
02	02	2.04	9		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	1 Kegiatan	5.165.015.000	APBD		1 Kegiatan	6.000.000.000	BKAD
02	02	2.05			Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah		5	02	02	2.05		Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah					BKAD		295.471.000				414.719.084	BKAD
02	02	2.05	1		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan analisis data keuangan	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	BKAD	60 Lap	86.231.500	APBD		60 Lap	68.387.934	BKAD

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02	02	2.05	02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jenis Pelaksanaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	1 Kegiatan	130.222.500	APBD		1 Kegiatan	138.532.460	BKAD
02	02	2.05	03		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jenis Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	BKAD	12 Bulan	79.017.000	APBD		12 Bulan	207.798.690	BKAD
02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data aset yang akurat				BKAD		779.187.550	APBD			1.135.097.435	BKAD
						Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah yang memiliki sertifikat							Cakupan Aset (tanah) milik Pemerintah yang memiliki sertifikat				BKAD			APBD				BKAD
						Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan							Cakupan aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan				BKAD			APBD				BKAD
02	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jenis Barang Milik Daerah yang dikelola				BKAD	100%	779.187.550	APBD		100%	1.135.097.435	BKAD
02	03	2.01	01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Yang ditetapkan	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKAD	2 dokumen	134.041.000	APBD		2 dokumen	43.070.495	BKAD
02	03	2.01	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKAD	2 dokumen	3.563.650	APBD		2 dokumen	5.617.619	BKAD
02	03	2.01	04		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan aset BMD yang tersusun dan tersosialisas	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Perda 5 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	BKAD	1 Perbup	44.614.000	APBD		1 Perbup	25.746.864	BKAD
02	03	2.01	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan data aset daerah	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	BKAD	5 dokumen	243.880.700	APBD		5 dokumen	417.484.388	BKAD
02	03	2.01	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data aset yang ter-update dan terinci	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 Entitas	7 Entitas	7 Entitas	BKAD	7 Entitas	83.805.200	APBD		7 Entitas	68.488.602	BKAD
02	03	2.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset bersertifikat dan ber BPKB	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Sertifikat 20 BPKB	30 Sertifikat 20 BPKB	30 Sertifikat 20 BPKB	BKAD	30 Sertifikat dan 20 BPKB	63.738.000	APBD		30 Sertifikat dan 20 BPKB	133.285.130	BKAD
02	03	2.01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan,dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jenis dokumen atas hasil optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,Pemusnahan,dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	BKAD	5 Jenis	99.413.000	APBD		5 Jenis	150.067.921	BKAD
02	03	2.01	11		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil vRekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BKAD	1 Laporan	17.863.500	APBD		1 Laporan	17.863.500	BKAD
02	03	2.01	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah pengelola Barang Milik Daerah yang dibina	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Entitas	36 Entitas	36 Entitas	BKAD	36 Entitas	88.268.500	APBD		36 Entitas	273.472.917	BKAD

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
02	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Pendapatan Daerah	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Pendapatan Daerah	4	3,179	3	3,00	4.844.363.267					3,00	4.844.363.267	Badan Pendapatan Daerah
							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 JPL	20 JPL	20 JPL	20 JPL						20 JPL		
02	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	3.499.920.567					100%	3.499.920.567	Badan Pendapatan Daerah
02	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/bulan	26 orang/bulan	25 Orang/bulan	Barru	25 orang/bulan	3.499.920.567	DAU			25 orang/bulan	3.499.920.567	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	100%	-		100%	69.739.500				100%	69.739.500	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	6 orang	-	Kab. Barru dan Luar daerah	6 orang	69.739.500	DAU			6 orang	69.739.500	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%		100%	365.029.600				100%	365.029.600	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	Barru	1 Paket	910.000	DAU			1 Paket	910.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	Barru	1 Paket	860.000	DAU			1 Paket	860.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265 Laporan	43 laporan	150 laporan	Kab. Barru dan Luar daerah	339 laporan	363.259.600	DAU			339 laporan	363.259.600	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%		100%	348.100.000				100%	348.100.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	-	3Unit	Barru	4 Unit	120.000.000				4 Unit	120.000.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	6 Unit	6 Unit	Barru	14 Unit	206.500.000	DAU			14 Unit	206.500.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.07	05			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	-	-	Barru	3 Unit	21.600.000				3 Unit	21.600.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%		100%	283.573.600				100%	283.573.600	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	12 Laporan	68.298.100	DAU			12 Laporan	68.298.100	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Barru	24 Laporan	74.875.500	DAU			24 Laporan	74.875.500	Badan Pendapatan Daerah

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
04	02	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 laporan	1 Laporan	Barru	22 Laporan	140.400.000	DAU		22 Laporan	140.400.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100%	278.000.000			100%	278.000.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	11 Unit	15 Unit	Barru	18 Unit	70.500.000	DAU		18 Unit	70.500.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	3 Unit	3 Unit	Barru	32 Unit	12.500.000	DAU		32 Unit	12.500.000	Badan Pendapatan Daerah
04	02	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	Barru	1 Unit	195.000.000	DAU		1 Unit	195.000.000	Badan Pendapatan Daerah
02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	2,04%	1,85%	3,84%		3,24	3.153.156.000			3,24	3.153.156.000	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase keterpenuhan capaian intensifikasi dan ekstensifikasi	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase keterpenuhan capaian intensifikasi dan ekstensifikasi	100%	100%	100%		100%	3.153.156.000			100%	3.153.156.000	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01	01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	14 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Barru dan Luar daerah	7 Dokumen	651.672.500	DAU		7 Dokumen	651.672.500	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	35 laporan	7 Laporan	7 Laporan	Barru	7 Laporan	45.896.000	DAU		7 Laporan	45.896.000	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	35 unit	7 Unit	6 Unit	Barru	7 Unit	381.500.000	DAU		7 Unit	381.500.000	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	Barru	5 Laporan	1.234.479.000	DAU		5 Laporan	1.234.479.000	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Barru	16 Laporan	108.150.000	DAU		16 Laporan	108.150.000	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Barru	1 dokumen	46.789.500	DAU		1 dokumen	46.789.500	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Barru	4 Dokumen	53.743.000	DAU		4 Dokumen	53.743.000	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Barru	2 Dokumen	400.517.000	DAU		2 Dokumen	400.517.000	Badan Pendapatan Daerah
02	04	2.01	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Barru	4 Dokumen	230.409.000	DAU		4 Dokumen	230.409.000	Badan Pendapatan Daerah

KODE					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3					KEPEGAWAIAN																			
3	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BKPSDM	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP BKPSDM	4	3	3		3	3.918.486.360	DAU		4	3.837.969.566	BKPSDM
						Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan							Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100 JP	26,53 JP	20 JP		20 JP	214.301.040			20 JP	225.884.880	BKPSDM
3	1	2.02			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100%	100%	100%		100%	3.253.794.735			100%	3.416.484.472	BKPSDM
3	1	2.02	1		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	170 orang/bulan	28 orang/bulan	34 orang/bulan	Kab. Barru	34 orang/bulan	3.253.794.735			35 orang/bulan	3.416.484.472	BKPSDM
3	1	2.05			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM	100%	100,00%	100%		100%	214.301.040			100%	225.884.880	BKPSDM
3	1	2.05	09		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	170 orang	63 orang	34 orang	Kab. Barru dan luar Kab	34 orang	214.301.040			35 orang	225.884.880	BKPSDM
3	1	2.06			Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun	100%	100%	100%		100%	265.087.500			100%	265.836.900	BKPSDM
3	1	2.06	03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	Kab. Barru	3 paket	6.640.000			3 paket	6.639.400	BKPSDM
3	1	2.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	2 paket	3 paket	Kab. Barru	3 paket	19.025.000			3 paket	19.775.000	BKPSDM
3	1	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	6 laporan	6 laporan	Kab. Barru dan luar Kab	6 laporan	239.422.500			6 laporan	239.422.500	BKPSDM
3	1	2.07			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun	5	03	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun	100%	89,20%	98,30%		98,30%	274.871.625			98,86%	25.610.000	BKPSDM
3	1	2.07	05		Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	1 unit	7 unit	Kab. Barru	7 unit	200.000.000			0	-	BKPSDM
3	1	2.07	10		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 unit	4 unit	7 unit	Kab. Barru	7 unit	74.871.625			2 unit	25.610.000	BKPSDM
3	1	2.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%		100%	85.822.500			100%	88.759.500	BKPSDM
3	1	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	03	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	1 laporan	1 laporan	Kab. Barru	1 laporan	85.822.500			1 laporan	88.759.500	BKPSDM
3	1	2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun	5	03	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun	100%	10,17%	14,90%		14,90%	38.910.000			18,82%	41.278.694	BKPSDM

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	1	2.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5	03	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 unit	18 unit	20 unit	Kab. Barru	20 unit	32.010.000			20 unit	31.878.694	BKPSDM
3	1	2.09	05		Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5	03	01	2,1	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	65 unit	-		Kab. Barru		-			10 unit	2.500.000	BKPSDM
3	1	2.09	10		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	03	01	2,1	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 unit	12 unit	18 unit	Kab. Barru	18 unit	6.900.000			18 unit	6.900.000	BKPSDM
3	2				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Kategori A (81-100)	Kategori C(41-60)	Kategori B (61-80)		Kategori B (61-80)	1.921.928.050	DAU		Kategori B (61-80)	2.616.313.597	BKPSDM
3	2	2.01			Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik	5	03	02	2		Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik	57,53%	53,96%	58,97%		58,97%	661.927.800			58,25%	1.460.438.285	BKPSDM
3	2	2.01	02		Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	5	03	02	2	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Barru	2 dokumen	69.790.000			2 dokumen	76.931.135	BKPSDM
3	2	2.01	03		Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	5	03	02	2	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Barru	1 dokumen	311.543.750			1 dokumen	788.830.726	BKPSDM
3	2	2.01	06		Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	5	03	02	2,01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Barru	1 dokumen	49.512.050			1 dokumen	157.367.324	BKPSDM
3	2	2.01	08		Fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	5	03	02	2,01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	10 lembaga	1 lembaga	2 lembaga	Kab. Barru	2 lembaga	13.162.000			2 lembaga	13.820.100	BKPSDM
3	2	2.01	10		Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	5	03	02	2,01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Barru	1 dokumen	159.590.000			1 dokumen	365.159.000	BKPSDM
3	2	2.01	11		Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	5	03	02	2,01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Barru	2 dokumen	58.330.000			2 dokumen	58.330.000	BKPSDM
3	2	2.02			Mutasi dan promosi ASN	Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan	5	03	02	2,02		Mutasi dan promosi ASN	Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan	100%	86,83%	100%		100%	891.037.400			100%	784.897.000	BKPSDM
3	2	2.02	01		Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	5	03	02	2,02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Barru	5 dokumen	89.427.850			5 dokumen	89.568.650	BKPSDM
3	2	2.02	02		Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	5	03	02	2,02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Barru	2 dokumen	139.675.500			2 dokumen	205.218.500	BKPSDM
3	2	2.02	03		Pengelolaan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	5	03	02	2,02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Barru	1 dokumen	661.934.050			1 dokumen	490.109.850	BKPSDM
3	2	2.03			Pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3	5	03	02	2,03		Pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3	80,66%	76,95%	80,40%		80,40%	174.645.000			79,89%	174.645.000	BKPSDM

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
															Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
3	2	2.03	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	280 orang	21 orang	56 orang	Kab. Barru	56 orang	174.645.000		56 orang	174.645.000	BKPSDM
3	2	2.04		Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik	5	03	02	2.04		Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik	100%	28,60%	91,12%		91,12%	194.317.850		100,00%	196.333.312	BKPSDM
3	2	2.04	02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Barru	3 dokumen	47.605.250		3 dokumen	50.004.712	BKPSDM
3	2	2.04	04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1030 orang	-	206 orang	Kab. Barru	206 orang	73.894.000		206 orang	73.510.000	BKPSDM
3	2	2.04	07	Pembinaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	34 orang	12 orang	7 orang	Kab. Barru	7 orang	72.818.600		6 orang	72.818.600	BKPSDM
4				PENDIDIKAN DAN PELATHAN																		
4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP setahun	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP setahun	100%	15,62%	80%		80%	976.854.500	DAU	80%	976.854.500	BKPSDM
4	2	2.02		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik	5	04	02	2.02		Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik	100%	100%	100%		100%	976.854.500		100%	976.854.500	BKPSDM
4	2	2.02	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	30 laporan	3 laporan	6 laporan	Kab. Barru dan luar Kab	6 laporan	976.854.500		6 laporan	976.854.500	BKPSDM
5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	≥ 1000	≥ 685	≥ 764		≥ 842 Poin	436.898.100		≥ 921 Poin	610.000.000	BAPPELITBANGD A
05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	100%	100%	100%		100%	318.230.800		100%	488.000.000	BAPPELITBANGD A
05	02	2.01	1,00	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	1 Laporan	77.927.000	DAU	1 Laporan	122.000.000	BAPPELITBANGD A

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
05	02	2.01	5,00		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	1 Laporan	73.173.800	DAU		1 Laporan	122.000.000	BAPPELITBANGDA
05	02	2.01	13,00		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	1 Rekomendasi	-	Barru	1 Rekomendasi	70.652.500	DAU		1 Rekomendasi	122.000.000	BAPPELITBANGDA
05	02	2.01	14,00		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	5 Laporan	1 Laporan	-	Barru	1 Laporan	96.477.500	DAU		1 Laporan	122.000.000	BAPPELITBANGDA
05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	100%	100%	100%		100%	118.667.300			100%	122.000.000	BAPPELITBANGDA
05	02	2.04	3,00		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Barru	1 Laporan	118.667.300	DAU		1 Laporan	122.000.000	BAPPELITBANGDA
1					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
					INSPEKTORAT DAERAH																			
01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Inspektorat	Level 4	Level 2	3 Level	Kab. Barru	3 Level	5.150.846.619	DAU		3 Level	6.515.601.719	Inspektorat
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 JP	20 JP	20 JP	Kab. Barru	20 JP		DAU		20 JP		
01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	6	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	93,09%	100%	Kab. Barru	100 %	3.799.295.719	DAU		100 %	3.799.295.719	Inspektorat
01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6	01	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/ bulan	504 Orang/ Tahun	504 Orang/ Tahun	Kab. Barru	39 Orang / Bulan	3.799.295.719	DAU		39 Orang / Bulan	3.799.295.719	Inspektorat
01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparat inspektorat yang mengikuti pelatihan	6	01	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparat inspektorat yang mengikuti pelatihan	100%	52,40%	100%	Kab. Barru	100 %	983.316.400	DAU		100 %	2.118.252.000	Inspektorat
01	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	01	01	2,1	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	43 orang	39 Orang	39 Orang	Kab. Barru	39 Orang	585.428.000	DAU		43 Orang	945.192.000	Inspektorat
01	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	01	01	2,1	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	20 Orang	39 Orang	Kab. Barru	39 Orang	397.888.400	DAU		50 Orang	1.173.060.000	Inspektorat
01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	6	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	94,56%	100%	Kab. Barru	100 %	188.939.500	DAU		100 %	278.338.000	Inspektorat

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJA WAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	6	01	01	2,1	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	7 Paket	Kab. Barru	7 Paket	2.049.000	DAU		8 Paket	14.800.000	Inspektorat
01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	01	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	30 Laporan	97 Laporan	Kab. Barru	97 Laporan	186.890.500	DAU		38 Laporan	263.538.000	Inspektorat
01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Kab. Barru	100 %	34.948.000	DAU		100 %	150.928.000	Inspektorat
01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6	01	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	24 Unit	28 Unit	Kab. Barru	17 Unit	24.448.000	DAU		12 Unit	80.048.000	Inspektorat
01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	01	01	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	5 Unit	0 Unit	Kab. Barru	1 Unit	10.500.000	DAU		12 Unit	70.880.000	Inspektorat
01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	6	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	75%	100%	Kab. Barru	100 %	90.224.000	DAU		100 %	73.500.000	Inspektorat
01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	6	01	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Barru	12 Laporan	85.424.000	DAU		12 Laporan	72.600.000	Inspektorat
01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	6	01	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	Kab. Barru	2 Laporan	-	DAU		2 Laporan	-	Inspektorat
01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	6	01	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Barru	1 Laporan	4.800.000	DAU		2 Laporan	900.000	Inspektorat
01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	6	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	54,85%	100%	Kab. Barru	100 %	54.123.000	DAU		100 %	95.288.000	Inspektorat
01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	01	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	7 Unit	7 Unit	Kab. Barru	7 Unit	33.645.000	DAU		7 Unit	36.288.000	Inspektorat
01	01	2	09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor Yang Dipelihara	6	01	01	2,1	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	0 Unit	20 Unit	Kab. Barru	5 Unit	2.500.000	DAU		20 Unit	6.000.000	Inspektorat
01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6	01	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	4 Unit	17 Unit	Kab. Barru	23 Unit	10.630.000	DAU		36 Unit	18.000.000	Inspektorat
01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	01	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 Unit	1 Unit	Kab. Barru	1 Unit	7.348.000	DAU		1 Unit	35.000.000	Inspektorat
01	01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan BPK) dan Internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pemeriksaan Eksternal (Temuan BPK) dan Internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti	95%	90%	90%	Kab. Barru	90 %	1.476.118.000	DAU		90 %	2.552.839.000	Inspektorat
01	01	2			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan	6	01	02	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan	28,50%	20%	20%	Kab. Barru	20 %	864.788.000	DAU		20 %	1.604.867.000	Inspektorat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah	6	01	02	2	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	38 Laporan	38 Laporan	14 Laporan	Kab. Barru	14 Laporan	259.915.000	DAU		38 Laporan	673.200.000	Inspektorat
01	01	2	01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah	6	01	02	2	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Barru	7 Laporan	172.820.000	DAU		7 Laporan	210.650.000	Inspektorat
01	01	2	01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6	01	02	2	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	38 Laporan	38 Laporan	43 Laporan	Kab. Barru	43 Laporan	177.105.000	DAU		38 Laporan	246.840.000	Inspektorat
01	01	2	01	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6	01	02	2	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Barru	1 Laporan	13.700.000	DAU		1 Laporan	38.335.000	Inspektorat
01	01	2	01	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6	01	02	2	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Barru	7 Laporan	186.035.000	DAU		12 Laporan	187.250.000	Inspektorat
01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6	01	02	2	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan	0 Kesepakatan	1 Kesepakatan	Kab. Barru	1 Kesepakatan	410.000	DAU		3 Kesepakatan	30.910.000	Inspektorat
01	01	2	01	07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	01	02	2	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Barru	3 Dokumen	54.803.000	DAU		1 Dokumen	217.682.000	Inspektorat
01	01	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	Kab. Barru	100 %	611.330.000	DAU		100 %	947.972.000	Inspektorat
01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	Kab. Barru	1 Laporan	19.600.000	DAU		5 Laporan	39.572.000	Inspektorat
01	01	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	40 Laporan	45 Laporan	Kab. Barru	46 Laporan	591.730.000	DAU		40 Laporan	908.400.000	Inspektorat
01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyimpangan/penyalahgunaan yang terjadi	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penyimpangan/penyalahgunaan yang terjadi	4%	7%	7%	Kab. Barru	6%	548.773.500	DAU		5%	900.133.000	Inspektorat
01	03	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	100%	100%	Kab. Barru	100 %	-	DAU		100 %	53.000.000	Inspektorat
01	03	2	01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Kab. Barru	1 Rekomendasi	-	DAU		1 Rekomendasi	1.500.000	Inspektorat
01	03	2	01	02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Kab. Barru	1 Rekomendasi	-	DAU		1 Rekomendasi	51.500.000	Inspektorat
01	03	2	02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,0 IEPK	3,5 IEPK	3,5 IEPK	Kab. Barru	3,5 IEPK	548.773.500	DAU		3,5 IEPK	847.133.000	Inspektorat
01	03	2	02	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah	7 Laporan	36 Perangkat Daerah	Kab. Barru	36 Perangkat Daerah	192.675.000	DAU		36 Perangkat Daerah	143.748.000	Inspektorat
01	03	2	02	02	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	Kab. Barru	36 Perangkat Daerah	20.880.000	DAU		36 Perangkat Daerah	143.385.000	Inspektorat

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	03	2	02	03	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Barru	4 Kegiatan	289.564.000	DAU		4 Kegiatan	560.000.000	Inspektorat
01	03	2	02	04	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	Kab. Barru	36 Perangkat Daerah	45.654.500	DAU		36 Perangkat Daerah	-	Inspektorat
URUSAN KEWILAYAHAN																								
KECAMATAN BARRU																								
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Barru	3 Level	3 Level	3 Level		3 Level	5.176.042.030			3 Level	5.907.882.728	Kantor Kecamatan Barru
						Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 JPL	18 JPL	0		20 JPL	13.794.000			20 JPL	104.388.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%		100%	4.185.893.606			100%	4.437.273.135	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang	54 Orang	54 Orang	Kecamatan Barru	54 Orang	4.185.893.606	APBD		54 Orang	4.437.273.135	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100%	33%	0		54%	13.794.000			41%	104.388.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	102 Orang	6 Orang	0	Kecamatan Barru	6 Orang	13.794.000	APBD		22 Orang	104.388.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	85%	100%		100%	218.047.400			100%	463.703.400	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	0	0	Kecamatan Barru	0	-	APBD		10 paket	17.754.900	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	0	0	Kecamatan Barru	0	-	APBD		8 paket	12.658.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	Kecamatan Barru	12 Paket	51.140.000	APBD		1 Paket	30.645.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	Kecamatan Barru	12 Paket	7.577.000	APBD		2 Paket	14.156.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Kecamatan Barru	5 Dokumen	15.605.000	APBD		5 dokumen	15.720.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kecamatan Barru	12 Laporan	9.406.000	APBD		12 laporan	14.850.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	3 Laporan	498 Laporan	Kecamatan Barru	550 Laporan	134.319.400	APBD		3 laporan	357.919.500	Kantor Kecamatan Barru

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	0		100%	122.582.400			100%	272.037.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 unit	1 unit	0	Kecamatan Barru	2 unit	27.500.000	APBD		8 unit	75.500.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	137 unit	0	0	Kecamatan Barru	10 unit	95.082.400	APBD		22 Unit	196.537.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%		100%	560.667.137			100%	600.957.793	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	12 laporan	12 laporan	Kecamatan Barru	12 laporan	495.270.300	APBD		12 Laporan	528.173.100	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	144 laporan	144 laporan	Kecamatan Barru	144 laporan	36.531.837	APBD		12 Laporan	43.984.693	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	Kecamatan Barru	12 Laporan	28.865.000	APBD		12 Laporan	28.800.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	60%	100%		100%	88.851.487			100%	133.911.400	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	9 Unit	9 Unit	Kecamatan Barru	9 Unit	61.472.000	APBD		19 unit	84.279.400	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 Unit	0	0	Kecamatan Barru	0	-	APBD		10 unit	4.320.200	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	12 Unit	11 Unit	Kecamatan Barru	11 Unit	4.680.000	APBD		29 unit	13.500.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0	0	Kecamatan Barru	6 Unit	20.199.487	APBD		6 Unit	25.457.800	Kantor Kecamatan Barru
7	01	01	2.09	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	01	01	2.09	0019	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	58 Unit	4 Unit	4 Unit	Kecamatan Barru	5 Unit	2.500.000	APBD		13 unit	6.354.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	100%	100%		100%	54.999.000			100%	67.967.900	Kantor Kecamatan Barru
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%		100%	54.670.000			100%	66.575.100	Kantor Kecamatan Barru

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kecamatan Barru	4 Laporan	12.984.500	APBD		3 Laporan	27.562.500	Kantor Kecamatan Barru
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Kecamatan Barru	6 Dokumen	41.685.500	APBD		5 Dokumen	39.012.600	Kantor Kecamatan Barru
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan Kegiatan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan Kegiatan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	100%	100%	100%		100%	329.000			100%	1.392.800	Kantor Kecamatan Barru
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Kecamatan Barru	2 Laporan	329.000	APBD		25 laporan (SOP)	1.392.800	Kantor Kecamatan Barru
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	100%	100%	100%		100%	1.526.687.271			100%	2.042.461.900	Kantor Kecamatan Barru
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%	100%	100%		100%	6.665.000			7 Lembaga Kemasyarakatan	3.092.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Barru	35 Lembaga Kemasyarakatan	6.665.000	APBD		7 Lembaga Kemasyarakatan	3.092.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	100%	100%	100%		100%	647.985.271			100%	1.217.774.700	Kantor Kecamatan Barru
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Barru	35 Lembaga Kemasyarakatan	30.410.000	APBD		7 Lembaga Kemasyarakatan	67.285.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	5 Unit	5 Unit	Kecamatan Barru	5 Unit	576.955.271	APBD		5 Unit	787.296.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas / ormas	5 Pokmas / ormas	10 Pokmas / ormas	Kecamatan Barru	11 Pokmas / ormas	39.120.000	APBD		10 Pokmas	356.825.700	Kantor Kecamatan Barru
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Kecamatan Barru	5 Laporan	1.500.000	APBD		5 laporan	6.368.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina					100%	872.037.000			100%	821.595.200	Kantor Kecamatan Barru

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Barru	25 Lembaga Kemasyarakatan	872.037.000	APBD		7 lembaga	821.595.200	Kantor Kecamatan Barru
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%		100%	28.595.000			100%	60.675.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	36 Laporan	11 Laporan	9 Laporan		9 Laporan	28.595.000			7 Laporan	60.675.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26 Evaluasi	9 Evaluasi	7 Evaluasi	Kecamatan Barru	12 Laporan	21.665.000	APBD		3 Evaluasi	42.195.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kecamatan Barru	7 laporan	6.930.000	APBD		2 laporan	18.480.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%		100%	1.055.000			100%	3.867.900	Kantor Kecamatan Barru
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1.055.000			1 Dokumen	3.867.900	Kantor Kecamatan Barru
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kecamatan Barru	4 Dokumen	1.055.000	APBD		1 Dokumen	3.867.900	Kantor Kecamatan Barru
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang dibina dan diawasi	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%		100%	5.565.000			100%	11.739.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	5.565.000			5 Laporan	11.739.000	Kantor Kecamatan Barru
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Kecamatan Barru	10 Laporan	5.565.000	APBD		5 Laporan	11.739.000	Kantor Kecamatan Barru
KECAMATAN TANETE RILAU																								
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Tanete Rilau	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kantor Kecamatan Tanete Rilau	3 Point	3 Point	3 Point		3 Point	3.380.885.507			3 Point	3.686.405.010	Kecamatan Tanete Rilau
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan					Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	20 JPL		20 JPL	6.117.500			20 JPL	61.961.000			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	100	100		100%	2.963.450.518			100%	3.161.810.434	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	39	39	Kec. Tanete Rilau	39 orang	2.963.450.518	APBD		42 orang	3.161.810.434	Kecamatan Tanete Rilau

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB		
															Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
7	01	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi terhadap keseluruhan ASN	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi terhadap keseluruhan ASN	100	100	100		100 % (13 Orang)	6.117.500			100 % (13 Orang)	61.961.000	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	67	11	11	Kec. Tanete Rilau	2 orang	6.117.500	APBD		15 Orang	61.961.000	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Admintrasi umum perangkat daerah	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Admintrasi umum perangkat daerah	100	100	100		100%	190.249.300			100%	180.036.350	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35	7	3	Kec. Tanete Rilau	7 Paket	944.500	APBD		7 Paket	14.754.900	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	40	8	8	Kec. Tanete Rilau	8 Paket	1.659.800	APBD		8 Paket	12.658.000	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	8	1	3	Kec. Tanete Rilau	1 Paket	43.192.000	APBD		1 Paket	16.798.000	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10	2	6	Kec. Tanete Rilau	2 paket	5.447.000	APBD		2 paket	5.656.000	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20	5	3	Kec. Tanete Rilau	5 Dokumen	5.102.000	APBD		5 Dokumen	8.684.500	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5	1	24	Kec. Tanete Rilau	12 Laporan	6.372.000	APBD		1 Laporan	6.945.750	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	438	547	Kec. Tanete Rilau	529 Laporan	127.532.000	APBD		4 Laporan	114.539.200	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	100	100		100% (15 unit)	32.542.200			100% (15 unit)	93.179.500	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	01	2,07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	25	9	9	Kec. Tanete Rilau	32 unit	7.950.000	APBD		4 unit	15.048.500	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,07	06	Pengadan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	01	01	2.07	0006	Pengadan peralatan dan mesin lainnya	30	0	0	Kec. Tanete Rilau	3 Unit	23.742.000	APBD		5 Unit	63.661.000	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	23	4	4	Kec. Tanete Rilau	1 unit	850.200	APBD		6 unit	14.470.000	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelayanan Jasa Penunjang urusan Kantor	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelayanan Jasa Penunjang urusan Kantor	100	100	100		100 % (10 Laporan)	148.521.469			100 % (10 Laporan)	169.637.726	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	4	16	Kec. Tanete Rilau	36 Laporan	109.528.688	APBD		4 Laporan	121.789.500	Kecamatan Tanete Rilau	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	15	3	84	Kec. Tanete Rilau	108 Laporan	29.330.781	APBD		3 Laporan	36.848.226	Kecamatan Tanete Rilau	

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	2	24	Kec. Tanete Rilau	24 laporan	9.662.000	APBD		4 laporan	11.000.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemeritahan daerah yang dipelihara	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemeritahan daerah yang dipelihara	100	100	100		100 % (33 unit)	46.121.690			100 % (33 unit)	81.741.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	6	6	Kec. Tanete Rilau	6 unit	25.740.000	APBD		6 unit	36.915.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	37	0	0	Kec. Tanete Rilau	7unit	663.790	APBD		8 unit	2.861.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	9	16	Kec. Tanete Rilau	18 unit	6.985.000	APBD		10 unit	7.015.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	0	3	Kec. Tanete Rilau	3 unit	12.732.900	APBD		4 unit	31.500.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang tersusun dan diinfflementasikan	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang tersusun dan diinfflementasikan	100	100	100		100%	26.364.000				36.445.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	02	2,01		Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketepenuhan pemerintahan di tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketepenuhan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100	100	100		100%	25.926.000			100%	35.870.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15	3	34	Kec. Tanete Rilau	3 laporan	15.958.000	APBD		3 laporan	22.950.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50	0	5	Kec. Tanete Rilau	10 Dokumen	9.968.000	APBD		10 Dokumen	12.920.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan pelayanan Publik di tingkat Kecamatan SOP	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhihan pelayanan Publik di tingkat Kecamatan SOP	100	100	100		100%	438.000			100% (20 Laporan)	575.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	10	10	Kec. Tanete Rilau	3 laporan	438.000	APBD		25 laporan	575.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan Masyarakat/ Kelompok/ Lembaga	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan Masyarakat/ Kelompok/ Lembaga	100	100	100		100%	584.708.226				883.928.157	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	100	100	100		100 % (6 Lembaga)	2.664.000			100 % (6 Lembaga)	3.092.000	Kecamatan Tanete Rilau

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	24	24	Kecamatan Tanete Rilau	6 Lembaga	2.664.000	APBD		6 Lembaga	3.092.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	100	100	100		100%	250.041.226			100%	572.161.765	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	6	6	Kecamatan Tanete Rilau	6 Lembaga	20.584.000	APBD		6 Lembaga	35.445.500	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	0	2	Kecamatan Tanete Rilau	2 unit	222.369.226	APBD		3 unit	483.916.265	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	0	5	Kecamatan Tanete Rilau	4 Pokmas/ormas	4.964.000	APBD		4 Pokmas/ormas	50.500.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10	2	2	Kecamatan Tanete Rilau	2 laporan	2.124.000	APBD		2 laporan	2.300.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100	96,14118429	100		100%	332.003.000			100%	308.674.392	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6	6	6	Kecamatan Tanete Rilau	6 lembaga	332.003.000	APBD		6 lembaga	306.174.392	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100	94,88	100		100% (7 Laporan)	42.254.000			100% (7 Laporan)	87.936.138	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	7	7		7 Laporan	42.254.000			7 Laporan	87.936.138	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	01	04	2,01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	Kecamatan Tanete Rilau	5 Laporan	24.104.000	APBD		5 evaluasi	44.195.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	01	04	2,01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	2	2	Kecamatan Tanete Rilau	2 Laporan	18.150.000	APBD		2 Laporan	43.741.138	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100		100%	61.801.400			100%	47.647.845	Kecamatan Tanete Rilau

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	125	25	25		25 orang	61.801.400			25 orang	47.647.845	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7	01	05	2,01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125	25	25	Kecamatan Tanete Rilau	25 orang	61.801.400	APBD		25 orang	47.647.845	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PersentasePemerintahan Desa/keurahan yang dibina dan diawasi	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PersentasePemerintahan Desa/keurahan yang dibina dan diawasi	100	100	100		100%	1.230.500			100%	11.939.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8	8	8		8 laporan	1.230.500			8 laporan	11.939.000	Kecamatan Tanete Rilau
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	01	04	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8	8	8	Kecamatan Tanete Rilau	8 Laporan	1.230.500	APBD		8 laporan	11.939.000	Kecamatan Tanete Rilau
KECAMATAN TANETE RIAJA																								
7	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Tanete Riaja	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Tanete Riaja	3 point	3 point	3 point		3 point	3.193.903.029			3 point	3.548.054.536	Kecamatan Tanete Riaja
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	20 JPL		20 JPL				20 JPL		
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%		100%	2.779.754.647			100%	3.111.174.086	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 orang	38 orang	38 orang	Kec. Tanete Riaja	38 orang	2.779.754.647	APBD		38 orang	3.111.174.086	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi teknis terhadap Keseluruhan ASN	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi teknis terhadap Keseluruhan ASN	100%	100%	100%		100%	34.750.000			100%	54.000.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Org	11 Org	11 Org	Kec. Tanete Riaja	11 Org	34.750.000	APBD		11 Org	54.000.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%	216.062.000			100%	145.656.000	Kecamatan Tanete Riaja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 paket	5 paket	5 paket	Kec. Tanete Riaja	5 paket	3.070.600	APBD		5 paket	2.500.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	Kec. Tanete Riaja	2 Paket	1.892.500	APBD		2 Paket	3.500.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	Kec. Tanete Riaja	1 Paket	30.600.000	APBD		1 Paket	17.396.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	Kec. Tanete Riaja	2 Paket	5.530.000	APBD		2 Paket	6.000.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Kec. Tanete Riaja	4 Dokumen	2.400.000	APBD		4 Dokumen	5.160.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tanete Riaja	12 Laporan	6.253.500	APBD		12 Laporan	2.100.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kec. Tanete Riaja	3 Laporan	166.315.400	APBD		3 Laporan	109.000.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%		100%	35.386.000			100%	54.000.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	6 paket	6 paket	Kec. Tanete Riaja	6 Paket	17.588.000	APBD		6 Paket	14.500.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	7 Unit	7 Unit	Kec. Tanete Riaja	7 Unit	17.798.000	APBD		7 Unit	39.500.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa Penunjang Urusan Kantor	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa Penunjang Urusan Kantor	100%	100%	100%		100%	87.429.882			100%	144.914.450	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Kec. Tanete Riaja	12 Laporan	68.610.420	APBD		12 Laporan	121.306.450	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Kec. Tanete Riaja	6 Laporan	18.819.462	APBD		6 Laporan	20.608.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100%	40.020.500			100%	38.310.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	7 unit	7 unit	Kec. Tanete Riaja	7 unit	24.989.000	APBD		7 unit	26.560.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	5 unit	5 unit	Kec. Tanete Riaja	5 unit	7.130.000	APBD		5 unit	2.500.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	2 Unit	2 Unit	Kec. Tanete Riaja	2 Unit	7.901.500	APBD		3 Unit	4.250.000	Kecamatan Tanete Riaja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen SOP Pelayanan Kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	100%	100%		100%	35.217.600			100%	28.200.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%		100%	34.718.000			100%	27.700.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kec. Tanete Riaja	3 Laporan	33.230.000	APBD		3 Laporan	24.500.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Kec. Tanete Riaja	6 Dok	1.488.000	APBD		6 Dok	3.200.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	100%	100%	100%		100%	499.600			100%	500.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Tanete Riaja	4 Laporan	499.600	APBD		4 Laporan	500.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Lembaga	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembangunan yang melibatkan Masyarakat/Kelompok/Lembaga	100%	100%	100%		100%	320.207.848			100%	424.079.320	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100%	100%	100%		100%	1.600.000			6 lembaga	3.200.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	Kec. Tanete Riaja	6 lembaga	1.600.000	APBD		6 lembaga	3.200.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	100%	100%	100%		100%	195.652.848			100%	283.679.320	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	Kec. Tanete Riaja	3 Lembaga	12.179.200	APBD		3 Lembaga	19.000.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	1 Unit	1 Unit	Kec. Tanete Riaja	1 Unit	59.293.800	APBD		1 Unit	260.424.320	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas	2 Pokmas	2 Pokmas	Kec. Tanete Riaja	2 Pokmas	124.179.848	APBD		2 Pokmas	2.255.000	Kecamatan Tanete Riaja

KODE				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB		
															Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatanTingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatanTingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	100%	100%	100%		100%	109.255.000			100%	137.200.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 lbg	5 lbg	5 lbg	Kec. Tanete Riaja	5 lbg	109.255.000	APBD		5 lbg	137.200.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%		100%	42.121.000			100%	30.621.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7	01	04	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	125 Orang	25 Orang	25 Orang		25 Orang	42.121.000			25 Orang	30.621.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7	01	04	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	125 Orang	25 Orang	25 Orang	Kec. Tanete Riaja	25 Orang	42.121.000	APBD		25 Orang	30.621.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan desa/ kel yang dibina dan diawasi	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan desa/ kel yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%		100%	3.258.400			100%	4.100.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan		6 Laporan	3.258.400			6 Laporan	4.100.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	01	05	2.01		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	30 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Kec. Tanete Riaja	6 Laporan	3.258.400	APBD		6 Laporan	4.100.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM	Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM	Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%		100%	32.980.000			100%	49.490.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan	32.980.000			5 Laporan	49.490.000	Kecamatan Tanete Riaja
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	01	06	2.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kec. Tanete Riaja	4 Laporan	16.300.000	APBD		4 Evaluasi	21.200.000	Kecamatan Tanete Riaja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB		
																		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	01	06	2.01	0017	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kec. Tanete Riaja	1 Laporan	16.680.000	APBD		1 Laporan	28.290.000	Kecamatan Tanete Riaja			
KECAMATAN SOPPENG RIAJA																											
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Soppeng Riaja	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Soppeng Riaja	3 point	3 point	3 point			3 point	2.905.895.355			3 point	3.772.522.428	Kantor Kec. Soppeng Riaja		
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Soppeng Riaja	20 JPL	18 JPL	20 JPL			20 JPL				20 JPL				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100	100%	100%			2.441.677.981				2.708.841.908	Kantor Kec. Soppeng Riaja			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	sds	sds	sds	sds	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun	160 orang	30 orang	32 orang	Kec. Soppeng Riaja	32 Orang	2.441.677.981	APBD		32 Orang	2.708.841.908	Kantor Kec. Soppeng Riaja			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	40 orang	4 Orang	-			3 orang	6.897.000			8 Orang	53.155.800	Kantor Kec. Soppeng Riaja		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	01	01	2.05	0011	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	4 Orang	-	Kec. Soppeng Riaja	3 orang	6.897.000	APBD		8 Orang	53.155.800	Kantor Kec. Soppeng Riaja			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%			100%	198.245.900			100%	454.704.400	Kantor Kec. Soppeng Riaja		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan KOMPONEN Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan/penerangan bangunan kantor yang diadakan	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan KOMPONEN Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan/penerangan bangunan kantor yang diadakan	15 paket	-	-	Kec. Soppeng Riaja	2 Paket	465.000	APBD		3 Paket	6.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	-	-	Kec. Soppeng Riaja	3 Paket	1.185.000	APBD		3 Paket	12.100.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja			
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	4 paket	9 paket	Kec. Soppeng Riaja	11 Paket	26.143.400	APBD		3 Paket	213.672.200	Kantor Kec. Soppeng Riaja			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	30 paket	-	3 paket	Kec. Soppeng Riaja	4 Paket	3.574.000	APBD		6 Paket	13.400.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	Kec. Soppeng Riaja	5 Dokumen	7.980.000	APBD		5 Dokumen	8.400.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja			
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	-	12 Laporan	Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	5.491.000	APBD		12 Laporan	2.340.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	60 laporan	12 laporan	12 Laporan	Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	153.407.500	APBD		12 Laporan	198.792.200	Kantor Kec. Soppeng Riaja			

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%		100%	27.065.000			100%	138.306.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	25 unit	-	-	Kec. Soppeng Riaja	60 unit	7.800.000	APBD		5 unit	11.307.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	25 Unit	5 unit	1 unit	Kec. Soppeng Riaja	2 unit	19.265.000	APBD		5 unit	61.999.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%		100%	169.457.274			100%	183.714.320	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	-	-	Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	11.630.000	APBD		12 Laporan	26.954.400	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 Laporan	Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	30.027.274	APBD		12 Laporan	40.959.920	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	127.800.000	APBD		12 Laporan	115.800.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100%	62.552.200			100%	233.800.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110 unit	-	-	Kec. Soppeng Riaja	3 unit	2.550.000	APBD		22 Unit	93.100.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 unit	7 unit	7 unit	Kec. Soppeng Riaja	4 unit	41.600.000	APBD		11 unit	37.250.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	16 unit	9 unit	Kec. Soppeng Riaja	16 unit	8.420.000	APBD		5 unit	17.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	-	4 unit	Kec. Soppeng Riaja	4 unit	9.982.200	APBD		4 unit	25.750.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Dokumen SOP Pelyanan Kecamatan Yang disusun dan Di implementasikan	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Dokumen SOP Pelyanan Kecamatan Yang disusun dan Di implemantasikan	100%	100%	100%		100%	73.504.800			100%	77.600.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%		7 Desa/Kelurahan	71.903.800			7 Desa/Kelurahan	24.850.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

KODE					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	02	2.01	01	Kordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan atau instansi vertikal	7	01	02	2.01	0001	Kordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan atau instansi vertikal	40 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Kec. Soppeng Riaja	4 Laporan	54.896.800	APBD		8 Laporan	7.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	Kec. Soppeng Riaja	3 Dokumen	17.007.000	APBD		3 Dokumen	17.350.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	100%	100%	100%		100%	1.601.000			100%	52.750.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah kecamatan	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah kecamatan	60 laporan	12 laporan	12 Laporan	Kec. Soppeng Riaja	12 Laporan	1.601.000	APBD		4 Dokumen	52.750.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kelompok/lembaga	100%	100%	100%		100%	492.372.370			100%	438.429.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	1.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%	100%	100%		100%	4.215.000			100%	7.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	1.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 lembaga	5 Lembaga	5 lembaga	Kec. Soppeng Riaja	6 Lembaga	4.215.000	APBD		5 Lembaga	7.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan	100%	100%	100%		100%	249.875.370			100%	371.579.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 lembaga	5 lembaga	6 lembaga	Kec. Soppeng Riaja	6 Lembaga	22.992.000	APBD		5 Lembaga	143.879.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	-	2 unit	Kec. Soppeng Riaja	2 Unit	214.441.370	APBD		2 Unit	15.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas	2 pokmas	6 pokmaa	Kec. Soppeng Riaja	6 Pokmas/ormas	12.032.000	APBD		2 Pokmas/ormas	200.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

KODE						Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJA WAB
																		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	03	2.02	04		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	35 laporan	3 laporan	2 laporan	Kec. Soppeng Riaja	2 Laporan	410.000	APBD		7 Laporan	12.700.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina	25 lembaga	100%	100%		5 Lembaga Kemasyarakatan	238.282.000			5 Lembaga Kemasyarakatan	59.350.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	03	2.03	01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	Kec. Soppeng Riaja	5 Lembaga kemasyarakatan	238.282.000	APBD		5 Lembaga kemasyarakatan	59.350.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	84%	100%		100%	32.071.000			100%	33.400.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	15 laporan	3 laporan	3 laporan		4 laporan	32.071.000			Evaluasi dan Laporan	33.400.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	1 laporan	2 laporan	Kec. Soppeng Riaja	2 Laporan	20.216.000	APBD		1 Evaluasi	25.000.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	04	2.01	04		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	-	1 laporan	Kec. Soppeng Riaja	2 Laporan	11.855.000	APBD		2 Laporan	8.400.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peresentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peresentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%		100%	47.477.000			100%	23.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	05	2.			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	5 keg	1 keg	1 keg		1 Keg	47.477.000			1 Keg	23.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	05	2.01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125 orang	20 orang	22 orang	Kec. Soppeng Riaja	22 Orang	47.477.000	APBD		25 Orang	23.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peresentase Pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peresentase Pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%		100%	4.040.000			100%	7.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
7	01	06	2.1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	25 laporan	5 laporan	5 laporan		5 Laporan	4.040.000			5 Laporan	7.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25 laporan	5 laporan	5 laporan	Kec. Soppeng Riaja	5 Laporan	4.040.000	APBD		5 Laporan	7.500.000	Kantor Kec. Soppeng Riaja	
KECAMATAN BALUSU																									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	4 Point	2 Point	3 Point		3 Point	2.372.735.226			3 Point	2.865.619.986	Kecamatan Balusu	
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JPL	20 JPL	20 JPL		20 JPL							
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	92	100		100%	2.034.218.726			100%	2.394.120.986	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	sds	sds	sds	sds	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	92	23	Kecamatan Balusu	23 orang	2.034.218.726	APBD		23 orang	2.394.120.986	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	100	99%	100		100%	20.500.000			100%	54.714.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	99	100	Kecamatan Balusu	9 orang	20.500.000	APBD		9 orang	54.714.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	99,38	100		100%	171.571.500			100%	199.340.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	100	12	Kecamatan Balusu	12 Paket	1.210.000	APBD		12 Paket	3.000.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	100	7	Kecamatan Balusu	7 Paket	2.500.000	APBD		7 Paket	3.600.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	99,99	1	Kecamatan Balusu	1 paket	20.000.000	APBD		1 paket	25.000.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	99,37	2	Kecamatan Balusu	2 paket	5.636.500	APBD		2 paket	8.500.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10	61,28	2	Kecamatan Balusu	2 Dok	3.960.000	APBD		2 Dok	3.960.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	100	12	Kecamatan Balusu	12 lap	13.265.000	APBD		12 lap	16.500.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	98,59	3	Kecamatan Balusu	581 kali	125.000.000	APBD		581 kali	138.780.000	Kecamatan Balusu	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	230	96,27			46 unit	15.000.000			46 unit	50.000.000	Kecamatan Balusu	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	166	0		Kecamatan Balusu	35 paket	7.500.000	APBD		35 paket	25.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X	XX	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	96:27:00		Kecamatan Balusu	3 jenis	7.500.000	APBD		3 jenis	25.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100	88%	100		5 Laporan	107.600.000			5 Laporan	118.100.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	115%	12	Kecamatan Balusu	12 Laporan	78.000.000	APBD		12 Laporan	78.500.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	83,666	2	Kecamatan Balusu	2 Laporan	20.000.000	APBD		2 Laporan	30.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	100	2	Kecamatan Balusu	2 Laporan	9.600.000	APBD		2 Laporan	9.600.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100	97%	100		35 unit,1 paket	23.845.000			35 unit,1 paket	49.345.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	97	8	Kecamatan Balusu	8 unit	12.345.000	APBD		8 unit	32.345.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22	100	22	Kecamatan Balusu	22 unit	2.000.000	APBD		22 unit	3.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	82	5	Kecamatan Balusu	3 unit	3.000.000	APBD		3 unit	6.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	100	1	Kecamatan Balusu	1 paket	6.500.000	APBD		1 paket	8.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100	90	100		100%	20.000.000			100%	28.500.000	Kecamatan Balusu
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketrpenuhan Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketrpenuhan Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	89%	100		100%	20.000.000			100%	28.500.000	Kecamatan Balusu
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	28,00	3	Kecamatan Balusu	3 Lap	17.500.000	APBD		3 Lap	25.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	100		Kecamatan Balusu	6 dokumen	2.500.000	APBD		6 dokumen	3.500.000	Kecamatan Balusu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	100	81,88	100		100%	364.867.664			100%	390.451.000	Kecamatan Balusu

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prsentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prsentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100	100	100		100%	2.285.000			100%	2.508.500	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30	71	6	Kecamatan Balusu	6 lbg	2.285.000	APBD		6 lbg	2.508.500	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan	100	35%	100%		100%	209.500.000			100%	210.500.000	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunandi Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	0	5	Kecamatan Balusu	5 lbg	6.500.000	APBD		5 lbg	7.500.000	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	0	1	Kecamatan Balusu	1 unit	139.636.500	APBD		1 unit	139.636.500	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	0	2	Kecamatan Balusu	2 Pokmas/ormas	60.363.500	APBD		2 Pokmas/ormas	60.363.500	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	20	1	4	Kecamatan Balusu	4 lap	3.000.000	APBD		4 lap	3.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	100	84%	100		5 lgb,1 lap	153.082.664			5 lgb,1 lap	177.442.500	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25	99	5	Kecamatan Balusu	5 lbg	151.892.664	APBD		5 lbg	174.942.500	Kecamatan Balusu
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	100	1	Kecamatan Balusu	1 Lap	1.190.000	APBD		1 Lap	2.500.000	Kecamatan Balusu
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100		25 orang	37.975.000			25 orang	38.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25	25	25		25 orang	37.975.000			25 orang	38.000.000	Kecamatan Balusu

KODE					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125	25	25	Kecamatan Balusu	25 orang	37.975.000	APBD		25 orang	38.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi	100	81	100		5 LAporan	1.855.000			5 LAporan	3.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	25	81	1		5 laporan	1.855.000			5 laporan	3.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25	100	1	Kecamatan Balusu	5 desa	1.855.000	APBD		5 desa	3.000.000	Kecamatan Balusu
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100	58%	100		100%	23.340.000			100%	23.340.000	Kecamatan Balusu
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	18	5		5 Laporan	23.340.000			5 Laporan	23.340.000	Kecamatan Balusu
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20	127	1	Kecamatan Balusu	4 laporan	14.840.000	APBD		4 Evaluasi	14.840.000	Kecamatan Balusu
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	-	4	Kecamatan Balusu	1 lap	8.500.000	APBD		1 lap	8.500.000	Kecamatan Balusu
KECAMATAN PUJANANTING																								
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Nilai Maturitas SPIP Kecamatan	3 Poin	2 Poin	2 Poin		3 Point	2.253.638.762			3 Point	2.431.317.942	Kecamatan Pujananting
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan										20jpl									
7	1	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya efektifitas dan efesiensi kegiatan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7	1	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya efektifitas dan efesiensi kegiatan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%		14 dok,8 lap	3.104.000			14 dok,8 lap	3.104.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	1	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	2 dok	2 dok	Kecamatan Pujananting	2 dok	482.000	APBD		2 dok	482.000	Kecamatan Pujananting

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	1	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	1	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	1 Dok	1 Dok	Kecamatan Pujananting	1 Dok	437.000	APBD		1 Dok	437.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7	1	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	1 Dok	1 Dok	Kecamatan Pujananting	1 Dok	437.000	APBD		1 Dok	437.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7	1	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dok	1 Dok	1 Dok	Kecamatan Pujananting	1 Dok	437.000	APBD		1 Dok	437.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7	1	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dok	1 Dok	1 Dok	Kecamatan Pujananting	1 Dok	437.000	APBD		1 Dok	437.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	1	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	4 laporan	4 laporan	Kecamatan Pujananting	4 laporan	437.000	APBD		4 laporan	437.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	1	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	4 laporan	4 laporan	Kecamatan Pujananting	4 laporan	437.000	APBD		4 laporan	437.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	7	1	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%		100%	1.856.135.982			100%	1.856.135.982	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7	1	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115	23 org/ bln	23 org/ bln	Kecamatan Pujananting	23 org/ bln	1.855.695.982	APBD		23 org/ bln	1.855.695.982	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	1	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	Kecamatan Pujananting	1 laporan	220.000	APBD		1 laporan	220.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	1	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12 laporan	12 laporan	Kecamatan Pujananting	12 laporan	220.000	APBD		12 laporan	220.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah	7	1	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%		1 dok,1 Lap	600.000			1 dok,1 Lap	600.000	Kecamatan Pujananting
X	X	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	X	XX	01	2,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dok	1 dok	1 dok	Kecamatan Pujananting	1 dok	300.000	APBD		1 dok	300.000	Kecamatan Pujananting
X	X	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	X	XX	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	1 lap	1 lap	Kecamatan Pujananting	1 lap	300.000	APBD		1 lap	300.000	Kecamatan Pujananting

KODE				Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB		
																Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
7	1	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan kegiatan administrasi Kepegawaian	7	1	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan kegiatan administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%		100%	13.000.000			100%	77.556.000	Kecamatan Pujananting		
X	X	X	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X	XX	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	2 orang	2 orang	Kecamatan Pujananting	2 orang	13.000.000	APBD		13 orang	77.556.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	7	1	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%		100%	207.812.500			100%	281.143.000	Kecamatan Pujananting		
7	1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	1	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35	7 Paket	7 Paket	Kecamatan Pujananting	7 Paket	2.152.000	APBD		7 Paket	3.000.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	1	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	20 Paket	20 Paket	Kecamatan Pujananting	20 Paket	7.500.000	APBD		20 Paket	15.000.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	1	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1 paket	1 paket	Kecamatan Pujananting	1 paket	33.900.000	APBD		1 paket	33.900.000	Kecamatan Pujananting	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	2 paket	2 paket	Kecamatan Pujananting	2 paket	5.694.500	APBD		2 paket	5.694.500	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	1	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	20 Dok	20 Dok	Kecamatan Pujananting	20 Dok	4.080.000	APBD		20 Dok	5.060.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	1	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12 lap	12 lap	Kecamatan Pujananting	12 lap	65.926.000	APBD		12 lap	60.926.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	1	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2265	453 Kali	453 Kali	Kecamatan Pujananting	453 Kali	88.560.000	APBD		453 Kali	157.562.500	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUsuran Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7	1	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUsuran Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10.500 unit	21 unit	21 unit		21 unit	33.500.000			21 unit	79.021.000	Kecamatan Pujananting		
7	1	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	X	XX	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	5 Unit	5 Unit	Kecamatan Pujananting	5 Unit	12.500.000	APBD		10 Unit	25.000.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X	XX	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	2 unit	2 unit	Kecamatan Pujananting	2 unit	15.000.000	APBD		1 unit	6.000.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,07	07	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan		XX	01	2,07	0007	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor yang dibutuhkan	20 unit	5 unit	5 unit	Kecamatan Pujananting	5 unit	6.000.000	APBD		5 unit	48.021.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	7	1	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor	100%	100%	100%		100%	91.570.970			100%	82.855.000	Kecamatan Pujananting		
7	1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	1	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kecamatan Pujananting	1 Laporan	14.958.800	APBD		1 Laporan	57.455.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	1	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 laporan	3 Laporan	3 Laporan	Kecamatan Pujananting	3 Laporan	19.612.170	APBD		3 Laporan	20.600.000	Kecamatan Pujananting	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
7	1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	1	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kecamatan Pujananting	1 Laporan	57.000.000	APBD		1 Laporan	4.800.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	7	1	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100%	100%	100%		100%	47.915.310			100%	50.902.960	Kecamatan Pujananting	
X	X	X	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X	XX	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	8 unit	8 unit	Kecamatan Pujananting	8 unit	30.350.000	APBD		8 unit	30.350.000	Kecamatan Pujananting
7	1	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7	1	01	2,09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	65	13 unit	13 unit	Kecamatan Pujananting	13 unit	2.525.310	APBD		13 unit	2.525.310	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	1	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5unit	5unit	Kecamatan Pujananting	5unit	5.000.000	APBD		3unit	3.500.000	Kecamatan Pujananting	
7	1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	1	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Paket	2 paket	2 paket	Kecamatan Pujananting	2 paket	10.040.000	APBD		2 paket	14.527.650	Kecamatan Pujananting	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan	100%	100%	100%		100%	5.300.000			100%	13.835.000	Kecamatan Pujananting	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketrpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Ketrpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%		100%	4.500.000			100%	13.035.000	Kecamatan Pujananting	
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	01	02	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 lap	3 Lap	3 Lap	Kecamatan Pujananting	3 Lap	4.500.000	APBD		3 Lap	13.035.000	Kecamatan Pujananting	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP	100%	100%	100%		100%	800.000			100%	800.000	Kecamatan Pujananting	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	01	02	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	Kecamatan Pujananting	7 dokumen	800.000	APBD		7 dokumen	800.000	Kecamatan Pujananting	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat /kelompok/lembaga	100%	100%	100%		100%	316.142.000			100%	362.756.961	Kecamatan Pujananting	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan	7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan	100%	100%	100%		100%	265.191.000			100%	205.960.361	Kecamatan Pujananting	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	01	03	2,02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	2 unit	2 unit	Kecamatan Pujananting	2 unit	130.500.000	APBD		2 unit	194.960.361	Kecamatan Pujananting	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	01	03	2,02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	2 Pokmas/ormas	2 Pokmas/ormas	Kecamatan Pujananting	2 Pokmas/ormas	133.691.000	APBD		2 Pokmas/ormas	10.000.000	Kecamatan Pujananting
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	01	03	2,02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10	2 lap	2 lap	Kecamatan Pujananting	2 lap	1.000.000	APBD		2 lap	1.000.000	Kecamatan Pujananting
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	100%	100%	100%		100%	50.951.000			100%	156.796.600	Kecamatan Pujananting
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	01	03	2,03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lbg	3 lbg	3 lbg	Kecamatan Pujananting	3 lbg	40.551.000	APBD		3 lbg	102.000.000	Kecamatan Pujananting
7	01	03	2,03	04	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan Difasilitasi	7	01	03	2,03	0004	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan Difasilitasi	20 lbg	4 lembaga	4 lembaga	Kecamatan Pujananting	4 lembaga	10.400.000	APBD		4 lembaga	54.796.600	Kecamatan Pujananting
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%		100%	34.504.400			100%	34.504.400	Kecamatan Pujananting
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	100%		100%	34.504.400			100%	34.504.400	Kecamatan Pujananting
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7	01	05	2,01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	135 Orang	27 Orang	27 Orang	Kecamatan Pujananting	27 orang	34.504.400	APBD		27 orang	34.504.400	Kecamatan Pujananting
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%		100%	1.710.000			100%	1.800.000	Kecamatan Pujananting
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	30 Laporan	6 laporan	6 laporan		6 laporan	1.710.000			6 laporan	1.800.000	Kecamatan Pujananting
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	01	06	2,01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	30 Desa	6 Desa	6 Desa	Kecamatan Pujananting	6 desa	1.710.000	APBD		6 desa	1.800.000	Kecamatan Pujananting
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%		100%	28.728.000			100%	28.728.000	Kecamatan Pujananting
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	28.728.000			1 Laporan	28.728.000	Kecamatan Pujananting

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Kecamatan Pujananting	4 Laporan	16.728.000	APBD		4 Evaluasi	16.728.000	Kecamatan Pujananting	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	1 lap	1 lap	Kecamatan Pujananting	1 lap	12.000.000	APBD		1 lap	12.000.000	Kecamatan Pujananting	
KECAMATAN MALLUSETASI																									
7	1	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP kecamatan	7	1	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Maturitas SPIP kecamatan	3 Poin	2 Poin	2 Poin		3 Poin	4.117.915.878				3 level	3.197.064.931	Kantor Kecamatan Mallusetasi
						Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan							Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	100 JPL	20 JPL	0		20 JPL					20 JPL		
7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%		100%	3.309.023.230				100%	2.114.690.931	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7	1	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	Kecamatan Mallusetasi	43 Orang/Bulan	3.309.023.230	APBD		43 Orang/Bulan	2.114.690.931	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	7	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN	91,65%	15%	0		18,75%	49.377.000				20,83%	30.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	1	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 orang	14 orang	0	Kecamatan Mallusetasi	9 orang	49.377.000	APBD		10 orang	30.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	7	1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	100	100		100%	266.573.500				100%	379.263.500	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	1	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	Kecamatan Mallusetasi	4 paket	16.190.000	APBD		4 paket	37.440.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7	1	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	40 paket	4 paket	12 paket	Kecamatan Mallusetasi	8 paket	7.497.000	APBD		8 paket	16.623.500	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	1	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 dok.	5 dok.	4 dok.	Kecamatan Mallusetasi	5 dok.	9.840.000	APBD		5 dok.	11.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7	1	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	Kecamatan Mallusetasi	12 laporan	233.046.500	APBD		12 laporan	277.950.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%		100%	7.500.000				100%	176.010.500	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	1	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 unit	6 unit	5 unit	Kecamatan Mallusetasi	8 unit	7.500.000	APBD		8 unit	140.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	

KODE				Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN				Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
															Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
7	1	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	7	1	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	100%	Kecamatan Mallusetasi	100%	431.007.148	APBD		100%	401.100.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi	
7	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	1	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	12 laporan	12 laporan	Kecamatan Mallusetasi	12 laporan	41.371.500	APBD	12 laporan	41.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	1	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	Kecamatan Mallusetasi	12 laporan	56.035.648	APBD	12 laporan	24.000.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	1	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	Kecamatan Mallusetasi	12 laporan	333.600.000	APBD	12 laporan	321.600.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUsuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah PenunjangUsuran Pemerintahan Daerah yang dipelihara	7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUsuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%		100%	54.435.000		100%	95.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	1	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	170 unit	28 unit	34 unit	Kecamatan Mallusetasi	34 unit	45.635.000	APBD	34 unit	61.000.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	1	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 unit	44 unit	31 unit	Kecamatan Mallusetasi	31 unit	8.800.000	APBD	31 unit	14.000.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	02	.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen SOP Pelayanan yand disusun dan Implementasikan	7	1	02	.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen SOP Pelayanan yand disusun dan Implementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	7.500.000		100%	19.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	1	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	7.500.000		100%	12.000.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7	1	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 laporan	2 laporan	2 laporan	Kecamatan Mallusetasi	2 laporan	7.500.000	APBD	2 laporan	7.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/ kelompok/ lemb aga	7	1	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/ kelompok/ lemb aga	100%	100%	100%		100%	788.570.000		100%	1.461.793.730	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	7	1	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	100%	100%	100%		100%	2.660.000		100%	114.750.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	1	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	Kecamatan Mallusetasi	5 lembaga	2.660.000	APBD	5 lembaga	114.750.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kelompok Masyarakat yang mendukung Kegiatan Pemberdayaan	7	1	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Kelompok Masyarakat yang mendukung Kegiatan Pemberdayaan	100%	100%	100%		100%	627.628.000		100%	1.150.293.730	Kantor Kecamatan Mallusetasi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	1	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	1	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	Kecamatan Mallusetasi	5 lembaga	30.814.000	APBD		5 lembaga	114.750.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	1	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 unit	3 unit	3 unit	Kecamatan Mallusetasi	6 unit	492.000.000	APBD		6 unit	816.293.730	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	1	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150 Klp.	30 Klp.	30 Klp.	Kecamatan Mallusetasi	30 klp.	100.800.000	APBD		30 klp.	215.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	1	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	15 laporan	3 laporan	3 laporan	Kecamatan Mallusetasi	3 laporan	4.014.000	APBD		3 laporan	4.000.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	7	1	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina	100%	100%	100%		100%	158.282.000			100%	196.750.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7	1	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	Kecamatan Mallusetasi	5 lembaga	158.282.000	APBD		5 lembaga	196.750.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	50%	50%		100%	32.150.000			100%	32.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7	1	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	75 Lap.	14 Laporan	14 laporan		15 Lap.	32.150.000			15 Lap.	32.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	1	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	Kecamatan Mallusetasi	12 Laporan	19.650.000	APBD		12 Evaluasi	19.750.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7	1	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15 laporan	2 laporan	2 laporan	Kecamatan Mallusetasi	3 laporan	12.500.000	APBD		3 laporan	12.500.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7	1	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%		100%	39.463.400			100%	56.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	125 orang	25 orang	25 orang		25 orang	39.463.400			100	56.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
7	1	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KEsatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7	1	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan kebangsaaan dan Ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara KEsatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125 orang	25 orang	25 orang	Kecamatan Mallusetasi	25 orang	39.463.400	APBD		25 orang	56.250.000	Kantor Kecamatan Mallusetasi
					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
1					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara.	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Barru	100%	1.208.690.400	D A U		100%	1.209.690.400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	02	2.01			Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karater Kebangsaan.	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila danKarakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karater Kebangsaan.	13 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Barru	2 Dokumen	1.208.690.400	D A U		3 Dokumen	1.209.690.400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	02	2.01	03		Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 Orang	35 Orang	200 Orang	Barru	84 Orang	1.197.690.400	D A U		84 Orang	1.197.690.400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	02	2.01	04		Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	10 Orang	20 Orang	Barru	10 Orang	11.000.000	D A U		70 Orang	12.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada.	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu/Pilkada.	400 Persen	0 Persen	80 Persen	Barru	80%	24.109.010.333	D A U		80%	649.459.296	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	03	2.01			Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pilkada Serta Pantauan Situasi Politik.	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pilkada Serta Pantauan Situasi Politik.	20 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	Barru	3 Dokumen	24.109.010.333	D A U		3 Dokumen	649.459.296	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	03	2.01	03		Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2460 Orang	327 Orang	522 Orang	Barru	92.300 Orang	572.020.650	D A U		92.300 Orang	572.020.650	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	03	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	84 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	Barru	5 Laporan	23.536.989.683	D A U		12 Laporan	77.438.646	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi.	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Barru	100%	133.234.689	D A U		100%	133.889.183	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	04	2.01			Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Barru	3 Dokumen	133.234.689	D A U		3 Dokumen	133.889.183	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	04	2.01	04		Pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	830 Orang	195 Orang	166 Orang	Barru	200 Orang	90.000.000	D A U		200 Orang	90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	04	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	Barru	1 Laporan	43.234.689	D A U		1 Laporan	43.889.183	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemnbinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemnbinaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Barru	100%	123.558.782	D A U		100%	126.029.938	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	2.01			Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan PematapanPelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Barru	2 Dokumen	123.558.782	D A U		2 Dokumen	126.029.938	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	2.01	03		Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang	55 Orang	200 Orang	Barru	200 Orang	40.000.000	D A U		200 Orang	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	05	2.01	04		Pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350 Orang	35 Orang	70 Orang	Barru	19 Orang	83.558.782	D A U		70 Orang	86.029.938	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat.	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial di Lingkungan Masyarakat.	50 Persen	20 Persen	50 Persen	Barru	50%	342.156.063	D A U		50%	348.999.184	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	06	2.01			Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Tehnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	19 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	Barru	5 Dokumen	342.156.063	D A U		5 Dokumen	348.999.184	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	06	2.01	03		Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	600 Orang	0 Orang	100 Orang	Barru	100 Orang	31.055.821	D A U		100 Orang	33.999.184	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	06	2.01	04		Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	990 Orang	100 Orang	198 Orang	Barru	57 Orang	121.944.179	D A U		198 orang	124.980.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	06	2.01	05		Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60 Orang	12 Orang	12 Orang	Barru	12 Laporan	20.000.000	D A U		12 Laporan	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	06	2.01	06		Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota (FORKOPIMDA).	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota (FORKOPIMDA).	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Barru	4 Dokumen	169.156.063	D A U		12 Dokumen	170.020.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
						Nilai Reformasi, Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.							Nilai Reformasi, Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	80	60	60	Barru	70 (BB)		D A U		70 (BB)		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB	
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
01	01				Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barru.	8	01	01		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barru.	80	60	70	Barru	70 (BB)		D A U		70 (BB)		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
						Nilai maturitas SPIP Kesbangpol.						4	3	3	3,00		2.165.905.952				D A U		4,00	2.175.432.044	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
						Rata-rata lama Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan.						20 JPL	0 JPL	20 JLP	20 JPL								20 JPL		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan.	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang- undangan.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Barru	100%	1.689.583.018	D A U		100%	1.689.583.018	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
01	01	2.02	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN.	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN.	89 Orang	21 Orang	19 Orang	Barru	20 Orang	1.689.583.018	D A U		20 Orang	1.689.583.018	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN.	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Barru	100%	85.000.000	D A U		100%	95.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	66 Orang	11 Orang	13 Orang	Barru	13 Orang	85.000.000	D A U		14 Orang	95.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah.	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Barru	100%	203.600.429	D A U		100%	177.101.948	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.	5 Paket	1 Paket	1 Paket	Barru	6 Paket	1.600.429	D A U		1 Paket	1.600.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	5 Paket	1 Paket	1 Paket	Barru	9 Paket	2.000.000	D A U		1 Paket	2.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	2150 Orang	213 Orang	400 Orang	Barru	450 Laporan	200.000.000	D A U		450 Laporan	173.501.948	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Barru	100%	40.000.000	D A U		100%	34.498.052	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan.	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan.	41 Unit	6 Unit	8 Unit	Barru	5 Unit	40.000.000	D A U		8 Unit	34.498.052	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor.	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor.	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Barru	100%	74.722.505	D A U		100%	82.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
01	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	20 Laporan	4 Laporan	4 laporan	Barru	4 Laporan	52.722.505	D A U		4 Laporan	60.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	KODE REKENING PEMUTAKHIRAN					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/Kegiatan/Sub Kegiatan PEMUTAKHIRAN	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) PEMUTAKHIRAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025		PENANGGUNGJAWAB
																	Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan.	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan.	60 Laporan	24 laporan	12 laporan	Barru	24 Laporan	22.000.000	D A U		24 Laporan	22.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.	100 Persen	100 persen	100 persen	Barru	100%	73.000.000	D A U		100%	97.249.026	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan.	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan.	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	25 Unit	5 Unit	5 Unit	Barru	6 Unit	40.000.000	D A U		5 Unit	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.	59 Unit	3 Unit	10 Unit	Barru	5 Unit	3.000.000	D A U		14 Unit	4.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
01	01	2.09	09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi.	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi.	4 Unit	0 Unit	1 Unit	Barru	1 Unit	30.000.000	D A U		1 Unit	48.249.026	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
																			832.704.906.813					
																			1.145.039.945.001					

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barru, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dicapai.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indicator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sector, urusan, dan bidang pemerintahan sebagaimana dituangkan pada table berikut.

Tabel 6.1

Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,53	72,16	72,57
	• Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,35	69,06	69,07
	• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,25	8,77	8,84
	• Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,61	13,62	13,63
	• Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)	Ribu Rupiah/ Orang	11,27	11.37	11.43

2	Kemiskinan				
	• Tingkat Kemiskinan	%	8,4	6,67	6,41
	• Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	14.730	11.696	11.240
	• Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka/ nilai	0,07	0.055	0.053
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	5,31	5,14
	• Jumlah Penganggur	jiwa	4.495	4.484	4.341
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,91	6,64
5	PDRB Perkapita				
	• ADHB	Juta Rp	47,50	48,5	51
	• ADHK	Juta Rp	28,51	47,50	50,92
6	Rasio Gini	Angka	0,36	0,34	0,33

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2

Capaian Indikator Kinerja Utama 2021, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Asumsi Capaian 2023	Target Tahun 2024
			Target	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,79	71,53	72,27	72,57
	• Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,05	69,35	69,06	69,07
	• Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,53	8,25	8,77	8,84
	• Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,61	13,61	13,62	13,63

	• Pengeluaran Per Kapita (Disesuaikan)	Ribu Rupiah/ Orang		11,27	11,37	11,43
2	Indeks Pendidikan	Poin	69,94	65,31	70,28	70,83
3	Indeks Kesehatan	Poin	76,69	75,92	76,93	77,26
4	Paritas Daya Beli	Juta Rupiah	11,12	11,27	11,35	11,63
5	Persentase Penurunan Korban meninggal dan hilang karena bencana	%	0,011	0,061	0,009	0,006
6	Persentase Peningkatan Desa/Kel Pemajuan Kebudayaan dari 0 menjadi 12,73%	%	5,45	0,05	7,25	9,09
7	Indeks Ketahanan Bencana	Poin	0,69	0,64	0,72	0,75
8	Persentase Objek Kemajuan Budaya yang terpelihara	%	9,52	0,083	11,11	12,7
9	Indeks Williamson	Poin	0,29	0,29	0,28	0,27
10	Indeks daya saing daerah Pilar infrastruktur	Poin	3,82	1,95	3,874	3,881
11	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	5,11	5,91	6,64
12	Persentase Kontribusi Sektor- sektor strategis terhadap PDRB	%	51,94	50,27	52,52	52,97
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	73,73	72,04	74	74,26
14	Indeks Gini	Poin	0,35	0,33	0,34	0,33
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,88	5,32	5,31	5,14
16	Angka Kemiskinan	%	7,45	8,40	6,67	6,41
17	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	65	50,13	70	73
18	Nilai SAKIP	Poin	60	57,34	65	70
19	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,51	3,96	3,7	4
20	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	6,5	0,04	6,1	5,9
21	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Poin	0,001	0,001	0,001	0,001

6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Asumsi Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kab. Barru
Tahun 2024

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangka t Daerah
1					ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	1				KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI					
1	1	1			Tingkat kemiskinan	%	8,40	8,57	8,32	Disnaker, Dinsos, Diskumdag
1	1	2			Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,93	7,04	DPMPTSP, Dinas Perikanan, Disparpora, Dinas Pert. &Ketahana n Pangan
1	1	3			PDRB per kapita	Juta Rp	47,50	47,08	51	DPMPTSP, Dinas Perikanan, Disparpora, Dinas Pert. & Ketahanan Pangan
1	1	4			Indeks Gini	Poin	0,36	0,34	0,33	Disnaker, Dinsos, Diskumdag
1	1	5			Laju inflasi	%	6,66	3,0 - 1,0	3,0 - 1,0	Dinas Perikanan, Disparpora, Dinas Pert. & Ketahanan Pangan, Diskumdag
1	1	6			Indeks Williamson	Poin	0,29	0,28	0,27	Dinas PUPR,PKP, Pertanahan & Dishub
1	2				KESEJAHTERAAN SOSIAL					
1	2	1			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,53	72,27	72,57	Dinas Pendidikan & Kebudayaa n
1	2	2			Tingkat pengangguran terbuka	%	5,32	5,31	5,14	Disnaker, Dinsos, Diskumdag
1	2	3			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,62	13,63	Dinas Pendidikan & Kebudayaa n
1	2	4			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,25	8,77	8,84	Dinas

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
										Pendidikan & Kebudayaan
1	2	5			Angka usia harapan hidup	Tahun	69,35	69,06	69,07	Dinas Kesehatan
1	2	6			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	95,64	95,62	95,65	Dinas PMDPPKB&PPPA
1	2	7			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	65,24	64,15	64,25	PMDPPKB&PPPA
2					ASPEK PELAYANAN UMUM					
2	2				Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
2	2	1			Pendidikan					
2	2	1	1		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	74,14	93,05	95,12	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	97,43	95,37	97,03	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,87	94,5	96	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	87,42	87,14	90,93	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	5	1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A	%	103,23	106,6	107,41	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	5	2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	88,87	108,63	109,46	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	6	1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	99,39	95,37	97,03	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	6	2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	82,21	94,5	96	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	7	1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A	%	99,38	100	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	7	2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B	%	94,01	100	100	Dinas Pendidikan

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
										& Kebudayaan
2	2	1	8	1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,52	0	0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	8	2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,90	0	0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	9	1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,63	100	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	9	2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,82	100	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	10	1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	90,29	100	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	10	2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	-	100	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	11	1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94,24	96,39	97,13	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	11	2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	55,56	56,26	56,69	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	12	1	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD	%	99,50	104,99	105,79	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	12	2	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SMP	%	38,24	57,18	57,62	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	13	1	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar (SD)	nilai	664,98	1040,9	1032,99	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	13	2	Rasio guru/murid pendidikan dasar SMP (SMP)	nilai	1.434,29	713,48	708,06	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	14		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	89,17	99,31	99,39	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	1	15		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	90,02	90,71	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	2	2			Kesehatan					
2	2	2	1		Angka Kematian Bayi (AKB)	angka per	15	1,75	1,67	Dinas

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
					Bayi per 1000 kelahiran hidup	100.000				Kesehatan
	2	2	2		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	angka per 100.000	99,60	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	2	3		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	1	0,19	0,18	Dinas Kesehatan
2	2	2	4		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka per 100.000	15	1,24	1,06	Dinas Kesehatan
2	2	2	5		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka per 100.000	67	47	40	Dinas Kesehatan
2	2	2	6		Rasio dokter per satuan penduduk	angka per 1000	15	0,28	0,28	Dinas Kesehatan
2	2	2	7		Rasio tenaga medis persatuan penduduk	angka per 1000	99,60	0,45	0,45	Dinas Kesehatan
2	2	2	8		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	1	0,5	0,5	Dinas Kesehatan
2	2	2	9		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang Terakreditasi (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	15	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	2	10		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	67	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	2	11		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	0,25	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	2	12		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	0,43	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	2	13		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	0,1	63,1	63,8	Dinas Kesehatan
2	2	2	14		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	66,1	66,8	Dinas Kesehatan
2	2	2	15		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	59,1	59,8	Dinas Kesehatan
2	2	2	16		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	81,1	81,8	Dinas Kesehatan
2	2	2	17		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	95	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	2	18		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	82,60	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	2	19		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	89	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	2	20		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	69	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	2	21		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	69	74,7	75,6	Dinas Kesehatan

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
2	2	2	22		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	65	100	100	Dinas Kesehatan
2	2	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2	2	3	1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Nilai	8,46	6,54	7,37	Dinas PUPR,PKP
2	2	3	2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Nilai	17,06	31,04	31,87	Dinas PUPR,PKP, Pertanahan
2	2	3	3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (Permendagri 18 Tahun 2020)	Nilai	27,90	54,49	55,32	Dinas PUPR,Dinas Pertanian
2	2	3	4		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	51,67	56	58	Dinas PUPR,Dinas Pertanian
2	2	3	5		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	95,75	98,31	98,87	Dinas PUPR,PKP
2	2	3	6		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	95,49	98,24	Dinas PUPR,PKP
2	2	3	7		Rasio kepatuhan IMB kab/kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	100	100	Dinas PUPR & Pertanahan
2	2	3	8		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	74,58	84,01	84,84	Dinas PUPR, Pertanahan & Dishub
2	2	3	9		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	25	72,19	73,02	Dinas PUPR
2	2	3	10		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	Dinas PUPR
2	2	3	11		Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	6,41	100	100	Dinas PUPR
2	2	3	12		Persentase areal kawasan kumuh	%	0,06	0,06	0,06	Dinas PUPR,PKP
2	2	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman					
2	2	4	1		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	100	100	Dinas PKP
2	2	4	2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	100	100	Dinas PKP
2	2	4	3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah	Persen	86,21	75,37	76,84	Dinas PKP

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
					10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (Permendagri 18 Tahun 2020)					
2	2	4	4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	1,09	3,29	3,01	Dinas PKP
2	2	4	5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	54,6	38,32	39,79	Dinas PKP
2	2	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
2	2	5	1		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	100	100	Satpol PP & Damkar, Kesbangpol, Setda
2	2	5	2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	100	100	100	Satpol PP & Damkar
2	2	5	3		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	Per 10.000 pddk	0,38	0,56	0,59	Kesbangpol
2	2	5	4		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	100	Satpol PP & Damkar, Kesbangpol, Setda
2	2	5	5		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	177.648	25319	26195	BPBD
2	2	5	6		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Permendagri 18 Tahun 2020)	Orang	177.648	27819	28795	BPBD
2	2	5	7		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Permendagri 18 Tahun 2020)	Orang	100	100	100	BPBD & Dinas Sosial
2	2	5	8		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	100	100	Satpol PP & Damkar
2	2	5	9		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100	100	Satpol PP & Damkar
2	2	5	10		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	100	15	15	Satpol PP & Damkar
2	2	6			Sosial					
2	2	6	1		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	Dinas Sosial
2	2	6	1		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	100	100	Dinas Sosial
2	2	6	1		Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	80	90	Dinas Sosial
2	2	6	2		Presentase PMKS yang tertangani	%	100	80	90	Dinas Sosial

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
2	3				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
2	3	1			Tenaga Kerja					
2	3	1	1		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	58	66	74	Dinas Tenaga Kerja
2	3	1	2		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	56,86	58,46	60,06	Dinas Tenaga Kerja
2	3	1	3		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	3.982,83	61	69	Dinas Tenaga Kerja
2	3	1	4		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	78,60	52,16	61,44	Dinas Tenaga Kerja
2	3	1	5		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	42,81	12,1	14,4	Dinas Tenaga Kerja
2	3	1	6		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		67,00	71,07	71,61	Dinas Tenaga Kerja
2	3	1	7		Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah		0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
2	3	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2	3	2	1		Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	41,42	13,85	14,05	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	2	2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	0,28	0,37	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	2	3		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	9,85	19,01	19,56	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	2	4		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	21,7	22,3	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	2	5		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	0	0,33	0,27	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	2	6		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	2	7		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	2	8		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	Dinas PMDPPKB&P3A

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
2	3	3			Pangan					
2	3	3	1		Ketersediaan pangan utama (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	237.980	46,92	47,82	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
2	3	3	2		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	77,30	68	72	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
2	3	4			Pertanahan					
2	3	4	1		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	42,37	100	100	Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Pertanahan
2	3	4	2		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	71	78	Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Pertanahan
2	3	4	3		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	100	100	100	Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Pertanahan
2	3	4	4		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	14,85	14	17	Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Pertanahan
2	3	5			Lingkungan Hidup					
2	3	5	1		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Nilai	72,04	74,26	74,52	Dinas Lingk. Hidup
2	3	5	2		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	81,63	82	Dinas Lingk. Hidup
2	3	5	3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	100	100	Dinas Lingk. Hidup
2	3	5	4		Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada/Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Dinas Lingk.Hidup
2	3	5	5		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Daerah	Ada/Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Dinas Lingk. Hidup
2	3	5	6		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada/Tidak ada	Ada	ADA	ADA	Dinas Lingk. Hidup
2	3	5	7		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	50,67	62	64	Dinas Lingk. Hidup
2	3	5	8		Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	92,74	91,84	92,31	Dinas Lingk. Hidup
2	3	5	9		Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan Lahan	poin	70,44	71	73	Dinas Lingk. Hidup
2	3	5	10		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	%	23,00	7,17%	8,22%	DPMPTSP, Dinas Lingk. Hidup

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
					LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah					
2	3	5	11		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di daerah	%	2	100	100	Dinas Lingk. Hidup
2	3	6			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2	3	6	1		Perekaman KTP elektronik (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	98,72	100	100	Disdukcapil
2	3	6	2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Kepemilikan akta kelahiran	Persen	41,10	45	45	Disdukcapil
2	3	6	3		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	22	95,25	Disdukcapil
2	3	6	4		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Angka	98	100	100	Disdukcapil
2	3	6	5		Rasio pasangan berakte nikah	%	50,72	100	100	Disdukcapil
2	3	6	6		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	ADA	ADA	Disdukcapil
2	3	6	7		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Disdukcapil
2	3	6	8		Cakupan Penerbitan KTP	%	98,06	100	100	Disdukcapil
2	3	6	9		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	46,66	96	96	Disdukcapil
2	3	7			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
					Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	100	100	100	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	7	1		Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	57,5	45,22	53,22	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	7	2		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	1	1	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	7	3		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1	1 Kelompok Binaan LPM	1 Kelompok Binaan LPM	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	7	4		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		41,70	42,8	43,98	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	7	5		Presentase LPM Berprestasi	%	35,00	36,49	41,14	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	7	6		Presentase PKK aktif	%	100	100%	100%	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	7	7		Presentase Posyandu aktif	%	100	100%	100%	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	7	8		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30	30%	30%	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	7	9		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	50	50%	50%	Dinas PMDPPKB& P3A
2	3	8			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
X	X				TFR (Angka Kelahiran Total) (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	2,52	2,50	2,40	Dinas

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
										PMDPPKB&P3A
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	17,41	16,50	15	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	1		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	64,99	72,3	74,3	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	2		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	1,44	1	0,87	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	3		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,41	18,13	18,63	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	4		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	10,20	15,08	15,5	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	5		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	32,44	54,35	55,85	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	6		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	51,12	48,97	50,32	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	7		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	43,06	32,66	33,56	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	8		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	50,35	35,98	36,98	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	9		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100%	100%	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	10		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	757	976,6	1003,55	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	11		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100%	100%	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	13		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	97,77	58,34	60,9	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	14		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100%	100%	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	15		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	10,55	100%	100%	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	16		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100%	100%	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	17		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100%	100%	Dinas PMDPPKB&P3A
2	3	8	18		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi	%	100	100%	100%	Dinas PMDPPKB

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
					keluarga					&P3A
2	3	9			Perhubungan					
2	3	9	1		Rasio konektivitas kabupaten/kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Nilai	0,76	72,89	73,23	Dinas Perhubungan
2	3	9	2		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Nilai	0,5	0,6	0,7	Dinas Perhubungan
2	3	9	3		Jumlah arus penumpang angkutan umum	jiwa	288,282	2.096.196	2.301.623	Dinas Perhubungan
2	3	9	4		Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Unit	8	11	11	Dinas Perhubungan
2	3	9	5		Presentase layanan Angkutan darat	%	0,04	100	100	Dinas Perhubungan
2	3	9	6		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org/Ton	189.900	931.890 Orang, 13.093 Ton	939.723 Orang, 13.879 Ton	Dinas Perhubungan
2	3	9	7		Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Org/Ton	237.738 Org, 18.552.717 Ton	1.893.899 Orang, 9.792.798 Ton	1.903.555 Orang, 9.812.094 Ton	Dinas Perhubungan
2	3	10			Komunikasi dan Informatika					
2	3	10	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	100	100	Diskominsta
2	3	10	2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	86,04	100	100	Diskominsta
2	3	10	3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	42,54	98	99	Diskominsta
2	3	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
2	3	11	1		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	37,91	39,01	Diskumdag
2	3	11	2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	42,80	46,88	48,98	Diskumdag
2	3	11	3		Persentase koperasi aktif	%	63,55	79,89	83,65	Diskumdag
2	3	11	4		Persentase UKM non BPR/LKM UKM	%	-	95,87	96,54	Diskumdag
2	3	11	5		Presentase BPR/LKM Aktif	%	71,43	75,14	76,41	Diskumdag
2	3	11	6		Presentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,36	99,87	99,89	Diskumdag
2	3	12			Penanaman Modal					
					Persentase peningkatan	%	5,54	5,64	5,73	DPMPTSP

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
					investasi di Kabupaten / Kota (Permendagri 18 Tahun 2020)					
2	3	12	1		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	49	124,1209	126,2309	DPMPTSP
2	3	12	2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	424.182.849.592	873.404.546.203	879.518.378.026	DPMPTSP
2	3	12	3		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp.	-6,36	17,42077	17,54272	DPMPTSP
2	3	1	3		Kepemudaan dan Olahraga					
2	3	13	1		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	0,74	0,91	1,12	Disparpora
2	3	13	2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	1,70	15,30	17,30	Disparpora
2	3	13	3		Peningkatan prestasi olahraga (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	10	26,1	27,4	Disparpora
2	3	13	4		Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	Disparpora
2	3	13	5		Presentase wirausaha muda	%	52,77	14,02	14,26	Disparpora
2	3	13	6		Cakupan pembinaan olahraga	%	92,86	100	100	Disparpora
2	3	13	7		Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	77,78	7,59	8,48	Disparpora
2	3	13	8		Jumlah atlet berprestasi	Org	0	2	2	Disparpora
2	3	13	9		Cakupan pembinaan atlet muda	%	68,27	74,58	75,85	Disparpora
2	3	13	10		Jumlah Prestasi olahraga	Org	0	2	2	Disparpora
2	3	1	4		Statistik					
2	3	14	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	84	86	Bappelitbangda, Diskominsta
2	3	14	2		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	84	86	Bappelitbangda, Diskominsta
2	3	14	3		Buku "kabupaten dalam angka"	ADA/TDK	Ada	ADA	ADA	Bappelitbangda, Diskominsta
2	3	14	4		Buku "PDRB kabupaten"	ADA/TDK		ADA	ADA	Bappelitbangda, Diskominsta
2	3	1	5		Persandian					
2	3	15	1		Tingkat keamanan informasi pemerintah (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	100	100	100	Diskominsta
2	3	15	2		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	2,7	2,7	2,7	Diskominsta
2	3	1	6		Kebudayaan					
2	3	16	1		Terlestarikannya Cagar Budaya (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	15	100	100	Dinas Pendidikan &

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
										Kebudayaan
2	3	16	2		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	100	10	10	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	3	16	3		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3	84,15	85,58	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	3	16	4		Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jenis	15	10	13	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	3	16	5		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	15	32	32	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	3	17			Perpustakaan					
					Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	69,52	60	62	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	37,55	24,00	25,00	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	3	17	1		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa	127.693	127577	129746	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	3	17	2		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	59.837	61729	62778	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	3	17	3		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Poin	0,29	0,3	0,3	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	3	18	4		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	10	2	3	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	3	18			Kearsipan					
2	3	18	1		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) (Permendagri 18 Tahun 2020)	Nilai	55,00	57,5	60,5	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	3	18	2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (Permendagri 18 Tahun 2020)	Nilai	0	59	62	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	3	18	3		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	75	100	100	Dinas Perpustakaan & Kearsipan

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
2	3	18	4		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Org	50	3	4	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
2	4				Pelayanan Urusan Pilihan					
2	4	1			Kelautan dan Perikanan					
2	4	1	1		Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) (Permendagri 18 Tahun 2020)	Ton	26.421,30	27350,51	27897,52	Dinas Perikanan
2	4	1	2		Produksi perikanan	Ton	26.429,87	26563,42	26908,75	Dinas Perikanan
2	4	1	3		Konsumsi ikan	%	100,02	46,52	46,79	Dinas Perikanan
2	4	1	4		Cakupan bina kelompok nelayan	%	80	85	87	Dinas Perikanan
2	4	1	5		Produksi perikanan kelompok nelayan	%	14.640,82	13058	13341	Dinas Perikanan
2	4	2			Pariwisata					
2	4	2	1		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kecamatan (Permendagri 18 Tahun 2020)	Persen	122,22	3	3	Disparpora
2	4	2	2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	54,80	5	5	Disparpora
2	4	2	3		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,09	1,04	1,05	Disparpora
2	4	2	4		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,13	1,01	1,05	Disparpora
2	4	3			Pertanian					
2	4	3	1		Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	5,83	7,48	7,98	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
2	4	3	2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-84,50	0,3	0,27	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
2	4	3	3		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	57,20	54,65	55,06	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
2	4	3	4		Cakupan bina kelompok petani	%	11,24	12,2	12,3	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
2	4	4			Perdagangan					
2	4	4	1		Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	23,08	31,65	37,97	Diskumdag
2	4	4	2		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	26,13	59,81	60,61	Diskumdag
2	4	4	3		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	99,20	90,59	91,39	Diskumdag
2	4	4	4		Ekspor Bersih Perdagangan	RP	-	107.293.	115.876.588	Diskumdag

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
								137		
2	4	4	5		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	-	31,87	33,98	Diskumdag
2	4	5			Perindustrian					
2	4	5	1		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kota (Permendagri 18 Tahun 2020)	%	7,12	7,41	8,41	Diskumdag
2	4	5	1		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50	56	58	Diskumdag
2	4	5	1	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	Diskumdag
2	4	5	1		Cakupan bina kelompok pengrajin	%	15,00	15,34	15,97	Diskumdag
2	5				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
2	5	1			Sekretariat Daerah					
2	5	1	1		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	25,94	28,49	29,89	Setda
2	5	1	2		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Poin	38,33	21,8	22	Setda
2	5	2			Sekretariat Dewan					
2	5	2	1		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA/TDK	Ada	ADA	ADA	Set. DPRD
2	5	2	2		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA/TDK	Ada	ADA	ADA	Set. DPRD
2	5	2	3		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA/TDK	Ada	ADA	ADA	Set. DPRD
2	6				Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
2	6	1			Perencanaan Pembangunan					
2	6	1	1		Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ADA/TDK	Ada	ADA	ADA	Bappelitbangda
2	6	1	2		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ADA/TDK	Ada	ADA	ADA	Bappelitbangda
2	6	1	3		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ADA/TDK	Ada	ADA	ADA	Bappelitbangda
2	6	1	4		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA/TDK	Ada	ADA	ADA	Bappelitbangda
2	6	1	5		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	Bappelitbangda

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
2	6	1	6		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	Bappelitbangda
2	6	2			Keuangan					
2	6	2	1		Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	BPKAD
2	6	2	2		Persentase SILPA	%	13,18	5	5	BPKAD
2	6	2	3		Persentase belanja pendidikan (20%)	%	31,55	20	20	BPKAD
2	6	2	4		Persentase belanja kesehatan (10%)	%	18,13	10	10	BPKAD
2	6	2	5		Penetapan APBD	DD/MM/YY	30 Desember 2021	30-Nov-22	30-Nov-23	BPKAD
2	6	2	6		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-12,04	5,83	5,23	BPKAD
2	6	2	7		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	18,56	3,84	3,24	BPKAD
2	6	2	8		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	11,83 %	6,63	6,03	BPKAD
2	6	3			Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
2	6	3	1		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	299,10	6,01	7,21	BKPSDM
2	6	3	2		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,31	26,07	29,07	BKPSDM
2	6	3	3		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11,08	41	42	BKPSDM
2	6	3	4		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JPL	26,77	20	20	BKPSDM
2	6	3	5		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	25,10	20	25	BKPSDM
2	6	3	6		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	29,02	72	76	BKPSDM
2	6	3	7		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	32	29	29	BKPSDM
2	6	3	8		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	980	200	200	BKPSDM
2	6	3	9		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.733	3.345	3.345	BKPSDM
2	6	4			Penelitian dan Pengembangan					
2	6	4	1		Persentase implementasi rencana kelitbang.	%	100	100	100	Bappelitbangda
2	6	4	2		Persentase pemanfaatan hasil kelitbang.	%	100	100	100	Bappelitbangda
2	6	4	3		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SIDA)	%	100	100	100	Bappelitbangda
2	6	4	4		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	72,00	100	100	Bappelitbangda
2	6	5			Pengawasan					
2	6	5	1		Persentase tindak lanjut temuan	%	50,94	100	100	Inspektorat Daerah, Setda

No					Bidang Urusan / Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Asumsi capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah
2	6	5	2		Persentase pelanggaran pegawai	%	0,10	0	0	BKPSDM
2	6	5	3		Jumlah temuan BPK		9	9	8	Inspektorat Daerah
2	6	5	4		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2	3	3	Inspektorat Daerah
2	6	5	5		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Poin	2	3	3	Inspektorat Daerah

6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4
Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Target Nasional	Capaian 2022	Rencana Capaian 2023	Target 2024
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Anak usia dini	100%	74,14%	91,55%	93,05%
2	Pendidikan Dasar (SD)	100%	97,22%	94,49%	95,37%
	Pendidikan Dasar (SMP)	100%		91,57%	94,50%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	80,71%	87,14%
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil	100%	97%	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin	100%	93%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir	100%	95%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Bagi Balita	100%	83%	63,1%	63,8%
5	Pelayanan Kesehatan Bagi usia pendidikan dasar	100%	89%	66,1%	66,8%
6	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif	100%	69%	59,1%	59,8%
7	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut	100%	48%	81,1%	81,8%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	65%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Bagi Diabetes Militus	100%	94%	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Bagi Orangdengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	88%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Bagi tuberkolosis	100%	102%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Bagi penderita HIV	100%	91%	74,7%	75,6%
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	95,61%	100	98,31%	98,87%
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	88,74%	100	95,49%	95,24%
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100	100%	100%
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	0	100%	100%
SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN					
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%

2	pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%
SPM SOSIAL					
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100%	100%
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%

6.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota.

Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Barru berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021 - 2026 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 6.5
Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG) Kab. Barru Tahun 2024

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	8,40	8,32
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jiwa		37279
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	96,75	100
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	100	100
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Poin	99,39	99,38
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Desa/ Kel	NA	10
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jiwa		308
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa		0
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	7.755.290.000	198.726.320,00
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	dok	Ada	ADA
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.	Persen	14,00	7,16

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2024

	Berkelanjutan	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen	NA	32,81
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Persen	93,2	94,03
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Poin	1	0,52
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Poin	15,00	3,58
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Poin		0,05
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Poin	10,20	20,27
		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Persen		0,47%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	NA	98,65
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	NA	93,56
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Poin	103,23	114,00
		4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik. $((1/2) \times 100\%)$	Persen		87,96
		4.c.1*	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik. $((1/2) \times 100\%)$	Persen		97,19
		4.c.1*	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik. $((1/2) \times 100\%)$	Persen		99,39
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen		12,12
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	17,41	11,87
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen		85,00
		5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung	Dok	36	7

			pemberdayaan perempuan.			
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	95,75	100,00
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	95,75	100,00
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Persen		2730
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Persen		88,34
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Rp	47,50	54.092.000
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Persen		59,76%
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persen		51,00%
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Persen		52,19%
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen		5,14
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jiwa		732
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Jiwa		31,50%
		8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	persen	1,09	6,72
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antar-negara	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dok		Belum ada
		10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	jiwa		37279
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.			Belum Ada
		11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jiwa	0,061	0,01
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp		198.726.320,00
		11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan	Persen	85,05	99,98

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2024

			yang tertangani.			
		11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dok	Ada	Ada
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	jiwa		0,01
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dok	3	2
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%		0,01
		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Persen	CC	B
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Persen	46,66	97,16
		16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Org		3
		16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dok		Belum Ada
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Rp		1.081.66 2.957.43 0,00

BAB VII

P E N U T U P

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 2024 merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barru pada Tahun 2024. Penyusunan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024, diarahkan untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan secara terarah, efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dengan tetap bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat;
- b. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
- c. Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan berbasis pada *SIPD*;
- d. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber- sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dengan berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024;
- e. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan

- pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 bila diperlukan;
 - h. RKPD Kabupaten barru Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024;
 - i. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

7.2. Kesimpulan

- 1. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024 dalam penyusunannya telah menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu Pendekatan Teknokratis, Pendekatan partisipatif dan Bottom-up, Pendekatan Top-Down, dan Pendekatan Politis sehingga diharapkan akan dihasilkan dokumen perencanaan yang memenuhi asas akuntabilitas dan kemanfaatan;
- 2. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD melalui pokok-pokok pikiran dan pemangku pembangunan lainnya;
- 3. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2024;

4. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN, Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan melalui APBD Prov.Sulsel maupun sumber dana lainnya;
5. Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing

